METADATA
NTB SATU DATA

Pedoman Pengumpulan Data Sektoral NTB Satu Data

2025

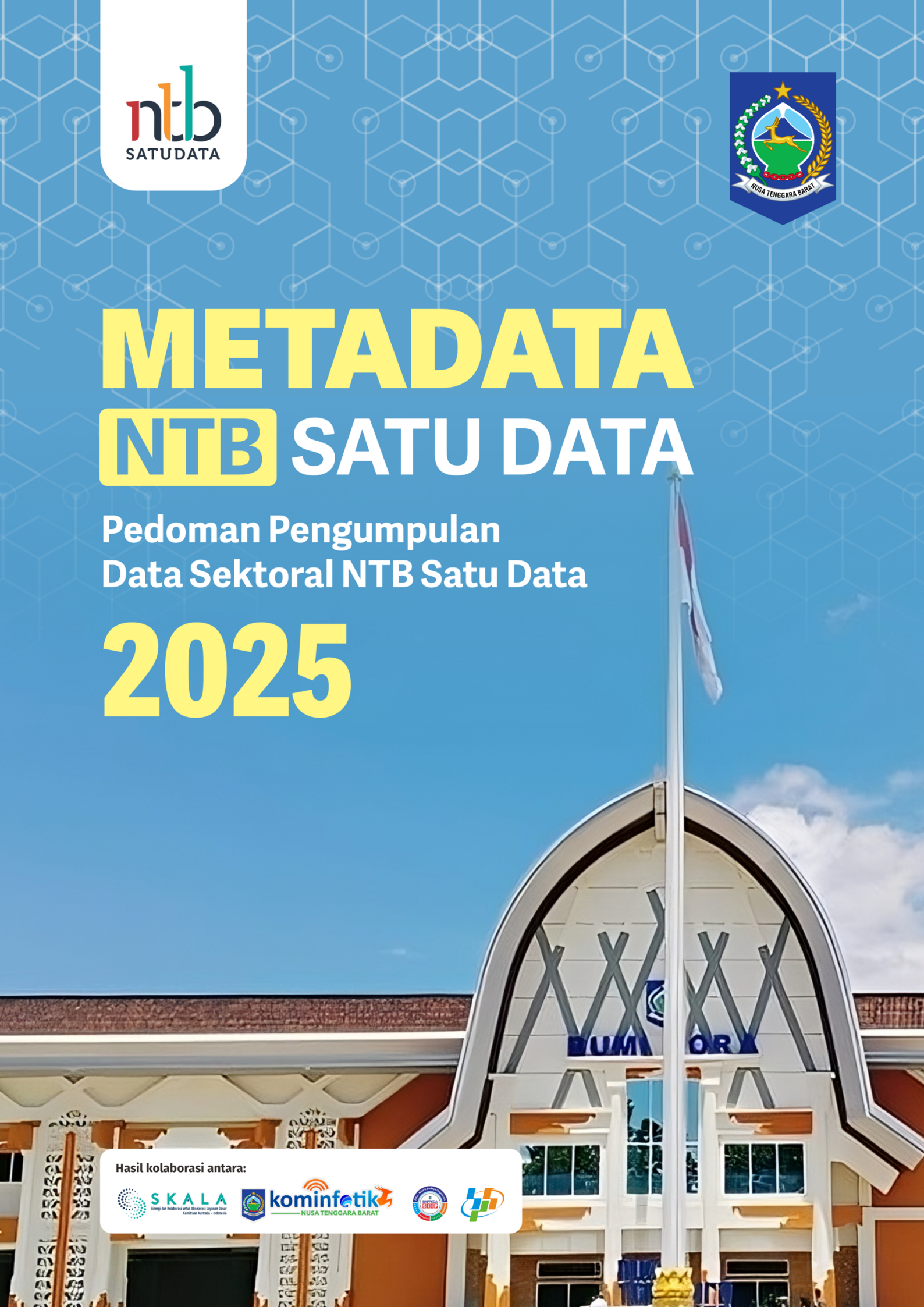

Hasil kolaborasi antara:

METADATA

NTB SATU DATA

Pedoman Pengumpulan Data Sektoral NTB Satu Data
2025

Sambutan

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Lalu Muhamad Iqbal

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berhasil menyusun dan menerbitkan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025. Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Pemerintah Provinsi NTB berupaya membangun sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, memuat visi NTB Emas 2045, yaitu NTB Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan, dan Sejahtera. Tata kelola data yang berkualitas menjadi kunci melaksanakan amanat RPJPN dan RPJPD di Provinsi NTB.

Penyusunan buku ini merupakan langkah yang sangat penting untuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kunci utamanya adalah pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Metadata yang disusun ini menjadi landasan teknis dalam pengelolaan data, memperkuat akuntabilitas, transparansi, integrasi, sinergitas, perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah berbasis bukti di Provinsi NTB. Tata kelola data yang berkualitas akan mendukung implementasi konsep transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola dalam pembangunan daerah.

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen dan berkontribusi memberikan saran, masukan, dan aspirasinya dalam penyusunan buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini, terutama kepada seluruh Tim Penyusun, Pembina Data, Walidata, dan seluruh Produsen Data-

Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan Program SKALA Kemitraan Australia-Indonesia di Provinsi NTB.

Saya berharap buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dan fondasi yang kuat bagi seluruh pihak dalam membangun tata kelola data yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi pembangunan daerah di Provinsi NTB yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan inspirasi, motivasi, energi baru, dan kekuatan kepada kita semua untuk mewujudkan NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Mataram, September 2025
Gubernur Nusa Tenggara Barat,

Lalu Muhamad Iqbal

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat karunia-Nya, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil menyusun buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025. Penyusunan buku merupakan upaya strategis untuk memperkuat ekosistem data pembangunan daerah di Provinsi NTB. Hal ini mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 31, yaitu perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem tata kelola data dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan daerah. Metadata menjadi salah satu instrumen penting yang menjelaskan deskripsi terstandar atas data yang dihasilkan produsen data. Metadata ini menjelaskan definisi, metodologi, frekuensi, dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagai produsen data. Hal ini membuka peluang untuk keterbukaan, keandalan, dan pemanfaatan data secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bapak Lalu Muhamad Iqbal dan Ibu Indah Dhamayanti Putri, Pemerintah Provinsi NTB berupaya menerapkan cara-cara baru pada tata kelola keuangan daerah, tata kelola perencanaan dan pembangunan, dan tata kelola sumber daya manusia. Cara baru ini mencakup kerja berbasis data, bekerja dalam tim, pola pikir sistem, sinergitas lintas sektor, inovatif, kreatif, integritas. Metadata menjadi penting untuk tata kelola data yang berkualitas, untuk membangun sinergitas dan integrasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan berbasis data.

Terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB sebagai produsen data dan Tim Penyusun buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025, Forum NTB Satu Data, dan dukungan Program SKALA Kemitraan Australia-Indonesia di Provinsi NTB. Kami berharap buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini menjadi landasan kuat untuk transformasi tata kelola data untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi NTB.

Semoga buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat luas dan menjadi referensi penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Visi NTB Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Mataram, September 2025

Kepala Bappeda Provinsi NTB,	Kepala BPS Provinsi NTB,	Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB,
Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	**Dr. Drs. Wahyudin, M.M**	**H. Yusron Hadi, ST., M.UM**

METADATA

NTB SATU DATA

Pedoman Pengumpulan Data Sektoral NTB Satu Data 2025

© 2025 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si (Kepala Bappeda Provinsi NTB)
Dr. Drs. Wahyudin, M.M (Kepala BPS Provinsi NTB)
H. Yusron Hadi, ST., M.MUM (Kepala Dinas Kominfotik)

Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Hj. Suryani Eka Wijaya, ST., MBA., PhD
Irsan Hadiyan, S.E.,M.Ak
Sugeng P. Putra, S.STP. M.Si
Didik Setiawan, S.T
Muji Burrahman, S.Si
Prasetyo Rangga Waskita, S.Hut
Novita Melyantika Utami, S.E

Tim Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Fitriyati Utami, SP
Iqbal Julianto S. Stat
Eka Fitria Damayanti S.Si
Martisah S. Stat

Tim Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Wini Widiastuti, S.ST.,M.Sc
Ratih Sosilawati, S.ST

Tim SKALA Kemitraan Australia-Indonesia Provinsi NTB

Lalu Anja Kusuma
Muhammad Ridha Makruf

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
TIM PENYUSUN v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL xl
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Tujuan 4
1.3. Ruang Lingkup 4
1.4. Metodologi 5
1.5. Sistematika 6
BAB II METADATA NTB SATU DATA 8
1.6. Metadata Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 8
1) Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah 8
1.7. Metadata Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah 10
1) Jumlah Pegawai yang terlayani Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Layanan 10
2) Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Dokumen 11
3) Daftar Pelayanan Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12
1.8. Metadata Biro Hukum Sekretariat Daerah 14
1) Daftar Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 14
2) Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 15
3) Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Penanganan 16
4) Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Jenis 17
5) Daftar Re-regulasi atau De-regulasi Perundang-undangan berdasarkan Hasil Reviu 18
6) Daftar ASN sebagai Perancang Peraturan Undang-undang berdasarkan Instansi dan Jabatan 19
2.4. Metadata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 22
1) Daftar Peserta MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 22
2) Daftar Juara MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 23
3) Daftar Peserta MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 25

4) Daftar Juara MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 26
5) Daftar Peserta STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 28
6) Daftar Juara STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 29
7) Daftar Peserta STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 31
8) Daftar Juara STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota 32
2.5. Metadata Biro Organisasi Sekretariat Daerah 34
1) Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 34
2) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 35
3) Nilai Komponen Pembentuk Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 37
4) Nilai Komponen Pembentuk Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 38
5) Daftar Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB/Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTB 39
6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui SIMASKOT berdasarkan Perangkat Daerah dan Jenis Layanan Publik 40
7) Nilai Evaluasi Unit Pelayanan Publik (UPP) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 41
8) Daftar Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan peta proses bisnis 43
9) Daftar Perangkat Daerah berdasarkan Jenis Layanan dengan variabel Kriteria Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 44
2.6. Metadata Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah 47
1) Daftar Nama Pulau berdasarkan Status Huni 47
2) Daftar Kerja Sama Pemprov NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lain, Swasta dan Luar Negeri berdasarkan Status Naskah Kerja Sama 48
3) Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota . 50
2.7. Metadata Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 52
1) Rekap pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ berdasarkan Jenis Pengadaan 52
2) Daftar Pengadaan Langsung yang Tercatat Pada Aplikasi SPSE 53
3) Daftar Transaksi *E-purchasing* berdasarkan Perangkat Daerah 55
4) Rencana Umum Pengadaan (RUP) SiRUP berdasarkan Perangkat Daerah .. 56
5) Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota 57
6) Komponen Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota 58
7) *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 59

8) Komponen (Indikator) Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota....60
9) Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota....61
10) Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/ Kota....63
2.8. Metadata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah....65
1) Nilai Aset, Laba Bersih, Nilai *Capital Expenditure*, dan Nilai Operasional berdasarkan BUMD....65
2) Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum, BPR dan BPRS....66
3) Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah....67
4) Jumlah Kantor Cabang PT BPR NTB Syariah berdasarkan Kabupaten/Kota ..68
5) Jumlah nasabah yang dijamin oleh PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan Jenis Kegiatan....69
6) Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) berdasarkan Kabupaten/Kota....70
7) Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Permigas (JBKP) berdasarkan Kabupaten/Kota....71
8) Kuota LPG 3 kg berdasarkan Kabupaten/Kota....72
2.9. Metadata Biro Umum Sekretariat Daerah....74
1) Jumlah Aset yang dikelola berdasarkan Jenis Aset....74
2) Jumlah Surat Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Surat (Masuk dan Keluar)....75
3) Jumlah Arsip Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Arsip....77
2.10. Metadata Badan Kepegawaian Daerah....78
1) Jumlah PNS berdasarkan OPD....78
2) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Agama....79
3) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Golongan....80
4) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jabatan (Fungsional)....81
5) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin....83
6) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan....84
7) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Usia....85
8) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Bulan Pensiun....86
9) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Eselon....88
10) Jumlah PPPK berdasarkan OPD....89
11) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Agama....89
12) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Golongan....90
13) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jabatan (fungsional)....92
14) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin....93
15) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan....94
16) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Usia....96
2.11. Metadata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri....98
1) Jumlah Kasus Konflik Sosial Berdasarkan Daerah Konflik Kabupaten/Kota....98

2) Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Latar Belakang Konflik dan Kabupaten/Kota 99
3) Jumlah Masyarakat Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan berdasarkan Status Disabilitas dan Jenis Kelamin 100
4) Jumlah TPS Pilpres dan Pileg berdasarkan Desa/Kelurahan 102
5) Jumlah DPT Pilpres dan Pileg berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan 103
6) Jumlah Surat Suara Pilpres dan Pileg berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan 105
7) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg berdasarkan Kabupaten/Kota 106
8) Jumlah TPS Pilgub berdasarkan Desa/Kelurahan 107
9) Jumlah DPT Pilgub berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan 108
10) Jumlah Surat Suara Pilgub berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan 110
11) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub berdasarkan Kabupaten/Kota 111
12) Jumlah Organisasi Masyarakat berdasarkan Bidang Kegiatan dan Status Badan Hukum (SKT dan Badan Hukum) 112
13) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan Provinsi se-Nasional 114
14) Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB 115

2.12. Metadata Badan Penanggulangan Bencana Daerah 117

1) Daftar Desa berdasarkan Status (Desa Tangguh Bencana, Belum Desa Tangguh Bencana) 117
2) Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 118
3) Komponen Pembentuk (7 Prioritas) Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota 120
4) Indeks Risiko Bencana berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 122
5) Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) berdasarkan Kabupaten/Kota 123
6) Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan berdasarkan Jenis dan Kondisi 124
7) Jumlah Logistik berdasarkan Sumber (APBD, BPBD dll.) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 125
8) Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota 127
9) Jumlah Korban Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota 128
10) Jumlah Kerusakan akibat Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota 130
11) Dokumen Jitupasna dan R3P berdasarkan Kejadian Bencana 132
12) Jumlah KK yang terdampak Kekeringan berdasarkan Kabupaten/Kota 133
13) Jumlah Pos Pemadam Kebakaran berdasarkan Kabupaten/Kota 134
14) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) berdasarkan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran dan Kabupaten/Kota 135
15) Jumlah Kasus Kebakaran Pemukiman berdasarkan Kabupaten/Kota 136

16) Daftar Desa Peserta Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana 137
2.13. Metadata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 139
1) Jumlah Belanja Daerah berdasarkan Komponen 139
2) Jumlah Belanja Operasi berdasarkan Komponen 140
3) Jumlah Belanja Modal berdasarkan Komponen 141
4) Jumlah Transfer Daerah berdasarkan Komponen 142
5) Jumlah Pembiayaan Daerah berdasarkan Komponen 143
6) Jumlah APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Ditetapkan.....144
7) Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) 145
8) Daftar Tanah Milik Daerah yang Disertifikatkan 146
2.14. Metadata Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 148
1) Jumlah Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen 148
2) Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Komponen 149
3) Jumlah Pendapatan Transfer berdasarkan Komponen 150
4) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) berdasarkan Komponen 152
5) Jumlah Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Komponen.....153
6) Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Komponen 155
7) Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDyP) berdasarkan Komponen 156
8) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan Komponen 157
9) Persentase Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah 159
10) Persentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 160
11) Persentase Komponen Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Transfer 161
12) Persentase Komponen LLPD terhadap LLPD 162
13) Persentase Komponen Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah 163
14) Persentase Komponen Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Retribusi Daerah 164
15) Persentase Komponen Pendapatan HPKDyP terhadap Pendapatan HPKDyP 165
16) Persentase Komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap Lain-lain PAD yang Sah 166
17) Pertumbuhan Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen.....168
18) Jumlah Kendaraan yang Melakukan Daftar Ulang PKB Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Kabupaten Kota.....169
19) Jumlah Objek Kendaraan Bermotor yang melakukan Daftar Ulang berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota.....170
20) Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah BBN berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota 171

21) Jumlah Pendapatan PKB berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota 172
22) Jumlah Objek Pajak Baru berdasarkan Kabupaten/Kota (Jumlah Objek Pajak yang Aktif Melakukan Daftar Ulang)..... 173
23) Nilai Retribusi Daerah berdasarkan Perangkat Daerah 174
2.15. Metadata Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 176
1) Jumlah dan Persentase ASN yang Bersertifikat Kompetensi berdasarkan Jenis Kompetensi (Teknis, Manajerial, dan Fungsional) 176
2) Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis..... 177
3) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial berdasarkan Pemda dan Kategori Manajerial (PKP, PKA, PKN2) 179
4) Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan Pemerintah Daerah.. 180
5) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional..... 182
6) Jumlah Peserta Kegiatan Uji Sertifikasi JFT 183
2.16. Metadata Badan Penghubung 185
1) Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Jenis Kelamin 185
2) Jumlah Tamu yang Menginap di Wisma NTB, Jakarta 186
3) Jumlah Sarana pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Kelompok dan Jenisnya 187
4) Daftar Event yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta 188
2.17. Metadata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... 190
1) Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB 190
2) Daftar Laporan Tahunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 191
3) Daftar *Roadmap*/Rencana Aksi Daerah Se-Provinsi NTB 192
4) Daftar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)..... 193
5) Daftar Dokumen Evaluasi Daerah (Evaluasi RPJPD, Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD, Evaluasi Dekon TP, Evaluasi DAK) 194
6) IHK dan Inflasi Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Gabungan..... 195
7) Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 197
8) Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 198
9) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha..... 199
10) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha..... 200
11) Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 201
12) Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan PDRB dari Sisi Pengeluaran 202
13) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota..... 203
14) Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota.... 204

15) Garis kemiskinan berdasarkan Klasifikasi Daerah (Perkotaan dan Pedesaan) 205
16) Nilai Capaian SPM berdasarkan Urusan Layanan Dasar 206
17) TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota 207
18) IPM Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 208
19) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....209
20) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 210
2.18. Metadata Badan Riset Dan Inovasi Daerah 212
1) Daftar Kajian yang di Fasilitasi BRIDA berdasarkan Jenis Kajian 212
2) Daftar Izin Penelitian berdasarkan Universitas 213
3) Jumlah *Prototype* Karya IKM mitra BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 214
4) Daftar *Tenant* IKM binaan BRIDA NTB berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten/Kota 215
5) Jumlah Kunjungan Eduwisata BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota ...216
6) Jumlah Penerima Sertifikasi Profesi oleh BRIDA NTB berdasarkan Jenis Sertifikasi dan Kabupaten/Kota.....217
7) Standarisasi Mesin yang Di Fasilitasi BRIDA 218
8) Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Dalam Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota 219
9) Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Luar Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota & Negara Tujuan 221
10) Jumlah Peserta Pelatihan Rumah Bahasa berdasarkan Jenis Pelatihan dan Kabupaten/Kota.....222
11) Indeks Inovasi Daerah (Program *Innovative Goverment Award*) 223
12) Indeks Daya Saing Daerah 224
2.19. Metadata Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 226
1) Konsumsi Listrik per Kapita.....226
2) Persentase Rasio Elektrifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota.....227
3) Jumlah Perizinan Bidang Ketenagalistrikan berdasarkan Kabupaten/Kota .228
4) Jumlah *Captive Power* (Pembangkit Listrik) berdasarkan Sistem 229
5) Jumlah Pembangunan PLTS SHS berdasarkan Kabupaten/Kota 231
6) Jumlah Pembangunan PLTS Komunal berdasarkan Kabupaten/Kota 232
7) Persentase Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Pembangkit Listrik ..233
8) Persentase Izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practices*) 235
9) Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Non-Logam berdasarkan Kabupaten/Kota 236
10) Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Batuan berdasarkan Kabupaten/Kota 238
11) Jumlah Ekspor Konsentrat PT. Newmont Nusa Tenggara/PT. AMNT 240
12) Jumlah Lokasi Bahan Galian Batuan berdasarkan Jenis Bahan Galian dan Kabupaten Kota 241

13) Jumlah Biogas Rumah berdasarkan Kabupaten/Kota 242
14) Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan..... 243
2.20. Metadata Dinas Kelautan dan Perikanan 245
1) Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota 245
2) Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota 246
3) Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota 247
4) Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 248
5) Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 250
6) Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut berdasarkan Jenis Kapal dan Kabupaten/Kota 251
7) Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut berdasarkan Jenis Alat Tangkap dan Kabupaten/Kota 253
8) Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota 254
9) Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota 255
10) Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perahu/Kapal dan Kabupaten/Kota 256
11) Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Alat dan Kabupaten/Kota..... 257
12) Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota..... 258
13) Jumlah Pembudidaya Ikan berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 260
14) Luas Area Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 261
15) Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 262
16) Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 263
17) Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 265
18) Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 266
19) Nilai Tukar Petani Perikanan 267
20) Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap..... 268
21) Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya 269
22) Angka Konsumsi Ikan berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 270
23) Produksi Olahan Hasil Perikanan berdasarkan Jenis Olahan dan Kabupaten/Kota 271
24) Jumlah Petambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota 272

25) Luas Lahan Tambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota 273
26) Produksi Garam berdasarkan Kabupaten/Kota 274
27) Luas Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Penetapan Pemerintah Pusat.....275
28) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas berdasarkan Kabupaten/Kota....276
29) Persentase Luas Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terkelola secara Berkelanjutan 277
30) Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya yang mendapatkan bantuan Pemerintah Provinsi 278
31) Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It) 279
32) Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib).....280
33) Jumlah Produksi Ikan Berdasarkan Kabupaten/Kota 281
34) Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi 283
35) Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dilatih 284
36) Jumlah Pelaku Usaha yang terdata pada aplikasi KUSUKA 285
2.21. Metadata Dinas Kesehatan 286
1) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH).....286
2) Jumlah Kasus Kematian Ibu 287
3) Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat 288
4) Jumlah dan Persentase Persalinan di Fasyankes di Nusa Tenggara Barat ..290
5) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan dan Mengonsumsi Tablet Tambah Darah di Nusa Tenggara Barat.....291
6) Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri 292
7) Jumlah dan Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan K1, K4. K6 di Nusa Tenggara Barat 294
8) Jumlah dan Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan KF dan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat 296
9) Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (*Age Spesific Fertility* Rate/ASFR) 300
10) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR).....301
11) Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan 302
12) Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhir Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 303
13) Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun dengan Anemia 305
14) Jumlah Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun dengan Kurang Energi Kronis (KEK) 306
15) Jumlah kehamilan 4T (Terlalu Banyak, Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Tua) 307
16) Jumlah Kasus Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita 308
17) Jumlah Kematian Bayi (Neonatal dan Postneonatal) berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat.....310

18) Jumlah Kematian Anak Balita berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat 312
19) Jumlah dan Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Nusa Tenggara Barat 313
20) Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif di Nusa Tenggara Barat 314
21) Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Nusa Tenggara Barat 316
22) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 317
23) Jumlah dan Cakupan Bayi dan Anak Balita yang Mendapatkan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat 318
24) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 320
25) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib3 berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 321
26) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Polio4* berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 323
27) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Campak Rubela berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 324
28) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita berdasarkan Jenis Pelayanan di Nusa Tenggara Barat 325
29) Jumlah dan Persentase Balita Ditimbang di Nusa Tenggara Barat 327
30) Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk di Nusa Tenggara Barat 329
31) Jumlah dan Persentase Balita berdasarkan Status Gizi Kurang, Pendek dan Kurus di Nusa Tenggara Barat 330
32) Jumlah dan Persentase Balita *Stunting* di Nusa Tenggara Barat 332
33) Jumlah dan Persentase Anak Usia 18-24 Bulan yang Mendapat DPT-HB-Hib Dosis ke-4 333
34) Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima 2 Dosis Vaksin Campak (Cakupan Imunisasi Campak-2) 334
35) Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima Vaksinasi PCV Dosis Ketiga 336
36) Jumlah dan Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Nusa Tenggara Barat 337
37) Persentase Remaja Putri (15-19 tahun) dengan Anemia 338
38) Jumlah Posyandu dan Posyandu Aktif di Nusa Tenggara Barat 339
39) Jumlah Kader Posyandu 341
40) Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif 342
41) Jumlah Posbindu PTM di Nusa Tenggara Barat 343
42) Jumlah dan Persentase Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif berdasarkan Kontrasepsi di Nusa Tenggara Barat 344
43) Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/*Discontinuation of Contraseptive Rate* (DCR) 12 bulan 346
44) Unmet Need KB 347

45) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik berdasarkan Kelas di Nusa Tenggara Barat....348
46) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di Nusa Tenggara Barat....350
47) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Sekolah di Nusa Tenggara Barat....351
48) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat....353
49) *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan....354
50) Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir....355
51) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun....356
52) Jumlah dan Cakupan Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat....357
53) Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Nusa Tenggara Barat....359
54) Jumlah Kasus Tuberkulosis berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat....361
55) Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat....362
56) Angka Pengobatan Lengkap (*Complete Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat....363
57) Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat....364
58) Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage* TBC)....366
59) Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak di Nusa Tenggara Barat....367
60) Persentase Obat Tuberkulosis di FKTP dan FKTL....368
61) Jumlah Kasus Baru Kusta (Kering dan Basah) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat....368
62) Jumlah Kasus Kusta (Kering dan Basah) Terdaftar berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat....370
63) Jumlah Penderita Kusta (Kering dan Basah) Selesai Berobat di Nusa Tenggara Barat....372
64) Angka Kesembuhan atau RFT Rate Kusta (Kering dan Basah)....375
65) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta....376
66) Persentase Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat....377
67) Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai API <1/1.000 Penduduk....378
68) Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi....379
69) Persentase Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka Mikrofilaria <1%....380
70) Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat ..381
71) Jumlah Kasus HIV berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 382
72) Jumlah ODHIV Baru dan Mendapatkan Perawatan di Nusa Tenggara Barat 383
73) Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria....384

74) Jumlah Kasus, Pengobatan dan Kematian Malaria di Nusa Tenggara Barat 385
75) Jumlah Kasus dan Kematian Malaria berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 386
76) Persentase Kasus Malaria Mendapat Pengobatan Standar di Nusa Tenggara Barat 387
77) Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Malaria di Nusa Tenggara Barat 389
78) Jumlah Kasus *Accute Flacid Paralysis* (AFP) Non Polio di Nusa Tenggara Barat 390
79) Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Nusa Tenggara Barat 391
80) Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 392
81) Jumlah Kasus Diare Semua Umur yang Dilayani dan Mendapat Oralit di Nusa Tenggara Barat 394
82) Jumlah Kasus Diare Balita yang Dilayani Mendapat Oralit dan Zinc di Nusa Tenggara Barat 395
83) Jumlah Kasus, Kematian dan Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nusa Tenggara Barat 397
84) Jumlah dan Cakupan Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 399
85) Jumlah dan Cakupan Penderita Diabetes Melitus Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat 400
86) Jumlah dan Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 401
87) Jumlah Penderita ODGJ Berat (Skizofrenia dan Psikotik Akut) berdasarkan Kelompok Usia di Nusa Tenggara Barat 403
88) Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode IVA di Nusa Tenggara Barat 405
89) Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Metode Sadanis di Nusa Tenggara Barat 407
90) Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami KLB dan Ditangani Kurang dari 24 Jam di Nusa Tenggara Barat 409
91) Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis 410
92) Jumlah yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi 411
93) Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat 412
94) Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Nusa Tenggara Barat 413
95) Jumlah Tenaga Kefarmasian berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat ... 414
96) Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Nusa Tenggara Barat 415
97) Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik dan Keteknisan Medik di Nusa Tenggara Barat 416
98) Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 417
99) Persentase Puskesmas Tanpa Dokter 418

100) Jumlah dan Persentase Puskesmas yang Terpenuhi 9 Jenis Tenaga Kesehatan 420
101) Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 Penduduk 421
102) Jumlah Fasilitas Kesehatan....422
103) Jumlah dan Persentase Puskesmas berdasarkan Akreditasi 423
104) Jumlah dan Persentase Rumah Sakit berdasarkan Akreditasi....425
105) Jumlah Sarana Kesehatan Puskesmas berdasarkan Kemampuan Pelayanan di Nusa Tenggara Barat 426
106) Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat 427
107) Daftar Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis dan Kelas di Nusa Tenggara Barat....428
108) Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 430
109) Jumlah Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 432
110) Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat....433
111) Jumlah Fasilitas Kesehatan di Daerah Sulit 434
112) Persentase Obat Memenuhi Syarat....435
113) Persentase Makanan Memenuhi Syarat 437
114) Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial 438
115) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Jenis Bantuan di Nusa Tenggara Barat....439
116) Jumlah dan Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Nusa Tenggara Barat 440
117) Jumlah dan Persentase Tempat Fasilitas Umum yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat 442
118) Jumlah dan Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Nusa Tenggara Barat 444
119) Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 445
120) Persentase Kabupaten/Kota Sehat 447
121) Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat....448
122) Persentase KK dengan Akses Terhadap Sanitasi (Fasilitas tempat Buang Air Besar)....449
123) Warga Negara terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 453
124) Warga Negara terdampak Kejadian Luar Biasa Provinsi....454
125) Data Daerah dan Rekapitulasi Jumlah Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Provinsi 455
2.22. Metadata Dinas Ketahanan Pangan....457
1) Rasio Ketersediaan Pangan (Ketersediaan, Kebutuhan) berdasarkan Jenis Komoditas 457

2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi 458
3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi 460
4) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Komsumsi berdasarkan Kabupaten/Kota 463
5) Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 465
6) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalensi of Undernourishment (PoU) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 466
7) Indeks Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan 468
8) Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan 475
9) Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota 478
10) Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 481
11) Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis 482
12) Jumlah Bantuan Pangan yang tersalurkan berdasarkan Jenis Bantuan dan Kabupaten/Kota 484
2.23. Metadata Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 485
1) Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan Provinsi Se-Indonesia 485
2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota 486
3) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota 488
4) Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 490
5) Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota 491
6) Komponen Pembentuk Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi NTB 493
7) Komponen Pembentuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota 494
8) Komponen Pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota 495
9) Komponen Pembentuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 497
10) Komponen Pembentuk Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota 498
11) Jumlah Lembaga dan Pers berdasarkan Jenis Media di Provinsi NTB 500
12) Jumlah Sengketa Informasi Publik 501
13) Daftar Area *Blankspot* berdasarkan Kabupaten/Kota 502
14) Daftar Area Lemah Sinyal berdasarkan Kabupaten/Kota 503
15) Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) berdasarkan Kabupaten/Kota 504
16) Jumlah Aplikasi TIK yang dimanfaatkan berdasarkan Jenis 505
17) Jumlah Pejabat yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berdasarkan Perangkat Daerah 506
18) Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang Digital 507
19) Komponen Pembentuk (Aspek) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota 508
2.24. Metadata Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 510

1) Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 510
2) Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 511
3) Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 512
4) Jumlah Pengawas Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 513
5) Jumlah Pengurus Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 514
6) Jumlah Koperasi berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota 515
7) Jumlah Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota 516
8) Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat berdasarkan Kabupaten/Kota 517
9) Jumlah Koperasi Sehat berdasarkan Kabupaten/Kota 518
10) Jumlah Koperasi Sektor Riil berdasarkan Kabupaten/Kota.....519
11) Jumlah Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota 520
12) Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota 521
13) Jumlah Aset Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 522
14) Jumlah Modal Luar Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 523
15) Jumlah Modal Sendiri Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 524
16) Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 525
17) Jumlah Volume Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 526
18) Jumlah UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota 527
19) Persentase Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota 528
20) Persentase Koperasi Sehat Binaan Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 528
21) Persentase Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota.....530
22) Persentase Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota 531
23) Persentase UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota 532
24) Daftar *Start Up* (Perusahaan Rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan 533
25) Daftar Koperasi Modern 534
26) Jumlah UMKM berdasarkan Sektor Usaha dan Kabupaten/Kota 535
27) Jumlah Koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan berdasarkan Kabupaten/Kota 536

2.25. Metadata Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....538
1) Jumlah Sampah yang terkelola di TPA Kebon Kongo 538
2) Daftar Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Laut, Air, Udara).539
3) Daftar Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup 540
4) Daftar Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) berdasarkan Status (Efektif dan Tidak Efektif).....541

5) Luas Areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan Jumlah Bibit dan Kabupaten/Kota 542
6) Daftar Desa Sekitar Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 543
7) Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan Desa/Kelurahan..... 544
8) Daftar kelompok Tani Hutan (KTH) yang Sudah Memiliki Usaha berdasarkan Desa/Kelurahan 545
9) Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kelompok Hutan 547
10) Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kabupaten/Kota 548
11) Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan BKPH..... 549
12) Luas Tutupan Lahan berdasarkan Kategori..... 550
13) Luas Perhutanan Sosial berdasarkan Skema (HKM, HTR, KK, HD), BKPH dan Kabupaten/Kota..... 552
14) Luas Lahan Kritis berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan dan Kabupaten/Kota 553
15) Daftar Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup berdasarkan Kabupaten/Kota 554
16) Jumlah Kasus Tindak Pidana Kehutanan 555
17) Daftar Perusahaan yang mengikuti Program PROPER berdasarkan Peringkat dan Kabupaten/Kota..... 556
18) Jumlah Produksi HHK berdasarkan Jenis Kayu 558
19) Jumlah Produksi HHBK berdasarkan Jenis Hasil Hutan dan BKPH 559
20) Daftar Perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Progres Perizinan..... 560
21) Daftar Pemegang Izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan Kabupaten/Kota..... 561
22) Luas Kebakaran Hutan berdasarkan BKPH/Tahura..... 562
23) Luas Perambahan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura 563
24) Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dikaji dan dinilai berdasarkan Jenis Dokumen, Sektor dan Kabupaten/Kota 564
25) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berdasarkan Fungsi Hutan dan Kabupaten/Kota..... 566
26) Intensitas Patroli dan Luas Pengamanan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura 567
27) Daftar Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) 568
28) Daftar Sebaran Mata Air 569
29) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indikator Penyusunnya 570
30) Proyeksi/Potensi Jumlah Timbulan Sampah berdasarkan Kabupaten/Kota 571
31) Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Komponennya 572
32) Daftar Lokasi Bank Sampah berdasarkan Desa/Kelurahan..... 573
33) Daftar Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim berdasarkan Kategori..... 574
34) Daftar Sekolah Adiwiyata berdasarkan Status dan Kabupaten/Kota 575
2.26. Metadata Dinas Pariwisata..... 577
1) Daftar Destinasi Pariwisata..... 577

2) Daftar Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terdaftar dan Telah memiliki Sertifikasi HaKI berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota.....578
3) Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan.....579
4) Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Unggulan (Islamic Center) berdasarkan Jenis Wisatawan 581
5) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel ..582
6) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel.....583
7) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) berdasarkan Kabupaten Kota 585
8) Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel ..586
9) Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel.....587
10) Rata-rata Lama Menginap (RLM) berdasarkan Kabupaten Kota 589
11) Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel.....590
12) Jumlah Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel 591
13) Jumlah Tamu Menginap berdasarkan Kabupaten Kota 593
14) Jumlah Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota 594
15) Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Kamar, dan Tenaga Kerja Hotel berdasarkan Kabupaten Kota.....595
16) Daftar Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).....597
2.27. Metadata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 599
1) Panjang Ruas Jalan Provinsi yang Sudah Memiliki Trotoar/Pedestrian yang Aman.....599
2) Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT) 600
3) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar 601
4) Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR) 602
5) Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan 603
6) Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah 604
7) Panjang Jalan Nasional dan Provinsi berdasarkan Kondisi.....605
8) Panjang Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota 607
9) Luas Areal Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi berdasarkan Kondisi (Rusak/Baik).....608
10) Panjang Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi berdasarkan Kondisi (Rusak/Baik) 609
11) Daerah Tangkapan, Volume dan Luas Embung Kewenangan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota 610
12) Luas dan Panjang Saluran Drainase berdasarkan Kabupaten/Kota.....611
13) Rumah Terlayani SPAM Regional Provinsi.....612
14) Rumah Tangga terlayani SPALD Regional Provinsi 614

2.28. Metadata Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 617
1) Daftar Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) 617
2) Daftar Nama Desa dan Kelurahan 618
3) Jumlah Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota ... 620
4) Jumlah Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota ... 621
5) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju dll) dan Kabupaten 622
6) Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum 623
7) Jumlah Dana Desa (DD) berdasarkan Kabupaten 624
8) Jumlah Dusun, Jumlah Lingkungan berdasarkan Desa/Kelurahan 625
9) Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin 626
10) Jumlah Lembaga Adat Desa berdasarkan Kabupaten/Kota 627
11) Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 628
12) Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 630
13) Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 631
14) Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota .. 633
15) Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 634
16) Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 636
17) Jumlah Penduduk yang Memiliki KIA berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 637
18) Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) berdasarkan Kabupaten/Kota 638
19) Jumlah Posyandu, Posyandu Keluarga, dan Kader Posyandu berdasarkan Kabupaten/Kota 639
20) Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun Se-Provinsi NTB 641
2.29. Metadata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 643
1) Jumlah Anggaran Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berdasarkan OPD 643
2) Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Kabupaten/Kota 644
3) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 645
4) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Bentuk Kekerasan dan Kabupaten/Kota 647
5) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Kategori Usia (Anak-anak/Dewasa), Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 651
6) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota 653
7) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota 655

8) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota....657
9) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota....659
10) Jumlah Pelaku Kekerasan berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Kabupaten/Kota....661
11) Jumlah Kasus KDRT berdasarkan Kabupaten/Kota....663
12) Jumlah Korban KDRT berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota....664
13) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Kekerasan yang dialami dan Kabupaten/Kota....666
14) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Layanan yang diterima dan Kabupaten/Kota....668
15) Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan....670
16) Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berdasarkan Kabupaten/Kota....671
17) Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota....673
18) Daftar Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat (Pratama, Madya, Nindya, Utama) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)....674
2.30. Metadata Dinas Pemuda dan Olahraga....676
1) Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional antar Atlet PPLP berdasarkan Cabang Olahraga....676
2) Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Wirausaha Dispora NTB berdasarkan Kabupaten/Kota....677
3) Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara berdasarkan Negara Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota....678
4) Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi berdasarkan Provinsi Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota....679
5) Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota....680
6) Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Nasional berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota....681
7) Jumlah Atlet PPLP dan PPLPD NTB berdasarkan Kabupaten/Kota....682
8) Daftar Atlet Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga....683
9) Daftar Atlet Disabilitas Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga....684
10) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berdasarkan Provinsi se-Indonesia....686
11) Nilai Komponen Pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB....687
12) Daftar Nama Atlet Elit Nasional....688
13) Daftar Pelatih Olahraga yang Bersertifikat berdasarkan Cabang Olahraga dan Kabupaten/Kota....689
14) Daftar Prasarana Olahraga yang Dikelola oleh Dispora NTB....690

15) Nilai Komponen Pembentuk (Indikator) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB 691
2.31. Metadata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 695
1) Nilai Investasi berdasarkan Sektor dan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) 695
2) Nilai Investasi berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota 696
3) Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Sektor 697
4) Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota 698
5) Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI yang Menyampaikan LKPM berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota 700
6) Jumlah Tambahan Tenaga Kerja di Perusahaan PMA/PMDN berdasarkan Asal Tenaga Kerja (TKI dan TKA) dan Kabupaten/Kota 701
7) Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor 702
8) Daftar Pengaduan Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi 703
9) Jumlah Perizinan untuk Risiko Skala Sedang dan Besar 704
2.32. Metadata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 706
1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK/PAUD berdasarkan Kabupaten/Kota 706
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 707
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 708
4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 710
5) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 711
6) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 712
7) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 714
8) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki Berdasarkan Jenjang Pendidikan 715
9) Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota 716
10) Jumlah Peserta Didik Tingkat TK/PAUD berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 718
11) Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 719
12) Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 720

13) Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat Berdasarkan Kabupaten/Kota 721
14) Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat yang Berusia 7-12 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 723
15) Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/Sederajat yang Berusia 13-15 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 724
16) Jumlah Peserta Didik Tingkat SMA/Sederajat yang Berusia 16-18 tahun berdasarkan Kabupaten/Kota 725
17) Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan Khusus berdasarkan Kabupaten Kota, Satuan Pendidikan Khusus, Status Satuan Pendidikan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 726
18) Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada SMA dan SMK berdasarkan Satuan Pendidikan, Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan.....728
19) Jumlah Pendidik SMA dan SMK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidik dan Kabupaten/Kota.....729
20) Jumlah Pendidik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Status Satuan pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota.....730
21) Jumlah Pendidik Mata Pelajaran Bimbingan Konseling pada SMA/SMK/SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 731
22) Jumlah Pendidik di SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota 732
23) Jumlah Pendidik SMA,SMK dan SLB yang memiliki Sertifikat Pendidik Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten/Kota 734
24) Jumlah Tenaga Kependidikan SMA,SMK dan SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 735
25) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin.....736
26) Iklim Inklusivitas, Iklim Keamanan dan Iklim Kebhinekaan berdasarkan Jenjang Pendidikan 737
27) Rata-rata lama sekolah (RLS) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 739
28) Kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Jenjang Pendidikan 740
29) Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama dan Menurut Jenis Kelamin 741
30) Format Data Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 743
31) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berdasarkan Provinsi Se-Indonesia 744
32) Dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB 745
33) Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB 746
34) Jumlah Kepala Sekolah (SMA,SMK,SLB) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota 751

35) Jumlah Pengawas (SMA,SMK, SLB)berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Pengawas 752
36) Persentase lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi 753
37) Angka Melanjutkan dari Lulusan SD/MI ke SMP/MTs menurut Provinsi 754
38) Angka Melanjutkan dari Lulusan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berdasarkan Kabupaten/Kota 755
39) Angka Mengulang berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota . 756
40) Jumlah(Persentase) anak tidak sekolah dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 757
41) Angka anak tidak sekolah berdasarkan Provinsi dan Kelompok Umur..... 758
42) Angka Melek Huruf berdasarkan Kabupaten/Kota 759
43) Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kabupaten/Kota 761
44) Jumlah Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 762
45) Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah/*Drop Out* SMA/SMK/SLB berdasarkan Kabupaten/Kota 763
46) Jumlah anak usia 4 - 18 Tahun penyandang disabilitas (Berat) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Ekonomi, dan Kabupaten/Kota..... 764
47) Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Pendidik berdasarkan Kabupaten/Kota 766
48) Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Rombongan Belajar berdasarkan Satuan pendidikan 767
49) Rasio Rombongan Belajar pada SMA, SMK,SLB terhadap Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan 769
50) Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK/SLB berdasarkan Satuan pendidikan 770
51) Daftar Lembaga yang mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Keahlian untuk SMK 771
52) Jumlah Ruang Kelas pada SMA dan SMK berdasarkan Kondisi, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota 772
53) Jumlah Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan Khusus 774
54) Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota 775
55) Jumlah SMA Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota 776
56) Status Akreditasi SMA/SMK/SLB Berdasarkan Status sekolah 777
57) Jumlah Lulusan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Sekolah 778
58) Jumlah Lulusan SMK yang bekerja berdasarkan Kabupaten/Kota 779
59) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Ritus 780
60) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Manuskrip 782
61) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Tradisi Lisan 783
62) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Adat Istiadat..... 784
63) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Seni..... 786
64) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Bahasa..... 787
65) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Pengetahuan Tradisional..... 788

66) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Teknologi Tradisional 790
67) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Olah Raga Tradisional 791
68) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Permainan Rakyat 792
69) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Indikasi Geografis 793
70) Daftar Cagar Budaya Provinsi NTB 795
71) Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Angka Partisipasi Provinsi 796
72) Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi 797
73) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Provinsi.....799
74) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kejuruan Provinsi 800
75) Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan Numerasi Provinsi.....801
76) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Provinsi 804
2.33. Metadata Dinas Perdagangan 806
1) Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi.....806
2) Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Jenis Bantuan.....807
3) Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Kabupaten/Kota 808
4) Jumlah Pengaduan Konsumen yang Difasilitasi berdasarkan Kabupaten/Kota 809
5) Jumlah Produk Unggulan yang dipromosikan di NTB *Mall* berdasarkan Kategori Produk 810
6) Jumlah UKM yang bermitra di NTB *Mall* berdasarkan Kabupaten/Kota 811
7) Komoditi Barang dan Jasa yang diawasi Peredarannya 812
8) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir 813
9) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas.....814
10) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan 815
11) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan.....816
12) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang 817
13) Perkembangan Harga Rata-rata Bahan Pokok berdasarkan Komoditas 818
14) Perkembangan Harga Rata-rata Barang Strategis (Penting) yang dipantau berdasarkan Jenis Barang 819
15) Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dengan Penerbitan SKA berdasarkan Tambang-Non Tambang 820
16) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir 821
17) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas.....822

18) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan 823
19) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan 824
20) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang 825
21) Daftar Pasar Tradisional/Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota 826
22) Daftar Pelaksanaan Pasar Lelang 827
23) Daftar Pelaksanaan Pasar Murah 829
24) Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) berdasarkan Provinsi se-Indonesia . 830
25) Komponen Pembentuk Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Provinsi NTB 831
2.34. Metadata Dinas Perhubungan 833
1) Panjang Ruas Jalan Provinsi yang sudah memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Kabupaten/Kota 833
2) Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota 834
3) Daftar pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan 835
4) Daftar pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan 836
5) Daftar Bandar Udara (Luas, Lokasi/Koordinat, Kategori) 837
6) Bongkar Muat Bagasi melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 838
7) Bongkar Muat Kargo melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 839
8) Jumlah Penumpang melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 840
9) Jumlah Pesawat melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 841
10) Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB berdasarkan Jenis Komoditi 842
11) Bongkar Muat Hewan melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB 844
12) Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB . 845
13) Jumlah Kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano 846
14) Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano 847
15) Jumlah Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano 848
16) Daftar Rute Angkutan Laut di Provinsi NTB 849
17) Jumlah Kendaraan melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB 850
18) Jumlah Penumpang melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB 851
19) Jumlah Kendaraan yang memperpanjang Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) 852
20) Daftar Rute/Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 853

21) Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 854
22) Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 855
23) Daftar Permohonan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 857
2.35. Metadata Dinas Perindustrian 858
1) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Terfasilitasi Sertifikasi Halal 858
2) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang terlatih dalam Meningkatkan Mutu Kemasan 859
3) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek 860
4) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Wirausaha Baru (WUB) 862
5) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 863
6) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi NTB 864
7) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan Cabang Industri dan Kabupaten/Kota (Klasifikasi Cabang Industri Sesuai Permenperin) 866
8) Jumlah Industri Kecil berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota 868
9) Jumlah Industri Mikro berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota 869
2.36. Metadata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 871
1) Jumlah Koleksi Perpustakaan berdasarkan Klasifikasi Subyek DDC 871
2) Jumlah Alih Media Koleksi Perpustakaan berdasarkan Jenis 872
3) Jumlah Karya Cetak Karya Rekam Koleksi Deposit Daerah berdasarkan Jenis 873
4) Jumlah Kunjungan Perpustakaan berdasarkan Jenis Layanan 875
5) Jumlah Anggota Perpustakaan berdasarkan Jenis Keanggotaan 876
6) Jumlah Pos dan Mobil Perpustakaan Keliling 877
7) Daftar Perpustakaan Terakreditasi di NTB 878
8) Jumlah Arsip berdasarkan Jenis 880
9) Jumlah Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) Koleksi Perpustakaan 881
10) Sirkulasi koleksi perpustakaan 881
11) Daftar *Record Center* berdasarkan Perangkat Daerah 882
12) Daftar Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial berdasarkan Desa/Kelurahan 883
13) Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) berdasarkan Provinsi se-Indonesia 884
14) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 885
15) Komponen Pembentuk Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 887
16) Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 888
17) Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota 890
2.37. Metadata Dinas Pertanian dan Perkebunan 892

1) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi berdasarkan Kabupaten/Kota 892
2) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jagung berdasarkan Kabupaten/Kota 894
3) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Mangga berdasarkan Kabupaten/Kota 896
4) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Manggis berdasarkan Kabupaten/Kota 898
5) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pisang berdasarkan Kabupaten/Kota 900
6) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Durian berdasarkan Kabupaten/Kota 902
7) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Rambutan berdasarkan Kabupaten/Kota 904
8) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nangka berdasarkan Kabupaten/Kota 906
9) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nanas berdasarkan Kabupaten/Kota 908
10) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pepaya berdasarkan Kabupaten/Kota 910
11) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Merah berdasarkan Kabupaten/Kota 912
12) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Besar berdasarkan Kabupaten/Kota 914
13) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Rawit berdasarkan Kabupaten/Kota 916
14) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Putih berdasarkan Kabupaten/Kota 918
15) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tomat berdasarkan Kabupaten/Kota 920
16) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kentang berdasarkan Kabupaten/Kota 922
17) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kubis berdasarkan Kabupaten/Kota 923
18) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Buncis berdasarkan Kabupaten/Kota 925
19) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Tanah berdasarkan Kabupaten/Kota 926
20) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Kayu berdasarkan Kabupaten/Kota 928
21) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Jalar berdasarkan Kabupaten/Kota 930
22) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Hijau berdasarkan Kabupaten/Kota 932
23) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kelapa berdasarkan Kabupaten/Kota 934

24) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Robusta berdasarkan Kabupaten/Kota 936
25) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Arabika berdasarkan Kabupaten/Kota 937
26) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jambu Mete berdasarkan Kabupaten/Kota 939
27) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kakao berdasarkan Kabupaten/Kota 940
28) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota 942
29) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Virginia berdasarkan Kabupaten/Kota 943
30) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tebu berdasarkan Kabupaten/Kota 945
31) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Asam berdasarkan Kabupaten/Kota 946
32) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lada berdasarkan Kabupaten/Kota 948
33) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kemiri berdasarkan Kabupaten/Kota 949
34) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Aren berdasarkan Kabupaten/Kota 951
35) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lontar berdasarkan Kabupaten/Kota 952
36) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jarak Pagar berdasarkan Kabupaten/Kota 954
37) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cengkeh berdasarkan Kabupaten/Kota 955
38) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kapuk berdasarkan Kabupaten/Kota 957
39) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Vanili berdasarkan Kabupaten/Kota 958
40) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Wijen berdasarkan Kabupaten/Kota 960
41) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Pinang berdasarkan Kabupaten/Kota 961
42) Produksi dan Luas Panen Aglonema berdasarkan Kabupaten/Kota 963
43) Produksi dan Luas Panen Anthurium Bunga berdasarkan Kabupaten/Kota 964
44) Produksi dan Luas Panen Krisan berdasarkan Kabupaten/Kota 965
45) Produksi dan Luas Panen Mawar berdasarkan Kabupaten/Kota 967
46) Produksi dan Luas Panen Melati berdasarkan Kabupaten/Kota 968
47) Produksi dan Luas Panen Palem berdasarkan Kabupaten/Kota 970
48) Produksi dan Luas Panen Jahe berdasarkan Kabupaten/Kota.....971
49) Produksi dan Luas Panen Laos/Lengkuas berdasarkan Kabupaten/Kota ...972
50) Produksi dan Luas Panen Kunyit berdasarkan Kabupaten/Kota 974

51) Produksi dan Luas Panen Temukunci berdasarkan Kabupaten/Kota 975
52) Produksi dan Luas Panen Lempuyang berdasarkan Kabupaten/Kota..... 977
53) Luas Lahan Pertanian berdasarkan Jenis Pengairan dan Kabupaten/Kota. 978
54) Luas Pertanaman yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota 979
55) Luas Pertanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota 980
56) Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Kelas dan Kabupaten/Kota 981
57) Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Pembinaan berdasarkan Kabupaten/Kota 983
58) Jumlah Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota 984
59) Jumlah Target dan Realisasi Pupuk Subsidi berdasarkan Kabupaten/Kota 985
60) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota 987
61) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota 988

2.38. Metadata Dinas Perumahan dan Permukiman..... 990
1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Status Kerawanan Bencana dan Potensi Relokasi Daerah 990
2) Jumlah Rumah Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Status Ekonomi dan Kepemilikan Rumah..... 991
3) Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding) berdasarkan Kabupaten/Kota..... 994
4) Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan jenis bukti kepemilikan lahan bangunan tempat tinggal berupa sertifikat berdasarkan Kabupaten/Kota 996
5) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin berdasarkan Desa/Kelurahan..... 998
6) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan 999
7) Jumlah Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Kabupaten/Kota 1000
8) Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Desa/Kelurahan 1002
9) Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan..... 1003
10) Jumlah Kawasan Permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) berdasarkan Desa/Kelurahan..... 1004
11) Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 1006
12) Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Provinsi 1008
13) Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi 1009
14) Identifikasi Perumahan di Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 1011
15) Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha)..... 1012

16) Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi 1014
2.39. Metadata Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1016
1) Populasi Ternak berdasarkan Jenis Ternak 1016
2) Populasi Unggas berdasarkan Jenis Unggas 1017
3) Populasi Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak, Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 1018
4) Jumlah Pemotongan Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak 1019
5) Populasi Ayam Buras berdasarkan Kabupaten/Kota 1020
6) Populasi Ayam Petelur berdasarkan Kabupaten/Kota 1021
7) Populasi Ayam Ras Pedaging berdasarkan Kabupaten/Kota 1022
8) Populasi Babi berdasarkan Kabupaten/Kota 1023
9) Populasi Domba berdasarkan Kabupaten/Kota 1024
10) Populasi Itik berdasarkan Kabupaten/Kota 1025
11) Populasi Itik Manila berdasarkan Kabupaten/Kota 1026
12) Populasi Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota 1027
13) Populasi Kelinci berdasarkan Kabupaten/Kota 1028
14) Populasi Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota 1029
15) Populasi Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota 1030
16) Populasi Merpati berdasarkan Kabupaten/Kota 1031
17) Populasi Puyuh berdasarkan Kabupaten/Kota 1032
18) Populasi Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota 1033
19) Pemotongan Babi berdasarkan Kabupaten/Kota 1034
20) Pemotongan Domba berdasarkan Kabupaten/Kota 1035
21) Pemotongan Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota 1036
22) Pemotongan Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota 1037
23) Pemotongan Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota 1038
24) Pemotongan Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota 1039
25) Jumlah Kasus Hewan Tertular PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota 1040
26) Persentase perkembangan Ternak yang Terinfeksi PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota 1041
27) Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota 1042
28) Produksi Telur Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota 1043
29) Jumlah Ternak Potong dan Bibit yang dikirim ke Luar Daerah berdasarkan Jenis Ternak 1044
30) Jumlah Ternak dan Hasil Ternak yang masuk ke dalam Daerah berdasarkan Komoditas 1045
31) Jumlah Kelompok Ternak yang dibina berdasarkan Komoditas dan Kabupaten/Kota 1046
32) Jumlah UKM Produk Peternakan yang dibina berdasarkan Kabupaten/Kota 1047

33) Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Peternakan berdasarkan Jenis Sarana dan Kabupaten/Kota 1048
34) Nilai Tukar Petani Peternakan 1049
35) Daftar Kelompok Tani Ternak (KTT) berbasis Korporasi 1050
36) Jumlah Sapi Inseminasi Buatan berdasarkan Kabupaten/Kota 1051
37) Jumlah Ternak yang di-Vaksinasi berdasarkan Jenis Vaksin dan Kabupaten/Kota 1052
38) Jumlah *Day Old Chicken* (DOC) yang didistribusikan berdasarkan Kabupaten/Kota 1053
39) Unit Usaha yang Memiliki Sertifikasi NKV 1054
40) Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Peternakan Berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota 1056
41) Jumlah Tenaga Lapang Bidang Peternakan Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Kabupaten/Kota 1057

2.40. Metadata Dinas Sosial 1059

1) Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT/Sembako berdasarkan Kabupaten/Kota 1059
2) Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program PKH berdasarkan Kabupaten/Kota 1060
3) Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Kabupaten/Kota 1061
4) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur..... 1062
5) Jumlah Keluarga dan Individu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Kabupaten/Kota 1063
6) Jumlah Wanita Penerima Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita "Mirah Adi" berdasarkan Jenis Rehabilitasi dan Kabupaten/Kota 1065
7) Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri" berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1066
8) Jumlah Anak Asuh pada Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1068
9) Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Mandalika" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota..... 1069
10) Jumlah Anak Penerima Perlindungan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1070
11) Jumlah Disabilitas Penerima Pemberdayaan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1071
12) Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya "Madani" berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1073
13) Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Meci Angi" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota..... 1074

14) Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras “Muthmainnah” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1075
15) Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis.....1077
16) Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Dalam Panti Dan/Atau Lembaga Baik Milik Pemerintah Maupun Masyarakat 1079
17) Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Luar Panti Dan/Atau Lembaga (Berbasis Keluarga/Masyarakat/ Komunitas) 1082
18) Rekapitulasi Estimasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1084
19) Data dan Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) 1087
20) Data dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi 1088
2.41. Metadata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....1090
1) Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Hasil Uji Kompetensi dan Lembaga Pelatihan Kerja 1090
2) Jumlah Pencari Kerja, Pencari Kerja yang ditempatkan dan Jumlah Lowongan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1091
3) Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin1093
4) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota.....1094
5) Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin 1096
6) Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin1097
7) Jumlah Kantor pusat dan Cabang PPTKIS berdasarkan Kabupaten/Kota..1098
8) Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Terakreditasi berdasarkan Kabupaten/Kota 1099
9) Jumlah Perusahaan yang memiliki Sarana Hubungan Industrial berdasarkan Sektor dan Kabupaten/Kota.....1100
10) Daftar Perusahaan yang memiliki Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....1101
11) Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota 1102
12) Besaran Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.....1103
13) Jumlah Perusahaan yang sudah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota 1103
14) Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota 1105
15) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin 1106
16) Jumlah Penduduk yang Bekerja.....1107
17) Penerimaan remitansi PMI melalui Bank Indonesia dan Pos Indonesia....1108

18) Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama seminggu menurut kabupaten/kota (Penduduk Usia Kerja) 1109
19) Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Status Bekerja (Bekerja dan Pengangguran) dan Kabupaten/Kota 1111
20) Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat 1112
21) Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 1113
22) Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Bekerja 1114
23) Jumlah LPKS yang ada dan sudah terakreditasi 1115
24) Jumlah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah) 1116
25) Jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah) 1117
26) Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Kategori Bekerja (Penuh Waktu, Paruh Waktu, Setengah Pengangguran)..... 1118
27) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin 1119
28) Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama 1120
29) Persentase TPT berdasarkan Daerah (Perkotaan, Pedesaan)..... 1121
30) Persentase TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut jenis kelamin 1122
31) Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal berdasarkan pekerjaan utama..... 1124
32) Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal berdasarkan tingkat pendidikan dan Kabupaten/Kota..... 1125
33) Rata-rata upah yang diterima buruh/karyawan dalam sebulan menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota..... 1126
34) Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota 1127
35) Jumlah peserta pemagangan dalam negeri berdasarkan Kabupaten/Kota 1128
36) Jumlah peserta pemagangan luar negeri berdasarkan Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota 1129

2.42. Metadata Inspektorat..... 1130
1) Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Zona Integritas (ZI)..... 1130
2) Jumlah Pengaduan Masyarakat berdasarkan Media Aduan 1131
3) Nilai SAKIP berdasarkan Perangkat Daerah 1132
4) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Perangkat Daerah..... 1134

2.43. Metadata Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, Dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB..... 1135
1) *Average Length of Stay* (ALOS) 1135
2) *Bed Occupation Rate* (BOR)..... 1136

3) *Bed Turn Over* (BTO) 1137
4) *Turn Over Interval* (TOI) 1138
5) *Gross Death Rate* (GDR) 1139
6) *Net Death Rate* (NDR) 1140
7) Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) 1141
8) Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) dan Cara Pembayaran 1143
9) Daftar 10 Besar Penyakit berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) per Triwulan 1144
10) Jumlah SDM Kesehatan berdasarkan Status Kepegawaian (ASN, Non-ASN) dan Jenis SDM Kesehatan....1146
11) Jumlah Pasien Pelayanan Pasung 1148
12) Jumlah Pasien Pelayanan Terapi NAPZA....1149
13) Pelayanan Konseling dan Tes HIV/AIDS....1150
14) Peserta Tes HIV/AIDS Terkonfirmasi Positif 1151

2.44. Metadata Satuan Polisi Pamong Praja 1153
1) Daftar Produk Hukum Daerah NTB yang mengandung sanksi untuk ditegakkan....1153
2) Cakupan Penegakan Hukum Peraturan Daerah 1154
3) Jumlah Pengamanan berdasarkan Jenisnya 1155
4) Jumlah Satlinmas berdasarkan Kabupaten/Kota 1156
5) Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi NTB....1157
6) Jumlah Anggota Satpol PP berdasarkan Status (ASN, Non-ASN) dan Kabupaten/Kota 1158
7) Daftar Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Serta Aset Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada....1159
8) Rekapitulasi Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada....1161
9) Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada, Sesuai Kriteria yang Ditentukan 1162

2.45. Metadata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah....1164
1) Daftar Nama Anggota DPRD berdasarkan Jenis Kelamin, Partai Politik dan Dapil 1164
2) Daftar Perda Inisiasi DPRD....1166
3) Daftar Kegiatan *Hearing* dan Audiensi yang diterima DPRD 1167

BAB III PENUTUP 1170

LAMPIRAN 1172

Lampiran 1. Daftar Perangkat Daerah Provinsi NTB....1172
Lampiran 2. Kode Wilayah dan Nama Kabupaten/ Kota 1174
Lampiran 3. Kode Wilayah dan Nama Kecamatan....1175
Lampiran 4. Kode Wilayah dan Nama Desa/Kelurahan 1179
Lampiran 5. Sektor/Lapangan Usaha....1211

Lampiran 6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 1211
Lampiran 7. Kode Wilayah dan Nama Provinsi se-Indonesia 1212

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Format Data Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah 8

Tabel 2. Format Data Jumlah Pegawai yang terlayani Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Layanan 10

Tabel 3. Format Data Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Dokumen.....11

Tabel 4. Format Data Daftar Pelayanan Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12

Tabel 5. Format Data Daftar Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....14

Tabel 6. Format Data Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi.....16

Tabel 7. Format Data Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Penanganan 17

Tabel 8. Format Data Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Jenis 18

Tabel 9. Format Data Daftar Re-regulasi atau De-regulasi Perundang-undangan berdasarkan Hasil Reviu 19

Tabel 10. Format Data Jumlah ASN sebagai Perancang Peraturan Undang-undang berdasarkan Instansi dan Jabatan 19

Tabel 11. Format Data Daftar Peserta MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....22

Tabel 12. Format Data Daftar Juara MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....23

Tabel 13. Format Data Daftar Peserta MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....25

Tabel 14. Format Data Daftar Juara MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....26

Tabel 15. Format Data Daftar Peserta STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....28

Tabel 16. Format Data Daftar Juara STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....29

Tabel 17. Format Data Daftar Peserta STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....31

Tabel 18. Format Data Daftar Juara STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota.....32

Tabel 19. Format Data Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 34

Tabel 20. Format Data Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 36

Tabel 21. Format Data Nilai Komponen Pembentuk Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 37

Tabel 22. Format Data Nilai Komponen Pembentuk Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB 38
Tabel 23. Format Data Daftar Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB/Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTB 39
Tabel 24. Format Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui SIMASKOT berdasarkan Perangkat Daerah dan Jenis Layanan Publik 41
Tabel 25. Format Data Nilai Evaluasi Unit Pelayanan Publik (UPP) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 42
Tabel 26. Format Data Daftar Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan peta proses bisnis 44
Tabel 27. Format Data Daftar Perangkat Daerah berdasarkan Jenis Layanan dengan variabel Kriteria Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 45
Tabel 28. Format Data Daftar Nama Pulau berdasarkan Status Huni 47
Tabel 29. Format Data Daftar Kerja sama Pemprov NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lain, Swasta dan Luar Negeri berdasarkan Status Naskah Kerja sama 48
Tabel 30. Format Data Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 50
Tabel 31. Format Data Rekap pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ berdasarkan Jenis Pengadaan 52
Tabel 32. Format Data Daftar Pengadaan Langsung yang Tercatat Pada Aplikasi SPSE 54
Tabel 33. Format Data Daftar Transaksi *E-purchasing* berdasarkan Perangkat Daerah 55
Tabel 34. Format Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) SiRUP berdasarkan Perangkat Daerah 56
Tabel 35. Format Data Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota 57
Tabel 36. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota 59
Tabel 37. Format Data *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 60
Tabel 38. Format Data Komponen Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 61
Tabel 39. Format Data Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota 62
Tabel 40. Format Data Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 63
Tabel 41. Format Data Nilai Aset, Laba Bersih, Nilai *Capital Expenditure*, dan Nilai Operasional berdasarkan BUMD 65
Tabel 42. Format Data Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum, BPR dan BPRS 66
Tabel 43. Format Data Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah 67
Tabel 44. Format Data Jumlah Kantor Cabang PT BPR NTB Syariah berdasarkan Kabupaten/Kota 68
Tabel 45. Format Data Jumlah nasabah yang dijamin oleh PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan Jenis Kegiatan 69
Tabel 46. Format Data Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) berdasarkan Kabupaten/Kota 70

Tabel 47. Format Data Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Permigas (JBKP) berdasarkan Kabupaten/Kota 71
Tabel 48. Format Data Kuota LPG 3 kg berdasarkan Kabupaten/Kota 72
Tabel 49. Format Data Jumlah Aset yang dikelola berdasarkan Jenis Aset 74
Tabel 50. Format Data Jumlah Surat Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Surat (Masuk dan Keluar) 75
Tabel 51. Format Data Jumlah Arsip Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Arsip 77
Tabel 52. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD 78
Tabel 53. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Agama 79
Tabel 54. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Golongan 80
Tabel 55. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jabatan (fungsional) 81
Tabel 56. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin 83
Tabel 57. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan 84
Tabel 58. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Usia 86
Tabel 59. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Bulan Pensiun 87
Tabel 60. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Eselon 88
Tabel 61. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD 89
Tabel 62. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Agama 90
Tabel 63. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Golongan 91
Tabel 64. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jabatan (fungsional) 92
Tabel 65. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin 94
Tabel 66. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan 95
Tabel 67. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Usia 96
Tabel 68. Format Data Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Jenis Konflik dan Kabupaten/Kota 98
Tabel 69. Format Data Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Latar Belakang Konflik dan Kabupaten/Kota 99
Tabel 70. Format Data Jumlah Masyarakat Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan berdasarkan Status Disabilitas dan Jenis Kelamin 100
Tabel 71. Format Data Jumlah TPS Pilpres dan Pileg berdasarkan Desa/Kelurahan 102
Tabel 72. Format Data Jumlah DPT Pilpres dan Pileg berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan 103
Tabel 73. Format Data Jumlah Surat Suara Pilpres dan Pileg berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan 105
Tabel 74. Format Data Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg berdasarkan Kabupaten/Kota 106
Tabel 75. Format Data Jumlah TPS Pilgub berdasarkan Desa/Kelurahan 107
Tabel 76. Format Data Jumlah DPT Pilgub berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan 108
Tabel 77. Format Data Jumlah Surat Suara Pilgub berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan 110
Tabel 78. Format Data Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub berdasarkan Kabupaten/Kota 112

Tabel 79. Format Data Jumlah Organisasi Masyarakat berdasarkan Bidang Kegiatan dan Status Badan Hukum (SKT dan Badan Hukum) 112
Tabel 80. Format Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan Provinsi se-Nasional 114
Tabel 81. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB 116
Tabel 82. Format Data Daftar Desa berdasarkan Status (Desa Tangguh Bencana, Belum Desa Tangguh Bencana) 117
Tabel 83. Format Data Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 119
Tabel 84. Format Data Komponen Pembentuk (7 Prioritas) Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota 121
Tabel 85. Format Data Indeks Risiko Bencana berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota .. 122
Tabel 86. Format Data Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) berdasarkan Kabupaten/Kota 123
Tabel 87. Format Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan berdasarkan Jenis dan Kondisi 124
Tabel 88. Format Data Jumlah Logistik berdasarkan Sumber (APBD, BPBD dll.) 126
Tabel 89. Format Data Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota 127
Tabel 90. Format Data Jumlah Korban Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota 129
Tabel 91. Format Data Jumlah Kerusakan akibat Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota 130
Tabel 92. Format Data Dokumen Jitupasna dan R3P berdasarkan Kejadian Bencana 132
Tabel 93. Format Data Jumlah KK yang terdampak Kekeringan berdasarkan Kabupaten/Kota 133
Tabel 94. Format Data Jumlah Pos Pemadam Kebakaran berdasarkan Kabupaten/Kota 134
Tabel 95. Format Data Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) berdasarkan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran dan Kabupaten/Kota 136
Tabel 96. Format Data Jumlah Kasus Kebakaran Pemukiman berdasarkan Kabupaten/Kota 137
Tabel 97. Format Data Daftar Desa Peserta Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana ... 138
Tabel 98. Format Data Jumlah Belanja Daerah berdasarkan Komponen 139
Tabel 99. Format Data Jumlah Belanja Operasi berdasarkan Komponen 140
Tabel 100. Format Data Jumlah Belanja Modal berdasarkan Komponen 141
Tabel 101. Format Data Jumlah Transfer Daerah berdasarkan Komponen 142
Tabel 102. Format Data Jumlah Pembiayaan Daerah berdasarkan Komponen 143
Tabel 103. Format Data Jumlah APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 144
Tabel 104. Format Data Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) 145
Tabel 105. Format Data Daftar Tanah Milik Daerah yang Disertifikatkan 147
Tabel 106. Format Data Jumlah Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen 148
Tabel 107. Format Data Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Komponen 149
Tabel 108. Format Data Jumlah Pendapatan Transfer berdasarkan Komponen 151

Tabel 109. Format Data Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) berdasarkan Komponen 152
Tabel 110. Format Data Jumlah Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Komponen 153
Tabel 111. Format Data Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Komponen 155
Tabel 112. Format Data Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDyP) berdasarkan Komponen 156
Tabel 113. Format Data Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan Komponen 158
Tabel 114. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah 159
Tabel 115. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 160
Tabel 116. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Transfer 161
Tabel 117. Format Data Persentase Komponen LLPD terhadap LLPD 162
Tabel 118. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah 163
Tabel 119. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Retribusi Daerah 165
Tabel 120. Format Data Persentase Komponen Pendapatan HPKDyP terhadap Pendapatan HPKDyP 166
Tabel 121. Format Data Persentase Komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap Lain-lain PAD yang Sah 167
Tabel 122. Format Data Pertumbuhan Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen 168
Tabel 123. Format Data Jumlah Kendaraan yang Melakukan Daftar Ulang PKB Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Kabupaten Kota 169
Tabel 124. Format Data Jumlah Objek Kendaraan Bermotor yang melakukan Daftar Ulang berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota 170
Tabel 125. Format Data Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah BBN berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota 171
Tabel 126. Format Data Jumlah Pendapatan PKB berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota 172
Tabel 127. Format Data Jumlah Objek Pajak Baru berdasarkan Kabupaten/Kota 173
Tabel 128. Format Data Nilai Retribusi Daerah berdasarkan Perangkat Daerah 174
Tabel 129. Format Data Jumlah dan Persentase ASN yang Bersertifikat Kompetensi berdasarkan Jenis Kompetensi (Teknis, Manajerial, dan Fungsional) 176
Tabel 130. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis 178
Tabel 131. Format Data Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial berdasarkan Pemda dan Kategori Manajerial (PKP, PKA, PKN2) 180
Tabel 132. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan Pemerintah Daerah 181
Tabel 133. Format Data Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional 182
Tabel 134. Format Data Jumlah Peserta Kegiatan Uji Sertifikasi JFT 184
Tabel 135. Format Data Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Jenis Kelamin 185

Tabel 136. Format Data Jumlah Tamu yang Menginap di Wisma NTB, Jakarta 187
Tabel 137. Format Data Jumlah Sarana pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Kelompok dan Jenisnya 188
Tabel 138. Format Data Daftar Event yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta 189
Tabel 139. Format Data Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB..... 190
Tabel 140. Format Data Daftar Laporan Tahunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)..... 191
Tabel 141. Format Data Daftar *Roadmap*/Rencana Aksi Daerah Se-Provinsi NTB..... 192
Tabel 142. Format Data Daftar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) .. 193
Tabel 143. Format Data Daftar Dokumen Evaluasi Daerah (Evaluasi RPJPD, Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD, Evaluasi Dekon TP, Evaluasi DAK) 194
Tabel 144. Format Data IHK dan Inflasi Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Gabungan 196
Tabel 145. Format Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 197
Tabel 146. Format Data Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha..... 198
Tabel 147. Format Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 199
Tabel 148. Format Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 200
Tabel 149. Format Data Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 201
Tabel 150. Format Data Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan PDRB dari Sisi Pengeluaran 202
Tabel 151. Format Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 204
Tabel 152. Format Data Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota..... 205
Tabel 153. Format Data Garis kemiskinan berdasarkan Klasifikasi Daerah (Perkotaan dan Pedesaan)..... 206
Tabel 154. Format Data Nilai Capaian SPM berdasarkan Urusan Layanan Dasar 207
Tabel 155. Format Data TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota..... 208
Tabel 156. Format Data IPM Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 209
Tabel 157. Format Data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat..... 210
Tabel 158. Format Data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat..... 211
Tabel 159. Format Data Daftar Kajian yang di Fasilitasi BRIDA berdasarkan Jenis Kajian . 212
Tabel 160. Format Data Daftar Izin Penelitian berdasarkan Universitas 213
Tabel 161. Format Data Jumlah *Prototype* Karya IKM mitra BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota..... 214
Tabel 162. Format Data Daftar *Tenant* IKM binaan BRIDA NTB berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten/Kota 215

Tabel 163. Format Data Jumlah Kunjungan Eduwisata BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 216
Tabel 164. Format Data Jumlah Penerima Sertifikasi Profesi oleh BRIDA NTB berdasarkan Jenis Sertifikasi dan Kabupaten/Kota 217
Tabel 165. Format Data Standarisasi Mesin yang Di Fasilitasi BRIDA 218
Tabel 166. Format Data Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Dalam Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota 220
Tabel 167. Format Data Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Luar Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota & Negara Tujuan 221
Tabel 168. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Rumah Bahasa berdasarkan Jenis Pelatihan dan Kabupaten/Kota 222
Tabel 169. Format Data Indeks Inovasi Daerah (Program *Innovative Goverment Award*) ..223
Tabel 170. Format Data Indeks Daya Saing Daerah 224
Tabel 171. Format Data Konsumsi Listrik per Kapita 226
Tabel 172. Format Data Persentase Rasio Elektrifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota 227
Tabel 173. Format Data Jumlah Perizinan Bidang Ketenagalistrikan berdasarkan Kabupaten/Kota 229
Tabel 174. Format Data Jumlah *Captive Power* (Pembangkit Listrik) berdasarkan Sistem 230
Tabel 175. Format Data Jumlah Pembangunan PLTS SHS berdasarkan Kabupaten/Kota .231
Tabel 176. Format Data Jumlah Pembangunan PLTS Komunal berdasarkan Kabupaten/Kota 232
Tabel 177. Format Data Persentase Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Pembangkit Listrik 234
Tabel 178. Format Data Persentase Izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good mining practices) 235
Tabel 179. Format Data Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Non-Logam berdasarkan Kabupaten/Kota 237
Tabel 180. Format Data Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Batuan berdasarkan Kabupaten/Kota 239
Tabel 181. Format Data Jumlah Ekspor Konsentrat PT. Newmont Nusa Tenggara/PT. AMNT 240
Tabel 182. Format Data Jumlah Lokasi Bahan Galian Batuan berdasarkan Jenis Bahan Galian dan Kabupaten Kota 241
Tabel 183. Format Data Jumlah Biogas Rumah berdasarkan Kabupaten/Kota 242
Tabel 184. Format Data Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan 244
Tabel 185. Format Data Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota 245
Tabel 186. Format Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota 246
Tabel 187. Format Data Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota 247
Tabel 188. Format Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 249
Tabel 189. Format Data Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 250

Tabel 190. Format Data Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut berdasarkan Jenis Kapal dan Kabupaten/Kota 252
Tabel 191. Format Data Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut berdasarkan Jenis Alat Tangkap dan Kabupaten/Kota 253
Tabel 192. Format Data Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota 254
Tabel 193. Format Data Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota 255
Tabel 194. Format Data Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perahu/Kapal dan Kabupaten/Kota 256
Tabel 195. Format Data Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Alat dan Kabupaten/Kota..... 258
Tabel 196. Format Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 259
Tabel 197. Format Data Jumlah Pembudidaya Ikan berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 260
Tabel 198. Format Data Luas Area Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 261
Tabel 199. Format Data Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 262
Tabel 200. Format Data Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota 264
Tabel 201. Format Data Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 265
Tabel 202. Format Data Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota 266
Tabel 203. Format Data Nilai Tukar Petani Perikanan 267
Tabel 204. Format Data Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap 268
Tabel 205. Format Data Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya..... 269
Tabel 206. Format Data Angka Konsumsi Ikan berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 270
Tabel 207. Format Data Produksi Olahan Hasil Perikanan berdasarkan Jenis Olahan dan Kabupaten/Kota 271
Tabel 208. Format Data Jumlah Petambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota..... 272
Tabel 209. Format Data Luas Lahan Tambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota 273
Tabel 210. Format Data Produksi Garam berdasarkan Kabupaten/Kota 274
Tabel 211. Format Data Luas Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Penetapan Pemerintah Pusat 275
Tabel 212. Format Data Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas berdasarkan Kabupaten/Kota..... 276
Tabel 213. Format Data Persentase Luas Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terkelola secara Berkelanjutan 278
Tabel 214. Format Data Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya yang mendapatkan bantuan Pemerintah Provinsi..... 279
Tabel 215. Format Data Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It) 280
Tabel 216. Format Data Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)..... 281

Tabel 217. Format Data Jumlah Produksi Ikan Berdasarkan Kabupaten/Kota 282
Tabel 218. Format Data Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi 283
Tabel 219. Format Data Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dilatih 284
Tabel 220. Format Data Jumlah Pelaku Usaha yang terdata pada aplikasi KUSUKA 285
Tabel 221. Format Data Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 286
Tabel 222. Format Data Jumlah Kasus Kematian Ibu 287
Tabel 223. Format Data Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat 289
Tabel 224. Format Data Jumlah dan Persentase Persalinan di Fasyankes di Nusa Tenggara Barat 290
Tabel 225. Format Data Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan dan Mengonsumsi Tablet Tambah Darah di Nusa Tenggara Barat. 292
Tabel 226. Format Data Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri 293
Tabel 227. Format Data Jumlah dan Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan K1, K4. K6 di Nusa Tenggara Barat 295
Tabel 228. Format Data Jumlah dan Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan KF dan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat 297
Tabel 229. Format Data Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (*Age Spesific Fertility Rate*/ASFR) 300
Tabel 230. Format Data Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) 301
Tabel 231. Format Data Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan 303
Tabel 232. Format Data Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhir Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 304
Tabel 233. Format Data Jumlah dan persentase ibu hamil usia 15-49 dengan anemia 305
Tabel 234. Format Data Jumlah Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun dengan Kurang Energi Kronis (KEK) 306
Tabel 235. Format Data Jumlah kehamilan 4T (Terlalu Banyak, Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Tua) 308
Tabel 236. Format Data Jumlah Kasus Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita 309
Tabel 237. Format Data Jumlah Kematian Bayi (Neonatal dan Postneonatal) berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat 310
Tabel 238. Format Data Jumlah Kematian Anak Balita berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat 312
Tabel 239. Format Data Jumlah dan Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Nusa Tenggara Barat 314
Tabel 240. Format Data Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif di Nusa Tenggara Barat 315
Tabel 241. Format Data Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Nusa Tenggara Barat 316
Tabel 242. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 318

Tabel 243. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi dan Anak Balita yang Mendapatkan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat 319
Tabel 244. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 320
Tabel 245. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib3 berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat..... 322
Tabel 246. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Polio4* berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 323
Tabel 247. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Campak Rubela berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 325
Tabel 248. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita berdasarkan Jenis Pelayanan di Nusa Tenggara Barat..... 326
Tabel 249. Format Data Jumlah dan Persentase Balita Ditimbang di Nusa Tenggara Barat 328
Tabel 250. Format Data Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk di Nusa Tenggara Barat 329
Tabel 251. Format Data Jumlah dan Persentase Balita berdasarkan Status Gizi Kurang, Pendek dan Kurus di Nusa Tenggara Barat 331
Tabel 252. Format Data Jumlah dan Persentase Balita *Stunting* di Nusa Tenggara Barat . 332
Tabel 253. Format Data Jumlah dan Persentase Anak Usia 18-24 Bulan yang Mendapat DPT-HB-Hib Dosis ke-4 333
Tabel 254. Format Data Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima 2 Dosis Vaksin Campak (Cakupan Imunisasi Campak-2) 335
Tabel 255. Format Data Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima Vaksinasi PCV Dosis Ketiga 336
Tabel 256. Format Data Jumlah dan Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Nusa Tenggara Barat 337
Tabel 257. Format Data Persentase Remaja Putri (15-19 tahun) dengan Anemia 339
Tabel 258. Format Data Jumlah Posyandu dan Posyandu Aktif di Nusa Tenggara Barat ... 340
Tabel 259. Format Data Jumlah Kader Posyandu..... 341
Tabel 260. Format Data Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif..... 343
Tabel 261. Format Data Jumlah Posbindu PTM di Nusa Tenggara Barat 344
Tabel 262. Format Data Jumlah dan Persentase Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif berdasarkan Kontrasepsi di Nusa Tenggara Barat..... 345
Tabel 263. Format Data Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/*Discontinuation of Contraseptive Rate* (DCR) 12 bulan..... 346
Tabel 264. Format Data *Unmet Need* KB..... 347
Tabel 265. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik berdasarkan Kelas di Nusa Tenggara Barat..... 349
Tabel 266. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di Nusa Tenggara Barat..... 350
Tabel 267. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Sekolah di Nusa Tenggara Barat..... 352
Tabel 268. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 353

Tabel 269. Format Data *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan 355
Tabel 270. Format Data Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir 356
Tabel 271. Format Data Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun..... 357
Tabel 272. Format Data Jumlah dan Cakupan Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 358
Tabel 273. Format Data Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Nusa Tenggara Barat..... 360
Tabel 274. Format Data Jumlah Kasus Tuberkulosis berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 361
Tabel 275. Format Data Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat..... 362
Tabel 276. Format Data Angka Pengobatan Lengkap (*Complete Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat 364
Tabel 277. Format Data Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat 365
Tabel 278. Format Data Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage* TBC) 366
Tabel 279. Format Data Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak di Nusa Tenggara Barat..... 367
Tabel 280. Format Data Persentase Obat Tuberkulosis di FKTP dan FKTL..... 368
Tabel 281. Format Data Jumlah Kasus Baru Kusta (Kering dan Basah) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 369
Tabel 282. Format Data Jumlah Kasus Kusta (Kering dan Basah) Terdaftar berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat 371
Tabel 283. Format Data Jumlah Penderita Kusta (Kering dan Basah) Selesai Berobat di Nusa Tenggara Barat..... 373
Tabel 284. Format Data Angka Kesembuhan atau RFT Rate Kusta (Kering dan Basah)..... 375
Tabel 285. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta 377
Tabel 286. Format Data Persentase Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat 377
Tabel 287. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai API <1/1.000 Penduduk..... 379
Tabel 288. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi 380
Tabel 289. Format Data Persentase Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka Mikrofilaria <1%..... 380
Tabel 290. Format Data Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat 381
Tabel 291. Format Data Jumlah Kasus HIV berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat..... 382
Tabel 292. Format Data Jumlah ODHIV Baru dan Mendapatkan Perawatan di Nusa Tenggara Barat 383
Tabel 293. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria 384
Tabel 294. Format Data Jumlah Kasus, Pengobatan dan Kematian Malaria di Nusa Tenggara Barat 385
Tabel 295. Format Data Jumlah Kasus dan Kematian Malaria berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 387

Tabel 296. Format Data Persentase Kasus Malaria Mendapat Pengobatan Standar di Nusa Tenggara Barat 388
Tabel 297. Format Data Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Malaria di Nusa Tenggara Barat 389
Tabel 298. Format Data Jumlah Kasus *Accute Flacid Paralysis* (AFP) Non Polio di Nusa Tenggara Barat 390
Tabel 299. Format Data Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Nusa Tenggara Barat 391
Tabel 300. Format Data Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 393
Tabel 301. Format Data Jumlah Kasus Diare Semua Umur yang Dilayani dan Mendapat Oralit di Nusa Tenggara Barat 394
Tabel 302. Format Data Jumlah Kasus Diare Balita yang Dilayani Mendapat Oralit dan Zinc di Nusa Tenggara Barat 396
Tabel 303. Format Data Jumlah Kasus, Kematian dan Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nusa Tenggara Barat 398
Tabel 304. Format Data Jumlah dan Cakupan Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat 399
Tabel 305. Format Data Jumlah dan Cakupan Penderita Diabetes Melitus Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat 401
Tabel 306. Format Data Jumlah dan Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 402
Tabel 307. Format Data Jumlah Penderita ODGJ Berat (Skizofrenia dan Psikotik Akut) berdasarkan Kelompok Usia di Nusa Tenggara Barat 404
Tabel 308. Format Data Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode IVA di Nusa Tenggara Barat 406
Tabel 309. Format Data Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Metode Sadanis di Nusa Tenggara Barat 408
Tabel 310. Format Data Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami KLB dan Ditangani Kurang dari 24 Jam di Nusa Tenggara Barat 409
Tabel 311. Format Data Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis 410
Tabel 312. Format Data Jumlah yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi 411
Tabel 313. Format Data Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat 412
Tabel 314. Format Data Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Nusa Tenggara Barat 413
Tabel 315. Format Data Jumlah Tenaga Kefarmasian berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat 414
Tabel 316. Format Data Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Nusa Tenggara Barat 415
Tabel 317. Format Data Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik dan Keteknisan Medik di Nusa Tenggara Barat 417
Tabel 318. Format Data Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 418
Tabel 319. Format Data Persentase Puskesmas Tanpa Dokter 419

Tabel 320. Format Data Jumlah dan Persentase Puskesmas yang Terpenuhi 9 Jenis Tenaga Kesehatan 420
Tabel 321. Format Data Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 Penduduk..... 422
Tabel 322. Format Data Jumlah Fasilitas Kesehatan 422
Tabel 323. Format Data Jumlah dan Persentase Puskesmas berdasarkan Akreditasi..... 424
Tabel 324. Format Data Jumlah dan Persentase Rumah Sakit berdasarkan Akreditasi 425
Tabel 325. Format Data Jumlah Sarana Kesehatan Puskesmas berdasarkan Kemampuan Pelayanan di Nusa Tenggara Barat..... 426
Tabel 326. Format Data Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat..... 428
Tabel 327. Format Data Daftar Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis dan Kelas di Nusa Tenggara Barat 429
Tabel 328. Format Data Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 430
Tabel 329. Format Data Jumlah Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat 432
Tabel 330. Format Data Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat..... 433
Tabel 331. Format Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Daerah Sulit..... 434
Tabel 332. Format Data Persentase Obat Memenuhi Syarat 436
Tabel 333. Format Data Persentase Makanan Memenuhi Syarat..... 437
Tabel 334. Format Data Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial 438
Tabel 335. Format Data Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Jenis Bantuan di Nusa Tenggara Barat..... 440
Tabel 336. Format Data Jumlah dan Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Nusa Tenggara Barat..... 441
Tabel 337. Format Data Jumlah dan Persentase Tempat Fasilitas Umum yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat..... 442
Tabel 338. Format Data Jumlah dan Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Nusa Tenggara Barat..... 444
Tabel 339. Format Data Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 446
Tabel 340. Format Data Persentase Kabupaten/Kota Sehat 447
Tabel 341. Format Data Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 448
Tabel 342. Format Data Persentase KK dengan akses terhadap sanitasi (Fasilitas tempat Buang Air Besar) 450
Tabel 343. Format Data Warga Negara terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 453
Tabel 344. Format Data Warga Negara terdampak Kejadian Luar Biasa Provinsi..... 454
Tabel 345. Format Data Daerah dan Rekapitulasi Jumlah Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Provinsi..... 455
Tabel 346. Format Data Rasio Ketersediaan Pangan (Ketersediaan, Kebutuhan) berdasarkan Jenis Komoditas..... 457

Tabel 347. Format Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi 459
Tabel 348. Format Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi 460
Tabel 349. Format Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Komsumsi berdasarkan Kabupaten/Kota 463
Tabel 350. Format Data Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota . 465
Tabel 351. Format Data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalensi of Undernourishment (PoU) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 467
Tabel 352. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan 468
Tabel 353. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan 475
Tabel 354. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota 478
Tabel 355. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 481
Tabel 356. Format Data Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis 483
Tabel 357. Format Data Jumlah Bantuan Pangan yang tersalurkan berdasarkan Jenis Bantuan dan Kabupaten/Kota 484
Tabel 358. Format Data Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan Provinsi Se-Indonesia .. 485
Tabel 359. Format Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota 487
Tabel 360. Format Data Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota... 489
Tabel 361. Format Data Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 490
Tabel 362. Format Data Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota 492
Tabel 363. Format Data Komponen pembentuk Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi NTB 493
Tabel 364. Format Data Komponen pembentuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota 495
Tabel 365. Format Data Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota 496
Tabel 366. Format Data Komponen pembentuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 498
Tabel 367. Format Data Komponen pembentuk Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota 499
Tabel 368. Format Data Jumlah Lembaga dan Pers berdasarkan Jenis Media di Provinsi NTB 500
Tabel 369. Format Data Jumlah Sengketa Informasi Publik 501
Tabel 370. Format Data Daftar Area *Blankspot* berdasarkan Kabupaten/Kota 502
Tabel 371. Format Data Daftar Area Lemah Sinyal berdasarkan Kabupaten/Kota..... 503
Tabel 372. Format Data Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) berdasarkan Kabupaten/Kota..... 504
Tabel 373. Format Data Jumlah Aplikasi TIK yang dimanfaatkan berdasarkan Jenis..... 505
Tabel 374. Format Data Jumlah Pejabat yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berdasarkan Perangkat Daerah 506
Tabel 375. Format Data Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital 507
Tabel 376. Format Data Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota 508
Tabel 377. Format Data Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota..... 510

Tabel 378. Format Data Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 511
Tabel 379. Format Data Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 512
Tabel 380. Format Data Jumlah Pengawas Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 513
Tabel 381. Format Data Jumlah Pengurus Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 514
Tabel 382. Format Data Jumlah Koperasi berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota 515
Tabel 383. Format Data Jumlah Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota 516
Tabel 384. Format Data Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat berdasarkan Kabupaten/Kota 517
Tabel 385. Format Data Jumlah Koperasi Sehat Binaan Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 518
Tabel 386. Format Data Jumlah Koperasi Sektor Riil berdasarkan Kabupaten/Kota 519
Tabel 387. Format Data Jumlah Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota 520
Tabel 388. Format Data Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota 521
Tabel 389. Format Data Jumlah Aset Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 522
Tabel 390. Format Data Jumlah Modal Luar Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 523
Tabel 391. Format Data Jumlah Modal Sendiri Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 524
Tabel 392. Format Data Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota 525
Tabel 393. Format Data Jumlah Volume Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota ... 526
Tabel 394. Format Data Jumlah UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota 527
Tabel 395. Format Data Persentase Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota 528
Tabel 396. Format Data Persentase Koperasi Sehat Binaan Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 529
Tabel 397. Format Data Persentase Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota 530
Tabel 398. Format Data Persentase Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota 531
Tabel 399. Format Data Persentase UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota 532
Tabel 400. Format Data Daftar *Start Up* (Perusahaan Rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan 533
Tabel 401. Format Data Daftar Koperasi Modern 534
Tabel 402. Format Data Jumlah UMKM berdasarkan Sektor Usaha dan Kabupaten/Kota . 535
Tabel 403. Format Data Jumlah Koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan berdasarkan Kabupaten/Kota 536
Tabel 404. Format Data Jumlah Sampah yang terkelola di TPA Kebon Kongo 538
Tabel 405. Format Data Daftar Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Laut, Air, Udara) 539

Tabel 406. Format Data Daftar Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup .. 540
Tabel 407. Format Data Daftar Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) berdasarkan Status (Efektif dan Tidak Efektif) 541
Tabel 408. Format Data Luas Areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan Jumlah Bibit dan Kabupaten/Kota 542
Tabel 409. Format Data Daftar Desa Sekitar Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 543
Tabel 410. Format Data Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan Desa/Kelurahan 545
Tabel 411. Format Data Daftar kelompok Tani Hutan (KTH) yang Sudah Memiliki Usaha berdasarkan Desa/Kelurahan 546
Tabel 412. Format Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kelompok Hutan 547
Tabel 413. Format Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kabupaten/Kota. 548
Tabel 414. Format Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan BKPH 549
Tabel 415. Format Data Luas Tutupan Lahan berdasarkan Kategori 551
Tabel 416. Format Data Luas Perhutanan Sosial berdasarkan Skema (HKM, HTR, KK, HD), BKPH dan Kabupaten/Kota 552
Tabel 417. Format Data Luas Lahan Kritis berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan dan Kabupaten/Kota 554
Tabel 418. Format Data Jumlah Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup berdasarkan Kabupaten/Kota 555
Tabel 419. Format Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Kehutanan 556
Tabel 420. Format Data Jumlah Perusahaan yang mengikuti Program PROPER berdasarkan Peringkat dan Kabupaten/Kota 557
Tabel 421. Format Data Jumlah Produksi HHK berdasarkan Jenis Kayu 558
Tabel 422. Format Data Jumlah Produksi HHBK berdasarkan Jenis Hasil Hutan dan BKPH 559
Tabel 423. Format Data Jumlah Perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Progres Perizinan 560
Tabel 424. Format Data Jumlah Pemegang Izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan Kabupaten/Kota 562
Tabel 425. Format Data Luas Kebakaran Hutan berdasarkan BKPH/Tahura 563
Tabel 426. Format Data Luas Perambahan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura 564
Tabel 427. Format Data Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dikaji dan dinilai berdasarkan Jenis Dokumen, Sektor dan Kabupaten/Kota 565
Tabel 428. Format Data Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berdasarkan Fungsi Hutan dan Kabupaten/Kota 566
Tabel 429. Format Data Intensitas Patroli dan Luas Pengamanan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura 567
Tabel 430. Format Data Daftar Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) 568
Tabel 431. Format Data Daftar Sebaran Mata Air 569
Tabel 432. Format Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indikator Penyusunnya 570

Tabel 433. Format Data Proyeksi/Potensi Jumlah Timbulan Sampah berdasarkan Kabupaten/Kota 571
Tabel 434. Format Data Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Komponennya 572
Tabel 435. Format Data Daftar Lokasi Bank Sampah berdasarkan Desa/Kelurahan 573
Tabel 436. Format Data Daftar Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim berdasarkan Kategori 574
Tabel 437. Format Data Daftar Sekolah Adiwiyata berdasarkan Status dan Kabupaten/Kota 575
Tabel 438. Format Data Daftar Destinasi Pariwisata 577
Tabel 439. Format Data Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terdaftar dan Telah memiliki Sertifikasi HaKI berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota 578
Tabel 440. Format Data Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan 580
Tabel 441. Format Data Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Unggulan (Islamic Center) berdasarkan Jenis Wisatawan 581
Tabel 442. Format Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel 582
Tabel 443. Format Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel 584
Tabel 444. Format Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) berdasarkan Kabupaten Kota 585
Tabel 445. Format Data Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel 586
Tabel 446. Format Data Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel 588
Tabel 447. Format Data Rata-rata Lama Menginap (RLM) berdasarkan Kabupaten Kota 589
Tabel 448. Format Data Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel 590
Tabel 449. Format Data Jumlah Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel 592
Tabel 450. Format Data Jumlah Tamu Menginap berdasarkan Kabupaten Kota 593
Tabel 451. Format Data Jumlah Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota 594
Tabel 452. Format Data Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Kamar, dan Tenaga Kerja Hotel berdasarkan Kabupaten Kota 595
Tabel 453. Format Data Daftar Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 597
Tabel 454. Format Data Panjang Ruas Jalan Provinsi yang Sudah Memiliki Trotoar/Pedestrian yang Aman 599
Tabel 455. Format Data Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT) 600
Tabel 456. Format Data Proporsi Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar 601
Tabel 457. Format Data Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR) 602
Tabel 458. Format Data Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan 603
Tabel 459. Format Data Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah 605

Tabel 460. Format Data Panjang Jalan Nasional dan Provinsi berdasarkan Kondisi 606
Tabel 461. Format Data Panjang Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota.... 607
Tabel 462. Format Data Luas Areal Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 608
Tabel 463. Format Data Luas dan Panjang Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan dan Kondisi (Rusak/Baik) 609
Tabel 464. Format Data Daerah Tangkapan, Volume dan Luas Embung Kewenangan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota 611
Tabel 465. Format Data Luas dan Panjang Saluran Drainase berdasarkan Kabupaten/Kota 612
Tabel 466. Jumlah Rumah Tangga terlayani SPAM Regional Provinsi 613
Tabel 467. Jumlah Rumah Tangga terlayani SPALD Regional Provinsi 615
Tabel 468. Format Data Daftar Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) 618
Tabel 469. Format Data Daftar Nama Desa dan Kelurahan 619
Tabel 470. Format Data Jumlah Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 620
Tabel 471. Format Data Jumlah Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 621
Tabel 472. Format Data Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju dll) dan Kabupaten 622
Tabel 473. Format Data Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum 623
Tabel 474. Format Data Jumlah Dana Desa (DD) berdasarkan Kabupaten 624
Tabel 475. Format Data Jumlah Dusun, Jumlah Lingkungan berdasarkan Desa/Kelurahan 625
Tabel 476. Format Data Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin 627
Tabel 477. Format Data Jumlah Lembaga Adat Desa berdasarkan Kabupaten/Kota 628
Tabel 478. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 629
Tabel 479. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 630
Tabel 480. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 632
Tabel 481. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota 633
Tabel 482. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 635
Tabel 483. Format Data Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 636
Tabel 484. Format Data Jumlah Penduduk yang Memiliki KIA berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 638
Tabel 485. Format Data Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) berdasarkan Kabupaten/Kota 639
Tabel 486. Format Data Jumlah Posyandu, Posyandu Keluarga, dan Kader Posyandu berdasarkan Kabupaten/Kota 640

Tabel 487. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun Se-Provinsi NTB 641
Tabel 488. Format Data Jumlah Anggaran Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berdasarkan OPD 643
Tabel 489. Format Data Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Kabupaten/Kota 644
Tabel 490. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 646
Tabel 491. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Bentuk Kekerasan dan Kabupaten/Kota 649
Tabel 492. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Kategori Usia (Anak-anak/Dewasa), Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 652
Tabel 493. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota 654
Tabel 494. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota 656
Tabel 495. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota 658
Tabel 496. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota 660
Tabel 497. Format Data Jumlah Pelaku Kekerasan berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Kabupaten/Kota 662
Tabel 498. Format Data Jumlah Kasus KDRT berdasarkan Kabupaten/Kota 663
Tabel 499. Format Data Jumlah Korban KDRT berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 665
Tabel 500. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Kekerasan yang dialami dan Kabupaten/Kota 667
Tabel 501. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Layanan yang diterima dan Kabupaten/Kota 669
Tabel 502. Format Data Rata-rata usia kawin pertama perempuan 670
Tabel 503. Format Data Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berdasarkan Kabupaten/Kota 671
Tabel 504. Format Data Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota 673
Tabel 505. Format Data Daftar Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat (Pratama, Madya, Nindya, Utama) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 675
Tabel 506. Format Data Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional antar Atlet PPLP berdasarkan Cabang Olahraga 676
Tabel 507. Format Data Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Wirausaha Dispora NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 677
Tabel 508. Format Data Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara berdasarkan Negara Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota 678
Tabel 509. Format Data Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi berdasarkan Provinsi Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota 679
Tabel 510. Format Data Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota 680

Tabel 511. Format Data Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Nasional berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota 681
Tabel 512. Format Data Jumlah Atlet PPLP dan PPLPD NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 682
Tabel 513. Format Data Daftar Atlet Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga 683
Tabel 514. Format Data Daftar Atlet Disabilitas Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga 685
Tabel 515. Format Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berdasarkan Provinsi se-Indonesia 686
Tabel 516. Format Data Nilai Komponen Pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB 688
Tabel 517. Format Data Daftar Nama Atlet Elit Nasional 689
Tabel 518. Format Data Daftar Pelatih Olahraga yang Bersertifikat berdasarkan Cabang Olahraga dan Kabupaten/Kota 689
Tabel 519. Format Data Daftar Prasarana Olahraga yang Dikelola oleh Dispora NTB 691
Tabel 520. Format Data Nilai Komponen Pembentuk (Indikator) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB 692
Tabel 521. Format Data Nilai Investasi berdasarkan Sektor dan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) 695
Tabel 522. Format Data Nilai Investasi berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota 696
Tabel 523. Format Data Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Sektor 698
Tabel 524. Format Data Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota 699
Tabel 525. Format Data Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI yang Menyampaikan LKPM berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota 700
Tabel 526. Format Data Jumlah Tambahan Tenaga Kerja di Perusahaan PMA/PMDN berdasarkan Asal Tenaga Kerja (TKI dan TKA) dan Kabupaten/Kota 701
Tabel 527. Format Data Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor 702
Tabel 528. Format Data Daftar Pengaduan Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi 703
Tabel 529. Format Data Jumlah Perizinan untuk Risiko Skala Sedang dan Besar 704
Tabel 530. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK/PAUD berdasarkan Kabupaten/Kota 706
Tabel 531. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 707
Tabel 532. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 709
Tabel 533. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 710
Tabel 534. Format Data Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 711

Tabel 535. Format Data Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 713
Tabel 536. Format Data Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota 714
Tabel 537. Format Data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki Berdasarkan Jenjang Pendidikan 716
Tabel 538. Format Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota 717
Tabel 539. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat TK/PAUD berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 718
Tabel 540. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 720
Tabel 541. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/MTs/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 721
Tabel 542. Format Data Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat Berdasarkan Kabupaten/Kota 722
Tabel 543. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat yang Berusia 7-12 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 723
Tabel 544. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/MTs/Sederajat yang Berusia 13-15 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota 724
Tabel 545. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SMA/Sederajat yang Berusia 16-18 tahun berdasarkan Kabupaten/Kota 725
Tabel 546. Format Data Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan Khusus berdasarkan Kabupaten Kota, Satuan Pendidikan Khusus, Status Satuan Pendidikan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 726
Tabel 547. Format Data Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada SMA dan SMK berdasarkan Satuan Pendidikan, Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan 728
Tabel 548. Format Data Jumlah Pendidik SMA dan SMK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidik dan Kabupaten/Kota 729
Tabel 549. Format Data Jumlah Pendidik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Status Satuan pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota 731
Tabel 550. Format Data Jumlah Pendidik Mata Pelajaran Bimbingan Konseling pada SMA/SMK/SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 732
Tabel 551. Format Data Jumlah Pendidik di SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota 733
Tabel 552. Format Data Jumlah Pendidik SMA,SMK dan SLB yang memiliki Sertifikat Pendidik Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten/Kota 734
Tabel 553. Format Data Jumlah Tenaga Kependidikan SMA,SMK dan SLB Berdasarkan Satuan Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan 735
Tabel 554. Format Data Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin (Tabel Format Data sesuai Format Portal NTB Satu Data) 737
Tabel 555. Format Data Iklim Inklusivitas, Iklim Keamanan dan Iklim Kebhinekaan berdasarkan Jenjang Pendidikan 738

Tabel 556. Format Data Rata-rata lama sekolah (RLS) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 739
Tabel 557. Format Data Kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Jenjang Pendidikan 740
Tabel 558. Format Data Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama dan Menurut Jenis Kelamin 742
Tabel 559. Format Data Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 743
Tabel 560. Format Data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berdasarkan Provinsi Se-Indonesia 745
Tabel 561. Format Data Dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB 746
Tabel 562. Format Data Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB 747
Tabel 563. Format Data Jumlah Kepala Sekolah (SMA,SMK,SLB) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota 751
Tabel 564. Format Data Jumlah Pengawas (SMA,SMK, SLB)berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Pengawas 752
Tabel 565. Format Data Persentase lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi 753
Tabel 566. Format Data Angka Melanjutkan dari Lulusan SD/MI ke SMP/MTs berdasarkan Kabupaten/Kota 755
Tabel 567. Format Data Angka Melanjutkan dari Lulusan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berdasarkan Kabupaten/Kota 756
Tabel 568. Format Data Angka Mengulang berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Provinsi 756
Tabel 569. Format Data Jumlah anak tidak sekolah dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 758
Tabel 570. Format Data Angka anak tidak sekolah berdasarkan Provinsi dan Kelompok Umur 759
Tabel 571. Format Data Angka Melek Huruf berdasarkan Kabupaten/Kota 760
Tabel 572. Format Data Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kabupaten/Kota 761
Tabel 573. Format Data Jumlah Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 762
Tabel 574. Format Data Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah/*Drop Out* SMA/SMK/SLB berdasarkan Kabupaten/Kota 763
Tabel 575. Format Data Jumlah anak usia 4 - 18 Tahun penyandang disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Status Ekonomi dan Kabupaten/Kota 765
Tabel 576. Format Data Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Pendidik berdasarkan Satuan Pendidikan 766
Tabel 577. Format Data Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Rombongan Belajar berdasarkan Satuan pendidikan 768
Tabel 578. Format Data Rasio Rombongan Belajar pada SMA, SMK,SLB terhadap Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan 769

Tabel 579. Format Data Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK/SLB berdasarkan Satuan pendidikan 770
Tabel 580. Format Data Daftar Lembaga yang mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Keahlian untuk SMK 771
Tabel 581. Format Data Jumlah Ruang Kelas pada SMA dan SMK berdasarkan Kondisi, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota 773
Tabel 582. Format Data Jumlah Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan Khusus..... 774
Tabel 583. Format Data Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota 775
Tabel 584. Format Data Jumlah SMA Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota 776
Tabel 585. Format Data Status Akreditasi SMA/SMK/SLB Berdasarkan Status sekolah 777
Tabel 586. Format Data Jumlah Lulusan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Sekolah 779
Tabel 587. Format Data Jumlah Lulusan SMK yang bekerja berdasarkan Kabupaten/Kota 780
Tabel 588. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Ritus 781
Tabel 589. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Manuskrip 782
Tabel 590. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Tradisi Lisan 783
Tabel 591. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Adat Istiadat..... 785
Tabel 592. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Seni 786
Tabel 593. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Bahasa 788
Tabel 594. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Pengetahuan Tradisional 789
Tabel 595. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Teknologi Tradisional 790
Tabel 596. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Olah Raga Tradisional 791
Tabel 597. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Permainan Rakyat ... 793
Tabel 598. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Indikasi Geografis.... 794
Tabel 599. Format Data Daftar Cagar Budaya Provinsi NTB 795
Tabel 600. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Angka Partisipasi Provinsi... 796
Tabel 601. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi 797
Tabel 602. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Provinsi 799
Tabel 603. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kejuruan Provinsi 800
Tabel 604. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan Numerasi Provinsi 802
Tabel 605. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Provinsi 804
Tabel 606. Format Data Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi 806
Tabel 607. Format Data Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Jenis Bantuan 807

Tabel 608. Format Data Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Kabupaten/Kota 808
Tabel 609. Format Data Jumlah Pengaduan Konsumen yang Difasilitasi berdasarkan Kabupaten/Kota 809
Tabel 610. Format Data Jumlah Produk Unggulan yang dipromosikan di NTB *Mall* berdasarkan Kategori Produk 810
Tabel 611. Format Data Jumlah UKM yang bermitra di NTB *Mall* berdasarkan Kabupaten/Kota 811
Tabel 612. Format Data Komoditi Barang dan Jasa yang diawasi Peredarannya 812
Tabel 613. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir 813
Tabel 614. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas 814
Tabel 615. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan 815
Tabel 616. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan 816
Tabel 617. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang 817
Tabel 618. Format Data Perkembangan Harga Rata-rata Bahan Pokok berdasarkan Komoditas 818
Tabel 619. Format Data Perkembangan Harga Rata-rata Barang Strategis (Penting) yang dipantau berdasarkan Jenis Barang 819
Tabel 620. Format Data Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dengan Penerbitan SKA berdasarkan Tambang-Non Tambang 820
Tabel 621. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir 821
Tabel 622. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas 822
Tabel 623. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan 823
Tabel 624. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan 824
Tabel 625. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang 825
Tabel 626. Format Data Daftar Pasar Tradisional/Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota .. 826
Tabel 627. Format Data Daftar Pelaksanaan Pasar Lelang 828
Tabel 628. Format Data Daftar Pelaksanaan Pasar Murah 829
Tabel 629. Format Data Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) berdasarkan Provinsi se-Indonesia 830
Tabel 630. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Provinsi NTB 831
Tabel 631. Format Data Panjang Ruas Jalan Provinsi yang sudah memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Kabupaten/Kota 833
Tabel 632. Format Data Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota 834

Tabel 633. Format Data Daftar pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan 835
Tabel 634. Format Data Daftar pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan 836
Tabel 635. Format Data Daftar Bandar Udara (Luas, Lokasi/Koordinat, Kategori) 837
Tabel 636. Format Data Bongkar Muat Bagasi melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 838
Tabel 637. Format Data Bongkar Muat Kargo melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 839
Tabel 638. Format Data Jumlah Penumpang melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 840
Tabel 639. Format Data Jumlah Pesawat melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) 841
Tabel 640. Format Data Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB berdasarkan Jenis Komoditi 843
Tabel 641. Format Data Bongkar Muat Hewan melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB 844
Tabel 642. Format Data Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB 845
Tabel 643. Format Data Jumlah Kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano 846
Tabel 644. Format Data Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano 847
Tabel 645. Format Data Jumlah Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano 848
Tabel 646. Format Data Daftar Rute Angkutan Laut di Provinsi NTB 849
Tabel 647. Format Data Jumlah Kendaraan melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB 850
Tabel 648. Format Data Jumlah Penumpang melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB 851
Tabel 649. Format Data Jumlah Kendaraan yang memperpanjang Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) 853
Tabel 650. Format Data Daftar Rute/Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 854
Tabel 651. Format Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 854
Tabel 652. Format Data Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota 856
Tabel 653. Format Data Daftar Permohonan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 857
Tabel 654. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Terfasilitasi Sertifikasi Halal 858
Tabel 655. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang terlatih dalam Meningkatkan Mutu Kemasan 860
Tabel 656. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek 861
Tabel 657. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Wirausaha Baru (WUB) 862
Tabel 658. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 864
Tabel 659. Format Data Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi NTB 865

Tabel 660. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan Cabang Industri dan Kabupaten/Kota (Klasifikasi Cabang Industri Sesuai Permenperin) 867
Tabel 661. Format Data Jumlah Industri Kecil berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota 868
Tabel 662. Format Data Jumlah Industri Mikro berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota 870
Tabel 663. Format Data Jumlah Koleksi Perpustakaan berdasarkan Klasifikasi Subyek DDC 871
Tabel 664. Format Data Jumlah Alih Media Koleksi Perpustakaan berdasarkan Jenis 873
Tabel 665. Format Data Jumlah Karya Cetak Karya Rekam Koleksi Deposit Daerah berdasarkan Jenis 874
Tabel 666. Format Data Jumlah Kunjungan Perpustakaan berdasarkan Jenis Layanan 875
Tabel 667. Format Data Jumlah Anggota Perpustakaan berdasarkan Jenis Keanggotaan. 876
Tabel 668. Format Data Jumlah Pos dan Mobil Perpustakaan Keliling 877
Tabel 669. Format Data Daftar Perpustakaan Terakreditasi di NTB..... 879
Tabel 670. Format Data Jumlah Arsip berdasarkan Jenis 880
Tabel 671. Format Data Jumlah Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) Koleksi Perpustakaan 882
Tabel 672. Format Data Daftar *Record Center* berdasarkan Perangkat Daerah 883
Tabel 673. Format Data Daftar Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial berdasarkan Desa/Kelurahan 884
Tabel 674. Format Data Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) berdasarkan Provinsi se-Indonesia 885
Tabel 675. Format Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) berdasarkan Provinsi se-Indonesia 886
Tabel 676. Format Data Komponen Pembentuk Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 888
Tabel 677. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 889
Tabel 678. Format Data Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota .. 890
Tabel 679. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi berdasarkan Kabupaten/Kota..... 893
Tabel 680. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jagung berdasarkan Kabupaten/Kota..... 895
Tabel 681. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Mangga berdasarkan Kabupaten/Kota 897
Tabel 682. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Manggis berdasarkan Kabupaten/Kota 899
Tabel 683. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pisang berdasarkan Kabupaten/Kota 901
Tabel 684. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Durian berdasarkan Kabupaten/Kota 902
Tabel 685. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Rambutan berdasarkan Kabupaten/Kota 905
Tabel 686. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nangka berdasarkan Kabupaten/Kota 907

Tabel 687. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nanas berdasarkan Kabupaten/Kota....909
Tabel 688. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pepaya berdasarkan Kabupaten/Kota....911
Tabel 689. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Merah berdasarkan Kabupaten/Kota....913
Tabel 690. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Besar berdasarkan Kabupaten/Kota....915
Tabel 691. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Rawit berdasarkan Kabupaten/Kota....917
Tabel 692. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Putih berdasarkan Kabupaten/Kota....919
Tabel 693. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tomat berdasarkan Kabupaten/Kota....921
Tabel 694. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kentang berdasarkan Kabupaten/Kota....922
Tabel 695. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kubis berdasarkan Kabupaten/Kota....924
Tabel 696. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Buncis berdasarkan Kabupaten/Kota....925
Tabel 697. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Tanah berdasarkan Kabupaten/Kota....927
Tabel 698. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Kayu berdasarkan Kabupaten/Kota....929
Tabel 699. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Jalar berdasarkan Kabupaten/Kota....931
Tabel 700. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Hijau berdasarkan Kabupaten/Kota....933
Tabel 701. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kelapa berdasarkan Kabupaten/Kota....935
Tabel 702. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Robusta berdasarkan Kabupaten/Kota....936
Tabel 703. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Arabika berdasarkan Kabupaten/Kota....938
Tabel 704. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jambu Mete berdasarkan Kabupaten/Kota....939
Tabel 705. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kakao berdasarkan Kabupaten/Kota....941
Tabel 706. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota....942
Tabel 707. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Virginia berdasarkan Kabupaten/Kota....944
Tabel 708. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tebu berdasarkan Kabupaten/Kota....945
Tabel 709. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Asam berdasarkan Kabupaten/Kota....947

Tabel 710. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lada berdasarkan Kabupaten/Kota 948
Tabel 711. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kemiri berdasarkan Kabupaten/Kota 950
Tabel 712. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Aren berdasarkan Kabupaten/Kota 951
Tabel 713. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lontar berdasarkan Kabupaten/Kota 953
Tabel 714. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jarak Pagar berdasarkan Kabupaten/Kota 954
Tabel 715. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cengkeh berdasarkan Kabupaten/Kota 956
Tabel 716. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kapuk berdasarkan Kabupaten/Kota 957
Tabel 717. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Vanili berdasarkan Kabupaten/Kota 959
Tabel 718. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Wijen berdasarkan Kabupaten/Kota 960
Tabel 719. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Pinang berdasarkan Kabupaten/Kota 962
Tabel 720. Format Data Produksi dan Luas Panen Aglonema berdasarkan Kabupaten/Kota 963
Tabel 721. Format Data Produksi dan Luas Panen Anthurium Bunga berdasarkan Kabupaten/Kota 965
Tabel 722. Format Data Produksi dan Luas Panen Krisan berdasarkan Kabupaten/Kota . 966
Tabel 723. Format Data Produksi dan Luas Panen Mawar berdasarkan Kabupaten/Kota. 967
Tabel 724. Format Data Produksi dan Luas Panen Melati berdasarkan Kabupaten/Kota . 969
Tabel 725. Format Data Produksi dan Luas Panen Palem berdasarkan Kabupaten/Kota . 970
Tabel 726. Format Data Produksi dan Luas Panen Jahe berdasarkan Kabupaten/Kota 971
Tabel 727. Format Data Produksi dan Luas Panen Laos/Lengkuas berdasarkan Kabupaten/Kota 973
Tabel 728. Format Data Produksi dan Luas Panen Kunyit berdasarkan Kabupaten/Kota . 974
Tabel 729. Format Data Produksi dan Luas Panen Temukunci berdasarkan Kabupaten/Kota 976
Tabel 730. Format Data Produksi dan Luas Panen Lempuyang berdasarkan Kabupaten/Kota 977
Tabel 731. Format Data Luas Lahan Pertanian berdasarkan Jenis Pengairan dan Kabupaten/Kota 978
Tabel 732. Format Data Luas Pertanaman yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota 979
Tabel 733. Format Data Luas Pertanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota 981
Tabel 734. Format Data Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Kelas dan Kabupaten/Kota 982
Tabel 735. Format Data Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Pembinaan berdasarkan Kabupaten/Kota 983

Tabel 736. Format Data Jumlah Bantuan Alat Mesin Pertanian berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota 984
Tabel 737. Format Data Jumlah Target dan Realisasi Pupuk Subsidi berdasarkan Kabupaten/Kota 986
Tabel 738. Format Data Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota 987
Tabel 739. Format Data Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota 988
Tabel 740. Format Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Status Kerawanan Bencana dan Potensi Relokasi Daerah 990
Tabel 741. Format Data Jumlah Rumah Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Status Ekonomi dan Kepemilikan Rumah 992
Tabel 742. Format Data Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding) berdasarkan Kabupaten/Kota ... 995
Tabel 743. Format Data Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan jenis bukti kepemilikan lahan bangunan tempat tinggal berupa sertifikat berdasarkan Kabupaten/Kota 996
Tabel 744. Format Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin berdasarkan Desa/Kelurahan 998
Tabel 745. Format Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan 999
Tabel 746. Format Data Jumlah Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Kabupaten/Kota 1001
Tabel 747. Format Data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Desa/Kelurahan 1002
Tabel 748. Format Data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan 1004
Tabel 749. Format Data Jumlah Kawasan Permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) berdasarkan Desa/Kelurahan 1005
Tabel 750. Format Data Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 1007
Tabel 751. Format Data Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Provinsi 1008
Tabel 752. Format Data Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi 1009
Tabel 753. Format Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 1011
Tabel 754. Format Data Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha) 1013
Tabel 755. Format Data Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi 1014
Tabel 756. Format Data Populasi Ternak berdasarkan Jenis Ternak 1016
Tabel 757. Format Data Populasi Unggas berdasarkan Jenis Unggas 1017
Tabel 758. Format Data Populasi Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak, Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 1018
Tabel 759. Format Data Jumlah Pemotongan Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak ... 1020
Tabel 760. Format Data Populasi Ayam Buras berdasarkan Kabupaten/Kota 1021

Tabel 761. Format Data Populasi Ayam Petelur berdasarkan Kabupaten/Kota.....1022
Tabel 762. Format Data Populasi Ayam Ras Pedaging berdasarkan Kabupaten/Kota 1023
Tabel 763. Format Data Populasi Babi berdasarkan Kabupaten/Kota 1024
Tabel 764. Format Data Populasi Domba berdasarkan Kabupaten/Kota 1025
Tabel 765. Format Data Populasi Itik berdasarkan Kabupaten/Kota 1026
Tabel 766. Format Data Populasi Itik Manila berdasarkan Kabupaten/Kota 1027
Tabel 767. Format Data Populasi Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota 1028
Tabel 768. Format Data Populasi Kelinci berdasarkan Kabupaten/Kota 1029
Tabel 769. Format Data Populasi Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota 1029
Tabel 770. Format Data Populasi Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota 1031
Tabel 771. Format Data Populasi Merpati berdasarkan Kabupaten/Kota 1032
Tabel 772. Format Data Populasi Puyuh berdasarkan Kabupaten/Kota 1033
Tabel 773. Format Data Populasi Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota.....1034
Tabel 774. Format Data Pemotongan Babi berdasarkan Kabupaten/Kota.....1035
Tabel 775. Format Data Pemotongan Domba berdasarkan Kabupaten/Kota 1036
Tabel 776. Format Data Pemotongan Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota 1037
Tabel 777. Format Data Pemotongan Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota.....1038
Tabel 778. Format Data Pemotongan Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota.....1039
Tabel 779. Format Data Pemotongan Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota.....1040
Tabel 780. Format Data Jumlah Kasus Hewan Tertular PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota 1041
Tabel 781. Format Data Persentase Penurunan perkembangan Ternak yang Terinfeksi PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota.....1042
Tabel 782. Format Data Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota.....1043
Tabel 783. Format Data Produksi Telur Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota.....1044
Tabel 784. Format Data Jumlah Ternak Potong dan Bibit yang dikirim ke Luar Daerah berdasarkan Jenis Ternak 1045
Tabel 785. Format Data Jumlah Ternak dan Hasil Ternak yang masuk ke dalam Daerah berdasarkan Komoditas 1046
Tabel 786. Format Data Jumlah Kelompok Ternak yang dibina berdasarkan Komoditas dan Kabupaten/Kota 1047
Tabel 787. Format Data Jumlah UKM Produk Peternakan yang dibina berdasarkan Kabupaten/Kota.....1048
Tabel 788. Format Data Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Peternakan berdasarkan Jenis Sarana dan Kabupaten/Kota 1049
Tabel 789. Format Data Nilai Tukar Petani Peternakan 1050
Tabel 790. Format Data Daftar Kelompok Tani Ternak (KTT) berbasis Korporasi 1050
Tabel 791. Format Data Jumlah Sapi Inseminasi Buatan berdasarkan Kabupaten/Kota..1052
Tabel 792. Format Data Jumlah Ternak yang di-Vaksinasi berdasarkan Jenis Vaksin dan Kabupaten/Kota.....1053
Tabel 793. Format Data Jumlah *Day Old Chicken* (DOC) yang didistribusikan berdasarkan Kabupaten/Kota 1054

Tabel 794. Format Data Unit Usaha yang Memiliki Sertifikasi NKV 1055
Tabel 795. Format Data Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Peternakan Berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota 1056
Tabel 796. Format Data Jumlah Tenaga Lapang Bidang Peternakan Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Kabupaten/Kota 1057
Tabel 797. Format Data Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT/Sembako berdasarkan Kabupaten/Kota..... 1059
Tabel 798. Format Data Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program PKH berdasarkan Kabupaten/Kota..... 1060
Tabel 799. Format Data Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Kabupaten/Kota 1062
Tabel 800. Format Data Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 1063
Tabel 801. Format Data Jumlah Keluarga dan Individu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Kabupaten/Kota 1064
Tabel 802. Format Data Jumlah Wanita Penerima Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” berdasarkan Jenis Rehabilitasi dan Kabupaten/Kota..... 1065
Tabel 803. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota..... 1067
Tabel 804. Format Data Jumlah Anak Asuh pada Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1068
Tabel 805. Format Data Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Mandalika” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1069
Tabel 806. Format Data Jumlah Anak Penerima Perlindungan pada PPSPAPPD “Sasambo Matupa” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1070
Tabel 807. Format Data Jumlah Disabilitas Penerima Pemberdayaan pada PPSPAPPD “Sasambo Matupa” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1072
Tabel 808. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya “Madani” berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1073
Tabel 809. Format Data Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota..... 1075
Tabel 810. Format Data Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras “Muthmainnah” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota..... 1076
Tabel 811. Format Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis 1077
Tabel 812. Format Data Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Dalam Panti Dan/Atau Lembaga Baik Milik Pemerintah Maupun Masyarakat 1080
Tabel 813. Format Data Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Luar Panti Dan/Atau Lembaga 1083

Tabel 814. Format Data Rekapitulasi Estimasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1085
Tabel 815. Format Data dan Rekapitulasi Jumlah Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) 1087
Tabel 816. Format Data dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi 1088
Tabel 817. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Hasil Uji Kompetensi dan Lembaga Pelatihan Kerja 1090
Tabel 818. Format Data Jumlah Pencari Kerja, Pencari Kerja yang ditempatkan dan Jumlah Lowongan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota 1092
Tabel 819. Format Data Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 1093
Tabel 820. Format Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota 1094
Tabel 821. Format Data Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin 1096
Tabel 822. Format Data Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin 1097
Tabel 823. Format Data Jumlah Kantor pusat dan Cabang PPTKIS berdasarkan Kabupaten/Kota 1098
Tabel 824. Format Data Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Terakreditasi berdasarkan Kabupaten/Kota 1099
Tabel 825. Format Data Jumlah Perusahaan yang memiliki Sarana Hubungan Industrial berdasarkan Sektor dan Kabupaten/Kota 1100
Tabel 826. Format Data Daftar Perusahaan yang memiliki Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 1101
Tabel 827. Format Data Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota 1102
Tabel 828. Format Data Besaran Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota 1103
Tabel 829. Format Data Jumlah Perusahan yang sudah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota 1104
Tabel 830. Format Data Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota 1105
Tabel 831. Format Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin 1106
Tabel 832. Format Data Jumlah Penduduk yang Bekerja 1107
Variabel **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 833. Format Data Penerimaan remitansi PMI melalui Bank Indonesia dan Pos Indonesia 1108
Tabel 834. Format Data Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama seminggu menurut kabupaten/kota (Penduduk Usia Kerja) 1109
Tabel 835. Format Data Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Status Bekerja (Bekerja dan Pengangguran) dan Kabupaten/Kota 1111
Tabel 836. Format Data Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 1113
Tabel 837. Format Data Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Bekerja 1114
Tabel 838. Format Data Jumlah LPKS yang ada dan sudah terakreditasi 1116

Tabel 839. Format Data Jumlah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah) 1117
Tabel 840. Format Data Jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah) 1118
Tabel 841. Format Data Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Kategori Bekerja (Penuh Waktu, Paruh Waktu, Setengah Pengangguran) 1119
Tabel 842. Format Data Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin 1120
Tabel 843. Format Data Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama 1121
Tabel 844. Format Data Persentase TPT berdasarkan Daerah (Perkotaan, Pedesaan) 1122
Tabel 845. Format Data Persentase TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut jenis kelamin 1123
Tabel 846. Format Data Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal berdasarkan pekerjaan utama 1124
Tabel 847. Format Data Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal berdasarkan tingkat pendidikan dan Kabupaten/Kota 1125
Tabel 848. Format Data Rata-rata upah yang diterima buruh/karyawan dalam sebulan menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota 1126
Tabel 849. Format Data Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota . 1127
Tabel 850. Format Data Jumlah peserta pemagangan dalam negeri berdasarkan Kabupaten/Kota 1128
Tabel 851. Format Data Jumlah peserta pemagangan luar negeri berdasarkan Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota 1129
Tabel 852. Format Data Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Zona Integritas (ZI) 1131
Tabel 853. Format Data Jumlah Pengaduan Masyarakat berdasarkan Media Aduan 1132
Tabel 854. Format Data Nilai SAKIP berdasarkan Perangkat Daerah 1133
Tabel 855. Format Data Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Perangkat Daerah 1134
Tabel 856. Format Data *Average Length of Stay* (ALOS) 1135
Tabel 857. Format Data *Bed Occupation Rate* (BOR) 1136
Tabel 858. Format Data *Bed Turn Over* (BTO) 1137
Tabel 859. Format Data *Turn Over Interval* (TOI) 1138
Tabel 860. Format Data *Gross Death Rate* (GDR) 1139
Tabel 861. Format Data *Net Death Rate* (NDR) 1141
Tabel 862. Format Data Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) 1142
Tabel 863. Format Data Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) dan Cara Pembayaran 1143
Tabel 864. Format Data Daftar 10 Besar Penyakit berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) per Triwulan 1145
Tabel 865. Format Data Jumlah SDM Kesehatan berdasarkan Status Kepegawaian (ASN, Non-ASN) dan Jenis SDM Kesehatan 1146

Tabel 866. Format Data Jumlah Pasien Pelayanan Pasung 1148
Tabel 867. Format Data Jumlah Pasien Pelayanan Terapi NAPZA 1149
Tabel 868. Format Data Pelayanan Konseling dan Tes HIV/AIDS 1150
Tabel 869. Format Data Peserta Tes HIV/AIDS Terkonfirmasi Positif.....1151
Tabel 870. Format Data Daftar Produk Hukum Daerah NTB yang mengandung sanksi untuk ditegakkan 1153
Tabel 871. Format Data Cakupan Penegakan Hukum Peraturan Daerah 1154
Tabel 872. Format Data Jumlah Pengamanan berdasarkan Jenisnya.....1155
Tabel 873. Format Data Jumlah Satlinmas berdasarkan Kabupaten/Kota.....1156
Tabel 874. Format Data Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi NTB.....1157
Tabel 875. Format Data Jumlah Anggota Satpol PP berdasarkan Status (ASN, Non-ASN) dan Kabupaten/Kota 1159
Tabel 876. Format Data Daftar Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Serta Aset Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada 1160
Tabel 877. Format Data Rekapitulasi Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada.....1161
Tabel 878. Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada, Sesuai Kriteria yang Ditentukan 1162
Tabel 879. Format Data Daftar Nama Anggota DPRD berdasarkan Jenis Kelamin, Partai Politik dan Dapil.....1164
Tabel 880. Format Data Daftar Perda Inisiasi DPRD.....1166
Tabel 881. Format Data Daftar Kegiatan *Hearing* dan Audiensi yang diterima DPRD.....1167

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Pemerintah Provinsi NTB berupaya membangun sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Mengacu pada RPJPN, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, memuat visi NTB Emas 2045, yaitu NTB Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan, dan Sejahtera. Tata kelola data yang berkualitas menjadi kunci melaksanakan amanat RPJPN dan RPJPD di Provinsi NTB. Data dan informasi yang valid, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mutakhir menjadi elemen krusial dalam keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB.

Tata kelola data ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menjadi arah kebijakan nasional untuk dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah. Penyusunan buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini merupakan langkah yang sangat penting untuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Selanjutnya, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data berkualitas untuk pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Tata kelola data yang berkualitas akan mendukung implementasi konsep transformasi dalam

perencanaan pembangunan daerah, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola dalam pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah berbasis data menjadi fondasi utama untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berhasil menyusun dan menerbitkan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025. Kunci utamanya adalah pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Metadata yang disusun ini menjadi landasan teknis dalam pengelolaan data, memperkuat akuntabilitas, transparansi, integrasi, sinergitas, perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah berbasis bukti di Provinsi NTB.

Dalam tata kelola data pemerintah yang sejalan dengan Satu Data Indonesia (SDI), produsen data melaksanakan proses tata kelola data berdasarkan metadata. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, metadata menjadi kunci untuk mengurangi risiko duplikasi data kegiatan statistik. Metadata juga sangat membantu untuk memudahkan dalam pengelolaan data dan penggunaan data. Secara definisi, mengacu pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, metadata statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Metadata memiliki peran penting dalam penguatan NTB Satu Data untuk mendukung implementasi perencanaan pembangunan berbasis data dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan Provinsi NTB. Metadata juga berperan penting untuk meningkatkan interoperabilitas data dengan membantu menyelaraskan struktur dan definisi data antar perangkat daerah. Metadata juga menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya, bagi pemangku kepentingan, metadata akan sangat membantu dalam perencanaan dan pembangunan daerah untuk memahami konteks, dan cakupan data yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Metadata dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data daerah untuk menjamin kualitas dan konsistensi data sebagai bentuk akuntabilitas data.

Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dan fondasi yang kuat bagi seluruh pihak dalam membangun tata kelola data yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi pembangunan daerah di Provinsi NTB yang kita cintai ini. Penyusunan buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis dan upaya nyata untuk memperkuat ekosistem data daerah yang berdaya guna, inklusif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan NTB Satu Data. Harapannya, proses perencanaan pembangunan daerah dapat menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan menjamin pembangunan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi NTB.

1.2. Tujuan

Penyusunan buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kualitas tata kelola data Pemerintah Provinsi NTB sebagai bagian dari implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI) untuk memberikan deskripsi dan gambaran pengelompokan data, informasi indikator, dan acuan penentuan indikator pembangunan Provinsi NTB Tahun 2025
2) Menyediakan metadata terstandar dan berkualitas untuk semua *dataset* yang menjadi elemen data yang mudah dipahami dan diakses oleh semua pemangku kepentingan
3) Menjadi acuan bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola dan mengevaluasi data sektoral sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas perangkat daerah pada Tahun 2025.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Data Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 100-3-3.1-201 Tahun 2025 Tentang Penetapan Daftar Data Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
2) Deskripsi metadata yang meliputi elemen-elemen terkait nama data, definisi, satuan, periode waktu, perangkat daerah sebagai produsen data, instansi pembina data, dan format penyimpanan data.

3) Pedoman teknis metadata Satu Data Indonesia, standar data BPS dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional, dan regulasi sektoral spesifik yang telah memiliki metadata dari Kementerian/Lembaga yang telah dipublikasikan.
4) Data sektoral yang berkontribusi pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah di Provinsi NTB.

1.4. Metodologi

Penyusunan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Inventarisasi Data

   Inventarisasi data bertujuan untuk pengumpulan daftar data dari seluruh perangkat daerah dan regulasi/kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, melalui lokakarya/*workshop* dan analisis dokumen.

2) Standarisasi Metadata

   Penyesuaian dengan format metadata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Keputusan Kepala BPS Nomor 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional, dan regulasi sektoral spesifik yang telah memiliki metadata dari Kementerian/Lembaga yang telah dipublikasikan.

3) Validasi Data

   Validasi data bertujuan untuk melakukan verifikasi metadata oleh perangkat daerah guna menjamin kesesuaian dan akurasi data dan informasi sektoral.

4) Penyusunan Dokumen

   Penyusunan dokumen metadata dalam bentuk buku dengan sistematika yang terstruktur dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

1.5. Sistematika

Buku Metadata – NTB Satu Data Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

   Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika dalam memahami konsep dan substansi metadata untuk daftar data daerah Provinsi NTB tahun 2025.

2) Bab II Metadata NTB Satu Data

   Bab II Metadata NTB Satu Data memuat metadata Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung implementasi NTB Satu Data.

3) Bab III Penutup

   Bab III Penutup memuat rencana implementasi metadata dalam proses tata kelola data untuk mewujudkan NTB Satu Data di Provinsi NTB.

BAB II
METADATA
NTB SATU DATA

BAB II

METADATA NTB SATU DATA

1.6. Metadata Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

1) Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : Realisasi Pelaksanaan Program
Definisi : Besaran nilai dan persentase realisasi anggaran program/kegiatan terhadap total anggaran yang telah dialokasikan dalam DPA APBD per perangkat daerah
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 1. Format Data Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA APBD Provinsi NTB berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-

Pagu Anggaran	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuh kan atau dapat belanjakan.	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Anggaran	Nilai anggaran yang telah dibelanjakan oleh perangkat daerah dalam interval waktu tertentu	-	Nilai	Rupiah
Persentase Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran dibagi dengan Pagu Anggaran dikali 100%	-	Persentase	Persen
Persentase Realisasi Fisik	Realisasi fisik dibagi dengan koefisien anggaran dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun Realisasi APBD	-	-	-
Triwulan	Triwulan Realisasi APBD 1. Triwulan I merupakan Total Realisasi Bulan Januari-Maret 2. Triwulan II merupakan Akumulasi Total Realisasi Bulan Januari-Juni 3. Triwulan III merupakan Akumulasi Total Realisasi Bulan Januari-September 4. Triwulan IV merupakan Akumulasi Total Realisasi Bulan Januari-Desember	1. Triwulan I 2. Triwulan II 3. Triwulan III 4. Triwulan IV	-	-

1.7. Metadata Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah

1) Jumlah Pegawai yang terlayani Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Layanan

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil
Definisi : Jumlah pegawai yang telah menerima layanan administrasi kepegawaian berdasarkan jenis layanan.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 2. Format Data Jumlah Pegawai yang terlayani Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Layanan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Layanan	-	-	-	-
Jumlah Pegawai	Seluruh pegawai di suatu instansi atau organisasi, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Non PNS, atau pegawai kontrak. Administrasi Kepegawaian memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh urusan kepegawaian, mulai dari rekrutmen,	-	Total	Orang

	pengelolaan data, pengembangan karier, hingga pensiun.			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Dokumen

Konsep : [K01650] Perencanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembangunan
Definisi : Jumlah dokumen resmi yang disusun dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan administrasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 3. Format Data Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB berdasarkan Jenis Dokumen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Dokumen	-	-	-	-
Jumlah Dokumen	Jumlah berbagai jenis dokumen yang digunakan untuk menyusun, mengelola, dan melacak kegiatan perencanaan, baik di tingkat pemerintah, lembaga, atau organisasi.	-	Total	Dokumen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Daftar Pelayanan Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Konsep : Pelayanan Protokoler
Definisi : Jumlah kegiatan protokoler yang telah dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan.
Ukuran : Total
Satuan : Pelayanan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 4. Format Data Daftar Pelayanan Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Daftar Pelayanan Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mencakup serangkaian kegiatan yang mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai dengan kedudukan mereka. Pelayanan ini memastikan bahwa acara-acara resmi dan kunjungan tamu berjalan dengan tertib dan sesuai dengan standar protokol yang berlaku.	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

1.8. Metadata Biro Hukum Sekretariat Daerah

1) Daftar Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Konsep : Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur

Definisi : Peraturan Daerah: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. (Sumber: UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Peraturan Gubernur: Peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan. (Sumber: Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah).

Ukuran : -

Satuan : -

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Biro Hukum Sekretariat Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 5. Format Data Daftar Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Klasifikasi	Klasifikasi Produk Hukum	1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Gubernur	-	-

Nomor Registrasi Produk Hukum	Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. (Sumber: Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)	-	-	-
Judul Produk Hukum	Nama Produk Hukum	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi

Konsep : [K00401] Dokumen Hukum
Definisi : Banyaknya Produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang kemudian melalui proses fasilitasi dan evaluasi oleh lembaga atau badan yang memiliki otoritas terkait.
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Hukum Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 6. Format Data Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Fasilitasi Perda	Jumlah fasilitasi Perda kabupaten/ kota yang telah difasilitasi dan dievaluasi oleh pemerintah provinsi.	-	Total	Dokumen
Jumlah Fasilitasi Perbup/Perwali	Jumlah fasilitasi Perbup/Perwali kabupaten/kota yang telah difasilitasi dan dievaluasi oleh pemerintah provinsi.	-	Total	Dokumen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Penanganan

Konsep : [K00220] Bantuan Hukum
Definisi : Banyaknya fasilitasi bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi NTB dalam hal penyelesaian masalah hukum.
Ukuran : Total
Satuan : Perkara
Metode Perhitungan : Jumlah fasilitasi bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi NTB.
Sumber Data/Publikasi : Biro Hukum Sekretariat Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 7. Format Data Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Penanganan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Penanganan	Jenis Fasilitasi bantuan hukum yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam hal penyelesaian masalah hukum.	1. Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi Dan HAM 2. Penanganan Masalah Hukum (Litigasi)	-	-
Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum	Banyaknya fasilitasi bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi NTB dalam hal penyelesaian masalah hukum	-	Total	Perkara
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Jenis

Konsep : [K00401] Dokumen Hukum
Definisi : Banyaknya Produk Hukum yang dilakukan proses harmonisasi/penyelarasan dengan Kementerian Hukum agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, asas hukum, dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Hukum Sekretariat Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 8. Format Data Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Jenis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Produk Hukum yang diharmonisasi	Nama Produk hukum yang dilakukan proses harmonisasi/penyelarasan dengan Kementerian Hukum agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, asas hukum, dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakpastian hukum	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Daftar Re-regulasi atau De-regulasi Perundang-undangan berdasarkan Hasil Reviu

Konsep : [K00401] Dokumen Hukum
Definisi : Re-gulasi: proses revisi atau penyesuaian kembali suatu peraturan perundang2an yang sudah ada.
De-Regulasi: proses penghapusan atau pengurangan regulasi yang dianggap tidak diperlukan.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Hukum Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 9. Format Data Daftar Re-regulasi atau De-regulasi Perundang-undangan berdasarkan Hasil Reviu

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Produk Hukum	Nama Produk hukum yang di re-regulasi dan di de-regulasi	-	-	-
Rekomendasi	Muatan rekomendasi yang tertuang di dalam Laporan Akhir dari Kementerian Hukum dan HAM RI	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Daftar ASN sebagai Perancang Peraturan Undang-undang berdasarkan Instansi dan Jabatan

Konsep : Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan,

Definisi : Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. (Sumber: PermenPANRB Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan)

Ukuran : -

Satuan : -

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Biro Hukum Sekretariat Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 10. Format Data Jumlah ASN sebagai Perancang Peraturan Undang-undang berdasarkan Instansi dan Jabatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Instansi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Nama Pejabat	Nama Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
NIP	Nomor Induk Pegawai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
Jabatan	Jabatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
Pangkat/Golongan	Pangkat/Golongan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	1. Pembina Utama(IV/e) 2. Pembina Utama Madya(IV/d) 3. Pembina Utama Muda(IV/c) 4. Pembina Tingkat I(IV/b) 5. Pembina(IV/a) 6. Penata Tingkat I(III/d) 7. Penata(III/c) 8. Penata Muda Tingkat I(III/b) 9. Penata Muda(III/a) 10. Pengatur Tingkat I(II/d) 11. Pengatur(II/c) 12. Pengatur Muda Tingkat I(II/b) 13. Pengatur Muda(II/a) 14. Juru Tingkat I(I/d) 15. Juru(I/c)	-	-

		16. Juru Muda Tingkat I(I/b) 17. Juru Muda(I/a)		
Nomor SK	Nomor SK Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
Tahun SK	Tahun penyajian data	-	-	-

2.4. Metadata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

1) Daftar Peserta MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : MTQ Tingkat Provinsi
Definisi : Daftar orang yang mengikuti kompetisi berdasarkan cabang perlombaan pada ajang MTQ tingkat Provinsi
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 11. Format Data Daftar Peserta MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	Asal peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Nama Peserta	Nama peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Provinsi	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran	-	-

		5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran 7. Cabang Tafsir Al-Quran 8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran		
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Daftar Juara MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : MTQ Tingkat Provinsi
Definisi : Peserta yang meraih peringkat juara (1, 2, atau 3) atau penghargaan khusus dalam berbagai cabang perlombaan pada ajang MTQ tingkat Provinsi
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 12. Format Data Daftar Juara MTQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	Asal peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-

Nama Peserta	Nama peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Provinsi	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran 7. Cabang Tafsir Al-Quran 8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran	-	-
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Nilai	Nilai yang diperoleh peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Juara	Juara yang diperoleh peserta MTQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Daftar Peserta MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : MTQ Tingkat Nasional
Definisi : Daftar orang yang mengikuti kompetisi berdasarkan cabang perlombaan pada ajang MTQ tingkat Nasional
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 13. Format Data Daftar Peserta MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	Asal peserta MTQ Tingkat Nasional	-	-	-
Nama Peserta	Nama peserta MTQ Tingkat Nasional	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Nasional	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran	-	-

		7. Cabang Tafsir Al-Quran 8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran		
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Nasional	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Daftar Juara MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : MTQ Tingkat Nasional
Definisi : Peserta yang meraih peringkat juara (1, 2, atau 3) atau penghargaan khusus dalam berbagai cabang perlombaan pada ajang MTQ tingkat Nasional
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 14. Format Data Daftar Juara MTQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/ Kota	Asal peserta MTQ Tingkat Nasional	-	-	-

Nama Peserta	Nama peserta MTQ Tingkat Nasional	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Nasional	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran 7. Cabang Tafsir Al-Quran 8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran	-	-
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta MTQ Tingkat Nasional	-	Total	Poin
Nilai	Nilai yang diperoleh peserta MTQ Tingkat Nasional	-	-	-
Juara	Juara yang diperoleh peserta MTQ Tingkat Nasional	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Daftar Peserta STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : STQ Tingkat Provinsi
Definisi : Daftar orang yang terdaftar secara resmi dan berpartisipasi dalam berbagai cabang perlombaan pada ajang STQ tingkat Provinsi
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 15. Format Data Daftar Peserta STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	Asal peserta STQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Nama Peserta	Nama peserta STQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Provinsi	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran	-	-

		7. Cabang Tafsir Al-Quran 8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran		
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Daftar Juara STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : STQ Tingkat Provinsi
Definisi : Peserta yang memperoleh peringkat 1, 2, atau 3 dalam cabang perlombaan pada STQ tingkat Provinsi
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 16. Format Data Daftar Juara STQ Tingkat Provinsi berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	Asal peserta STQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Nama Peserta	Nama peserta STQ Tingkat Provinsi	-	-	-

Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Provinsi	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran 7. Cabang Tafsir Al-Quran 8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran	-	-
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Provinsi	-	Total	Poin
Nilai	Nilai yang diperoleh peserta STQ Tingkat Provinsi	-	-	-
Juara	Juara yang diperoleh peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Daftar Peserta STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : STQ Tingkat Nasional
Definisi : Daftar orang yang mewakili provinsi (berdasarkan hasil seleksi tingkat provinsi) berdasarkan cabang perlombaan dalam ajang STQ tingkat nasional.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 17. Format Data Daftar Peserta STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	Asal peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-
Nama Peserta	Nama peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Nasional	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran 7. Cabang Tafsir Al-Quran	-	-

		8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran		
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Daftar Juara STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : STQ Tingkat Nasional
Definisi : Peserta yang memperoleh peringkat 1, 2, atau 3 dalam cabang perlombaan pada STQ tingkat nasional
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 18. Format Data Daftar Juara STQ Tingkat Nasional berdasarkan Cabang Perlombaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	Asal peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-

Nama Peserta	Nama peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Perlombaan	Cabang perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Nasional	1. Cabang Fahmil Al-Quran 2. Cabang Fahmil Quran 3. Cabang Kaligrafi Al-Quran 4. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 5. Cabang Qiraat Al-Quran 6. Cabang Syarhil Al-Quran 7. Cabang Tafsir Al-Quran 8. Cabang Tahfidz Al-Quran 9. Cabang Tartil Al-Quran 10. Cabang Tilawah Al-Quran	-	-
Golongan Perlombaan	Golongan perlombaan yang diikuti peserta STQ Tingkat Nasional	-	Total	Poin
Nilai	Nilai yang diperoleh peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-
Juara	Juara yang diperoleh peserta STQ Tingkat Nasional	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.5. Metadata Biro Organisasi Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Konsep : [K00614] Instansi Pemerintah, [K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Definisi : Skor atau predikat yang diperoleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KemenPANRB
Tautan Publikasi Sumber Data : https://1data.menpan.go.id/

Tabel 19. Format Data Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diperoleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPANRB			

Predikat	Predikat yang didapatkan berdasarkan nilai SAKIP: 1. Predikat AA (Sangat Memuaskan, nilai > 90-100) 2. Predikat A (Memuaskan, nilai > 80-90) 3. Predikat BB (Sangat Baik, nilai > 70 – 80) 4. Predikat B (Baik, nilai > 60-70) 5. Predikat CC (Cukup/Memadai, nilai > 50-60) 6. Predikat C (Kurang, nilai > 30-50) 7. Predikat D (Sangat Kurang, nilai > 0-30)	1. Predikat AA 2. Predikat A 3. Predikat BB 4. Predikat B 5. Predikat CC 6. Predikat C 7. Predikat D		
Tahun	Tahun penyajian data			

2) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Konsep : [K00614] Instansi Pemerintah, [K01860] Reformasi Birokrasi (RB), [K01576] Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Definisi : Skor atau predikat yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KemenPANRB
Tautan Publikasi Sumber Data : https://1data.menpan.go.id/

Tabel 20. Format Data Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai RB	Skor atau predikat yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan reformasi birokrasi oleh KemenPANRB			
Kategori	Kategori yang didapatkan berdasarkan nilai RB yang diperoleh 1. Predikat AA (Sangat Memuaskan, nilai > 90-100) 2. Predikat A (Memuaskan, nilai > 80-90) 3. Predikat BB (Sangat Baik, nilai > 70 – 80) 4. Predikat B (Baik, nilai > 60-70) 5. Predikat CC (Cukup/Memadai, nilai > 50-60) 6. Predikat C (Kurang, nilai > 30-50) 7. Predikat D (Sangat Kurang, nilai > 0-30)	1. Predikat AA 2. Predikat A 3. Predikat BB 4. Predikat B 5. Predikat CC 6. Predikat C 7. Predikat D		
Tahun	Tahun penyajian data			

3) Nilai Komponen Pembentuk Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Konsep : [K00614] Instansi Pemerintah, [K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Definisi : Skor yang diperoleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan komponen
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KemenPANRB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 21. Format Data Nilai Komponen Pembentuk Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Komponen Penilaian	Komponen pembentuk Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
Bobot	Bobot penilaian Komponen pembentuk Nilai SAKIP	-	-	-

Nilai Komponen Pembentuk SAKIP	Nilai masing-masing Komponen pembentuk Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Nilai Komponen Pembentuk Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Konsep : [K00614] Instansi Pemerintah, [K01860] Reformasi Birokrasi (RB), [K01576] Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Definisi : Skor yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan komponen
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KemenPANRB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 22. Format Data Nilai Komponen Pembentuk Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Komponen Penilaian	Komponen pembentuk Nilai RB Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB	1. RB General 2. RB Tematik		
Bobot	Bobot penilaian Komponen pembentuk Nilai RB	-	-	-
Nilai Komponen Pembentuk RB	Nilai masing-masing Komponen pembentuk Nilai RB Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Daftar Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB/Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTB

Konsep : [K00614] Instansi Pemerintah
Definisi : Daftar nama organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang mencakup Dinas, Badan, Biro, dan Rumah Sakit
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Organisasi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 23. Format Data Daftar Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB/Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Perangkat Daerah	-	Sesuai Lampiran 1		
Kategori	-	1. Bagian 2. Bidang 3. Lainnya 4. Unit Pelaksana Teknis Badan 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas	-	-
Sumber	Regulasi terkait nama Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB/Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui SIMASKOT berdasarkan Perangkat Daerah dan Jenis Layanan Publik

Konsep : [K01368] Pelayanan Publik
Definisi : Penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan beberapa indikator, seperti prosedur, waktu, biaya, dan kompetensi petugas melalui platform SIMASKOT berdasarkan OPD dan Jenis Pelayanan
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Organisasi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 24. Format Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui SIMASKOT berdasarkan Perangkat Daerah dan Jenis Layanan Publik

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Perangkat Daerah	-	Sesuai Lampiran 1	-	-
Rerata Tahunan IKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada perangkat daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB ada masing-masing Perangkat Daerah	-	Indeks	-
Kategori	Kategori yang didapatkan berdasarkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada masing-masing Perangkat Daerah	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Nilai Evaluasi Unit Pelayanan Publik (UPP) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : [K01368] Pelayanan Publik
Definisi : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Sedangkan Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP. (Sumber Data: PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik)
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin

Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KemenPANRB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 25. Format Data Nilai Evaluasi Unit Pelayanan Publik (UPP) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Perangkat Daerah	-	Sesuai Lampiran 1	-	-
Nilai IPP	Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	-	Indeks	-

Kategori	Kategori yang didapatkan berdasarkan nilai IPP yang diperoleh: 1. Predikat A (Pelayanan Prima, nilai 4,51-5,00) 2. Predikat A– (Sangat Baik, nilai 4,01-4,50) 3. Predikat B (Baik, nilai 3,51-4,00) 4. Predikat B– (Baik/Dengan Catatan, nilai 3,01-3,50) 5. Predikat C (Cukup, nilai 2,51-3,00) 6. Predikat C– (Cukup/Dengan Catatan, nilai 2,01-2,50) 7. Predikat D (Prioritas Pembinaan, nilai 1,51-2,00) 8. Predikat E (Prioritas Pembinaan, nilai 1,01-1,50 9. Predikat F (Prioritas Pembinaan, nilai 0-1,00)	1. Predikat A 2. Predikat A– 3. Predikat B 4. Predikat B– 5. Predikat C 6. Predikat C– 7. Predikat D 8. Predikat E 9. Predikat F	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Daftar Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan peta proses bisnis

Konsep : [K00614] Instansi Pemerintah, Proses Bisnis Perangkat Daerah

Definisi : Jumlah perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah mengimplementasikan tata kelola organisasi sesuai dengan standar dan ketentuan peta proses bisnis yang ditetapkan.
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. (Sumber Data: Pergub NTB

Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 26. Format Data Daftar Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan peta proses bisnis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Perangkat Daerah	-	Sesuai Lampiran 1		
Sesuai Probis	Status perangkat daerah terkait kesesuaian dengan ketentuan peta proses bisnis	1. Ya 2. Tidak	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Daftar Perangkat Daerah berdasarkan Jenis Layanan dengan variabel Kriteria Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Konsep : [K01368] Pelayanan Publik
Definisi : Daftar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik beserta 6 aspek yang menjadi kriteria Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Ukuran : -

Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 27. Format Data Daftar Perangkat Daerah berdasarkan Jenis Layanan dengan variabel Kriteria Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Perangkat Daerah	-	Sesuai Lampiran 1		
Nama Pelayanan Publik	Nama Pelayanan Publik pada masing-masing Perangkat Daerah.	-	-	-
Kebijakan Pelayanan	Ketersediaan kebijakan pelayanan	1. Standar Pelayanan 2. Maklumat Pelayanan 3. Survei Kepuasan Masyarakat	-	-
Profesionalisme SDM	Ketersediaan SDM yang khusus bertugas pada pelayanan publik	1. Terdapat Petugas Khusus 2. Tidak terdapat Petugas Khusus	-	-
Sarpras	Ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Pelayanan Publik	1. Sarpras Layak 2. Sarpras Tidak Layak	-	-
SIPP	Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	1. SIPPP elektronik 2. SIPP non elektronik 3. Kepemilikan situs 4. Pemutakhiran data	-	-
Konsultasi dan Pengaduan	Ketersediaan ruang konsultan dan pengaduan untuk Pelayanan Publik	1. Ya 2. Tidak	-	-

Inovasi Pelayanan	Adanya inovasi pelayanan publik	1. Ya 2. Tidak	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.6. Metadata Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

1) Daftar Nama Pulau berdasarkan Status Huni

Konsep : Pulau Status Huni
Definisi : Daftar data yang mengelompokkan pulau-pulau di suatu wilayah menurut status hunian atau keberadaan penduduknya.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 28. Format Data Daftar Nama Pulau berdasarkan Status Huni

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Pulau	Daftar nama pulau	-	-	-
Kategori Pulau	Jenis pulau	1. Pulau Berpenghuni 2. Pulau Tak berpenghuni	-	-
Luas Pulau	Luas daerah pulau	-	Luas	Hektar

Koordinat Lintang	-	-	-	-
Koordinat Bujur	-	-	-	-

2) Daftar Kerja Sama Pemprov NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lain, Swasta dan Luar Negeri berdasarkan Status Naskah Kerja Sama

Konsep : Kerja Sama
Definisi : Kumpulan informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi lain, pihak swasta, dan luar negeri.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 29. Format Data Daftar Kerja sama Pemprov NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lain, Swasta dan Luar Negeri berdasarkan Status Naskah Kerja sama

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Pemerintah Daerah	-	Pemerintah Provinsi NTB	-	-
Mitra Kerja Sama	Mitra kerja sama Pemerintah Provinsi NTB	-	-	-
Kategori Kerja sama	-	1. KSDD	-	-

		2. KSDPK		
Judul Kerja sama	Judul kerja sama antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota	-	-	-
Nomor Kerja sama	Nomor dokumen kerja sama antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota	-	-	-
Tanggal Penetapan Kerja sama	Tanggal penetapan kerja sama antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota	-	-	-
Jangka Waktu	Jangka waktu kerja sama	-	-	-
Judul PKS	Judul perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Instansi tertentu	-	-	-
Nomor PKS	Nomor dokumen kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Instansi tertentu	-	-	-
Tanggal PKS	Tanggal penetapan kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Instansi tertentu	-	-	-
Urusan Pemerintah yang Dikerja samakan	Bidang urusan kerja sama antar pemerintah atau antara pemerintah dengan instansi	-	-	-
Status Pelaksanaan	Status pelaksanaan kerja sama	1. Masih Berjalan 2. Selesai	-	-
Manfaat dan Tindak Lanjut	Manfaat dan tindak lanjut kerja sama	-	-	-
Sumber Pembiayaan	Sumber pembiayaan kerja sama	-	-	-

Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Kepemimpinan
Definisi : Daftar nama dan periode jabatan KDH dan Wakil KDH pada level Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 30. Format Data Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jabatan	-	-	-	-
Nama	Nama Kepala Daerah	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Kepala Daerah	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Periode	Periode kepemimpinan Kepala Daerah	-	-	-
Nomor Surat Keputusan	Nomor surat keputusan penetapan kepala daerah	-	-	-

Tanggal Surat Keputusan	Tanggal penetapan surat keputusan	-	-	-

2.7. Metadata Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

1) Rekap pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ berdasarkan Jenis Pengadaan

Konsep : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Definisi : Rekapitulasi data mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai dengan jenis pengadaan, seperti pengadaan barang, jasa konsultasi, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi.
Ukuran : Total
Satuan : Paket
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 31. Format Data Rekap pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ berdasarkan Jenis Pengadaan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Program/Nama Paket	-	-	-	-
Jenis Pengadaan	Jenis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.	1. Pekerjaan Konstruksi 2. Jasa Konsultasi 3. Barang 4. Jasa Lainnya	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-

Pagu Anggaran	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.	-	Total	Rupiah
HPS	Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang selanjutnya disebut Harga Perkiraan sendiri (HPS)	-	Total	Rupiah
Nilai Kontrak/Adendum	Nilai perjanjian tertulis antara pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia.	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Daftar Pengadaan Langsung yang Tercatat Pada Aplikasi SPSE

Konsep : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Definisi : Kumpulan data mengenai pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung yang di-*input* dan dikelola melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 32. Format Data Daftar Pengadaan Langsung yang Tercatat Pada Aplikasi SPSE

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Paket	Nama kegiatan pengadaan barang/jasa.	-	-	-
Kode Paket	kode yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap paket pengadaan barang/jasa yang tercantum pada SPSE	-	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jenis Pengadaan	Jenis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.	-	-	-
Nilai Pagu	[K00103] Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.	-	Total	Rupiah
Nilai Kontrak	Nilai perjanjian tertulis antara pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia.	-	Total	Rupiah
Nilai PDN	Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) pada transaksi pengadaan langsung.	-	Total	Rupiah
Nilai UMK	Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK) pada transaksi pengadaan langsung.	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Daftar Transaksi *E-purchasing* berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : Transaksi *E-purchasing*
Definisi : Kumpulan data transaksi pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui *E-purchasing* oleh perangkat daerah.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 33. Format Data Daftar Transaksi *E-purchasing* berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Total Transaksi e-katalog	Total transaksi pengadaan barang/jasa menggunakan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik	-	Total	Rupiah
PDN	Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) dalam transaksi e-katalog	-	Total	Rupiah
Impor	Nilai Impor dalam transaksi e-katalog	-	Total	Rupiah
Total Transaksi Toko Daring	Total transaksi pengadaan barang/jasa menggunakan metode *e-purchasing* melalui toko daring	-	Total	Rupiah

Total *E-purchasing*	Total transaksi pengadaan barang/jasa menggunakan metode *E-purchasing* (pembelian secara elektronik) melalui sistem Katalog Elektronik;	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Rencana Umum Pengadaan (RUP) SiRUP berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : Dokumen RUP SIRUP
Definisi : Kumpulan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) SiRUP yang memuat rencana pengadaan barang/jasa yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 34. Format Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) SiRUP berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-

Jumlah Paket	Total paket pengadaan terumumkan pada SiRUP	-	-	-
Pagu Pengadaan	Pagu anggaran pengadaan barang/jasa	-	-	-
Pagu terumumkan di SiRUP	Pagu anggaran pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SiRUP	-	-	-
Persentase	Pagu terumumkan di SIRup dibagi Pagu Pengadaan dikali 100	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Definisi : ITKP menggambarkan skor penilaian terhadap sistem, proses, dan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan indikator tata kelola pengadaan yang baik.
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 35. Format Data Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai ITKP	Nilai Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP)	-	Persentase	Persen
Predikat	Predikat yang diperoleh berdasarkan penilaian ITKP: 1. Istimewa: 100 2. Sangat Baik: >90 s.d <100 3. Baik >70 s.d 90 4. Cukup ≥50 s.d 70 5. Kurang <50	1. Istimewa 2. Sangat Baik 3. Baik 4. Cukup 5. Kurang	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Komponen Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Definisi : Nilai atau bobot dari sekumpulan indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang terdiri dari beberapa aspek, seperti kelembagaan, proses pengadaan, kualitas layanan, transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas.
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 36. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Indikator ITKP	Indikator yang menjadi Penilaian dalam ITKP	1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-
Nilai	Nilai setiap Indikator ITKP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : *Monitoring* Center for Prevention (MCP)
Definisi : Nilai MCP Provinsi/Kabupaten/Kota dalam implementasi pencegahan korupsi.
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 37. Format Data *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai MCSP	*Monitoring, Controlling, Surveillance for Pervention* (MCSP) adalah Ukuran capaian kinerja daerah dalam upaya pencegahan korupsi. MCSP digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi dan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam hal pencegahan korupsi.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Komponen (Indikator) Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : *Monitoring Center for Prevention* (MCP)

Definisi : Nilai atau bobot per komponen pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dievaluasi untuk menghasilkan skor MCP secara keseluruhan. Komponen terdiri dari 8 area intervensi strategis yang difokuskan KPK untuk menilai upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah

Ukuran : Indeks

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 38. Format Data Komponen Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Indikator MCSP	Indikator yang menjadi Penilaian dalam MCSP	1. Pelaksanaan Pengadaan 2. Pengendalian PBJ Strategis 3. independensi UKPBJ	-	-
Nilai	Nilai setiap Indikator MCSP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Definisi : Nilai atau bobot dari sekumpulan indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang terdiri dari beberapa aspek, seperti kelembagaan, proses pengadaan, kualitas layanan, transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas.
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 39. Format Data Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Indikator ITKP	Indikator yang menjadi Penilaian dalam ITKP	1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-
Sub Indikator	Sub Indikator yang menjadi Penilaian dalam ITKP	1. SiRUP 2. e-Katalog 3. Non *e-tendering*/non *e-purchasing* 4. *e-tendering* 5. Toko daring 6. e-kontrak	-	-
Nilai	Nilai setiap Sub Indikator penilaian ITKP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/ Kota

Konsep : *Monitoring Center for Prevention* (MCP)
Definisi : Nilai atau bobot per komponen pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dievaluasi untuk menghasilkan skor MCP secara keseluruhan. Komponen terdiri dari 8 area intervensi strategis yang difokuskan KPK untuk menilai upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro PBJ
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 40. Format Data Komponen (Sub-Indikator) Pembentuk *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Indikator MCSP	Indikator yang menjadi Penilaian dalam MCSP	1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-

Sub Indikator	Sub Indikator yang menjadi Penilaian dalam MCSP	1. Transparansi dan TKDN 2. Reviu dan Konsolidasi Pengadaan 3. Kepatuhan PBJ Strategis 4. Reviu HPS 5. Lelang Dini	-	-
Nilai	Nilai setiap Sub Indikator MCSP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.8. Metadata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

1) Nilai Aset, Laba Bersih, Nilai *Capital Expenditure*, dan Nilai Operasional berdasarkan BUMD

Konsep : Nilai Aset, Laba, *Capital Expenditure* dan Operasional BUMD

Definisi : Nilai Aset merupakan total nilai tercatat dari seluruh aset yang dimiliki oleh BUMD, baik yang digunakan dalam operasional maupun yang disimpan untuk investasi jangka panjang.

1. Laba Bersih merujuk pada keuntungan yang diperoleh BUMD setelah dikurangi dengan semua biaya operasional, pajak, bunga, depresiasi, dan biaya lainnya.
2. Nilai *Capital Expenditure* mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memelihara aset tetap yang digunakan dalam operasional BUMD.
3. Nilai Operasional merujuk pada biaya dan pendapatan yang timbul dari kegiatan sehari-hari yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha BUMD.

Ukuran : Total

Satuan : Rupiah

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 41. Format Data Nilai Aset, Laba Bersih, Nilai *Capital Expenditure*, dan Nilai Operasional berdasarkan BUMD

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama BUMD	Nama BUMD di Provinsi NTB	-	-	-
Kategori	Kategori nilai	1. Nilai Aset 2. Laba Bersih	-	-

		3. Nilai *Capital Expenditure* 4. Nilai Operasional		
Nilai	Nilai dari setiap kategori	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum, BPR dan BPRS

Konsep : Dana Pihak Ketiga (DPK)
Definisi : Jumlah dana yang dihimpun oleh bank dari pihak ketiga (yaitu nasabah atau masyarakat) yang disimpan dalam berbagai produk simpanan.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 42. Format Data Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum, BPR dan BPRS

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Bank	Jenis bank	1. Bank Umum 2. BPR 3. BPRS 4. PT. BPR NTB	-	-

Total Dana Pihak Ketiga	Jumlah dana yang dihimpun oleh bank dari pihak ketiga (yaitu nasabah atau masyarakat) yang disimpan dalam berbagai produk simpanan.	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah

Konsep : Penyertaan Modal Pemerintah
Definisi : Jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan daerah (PD) yang tercatat sebagai bagian dari kekayaan negara atau daerah.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 43. Format Data Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Perusda dan BUMD	Nama Perusda dan BUMD	1. PT. Askrida 2. PT. Asuransi Bangun Askrida 3. PT. Bank NTB 4. PT. Bank NTB Syariah 5. PT. BPR NTB 6. PT. Daerah Maju Bersaing	-	-

		7. PT. Gerbang NTB Emas 8. PT. Jamkrida NTB Bersaing		
Sumber Modal	Sumber penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah dan BUMD	1. Swasta 2. Pemerintah Provinsi NTB 3. Pemerintah Kabupaten/kota	-	-
Nilai Modal	Jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan daerah (PD) yang tercatat sebagai bagian dari kekayaan negara atau daerah	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah Kantor Cabang PT BPR NTB Syariah berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00713] Kantor Bank
Definisi : Jumlah kantor cabang merujuk pada total jumlah unit kantor operasional atau cabang yang dimiliki oleh PT BPR NTB Syariah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di provinsi NTB.
Ukuran : Total
Satuan : Kantor
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 44. Format Data Jumlah Kantor Cabang PT BPR NTB Syariah berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kantor Cabang PT BPR NTB	Jumlah kantor cabang merujuk pada total jumlah unit kantor operasional atau cabang yang dimiliki oleh PT BPR NTB Syariah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di provinsi NTB	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah nasabah yang dijamin oleh PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan Jenis Kegiatan

Konsep : Jaminan Nasabah
Definisi : Individu atau badan usaha yang telah mendapatkan layanan penjaminan dari PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan Jenis Kegiatan
Ukuran : Total
Satuan : Nasabah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 45. Format Data Jumlah nasabah yang dijamin oleh PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan Jenis Kegiatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan PT Jamkrida NTB Bersaing	-	-	-
Jenis Kredit	Jenis kredit yang dibiayai oleh PT Jamkrida NTB	1. Kredit Produktif 2. Kredit Konsumtif 3. *Surety Bond*	-	-
Jumlah Nasabah	Individu atau badan usaha yang telah mendapatkan layanan penjaminan dari PT Jamkrida NTB Bersaing berdasarkan jenis kegiatan	-	Total	Nasabah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Kuota Bahan Bakar Tertentu (JBT)
Definisi : Alokasi atau batasan jumlah bahan bakar tertentu yang ditentukan untuk setiap daerah (kabupaten/kota) dalam periode tertentu
Ukuran : Total
Satuan : Liter / Kg
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 46. Format Data Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kuota JBT	Alokasi atau batasan jumlah bahan bakar tertentu yang ditentukan untuk setiap daerah (kabupaten/kota) dalam periode tertentu	-	Total	Liter
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Permigas (JBKP) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Kuota Bahan Bakar Khusus Permigas (JBKP)
Definisi : Alokasi atau batasan jumlah bahan bakar yang diberikan untuk kebutuhan sektor permigas (perminyakan dan gas) di setiap kabupaten/kota.
Ukuran : Total
Satuan : Liter / Kg
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 47. Format Data Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Permigas (JBKP) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kuota JBKP	Alokasi atau batasan jumlah bahan bakar yang diberikan untuk kebutuhan sektor permigas (perminyakan dan gas) di setiap kabupaten/kota	-	Total	Liter
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Kuota LPG 3 kg berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00186] Bahan Bakar
Definisi : Jumlah alokasi gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg yang ditetapkan di tiap kabupaten/kota dalam suatu wilayah.
Ukuran : Total
Satuan : Kg
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Ekonomi
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 48. Format Data Kuota LPG 3 kg berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kuota LPG 3 Kg	Jumlah alokasi gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg yang ditetapkan di tiap kabupaten/kota dalam suatu wilayah	-	Total	Metrik Ton
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.9. Metadata Biro Umum Sekretariat Daerah

1) Jumlah Aset yang dikelola berdasarkan Jenis Aset

Konsep : [K00159] Aset
Definisi : Jumlah dan nilai aset yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB yang dikelompokkan menurut jenis asetnya. Aset dapat berupa aset tetap (tanah, bangunan, kendaraan), aset lancar (kas, piutang), maupun aset lainnya.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 49. Format Data Jumlah Aset yang dikelola berdasarkan Jenis Aset

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Barang	Kode barang/aset	-	-	-
Jenis Barang	Jenis barang/aset	-	-	-
Jenis Aset	-	1. Aset tetap 2. Aset lancar 3. Lainnya	-	-
Cara Perolehan	Cara perolehan aset	1. Pembelian 2. Hibah	-	-
Kondisi	Kondisi terakhir barang/aset	1. Baik 2. Rusak Ringan 3. Rusak Berat	-	-

		4. Lainnya		
Jumlah	Banyaknya barang/aset yang dimiliki	-	-	-
Tahun	Tahun pembelian barang atau hibah barang diberikan	-	-	-

2) Jumlah Surat Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Surat (Masuk dan Keluar)

Konsep : [K01704] Persuratan
Definisi : Jumlah informasi mengenai total surat yang diterima (surat masuk) dan dikirim (surat keluar) oleh Sekretariat Daerah dalam periode tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Surat
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 50. Format Data Jumlah Surat Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Surat (Masuk dan Keluar)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Sumber/Tujuan	Sumber atau tujuan surat	1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah 4. Asisten I 5. Asisten II 6. Asisten III	-	-

		7. Staf Ahli 8. Biro Organisasi 9. Biro Administrasi Pembangunan 10. Biro Pemerintahan 11. Biro Umum 12. Biro Hukum 13. Biro Administrasi Pimpinan 14. Biro Kesra 15. Biro Pengadaan Barang/Jasa 16. Biro Perekonomian		
Kategori Surat	-	1. Surat Masuk 2. Surat Keluar	-	-
Jumlah	Banyaknya surat masuk dan keluar pada bulan tertentu	-	Jumlah	Surat
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

3) Jumlah Arsip Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Arsip

Konsep : Arsip daerah
Definisi : Jumlah arsip yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, dikelompokkan berdasarkan kategori seperti arsip kepegawaian, keuangan, laporan-laporan, dan lainnya.
Ukuran : Total
Satuan : Arsip
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 51. Format Data Jumlah Arsip Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Arsip

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Arsip	Daftar nama arsip	-	-	-
Jenis Arsip	-	1. Pemberkasan 2. Penataan dan penyimpanan	-	-
Jumlah	Banyaknya arsip yang tersimpan	-	Jumlah	Berkas
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

2.10. Metadata Badan Kepegawaian Daerah

1) Jumlah PNS berdasarkan OPD

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 52. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Agama

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Agama
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan agama

Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 53. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Agama

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Agama	Agama/kepercayaan yang dianut oleh PNS sesuai yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan	1. Budha 2. Hindu 3. Islam 4. Katholik 5. Kristen	-	-
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan agama dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Golongan

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Golongan
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan golongan
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 54. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Golongan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Golongan	Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.	1. I/a 2. I/b 3. I/c 4. I/d 5. II/a 6. II/b 7. II/c 8. II/d 9. III/a 10. III/b 11. III/c 12. III/d	-	-

		13. IV/a 14. IV/b 15. IV/c 16. IV/d 17. IV/e		
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan golongan dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jabatan (Fungsional)

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Jabatan Fungsional
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan jabatan fungsional
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 55. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jabatan (fungsional)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jabatan	Kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang PNS pada sebuah lembaga. 1. Jabatan Fungsional Tertentu: Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 2. Jabatan Fungsional Umum: Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 3. Jabatan Struktural: Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.	1. Jabatan Fungsional Tertentu 2. Jabatan Fungsional Umum 3. Jabatan Struktural	-	-

Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan jabatan dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan jenis kelamin
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 56. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin PNS	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan jenis kelamin dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan pendidikan
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 57. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-

Jenjang Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	1. Sekolah Dasar/Sederajad 2. SLTP/Sederajad 3. SLTA/Sederajad 4. Diploma I 5. Diploma II 6. Diploma III/Sarjana Muda 7. Diploma IV 8. S-1/Sarjana 9. S-2/Magister 10. S-3/Doktor	-	-
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan jenjang pendidikan dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Usia

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Usia
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan usia
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 58. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Usia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Usia	Lama waktu hidup pegawai sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. 18-20 tahun 2. 21-25 tahun 3. 26-30 tahun 4. 31-35 tahun 5. 36-40 tahun 6. 41-45 tahun 7. 46-50 tahun 8. 51-55 tahun 9. 56-60 tahun 10. 61-65 tahun	Usia	Tahun
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan agama dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Bulan Pensiun

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Bulan Pensiun
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan bulan pensiun
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 59. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Bulan Pensiun

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Bulan Pensiun	Nama bulan dimana usia pegawai memasuki batas usia pensiun. Umumnya batas usia pensiun pegawai negeri sipil adalah 58 tahun, namun dapat diperpanjang hingga 65 tahun tergantung pada jabatan dan kebutuhan organisasi.	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan agama dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Eselon

Konsep : [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan OPD dan Eselon
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PNS di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan eselon
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 60. Format Data Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Eselon

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Eselon	Tingkatan jabatan struktural dalam pemerintahan yang digunakan untuk mengatur struktur organisasi dan kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. I.b 2. II.a 3. II.b 4. III/a 5. III/b 6. IV/a	-	-
Jumlah PNS	Total PNS berdasarkan perangkat daerah dan jenjang pendidikan dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Jumlah PPPK berdasarkan OPD

Konsep : [K01301] Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan OPD
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PPPK di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 61. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jumlah PPPK	Total PPPK berdasarkan perangkat daerah dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Agama

Konsep : [K01301] Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Agama
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Banyaknya PPPK di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan agama
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 62. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Agama

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Agama	Agama/kepercayaan yang dianut oleh PPPK sesuai yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan	1. Budha 2. Hindu 3. Islam 4. Katholik 5. Kristen	-	-
Jumlah PPPK	Total PPPK berdasarkan perangkat daerah dan agama dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Golongan

Konsep : [K01301] Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Golongan
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Banyaknya PPPK di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan golongan
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 63. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Golongan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Golongan	Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PPPK dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.	1. I 2. II 3. III 4. IV 5. V 6. VI 7. VII 8. VIII 9. IX 10. X 11. XI 12. XII 13. XIII 14. XIV 15. XV 16. XVI 17. XVII	-	-

Jumlah PPPK	Total PPPK berdasarkan perangkat daerah dan golongan dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jabatan (fungsional)

Konsep : [K01301] Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jabatan Fungsional
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PPPK di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan jabatan fungsional
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 64. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jabatan (fungsional)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jabatan	Kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang PPPK pada sebuah lembaga. 1. Jabatan Fungsional Tertentu: Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,	1. Jabatan Fungsional Tertentu 2. Jabatan Fungsional Umum	-	-

	tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 2. Jabatan Fungsional Umum: Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.			
Jumlah PPPK	Total PPPK berdasarkan perangkat daerah dan jabatan dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin

Konsep : [K01301] Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Banyaknya PPPK di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan jenis kelamin
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 65. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin PPPK	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah PPPK	Total PPPK berdasarkan perangkat daerah dan jenis kelamin dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan

Konsep : [K01301] Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PPPK di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan pendidikan
Sumber Data/Publikasi : BKD

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 66. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jenjang Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	1. Sekolah Dasar/Sederajad 2. SLTP/Sederajad 3. SLTA/Sederajad 4. Diploma I 5. Diploma II 6. Diploma III/Sarjana Muda 7. Diploma IV 8. S-1/Sarjana 9. S-2/Magister 10. S-3/Doktor	-	-
Jumlah PPPK	Total PPPK berdasarkan perangkat daerah dan jenjang pendidikan dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

16) Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Usia

Konsep : [K01301] Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi : Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Usia
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Banyaknya PPPK di Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan nama perangkat daerah dan usia
Sumber Data/Publikasi : BKD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 67. Format Data Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Usia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Usia	Lama waktu hidup pegawai sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	1. 18-20 tahun 2. 21-25 tahun 3. 26-30 tahun 4. 31-35 tahun 5. 36-40 tahun 6. 41-45 tahun 7. 46-50 tahun 8. 51-55 tahun 9. 56-60 tahun 10. 61-65 tahun	Usia	Tahun

Jumlah PPPK	Total PPPK berdasarkan perangkat daerah dan usia dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.11. Metadata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Jumlah Kasus Konflik Sosial Berdasarkan Daerah Konflik Kabupaten/Kota

Konsep : [K00962] Konflik Sosial
Definisi : Jumlah kejadian konflik yang terjadi dalam suatu wilayah administratif (kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan jenis konflik
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 68. Format Data Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Jenis Konflik dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah Konflik Sosial	Total konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kabupaten/kota	-	-	Kasus
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Latar Belakang Konflik dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00962] Konflik Sosial
Definisi : Jumlah kejadian konflik yang terjadi dalam suatu wilayah administratif (kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan faktor penyebab atau latar belakang konflik
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 69. Format Data Jumlah Kasus Konflik berdasarkan Latar Belakang Konflik dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Latar Belakang Konflik	Latar belakang konflik, atau penyebab terjadinya konflik, mencakup berbagai faktor yang dapat memicu pertentangan antara individu atau kelompok.	1. Idiologi 2. Politik 3. Ekonomi 4. Sosial 5. Budaya 6. Hankam	-	-
Jumlah Konflik Sosial	Total konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kabupaten/kota	-	-	Kasus

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Masyarakat Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan berdasarkan Status Disabilitas dan Jenis Kelamin

Konsep : Masyarakat
Definisi : Jumlah individu yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dalam suatu periode tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan status disabilitas (disabilitas atau non-disabilitas) dan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 70. Format Data Jumlah Masyarakat Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan berdasarkan Status Disabilitas dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Penyelenggara	-	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-

Status Disabilitas	Status disabilitas peserta sosialisasi Wawasan Kebangsaan, yaitu kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-disabilitas	-	-
Jumlah Peserta	Jumlah individu yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dalam suatu periode tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan status disabilitas (disabilitas atau non-disabilitas) dan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan)	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah TPS Pilpres dan Pileg berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Jumlah tempat pemungutan suara yang disediakan untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dalam suatu desa/kelurahan pada periode pemilu tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KPU
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 71. Format Data Jumlah TPS Pilpres dan Pileg berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-

Status	Status daerah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-
Jumlah TPS Pilpres dan Pileg	Jumlah tempat pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan Legislatif	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah DPT Pilpres dan Pileg berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam suatu wilayah administrasi desa/kelurahan, yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) dan status disabilitas (disabilitas atau non-disabilitas) dalam periode pemilu tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang (Pemilih)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Komisi Pemilihan Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 72. Format Data Jumlah DPT Pilpres dan Pileg berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-

Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status	Status daerah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Daftar Pemilih Tetap	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Status Disabilitas	Status disabilitas Daftar Pemilih Tetap, yaitu kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-disabilitas	-	-
Jumlah DPT	Jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah Surat Suara Pilpres dan Pileg berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Jumlah surat suara yang digunakan dalam proses pemungutan suara pada suatu desa/kelurahan, yang dikelompokkan berdasarkan kategori surat suara, seperti surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai.
Ukuran : Total
Satuan : Lembar (Surat Suara)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Komisi Pemilihan Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 73. Format Data Jumlah Surat Suara Pilpres dan Pileg berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status	Status daerah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-

Kategori Surat Suara	Kategori surat suara	1. Surat Suara Sah 2. Surat Suara Tidak Sah 3. Surat Suara Rusak	-	-
Jumlah Surat Suara	Lembaran kertas untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif	-	Total	Lembar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu Kabupaten/Kota, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Ukuran : Tingkat Partisipasi
Satuan : Persentase (%)
Metode Perhitungan : Partisipasi Pemilih = Jumlah Pengguna Hak Pilih / Jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%
Sumber Data/Publikasi : Komisi Pemilihan Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 74. Format Data Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg	Perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu Kabupaten/Kota, yang dinyatakan dalam bentuk persentase	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Jumlah TPS Pilgub berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Jumlah tempat pemungutan suara yang disediakan dalam suatu desa atau kelurahan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dalam periode pemilu tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Jumlah (TPS)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Komisi Pemilihan Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 75. Format Data Jumlah TPS Pilgub berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status	Status daerah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-
Jumlah TPS Pilgub	Jumlah tempat pemungutan suara pemilihan gubernur	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah DPT Pilgub berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam suatu desa atau kelurahan, yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) dan status disabilitas (disabilitas atau non-disabilitas) dalam periode pemilihan gubernur tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang (Pemilih)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Komisi Pemilihan Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 76. Format Data Jumlah DPT Pilgub berdasarkan Jenis Kelamin, Status Disabilitas dan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status	Status daerah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Daftar Pemilih Tetap	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Status Disabilitas	Status disabilitas Daftar Pemilih Tetap, yaitu kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-disabilitas	-	-

Jumlah DPT	Jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Jumlah Surat Suara Pilgub berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Jumlah surat suara yang digunakan dalam proses pemungutan suara pada suatu desa atau kelurahan, yang dikelompokkan berdasarkan kategori surat suara, seperti surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dalam suatu periode pemilihan gubernur tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Lembar (Surat Suara)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Komisi Pemilihan Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 77. Format Data Jumlah Surat Suara Pilgub berdasarkan Kategori Surat Suara dan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-

Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status	Status daerah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-
Kategori Surat Suara	Kategori surat suara	1. Surat Suara Sah 2. Surat Suara Tidak Sah 3. Surat Suara Rusak	-	-
Jumlah Surat Suara	Lembaran kertas untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur	-	Total	Lembar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pemilihan Umum
Definisi : Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur berdasarkan Kabupaten/Kota, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Ukuran : Tingkat partisipasi
Satuan : Persentase (%)
Metode Perhitungan : Partisipasi Pemilih = Jumlah Pengguna Hak Pilih / Jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%
Sumber Data/Publikasi : Komisi Pemilihan Umum
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 78. Format Data Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg	Perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu Kabupaten/Kota, yang dinyatakan dalam bentuk persentase	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Jumlah Organisasi Masyarakat berdasarkan Bidang Kegiatan dan Status Badan Hukum (SKT dan Badan Hukum)

Konsep : [K01263] Organisasi
Definisi : Jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar dalam suatu wilayah, yang dikelompokkan berdasarkan bidang kegiatan yang dijalankannya serta status legalitasnya, yaitu memiliki SKT atau berbadan hukum
Ukuran : Total
Satuan : Organisasi
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Neger
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 79. Format Data Jumlah Organisasi Masyarakat berdasarkan Bidang Kegiatan dan Status Badan Hukum (SKT dan Badan Hukum)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Bidang Kegiatan	Bidang kegiatan Ormas	1. Demokrasi 2. Ekonomi 3. Hukum 4. Keagamaan 5. Kebudayaan 6. Kepemudaan 7. Kesehatan 8. Ketenagakerjaan 9. Lingkungan Hidup 10. Pemberdayaan Masyarakat 11. Pemberdayaan Perempuan 12. Pendidikan 13. Penelitian Dan Pengembangan 14. Penguatan Kapasitas 15. Perlindungan HAM 16. Profesi 17. Seni Dan Olah Raga 18. Sosial/ Sosial Kemanusiaan 19. Sumber Daya Manusia 20. Hankamtibmas	-	-
Status Badan Hukum	Status badan hukum Ormas	1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 2. Badan Hukum	-	-

Jumlah Ormas	Jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar dalam suatu wilayah, yang dikelompokkan berdasarkan bidang kegiatan yang dijalankannya serta status legalitasnya, yaitu memiliki SKT atau berbadan hukum	-	Total	Organisasi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan Provinsi se-Nasional

Konsep : Demokrasi
Definisi : ukuran yang menggambarkan tingkat demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, yang dihitung berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Badan Pusat Statistik
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 80. Format Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan Provinsi se-Nasional

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-

Nilai IDI	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yaitu indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia	-	Indeks	Poin
Kategori IDI	Kategori nilai IDI	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB

Konsep : Demokrasi

Definisi : Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB adalah tiga aspek utama yang digunakan untuk menilai kualitas demokrasi di Provinsi NTB, yaitu:

1. Kebebasan Sipil – mencerminkan tingkat kebebasan individu dalam menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan kebebasan pers.
2. Hak-hak Politik – menggambarkan tingkat partisipasi politik masyarakat, baik dalam pemilu maupun dalam memengaruhi kebijakan publik.
3. Lembaga Demokrasi – menilai kinerja lembaga-lembaga politik dan pemerintahan dalam menjalankan prinsip demokrasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas.

Ukuran : Nilai

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 81. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen IDI	Komponen pembentuk nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Kebebasan 2. Kesetaraan 3. Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	-
Indikator IDI	Indikator pada komponen pembentuk nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-	-	-
Nilai Indikator	Nilai pada setiap indikator IDI	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.12. Metadata Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Daftar Desa berdasarkan Status (Desa Tangguh Bencana, Belum Desa Tangguh Bencana)

Konsep : Desa Tangguh Bencana
Definisi : Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. (Sumber: PerkaBNPB Nomor 1 Tahun 2012)
Ukuran : -
Satuan : Desa
Metode Perhitungan : Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dinilai berdasarkan aspek berikut ini.
1. Legislasi; 2. Perencanaan; 3. Kelembagaan; 4. Pendanaan; 5. Pengembangan Kapasitas; 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Kategori Nilai: Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60); Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50); Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35) (Sumber: PerkaBNPB Nomor 1 Tahun 2012).
Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 82. Format Data Daftar Desa berdasarkan Status (Desa Tangguh Bencana, Belum Desa Tangguh Bencana)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status	Kondisi desa setelah mendapatkan penilaian berdasarkan beberapa aspek penilaian destana	1. Destana 2. Belum Destana	-	-
Tingkatan Tagana	Klasifikasi destana berdasarkan hasil atau poin penilaian	1. Pratama 2. Madya 3. Utama		
Tahun	Tahun efektif penilaian	-	-	-

2) Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Ketahanan Daerah

Definisi : Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. (Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia RBI 2023). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen *Capacity* dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana. (Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia IRBI 2023).

Ukuran : Indeks

Satuan : -

Metode Perhitungan : Komponen Pembentuk Indeks Ketahanan Daerah metode lama adalah 7 prioritas sebagai berikut (2018-2025):

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Komponen Pembentuk Indeks Ketahanan Daerah metode baru adalah 4 pilar sebagai berikut:

1. Standar Tata Kelola, Kebijakan, dan Perencanaan; 2. Standar Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penguatan Sosial Ekonomi; 3. Standar Perlindungan dan Pemulihan Infrastruktur Kritis; 4. Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana.

(Sumber: Sistem Konversi IKD Baru: Dokumen Pengembangan Indeks Ketahanan Daerah Baru)

Kategori Nilai Indeks Ketahanan Daerah: Rendah (Nilai <= 0,4); Sedang (Nilai 0,4 - 0,8); Tinggi (Nilai 0,8 - 1). (Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia RBI 2023).

Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 83. Format Data Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai Indeks Ketahanan Daerah	Hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun efektif penilaian	-	-	-

3) Komponen Pembentuk (7 Prioritas) Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Indeks Ketahanan Daerah
Definisi	:	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. (Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia RBI 2023). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen Capacity dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana. (Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia IRBI 2023). Komponen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) berdasarkan metode lama terdiri dari 7 prioritas, sedangkan berdasarkan metode baru terdiri dari 4 pilar. (Sumber: Sistem Konversi IKD Baru: Dokumen Pengembangan Indeks Ketahanan Daerah Baru).
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Metode Perhitungan	:	Komponen Pembentuk Indeks Ketahanan Daerah metode lama adalah 7 prioritas sebagai berikut (2018-2025): 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana Komponen Pembentuk Indeks Ketahanan Daerah metode baru adalah 4 pilar sebagai berikut: 1. Standar Tata Kelola, Kebijakan, dan Perencanaan; 2. Standar Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penguatan Sosial Ekonomi; 3. Standar Perlindungan dan Pemulihan Infrastruktur Kritis; 4. Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana. (Sumber: Sistem Konversi IKD Baru: Dokumen Pengembangan Indeks Ketahanan Daerah Baru) Kategori Nilai Indeks Ketahanan Daerah: Rendah (Nilai <= 0,4); Sedang (Nilai 0,4 - 0,8); Tinggi (Nilai 0,8 - 1). (Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia RBI 2023).
Sumber Data/Publikasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 84. Format Data Komponen Pembentuk (7 Prioritas) Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Komponen Pembentuk IKD	Daftar komponen pembentuk IKD metode lama	1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana	-	-
Nilai IKD	Hasil penilaian IKD dari 7 komponen pembentuk IKD	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun efektif penilaian	-	-	-

4) Indeks Risiko Bencana berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Risiko Bencana
Definisi : Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. (Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia IRBI 2023)
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : *Risk* = *Hazard* x (*Vulnerability* / *Capacity*)
Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah
(Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia IRBI 2023).
Sumber Data/Publikasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tautan Publikasi Sumber Data : inarisk.bnpb.go.id/irbi

Tabel 85. Format Data Indeks Risiko Bencana berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nilai Indeks Risiko Bencana	Hasil penilaian Indeks Risiko Bencana	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun efektif penilaian	-	-	-

5) Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Rencana Kontijensi Bencana
Definisi : Rencana Kontijensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontijensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu. (Sumber: Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023).
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : Total dokumen rencana kontijensi bencana yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 86. Format Data Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah yang menangani urusan kebencanaan (BPBD) yang menyusun dokumen rencana kontijensi pada tingkat provinsi	-	-	-

Jenis Dokumen Rencana Kontijensi	Daftar dokumen rencana kontijensi yang disusun berdasarkan jenis bencana	1. Dokumen Renkon Banjir 2. Dokumen Renkon Tsunami 3. Dokumen Renkon Kekeringan 4. Dokumen Renkon Hidrometeorologi 5. Dokumen Renkon Longsor 6. Dokumen Renkon Gempa 7. Dokumen Renkon Gunung Meletus	-	-
Status	-	1. Disusun 2. Belum Tersedia	-	-

6) Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan berdasarkan Jenis dan Kondisi

Konsep : Sarana Prasarana
Definisi : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb.).
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total sarana prasarana yang dimiliki oleh BPBD dalam periode tertentu yang disajikan berdasarkan jenis sarana prasarana dan kondisi sarana prasarana
Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 87. Format Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan berdasarkan Jenis dan Kondisi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Sarana dan Prasarana	Daftar sarana dan prasaran sesuai jenisnya	-	-	-
Kondisi	Keadaan terakhir sarana prasarana	1. Layak 2. Rusak Ringan 3. Rusak Berat 4. Tidak Layak	-	-
Sumber Perolehan	-	1. APBD 2. APBN 3. Hibah 4. Lainnya	-	-
Jumlah Sarana Prasarana	Banyaknya sarana prasarana yang tersedia	-	Total	Unit
Tahun Perolehan	Tahun sarana prasarana diberikan	-	-	-

7) Jumlah Logistik berdasarkan Sumber (APBD, BPBD dll.) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Logistik

Definisi : [K01115] Logistik: Bagian dari rantai pasok (*supply chain*) yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*warehousing*), transportasi (*transportation*),distribusi (*distribution*), dan pelayanan pengantaran (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*).

Ukuran : Total

Satuan : Unit

Metode Perhitungan : Total logistik yang dimiliki oleh BPBD dalam periode tertentu yang disajikan berdasarkan sumber pengadaannya dan Nama Kabupaten/ Kota

Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 88. Format Data Jumlah Logistik berdasarkan Sumber (APBD, BPBD dll.)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Barang	Daftar logistik yang tersedia pada gudang BPBD sesuai jenisnya	-	-	-
Kondisi	Keadaan terakhir logistik	1. Layak 2. Rusak 3. Kadaluwarsa	-	-
Sumber Perolehan	-			
Lokasi	Tempat penyimpanan logistik	1. AB 2. AA	-	-
Jumlah Penerimaan	Banyaknya logistik yang diterima BPBD dari sumber		Total	Sesuai jenis logistik
Jumlah Terdistribusi	Banyaknya logistik yang disalurkan BPBD kepada korban bencana		Total	Sesuai jenis logistik
Sisa	Banyaknya logistik yang masih tersedia di gudang BPBD		Total	Sesuai jenis logistik
Tahun	Tahun data diperoleh	-	-	-

8) Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00255] Bencana
Definisi : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Ukuran : Total
Satuan : Kejadian
Metode Perhitungan : Total kejadian bencana yang terjadi dalam periode tertentu yang disajikan berdasarkan jenis bencana dan Nama Kabupaten/ Kota. Jenis bencana adalah meliputi: 1.Banjir/Banjir Bandang; 2.Gempabumi; 3.Tsunami; 4.Letusan Gunung Api; 5.Kebakaran Hutan dan lahan; 6. Tanah Longsor; 7.Gempa Bumi; 8.Kekeringan; 9.Cuaca Ekstrem; 10. Aksi Teror/Sabotase; 11. Wabah Penyakit (Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia RBI 2023).
Sumber Data/Publikasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tautan Publikasi Sumber Data : https://gis.bnpb.go.id/dibi.bnpb.go.id

Tabel 89. Format Data Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Bencana	Macam-macam bencana yang umumnya terjadi di Indonesia	1. Banjir/Banjir Bandang 2. Tanah Longsor 3. Angin Puting Beliung/Cuaca Ekstrem 4. Kekeringan 5. Kebakaran Hutan dan Lahan 6. Gempa Bumi 7. Tsunami 8. Letusan Gunung Api 9. Kebakaran Permukiman 10. Aksi Teror/Sabotase 11. Wabah Penyakit		
Jumlah	Banyaknya kejadian bencana yang terjadi dalam satu tahun terakhir	-	Total	Kali
Tahun	Tahun kejadian bencana	-	-	-

9) Jumlah Korban Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00975] Korban Bencana

Definisi : Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total korban yang diakibatkan oleh kejadian bencana yang terjadi dalam periode tertentu yang disajikan berdasarkan jenis bencana dan Nama Kabupaten/ Kota. Jenis bencana adalah meliputi: 1.Banjir/Banjir Bandang; 2.Gempabumi; 3.Tsunami; 4.Letusan Gunung Api; 5.Kebakaran Hutan dan

lahan; 6. Tanah Longsor; 7.Gempa Bumi; 8.Kekeringan; 9.Cuaca Ekstrem; 10. Aksi Teror/Sabotase; 11. Wabah Penyakit (Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia RBI 2023).

Sumber Data/Publikasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tautan Publikasi Sumber Data : https://gis.bnpb.go.id/dibi.bnpb.go.id

Tabel 90. Format Data Jumlah Korban Bencana berdasarkan Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Bencana	Macam-macam bencana yang umumnya terjadi di Indonesia	1. Banjir/Banjir Bandang 2. Tanah Longsor 3. Angin Puting Beliung/Cuaca Ekstrem 4. Kekeringan 5. Kebakaran Hutan dan Lahan 6. Gempa Bumi 7. Tsunami 8. Letusan Gunung Api 9. Kebakaran Permukiman 10. Aksi Teror/Sabotase 11. Wabah Penyakit		
Kondisi Korban	Keadaan korban pasca bencana	1. Terdampak 2. Meninggal 3. Luka Berat 4. Luka Ringan		

		5. Mengungsi 6. Hilang		
Jumlah	Banyaknya korban bencana yang terdata dalam satu tahun terakhir	-	Total	Orang
Tahun	Tahun kejadian bencana	-	-	-

10) Jumlah Kerusakan akibat Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00255] Bencana
Definisi : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerusakan akibat bencana adalah kerusakan yang terjadi pada bangunan, fasilitas, dan lingkungan akibat bencana alam atau kejadian darurat.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total kerusakan akibat bencana yang terjadi dalam periode tertentu yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tautan Publikasi Sumber Data : https://gis.bnpb.go.id/dibi.bnpb.go.id

Tabel 91. Format Data Jumlah Kerusakan akibat Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Fasilitas Umum	Macam-macam fasilitas umum yang mengalami kerusakan pasca bencana	1. Rumah rusak berat 2. Rumah rusak sedang 3. Rumah rusak ringan 4. Rumah terendam 5. Fasilitas Pendidikan 6. Fasilitas Kesehatan 7. Fasilitas peribadatan 8. Jembatan 9. Tanggul 10. Bendungan 11. Saluran Irigasi 12. Pabrik 13. Kantor 14. Toko 15. Jalan 16. Sawah 17. Kebun 18. Hutan		
Jumlah	Banyaknya fasilitas umum yang mengalami kerusakan	-	Total	Sesuai jenis fasilitas
Tahun	Tahun kejadian bencana	-	-	-

11) Dokumen Jitupasna dan R3P berdasarkan Kejadian Bencana

Konsep : Jituspasna; R3P

Definisi : Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu. (Sumber: Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017).

Ukuran : Total

Satuan : Dokumen

Metode Perhitungan : Total dokumen Jitupasna dan R3P yang disajikan berdasarkan jenis kejadian bencana

Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 92. Format Data Dokumen Jitupasna dan R3P berdasarkan Kejadian Bencana

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jitupasna	Nama dokumen jitupasna berdasarkan jenis bencana	-	-	-
Lokasi	Lokasi sasaran dokumen	-	-	-
Sumber	Sumber dana penyusunan dokumen	-	-	-

Tahun	Tahun penyusunan dokumen jitupasna	-		

12) Jumlah KK yang terdampak Kekeringan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Korban Bencana
Definisi : Kekeringan adalah berkurangnya persediaan air di bawah normal yang bersifat sementara baik di atmosfer maupun di permukaan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penyebab utama terjadinya kekeringan adalah defisit curah hujan yang terjadi selama periode tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
(Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia RBI 2023)
Ukuran : Total
Satuan : KK
Metode Perhitungan : Total keluarga (KK) yang terdampak bencana kekeringan dalam periode waktu tertentu yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota.
Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 93. Format Data Jumlah KK yang terdampak Kekeringan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kecamatan	Banyaknya kecamatan yang terdampak kekeringan	-	Total	Kecamatan
Jumlah Desa	Banyaknya desa yang terdampak kekeringan	-	Total	Desa
Jumlah Kepala Keluarga	Banyaknya keluarga yang terdampak kekeringan	-	Total	Kepala Keluarga
Jumlah jiwa terdampak	Banyak orang yang terdampak kekeringan	-	Total	Orang

13) Jumlah Pos Pemadam Kebakaran berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00445] Pos Pemadam Kebakaran
Definisi : Fasilitas dalam kawasan industri yang merupakan unit untuk pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total pos pemadam kebakaran yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 94. Format Data Jumlah Pos Pemadam Kebakaran berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Pos Tersedia	Jumlah pos pemadam kebakaran yang tersedia dan berfungsi dalam suatu kabupaten/kota	-	Total	Unit
Pos Minimum	Jumlah minimal kebutuhan pos pemadam Kebakaran dalam suatu kabupaten/kota	-	Total	Unit
Pos Rekomendasi	Jumlah rekomendasi kebutuhan pos pemadam Kebakaran dalam suatu kabupaten/kota	-	Total	Unit
Kesenjangan	Interval pos rekomendasi dengan pos yang tersedia	-	Total	Unit

14) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) berdasarkan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran dan Kabupaten/Kota

Konsep : Tingkat Waktu Tanggap

Definisi : Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) adalah rasio antara kejadian yang tertangani dalam waktu tertentu.
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pendekatan untuk menanggulangi kebakaran dengan memanfaatkan pengelolaan berbasis wilayah. WMK bertujuan untuk meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda.

Ukuran : Total

Satuan : Menit

Metode Perhitungan : Tingkat Waktu Tanggap = Total waktu yang dibutuhkan / Total kejadian yang Tertangani

Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 95. Format Data Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) berdasarkan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pendekatan untuk menanggulangi kebakaran dengan memanfaatkan pengelolaan berbasis wilayah. WMK bertujuan untuk meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda	-	Luas	Km^2
Tingkat Waktu Tanggap	Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) adalah rasio antara kejadian yang tertangani dalam waktu tertentu	-	Rata-rata	menit

15) Jumlah Kasus Kebakaran Pemukiman berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Kasus Kebakaran Pemukiman

Definisi : Kebakaran pemukiman adalah kebakaran yang terjadi di permukiman penduduk. Kebakaran ini dapat menimbulkan kerugian materiil, kerusakan lingkungan, dan korban jiwa.

Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : Total kasus kebakaran pemukiman yang terjadi dalam periode waktu tertentu yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 96. Format Data Jumlah Kasus Kebakaran Pemukiman berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah kejadian	Banyaknya kejadian kebakaran dalam periode tahun tertentu	-	Total	Kali
Tahun	Tahun data diperoleh	-	-	-

16) Daftar Desa Peserta Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana

Konsep : Sosialisasi; [K01901] Risiko Bencana
Definisi : [K01901] Risiko Bencana: Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya.

Ukuran : Total
Satuan : Desa
Metode Perhitungan : Total desa yang mengikuti sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam periode waktu tertentu
Sumber Data/Publikasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 97. Format Data Daftar Desa Peserta Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Tingkatan Tagana	Klasifikasi destana berdasarkan hasil atau poin penilaian	1. Pratama 2. Madya 3. Utama		

2.13. Metadata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1) Jumlah Belanja Daerah berdasarkan Komponen

Konsep : [K00103] Anggaran
Definisi : Jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, yang dikelompokkan sesuai dengan komponen belanja
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 98. Format Data Jumlah Belanja Daerah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Belanja Daerah	Komponen belanja daerah	1. Belanja Modal 2. Belanja Operasional 3. Belanja Tidak Terduga	-	-
Kategori	Kategori	1. Anggaran 2. Realisasi	-	-
Jumlah Belanja Daerah	Jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, dikelompokkan sesuai dengan komponen belanja	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Belanja Operasi berdasarkan Komponen

Konsep : [K00103] Anggaran
Definisi : Jumlah belanja per komponen pada belanja operasi
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 99. Format Data Jumlah Belanja Operasi berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Belanja Operasional	Komponen belanja Operasional	1. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Bunga 4. Belanja Hibah 5. Belanja Pegawai 6. Belanja Subsidi	-	-
Kategori	Kategori	1. Anggaran 2. Realisasi	-	-
Jumlah Belanja Operasional	Jumlah belanja per komponen pada belanja Operasional	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Belanja Modal berdasarkan Komponen

Konsep : [K00103] Anggaran
Definisi : Jumlah belanja per komponen pada belanja modal
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 100. Format Data Jumlah Belanja Modal berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Belanja Modal	Komponen belanja modal	1. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi 2. Belanja Gedung Dan Bangunan 3. Belanja Peralatan dan Mesin 4. Belanja Aset Tetap Lainnya 5. Belanja Aset Lainnya	-	-
Kategori	Kategori	1. Anggaran 2. Realisasi	-	-
Jumlah Belanja Modal	Jumlah belanja per komponen pada belanja modal	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah Transfer Daerah berdasarkan Komponen

Konsep : [K00103] Anggaran
Definisi : Jumlah dana transfer yang diterima pemerintah daerah berdasarkan komponen
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 101. Format Data Jumlah Transfer Daerah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Transfer Daerah	Komponen transfer daerah	1. Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/kota 2. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Kabupaten/kota 3. Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/kota 4. Bantuan Keuangan Ke Desa 5. Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya 6. Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
Kategori	Kategori	1. Anggaran 2. Realisasi	-	-

Jumlah Transfer Daerah	Jumlah dana transfer yang diterima pemerintah daerah berdasarkan komponen	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Pembiayaan Daerah berdasarkan Komponen

Konsep : [K00103] Anggaran
Definisi : Jumlah pembiayaan daerah berdasarkan komponen
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 102. Format Data Jumlah Pembiayaan Daerah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pembiayaan Daerah	Komponen pembiayaan daerah	1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-
Jumlah Pembiayaan Daerah	Jumlah pembiayaan daerah berdasarkan komponen	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

Konsep : [K00103] Anggaran
Definisi : Jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Perda
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 103. Format Data Jumlah APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah APBD	Jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Perda pada provinsi/kabupaten/kota	-	Total	Rupiah
Nomor Penetapan	Nomor Penetapan	-	-	-
Tanggal Penetapan	Tanggal Penetapan	-	-	-

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Konsep : [K00159] Aset
Definisi : Daftar dokumen administratif yang berisi informasi terperinci tentang aset yang dihapus, meliputi nama barang, kode barang, jumlah, nilai perolehan, alasan penghapusan, dan dasar hukum penghapusan.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 104. Format Data Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori	Penghapusan barang milik daerah meliputi: 1. Penghapusan dari DBP/DBKP 2. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah	1. Penghapusan dari DBP/DBKP 2. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah	-	-
Nama Barang	Nama barang milik daerah yang dilakukan penghapusan	-	-	-

Kode Barang	Kode barang milik daerah yang dilakukan penghapusan	-	-	-
Jumlah	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan penghapusan	-	-	-
Nilai Perolehan	Nilai perolehan barang milik daerah yang dilakukan penghapusan	-	-	-
Alasan Penghapusan	Alasan penghapusan barang milik daerah	1. Pemindahtanganan atas barang milik daerah 2. Pemusnahan 3. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 4. Menjalankan ketentuan undang-undang 5. Sebab lain	-	-
Dasar Hukum	Dasar hukum penghapusan barang milik daerah	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Daftar Tanah Milik Daerah yang Disertifikatkan

Konsep : [K00159] Aset
Definisi : Daftar dokumen administratif yang memuat data terperinci tentang tanah-tanah milik daerah yang sudah memiliki sertifikat, meliputi nomor sertifikat, lokasi, luas, status hak, dan tahun sertifikasi.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPKAD

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 105. Format Data Daftar Tanah Milik Daerah yang Disertifikatkan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nomor sertifikat	Nomor sertifikat tanah milik daerah	-	-	-
Lokasi	Lokasi tanah milik daerah	-	-	-
Luas	Luas tanah milik daerah	-	Luas	Ha
Status Hak	Status hak tanah milik daerah	-	-	-
Tahun	Tahun sertifikasi tanah milik daerah	-	-	-

2.14. Metadata Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Jumlah Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen

Konsep : [K01454] Pendapatan Daerah
Definisi : [25010023] Jumlah Pendapatan Daerah: Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh komponen pendapatan daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; Lain-lain Pendapatan Daerah
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 106. Format Data Jumlah Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Daerah	-	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan daerah	-	-
Target Pendapatan Daerah	Nilai masing-masing komponen pendapatan daerah yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Pendapatan Daerah	Nilai masing-masing komponen pendapatan daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah dibagi dengan target masing-masing komponen pendapatan daerah dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah	-	-	-

2) Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Komponen

Konsep : [K01451] Pendapatan Asli Daerah
Definisi : Jumlah dari semua Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang Sah
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 107. Format Data Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Asli Daerah	-	1. Pajak Daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah	-	-
Target PAD	Nilai masing-masing komponen pendapatan asli daerah yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi PAD	Nilai masing-masing komponen pendapatan asli daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Persentase Realisasi PAD	Realisasi masing-masing komponen PAD dibagi dengan target masing-masing komponen PAD dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen pendapatan asli daerah	-	-	-

3) Jumlah Pendapatan Transfer berdasarkan Komponen

Konsep : [K01463] Pendapatan Transfer
Definisi : Jumlah Pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh Komponen pendapatan transfer yang terdiri dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat, terdiri dari: Dana bagi hasil; Dana alokasi umum; Dana alokasi khusus; Dana insentif daerah; Dana insentif fiskal
b. Pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari bantuan keuangan

Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 108. Format Data Jumlah Pendapatan Transfer berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Pendapatan Transfer	-	1. Pendapatan transfer pemerintah pusat 2. Pendapatan transfer antar daerah	-	-
Target Pendapatan Transfer	Nilai masing-masing komponen pendapatan transfer yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Pendapatan Transfer	Nilai masing-masing komponen pendapatan transfer yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Persentase Realisasi Pendapatan Transfer	Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Transfer dibagi dengan target masing-masing komponen Pendapatan Transfer dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen pendapatan transfer	-	-	-

4) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) berdasarkan Komponen

Konsep : Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Definisi : Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang berasal dari selain PAD dan Pendapatan transfer.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari: Pendapatan Hibah; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 109. Format Data Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	1. Pendapatan Hibah 2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3. Bantuan Keuangan	-	-
Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Nilai masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Realisasi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Realisasi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi dengan target masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-

5) Jumlah Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Komponen

Konsep : [K01276] Pajak Daerah
Definisi : Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ukuran : total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh Komponen pendapatan pajak daerah terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Opsen Mineral Logam Bukan Batuan; Pajak Rokok; Pajak Alat Berat
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 110. Format Data Jumlah Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Pajak	-	1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Opsen Mineral Logam Bukan Batuan 6. Pajak Rokok 7. Pajak Alat Berat	-	-
Target Pendapatan Pajak	Nilai masing-masing komponen Pendapatan Pajak yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Pendapatan Pajak	Nilai masing-masing komponen Pendapatan Pajak yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Persentase Realisasi Pendapatan Pajak	Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Pajak dibagi dengan target masing-masing komponen Pendapatan Pajak dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen Pendapatan Pajak	-	-	-

6) Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Komponen

Konsep : [K01898] Retribusi Daerah
Definisi : Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh komponen pendapatan retribusi daerah yang terdiri dari: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perijinan Tertentu
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 111. Format Data Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Retribusi Daerah	-	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perijinan Tertentu	-	-
Target Pendapatan Retribusi Daerah	Nilai masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	Nilai masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah

Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah dibagi dengan target masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-

7) Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDyP) berdasarkan Komponen

Konsep : [K00511] Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Definisi : Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD
Ukuran : total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari masing-masing komponen HPKDyP yang terdiri dari: Bagian Laba atas penyertaan modal BUMN; Bagian Laba atas penyertaan modal BUMD
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 112. Format Data Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDyP) berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Komponen Pendapatan HPKDyP	-	1. Bagian Laba atas penyertaan modal BUMN 2. Bagian Laba atas penyertaan modal BUMD	-	-
Target Pendapatan HPKDyP	Nilai masing-masing komponen Pendapatan HPKDyP yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Pendapatan HPKDyP	Nilai masing-masing komponen Pendapatan HPKDyP yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Persentase Realisasi Pendapatan HPKDyP	Realisasi masing-masing komponen Pendapatan HPKDyP dibagi dengan target masing-masing komponen Pendapatan HPKDyP dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen Pendapatan HPKDyP	-	-	-

8) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan Komponen

Konsep : [K01048] Lain-lain PAD yang Sah

Definisi : Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Ukuran : Total

Satuan : Rupiah

Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh komponen Lain-lain PAD yang Sah
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 113. Format Data Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	-	1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 3. Jasa giro 4. Pendapatan bunga 5. Tuntutan ganti rugi 6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah	-	-
Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Nilai masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Nilai masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah

Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Realisasi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan target masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-

9) Persentase Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Konsep : [K01454] Pendapatan Daerah
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen pendapatan daerah/total pendapatan daerah * 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 114. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Daerah	-	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan Daerah	-	-

Realisasi Pendapatan Daerah	Total pendapatan daerah yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen Pendapatan Daerah	Nilai masing-masing komponen pendapatan daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi pendapatan	-	-	-

10) Persentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Konsep : [K01451] Pendapatan Asli Daerah
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen pendapatan asli daerah/total pendapatan asli daerah * 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 115. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen PAD	-	1. Pajak Daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-

		4. Lain-lain PAD yang sah		
Realisasi PAD	Total pendapatan asli daerah yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen PAD	Nilai masing-masing komponen pendapatan asli daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi	-	-	-

11) Persentase Komponen Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Transfer

Konsep : [K01463] Pendapatan Transfer
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer terhadap total pendapatan transfer
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen pendapatan transfer/total pendapatan tranfer* 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 116. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Transfer

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Transfer	-	1. Pendapatan transfer pemerintah pusat	-	-

		2. Pendapatan transfer antar daerah		
Realisasi Pendapatan Transfer	Total pendapatan transfer yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen Pendapatan Transfer	Nilai masing-masing komponen Pendapatan Transfer yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi Pendapatan Transfer	-	-	-

12) Persentase Komponen LLPD terhadap LLPD

Konsep : Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan daerah yang sah
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah/total Lain-lain pendapatan daerah yang sah * 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 117. Format Data Persentase Komponen LLPD terhadap LLPD

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen LLPD	-	1. Pendapatan Hibah	-	-

		2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3. Bantuan Keuangan		
Realisasi LLPD	Total Lain-lain pendapatan daerah yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen LLPD	Nilai masing-masing komponen Lain-lain pendapatan daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi	-	-	-

13) Persentase Komponen Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Konsep : [K01276] Pajak Daerah
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Retribusi Daerah
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen Pendapatan Pajak /total Pendapatan Pajak * 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 118. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Komponen Pendapatan Pajak	-	1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Opsen Mineral Logam Bukan Batuan 6. Pajak Rokok 7. Pajak Alat Berat	-	-
Realisasi Pendapatan Pajak	Total Pendapatan Pajak yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen Pendapatan Pajak	Nilai masing-masing komponen Pendapatan Pajak yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi Pendapatan Pajak	-	-	-

14) Persentase Komponen Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Retribusi Daerah

Konsep : [K01898] Retribusi Daerah
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen pendapatan retribusi daerah/total pendapatan retribusi daerah * 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 119. Format Data Persentase Komponen Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Retribusi Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Retribusi Daerah	-	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perijinan Tertentu	-	-
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	Total Pendapatan Retribusi Daerah yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen Pendapatan Retribusi Daerah	Nilai masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-

15) Persentase Komponen Pendapatan HPKDyP terhadap Pendapatan HPKDyP

Konsep : [K00511] Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan * 100%

Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 120. Format Data Persentase Komponen Pendapatan HPKDyP terhadap Pendapatan HPKDyP

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan HPKDyP	-	1. Bagian Laba atas penyertaan modal BUMN 2. Bagian Laba atas penyertaan modal BUMD	-	-
Realisasi Pendapatan HPKDyP	Total Pendapatan HPKDyP	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen Pendapatan HPKDyP	Nilai masing-masing komponen Pendapatan HPKDyP	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi Pendapatan HPKDyP	-	-	-

16) Persentase Komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap Lain-lain PAD yang Sah

Konsep : [K01048] Lain-lain PAD yang Sah
Definisi : Besarnya kontribusi masing-masing komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap total Lain-lain PAD yang Sah
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen Lain-lain PAD yang Sah/total Lain-lain PAD yang Sah * 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 121. Format Data Persentase Komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap Lain-lain PAD yang Sah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan LLPAD	-	1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 3. Jasa giro 4. Pendapatan bunga 5. Tuntutan ganti rugi 6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah	-	-
Realisasi Pendapatan LLPAD	Total Pendapatan LLPAD	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Komponen Pendapatan LLPAD	Nilai masing-masing komponen Pendapatan LLPAD	-	Nila	Rupiah
Kontribusi komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi Pendapatan LLPAD	-	-	-

17) Pertumbuhan Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen

Konsep : [K01454] Pendapatan Daerah
Definisi : Perkembangan atau pertumbuhan nilai komponen pendapatan daerah pada periode tertentu terhadap nilai periode sebelumnya.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Pada periode tertentu - Nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Pada periode sebelumnya/Nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Pada periode sebelumnya 100%
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 122. Format Data Pertumbuhan Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komponen Pendapatan Daerah	-	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan Daerah	-	-
Realisasi Komponen Pendapatan Daerah	Nilai masing-masing komponen pendapatan daerah yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Pertumbuhan komponen	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi pendapatan	-	-	-

18) Jumlah Kendaraan yang Melakukan Daftar Ulang PKB Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Kabupaten Kota

Konsep : [K00853] Kendaraan Bermotor
Definisi : Jumlah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah seluruh kendaraan yang melakukan daftar ulang
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 123. Format Data Jumlah Kendaraan yang Melakukan Daftar Ulang PKB Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	
Kelompok Kendaraan		1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4	-	
Jumlah Kendaraan	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang	-	Total	Unit
Nilai PKB	Nilai Pajak Kendaraan Bermotor yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah

Tahun	Tahun perhitungan nilai PKB	-	-	-

19) Jumlah Objek Kendaraan Bermotor yang melakukan Daftar Ulang berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00853] Kendaraan Bermotor
Definisi : Jumlah kendaraan yang melakukan registrasi atau pendaftaran ulang melalui layanan Samsat
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah seluruh kendaraan baik berdasarkan warna plat dan jenis kendaraan untuk semua kabupaten/kota di Provinsi NTB yang sudah melakukan registrasi atau pendaftaran ulang
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 124. Format Data Jumlah Objek Kendaraan Bermotor yang melakukan Daftar Ulang berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	
Warna Plat	-	1. Hitam 2. Kuning 3. Merah	-	

Jenis Kendaraan	-	Sesuai dengan jenis kendaraan yang melakukan daftar ulang	-	-
Jumlah Kendaraan	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang	-	Total	Unit
Tahun	Tahun melakukan daftar ulang	-	-	-

20) Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah BBN berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01276] Pajak Daerah; Pajak Bea Balik Nama.
Definisi : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. BBNKB dibayarkan saat pertama kali mendaftarkan kendaraan bermotor.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total dari seluruh BBNKB pada periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 125. Format Data Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah BBN berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	

Warna Plat	-	1. Hitam 2. Kuning 3. Merah	-	
Jenis Kendaraan	-	Sesuai dengan jenis kendaraan yang melakukan daftar ulang	-	-
Nilai BBN	Nilai pajak Bea Balik Nama, yang merupakan penjumlahan dari BBN I dan BBN II	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun melakukan daftar ulang	-	-	-

21) Jumlah Pendapatan PKB berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01276] Pajak Daerah; Pajak Kendaraan Bermotor.
Definisi : pajak atas kepemilikan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total dari seluruh pajak kendaraan bermotor pada periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 126. Format Data Jumlah Pendapatan PKB berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	
Warna Plat	-	1. Hitam 2. Kuning 3. Merah	-	
Jenis Kendaraan	-	Sesuai dengan jenis kendaraan yang melakukan daftar ulang	-	-
Nilai PKB	Nilai pajak kendaraan bermotor	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun melakukan daftar ulang	-	-	-

22) Jumlah Objek Pajak Baru berdasarkan Kabupaten/Kota (Jumlah Objek Pajak yang Aktif Melakukan Daftar Ulang)

Konsep : Kendaraan Baru
Definisi : Jumlah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang baru didaftarkan.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah seluruh kendaraan baru
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 127. Format Data Jumlah Objek Pajak Baru berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	
Kelompok Kendaraan		1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4	-	
Jumlah Kendaraan	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang	-	Total	Unit
Nilai PKB	Nilai Pajak Kendaraan Bermotor yang dihasilkan	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun perhitungan nilai PKB	-	-	-

23) Nilai Retribusi Daerah berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : [K01898] Retribusi Daerah
Definisi : Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan perangkat daerah.
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Jumlah dari seluruh retribusi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB
Sumber Data/Publikasi : Bappenda NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 128. Format Data Nilai Retribusi Daerah berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Perangkat Daerah	-	Sesuai Lampiran 1	-	-
Target Pendapatan Daerah	Nilai masing-masing komponen pendapatan daerah yang diharapkan/ditargetkan	-	Nilai	Rupiah
Realisasi Pendapatan Daerah	Nilai masing-masing komponen pendapatan daerah yang dihasilkan	-	Nila	Rupiah
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah dibagi dengan target masing-masing komponen pendapatan daerah dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah	-	-	-

2.15. Metadata Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

1) Jumlah dan Persentase ASN yang Bersertifikat Kompetensi berdasarkan Jenis Kompetensi (Teknis, Manajerial, dan Fungsional)

Konsep : [K00147] Aparatur Sipil Negara (ASN); Sertifikasi Kompetensi
Definisi : Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas yang profesional, efektif, dan efisien (Per BKN Nomor 7 Tahun 2020). Jenis Kompetensi: Teknis, Manajerial, Fungsional.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total ASN yang memiliki sertifikat kompetensi yang disajikan berdasarkan jenis kompetensi, yaitu Teknis, Manajerial, Fungsional
Sumber Data/Publikasi : BPSDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 129. Format Data Jumlah dan Persentase ASN yang Bersertifikat Kompetensi berdasarkan Jenis Kompetensi (Teknis, Manajerial, dan Fungsional)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Kompetensi	Program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ASN dalam berbagai bidang, termasuk keterampilan teknis yang spesifik, keterampilan manajemen dan kepemimpinan, serta keterampilan fungsional yang terkait dengan jabatan mereka	1. Kompetensi Teknis 2. Kompetensi Manajerial 3. Kompetensi Fungsional	-	-
Jumlah ASN yang Bersertifikat	Jumlah ASN yang bersertifikat kompetensi berdasarkan jenis kompetensi pada periode tertentu	-	Total	Orang
Jumlah ASN	Jumlah ASN keseluruhan pada periode tertentu	-	Total	Orang
Persentase ASN yang Bersertifikat	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi berdasarkan jenis kompetensi pada periode tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis

Konsep : [K01736] Peserta Pelatihan; [K00952] Kompetensi Teknis

Definisi : Orang yang ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan atau kompetensi. Kompetensi: Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Ukuran : Total

Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi teknis
Sumber Data/Publikasi : BPSDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 130. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	Nama Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan	-	-	-
Peserta Sasaran	Kelompok ASN yang menjadi target utama Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-
Durasi Pelaksanaan	Lama waktu penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	-	Total	Hari
Metode Pelaksanaan	Cara/pendekatan dalam menyampaikan materi Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Klasikal Tatap Muka (in-class training) **2.** Daring (Online) 3. Blended Learning (gabungan daring dan tatap muka)	-	-
Sumber Anggaran	Sumber anggaran pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-

Jumlah Peserta PKT	Jumlah ASN yang menjadi peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial berdasarkan Pemda dan Kategori Manajerial (PKP, PKA, PKN2)

Konsep : Kompetensi Manajerial
Definisi : Pelatihan Kepemimpinan merupakan salah satu pelatihan yang diperuntukkan sebagai pemenuhan kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelatihan Kepemimpinan terdiri dari: 1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP); 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi manajerial yang disajikan berdasarkan jenis pelatihan, yaitu PKP dan PKA
Sumber Data/Publikasi : BPSDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 131. Format Data Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial berdasarkan Pemda dan Kategori Manajerial (PKP, PKA, PKN2)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Pelatihan	Jenis pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial	1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 3. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II)	-	-
Jabatan Sasaran	Kelompok ASN yang menjadi target utama pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial	1. Pengawas (Eselon IV) 2. Administrator (Eselon III) 3. Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	-	-
Jumlah ASN	Jumlah ASN yang menjadi peserta pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan Pemerintah Daerah

Konsep : [K01736] Peserta Pelatihan; [K01346] Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS); Pelatihan Dasar CPNS

Definisi : Orang yang ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan atau kompetensi. Pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang yang diperuntukkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total CPNS yang mengikuti pelatihan dasar CPNS

Sumber Data/Publikasi : BPSDM

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 132. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan Pemerintah Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah CPNS	Jumlah CPNS pada periode tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional

Konsep : Kompetensi Fungsional

Definisi : Kompetensi fungsional adalah kemampuan yang harus dimiliki pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjalankan tugas jabatannya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan PNS yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional (JF) merupakan jabatan karier PNS yang bertugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kategori dan Jenjang JF:

1. JF Keahlian: Ahli Utama; Ahli Madya; Ahli Muda; Ahli Pertama
2. JF Keterampilan: Penyelia; Mahir; Terampil; Pemula

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi fungsional

Sumber Data/Publikasi : BPSDM

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 133. Format Data Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional	Nama Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional yang dilaksanakan	-	-	-

Jenis JFT dan Jenjang Jabatan	Jenis pelatihan dan jenjang jabatan yang menjadi sasaran pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional	-	-	-
Jumlah Peserta	Jumlah ASN yang menjadi peserta pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah Peserta Kegiatan Uji Sertifikasi JFT

Konsep : Sertifikasi JFT

Definisi : Kompetensi fungsional adalah kemampuan yang harus dimiliki pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjalankan tugas jabatannya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan PNS yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional (JF) merupakan jabatan karier PNS yang bertugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kategori dan Jenjang JF:

1. JF Keahlian: Ahli Utama; Ahli Madya; Ahli Muda; Ahli Pertama
2. JF Keterampilan: Penyelia; Mahir; Terampil; Pemula

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total ASN yang mengikuti sertifikasi jabatan fungsional tertentu

Sumber Data/Publikasi : BPSDM

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 134. Format Data Jumlah Peserta Kegiatan Uji Sertifikasi JFT

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Uji Sertifikasi JFT	Nama Kegiatan Uji Sertifikasi JFT yang dilaksanakan	-	-	-
Jenis JFT dan Jenjang Jabatan	Jenis JFT dan jenjang jabatan yang menjadi sasaran Kegiatan Uji Sertifikasi JFT	-	-	-
Jumlah Peserta	Jumlah ASN yang menjadi peserta Kegiatan Uji Sertifikasi JFT	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.16. Metadata Badan Penghubung

1) Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Jenis Kelamin

Konsep : [K01008] Wisata; [K02332] Wisatawan Mancanegara; [K02334] Wisatawan Nusantara.

Definisi : [24510014] Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara: Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial dengan tujuan Anjungan NTB, TMII Jakarta.
[24510015] Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara: Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar dari atau sama dengan 100 kilometer pergi-pulang dengan tujuan Anjungan NTB, TMII Jakarta.

Ukuran : Total

Satuan : Kunjungan

Metode Perhitungan : Total wisatawan Laki-laki Anjungan NTB, TMII Jakarta
Total wisatawan Perempuan Anjungan NTB, TMII Jakarta

Sumber Data/Publikasi : Badan Penghubung

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 135. Format Data Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin wisatawan	1. Laki-laki	-	-

		2. Perempuan		
Jumlah Pengunjung	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	-	Total	Orang
Tahun	Tahun Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB, TMII Jakarta	-	-	-
Bulan	Bulan Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB, TMII Jakarta	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-
Tanggal	Tanggal Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB, TMII Jakarta	-	-	-

2) Jumlah Tamu yang Menginap di Wisma NTB, Jakarta

Konsep : [K00524] Hotel; [K02099] Tamu Hotel.
Definisi : [24510019] Jumlah Tamu Hotel: Banyaknya orang yang menginap dan/atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh Wisma NTB, Jakarta
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total seluruh tamu yang menginap pada Wisma NTB, Jakarta
Sumber Data/Publikasi : Badan Penghubung
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 136. Format Data Jumlah Tamu yang Menginap di Wisma NTB, Jakarta

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Tamu	Sesuai dengan definisi	-	Total	Orang
Tahun	Tahun menginapnya Tamu pada Wisma NTB	-	-	-
Bulan	Bulan menginapnya Tamu pada Wisma NTB	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

3) Jumlah Sarana pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Kelompok dan Jenisnya

Konsep : Anjungan NTB
Definisi : Banyaknya Sarana pada Anjungan NTB, TMII Jakarta yang merupakan sarana untuk memberikan informasi mengenai rumah adat suku bangsa di NTB kepada masyarakat luas, Bangunan dan rumah adat, sekaligus digunakan sebagai tempat pameran dan peragaan berbagai benda sejarah, pakaian adat, peralatan kesenian, hasil kerajinan, dan benda-benda budaya lain yang berasal dari daerah NTB.
Ukuran : Total
Satuan : Set, Buah, Stel
Metode Perhitungan : Total seluruh Sarana masing-masing jenis barang pada Anjungan NTB
Sumber Data/Publikasi : Badan Penghubung
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 137. Format Data Jumlah Sarana pada Anjungan NTB, TMII Jakarta berdasarkan Kelompok dan Jenisnya

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok	Pengelompokan sarana yang tersedia pada Anjungan NTB, TMII Jakarta	-	-	-
Jenis Barang	Jenis barang pada masing-masing kelompok sarana	-	-	-
Jumlah Barang	Banyaknya masing-masing jenis barang	-	Total	Set; Buah; Stel
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Daftar Event yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta

Konsep : Anjungan NTB
Definisi : Daftar Event/Kegiatan yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta berdasarkan waktu pelaksanaan
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Badan Penghubung
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 138. Format Data Daftar Event yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Kegiatan	Nama Event/Kegiatan yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta	Sesuai Nama Event/Kegiatan	-	-
Tempat Kegiatan	Tempat pelaksanaan Event/Kegiatan yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta	Sesuai Tempat pelaksanaan Event/ Kegiatan	-	-
Tahun Pelaksanaan	Tahun pelaksanaan Event/Kegiatan yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta	-	-	-
Bulan Pelaksanaan	Bulan pelaksanaan Event/Kegiatan yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-
Tanggal Pelaksanaan	Tanggal pelaksanaan Event/Kegiatan yang Diikuti oleh Anjungan NTB TMII, Jakarta	-	-	-

2.17. Metadata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB

Konsep : [K00847] Kemiskinan
Definisi : Dokumen perencanaan yang berisi strategi, kebijakan, program, dan langkah-langkah konkret yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di daerahnya
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Bappeda
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 139. Format Data Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Dokumen	Jenis Dokumen yang dipublikasikan	1. Dokumen Perencanaan 2. Dokumen Evaluasi 3. Dokumen SDGs 4. Dokumen Penanggulangan Kemiskinan 5. Dokumen *Roadmap*/Renaksi 6. Dll.	-	-
Tahun Penyusunan	Tahun dokumen tersebut disahkan	-	-	-

Keterangan Dokumen	Penjelasan tambahan mengenai dokumen.	-	-	-
Tautan	Tautan untuk mengunduh dokumen	-	-	-

2) Daftar Laporan Tahunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep : *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Definisi : Kumpulan dokumen yang mencatat hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program SDGs dalam satu tahun.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Bappeda
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 140. Format Data Daftar Laporan Tahunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Dokumen	Jenis Dokumen yang dipublikasikan	1. Dokumen Perencanaan 2. Dokumen Evaluasi 3. Dokumen SDGs 4. Dokumen Penanggulangan Kemiskinan 5. Dokumen *Roadmap*/Renaksi 6. Dll.	-	-
Tahun Penyusunan	Tahun dokumen tersebut disahkan	-	-	-

Keterangan Dokumen	Penjelasan tambahan mengenai dokumen.	-	-	-
Tautan	Tautan untuk mengunduh dokumen	-	-	-

3) Daftar *Roadmap*/Rencana Aksi Daerah Se-Provinsi NTB

Konsep : Rencana Aksi Daerah (RAD)
Definisi : Kumpulan dokumen perencanaan strategis yang mencakup visi, misi, strategi, dan tahapan implementasi kebijakan dalam berbagai sektor di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Bappeda
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 141. Format Data Daftar *Roadmap*/Rencana Aksi Daerah Se-Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Dokumen	Jenis Dokumen yang dipublikasikan	1. Dokumen Perencanaan 2. Dokumen Evaluasi 3. Dokumen SDGs 4. Dokumen Penanggulangan Kemiskinan 5. Dokumen *Roadmap*/Renaksi 6. Dll.	-	-

Tahun Penyusunan	Tahun dokumen tersebut disahkan	-	-	-
Keterangan Dokumen	Penjelasan tambahan mengenai dokumen.	-	-	-
Tautan	Tautan untuk mengunduh dokumen	-	-	-

4) Daftar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)

Konsep : [K01650] Perencanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembangunan
Definisi : Daftar Dokumen Perencanaan Daerah mencakup tiga jenis dokumen utama yang disusun oleh pemerintah daerah yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Bappeda
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 142. Format Data Daftar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Dokumen	Jenis Dokumen yang dipublikasikan	1. RPJPD 2. RPJMD 3. RKPD	-	-
Tahun Penyusunan	Tahun dokumen tersebut disahkan	-	-	-
Keterangan Dokumen	Penjelasan tambahan mengenai dokumen.	-	-	-

Tautan	Tautan untuk mengunduh dokumen	-	-	-

5) Daftar Dokumen Evaluasi Daerah (Evaluasi RPJPD, Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD, Evaluasi Dekon TP, Evaluasi DAK)

Konsep : [K01650] Perencanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembangunan
Definisi : Daftar Dokumen Evaluasi Daerah mencakup dokumen-dokumen yang digunakan untuk menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Bappeda
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 143. Format Data Daftar Dokumen Evaluasi Daerah (Evaluasi RPJPD, Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD, Evaluasi Dekon TP, Evaluasi DAK)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Dokumen	Jenis Dokumen yang dipublikasikan	1. Evaluasi RPJPD 2. Evaluasi RPJMD 3. Evaluasi RKPD 4. Evaluasi Dekon TP 5. Evaluasi DAK	-	-
Tahun Penyusunan	Tahun dokumen tersebut disahkan	-	-	-
Keterangan Dokumen	Penjelasan tambahan mengenai dokumen.	-	-	-
Tautan	Tautan untuk mengunduh dokumen	-	-	-

6) IHK dan Inflasi Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Gabungan

Konsep : [K00501] Harga, Konsumen/Harga Eceran, [K00599] Inflasi

Definisi : IHK: Komponen pembentukan harga inflasi, dimana digunakan sebagai suatu ukuran untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara/daerah. Angka inflasi diperoleh berdasarkan penghitungan Indeks Harga Konsumen yang dinyatakan dalam persen.
Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

Ukuran : Indeks dan Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Inflasi Tahunan = ((indeks harga tahun ini - indeks harga tahun sebelumnya) / indeks harga tahun sebelumnya) x 100

IHK

$$IHK_t = \frac{\sum_{i=1}^{k} \frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}} P_{(t-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

IHK_t	:	Indeks bulan ke–*t*
$P_{0i}\ Q_{0i}$	:	Nilai Konsumsi barang ke–*i* pada tahun dasar
$\frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}} \times 100$	:	Relatif Harga Jenis barang ke–*i* pada bulan ke–*t* dibanding dengan bulan sebelumnya
$P_{(t-1)i}\ Q_{0i}$	:	Nilai Konsumsi barang ke–*i* pada bulan ke *(t–1)*
P_{ti}	:	Harga jenis barang ke–*i* pada bulan berjalan (*t*)
$P_{(t-1)}$	:	Harga jenis barang ke–*i* pada bulan sebelumnya (*t–1*)
k	:	Banyaknya jenis barang paket komoditas

INFLASI

$$INF_t = \frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100$$

dimana:

INF_t : Inflasi (atau deflasi) pada waktu (bulan atau tahun) t

IHK_t : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) t

IHK_{t-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) sebelumnya

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 144. Format Data IHK dan Inflasi Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Gabungan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
IHK	Komponen pembentukan harga inflasi, dimana digunakan sebagai suatu ukuran untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara/daerah.	-	Indeks	Poin
Inflasi	Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

7) Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Konsep : [22010007] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK); [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB), [K01710] Pertumbuhan Ekonomi

Definisi : Perkembangan nilai tambah barang dan jasa pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga konstan.

Ukuran : Tingkat

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : (PDRB atas dasar harga konstan periode t dikurangi PDRB atas dasar harga konstan periode t-1) dibagi PDRB atas dasar harga konstan periode t

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 145. Format Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Lapangan Usaha	17 kategori Lapangan usaha yang merujuk pada ISIC Rev. 4 Tahun 2008.	Sesuai Lampiran 5	-	-
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	Perkembangan nilai tambah barang dan jasa pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga konstan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Konsep : [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB)
Definisi : Persentase kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap total PDRB dalam satu periode tertentu.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 146. Format Data Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Lapangan Usaha	17 kategori Lapangan usaha yang merujuk pada ISIC Rev. 4 Tahun 2008.	Sesuai Lampiran 5	-	-
Distribusi Persentase PDRB ADHB	Persentase kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap total PDRB dalam satu periode tertentu.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Konsep : [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB)
Definisi : Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/ kabupaten/kota), dengan nilai barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Selisih antara nilai *output* produksi dengan biaya antara dalam proses produksi barang dan jasa pada masing-masing kategori lapangan usaha berdasarkan harga konstan 2010.
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 147. Format Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Sub Kategori PDRB	17 kategori Lapangan usaha yang merujuk pada ISIC Rev. 4 Tahun 2008.	Sesuai Lampiran 5	-	-
PDRB ADHK	Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/ kabupaten/kota), dengan nilai barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha	-	Total	Milyar Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Konsep : [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB)
Definisi : Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/ kabupaten/kota), dengan nilai barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu menurut lapangan usaha
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Selisih antara nilai *output* produksi dengan biaya antara dalam proses produksi barang dan jasa pada masing-masing kategori lapangan usaha berdasarkan harga berlaku.
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 148. Format Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Sub Kategori PDRB	17 kategori Lapangan usaha yang merujuk pada ISIC Rev. 4 Tahun 2008.	Sesuai Lampiran 5	-	-
PDRB ADHB	Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/ kabupaten/kota), dengan nilai barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu menurut lapangan usaha	-	Total	Milyar Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [10510013] Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita Setahun yang Disesuaikan; [K01536] Pengeluaran Rumah Tangga

Definisi : Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi setiap anggota rumah tangga selama sebulan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli yang mengacu pada kota rujukan dan tahun rujukan tertentu berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota.

Ukuran : Rata-rata

Satuan : Ribu Rupiah/Orang/Tahun

Metode Perhitungan : Teknis perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan:
1. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita
2. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil)
3. Menghitung Paritas Daya Beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP)
4. Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 149. Format Data Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-

Pengeluaran per Kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	-	Rata-rata	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan PDRB dari Sisi Pengeluaran

Konsep : [22010001] Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB); [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB)

Definisi : Besarnya peranan masing-masing lapangan usaha atau komponen (Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)) dalam perekonomian nasional (Sumber Data: Kepka BPS 846 Tahun 2024 disesuaikan)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha).

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal.

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 150. Format Data Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan PDRB dari Sisi Pengeluaran

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nilai PMTB ADHK	Nilai PMTB Atas Dasar Harga Konstan	-	Nilai	Milyar Rupiah
Nilai PMTB ADHB	Nilai PMTB Atas Dasar Harga Berlaku	-	Nilai	Milyar Rupiah
Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHB	Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHB	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : [K01479] Penduduk Miskin
Definisi : Banyaknya dan persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.
Ukuran : Total, Persentase
Satuan : Ribu Jiwa, Persen
Metode Perhitungan : Jumlah/ Persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 151. Format Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	52	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Penduduk Miskin	Banyaknya dan persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.	-	Total	Ribu Jiwa
Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01536] Pengeluaran Rumah Tangga
Definisi : Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran konsumsi) penduduk secara menyeluruh berdasarkan kabupaten / kota
Ukuran : Rasio
Satuan : -

Metode Perhitungan : Rasio Gini diperoleh dengan 1 dikurangi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i dikalikan dengan penjumlahan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i dan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 152. Format Data Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Gini Rasio	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran konsumsi) penduduk secara menyeluruh berdasarkan kabupaten / kota	-	Rasio	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Garis kemiskinan berdasarkan Klasifikasi Daerah (Perkotaan dan Pedesaan)

Konsep : [K00847] Kemiskinan

Definisi : Nilai rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan berdasarkan wilayah

Ukuran : Nilai

Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Garis Kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM)+ Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 153. Format Data Garis kemiskinan berdasarkan Klasifikasi Daerah (Perkotaan dan Pedesaan)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Daerah	Klasifikasi Daerah	Perkotaan; Pedesaan; Perkotaan + Pedesaan	-	-
Kategori	-	Makanan; Bukan Makanan	-	-
Garis Kemiskinan	Nilai rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan berdasarkan wilayah	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

16) Nilai Capaian SPM berdasarkan Urusan Layanan Dasar

Konsep : Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)
Definisi : Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal)
Ukuran : Persentase

Satuan : Persen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Biro Pemerintahan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 154. Format Data Nilai Capaian SPM berdasarkan Urusan Layanan Dasar

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Bidang /urusan	Bidang /Urusan SPM	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Rakyat 5. Tramtibumlinmas 6. Sosial	-	-
Nilai Indeks SPM	Nilai SPM yang diperoleh	-	Persentase	Persen
Kategori Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM berdasarkan Nilai SPM	1. Tuntas Paripurna (nilai 100) 2. Tuntas Utama (nilai 90-99) 3. Tuntas Madya (nilai 80-89) 4. Tuntas Pratama (nilai 70-79) 5. Tuntas Muda (nilai 60-69) 6. Belum tuntas (nilai < 60)	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

17) TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [10210083] Tingkat Pengangguran Terbuka; [K01510] Pengangguran; [K00117] Angkatan Kerja
Definisi : Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja/Bagian dari penduduk dalam angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja.
Ukuran : Persentase

Satuan : Persen
Metode Perhitungan : TPT = Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja x 100
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 155. Format Data TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
TPT	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja/Bagian dari penduduk dalam angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

18) IPM Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01386] Pembangunan Manusia
Definisi : Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.

Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 156. Format Data IPM Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
IPM	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

19) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Konsep : [22010016] Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB).
Definisi : Rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk atas dasar harga konstan 2010 (Sumber: Kepka BPS 846 disesuaikan).
Ukuran : Rasio
Satuan : Ribu Rupiah
Metode Perhitungan : Membagi PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.
Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 157. Format Data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Nama Provinsi	-	52	-	-
Kode Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
PDRB per Kapita ADHK	Rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk atas dasar harga konstan 2010	-	Rasio	Ribu Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

20) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Konsep : [22010016] Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita; [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB).
Definisi : Rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk atas dasar harga berlaku (Sumber: Kepka BPS 846 disesuaikan).
Ukuran : Rasio
Satuan : Ribu Rupiah
Metode Perhitungan : Membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 158. Format Data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Nama Provinsi	-	52	-	-
Kode Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
PDRB per Kapita ADHB	Rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk atas dasar harga berlaku	-	Rasio	Ribu Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.18. Metadata Badan Riset Dan Inovasi Daerah

1) Daftar Kajian yang di Fasilitasi BRIDA berdasarkan Jenis Kajian

Konsep : [K00798] Penelitian/Riset
Definisi : Kumpulan kajian atau penelitian yang mendapatkan dukungan, pendanaan, atau fasilitasi dari BRIDA sesuai dengan jenis dan fokus kajian.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 159. Format Data Daftar Kajian yang di Fasilitasi BRIDA berdasarkan Jenis Kajian

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kajian	Jenis kajian	-	-	-
Judul Kajian	Judul kajian atau penelitian yang mendapatkan dukungan, pendanaan, atau fasilitasi dari BRIDA sesuai dengan jenis dan fokus kajian	-	-	-
Tim Pengkaji	Nama-nama orang yang tergabung dalam tim penelitian	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Daftar Izin Penelitian berdasarkan Universitas

Konsep : [K00798] Penelitian/Riset
Definisi : Kumpulan data izin penelitian yang dikeluarkan oleh BRIDA untuk mahasiswa, dosen, atau peneliti dari berbagai universitas.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 160. Format Data Daftar Izin Penelitian berdasarkan Universitas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Universitas	Nama universitas	-	-	-
Nama Peneliti	Nama tim peneliti	-	-	-
Judul Penelitian	Judul penelitian	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah *Prototype* Karya IKM mitra BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00798] Penelitian/Riset
Definisi : Jumlah model awal atau percontohan dari suatu produk yang dikembangkan oleh IKM yang bermitra dengan BRIDA untuk uji coba, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut sebelum diproduksi massal.
Ukuran : Total
Satuan : Prototipe
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 161. Format Data Jumlah *Prototype* Karya IKM mitra BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Prototype	Nama model awal atau percontohan dari suatu produk yang dikembang-kan oleh IKM yang bermitra dengan BRIDA untuk uji coba, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut sebelum diproduksi massal	-	-	-
Jenis Prototype	Jenis prototype	-	-	-

Produsen Industri Kecil Menengah	Nama IKM yang menciptakan prototype	-	-	-
Status Uji Coba Prototype	Status Uji Coba Prototype	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Daftar *Tenant* IKM binaan BRIDA NTB berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten/Kota

Konsep : IKM
Definisi : Jumlah IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang terdaftar sebagai peserta program pembinaan BRIDA NTB berdasarkan jenis usaha dan kabupaten / kota
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 162. Format Data Daftar *Tenant* IKM binaan BRIDA NTB berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Tenan	Nama tenan IKM binaan BRIDA	-	-	-
Sektor Usaha	Sektor usaha tenan IKM binaan BRIDA	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Kunjungan Eduwisata BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00798] Penelitian/Riset
Definisi : Jumlah orang (termasuk pelajar, wisatawan, peneliti) yang mengunjungi lokasi eduwisata dalam periode tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 163. Format Data Jumlah Kunjungan Eduwisata BRIDA NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Lembaga	Nama lembaga yang melakukan kunjungan eduwisata	-	-	-
Jumlah (Orang)	Jumlah anggota lembaga yang melakukan kunjungan eduwisata	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah Penerima Sertifikasi Profesi oleh BRIDA NTB berdasarkan Jenis Sertifikasi dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02383] Sertifikasi
Definisi : Jumlah sertifikasi sebagai pengakuan resmi yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu dalam suatu bidang profesi yang difasilitasi BRIDA
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 164. Format Data Jumlah Penerima Sertifikasi Profesi oleh BRIDA NTB berdasarkan Jenis Sertifikasi dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Jenis Sertifikasi	Jenis sertifikasi yang dilaksanakan	-	-	-
Jumlah Peserta	Jumlah peserta sertifikasi yang dilaksanakan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Standarisasi Mesin yang Di Fasilitasi BRIDA

Konsep : [K02386] Standar Nasional Indonesia (SNI)
Definisi : Jumlah proses penetapan standar teknis dan operasional untuk berbagai jenis mesin yang digunakan IKM mitra BRIDA
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 165. Format Data Standarisasi Mesin yang Di Fasilitasi BRIDA

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Jenis Mesin	Jenis mesin yang standarisasinya difasilitasi BRIDA	-	-	-
Produsen Mesin	Produsen mesin yang standarisasinya difasilitasi BRIDA	-	-	-
Status Uji Coba Mesin	Status Uji Coba Mesin	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Dalam Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00234] Beasiswa
Definisi : Jumlah mahasiswa atau pelajar yang menerima bantuan pendidikan melalui program Beasiswa 1000 Cendekia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 166. Format Data Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Dalam Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenjang	Jenjang pendidikan	-	-	-
Jenis Bantuan	Jenis bantuan beasiswa	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penerima beasiswa	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Program Studi	Program studi penerima beasiswa	-	-	-
Universitas	Universitas penerima beasiswa	-	-	-
Jumlah Penerima Beasiswa	Jumlah penerima beasiswa	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Luar Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota & Negara Tujuan

Konsep : [K00234] Beasiswa
Definisi : Jumlah mahasiswa atau pelajar yang menerima bantuan pendidikan melalui program Beasiswa 1000 Cendekia untuk melanjutkan studi S1, S2 atau S3 di luar negeri.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 167. Format Data Jumlah Penerima Beasiswa 1000 Cendekia Luar Negeri berdasarkan Kabupaten/Kota & Negara Tujuan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Penerima Beasiswa	Nama Penerima Beasiswa	-	-	-
Jenis Beasiswa	Jenis beasiswa yang diterima	1. S1-*Partial Funded* 2. S2-*Partialy Funded* 3. S2-*Fully Funded* 4. S3-*Partial Funded* 5. S3-*Fully Funded*	-	-
Negara	Negara tujuan penerima beasiswa	-	-	-

Universitas	Universitas tujuan penerima beasiswa	-	-	-
Jurusan	Jurusan tujuan penerima beasiswa	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penerima beasiswa	-	-	-
Tahun Berangkat	Tahun keberangkatan penerima beasiswa	-	-	-

10) Jumlah Peserta Pelatihan Rumah Bahasa berdasarkan Jenis Pelatihan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01354] Pelatihan
Definisi : Jumlah orang yang mengikuti pelatihan bahasa yang diselenggarakan oleh Rumah Bahasa di Provinsi NTB berdasarkan kabupaten/kota
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 168. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Rumah Bahasa berdasarkan Jenis Pelatihan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Peserta	Nama peserta Pelatihan Rumah Bahasa	-	-	-
Jenis Pelatihan	Jenis Pelatihan Rumah Bahasa	1. IELTS 2. General English 3. EILT 4. Bahasa Prancis	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Indeks Inovasi Daerah (Program *Innovative Goverment Award*)

Konsep : [K00607] Inovasi
Definisi : Skor indeks yang mengukur kinerja inovasi suatu daerah berdasarkan kriteria tertentu seperti sumber daya, proses inovasi, hasil, dan dampak inovasi.
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 169. Format Data Indeks Inovasi Daerah (Program *Innovative Goverment Award*)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Judul Inovasi	Judul inovasi	-	-	-

Inovator	Nama inovator	-	-	-
Jenis Inovasi	Jenis inovasi	1. Teknologi 2. Digital 3. Non Digital	-	-
Skor Kematangan	Skor kematangan inovasi	-	Skor	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Indeks Daya Saing Daerah

Konsep : [K00366] Daya Saing; [K02323] Wilayah
Definisi : Skor indeks yang menilai tingkat daya saing suatu daerah berdasarkan kriteria tertentu seperti ekonomi, infrastruktur, kelembagaan, SDM, dan inovasi.
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BRIDA
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 170. Format Data Indeks Daya Saing Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Skor IDSD	Skor Indeks Daya Saing Daerah berdasarkan kabupaten/kota	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.19. Metadata Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

1) Konsumsi Listrik per Kapita

Konsep : Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita
Definisi : [24210016] Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita, [K00116] Angka-Angka Per Kapita.
Jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Penggunaan langsung mencakup penerangan umum dan pemakaian peralatan rumah tangga, sementara penggunaan tidak langsung meliputi konsumsi energi oleh sektor industri untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ukuran : Rata-rata
Satuan : Kilowatt-Jam per Kapita
Metode Perhitungan : Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita = Total Jumlah Energi Listrik yang Digunakan / Jumlah Penduduk dalam Periode Satu Tahun.
Sumber Data/Publikasi : Kementerian ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja

Tabel 171. Format Data Konsumsi Listrik per Kapita

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Penduduk	Total penduduk dalam periode satu tahun	-	Total	Orang
Jumlah konsumsi listrik	Total energi listrik yang digunakan dalam periode satu tahun	-	Total	kWh

Konsumsi listrik per kapita	Jumlah energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.	-	Rata-rata	kWh/kapita
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2) Persentase Rasio Elektrifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Rasio Elektrifikasi
Definisi : [24210014] Rasio Elektrifikasi; [K00427] Elektrifikasi; [K01111] Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara); [K01110] Listrik Non-PLN; Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN terhadap jumlah rumah tangga total. (Sumber: PP Nomor 79 Tahun 2014).
Ukuran : Rasio
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Rasio Elektrifikasi = Jumlah Rumah Tangga Berlistrik dibagi Jumlah Total Rumah Tangga
Sumber Data/Publikasi : Kementerian ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja

Tabel 172. Format Data Persentase Rasio Elektrifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kategori Rasio Elektrifikasi	-	1. Rasio Elektrifikasi non PLN 2. Rasio Elektrifikasi PLN	-	-
Nilai Rasio Elektrifikasi	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Rasio	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Jumlah Perizinan Bidang Ketenagalistrikan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Perizinan

Definisi : Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. (Sumber: UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2023). Perizinan Berusaha terkait Ketenagalistrikan adalah perizinan untuk melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang Tenaga Listrik (Sumber: UU Nomor 6 Tahun 2023). Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri adalah izin yang dimiliki oleh pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kilo watt dalam satu sistem instalasi tenaga listrik. Laporan adalah kewajiban bagi pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kilo watt dalam satu sistem tenaga listrik (Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan)

Ukuran : Total

Satuan : Badan Usaha, Kapasitas (kVa)

Metode Perhitungan : Total perizinan yang diberikan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik

Sumber Data/Publikasi : Kementerian ESDM

Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja

Tabel 173. Format Data Jumlah Perizinan Bidang Ketenagalistrikan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kategori Perizinan	-	1. IUPTLS 2. Laporan	-	-
Jumlah Badan Usaha	Banyaknya badan usaha yang mengajukan izin dalam periode satu tahun	-	Total	Badan Usaha
Jumlah Kapasitas	Banyaknya kapasitas energi listrik yang diizinkan dalam periode satu tahun	-	Total	kVa
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

4) Jumlah *Captive Power* (Pembangkit Listrik) berdasarkan Sistem

Konsep : Pembangkit Listrik

Definisi : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

1. Usaha pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka memproduksi tenaga listrik.
2. Usaha transmisi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke Konsumen atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

3. Usaha distribusi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke Konsumen.
4. Usaha penjualan tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada Konsumen. (Sumber: Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021).

Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total pembangkit listrik yang disajikan berdasarkan sistem
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 174. Format Data Jumlah *Captive Power* (Pembangkit Listrik) berdasarkan Sistem

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama sistem	Sistem adalah sistem ketenagalistrikan yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyaluran tenaga listrik ke konsumen	1. Lombok 2. Tambora	-	-
Jumlah perusahaan	Jumlah perusahaan *captive power*	-	Total	Buah
Kapasitas	Banyaknya energi listrik yang dihasilkan oleh sistem	-	Total	kW
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

5) Jumlah Pembangunan PLTS SHS berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pembangkit Listrik
Definisi : PLTS SHS adalah sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya mandiri (*Solar Home System*) yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. PLTS SHS dapat digunakan untuk penerangan dan kebutuhan energi listrik minimal di daerah yang belum terjangkau PLN. PLTS SHS dapat menghasilkan *output* berupa arus DC 12V atau AC 220/230 V.
Ukuran : Total
Satuan : PLTS SHS (Unit), Daya (kW)
Metode Perhitungan : Total PLTS SHS yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 175. Format Data Jumlah Pembangunan PLTS SHS berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah PLTS SHS	Banyaknya PLTS SHS yang dibentuk pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Unit
Daya PLTS SHS	Total energi listrik yang dihasilkan PLTS SHS	-	Total	kW
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

6) Jumlah Pembangunan PLTS Komunal berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pembangkit Listrik

Definisi : PLTS Komunal adalah sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu daerah komunal, seperti desa, kompleks perumahan, atau kawasan in PLTS komunal dapat digunakan untuk penerangan, kebutuhan rumah tangga, atau industri. PLTS komunal menggunakan panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Salah satu jenis PLTS Komunal adalah Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. PLTS Atap adalah pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLTS Atap serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik pelanggan PLTS Atap. (Sumber: Permen ESDM No. 4 Tahun 2024).

Ukuran : Total

Satuan : Unit

Metode Perhitungan : Total PLTS Komunal yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota

Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 176. Format Data Jumlah Pembangunan PLTS Komunal berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Jumlah PLTS Komunal	Banyaknya PLTS Komunal yang dibentuk pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Unit
Daya PLTS Komunal	Total energi listrik yang dihasilkan PLTS Komunal	-	Total	kW
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

7) Persentase Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Pembangkit Listrik

Konsep : Kontribusi EBT

Definisi : [K00435] Energi: Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

[K00438] Energi Terbarukan: Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber Energi Terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik berupa panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi panas bumi.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik (PLTS Fotovoltaik) adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik yang langsung diinterkoneksikan ke jaringan Tenaga Listrik PT PLN.

4. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi angin (bayu) menjadi listrik.
5. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biomassa.
6. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biogas.
7. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Laut (PLT Energi Laut) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang surut laut (tidal) atau perbedaan suhu lapisan laut (*ocean thermal energy conuersion*).
8. Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati (PLT) BBN adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi bahan bakar nabati cair.

(Sumber: Perpres Nomor 112 Tahun 2022).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Persentase Kontribusi EBT = Jumlah kapasitas pembangkit listrik EBT / Total kapasitas 'pembangkit listrik.
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 177. Format Data Persentase Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Pembangkit Listrik

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kapasitas Pembangkit Listrik EBT	Total energi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	-	Total	MegaWatt

Kapasitas Pembangkit Listrik	Total energi listrik yang dihasilkan dari seluruh Pembangkit Listrik	-	Total	MegaWatt
Persentase EBT	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

8) Persentase Izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practices*)

Konsep : Izin Usaha
Definisi : [K00633] Izin Usaha: Legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. (Sumber: PP Nomor 25 Tahun 2024). Kaidah teknik pertambangan yang baik atau *Good Mining Practice* (GMP) adalah kegiatan pertambangan yang mematuhi aturan, terencana, dan menerapkan teknologi yang sesuai. Kaidah ini juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Ukuran : Total
Satuan : Izin
Metode Perhitungan : Persentase Izin usaha pertambangan yang melaksanakan GMP = Total Izin usaha pertambangan yang melaksanakan GMP / Total Izin usaha pertambangan
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 178. Format Data Persentase Izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good mining practices)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah IUP	Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Izin
Jumlah IUP yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (GMP)	Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Izin
Persentase IUP yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (GMP)	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

9) Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Non-Logam berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Izin Usaha; Luas Lahan Usaha

Definisi : [K00633] Izin Usaha: Legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. (Sumber: PP Nomor 25 Tahun 2024).

[K01019] Lahan: Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. (Sumber: PP Nomor 25 Tahun 2024). Mineral non-logam adalah mineral yang tidak mengandung logam sebagai unsur utamanya. Mineral non-logam digunakan dalam berbagai industri, seperti konstruksi, pertanian, dan manufaktur. Contoh mineral non-logam: Batu kapur (kalsit), Pasir kuarsa, Mika, Gipsum, Dolomit, Fosfat, Garam, Granit, Bentonit, Kaolin.

Ukuran : Total
Satuan : Izin; Ha
Metode Perhitungan : Total Izin usaha pertambangan mineral non-logam yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota dan total luas wilayah izin usaha pertambangan mineral non-logam yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 179. Format Data Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Non-Logam berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah IUP	Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) non logam pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Izin
Luas Lahan	Total luas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) non logam yang	-	Total	Hektar

	diizinkan pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun			
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

10) Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Batuan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Izin Usaha; Luas Lahan Usaha

Definisi : [K00633] Izin Usaha: Legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.(Sumber: PP Nomor 25 Tahun 2024).
[K01019] Lahan: Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.(Sumber: PP Nomor 25 Tahun 2024). Mineral batuan adalah zat padat yang menyusun batuan. Mineral merupakan bahan penyusun batuan, seperti atom dalam molekul. Contoh mineral pembentuk batuan: Feldspar, Kuarsa, Amfibol, Mika, Olivin, Garnet, Kalsit, Piroksen.

Ukuran : Total

Satuan : Izin; Ha

Metode Perhitungan : Total Izin usaha pertambangan mineral batuan yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota dan total luas wilayah izin usaha pertambangan mineral batuan yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota

Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 180. Format Data Jumlah Izin dan Luas Lahan Usaha Pertambangan Mineral Batuan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah IUP	Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Izin
Luas Lahan	Total luas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

11) Jumlah Ekspor Konsentrat PT. Newmont Nusa Tenggara/PT. AMNT

Konsep : Ekspor
Definisi : [K00420] Ekspor: Seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal. Konsentrat tambang adalah produk akhir dari pengolahan bijih tambang yang kaya akan mineral berharga. Konsentrat tambang juga disebut bijih olahan.
Ukuran : Total
Satuan : Kg (Emas, Perak); Ton (Tembaga); Dmt (Konsentrat lainnya)
Metode Perhitungan : Total konsentrat yang diekspor oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 181. Format Data Jumlah Ekspor Konsentrat PT. Newmont Nusa Tenggara/PT. AMNT

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Konsentrat	Macam-macam konsentrat yang diekspor	1. Perak 2. Emas 3. Tembaga 4. Konsentrat lainnya	-	-
Jumlah	Banyaknya konsentrat yang diekspor dalam periode satu tahun	-	Total	Kg (Emas, Perak); Ton (Tembaga); Dmt

				(Konsentrat lainnya)
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

12) Jumlah Lokasi Bahan Galian Batuan berdasarkan Jenis Bahan Galian dan Kabupaten Kota

Konsep : Lokasi Bahan Galian Batuan
Definisi : Bahan galian batuan adalah batuan yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Bahan galian batuan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk mendukung pembangunan.
Ukuran : Total
Satuan : Lokasi
Metode Perhitungan : Total lokasi bahan galian batuan dalam periode tertentu yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 182. Format Data Jumlah Lokasi Bahan Galian Batuan berdasarkan Jenis Bahan Galian dan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah bahan galian	Macam-macam bahan galian yang dihasilkan	1. Batu bangunan 2. Pasir Krikil	-	-

		3. Tanah Urug 4. Tanah Liat 5. Batu Apung 6. Batu Kapur 7. Marmer		
Jumlah	Banyaknya lokasi bahan galian pada masing-masing kabupaten kota sesuai dengan jenis bahan galian	-	Total	Lokasi
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

13) Jumlah Biogas Rumah berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Biogas Rumah
Definisi : Biogas adalah bahan bakar yang berbentuk gas yang seluruhnya atau sebagian besar berasal dari bahan organik dengan standar dan mutu tertentu. (Sumber: Perpres Nomor 11 Tahun 2023)
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total biogas rumah dalam suatu periode yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 183. Format Data Jumlah Biogas Rumah berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah Biogas Rumah	Banyaknya biogas rumah pada masing-masing kabupaten kota dalam periode satu tahun	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

14) Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan

Konsep : Bauran EBT

Definisi : [K00435] Energi: Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
[K00438] Energi Terbarukan: Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi adalah kombinasi atau campuran dari berbagai sumber energi yang digunakan oleh suatu negara atau wilayah untuk memenuhi kebutuhan energinya, yang memainkan peran penting dalam kelestarian lingkungan dan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan = Total konsumsi Energi Baru Terbarukan / Total konsumsi Energi

Sumber Data/Publikasi : Dinas ESDM

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 184. Format Data Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah konsumsi Energi Baru Terbarukan	Banyaknya konsumsi energi baru terbarukan dalam periode satu tahun	-	Total	*Barrel of Oil Equivalent* (BOE)
Jumlah konsumsi energi	Banyaknya konsumsi dalam periode satu tahun	-	Total	*Barrel of Oil Equivalent* (BOE)
Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2.20. Metadata Dinas Kelautan dan Perikanan

1) Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01217] Nelayan; [K01218] Nelayan Buruh
Definisi : banyaknya orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan. Klasifikasi: Wilayah dan Jenis Nelayan
Ukuran : total
Satuan : orang
Metode Perhitungan : Total seluruh nelayan dan nelayan buruh
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 850

Tabel 185. Format Data Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Tempat Pendaratan Ikan	Lokasi tempat pendaratan ikan	1. Non Pelabuhan 2. Pelabuhan		
Jenis Nelayan		1. Nelayan 2. Nelayan Buruh		
Jumlah Nelayan	Jumlah nelayan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun dilakukan pendataan	-	-	-

2) Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan
Definisi : [24110003] Produksi Penangkapan Ikan. Banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dari sumber perikanan, baik di laut maupun perikanan darat. Klasifikasi: Wilayah dan tempat pendaratan ikan.
Ukuran : total
Satuan : ton
Metode Perhitungan : total seluruh produksi perikanan tangkap, baik dari perikanan tangkap pelabuhan, non pelabuhan maupun dari perairan umum daratan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 186. Format Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Perairan	Jenis perairan tempat nelayan menangkap ikan	1. Perairan Darat 2. Perairan Laur		
Tempat Pendaratan Ikan	Lokasi penangkapan ikan	1. Pelabuhan 2. Non Pelabuhan 3. Perairan Umum Daratan		
Jumlah Produksi	Jumlah produksi perikanan tangkap	-	Total	Kilogram

Tahun	Tahun dilakukan pendataan	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

3) Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan
Definisi : [24110223] Nilai Produksi Penangkapan Ikan. Nilai seluruh hasil kegiatan penangkapan ikan, binatang air lainnya, atau tanaman air, baik di laut maupun perairan darat, yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : total seluruh nilai produksi perikanan tangkap, baik dari perikanan tangkap pelabuhan, non pelabuhan maupun dari perairan umum daratan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 187. Format Data Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Tempat Pendaratan Ikan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Perairan	Jenis perairan tempat nelayan menangkap ikan	1. Perairan Darat 2. Perairan Laut		
Tempat Pendaratan Ikan	Lokasi penangkapan ikan	1. Pelabuhan 2. Non Pelabuhan 3. Perairan Umum Daratan		
Nilai Produksi	Jumlah Nilai produksi perikanan tangkap	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun dilakukan pendataan	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

4) Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan; [K00948] Komoditas Utama Perikanan
Definisi : [24110003] Produksi Penangkapan Ikan. Banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dari sumber perikanan, baik di laut maupun perikanan darat.
Klasifikasi : Wilayah dan Komoditas Utama
Ukuran : total
Satuan : ton
Metode Perhitungan : total seluruh produksi masing-masing komoditas utama perikanan tangkap
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846, Kepka 850

Tabel 188. Format Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Perairan	Jenis perairan tempat nelayan menangkap ikan	1. Perairan Darat 2. Perairan Laut		
Tempat Pendaratan Ikan	Lokasi penangkapan ikan	1. Pelabuhan 2. Non Pelabuhan 3. Perairan Umum Daratan		
Jenis Komoditas Utama		Perairan Laut 1. Cakalang 2. Rumput Laut 3. Tongkol 4. Tuna 5. Udang 6. Lainnya Perairan Darat 1. Ikan 2. Udang 3. Lainnya		
Produksi	Jumlah produksi perikanan tangkap	-	Total	Kilogram
Tahun	Tahun dilakukan pendataan	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

5) Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan; [K00948] Komoditas Utama Perikanan
Definisi : [24110223] Nilai Produksi Penangkapan Ikan. Nilai seluruh hasil kegiatan penangkapan ikan, binatang air lainnya, atau tanaman air, baik di laut maupun perairan darat, yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual.
Klasifikasi : Wilayah dan Komoditas Utama.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : total seluruh nilai produksi masing-masing komoditas utama perikanan tangkap
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846, Kepka 850

Tabel 189. Format Data Nilai Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Perairan	Jenis perairan tempat nelayan menangkap ikan	1. Perairan Darat 2. Perairan Laut		
Tempat Pendaratan Ikan	Lokasi penangkapan ikan	1. Pelabuhan 2. Non Pelabuhan 3. Perairan Umum Daratan		

Jenis Komoditas Utama		Perairan Laut 1. Cakalang 2. Rumput Laut 3. Tongkol 4. Tuna 5. Udang 6. Lainnya Perairan Darat 1. Ikan 2. Udang 3. Lainnya		
Nilai Produksi	Jumlah nilai produksi perikanan tangkap	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun dilakukan pendataan	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

6) Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut berdasarkan Jenis Kapal dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02362] Kapal Penangkap Ikan; [K01063] Laut
Definisi : [24110254] Jumlah Kapal Penangkap Ikan. Banyaknya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan.
Klasifikasi : Wilayah dan Jenis Kapal.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh kapal penangkap ikan dilaut
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 190. Format Data Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut berdasarkan Jenis Kapal dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kapal		1. Perahu Tanpa Motor 2. Kapal Motor	-	-
Tipe Kapal		Perahu Tanpa Motor: 1. Jukung 2. Perahu Papan Kecil 3. Perahu Papan Sedang 4. Perahu Papan Besar 5. Perahu Tanpa Motor Kapal Motor 1. 0 - 5 GT 2. 5 - 10 GT 3. 10 - 20 GT 4. 20 - 30 GT 5. 30 - 50 GT 6. Motor Tempel 7. Kapal Motor GT 8. Motor Tempel 0 - 5 GT 9. Motor Tempel 5 - 10 GT 10. Motor Tempel 10 - 20 GT		

Jumlah Kapal	Total jumlah kapal	-	Total	unit
Tahun	Tahun data total kapal	-	-	-

7) Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut berdasarkan Jenis Alat Tangkap dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00084] Alat Penangkap Ikan; [K01063] Laut
Definisi : Banyaknya Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan di laut. Klasifikasi: wilayah dan jenis alat tangkap
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh jenis alat penangkapan ikan di laut
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 850
Kepka 846

Tabel 191. Format Data Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut berdasarkan Jenis Alat Tangkap dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis API	Jenis alat tangkap	-	-	-
Jumlah API	Total jumlah alat penangkapan ikan	-	Total	unit
Tahun	Tahun data total kapal	-	-	-

8) Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan; [K01617] Perairan Darat
Definisi : [24110003] Produksi Penangkapan Ikan. (Disesuaikan) Banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dari sumber perikanan darat.
Klasifikasi : Wilayah dan Jenis ekosistem perikanan darat.
Ukuran : total
Satuan : Kilogram
Metode Perhitungan : penjumlahan dari produksi dari perikanan darat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 192. Format Data Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Perairan Umum	-	1. Rawa 2. Waduk	-	-
Produksi	Total produksi perikanan tangkap	-	Total	Kilogram
Tahun	Tahun data total kapal	-	-	-

9) Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan; [K01617] Perairan Darat
Definisi : [24110223] Nilai Produksi Penangkapan Ikan. (Disesuaikan) Nilai seluruh hasil kegiatan penangkapan ikan, binatang air lainnya, atau tanaman air di perairan darat, yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual.
Klasifikasi : Wilayah dan Jenis ekosistem perikanan darat.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : penjumlahan dari seluruh nilai produksi perikanan darat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 193. Format Data Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perairan Umum dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Perairan Umum	-	1. Rawa 2. Waduk	-	-
Nilai Produksi	Total nilai produksi perikanan tangkap	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun data total kapal	-	-	-

10) Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perahu/Kapal dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02362] Kapal Penangkap Ikan; [K01617] Perairan Darat
Definisi : [24110254] Jumlah Kapal Penangkap Ikan. Banyaknya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan. Klasifikasi: Wilayah dan Jenis Kapal
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh kapal yang laut
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 194. Format Data Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Perahu/Kapal dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kapal		1. Perahu Tanpa Motor 2. Kapal Motor	-	-

Tipe Kapal		Perahu Tanpa Motor: 1. Jukung 2. Perahu Papan Kecil 3. Perahu Papan Sedang 4. Perahu Papan Besar 5. Perahu Tanpa Motor Kapal Motor 1. 0 - 5 GT 2. 5 - 10 GT 3. 10 - 20 GT 4. 20 - 30 GT 5. 30 - 50 GT 6. Motor Tempel 7. Kapal Motor GT 8. Motor Tempel 0 - 5 GT 9. Motor Tempel 5 - 10 GT 10. Motor Tempel 10 - 20 GT		
Jumlah Kapal	Total jumlah kapal	-	Total	unit
Tahun	Tahun data total kapal	-	-	-

11) Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Alat dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00084] Alat Penangkap Ikan; [K01617] Perairan Darat
Definisi : Banyaknya Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan di laut. Klasifikasi: wilayah dan jenis alat tangkap
Ukuran : Total
Satuan : Unti
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh jenis alat penangkapan ikan di laut
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 850, Kepka 846

Tabel 195. Format Data Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan berdasarkan Jenis Alat dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis API	Jenis alat tangkap	-	-	-
Jumlah API	Total jumlah alat penangkapan ikan	-	Total	unit
Tahun	Tahun data total kapal	-	-	-

12) Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01925] Rumah Tangga; [K01405] Pembudidayaan Ikan
Definisi : [24110116] Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan. Banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan ikan serta panen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Klasifikasi: Wilayah dan Jenis Kegiatan Budidaya
Ukuran : Total
Satuan : Rumah Tangga
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh rumah tangga perikanan budidaya
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 196. Format Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kegiatan Budidaya	-	1. Karamba 2. Karamba Jaring Apung Laut 3. Karamba Jaring Apung Tawar 4. Kolam Air Deras 5. Kolam Air Tenang 6. Minapadi 7. Rumput Laut 8. Tambak Intensif 9. Tambak Semi Intensif 10. Tambak Sederhana 11. Laut Lainnya	-	-
Jumlah RTP	Total jumlah rumah tangga pembudidaya	-	Total	Rumah tangga
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

13) Jumlah Pembudidaya Ikan berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01403] Pembudi Daya Ikan
Definisi : [24110059] Jumlah Pembudi Daya Ikan. Jumlah dari setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh pembudidaya ikan.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 850

Tabel 197. Format Data Jumlah Pembudidaya Ikan berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kegiatan Budidaya	-	1. Karamba 2. Karamba Jaring Apung Laut 3. Karamba Jaring Apung Tawar 4. Kolam Air Deras 5. Kolam Air Tenang 6. Minapadi 7. Rumput Laut 8. Tambak Intensif 9. Tambak Semi Intensif	-	-

		10. Tambak Sederhana 11. Laut Lainnya		
Jumlah Pembudidaya	Total jumlah pembudidaya	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

14) Luas Area Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01405] Pembudidayaan Ikan
Definisi : [24110210] Luas Baku Wadah Budidaya Ikan. Luas permukaan tempat atau bangunan atau bejana yang berupa lahan, perairan, kurungan, jaring, dan/atau rakit yang digunakan untuk membudidayakan ikan. Klasifikasi: Wilayah dan Jenis Kegiatan Budidaya
Ukuran : Luas
Satuan : Meter persegi
Metode Perhitungan : penjumlahan dari seluruh luas area perikanan budidaya
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 198. Format Data Luas Area Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Kegiatan Budidaya	-	1. Karamba 2. Karamba Jaring Apung Laut 3. Karamba Jaring Apung Tawar 4. Kolam Air Deras 5. Kolam Air Tenang 6. Minapadi 7. Rumput Laut 8. Tambak Intensif 9. Tambak Semi Intensif 10. Tambak Sederhana 11. Laut Lainnya	-	-
Luas Area	Sesuai dengan definisi	-	Total	Meter Persegi
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

15) Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01405] Pembudidayaan Ikan
Definisi : [24110109] Jumlah Produksi Pembudidayaan Ikan. Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan.
Ukuran : Massa
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh produksi pembudidayaan ikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 199. Format Data Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kegiatan Budidaya	-	1. Karamba 2. Karamba Jaring Apung Laut 3. Karamba Jaring Apung Tawar 4. Kolam Air Deras 5. Kolam Air Tenang 6. Minapadi 7. Rumput Laut 8. Tambak Intensif 9. Tambak Semi Intensif 10. Tambak Sederhana 11. Laut Lainnya	-	-
Produksi	Sesuai dengan definisi	-	Total	Kilogram
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

16) Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01405] Pembudidayaan Ikan

Definisi : [24110222] Nilai Produksi Budi Daya Ikan. Nilai seluruh hasil kegiatan budi daya ikan yang meliputi budi daya ikan di laut, budi daya ikan di air tawar, serta budi daya ikan di air payau, yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual. Klasifikasi: wilayah dan jenis kegiatan budi daya.

Ukuran : Nilai

Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh nilai budidaya perikanan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 200. Format Data Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kegiatan Budidaya	-	1. Karamba 2. Karamba Jaring Apung Laut 3. Karamba Jaring Apung Tawar 4. Kolam Air Deras 5. Kolam Air Tenang 6. Minapadi 7. Rumput Laut 8. Tambak Intensif 9. Tambak Semi Intensif 10. Tambak Sederhana 11. Laut Lainnya	-	-
Nilai Produksi	Sesuai dengan definisi	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

17) Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01405] Pembudidayaan Ikan; [K00948] Komoditas Utama Perikanan
Definisi : [24110109] Jumlah Produksi Pembudidayaan Ikan. Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan. Komoditas utama perikanan budidaya antara lain: 1. Rumput laut; 2. Lobster; 3. Kerapu; 4. Udang; 5. Bandeng; 6. Nila; 7. Lele; 8. Ikan mas; 9. Gurami; 10. Ikan lainnya
Ukuran : Massa
Satuan : Kilogram/ton
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh produksi pembudidayaan ikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846, Kepka 850

Tabel 201. Format Data Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis komoditas utama	-	Sesuai dengan klasifikasi di definisi	-	-
Produksi	Sesuai dengan definisi	-	Total	Kg/Ton
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

18) Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01405] Pembudidayaan Ikan; [K00948] Komoditas Utama Perikanan
Definisi : [24110222] Nilai Produksi Budi Daya Ikan. Nilai seluruh hasil kegiatan budi daya ikan yang meliputi budi daya ikan di laut, budi daya ikan di air tawar, serta budi daya ikan di air payau, yang dinilai berdasarkan harga jual per satuan produksi, termasuk yang belum dijual. Komoditas utama perikanan budidaya antara lain: 1. Rumput laut; 2. Lobster; 3. Kerapu; 4. Udang; 5. Bandeng; 6. Nila; 7. Lele; 8. Ikan mas; 9. Gurami; 10. Ikan lainnya
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari seluruh nilai budi daya perikanan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846, Kepka 850

Tabel 202. Format Data Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis komoditas utama	-	Sesuai dengan klasifikasi di definisi	-	-
Nilai Produksi	Sesuai dengan definisi	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

19) Nilai Tukar Petani Perikanan

Konsep : [K01744] Petani
Definisi : [27010042] Nilai Tukar Petani (disesuaikan). Angka yang menggambarkan daya beli petani perikanan serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi.
Ukuran : Rasio
Satuan : -
Metode Perhitungan : Membandingkan Indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani dikalikan 100.
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 203. Format Data Nilai Tukar Petani Perikanan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nilai Tukar Petani Perikanan	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data yang bersangkutan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

20) Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap

Konsep : [K01744] Petani
Definisi : [27010042] Nilai Tukar Petani (disesuaikan). Angka yang menggambarkan daya beli petani perikanan tangkap serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi.
Ukuran : Rasio
Satuan : -
Metode Perhitungan : Membandingkan Indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani dikalikan 100
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 204. Format Data Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data yang bersangkutan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

21) Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya

Konsep : [K01744] Petani
Definisi : [27010042] Nilai Tukar Petani (Disesuaikan). Angka yang menggambarkan daya beli petani perikanan budi daya serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi.
Ukuran : Rasio
Satuan : -
Metode Perhitungan : Membandingkan Indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani dikalikan 100
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 205. Format Data Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data yang bersangkutan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

22) Angka Konsumsi Ikan berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Konsumsi; Ikan
Definisi : Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun (berdasarkan juknis IKU Kementerian PKP 2025 Definisi angka Konsumsi ikan: komsumsi ikan di dalam rumah tangga, di luar rumah tangga dan tidak tercatat).
Ukuran : rata-rata
Satuan : kg/kapita/tahun
Metode Perhitungan : Angka konsumsi ikan ditunjukkan oleh konsumsi ikan dari kelompok makanan/minuman jadi. konsumsi ikan dari kelompok makanan/makanan jadi merupakan perkalian (pengeluaran ikan dari kelompok makanan/minuman jadi atau pengeluaran dari kelompok ikan dan udang segar dikalikan dengan konstanta 0.8) dikalikan dengan kelompok ikan dan udang segar (dari jenis 1 sampai dengan n) dikalikan dengan konstanta 1,55 (yang merupakan faktor konversi dari bentuk goreng/bakar/dll. ke utuh segar).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : INDAH BPS

Tabel 206. Format Data Angka Konsumsi Ikan berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai AKI	Nilai AKI	-	Nilai	Poin

Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

23) Produksi Olahan Hasil Perikanan berdasarkan Jenis Olahan dan Kabupaten/Kota

Konsep : K01283] Pangan Olahan
Definisi : [24110260] Jumlah Produk Olahan Ikan. Berat produk hasil pengolahan berbahan baku ikan menjadi produk pangan olahan untuk konsumsi manusia. Jenis Kegiatan Pengolahan Ikan terdiri dari: 1. Fermentasi/Peragian; 2. Pelumatan Daging/Surimi; 3. Pembekuan; 4. Pemindangan; 5. Penanganan Produk Segar/Dingin; 6. Pengasapan/Pemanggangan; 7. Penggaraman/Pengeringan; 8. Pengolahan Lainnya; 9. Pereduksian/Ekstraksi
Ukuran : Massa
Satuan : Kilogram
Metode Perhitungan : Penjumlahan dari semua hasil pengolahan produksi perikanan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 207. Format Data Produksi Olahan Hasil Perikanan berdasarkan Jenis Olahan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Pengolahan	-	Sesuai dengan klasifikasi di definisi	-	-
Produksi Olahan	Total produksi olahan	-	Total	Kilogram

Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

24) Jumlah Petambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01742] Petambak Garam
Definisi : banyaknya orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman, termasuk pemilik dan/atau penggarap tambak garam.
Ukuran : Total
Satuan : Unit/orang
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh rumah tangga perikanan tambak garam
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 208. Format Data Jumlah Petambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis RTP	-	- Garam Tambak - Garam Non Tambak	-	-

Jumlah RTP	Total jumlah rumah tangga pembudidaya	-	Total	Rumah tangga
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

25) Luas Lahan Tambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Luas Lahan
Definisi : Luas lahan aktif yang digunakan sebagai lahan produksi garam
Ukuran : Luas
Satuan : Meter persegi
Metode Perhitungan : total dari seluruh luas lahan aktif yang digunakan untuk produksi garam
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Sirusa

Tabel 209. Format Data Luas Lahan Tambak Garam berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Lahan	-	1. Lahan Potensial 2. Lahan Integrasi 3. Lahan produksi	-	-
Luas Lahan	Total luas lahan	-	Total	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

26) Produksi Garam berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K00468] Garam
Definisi : [24110262] Jumlah Produksi Garam. Banyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam.
Ukuran : Total
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Agregasi penjumlahan dari setiap produksi garam provinsi yang dibentuk dari produksi garam kabupaten/kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 210. Format Data Produksi Garam berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Produksi	Jumlah produksi garam	-	Total	Ton
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

27) Luas Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Penetapan Pemerintah Pusat

Konsep : [K00753] Kawasan Konservasi; [K01063] Laut
Definisi : [31010085] Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut. Luas keseluruhan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.(Pengertian kawasan konservasi pada metadata KKP: Luas total dari kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan)
Ukuran : Luas
Satuan : Hektar
Metode Perhitungan : Luas dari masing-masing kawasan konservasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 211. Format Data Luas Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Penetapan Pemerintah Pusat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Regulasi	Regulasi sebagai penetapan Kawasan konservasi	-		
Jenis Kawasan Konservasi	Jenis kewenangan kawasan konservasi	1. Kawasan Konservasi Nasional 2. Kawasan Konservasi Daerah 3. Pencadangan Kawasan konservasi	-	-

Nama kawasan konservasi	Nama Kawasan konservasi	-	-	-
Luas kawasan	Total luas Kawasan konservasi	-	Luas	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

28) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan
Definisi : Kelompok masyarakat pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan meliputi bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan pengangkutan dan pemasaran ikan dan bidang ekosistem perairan dan atau kawasan konservasi, pencemaran perairan, pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati.
Ukuran : Total
Satuan : Kelompok
Metode Perhitungan : Jumlah kelompok pengawas dihimpun berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPT KKP
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Indah BPS

Tabel 212. Format Data Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama POKMASWAS	Nama Kelompok Pengawas Masyarakat	-	-	-
Jumlah Anggota	Total anggota setiap kelompok	-	Total	Orang
Penetapan Pembentukan	Regulasi pembentukan POKMASWAS	-	-	-
Kegiatan POKMASWAS	Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok pengawas	-	-	-
Status	Status keaktifan pengawas	1. Aktif 2. Tidak Aktif	-	-
Tahun	Tahun Pembentukan	-	-	-

29) Persentase Luas Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terkelola secara Berkelanjutan

Konsep : Pesisir, Pulau-pulau kecil

Definisi : Cakupan Luas Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terkelola secara Berkelanjutan. (Definisi DKP: Menghitung luas wilayah yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan (konservasi, restorasi, rehabilitasi, penggunaan ruang laut untuk kegiatan perikanan/non perikanan) dibanding total wilayah perairan sesuai kewenangan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Total Luas Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terkelola secara Berkelanjutan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 213. Format Data Persentase Luas Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terkelola secara Berkelanjutan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Luas wilayah LP3K	Total wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara keseluruhan	-	Luas	Hektar
Luas wilayah LP3K Terkelola	Total wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terkelola secara berkelanjutan	-	Luas	Hektar
Persentase	Pembagian antara luas LP3K yang terkelola dibagi dengan luas wilayah LP3K secara keseluruhan dikali 100 Persen	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun Perhitungan	-	-	-

30) Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya yang mendapatkan bantuan Pemerintah Provinsi

Konsep : [K01403] Pembudi Daya Ikan; [K01217] Nelayan; [K01218] Nelayan Buruh
Definisi : banyaknya kelompok nelayan dan pembudidaya yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB
Ukuran : Total
Satuan : Kelompok
Metode Perhitungan : Total jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 214. Format Data Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya yang mendapatkan bantuan Pemerintah Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kelompok Nelayan	Banyaknya kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB	-	Total	Kelompok
Tahun	Tahun mendapatkan bantuan	-	-	-

31) Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It)

Konsep : [K00505] Harga Produsen; [K01744] Petani; [K01403] Pembudi Daya Ikan
Definisi : [27010027] Indeks Harga yang Diterima Petani (Disesuaikan). Angka yang menggambarkan perkembangan harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani (pembudidaya ikan) sebelum ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut *farm gate* (harga di sawah/ladang setelah pemetikan).
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 215. Format Data Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nilai IT	Nilai Data Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan	-	Indeks	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data yang bersangkutan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

32) Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)

Konsep : [K00501] Harga Konsumen/Harga Eceran; [K01744] Petani; [K01403] Pembudi Daya Ikan
Definisi : [27010031] Indeks Harga yang Dibayar Petani (Disesuaikan). Angka yang menggambarkan perkembangan harga komoditas eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian.
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 216. Format Data Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nilai IB	Nilai Data Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan	-	Indeks	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data yang bersangkutan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

33) Jumlah Produksi Ikan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan

Definisi : [24110003] Produksi Penangkapan Ikan. Banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dari sumber perikanan, baik di laut maupun perikanan darat.

Klasifikasi: Wilayah

Ukuran : total

Satuan : ton

Metode Perhitungan : total seluruh produksi perikanan tangkap, baik dari perikanan tangkap pelabuhan, non pelabuhan maupun dari perairan umum daratan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 217. Format Data Jumlah Produksi Ikan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Perikanan	-	1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan Budidaya	-	-
Produksi Ikan	Total produksi ikan, baik pada perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	-	-	-
Tahun	Tahun dari total produksi ikan	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

34) Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi

Konsep : [K01476] Penduduk; [K00371] Perikanan; [K01354] Pelatihan
Definisi : Banyaknya masyarakat kelautan dan perikanan yang diberi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai kompetensi tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : orang
Metode Perhitungan : Total Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dilatih dan mendapat sertifikat kompetensi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 218. Format Data Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Masyarakat Kelautan	Banyaknya masyarakat kelautan yang mendapatkan pelatihan dan mendapatkan sertifikat	-	Total	orang
Tahun	Tahun mendapatkan bantuan	-	-	-

35) Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dilatih

Konsep : [K01476] Penduduk; [K00371] Perikanan; [K01354] Pelatihan
Definisi : Banyaknya masyarakat kelautan dan perikanan yang diberi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai kompetensi tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : orang
Metode Perhitungan : Total Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dilatih
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 219. Format Data Jumlah Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dilatih

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Masyarakat Kelautan	Banyaknya masyarakat kelautan yang mendapatkan pelatihan	-	Total	orang
Tahun	Tahun mendapatkan bantuan	-	-	-

36) Jumlah Pelaku Usaha yang terdata pada aplikasi KUSUKA

Konsep : [K01337] Pelaku Usaha; [K00824] Kelautan; [K01655] Perikanan
Definisi : [24110056] Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Banyaknya perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdata dalam aplikasi KUSUKA
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 220. Format Data Jumlah Pelaku Usaha yang terdata pada aplikasi KUSUKA

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Sub sektor	-	1. Penangkapan Ikan 2. Pembudidaya Ikan 3. Pengelolaan Ruang Laut 4. Pemasaran Ikan 5. Pengolahan Ikan 6. Pengangkutan Ikan	-	-
Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang terdapat di sistem KUSUKA	-	Total	Orang
Tahun	Tahun mendapatkan bantuan	-	-	-

2.21. Metadata Dinas Kesehatan

1) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Konsep : [10410187]: Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); [K02240] Umur/Usia
Definisi : Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Rata-rata
Satuan : Tahun
Metode Perhitungan : UHH menggunakan proyeksi penduduk hasil SP 2010
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 221. Format Data Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Usia Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	-	Rata-rata	Tahun
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Kasus Kematian Ibu

Konsep : [10410196]: Jumlah Kematian Ibu; [K00842] Kematian Ibu/*Maternal Mortality*
Definisi : Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Jiwa
Metode Perhitungan : Jumlah perempuan berumur 10 tahun ke atas yang meninggal selama masa kehamilan, keguguran/pengguguran, persalinan, atau 2 bulan setelah persalinan/keguguran/pengguguran di suatu wilayah. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 222. Format Data Jumlah Kasus Kematian Ibu

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kematian Ibu	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang	-	Total	Jiwa

	lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll.			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410196] Jumlah Kematian Ibu; [K00842] Kematian Ibu/*Maternal Mortality*.
Definisi : Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah perempuan berumur 10 tahun ke atas yang meninggal selama masa kehamilan, keguguran/pengguguran, persalinan, atau 2 bulan setelah persalinan/keguguran/pengguguran di suatu wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan penyebab utama. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 223. Format Data Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Penyebab Kematian Ibu	Penyebab kematian Ibu	1. Abortus 2. Covid-19 3. Gangguan Metabolik 4. Gangguan Sistem Pendarahan 5. Hipertensi dalam Kehamilan 6. Infeksi 7. Jantung 8. Kelainan Jantung dan Pembuluh darah 9. Pendarahan 10. Lain-Lain	-	-
Jumlah Kematian Ibu	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena	-	Total	Jiwa

	sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll.			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah dan Persentase Persalinan di Fasyankes di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan
Definisi : Bagian dari populasi Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Orang / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dibagi Jumlah Ibu bersalin di wilayah dan dalam kurun waktu tertentu dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 224. Format Data Jumlah dan Persentase Persalinan di Fasyankes di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah Persalinan di Fasyankes	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Persentase Persalinan di Fasyankes	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan dan Mengonsumsi Tablet Tambah Darah di Nusa Tenggara Barat.

Konsep : [K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal

Definisi : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah sesuai standar minimal 90 tablet selama masa kehamilan dengan sekurang-kurangnya setiap tablet mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat.
Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah sesuai standar minimal 90 tablet selama masa kehamilan dengan sekurang-kurangnya setiap tablet mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet.
Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 225. Format Data Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan dan Mengonsumsi Tablet Tambah Darah di Nusa Tenggara Barat.

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Ibu Hamil	Banyaknya ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	-	Total	Orang
Jumlah Ibu Hamil dapat TTD	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet	-	Total	Orang
Jumlah Ibu Hamil konsumsi TTD	Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri

Konsep : [10410151] Persentase Siswi SMP Sederajat dan SMA Sederajat yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah; [K02026] Siswa; [K01364] Pelayanan Masa Sebelum Hamil

Definisi : Bagian dari populasi siswi SMP sederajat dan SMA sederajat yang mengonsumsi tablet tambah darah sesuai standar yaitu sebanyak 52 tablet dalam satu tahun. (Sumber Data: Kepka BPS 846 Tahun 2024)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah dibagi total sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat dikali 100. (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 226. Format Data Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Remaja Putri	Banyaknya sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat	-	Total	Orang
Jumlah Remaja Putri yang mendapat TTD	Banyaknya sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat yang mendapat TTD	-	Total	Orang
Jumlah Remaja Putri yang mendapat TTD yang Lengkap dan Sesuai	Banyaknya sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat yang mendapat TTD yang Lengkap dan Sesuai	-	Total	Orang
Cakupan Remaja Putri yang Mendapat TTD	Bagian dari sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat yang mendapat TTD.	-	Persentase	Persen
Jumlah Remaja Putri yang mengonsumsi TTD	Banyaknya sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat yang mengonsumsi TTD	-	Total	Orang

Jumlah Remaja Putri yang mengonsumsi TTD yang Lengkap dan Sesuai	Banyaknya sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat yang mengonsumsi TTD yang Lengkap dan Sesuai	-	Total	Orang
Cakupan Remaja Putri yang mengonsumsi TTD	Bagian dari sasaran remaja putri siswi SMP dan SMA sederajat yang mengonsumsi TTD.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah dan Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan K1, K4. K6 di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Kunjungan ibu hamil K-1, Kunjungan ibu hamil K-4, Kunjungan ibu hamil K-6

Definisi : Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K-1: Bagian dari populasi Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit satu kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga dengan paling sedikit 2 kali oleh dokter pada trimester pertama dan ketiga.

Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K-4: Bagian dari populasi Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan.

Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K-6: Bagian dari populasi Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit enam kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga dengan paling sedikit 2 kali oleh dokter pada trimester pertama dan ketiga. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Ukuran : Total; Persentase
Satuan : Orang; Persen
Metode Perhitungan : Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K-1: Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1 sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama dikali 100.
Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K-4: Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama dikali 100.
Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K-6: Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K6 sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 227. Format Data Jumlah dan Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan K1, K4. K6 di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Ibu hamil	Banyaknya ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang

Jumlah Ibu hamil K1	Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1 sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Jumlah Ibu hamil K4	Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Jumlah Ibu hamil K6	Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K6 sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Cakupan Ibu hamil K1	Bagian dari populasi Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit satu kali	-	Persentase	Persen
Cakupan Ibu hamil K4	Bagian dari populasi Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali	-	Persentase	Persen
Cakupan Ibu hamil K6	Bagian dari populasi Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit enam kali	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Jumlah dan Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan KF dan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan Nifas KF Lengkap, Ibu nifas mendapat vitamin A

Definisi : Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan KF: Bagian dari populasi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling

sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-2 (KF1), hari ke-3 sampai hari ke-7 (KF2), hari ke 8 sampai ke-28 (KF3) dan hari ke-29 sampai ke-42 (KF4) setelah bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A: Bagian dari populasi ibu bersalin yang mendapatkan kapsul vitamin A 200.000 SI sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A melalui ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu baru melahirkan sampai hari ke-42 yang mendapat 2 kapsul vitamin yang mengandung vitamin A dosis 200.000 Satuan Internasional (SI), satu kapsul diberikan segera setelah melahirkan dan kapsul kedua diberikan minimal 24 jam setelah pemberian pertama. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Orang / Persen

Metode Perhitungan : Cakupan pelayanan Nifas KF Lengkap: Jumlah ibu nifas mendapatkan KF Lengkap di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi seluruh ibu nifas di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100.

Cakupan pelayanan Nifas Vitamin A: Jumlah ibu nifas mendapatkan Vitamin A di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi seluruh ibu nifas di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 228. Format Data Jumlah dan Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan KF dan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Ibu nifas	Banyaknya Ibu Nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	-	Total	Orang
Jumlah Ibu nifas KF1	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-2 (KF1)	-	Total	Orang
Jumlah Ibu nifas KF2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-3 sampai hari ke-7 (KF2)	-	Total	Orang
Jumlah Ibu nifas KF3	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke 8 sampai ke-28 (KF3)	-	Total	Orang
Jumlah Ibu nifas KF Lengkap	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-29 sampai ke-42 (KF4)	-	Total	Orang
Jumlah Ibu nifas dapat Vitamin A	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan kapsul vitamin A	-	Total	Orang

	200.000 SI sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A melalui ASI			
Cakupan Ibu nifas KF1	Bagian dari populasi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-2 (KF1)	-	Persentase	Persen
Cakupan Ibu nifas KF2	Bagian dari populasi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-3 sampai hari ke-7 (KF2)	-	Persentase	Persen
Cakupan Ibu nifas KF3	Bagian dari populasi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke 8 sampai ke-28 (KF3)	-	Persentase	Persen
Cakupan Ibu nifas KF Lengkap	Bagian dari populasi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-29 sampai ke-42 (KF4)	-	Persentase	Persen
Cakupan Ibu nifas dapat Vitamin A	Bagian dari populasi ibu bersalin yang mendapatkan kapsul vitamin A 200.000 SI sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A melalui ASI	-	Persentase	Persen

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (*Age Spesific Fertility* Rate/ASFR)

Konsep : [10410004] Angka Fertilitas Spesifik; Umur/*Age-specific Fertilty Rate* (ASFR); [K02352] Fertilitas; [K00819] Kelahiran Hidup

Definisi : Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15—49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Tingkat

Satuan : Kelahiran perseribu perempuan

Metode Perhitungan : Banyaknya jumlah kelahiran pada suatu tahun dari perempuan dengan kelompok umur tertentu per 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. Batasan kelompok umur perempuan (dalam 5 tahunan) adalah selama perempuan dalam masa subur (15-49 tahun). (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 229. Format Data Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (*Age Spesific Fertility Rate*/ASFR)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Umur Ibu	-	1. 15 - 19 Tahun 2. 20 - 24 Tahun 3. 25 - 29 Tahun	Total	Orang

		4. 30 - 34 Tahun 5. 35 - 39 Tahun 6. 40 - 44 Tahun 7. 45 - 49 Tahun		
ASFR	Banyaknya jumlah kelahiran pada suatu tahun dari perempuan dengan kelompok umur tertentu per 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut	-	Tingkat	Kelahiran perseribu perempuan
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Konsep : [10410005] Angka Fertilitas Total/*Total Fertility Rate* (TFR); [K02352] Fertilitas;[K00819] Kelahiran Hidup
Definisi : Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Ukuran : Tingkat
Satuan : Kelahiran
Metode Perhitungan : Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 230. Format Data Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
TFR	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya	-	Tingkat	Kelahiran
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan

Konsep : [10410142] Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Tahun yang Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan; [K01647] Perempuan;[K01824] Melahirkan/ Kelahiran;[K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Definisi : Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berumur 15—49 tahun yang pernah melahirkan anaknya dalam kondisi hidup di fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 231. Format Data Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
PPK 15-49 Melahirkan ALH di Faskes	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhir Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Konsep : [10410136] Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan. [K01647] Perempuan;[K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan;[K01587] Penolong Kelahiran;[K02174] Tenaga Kesehatan.

Definisi : Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berumur 15—49 tahun yang dalam proses melahirkan anaknya dalam kondisi hidup ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam dua tahun terakhir. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dikali 100 (Sumber: INDAH)
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 232. Format Data Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Kelahiran ALH yang Terakhir Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
PPK 15-49 Melahirkan ALH di Faskes	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun dengan Anemia

Konsep : [10410158] Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15—49 Tahun; [K00102] Anemia; [K00803] Kehamilan

Definisi : Bagian dari seluruh ibu hamil berusia 15—49 tahun yang memiliki kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11,0 g/dl pada pemeriksaan saat kunjungan pertama (K1). (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Orang / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah ibu hamil berusia 15-49 Tahun yang mengalami anemia di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dikali 100. (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 233. Format Data Jumlah dan persentase ibu hamil usia 15-49 dengan anemia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah ibu hamil usia 15-49 dengan anemia	Jumlah ibu hamil berusia 15-49 Tahun yang memiliki kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11,0 g/dl	-	Total	Orang

	pada pemeriksaan saat kunjungan pertama (K1)			
Persentase ibu hamil usia 15-49 dengan anemia	Persentase ibu hamil berusia 15-49 Tahun yang memiliki kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11,0 g/dl pada pemeriksaan saat kunjungan pertama (K1)	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Jumlah Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun dengan Kurang Energi Kronis (KEK)

Konsep : Kekurangan Energi Kronis (KEK)

Definisi : Banyaknya ibu hamil usia 15-49 dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm atau Indeks Massa Tubuh (IMT) pada pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤12 minggu) di bawah 18,5 kg/m2 (Kurus). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB disesuaikan).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah ibu hamil berusia 15-49 Tahun yang mengalami KEK di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dieks NTB disesuaikan).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 234. Format Data Jumlah Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun dengan Kurang Energi Kronis (KEK)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah ibu hamil usia 15-49 dengan kurang energi kronis (KEK)	Banyaknya ibu hamil usia 15-49 dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm atau Indeks Massa Tubuh (IMT) pada pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤12 minggu) di bawah 18,5 kg/m2 (Kurus)	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Jumlah kehamilan 4T (Terlalu Banyak, Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Tua)

Konsep : Kehamilan 4T
Definisi : Kehamilan yang 4 Terlalu (4T) yaitu berusia kurang dari 20 tahun; berusia lebih dari 35 tahun; telah memiliki anak hidup lebih dari 3 orang; atau jarak kelahiran antara satu anak dengan lainnya kurang dari 2 tahun. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB disesuaikan).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah ibu hamil yang memenuhi salah satu kriteria 4 Terlalu (4T) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB disesuaikan).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 235. Format Data Jumlah kehamilan 4T (Terlalu Banyak, Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Tua)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah kehamilan 4T	Kehamilan yang 4 Terlalu (4T) yaitu berusia kurang dari 20 tahun; berusia lebih dari 35 tahun; telah memiliki anak hidup lebih dari 3 orang; atau jarak kelahiran antara satu anak dengan lainnya kurang dari 2 tahun	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

16) Jumlah Kasus Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita

Konsep : Kematian Neonatal, Kematian Bayi; [10410195] Jumlah Kematian Balita; [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00206] Balita

Definisi : Jumlah Kasus Kematian neonatal: Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Jumlah Kasus Kematian bayi: Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Jumlah Kasus Kematian Balita: Banyaknya kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun di suatu wilayah. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total

Satuan : Jiwa

Metode Perhitungan : Total kematian masing-masing kelompok usia, meliputi Neonatal, Bayi dan Balita. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 236. Format Data Jumlah Kasus Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus Kematian Neonatal	Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.	-	Total	Jiwa
Jumlah Kasus Kematian Bayi	Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	-	Total	Jiwa
Jumlah Kasus Kematian Balita	Banyaknya Kematian yang terjadi pada anak usia 12 - 59 bulan tetapi bukan	-	Total	Jiwa

	disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

17) Jumlah Kematian Bayi (Neonatal dan Postneonatal) berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Kematian Neonatal, Kematian Postneonatal

Definisi : Kematian Neonatal: Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri berdasarkan penyebab utama. Kematian Postneonatal: Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri berdasarkan penyebab utama. Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total

Satuan : Jiwa

Metode Perhitungan : Total Kematian Masing-Masing Kelompok Usia, Yaitu Neonatal Dan Post Neonatal Berdasarkan Penyebab Utama Kematia. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 237. Format Data Jumlah Kematian Bayi (Neonatal dan Postneonatal) berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Penyebab Utama Kematian	Penyebab utama kematian masing-masing kelompok usia, yaitu neonatal dan postneonatal	Penyebab Utama Kematian Neonatal: 1. BBLR Dan Prematuritas 2. Asfiksia 3. Tetanus Neonatorum 4. Infeksi 5. Kelainan Kongenital 6. Covid-19 7. Kelainan Cardiovaskular Dan Respiratori 8. Lain-lain. B. Penyebab Utama Kematian Postneonatal: 1. Kondisi Perinatal 2. Pneumonia 3. Diare 4. Kelainan Kongenital Jantung 5. Kelainan Kongenital Lainnya 6. Meningitis 7. Penyakit Saraf 8. Demam Berdarah 9. Lain-lain.	Total	Jiwa
Jumlah Kematian Bayi Neonatal	Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri berdasarkan penyebab utama.	-	Total	Jiwa
Jumlah Kematian Bayi Postneonatal	Banyaknya Kematian yang terjadi pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11	-	Total	Jiwa

	bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri berdasarkan penyebab utama			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

18) Jumlah Kematian Anak Balita berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Kematian Anak Balita
Definisi : Banyaknya Kematian yang terjadi pada anak usia 12 - 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total
Satuan : Jiwa
Metode Perhitungan : Total Kematian Anak Balita berdasarkan Penyebab Utama Kematian (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 238. Format Data Jumlah Kematian Anak Balita berdasarkan Penyebab Utama di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-

Penyebab Utama Kematian	Penyebab utama kematian anak balita	1. Diare 2. Demam Berdarah 3. Pneumonia 4. Kelainan Kongenital Jantung 5. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) 6. Penyakit Saraf 7. Kelainan Kongenital Lainnya 8. Tenggelam, Cedera, Kecelakaan 9. Infeksi Parasit 10. Covid-19 11. Lain-lain	-	-
Jumlah Kematian Anak Balita	Banyaknya Kematian yang terjadi pada anak usia 12 - 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

19) Jumlah dan Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K00233] Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Definisi : Bagian dari populasi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Bayi BBLR di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah bayi baru lahir ditimbang di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama dikali 100.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tabel 239. Format Data Jumlah dan Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Bayi Lahir Ditimbang	Banyaknya Bayi lahir yang ditimbang di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Bayi BBLR	Jumlah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram	-	Total	Jiwa
Persentase Bayi BBLR	Persentase bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

20) Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410089] Persentase Anak Berusia 0—5 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. [K00091] Anak; [K00160] Air Susu Ibu (ASI)

Definisi : Bagian dari populasi anak berusia 0— 5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Jiwa / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah bayi kurang dari 6 bulan masih mendapat ASI Eksklusif dibagi jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang dilakukan *recall* dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 240. Format Data Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Bayi Mendapat ASI Eksklusif	Jumlah anak berusia 0— 5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain	-	Total	Jiwa
Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif	Persentase anak berusia 0— 5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

21) Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Bayi baru lahir mendapat IMD
Definisi : Banyaknya Proses menyusu yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total/Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah bayi baru lahir hidup yang mendapat IMD dibagi jumlah seluruh bayi baru lahir hidup dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 241. Format Data Jumlah dan Persentase Bayi Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Bayi Baru Lahir	Banyaknya bayi baru lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Bayi mendapat IMD	Banyaknya proses menyusu yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi	-	Total	Jiwa

	dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.			
Persentase Bayi Mendapat IMD	Persentase proses menyusu yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

22) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan Kesehatan Bayi

Definisi : Bagian dari populasi bayi yang mendapatkan Pelayanan kesehatan minimal 4 kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB/HiB1-3, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Jiwa / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah bayi (umur 29 hari - 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali dibagi jumlah seluruh bayi pada wilayah kerja dan kurun waktu tertentu dikali 100.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 242. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin bayi	1. Laki-laki 2. Perempuan		
Jumlah Bayi	Banyaknya Bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Bayi mendapat pelayanan	Jumlah bayi (umur 29 hari - 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	-	Total	Jiwa
Persentase Bayi mendapat pelayanan	Persentase bayi (umur 29 hari - 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

23) Jumlah dan Cakupan Bayi dan Anak Balita yang Mendapatkan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Bayi mendapat kapsul vitamin A. Anak balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali/tahun

Definisi : Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A = Bagian dari populasi bayi 6-11 bulan mendapat kapsul vitamin A berwarna biru dengan kandungan dosis 100.000 Satuan Internasional (SI) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan anak balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali/tahun = Bagian dari populasi anak balita umur 12-59 bulan mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi

200.000 SI di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Jiwa / Persen

Metode Perhitungan : Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A = Jumlah bayi 6-11 bulan yang mendapat kapsul Vitamin A dibagi jumlah bayi 6-11 bulan dikali 100.
Cakupan anak balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali/tahun = Jumlah anak balita 12-59 bulan yang mendapat kapsul Vitamin A dibagi jumlah anak balita 12-59 bulan dikali 100
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 243. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi dan Anak Balita yang Mendapatkan Vitamin A di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Bayi dan Anak Balita	Banyaknya bayi dan anak balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Bayi dan Anak Balita mendapat Vitamin A	Banyaknya bayi dan anak balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang mendapatkan vitamin A	-	Total	Jiwa

Persentase Bayi dan Anak Balita mendapat Vitamin A	Persentase bayi dan anak balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang mendapatkan vitamin A	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

24) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Imunisasi dasar lengkap
Definisi : Bagian dari populasi bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 244. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin bayi	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Bayi	Banyaknya Bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Bayi IDL	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode	-	Total	Jiwa
Cakupan Bayi IDL	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

25) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib3 berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Imunisasi DPT-HB-Hib3
Definisi : Bagian dari populasi bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke 3. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB3 di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 245. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib3 berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin bayi	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Bayi	Banyaknya Bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Bayi Imunisasi DPT-HB-Hib3	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB3 di satu wilayah tertentu selama satu periode	-	Total	Jiwa
Cakupan Bayi Imunisasi DPT-HB-Hib3	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB3 di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

26) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Polio4* berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Imunisasi Polio 4*
Definisi : Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) dosis ke 4*. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi POLIO4* di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 246. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Polio4* berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin bayi	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Bayi	Banyaknya bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa

Jumlah Bayi Imunisasi Polio4	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi POLIO4* di satu wilayah tertentu selama satu periode	-	Total	Jiwa
Cakupan Bayi Imunisasi Polio4	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi POLIO4* di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

27) Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Campak Rubela berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Imunisasi Campak Rubela
Definisi : Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi campak Rubela. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total /Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Campak Rubela di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 247. Format Data Jumlah dan Cakupan Bayi Mendapatkan Imunisasi Campak Rubela berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin bayi	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Bayi	Banyaknya bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Bayi Imunisasi Campak Rubela	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Campak Rubela di satu wilayah tertentu selama satu periode	-	Total	Jiwa
Cakupan Bayi Imunisasi Campak Rubela	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Campak Rubela di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah *surviving infant* pada wilayah dan periode yang sama dikali 100	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

28) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita berdasarkan Jenis Pelayanan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01361] Pelayanan Kesehatan; [K00206] Balita

Definisi : Bagian dari upaya yang diselenggarakan dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan Anak berusia 0—4 tahun (0—59 bulan). (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Pelayanan kesehatan balita tersebut meliputi:
1. Balita Memiliki Buku KIA,
2. Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan,
3. Balita dilayani SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang,),
4. Balita sakit yang datang berobat ke Puskesmas dilayani dengan pendekatan MTBS.
(Sumber Data: Definisi Operasional DIkes NTB)

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Jiwa / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah balita usia 0-4 Tahun yang mendapat masing-masing pelayanan kesehatan di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah balita pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 248. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita berdasarkan Jenis Pelayanan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Balita	Jumlah Balita	-	Total	Jiwa

Jumlah Anak Balita	Jumlah Anak Balita	-	Total	Jiwa
Jumlah Balita memiliki Buku KIA	Bagian dari pelayanan kesehatan balita	-	Total	Jiwa
Jumlah Balita Dipantau Pertumbuhan Perkembangan	Bagian dari pelayanan kesehatan balita	-	Total	Jiwa
Jumlah Dilayani SDIDTK	Bagian dari pelayanan kesehatan balita	-	Total	Jiwa
Jumlah Balita Dilayani MTBS	Bagian dari pelayanan kesehatan balita	-	Total	Jiwa
Cakupan Bayi mendapat Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 0-4 Tahun yang mendapat masing-masing pelayanan kesehatan di satu wilayah tertentu selama satu periode dibagi Jumlah balita pada wilayah dan periode yang sama dikali 100	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

29) Jumlah dan Persentase Balita Ditimbang di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Balita ditimbang (D)

Definisi : Bagian dari populasi Balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Jiwa / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah balita ditimbang di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah balita pada wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 249. Format Data Jumlah dan Persentase Balita Ditimbang di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Balita sasaran	Banyaknya balita sasaran untuk ditimbang berat badannya di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Balita ditimbang	Jumlah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya	-	Total	Jiwa
Persentase Balita ditimbang	Persentase balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

30) Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Balita Gizi Buruk
Definisi : Bagian dari populasi Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z *score* kurang dari -3 SD. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang atau tinggi badan dikali 100.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 250. Format Data Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Balita	Banyaknya balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Balita Gizi Buruk	Banyaknya balita dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan	-	Total	Jiwa

	(BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z *score* kurang dari -3 SD			
Persentase Balita Gizi Buruk	Persentase balita dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z *score* kurang dari -3 SD	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

31) Jumlah dan Persentase Balita berdasarkan Status Gizi Kurang, Pendek dan Kurus di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Balita Gizi Kurang, Balita Pendek, Balita Berat Badan Kurang

Definisi : Balita Gizi Kurang: Bagian dari populasi Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z *score* kurang dari -3 SD

Balita Pendek: Bagian dari populasi Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z *score* kurang dari -2 SD (termasuk pendek dan sangat pendek). Balita pendek termasuk balita pendek (<-2 SD) dan balita sangat pendek (< -3 SD).

Balita Berat Badan Kurang: Bagian dari populasi Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z *score* kurang dari -2 SD (termasuk berat badan kurang dan sangat kurang). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Jiwa / Persen

Metode Perhitungan : Persentase Balita Gizi Kurang: Jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan dikali 100.
Persentase Balita Pendek: Jumlah balita pendek dibagi jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan dikali 100.
Persentase Balita BB Kurang: Jumlah balita berat badan kurang dibagi jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 251. Format Data Jumlah dan Persentase Balita berdasarkan Status Gizi Kurang, Pendek dan Kurus di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Gizi Balita	-	1. Balita Gizi Kurang - *Underweight* (BB/U) 2. Balita Pendek - *Stunting* (TB/U) 3. Balita Kurus - *Wasting* (BB/ TB)	-	-
Jumlah Balita	Banyaknya balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Persentase Balita berdasarkan Status Gizi	Banyaknya balita berdasarkan status gizi dibagi jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan dikali 100	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

32) Jumlah dan Persentase Balita *Stunting* di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410162] Prevalensi Tengkes/*Stunting* pada Balita; [K02057] Tengkes/*Stunting*
Definisi : Bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846). Perhitungan balita pendek dan sangat pendek berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U). Balita pendek termasuk memiliki Z *Score* <-2 SD dan balita sangat pendek Z *Score* < -3 SD. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen. (Sumber Data: INDAH BPS).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 252. Format Data Jumlah dan Persentase Balita *Stunting* di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Balita	Banyaknya balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Balita *Stunting*	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu	-	Total	Jiwa

Persentase Balita *Stunting*	Persentase anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

33) Jumlah dan Persentase Anak Usia 18-24 Bulan yang Mendapat DPT-HB-Hib Dosis ke-4

Konsep : Imunisasi DPT-HB-Hib4
Definisi : Bagian dari Populasi Anak Usia 18-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke-4. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB4 di satu wilayah tertentu dibagi jumlah anak usia 18-24 bulan pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 253. Format Data Jumlah dan Persentase Anak Usia 18-24 Bulan yang Mendapat DPT-HB-Hib Dosis ke-4

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah Anak Usia 18-24 Bulan	Banyaknya Anak Usia 18-24 Bulan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Anak Usia 18-24 Bulan mendapat DPT-HB-Hib dosis ke-4	Jumlah anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB4 di satu wilayah tertentu	-	Total	Jiwa
Persentase Anak Usia 18-24 Bulan mendapat DPT-HB-Hib dosis ke-4	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB4 di satu wilayah tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

34) Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima 2 Dosis Vaksin Campak (Cakupan Imunisasi Campak-2)

Konsep : Imunisasi Campak Rubela 2
Definisi : Bagian dari populasi Anak Usia 12-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi Campak Rubela dosis ke-2. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi Campak Rubela 2 di suatu wilayah tertentu dibagi jumlah anak usia 12-24 bulan pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 254. Format Data Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima 2 Dosis Vaksin Campak (Cakupan Imunisasi Campak-2)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah anak usia 12-24 bulan	Banyaknya anak usia 12-24 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah anak usia 12-24 bulan mendapat Imunisasi Campak Rubela	Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi Campak Rubela 2 di suatu wilayah tertentu	-	Total	Jiwa
Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat Imunisasi Campak Rubela	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi Campak Rubela 2 di suatu wilayah tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

35) Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima Vaksinasi PCV Dosis Ketiga

Konsep : Imunisasi PCV 2
Definisi : Bagian dari Populasi Anak Usia 12-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis Imunisasi PCV dosis ke-3. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Jiwa / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi PCV 3 di suatu wilayah tertentu dibagi jumlah anak usia 12-24 bulan pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 255. Format Data Jumlah dan Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Menerima Vaksinasi PCV Dosis Ketiga

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah anak usia 12-24 bulan	Banyaknya anak usia 12-24 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah anak usia 12-24 bulan yang	Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi PCV 3 di suatu wilayah tertentu	-	Total	Jiwa

menerima vaksinasi PCV dosis ketiga				
Persentase anak usia 12-24 bulan yang menerima vaksinasi PCV dosis ketiga	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi PCV 3 di suatu wilayah tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

36) Jumlah dan Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Definisi : Bagian dari Populasi Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Desa/Kelurahan / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah desa atau kelurahan UCI di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 256. Format Data Jumlah dan Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Desa/Kelurahan	Banyaknya desa di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Jiwa
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Jumlah desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	-	Total	Desa/ kelurahan
Persentase Desa/Kelurahan UCI	Persentase esa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

37) Persentase Remaja Putri (15-19 tahun) dengan Anemia

Konsep : [K00102] Anemia
Definisi : Bagian dari populasi remaja putri yang mengalami kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Remaja Putri Kelas VII SMP dan X SMA yang teridentifikasi Anemia di suatu wilayah tertentu dibagi jumlah Remaja putri Kelas VII SMP dan X SMA yang mendapatkan skrining Anemia pada wilayah dan periode yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 257. Format Data Persentase Remaja Putri (15-19 tahun) dengan Anemia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Remaja Putri	Jumlah Remaja putri Kelas VII SMP dan X SMA yang mendapatkan skrining Anemia pada wilayah tertentu	-	Total	Orang
Jumlah Remaja Putri Anemia	Jumlah Remaja Putri Kelas VII SMP dan X SMA yang teridentifikasi Anemia di suatu wilayah tertentu	-	Total	Orang
Persentase Remaja Putri Anemia	Bagian dari populasi remaja putri yang mengalami kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

38) Jumlah Posyandu dan Posyandu Aktif di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410055] Jumlah Posyandu; [K01766] Posyandu; Posyandu Aktif

Definisi : Banyaknya suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)

Posyandu Aktif yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes.
2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah
3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi.
4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah posyandu: Jumlah posyandu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
Jumlah Posyandu Aktif: Jumlah posyandu aktif di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 258. Format Data Jumlah Posyandu dan Posyandu Aktif di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota		Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah Posyandu	Banyaknya posyandu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	-	Total	Unit
Jumlah Posyandu Aktif	Banyaknya posyandu yang memenuhi empat kriteria posyandu aktif	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

39) Jumlah Kader Posyandu

Konsep : Kader Posyandu
Definisi : Banyaknya anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela pada periode tertentu. (Sumber Data: Pergub NTB Nomor 30 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Posyandu)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total Kader di setiap Posyandu pada periode tertentu masing-masing Kabupaten/Kota. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 259. Format Data Jumlah Kader Posyandu

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kader Posyandu	Banyaknya anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela pada periode tertentu	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

40) Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif

Konsep : [10410055] Jumlah Posyandu; [K01766] Posyandu; Posyandu Aktif

Definisi : Bagian dari Seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Posyandu Aktif minimal 80%. Posyandu Aktif harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes.
2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah
3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi.
4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Kabupaten/Kota / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah kabupaten/kota di NTB yang memiliki posyandu aktif lebih dari 80% dibagi dengan Total Kabupaten/Kota di NTB.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 260. Format Data Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Kab/Kota Posyandu Aktif Min 80%	Banyaknya kabupaten/kota di NTB yang memiliki posyandu aktif lebih dari 80%	-	Total	Kab/Kota
Persentase Kab/Kota Posyandu Aktif Min 80%	Persentase kabupaten/kota di NTB yang memiliki posyandu aktif lebih dari 80%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

41) Jumlah Posbindu PTM di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Posbindu PTM
Definisi : Jumlah UKBM (Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/ deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta *monitoring* dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah Posbindu PTM pada kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 261. Format Data Jumlah Posbindu PTM di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Posbindu PTM	Jumlah Posbindu PTM pada kurun waktu tertentu	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

42) Jumlah dan Persentase Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif berdasarkan Kontrasepsi di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Peserta KB Aktif Metode Modern (mCPR)
Definisi : Bagian dari populasi peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi secara terus-menerus dengan metode modern (kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan, MAL) untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Orang / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah peserta KB Aktif dengan metode modern di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 262. Format Data Jumlah dan Persentase Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif berdasarkan Kontrasepsi di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kontrasepsi	Jenis kontrasepsi yang digunakan peserta Keluarga Berencana (KB)	Kondom; Suntik; Pil; AKDR; MOW; MOP; Implan; MAL	-	-
Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah peserta KB Aktif dengan metode modern di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Persentase KB Aktif	Persentase peserta KB Aktif dengan metode modern di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

43) Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/*Discontinuation of Contraseptive Rate* (DCR) 12 bulan

Konsep : Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (*Discontinuation Contraceptive Rate*/DCR) 12 bulan
Definisi : Persentase episode pemakaian kontrasepsi yang dihentikan pada 12 bulan terakhir dalam rentang waktu pengamatan selama 5 tahun/60 bulan sebelum survei. (Sumber Data: Laporan Kependudukan BKKBN Tahun 2024).
Ukuran : Tingkat
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BKKBN
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 263. Format Data Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/*Discontinuation of Contraseptive Rate* (DCR) 12 bulan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DCR)	Jenis kontrasepsi yang digunakan peserta Keluarga Berencana (KB)	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

44) Unmet Need KB

Konsep : Unmet need KB
Definisi : Bagian dari populasi pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi dibagi Jumlah pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: BKKBN)
Sumber Data/Publikasi : BKKBN
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 264. Format Data *Unmet Need* KB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah pasangan usia subur/PUS	Banyaknya pasangan Usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun	-	Total	Orang
Jumlah unmeet need KB	Jumlah pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak	-	Total	Orang

	tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi			
Persentase unmeet need KB	Persentase pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

45) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik berdasarkan Kelas di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan kesehatan peserta didik
Definisi : Bagian dari pupulasi peserta didik yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Orang / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah peserta didik yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah peserta didik di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 265. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik berdasarkan Kelas di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kelas	Kelas peserta didik yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kelas 1 SD/MI; Kelas 7 SMP/MTS; Kelas 10 SMA/MA	-	-
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya peserta didik pada masing-masing kelas yang mendapat pelayanan kesehatan	-	-	-
Jumlah Peserta Didik Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta didik yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan	-	Total	Orang
Cakupan Peserta Didik Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persentase peserta didik yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

46) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar

Definisi : Bagian dari populasi anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
1. Skrining kesehatan.
2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan

Pelayanan kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Orang / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah tertentu dibagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai 9(yang ada di wilayah kerha Kabupaten/Kota tersebut dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 266. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak dengan usia pendidikan dasar di suatu wilayah pada waktu tertentu	-	-	-
Jumlah Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah tertentu	-	Total	Orang
Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

47) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Sekolah di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar
Definisi : Bagian dari populasi sekolah yang menjadi target pelayanan kesehatan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Orang / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah sekolah yang mendapat pelayanan kesehatan dibagi jumlah total sekolah dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 267. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Sekolah di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Sekolah	Klasifikasi sekolah pada pendidikan dasar dan menengah	SD/MI; SMP/MTS; SMA/MA	-	-
Jumlah Sekolah	Banyaknya sekolah pada pendidikan dasar dan menengah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	-	-	-
Jumlah Sekolah Mendapat Pelayanan Kesehatan	Banyaknya sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	-	Total	Orang
Cakupan Sekolah Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persentase sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

48) Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan kesehatan usia lanjut
Definisi : Bagian dari Pelayanan kesehatan untuk warga negara usia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Orang / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah tertentu dibagi jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 268. Format Data Jumlah dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin lansia.	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-

Jumlah Usia Lanjut	Banyaknya warga usia 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	-	-	-
Jumlah Usia Lanjut Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah tertentu	-	Total	Orang
Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	Persentase warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

49) *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

Konsep : [10410155] Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan; [K02250] *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

Definisi : Bagian dari populasi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu dibagi jumlah total penduduk, dinyatakan dalam persen. (Sumber: INDAH BPS)

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 269. Format Data *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

50) Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir

Konsep : [10410055] Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan; [K01476] Penduduk; [K00835] Keluhan Kesehatan
Definisi : Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam periode waktu satu bulan terakhir. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen. (Sumber Data: INDAH BPS)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 270. Format Data Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah penduduk	Banyaknya penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Persentase	Persen
Jumlah Penduduk Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir	Jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir	-	Persentase	Persen
Persentase Penduduk Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir	Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

51) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun

Konsep : [10410160] Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas; [K01246] Obesitas
Definisi : Bagian dari populasi penduduk umur 18 tahun ke atas dengan hasil pengukuran indeks massa tubuh (IMT) lebih besar dari atau sama dengan 25. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25, dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen. (Sumber Data: INDAH BPS)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 271. Format Data Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun	Persentase penduduk umur ≥18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥25	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

52) Jumlah dan Cakupan Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Definisi : Bagian dari populasi warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:
1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Orang / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah orang usia 15-59 Tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15-59 Tahun di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tahun yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 272. Format Data Jumlah dan Cakupan Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pelayanan Skrining Kesehatan	Banyaknya orang usia 15-59 Tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	-	Total	Orang
Jumlah Berisiko	Banyaknya orang usia 15-59 Tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai	-	Total	Orang

	standar dalam kurun waktu satu tahun memiliki risiko penyakit			
Cakupan Pelayanan Skrining Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 Tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

53) Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Definisi : Banyaknya orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan dapat berupa pemeriksaan, pengobatan, pencabutan gigi tetap/gigi sulung, penambalan tetap/sementara, perawatan pulpa, pembersihan karang gigi dan pembuatan gigi tiruan lepasan (Permenkes Nomor 89 tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Gigi dan mulut. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 273. Format Data Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Tumpatan Gigi Tetap	Jumlah tumpatan gigi tetap yang telah selesai dilakukan penambalan permanen dalam satu tahun	1. Laki-laki 2. Perempuan;	-	-
Jumlah Pencabutan Gigi Tetap	Jumlah pencabutan gigi tetap yang dilakukan dalam satu tahun	-	Total	Orang
Jumlah Berisiko	Jumlah kasus gigi dan mulut yang berisiko dalam satu tahun	-	Total	Orang
Jumlah Kasus Gigi	Jumlah kasus gigi yang ditemukan dalam satu tahun	-	Total	Orang
Jumlah Kasus Dirujuk	Jumlah kasus gigi dan mulut yang dikirim dari Puskesmas ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut dalam satu tahun	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

54) Jumlah Kasus Tuberkulosis berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K02230] Tuberkulosis (TB)
Definisi : Banyaknya kasus seseorang yang didiagnosis menderita tuberkulosis, baik kasus baru maupun kambuh pada suatu periode tertentu. Tuberkulosis adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : Total Kasus Tuberkulosis berdasarkan Jenis Kelamin.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 274. Format Data Jumlah Kasus Tuberkulosis berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan		
Jumlah Kasus Tuberkulosis	Banyaknya kasus seseorang yang didiagnosis menderita tuberkulosis, baik kasus baru maupun kambuh pada suatu periode tertentu	-	Total	Orang

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

55) Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Kasus tuberkulosis sembuh
Definisi : Angka yang menggambarkan Pasien tuberkulosis paru sensitif obat (SO) dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Tuberkulosis adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah kasus tuberkulosis paru sensitif obat (S0) terkonfirmasi bakteriologis yang memiliki hasil pengobatan sembuh dibagi Jumlah kasus tuberkulosis paru sensitif obat (S0) terkonfirmasi yang diobati dan dilaporkan pada kohort yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 275. Format Data Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Angka Kesembuhan TB	Angka yang menggambarkan Pasien tuberkulosis paru sensitif obat (SO) dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

56) Angka Pengobatan Lengkap (*Complete Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pengobatan tuberkuloasis lengkap

Definisi : Angka yang menggambarkan Pasien tuberkulosis sensitif obat (SO) yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan. Tuberkulosis adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah kasus tuberkulosis paru sensitif obat (S0) yang memiliki hasil pengobatan lengkap dibagi Jumlah kasus tuberkulosis paru sensitif obat (S0) yang diobati dan dilaporkan pada kohort yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 276. Format Data Angka Pengobatan Lengkap (*Complete Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Angka Pengobatan Lengkap TB	Angka yang menggambarkan Pasien tuberkulosis sensitif obat (SO) yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

57) Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : 10410001; Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis; [K02230] Tuberkulosis (TB)

Definisi : Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh. Tuberkulosis adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah semua kasus tuberkulosis sensitif obat (SO) yang memiliki hasil akhir pengobatan sembuh dan pengobatan lengkap dibagi jumlah semua kasus tuberkulosis sensitif obat. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 277. Format Data Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis berdasarkan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

58) Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage* TBC)

Konsep : [10410015] Angka Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis; [K02230] Tuberkulosis (TB)
Definisi : Bagian dari perkiraan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati. Tuberkulosis adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah semua kasus TBC yang ditemukan dan diobati dibagi dengan perkiraan jumlah semua kasus TBC, dinyatakan dalam satuan persen. (Sumber Data: INDAH BPS).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 278. Format Data Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage* TBC)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Treatment Coverage TBC	Bagian dari perkiraan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

59) Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Kasus tuberkulosis anak, [K02230] Tuberkulosis (TB).
Definisi : Banyaknya kasus tuberkulosis pada anak usia 0-14 tahun. Tuberkulosis adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah seluruh kasus tuberkulosis anak (<15 Tahun) ditemukan yang dilaporkan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 279. Format Data Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak	Banyaknya kasus tuberkulosis pada anak usia 0-14 tahun	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

60) Persentase Obat Tuberkulosis di FKTP dan FKTL

Konsep : Obat Tuberkulosis
Definisi : Persentase obat tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Tuberkulosis adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 280. Format Data Persentase Obat Tuberkulosis di FKTP dan FKTL

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Persentase Obat Tuberkulosis di FKTP dan FKTL	Persentase obat tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

61) Jumlah Kasus Baru Kusta (Kering dan Basah) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Kusta; Kusta Kering, Kusta Basah

Definisi : Banyaknya kasus Kusta Baru baik kering maupun basah pada laki-laki maupun perempuan. Penderita kusta adalah Seseorang yang mempunyai satu dari tanda utama kusta, yaitu Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa, Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf, Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom, dan Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (*slit skin smear*).
Penderita tipe PB (Kusta Kering) adalah Penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta 1-5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif.
Penderita tipe MB (Kusta Basah) adalah Penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta > 5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total kasus baru kusta baik kering maupun basah pada penderita laki-laki dan perempuan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 281. Format Data Jumlah Kasus Baru Kusta (Kering dan Basah) berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Kasus Baru Kusta Kering	Banyaknya penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta 1-5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif	-	Total	Orang
Jumlah Kasus Baru Kusta Basah	Banyaknya penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta > 5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

62) Jumlah Kasus Kusta (Kering dan Basah) Terdaftar berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01012] Kusta

Definisi : Banyaknya kasus penderita Kusta kering maupun basah berdasarkan kelompok umur. Penderita kusta adalah Seseorang yang mempunyai satu dari tanda utama kusta, yaitu Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa, Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf, Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom, dan Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (*slit skin smear*).

Penderita tipe PB (Kusta Kering) adalah Penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta 1-5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif.
Penderita tipe MB (Kusta Basah) adalah Penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta > 5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif.

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total penderita kusta baik kering maupun basah pada masing-masing kelompok umur.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 282. Format Data Jumlah Kasus Kusta (Kering dan Basah) Terdaftar berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kelompok Umur	Kasus kusta terdaftar pada kelompok umur tertentu. Kasus kusta terdaftar pada anak yaitu Penderita kusta terdaftar pada penduduk yang berusia 0 - <15 tahun	Dewasa Anak	-	-

	Kasus kusta terdaftar pada dewasa yaitu Penderita kusta terdaftar pada penduduk yang berusia ≥ 15 tahun			
Jumlah Kasus Kusta Kering Terdaftar	Banyaknya penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta 1-5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif	-	Total	Orang
Jumlah Kasus Kusta Basah Terdaftar	Banyaknya penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta > 5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

63) Jumlah Penderita Kusta (Kering dan Basah) Selesai Berobat di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01012] Kusta

Definisi : Penderita kusta adalah Seseorang yang mempunyai satu dari tanda utama kusta, yaitu Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa, Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf, Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom, dan Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (*slit skin smear*). Penderita tipe PB (Kusta Kering) adalah Penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta 1-5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif. Sedangkan Penderita tipe

MB (Kusta Basah) adalah Penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta > 5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif. Jumlah Kasus Kusta Kering Selesai Berobat adalah Jumlah kasus kusta baru kering dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 blister dalam 6-9 bulan). Penderita kusta baru PB diambil dari penderita kusta baru PB yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate PB tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru PB tahun 2020 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu. Sedangkan Jumlah Kasus Kusta Basah Selesai Berobat adalah Jumlah kasus kusta baru MB dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 blister dalam 12-18 bulan). Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru MB yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan (Multi Drug Therapy/MDT) tepat waktu.

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total penderita kusta yang sudah selesai berobat. pada masing-masing kriteria yaitu:
1. Kasus Kusta Kering selesai Berobat
2. Kasus Kusta Basah selesai Berobat

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 283. Format Data Jumlah Penderita Kusta (Kering dan Basah) Selesai Berobat di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus Kusta Kering	Banyaknya penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta 1-5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif	-	Total	Orang
Jumlah Penderita Kusta Kering Selesai Berobat	Jumlah Kasus Kusta Kering Selesai Berobat adalah Jumlah kasus kusta baru kering dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 blister dalam 6-9 bulan)	-	Total	Orang
Jumlah Kasus Kusta Basah	Banyaknya penderita kusta yang mempunyai tanda utama yaitu Jumlah bercak kusta > 5, Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf, dan Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif	-	Total	Orang
Jumlah Penderita Kusta Basah Selesai Berobat	Jumlah Kasus Kusta Basah Selesai Berobat adalah Jumlah kasus kusta baru MB dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 blister dalam 12-18 bulan)	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

64) Angka Kesembuhan atau RFT Rate Kusta (Kering dan Basah)

Konsep : RFT Kusta

Definisi : *Release from Treatment* (RFT) Rate Kusta kering adalah Jumlah kasus kusta baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 blister dalam 6-9 bulan). Penderita kusta baru PB diambil dari penderita kusta baru PB yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT *rate* PB tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru PB tahun 2020 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu.

Release from Treatment (RFT) Rate Kusta Basah (Multi Basiler) adalah Jumlah kasus kusta baru MB dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 blister dalam 12-18 bulan). Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru MB yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT *rate* tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan (*Multi Drug Therapy*/MDT) tepat waktu.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah penderita Kusta yang sembuh dibagi dengan jumlah penderita Kusta baru dikali 100.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 284. Format Data Angka Kesembuhan atau RFT Rate Kusta (Kering dan Basah)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
RFT Rate Kusta Kering	lah kasus kusta baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 blister dalam 6-9 bulan)	-	Persentase	Persen
RFT Rate Kusta Basah	Jumlah kasus kusta baru MB dari periode kohort satu tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 blister dalam 12-18 bulan)	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

65) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta

Konsep : [10410034] Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta; [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota;[K00428] Eliminasi Penyakit;[K01012] Kusta

Definisi : Banyaknya kabupaten/kota yang telah mencapai pengurangan kasus penyakit kusta (kurang dari satu kasus per 10.000 penduduk) pada tahun tertentu. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total

Satuan : Kabupaten/ kota

Metode Perhitungan : Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi Kusta (<1 kasus/10.000 penduduk) pada tahun tertentu. (Sumber Data: INDAH BPS)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 285. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta	Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi Kusta (<1 kasus/10.000 penduduk) pada tahun tertentu	-	Total	Kabupaten/ Kota
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

66) Persentase Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat

Konsep : Kusta Baru Tanpa Cacat
Definisi : Banyaknya Kasus kusta baru yang tidak memiliki kelainan sensorik maupun anatomis dibagi jumlah seluruh penderita kusta (PB+MB) baru yang ditemukan pada wilayah tertentu dan kurun waktu yang sama.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah penderita kusta baru tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat 0) pada wilayah dan waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penderita kusta (PB+MB) baru yang ditemukan pada wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 286. Format Data Persentase Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kusta Baru	Banyaknya jumlah seluruh penderita kusta (PB+MB) baru yang ditemukan pada wilayah dan kurun waktu yang sama.	-	Persentase	Persen
Jumlah Kusta Baru Tanpa Cacat	Banyaknya penderita kusta baru tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat 0) pada wilayah dan waktu tertentu	-	Persentase	Persen
Persentase Kusta Baru Tanpa Cacat	Persentase kasus kusta baru yang tidak memiliki kelainan sensorik maupun anatomis	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

67) Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai API <1/1.000 Penduduk

Konsep : 0410013; Angka Kesakitan Malaria; [K00894] Kesakitan/ Morbiditas; [K01133] Malaria

Definisi : Banyaknya kasus positif malaria yang dibuktikan dengan pemeriksaan sediaan darah pada setiap 1000 penduduk. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)

Ukuran : Total

Satuan : Kabupaten/ Kota

Metode Perhitungan : Jumlah kasus malaria positif (dengan pemeriksaan sediaan darah) dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 1.000. (Sumber Data: INDAH BPS)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 287. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai API <1/1.000 Penduduk

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Kab/Kota API < dari 1/1000	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki API < dari 1/1000	-	Total	Kab/Kota
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

68) Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi

Konsep : [10410035] Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Filariasis [K00709] Kabupaten;[K00989] Kota;[K00428] Eliminasi Penyakit;[K01593] Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)
Definisi : Banyaknya kabupaten/kota yang telah mencapai pengurangan kasus penyakit filariasis/kaki gajah menjadi di bawah 1% pada tahun tertentu. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Kabupaten/ Kota
Metode Perhitungan : Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. (Sumber Data: INDAH BPS).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 288. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Kab/Kota Endemis Filariasis Eliminasi	Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%.	-	Total	Kab/Kota
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

69) Persentase Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka Mikrofilaria <1%

Konsep : [K00709] Kabupaten;[K00989] Kota;[K00428] Eliminasi Penyakit;[K01593] Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)

Definisi : Bagian dari kabupaten/kota yang telah mencapai pengurangan kasus penyakit filariasis/kaki gajah menjadi di bawah 1% pada tahun tertentu. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)

Ukuran : Total

Satuan : Kabupaten/ Kota

Metode Perhitungan : Jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% dibagi jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100. (Sumber Data: INDAH BPS disesuaikan).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 289. Format Data Persentase Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka Mikrofilaria <1%

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Persentase Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka Mikrofilaria <1%	Jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% dibagi jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

70) Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat

Konsep : HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)
Definisi : Banyaknya orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen *rapid test* pada kelompok umur. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Kasus HIV pada masing-masing kelompok umur. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 290. Format Data Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Umur	Pengelompokan populasi berdasarkan rentang usia tertentu	1. ≤ 4 Tahun 2. 5 - 14 Tahun 3. 15 - 19 Tahun	-	-

		4. 20 - 24 Tahun 5. 25 - 49 Tahun 6.≥ 50 Tahun		
Jumlah Kasus HIV	Banyaknya orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen *rapid test*	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

71) Jumlah Kasus HIV berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); [K00704] Jenis Kelamin
Definisi : Banyaknya orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen *rapid test* baik laki-laki maupun perempuan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Kasus HIV baik laki-laki maupun perempuan.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 291. Format Data Jumlah Kasus HIV berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Kasus HIV	Banyaknya orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen *rapid test*	-	Total	Orang

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

72) Jumlah ODHIV Baru dan Mendapatkan Perawatan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : ODHIV Baru mendapatkan ARV
Definisi : Jumlah Orang yang berisiko terinfeksi HIV mengetahui status terinfeksi HIV (penetapan diagnose) yang baru ditemukan dan diberikan pengobatan ARV (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total penderita DHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 292. Format Data Jumlah ODHIV Baru dan Mendapatkan Perawatan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah ODHIV Baru ditemukan	Orang yang berisiko terinfeksi HIV mengetahui status terinfeksi HIV (penetapan diagnosa) dan baru di temukan.	-	Total	Orang
Jumlah ODHIV Baru ditemukan Mendapat ARV	Total penderita DHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

73) Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria

Konsep : [10410036] Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria; [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K00428] Eliminasi Penyakit; [K01133] Malaria

Definisi : Banyaknya kabupaten/kota yang telah mencapai pengurangan kasus penyakit malaria pada tahun tertentu. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total

Satuan : Kabupaten/ kota

Metode Perhitungan : Jumlah absolut kumulatif kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun. (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 293. Format Data Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah absolut kumulatif kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun	-	Total	Kabupaten/ Kota
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

74) Jumlah Kasus, Pengobatan dan Kematian Malaria di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01133] Malaria
Definisi : Banyaknya kasus, pengobatan, dan kematian penyakit malaria yaitu Penyakit infeksi yang banyak dijumpai di daerah tropis, disertai gejala demam dan turun naiknya suhu yang tidak teratur, ditularkan oleh nyamuk anofeles. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Positif Malaria: Jumlah Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun *Rapid Diagnostic Test* (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Jumlah Malaria mendapat Pengobatan: Jumlah kasus malaria positif yang mendapat pengobatan pada masing-masing Kabupaten/Kota
Jumlah Kematian: Jumlah kasus kematian karena malaria di suatu wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 294. Format Data Jumlah Kasus, Pengobatan dan Kematian Malaria di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Positif Malaria	Jumlah Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium	-	Total	Orang
Jumlah Mendapat Pengobatan	Jumlah kasus malaria positif yang mendapat pengobatan pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Total	Orang
Jumlah Kematian akibat malaria	Jumlah kasus kematian karena malaria di suatu wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota.	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

75) Jumlah Kasus dan Kematian Malaria berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01133] Malaria; [K00704] Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya kasus Positif Malaria dan kematian akibat penyakit malaria yaitu Penyakit infeksi yang banyak dijumpai di daerah tropis, disertai gejala demam dan turun naiknya suhu yang tidak teratur, ditularkan oleh nyamuk anofeles baik laki-laki maupun perempuan. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846 disesuaikan).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah Positif Malaria: Jumlah Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor pada masing-masing Kabupaten/Kota dan pada setiap jenis kelamin.

Jumlah Kematian: Jumlah kasus kematian karena malaria di suatu wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota dan pada setiap jenis kelamin.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 295. Format Data Jumlah Kasus dan Kematian Malaria berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Positif Malaria	Jumlah Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium	-	Total	Orang
Jumlah Kematian akibat Malaria	Jumlah kasus kematian karena malaria di suatu wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota dan pada setiap jenis kelamin	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

76) Persentase Kasus Malaria Mendapat Pengobatan Standar di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01133] Malaria

Definisi : Bagian dari kasus penyakit malaria yaitu Penyakit infeksi yang banyak dijumpai di daerah tropis, disertai gejala demam dan turun naiknya suhu yang tidak teratur, ditularkan oleh nyamuk anofeles yang

mendapat pengobatan standar yang mendapat pengobatan standar. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846 disesuaikan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah kasus malaria positif yang diobati sesuai standar program di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kasus malaria positif di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 296. Format Data Persentase Kasus Malaria Mendapat Pengobatan Standar di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah kasus malaria positif	Jumlah Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium.	-	Total	Orang
Jumlah kasus malaria positif mendapat pengobatan	Jumlah kasus malaria positif yang mendapat pengobatan pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Total	Orang
Persentase Kasus Malaria Mendapat Pengobatan Standar	Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar program di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	-	Persentase	Persen

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

77) Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Malaria di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01133] Malaria
Definisi : Banyaknya korban meninggal akibat malaria selama rentang waktu tertentu. (Sumber Data: Kepka BPS 846 disesuaikan).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Kasus meninggal karena malaria di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kasus malaria positif di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 297. Format Data Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Malaria di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
CFR Malaria	Banyaknya korban meninggal akibat malaria selama rentang waktu tertentu	-	Persentase	Persen

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

78) Jumlah Kasus *Accute Flacid Paralysis* (AFP) Non Polio di Nusa Tenggara Barat

Konsep : *Acute Flacid Paralysis* (AFP)
Definisi : Banyaknya kasus Kelumpuhan pada anak berusia <15 tahun yang bersifat layuh (*flaccid*) terjadi secara akut/ mendadak (<14 hari) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah kasus AFP Non Polio pada penduduk<15 tahun di suatu wilayah kerja pada satu kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 298. Format Data Jumlah Kasus *Accute Flacid Paralysis* (AFP) Non Polio di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus AFP Non Polio	Banyaknya kasus Kelumpuhan pada anak berusia <15 tahun yang bersifat layuh (*flaccid*) terjadi secara akut/	-	Total	Orang

	mendadak (<14 hari) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

79) Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
Definisi : Banyaknya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Measless Rubella, Difteri, Hepatitis B, Pertusis, Poliomyelitis, Tetanus, Tuberkulosis). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : Jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Measless Rubella, Difteri, Hepatitis B, Pertusis, Poliomyelitis, Tetanus, Tuberkulosis) pada masing-masing Kabupaten/Kota. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 299. Format Data Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Penyakit	Jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	1. Difteri 2. Hepatitis B 3. Pertusis 4. Suspek Campak 5. Tetanus Neonatorum	-	-
Jumlah Kasus	Banyaknya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Measless Rubella, Difteri, Hepatitis B, Pertusis, Poliomyelitis, Tetanus, Tuberkulosis)	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

80) Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pneumonia
Definisi : Banyaknya Kasus Balita yang mengalami batuk dan atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas, usia 0-<2 bulan ≥60 kali/menit, usia 2-<12 bulan ≥ 50 kali/menit, usia 12-59 bulan ≥40 kali/menit. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 300. Format Data Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Kasus Pneumonia Balita	Banyaknya Kasus Balita yang mengalami batuk dan atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas, usia 0-<2 bulan ≥60 kali/menit, usia 2-<12 bulan ≥ 50 kali/menit, usia 12-59 bulan ≥40 kali/menit	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

81) Jumlah Kasus Diare Semua Umur yang Dilayani dan Mendapat Oralit di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Penderita diare semua umur yang dilayani
Penderita diare semua umur yang mendapat oralit

Definisi : Penderita diare semua umur yang dilayani: Banyaknya kasus penderita diare semua umur yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Penderita diare semua umur yang mendapat oralit: Jumlah penderita diare semua umur mendapat oralit yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah penderita diare semua umur di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun yang memenuhi kriteria:
1. Datang dan dilayani di sarana kesehatan
2. Mendapat oralit
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 301. Format Data Jumlah Kasus Diare Semua Umur yang Dilayani dan Mendapat Oralit di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus Diare SU Dilayani	Banyaknya kasus penderita diare semua umur yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	-	Total	Orang
Jumlah Kasus Diare SU Mendapat Oralit	Jumlah penderita diare semua umur mendapat oralit yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

82) Jumlah Kasus Diare Balita yang Dilayani Mendapat Oralit dan Zinc di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Penderita diare Balita yang dilayani, Penderita diare Balita yang mendapat Oralit , Penderita diare Balita yang mendapat Zinc.

Definisi : Penderita diare Balita yang dilayani : jumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
Penderita diare Balita yang mendapat Zinc: Jumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) mendapat Zinc yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Penderita diare Balita yang mendapat Oralit = Jumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) mendapat Oralit yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah penderita diare balita di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun yang memenuhi kriteria:
1. Datang dan dilayani di sarana kesehatan
2. Mendapat oralit
3. Mendapat ZInc
(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 302. Format Data Jumlah Kasus Diare Balita yang Dilayani Mendapat Oralit dan Zinc di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus Diare Balita Dilayani	jumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	-	Total	Orang
Jumlah Kasus Diare Balita Mendapat Oralit	Jumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) mendapat Zinc yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	-	Total	Orang

Jumlah Kasus Diare Balita Mendapat Zinc	Jumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) mendapat Oralit yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

83) Jumlah Kasus, Kematian dan Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K00369] Demam Berdarah Dengue (DBD)

Definisi : Banyaknya kasus, kematian dan angka kematian demam berdarah yang ditemukan yaitu Penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai demam mendadak 2-7 hari, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik perdarahan, lebam, kadang-kadang disertai dengan mimisan, berak darah, muntah darah dan kesadaran menurun.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah Kasus DBD: Jumlah kasus DBD yang ditemukan DBD pada kurun waktu tertentu pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Jumlah Kematian DBD: Jumlah Kematian yang disebabkan kasus DBD pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) DBD: jumlah kematian yang disebabkan DBD pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan pada kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 303. Format Data Jumlah Kasus, Kematian dan Angka Kematian (*Case Fatality Rate*) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus DBD	Banyaknya kasus DBD yang ditemukan DBD pada kurun waktu tertentu pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Total	Orang
Jumlah Kematian DBD	Banyaknya Kematian yang disebabkan kasus DBD pada masing-masing Kabupaten/Kota.	-	Total	Orang
CFR DBD	Persentase kasus DBD yang ditemukan DBD pada kurun waktu tertentu pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

84) Jumlah dan Cakupan Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410163] Prevalensi Tekanan Darah Tinggi; [K00521] Hipertensi
Definisi : Bagian dari populasi penduduk umur 18 tahun ke atas dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar dari 90 mmHg. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Orang / Persen
Metode Perhitungan : Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 304. Format Data Jumlah dan Cakupan Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-

Jumlah Penderita Hipertensi	Banyaknya estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota	-	Total	Orang
Jumlah Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan	Banyaknya penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Total	Orang
Cakupan Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

85) Jumlah dan Cakupan Penderita Diabetes Melitus Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Definisi : Bagian dari seluruh Pelayanan kesehatan yang sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi: 1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; 3. Melakukan rujukan jika diperlukan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Orang / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka Riskesdas terbaru dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 305. Format Data Jumlah dan Cakupan Penderita Diabetes Melitus Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Penderita Diabetes Melitus	Banyaknya penderita DM usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka Riskesdas terbaru	-	Total	Orang
Jumlah Penderita Diabetes Melitus Mendapat Layanan Kesehatan	Banyaknya penderita DM usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Total	Orang
Cakupan Penderita Diabetes Melitus Mendapat Layanan Kesehatan	Persentase penderita DM usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

86) Jumlah dan Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

Definisi : Bagian dari seluruh pelayanan kesehatan sesuai standar kepada ODGJ Berat di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan

pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Orang / Persen

Metode Perhitungan : Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita ODGJ berat di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi Riskesdas terbaru dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 306. Format Data Jumlah dan Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah ODGJ Berat	Banyaknya estimasi penderita ODGJ berat di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi Riskesdas terbaru	-	Total	Orang
Jumlah ODGJ Berat Mendapat Layanan Kesehatan	Banyaknya penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	Total	Orang

Cakupan ODGJ Berat Mendapat Layanan Kesehatan	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

87) Jumlah Penderita ODGJ Berat (Skizofrenia dan Psikotik Akut) berdasarkan Kelompok Usia di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Penderita ODGJ Berat, Skizofrenia , Psikotik Akut.

Definisi : Penderita ODGJ Berat: Jumlah Penderita Skizofrenia dan Psikotik Akut yang didiagnosis oleh dokter atau psikolog klinis atau psikiater.

Skizofrenia: Jumlah penderita Gangguan jiwa kompleks dengan presentasi klinis, perjalanan penyakit, dan respons terapi yang beragam. Gejala Skizofrenia terdiri dari:

1. Gejala positif, yaitu yang berlebihan dibandingkan fungsi normal, seperti waham, halusinasi, perilaku yang tidak terorganisasi
2. Gejala negatif, dimana fungsi mental dan ekspresi emosi menjadi berkurang, misalnya ditandai dengan anhedonia, interaksi sosial yang terganggu, dan afek tumpul
3. Gejala afektif, seperti cemas dan *mood* yang depresif
4. Gejala kognitif, misalnya gangguan memori kerja dan episodik, gangguan atensi, gangguan fungsi eksekutif dsb..

Skizofrenia apabila gejala tersebut sudah lebih 30 hari.

Psikotik akut: Jumlah penderita gangguan jiwa kompleks dengan Gejala yang di timbulkan sama dengan skizofrenia hanya belum sampai 30 hari. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah penderita ODGJ berat baik skizofrenia maupun psikotik akut pada masing-masing kelompok umur. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 307. Format Data Jumlah Penderita ODGJ Berat (Skizofrenia dan Psikotik Akut) berdasarkan Kelompok Usia di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kelompok Umur	-	1. 0-14 tahun 2. 15 - 59 tahun 3. > 60 tahun	Total	Orang
Jumlah Penderita Psikotik Akut	Jumlah penderita gangguan jiwa kompleks dengan Gejala yang di timbulkan sama dengan skizofrenia hanya belum sampai 30 hari	-	Total	Orang
Jumlah Penderita Skizofrenia	Jumlah penderita Gangguan jiwa kompleks dengan presentasi klinis, perjalanan penyakit, dan respons terapi yang beragam dengan gejala tertentu selama lebih dari 30 hari	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

88) Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode IVA di Nusa Tenggara Barat

Konsep	:	Deteksi dini faktor risiko kanker leher rahim
Definisi	:	Banyaknya Deteksi dini yang dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun yang memiliki Riwayat hubungan seksual, deteksi dini kanker leher Rahim dengan metode IVA di fasyankes, minimal 80% pada sasaran penduduk di satu wilayah. IVA (Inspeksi Visual dengan Asam asetat): Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium. Deteksi dini yang dimaksud dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya, di dalam maupun di luar gedung. IVA positif: Ditemukan bercak putih (lesi pra kanker) dengan pemeriksaan aplikasi asam asetat Curiga kanker: Pertumbuhan massa seperti kembang kol yang mudah berdarah atau luka bernanah/ulcer. IVA positif dan curiga kanker leher rahim dirujuk: Perempuan usia 30-50 tahun yang dinyatakan IVA positif dan dicurigai menderita kanker leher rahim berdasarkan pemeriksaan IVA yang dirujuk ke pelayanan kesehatan. Krioterapi: Suatu bentuk pengobatan yang menggunakan suhu dingin (gas CO2 atau N2O cair) untuk efek terapeutik untuk mematikan jaringan yang abnormal (lesi pra kanker (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang
Metode Perhitungan	:	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelayanan deteksi dini kanker berdasarkan metode IVA.
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 308. Format Data Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode IVA di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Pemeriksaan IVA	Jumlah pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%)	-	Total	Orang
Jumlah IVA Positif	Jumlah pasien dengan hasil pemeriksaan ditemukan bercak putih (lesi pra kanker) dengan pemeriksaan aplikasi asam asetat	-	Total	Orang
Jumlah Curiga Kanker Leher Rahim	Jumlah pasien dengan hasil pemeriksaan ditemukan pertumbuhan massa seperti kembang kol yang mudah berdarah atau luka bernanah/ulcer.	-	Total	Orang
Jumlah Krioterapi	Jumlah pasien yang mendapatkan pengobatan yang menggunakan suhu dingin (gas CO2 atau N2O cair) untuk efek terapeutik untuk mematikan jaringan yang abnormal (lesi pra kanker	-	Total	Orang

Jumlah IVA Positif, Curiga Kanker dan Dirujuk	Jumlah pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya menunjukkan IVA Positif dan Curiga Kanker, serta dirujuk ke pelayanan kesehatan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

89) Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Metode Sadanis di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Deteksi dini faktor risiko kanker payudara

Definisi : Banyaknya Deteksi dini yang dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun dengan risiko kanker payudara dengan metode SADANIS di fasyankes, minimal 80% pada sasaran penduduk di satu wilayah.

Sadanis: Pemeriksaan payudara secara manual oleh tenaga kesehatan terlatih. Deteksi dini yang dimaksud dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya, di dalam maupun di luar gedung.

Tumor/benjolan: Benjolan tidak normal pada payudara pada pemeriksaan klinis payudara oleh petugas kesehatan terlatih.

Curiga kanker payudara: Kelainan payudara yang mengarah kepada keganasan, seperti tekstur kulit seperti kulit jeruk, puting mengeluarkan darah, retraksi puting (puting tertarik ke dalam), dan lesung pada payudara.

Tumor/benjolan dan curiga kanker payudara dirujuk: Perempuan usia 30-50 tahun yang dicurigai memiliki tumor/benjolan dan dicurigai menderita kanker payudara berdasarkan pemeriksaan sadanis yang dirujuk ke pelayanan kesehatan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah perempuan yang mendapatkan pelayanan deteksi dini kanker payudara berdasarkan metode Sadanis.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 309. Format Data Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Metode Sadanis di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Pemeriksaan Sadanis	Jumlah pemeriksaan payudara secara manual oleh tenaga kesehatan terlatih	-	Total	Orang
Jumlah Tumor/Benjolan	Jumlah pasien yang hasil pemeriksaannya menunjukkan adanya benjolan tidak normal pada payudara	-	Total	Orang
Jumlah Curiga Kanker Payudara	Jumlah pasien yang hasil pemeriksaannya menunjukkan kelainan payudara yang mengarah kepada keganasan	-	Total	Orang
Jumlah Tumor, Curiga Kanker dan Dirujuk	Perempuan usia 30-50 tahun yang dicurigai memiliki tumor/benjolan dan dicurigai menderita kanker payudara berdasarkan pemeriksaan sadanis yang dirujuk ke pelayanan kesehatan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

90) Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami KLB dan Ditangani Kurang dari 24 Jam di Nusa Tenggara Barat

Konsep : KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam
Definisi : Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami KLB dan ditanggulangi <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) pada desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam pada periode waktu tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 310. Format Data Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami KLB dan Ditangani Kurang dari 24 Jam di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Desa KLB	Banyaknya Desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	Total	Desa/Kelurahan
Jumlah Desa KLB Ditangani Kurang 24 jam	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami KLB dan ditanggulangi <24 jam oleh Kabupaten/Kota	-	Total	Desa/Kelurahan

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

91) Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Konsep : [K01870] Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika
Definisi : Banyaknya proses pemulihan klien gangguan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Medis.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 311. Format Data Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapat Rehabilitasi	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Medis	-	Total	Orang

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

92) Jumlah yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi

Konsep : [K01870] Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika
Definisi : Banyaknya klien gangguan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif yang mengakses layanan pasca rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah penyalahguna NAPZA yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 312. Format Data Jumlah yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah yang Mengakses Layanan Rehabilitasi	Jumlah penyalahguna NAPZA yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

93) Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410076] Jumlah Tenaga Medis; [K02174] Tenaga Kesehatan
Definisi : Banyaknya tenaga kesehatan yang berhubungan dengan bidang kedokteran, mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat pada periode tertentu.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 313. Format Data Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Tenaga Medis	-	1. Dokter umum 2. Dokter Gigi 3. Dokter Spesialis 4. Dokter Gigi Spesialis		
Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat pada periode tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

94) Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410076] Jumlah Tenaga Keperawatan. [K01634] Perawat; [10410068; Jumlah Tenaga Kebidanan; [K00287] Bidan

Definisi : Jumlah Tenaga Keperawatan: Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya.
Jumlah Tenaga Kebidanan: Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan pada periode tertentu.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 314. Format Data Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Tenaga Medis	-	1. Perawat 2. Bidan	-	-
Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan pada periode tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

95) Jumlah Tenaga Kefarmasian berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410069] Jumlah Tenaga Kefarmasian. [K00152] Apoteker;[K02186] Tenaga Teknis Kefarmasian
Definisi : Banyaknya tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Tenaga kefarmasian pada periode tertentu.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 315. Format Data Jumlah Tenaga Kefarmasian berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Tenaga Kefarmasian	-	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-
Jumlah Tenaga Kefarmasian	Banyaknya tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

96) Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410072] Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat; [K02174] Tenaga Kesehatan; [10410071] Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan; [K02174] Tenaga Kesehatan; [10410067] Jumlah Tenaga Gizi; [K02156] Tenaga gizi

Definisi : Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat = Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan: Banyaknya tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan, mencakup tenaga lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
Jumlah Tenaga Gizi: Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutrisionis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi pada periode tertentu.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 316. Format Data Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Tenaga Kesehatan	-	Tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan lingkungan Tenaga gizi	-	-
Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi pada periode tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

97) Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik dan Keteknisan Medik di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10410077] Jumlah Tenaga Teknik Biomedis. [K02174] Tenaga Kesehatan
[10410075] Jumlah Tenaga Keterapian Fisik. [K02174] Tenaga Kesehatan
[10410074] Jumlah Tenaga Keteknisan Medis. [K02174] Tenaga Kesehatan

Definisi : Jumlah tenaga Teknik: Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedis yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medis, fisikawan medis, radioterapis, dan ortotik prostetik.
Jumlah Tenaga Keterapian: Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam terapi fisik, mencakup fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur.
Jumlah Tenaga Keteknisan: Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keteknisan medis, mencakup perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik dan Keteknisan Medik pada periode tertentu.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 317. Format Data Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik dan Keteknisan Medik di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Tenaga Kesehatan	-	Tenaga Teknik Biomedika, Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Keteknisan Medik	-	-
Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik dan Keteknisan Medik pada periode tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

98) Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Tenaga penunjang/pendukung kesehatan

Definisi : Banyaknya tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor/bidang kesehatan yang meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen. Pejabat struktural adalah tenaga yang menempati jabatan struktural di institusi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, Tenaga pendidik adalah tenaga yang bertugas mengajar di institusi pendidikan yang terdiri dari dosen, widyaiswara, dan lainnya, Tenaga dukungan manajemen terdiri dari pengelola program kesehatan, stafpenunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan, dan tenaga penunjang kesehatan lainnya. (Sumber Data:Definisi Operasional Dikes NTB)

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah tenaga Penunjang/pendukung kesehatan pada periode tertentu.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 318. Format Data Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Tenaga Penunjang/ Pendukung	-	Tenaga Dukungan Manajemen Tenaga Pendidik Pejabat Struktural	-	-
Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga Penunjang/pendukung kesehatan pada periode tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

99) Persentase Puskesmas Tanpa Dokter

Konsep : [10410150] Persentase Puskesmas Tanpa Dokter. [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); [K00397] Dokter.
Definisi : Bagian dari populasi puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, baik berstatus ASN atau non-ASN, baik ditempatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Puskesmas tanpa tenaga dokter dibagi dengan Jumlah Puskesmas Teregistrasi dikali 100. (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 319. Format Data Persentase Puskesmas Tanpa Dokter

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Puskesmas	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya dan teregistrasi.	-	Total	Unit
Jumlah Puskesmas tanpa tenaga dokter	Jumlah puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, baik berstatus ASN atau non-ASN, baik ditempatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	-	Total	Unit
Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	Persentase puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, baik berstatus ASN atau non-ASN, baik ditempatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

100) Jumlah dan Persentase Puskesmas yang Terpenuhi 9 Jenis Tenaga Kesehatan

Konsep : [10410149] Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Estándar. [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);[K02174] Tenaga Kesehatan.

Definisi : Bagian dari populasi puskesmas yang telah terpenuhi/memiliki 9 jenis tenaga kesehatan, mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, serta ahli teknologi laboratorium medik, sesuai standar minimal satu untuk masingmasing jenis tenaga kesehatan. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Unit Persen

Metode Perhitungan : Jumlah Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes (minimal 1) dibagi Jumlah Puskesmas Teregistrasi dikali 100. (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 320. Format Data Jumlah dan Persentase Puskesmas yang Terpenuhi 9 Jenis Tenaga Kesehatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Puskesmas	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan	-	Total	Unit

	preventif di wilayah kerjanya dan teregistrasi.			
Jumlah Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan (minimal 1)	-	Total	Unit
Persentase Persentase Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes	Persentase Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan (minimal 1)	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

101) Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 Penduduk

Konsep : [10410173] Tingkat Ketersediaan Tenaga Kesehatan. [K02174] Tenaga Kesehatan.
Definisi : Angka yang menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk setiap 1.000 penduduk. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846 disesuaikan).
Ukuran : Tingkat
Satuan : Orang perseribu penduduk
Metode Perhitungan : Jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 1.000 penduduk dibagi Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama dikali 100. (Sumber Data: INDAH BPS disesuaikan).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 321. Format Data Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 Penduduk

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Tenaga Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	-	-	-
Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 1.000 penduduk	-	Rasio	Orang per 1.000 Penduduk
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

102) Jumlah Fasilitas Kesehatan

Konsep : [K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Definisi : Banyaknya alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah fasilitas kesehatan pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 322. Format Data Jumlah Fasilitas Kesehatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Sarana Kesehatan	Fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan,	1. Rumah Sakit 2. Laboratorium Kesehatan Daerah 3. Puskesmas	-	-
Jumlah Sarana Kesehatan Terakreditasi	Jumlah fasilitas kesehatan pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

103) Jumlah dan Persentase Puskesmas berdasarkan Akreditasi

Konsep : [10410062] Jumlah Puskesmas; [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Definisi : Bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Unit/Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Puskesmas berdasarkan Akreditasi dibagi Jumlah Puskesmas terpadu pada periode tertentu dikali 100.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 323. Format Data Jumlah dan Persentase Puskesmas berdasarkan Akreditasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Puskesmas	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya dan teregistrasi.	-	Total	Unit
Jumlah Puskesmas berdasarkan Akreditasi	Banyaknya Puskesmas yang telah menjalani proses akreditasi dan memperoleh status tertentu sesuai dengan standar	1. Dasar 2. Madya 3. Utama 4. Paripurna	Total	Unit
Persentase Puskesmas berdasarkan Akreditasi	Persentase Puskesmas yang telah menjalani proses akreditasi dan memperoleh status tertentu sesuai dengan standar	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

104) Jumlah dan Persentase Rumah Sakit berdasarkan Akreditasi

Konsep : [10410066] Jumlah Rumah Sakit; [K01919] Rumah Sakit
Definisi : Banyaknya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Unit Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Rumah Sakit berdasarkan Akreditasi dibagi Jumlah Rumah sakit terakreditasi pada periode tertentu dikali 100.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 324. Format Data Jumlah dan Persentase Rumah Sakit berdasarkan Akreditasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Rumah sakit	Banyaknya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.	-	Total	Unit

Jumlah Rumah Sakit berdasarkan Akreditasi	Banyaknya Rumah Sakit yang telah menjalani proses akreditasi dan memperoleh status tertentu sesuai dengan standar	1. Dasar 2. Madya 3. Utama 4. Paripurna	Total	Unit
Persentase Rumah Sakit berdasarkan Akreditasi	Persentase Rumah Sakit yang telah menjalani proses akreditasi dan memperoleh status tertentu sesuai dengan standar	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

105) Jumlah Sarana Kesehatan Puskesmas berdasarkan Kemampuan Pelayanan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Definisi : Banyaknya sarana kesehatan yang dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Sarana Kesehatan Puskesmas pada masing-masing kriteria Kemampuan Pelayanan yaitu Rawat Inap dan Rawat Jalan.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 325. Format Data Jumlah Sarana Kesehatan Puskesmas berdasarkan Kemampuan Pelayanan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Banyaknya Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan	-	Total	Unit
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Banyaknya Puskesmas yang tidak diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap.	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

106) Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01919] Rumah Sakit
Definisi : Banyaknya sarana kesehatan yang tersedia pada institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus pada masing-masing kabupaten/kota.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 326. Format Data Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Rumah Sakit Umum	Banyaknya Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit	-	Total	Unit
Jumlah Rumah Sakit Khusus	Banyaknya Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

107) Daftar Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis dan Kelas di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [K01919] Rumah Sakit

Definisi : Daftar Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis dan Kelas pada periode tertentu
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 327. Format Data Daftar Sarana Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan Jenis dan Kelas di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Rumah Sakit	Nama Rumah Sakit pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	-	-
Jumlah Rumah Sakit Khusus	Banyaknya Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya	-	Total	Unit

Jumlah Rumah Sakit Khusus	Banyaknya Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

108) Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan
Definisi : Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. Kunjungan rawat jalan puskesmas termasuk kunjungan ke jaringan puskesmas, dalam gedung maupun luar gedung (puskesmas keliling, puskesmas pembantu, bidan desa, pemeriksaan anak sekolah, dsb.). (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang diklasifikasikan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 328. Format Data Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Saryankes	Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan yang dikunjungi pada Kunjungan Rawat Jalan	1. Praktik Mandiri Dokter Spesialis 2. Rumah Sakit Khusus 3. Rumah Sakit Umum 4. Klinik Utama 5. Praktik Mandiri Bidan/perawat 6. Praktik Mandiri Dokter Gigi 7. Praktik Mandiri Dokter 8. Klinik Pratama 9. Puskesmas	-	-
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

109) Jumlah Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap

Definisi : Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah Kunjungan Rawat Inap di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang diklasifikasikan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 329. Format Data Jumlah Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Saryankes	Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan yang dikunjungi pada Kunjungan Rawat Inap	1. Praktik Mandiri Dokter Spesialis 2. Rumah Sakit Khusus 3. Rumah Sakit Umum 4. Klinik Utama 5. Praktik Mandiri Bidan/perawat 6. Praktik Mandiri Dokter Gigi 7. Praktik Mandiri Dokter 8. Klinik Pratama	-	-

		9. Puskesmas		
Jumlah Kunjungan Rawat Inap	Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

110) Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Kunjungan Gangguan Jiwa
Definisi : Banyaknya Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa yang diklasifikasikan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 330. Format Data Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Saryankes	Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan yang dikunjungi pada Kunjungan Gangguan Jiwa	1. Rumah Sakit Umum 2. Klinik Pratama 3. Puskesmas 4. Rumah Sakit Khusus	-	-
Jumlah Kunjungan Rawat Inap	Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa yang diklasifikasikan berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

111) Jumlah Fasilitas Kesehatan di Daerah Sulit

Konsep : [K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Definisi : Banyaknya alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat di daerah sulit. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah Fasilitas Kesehatan di Daerah Sulit pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 331. Format Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Daerah Sulit

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Daerah Sulit	Banyaknya alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat di daerah sulit	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

112) Persentase Obat Memenuhi Syarat

Konsep : [10410106; Persentase Obat Memenuhi Syarat; [K01238] Obat;[K01245] Obat Bahan Alam;[K00988] Kosmetik; [K02087] Suplemen Kesehatan

Definisi : Bagian dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat, yaitu memiliki nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, memenuhi ketentuan penandaan, dan memenuhi syarat berdasarkan pengujian
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : 100 % dikurangi persentase obat tidak memenuhi syarat. (Sumber Data: INDAH BPS).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 332. Format Data Persentase Obat Memenuhi Syarat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Persentase Obat Memenuhi Syarat	Persentase obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat, yaitu memiliki nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, memenuhi ketentuan penandaan, dan memenuhi syarat berdasarkan pengujian	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

113) Persentase Makanan Memenuhi Syarat

Konsep : Makanan Memenuhi Syarat
Definisi : Bagian dari makanan yang memenuhi indikator makanan yang memenuhi syarat dengan didasarkan pada kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian. (Sumber Data: Dokumen Metadata Indikator RKP 2023 - EP4)
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat dibagi jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji dikali 100. (Sumber Data: Keputusan Kepala BPOM Nomor 231 Tahun 2023 Tentang Rencana Kinerja BPOM Tahun 2024)
Sumber Data/Publikasi : BPOM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 333. Format Data Persentase Makanan Memenuhi Syarat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Persentase Makanan Memenuhi Syarat	Persentase makanan yang memenuhi indikator makanan yang memenuhi syarat dengan didasarkan pada kriteria yaitu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

114) Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial

Konsep : [10410100] Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial. [K00709]; Kabupaten;[K00989] Kota;[K01238] Obat

Definisi : Bagian dari populasi kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item dari obat-obatan terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80% obat esensial dibagi jumlah puskesmas yang melapor dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 334. Format Data Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80% obat esensial	Banyaknya Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan	-	Total	Unit

Jumlah puskesmas yang melapor	Banyaknya Puskesmas yang melapor ketersediaan obat esensial	-	Total	Unit
Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persentase kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item dari obat-obatan terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

115) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Jenis Bantuan di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10610031] Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); K00677] Jaminan Sosial
Definisi : Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846)
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 335. Format Data Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Jenis Bantuan di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Bantuan	Jenis bantuan Kesehatan yang dimiliki	1. BP 2. PBPU Mandiri 3. PPU 4. PBI APBD 5. PBI APBN	-	-
Jumlah Peserta Jamkesnas	Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Cakupan Peserta Jamkesnas	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

116) Jumlah dan Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Nusa Tenggara Barat

Konsep : [10710009] Jumlah Keluarga dengan Fasilitas Sanitasi Layak; [K00829] Keluarga;[K01953] Sanitasi

Definisi : Banyaknya keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau sistem pengolahan air limbah (SPAL), yang digunakan oleh keluarga sendiri atau bersama dengan keluarga lain tertentu. (Sumber Data: Kepka BPS Nomor 846).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Keluarga Persen
Metode Perhitungan : Jumlah KK dengan akses sanitasi sanitasi layak dibagi jumlah KK di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 336. Format Data Jumlah dan Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah KK	Banyaknya KK di wilayah dan kurun waktu tertentu	-	Total	KK
Jumlah KK Sanitasi Layak (Jamban Sehat)	Banyaknya keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan	-	Total	KK
Persentase KK Sanitasi Layak (Jamban Sehat)	Persentase keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehata	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

117) Jumlah dan Persentase Tempat Fasilitas Umum yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar (Inspeksi Kesehatan Lingkungan/IKL).

Definisi : Bagian dari populasi Tempat dan Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar (IKL) meliputi sekolah, puskesmas, dan pasar.

1. Pasar yang dimaksud adalah pasar rakyat yang terdaftar di Kementerian Perdagangan/Dinas perdagangan Kabupaten/kota. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola, oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. Ketentuan mengenai pasar rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
2. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kemendikbud/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Puskesmas yang dimaksud adalah puskesmas yang terdaftar (teregistrasi) di Kemenkes.

(Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Ukuran : Total / Persentase

Satuan : Unit Persen

Metode Perhitungan : Jumlah total TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar (IKL) dibagi jumlah TFU di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 337. Format Data Jumlah dan Persentase Tempat Fasilitas Umum yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Banyaknya TFU di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	1. Pasar 2. Sarana Pendidikan (SD/MI) 3. Sarana Pendidikan (SMP/MTS) 4. Sarana Kesehatan (puskesmas)	Total	Unit
Jumlah TFU yang diawasi Sesuai Standar	Jumlah Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar (Inspeksi Kesehatan Lingkungan/IKL)	-	Total	Unit
Persentase TFU yang diawasi Sesuai Standar	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar (Inspeksi Kesehatan Lingkungan/IKL	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

118) Jumlah dan Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Nusa Tenggara Barat

Konsep : Desa/Kelurahan STBM
Definisi : Bagian dari populasi Desa/kelurahan yang seluruh KK-nya tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK-nya telah melaksanakan pilar-pilar CTPS, PAMMRT, PSRT, dan 30% PALDRT. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB)
Ukuran : Total / Persentase
Satuan : Desa Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Desa/Kelurahan STBM dibagi Jumlah desa/kelurahan di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 338. Format Data Jumlah dan Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	-	Total	Desa/Kelurahan
Jumlah Desa/ Kelurahan STBM	Banyaknya desa/kelurahan yang seluruh KK-nya tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK-nya telah	-	Total	Desa/Kelurahan

	melaksanakan pilar-pilar CTPS, PAMMRT, PSRT, dan 30% PALDRT			
Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persentase Desa/kelurahan yang seluruh KK-nya tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK-nya telah melaksanakan pilar-pilar CTPS, PAMMRT, PSRT, dan 30% PALDRT	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

119) Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Konsep : Desa/Kelurahan SBS
Definisi : Bagian dari populasi desa/kelurahan yang seluruh KK-nya tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka melalui proses verifikasi. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Desa/Kelurahan SBS dibagi Jumlah desa/kelurahan di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100. (Sumber Data: Definisi Operasional Dikes NTB).
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 339. Format Data Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	-	Total	Desa/Kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan SBS	Jumlah desa/kelurahan yang seluruh KK-nya tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka melalui proses verifikasi	-	Total	Desa/Kelurahan
Persentase Desa/Kelurahan SBS	Persentase desa/kelurahan yang seluruh KK-nya tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka melalui proses verifikasi	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

120) Persentase Kabupaten/Kota Sehat

Konsep : Kabupaten/Kota Sehat
Definisi : Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. (Sumber Data: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/Pb/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota sehat di NTB dibagi Jumlah Kabupaten/Kota di NTB dikali 100
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 340. Format Data Persentase Kabupaten/Kota Sehat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Persentase Kabupaten/Kota Sehat	Persentase kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

121) Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Konsep : GERMAS

Definisi : Bagian dari populasi kabupaten/kota yang memiliki kebijakan GERMAS sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 (melaksanakan 5 kluster GERMAS) dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan serta melaksanakan penggerakan masyarakat dalam mendukung 5 kluster GERMAS minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dan/atau mitra potensial. (Sumber Data: INDAH BPS).

Ukuran : Total; Persentase

Satuan : Orang; Persen

Metode Perhitungan : Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikalikan 100. (Sumber Data: INDAH BPS).

Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 341. Format Data Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	Banyaknya kabupaten/kota yang memiliki kebijakan GERMAS dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan serta melaksanakan penggerakan masyarakat dalam mendukung 5 kluster GERMAS minimal 3 kali setahun	-	Total	Orang

Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan GERMAS	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan GERMAS dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan serta melaksanakan penggerakan masyarakat dalam mendukung 5 kluster GERMAS minimal 3 kali setahun	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

122) Persentase KK dengan Akses Terhadap Sanitasi (Fasilitas tempat Buang Air Besar)

Konsep : Akses Sanitasi Aman, Akses Sanitasi Layak Sendiri, Akses Sanitasi Belum Layak, BABS Tertutup, BABS Terbuka.

Definisi : Akses Sanitasi Aman: Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa yang memiliki tangki septik dan disedot setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

Akses Sanitasi Layak Sendiri: Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik yang belum pernah disedot (perkotaan) atau menggunakan leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan).

Akses Sanitasi Layak Bersama (Sharing): Pengguna fasilitas sanitasi bersama rumah tangga lain tertentu yang: 1) menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik yang belum pernah disedot (perkotaan) atau 2) menggunakan kloset leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan).

Akses Sanitasi Belum Layak: Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu: 1) kloset menggunakan leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perkotaan); 2) menggunakan plengsengan dengan tutup dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan); atau 3) fasilitas umum (pasar/masjid/dll.) yang sudah memenuhi syarat (tangki septik).

BABS Tertutup: Pengguna fasilitas sanitasi: 1) ada bangunan atas (atap, dinding, ½ bangunan tutup sementara) atau bangunan tengah (menggunakan kloset leher angsa dan atau menggunakan plengsengan dengan tutup); atau 2) fasilitas umum (pasar/masjid/dll) yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut dan atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya.

BABS Terbuka: Tidak memiliki fasilitas sanitasi rumah tangga atau memiliki fasilitas sanitasi rumah tangga namun tidak menggunakannya (masih berperilaku buang air besar sembarangan di tempat terbuka).

Ukuran : Proporsi

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Akses Sanitasi Aman = Jumlah KK dengan Akses Sanitasi Aman pada kurun waktu tertentu dibagi total KK pada kurun waktu yang sama.

Akses Sanitasi layak Sendiri = Jumlah KK dengan Akses Sanitasi Layak Sendiri pada kurun waktu tertentu dibagi total KK pada kurun waktu yang sama.

Akses Sanitasi Belum Layak = Jumlah KK dengan Akses Belum Layak pada kurun waktu tertentu dibagi total KK pada kurun waktu yang sama.

Akses BABS Tertutup = Jumlah KK dengan Akses BABS Tertutup pada kurun waktu tertentu dibagi total KK pada kurun waktu yang sama.

Akses Sanitasi BABS Terbuka = Jumlah KK dengan Akses BABS Terbuka pada kurun waktu tertentu dibagi total KK pada kurun waktu yang sama.

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 342. Format Data Persentase KK dengan akses terhadap sanitasi (Fasilitas tempat Buang Air Besar)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Persentase KK Akses Sanitasi Aman	Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa yang memiliki tangki septik dan disedot setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).	-	Persentase	Persen
Persentase KK Akses Sanitasi Layak Sendiri	Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik yang belum pernah disedot (perkotaan) atau menggunakan leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan).	-	Persentase	Persen
Persentase KK Akses Sanitasi Layak Bersama	Pengguna fasilitas sanitasi bersama rumah tangga lain tertentu yang: 1) menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik yang belum pernah disedot (perkotaan) atau 2) menggunakan kloset leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan).	-	Persentase	Persen

Persentase KK Akses Belum Layak	Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu: 1) kloset menggunakan leher angsa dengan lubang tanah/cubluk (perkotaan); 2) menggunakan plengsengan dengan tutup dengan lubang tanah/cubluk (perdesaan); atau 3) fasilitas umum (pasar/masjid/dll.) yang sudah memenuhi syarat (tangki septik	-	Persentase	Persen
Persentase KK BABS Tertutup	Pengguna fasilitas sanitasi: 1) ada bangunan atas atau bangunan tengah (menggunakan kloset leher angsa dan atau menggunakan plengsengan dengan tutup); atau 2) fasilitas umum (pasar/masjid/dll.) yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut dan atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya.	-	Persentase	Persen
Persentase KK BABS Terbuka	Tidak memiliki fasilitas sanitasi rumah tangga atau memiliki fasilitas sanitasi rumah tangga namun tidak menggunakannya (masih berperilaku buang air besar sembarangan di tempat terbuka).	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

123) Warga Negara terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Konsep : Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
Definisi : Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana pada masing-masing Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 343. Format Data Warga Negara terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Warga Negara terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

124) Warga Negara terdampak Kejadian Luar Biasa Provinsi

Konsep : Kejadian Luar Biasa
Definisi : Jumlah Warga Negara yang terdampak Kejadian Luar Biasa
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah Warga Negara yang terdampak Kejadian Luar Biasa pada masing-masing Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 344. Format Data Warga Negara terdampak Kejadian Luar Biasa Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Warga Negara terdampak Kejadian Luar Biasa	Jumlah Warga Negara yang terdampak Kejadian Luar Biasa pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

125) Data Daerah dan Rekapitulasi Jumlah Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Provinsi

Konsep : Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan
Definisi : Banyaknya penduduk yang mendapatkan pelayanan Dasar Kesehatan Daerah di Provinsi NTB yaitu penduduk pada kategori tanggap darurat yang mengalami krisis kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana dan kategori Penduduk Yang Terdampak Dan Berisiko Pada Kondisi KLB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Kesehatan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 345. Format Data Daerah dan Rekapitulasi Jumlah Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kabupaten /Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana; Jenis Bencana	Jenis Bencana yang diakibatkan oleh Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana.	-	-	-
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana; Sasaran Penduduk Penerima	Banyaknya sasaran penduduk pada kategori pra-krisis yang mengalami krisis kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana	-	Total	Orang

Pelayanan Kesehatan; Pra-Krisis				
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana; Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan; Tanggap Darurat	Banyaknya sasaran penduduk pada kategori tanggap darurat yang mengalami krisis kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana	-	Total	Orang
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Jenis KLB	Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Jumlah Penduduk Yang Terdampak (Sakit)	Banyaknya Penduduk Yang Terdampak sakit akibat KLB	-	Total	Orang
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Jumlah Penduduk Yang Terdampak Dan Berisiko Pada Kondisi KLB	Banyaknya Penduduk Yang Terdampak Dan Berisiko Pada Kondisi KLB	-	Total	Orang
Keterangan	Keterangan yang menjelaskan data	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.22. Metadata Dinas Ketahanan Pangan

1) Rasio Ketersediaan Pangan (Ketersediaan, Kebutuhan) berdasarkan Jenis Komoditas

Konsep : Rasio Ketersediaan Pangan
Definisi : Perbandingan antara ketersediaan pangan suatu wilayah dengan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat di wilayah tersebut, dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun).
Ukuran : Rasio
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Rasio = Ketersediaan/kebutuhan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Ketahanan Pangan
Tautan Publikasi Sumber Data :

Tabel 346. Format Data Rasio Ketersediaan Pangan (Ketersediaan, Kebutuhan) berdasarkan Jenis Komoditas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komoditas	Jenis komoditas pangan	1. Beras 2. Jagung 3. Daging Sapi 4. Daging Ayam 5. Telur Ayam 6. Minyak Goreng 7. Gula Pasir 8. Cabe Rawit 9. Cabe Keriting	-	-

		10. Bawang Merah 11. Bawang Putih		
Ketersediaan	Total ketersediaan komoditas pangan	-	Total	Ton
Kebutuha	Total kebutuhan komoditas pangan	-	Total	Ton
Rasio	Perbandingan antara ketersediaan pangan suatu wilayah dengan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat di wilayah tersebut, dalam kurun waktu tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi

Konsep : [K01753] Pola Pangan Harapan (PPH)
Definisi : Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : Perhitungan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional no. 14/2024 tentang Pedoman Penilaian Skor Pola Pangan Harapan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Ketahanan Pangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 347. Format Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Bahan Pangan	Kelompok bahan pangan	1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan Hewani 4. Minyak dan Lemak 5. Buah/biji berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayuran dan buah 9. Lain-lain	-	-
Energi	Angka kecukupan energi dari setiap kelompok bahan pangan	-	Energi	Kkal/Kapita/Hari
Skor PPH Ketersediaan	Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya	-	Skor	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi

Konsep : [K01753] Pola Pangan Harapan (PPH)
Definisi : Menilai kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi energi dari berbagai kelompok pangan, apakah pola konsumsi pangan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang yang dianjurkan
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : Perhitungan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional no. 14/2024 tentang Pedoman Penilaian Skor Pola Pangan Harapan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Ketahanan Pangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 348. Format Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Pangan	Kelompok bahan pangan	1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan Hewani 4. Minyak dan Lemak 5. Buah/biji berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayuran dan buah 9. Lain-lain	-	-

Konsumsi Pangan	Jumlah rata-rata bahan pangan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam satu hari, dinyatakan dalam gram per kapita per hari.	-	Konsumsi	Gr/Kapita/Hari
Konsumsi Pangan Ideal	Jumlah ideal konsumsi berbagai kelompok pangan yang dianjurkan untuk mencapai pola konsumsi gizi seimbang, dinyatakan dalam gram per kapita per hari.	-	Konsumsi	Gr/Kapita/Hari
Komsumsi Energi	Jumlah energi (kalori) yang diperoleh rata-rata dari semua pangan yang dikonsumsi oleh seseorang dalam sehari, dinyatakan dalam kilokalori (kkal) per kapita per hari.	-	Konsumsi	Kkal/Kapita/Hari
Konsumsi Energi Ideal	Jumlah energi yang seharusnya dikonsumsi oleh individu sesuai dengan standar kebutuhan energi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik, dinyatakan dalam kilokalori per kapita per hari.	-	Konsumsi	Kkal/Kapita/Hari
Persentase Angka Kecukupan Energi	Perbandingan antara konsumsi energi aktual dengan konsumsi energi ideal	-	Persentase	Persen
Persentase Ideal Angka Kecukupan Energi	Nilai referensi yang ditetapkan sebagai batas ideal dari kecukupan energi, biasanya ditetapkan sebesar 100%, yang menandakan keseimbangan antara kebutuhan dan konsumsi	-	Persentase	Persen

Komsumsi Protein	Jumlah protein yang dikonsumsi rata-rata oleh individu dalam satu hari dari semua jenis pangan, dinyatakan dalam gram per kapita per hari.	-	Konsumsi	Kkal/Kapita/Hari
Konsumsi Protein Ideal	Jumlah protein harian yang direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh individu guna memenuhi kebutuhan gizi, dinyatakan dalam gram per kapita per hari.	-	Konsumsi	Kkal/Kapita/Hari
Persentase Angka Kecukupan Protein	Perbandingan antara konsumsi protein aktual dengan konsumsi protein ideal,	-	Persentase	Persen
Persentase Ideal Angka Kecukupan Protein	Nilai standar persentase kecukupan protein, biasanya ditetapkan 100%, yang menunjukkan bahwa konsumsi protein sudah sesuai dengan kebutuhan gizi.	-	Persentase	Persen
Skor PPH Konsumsi	Menilai kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi energi dari berbagai kelompok pangan, apakah pola konsumsi pangan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang yang dianjurkan	-	Skor	Poin
Skor PPH Konsumsi Ideal	Nilai maksimal dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dapat dicapai jika semua kelompok pangan dikonsumsi sesuai dengan jumlah idealnya. Umumnya, skor ideal adalah 100 poin, menandakan konsumsi pangan yang	-	Skor	Poin

	paling seimbang dan sesuai dengan kebutuhan gizi.			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Komsumsi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01753] Pola Pangan Harapan (PPH)
Definisi : Mengukur tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan yang diharapkan di suatu daerah, dengan menghitung skor yang mencerminkan keberagaman, kualitas, dan kuantitas pangan yang tersedia serta pola konsumsi masyarakat, yang dikelompokkan berdasarkan kabupaten atau kota, sehingga memberikan gambaran tentang ketahanan pangan dan pola makan masyarakat berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : Perhitungan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional no. 14/2024 tentang Pedoman Penilaian Skor Pola Pangan Harapan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Ketahanan Pangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 349. Format Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Komsumsi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kelompok Bahan Pangan	Kelompok bahan pangan	1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan Hewani 4. Minyak dan Lemak 5. Buah/biji berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayuran dan buah 9. Lain-lain	-	-
Skor PPH Ketersediaan	Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya	-	Skor	Poin
Skor PPH Konsumsi	Menilai kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi energi dari berbagai kelompok pangan, apakah pola konsumsi pangan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang yang dianjurkan	-	Skor	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Cadangan Beras
Definisi : Jumlah beras yang disimpan dan dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, sebagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan di wilayah tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat atau krisis pangan berdasarkan provinsi/kabupaten/kota
Ukuran : Massa
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Banyaknya Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Ketahanan Pangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 350. Format Data Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Stok Cadangan Beras	Jumlah beras yang disimpan dan dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, sebagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan di wilayah tersebut, serta untuk	-	Total	Ton

	memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat atau krisis pangan berdasarkan provinsi/kabupaten/kota			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalensi of Undernourishment (PoU) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Definisi : Persentase populasi di suatu daerah yang mengalami ketidakcukupan dalam konsumsi pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar, dihitung berdasarkan data konsumsi pangan dan status gizi masyarakat, yang memberikan gambaran tentang tingkat kekurangan pangan dan masalah gizi di berbagai provinsi, kabupaten, atau kota
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : PoU = Jumlah penduduk dengan Konsumsi < MDER/Total Penduduk X 100
PoU = Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
MDER (Minimum Dietary Energy Requirement) = Ambang batas kecukupan energi (biasanya sekitar 1800–2100 kcal/hari tergantung wilayah)
Sumber Data/Publikasi : DInas Ketahanan Pangan
Tautan Publikasi Sumber Data :

Tabel 351. Format Data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalensi of Undernourishment (PoU) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persentase populasi di suatu daerah yang mengalami ketidakcukupan dalam konsumsi pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar, dihitung berdasarkan data konsumsi pangan dan status gizi masyarakat, yang memberikan gambaran tentang tingkat kekurangan pangan dan masalah gizi di berbagai provinsi, kabupaten, atau kota	-	Persentase	Persen
Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Total penduduk yang mengalami kerentanan terhadap kekurangan pangan	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Indeks Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan

Konsep : [K00914] Ketahanan Pangan
Definisi : Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan pada level Desa/Kelurahan
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : $Y(j)=\sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$

Dimana:
i = Indikator ke-1 sampai ke-9
j = Kabupaten/kota yang dihitung
a_i = Bobot masing-masing indikator
X_{ij} = Nilai standar indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j
Y(j) = Indeks Ketahanan Pangan wilayah j

Sumber Data/Publikasi : DKP NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 352. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-

Nama Desa/ Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
A. Luas Wilayah Desa	Total luas geografis desa/kelurahan dalam satuan hektar (Ha), digunakan sebagai dasar perhitungan kepadatan dan rasio lahan terhadap penduduk.	-	Luas	Hektar
B. Jumlah Penduduk Desa	Jumlah seluruh penduduk yang tinggal di desa/kelurahan, mencakup semua kelompok usia dan jenis kelamin.	-	Total	Jiwa
C. Jumlah Rumah Tangga	Jumlah unit rumah tangga yang tercatat di wilayah desa/kelurahan, digunakan untuk menghitung indikator berbasis rumah tangga.	-	Total	KK
D. Tingkat Kepadatan Penduduk	Jumlah penduduk per kilometer persegi	-	Kepadatan penduduk	Jiwa/Km2
1. Data Rasio Lahan	Rasio antara luas lahan pangan produktif (misalnya sawah, ladang, kebun) terhadap jumlah penduduk. Semakin kecil rasionya, semakin rentan desa terhadap kekurangan pasokan pangan lokal.	-	Rasio	Poin
2. Data Rasio Sarana	Rasio jumlah fasilitas pangan (misalnya pasar, toko pangan, warung) terhadap jumlah penduduk. Menggambarkan kemudahan penduduk mengakses sarana distribusi pangan.	-	Rasio	Poin

3. Data Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	Persentase atau rasio penduduk miskin atau tidak sejahtera terhadap total penduduk desa. Mengindikasikan kerentanan ekonomi terhadap akses pangan.	-	Rasio	Poin
4. Data Akses Jalan	Persentase atau kualitas akses jalan menuju pusat distribusi pangan (pasar, jalan utama). Jalan yang buruk dapat menghambat distribusi pangan dan layanan dasar.	-	Rasio	Poin
5. Data Rasio Tanpa Air Bersih	Persentase penduduk atau rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih. Air bersih penting untuk konsumsi dan pemanfaatan pangan secara aman.	-	Rasio	Poin
6. Data Rasio Penduduk Per Tenaga Kesehatan Per Density	Jumlah penduduk dibandingkan jumlah tenaga kesehatan, disesuaikan dengan kepadatan wilayah. Mengukur akses dan beban layanan gizi dan kesehatan masyarakat.	-	Rasio	Poin
1. Prioritas Rasio Lahan	Nilai skoring/ranking dari indikator rasio lahan, digunakan untuk mengidentifikasi mana yang paling mendesak ditangani. Biasanya dibagi menjadi kategori prioritas tinggi, sedang, rendah.	-	-	-

2. Prioritas Rasio Sarana	Nilai skoring/ranking dari indikator rasio sarana, digunakan untuk mengidentifikasi mana yang paling mendesak ditangani. Biasanya dibagi menjadi kategori prioritas tinggi, sedang, rendah.	-	-	-
3. Prioritas Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	Nilai skoring/ranking dari indikator rasio Penduduk Tidak Sejahtera, digunakan untuk mengidentifikasi mana yang paling mendesak ditangani. Biasanya dibagi menjadi kategori prioritas tinggi, sedang, rendah.	-	-	-
4. Prioritas Akses Jalan	Nilai skoring/ranking dari indikator akses jalan, digunakan untuk mengidentifikasi mana yang paling mendesak ditangani. Biasanya dibagi menjadi kategori prioritas tinggi, sedang, rendah.	-	-	-
5. Prioritas Rasio Tanpa Air Bersih	Nilai skoring/ranking dari indikator rasio Tanpa Air Bersih, digunakan untuk mengidentifikasi mana yang paling mendesak ditangani. Biasanya dibagi menjadi kategori prioritas tinggi, sedang, rendah.	-	-	-

6. Prioritas Rasio Penduduk Per Tenaga Kesehatan Per Density	Nilai skoring/ranking dari indikator rasio Penduduk Per Tenaga Kesehatan Per Density, digunakan untuk mengidentifikasi mana yang paling mendesak ditangani. Biasanya dibagi menjadi kategori prioritas tinggi, sedang, rendah.	-	-	-
Indeks Komposit	Nilai gabungan dari indeks Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan yang memberikan gambaran ketahanan pangan secara menyeluruh di desa/kelurahan	-	Indeks	Poin
Peringkat	Peringkat desa/kelurahan berdasarkan nilai indeks komposit	-	-	-
Prioritas Komposit	Prioritas gabungan	-	-	-
1. Skor Rasio Lahan	Nilai kuantitatif yang diberikan pada indikator rasio lahan untuk keperluan pembobotan dan penghitungan indeks komposit. Skor ini biasanya telah dinormalisasi atau dikategorikan.	-	Skor	Poin
2. Skor Rasio Sarana	Nilai kuantitatif yang diberikan pada indikator rasio sarana untuk keperluan pembobotan dan penghitungan indeks komposit. Skor ini biasanya telah dinormalisasi atau dikategorikan.	-	Skor	Poin
3. Skor Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	Nilai kuantitatif yang diberikan pada indikator rasio Penduduk Tidak Sejahtera untuk keperluan pembobotan	-	Skor	Poin

	dan penghitungan indeks komposit. Skor ini biasanya telah dinormalisasi atau dikategorikan.			
4. Skor Akses Jalan	Nilai kuantitatif yang diberikan pada indikator akses jalan untuk keperluan pembobotan dan penghitungan indeks komposit. Skor ini biasanya telah dinormalisasi atau dikategorikan.	-	Skor	Poin
5. Skor Rasio Tanpa Air Bersih	Nilai kuantitatif yang diberikan pada indikator rasio Tanpa Air Bersih untuk keperluan pembobotan dan penghitungan indeks komposit. Skor ini biasanya telah dinormalisasi atau dikategorikan.	-	Skor	Poin
6. Skor Rasio Penduduk Per Tenaga Kesehatan Per Density	Nilai kuantitatif yang diberikan pada indikator rasio Penduduk Per Tenaga Kesehatan Per Density untuk keperluan pembobotan dan penghitungan indeks komposit. Skor ini biasanya telah dinormalisasi atau dikategorikan.	-	Skor	Poin
Indeks Ketersediaan	Menggambarkan kondisi ketersediaan pangan di desa, berdasarkan indikator seperti rasio lahan, sarana distribusi, dan produksi pangan lokal.	-	Indeks	Poin
Indeks Akses	Mengukur kemudahan penduduk mengakses pangan, baik secara ekonomi maupun fisik, berdasarkan data seperti rasio penduduk tidak	-	Indeks	Poin

	sejahtera, akses jalan, dan harga pangan.			
Indeks Pemanfaatan	Mengukur kemudahan penduduk mengakses pangan, baik secara ekonomi maupun fisik, berdasarkan data seperti rasio penduduk tidak sejahtera, akses jalan, dan harga pangan.	-	Indeks	Poin
Indeks Komposit2	Nilai gabungan dari indeks Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan yang memberikan gambaran ketahanan pangan secara menyeluruh di desa/kelurahan	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan

Konsep : [K00914] Ketahanan Pangan
Definisi : Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan pada level Desa/Kelurahan
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DKP NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 353. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
1. Rasio Konsumsi Normative terhadap Produksi Bersih (NCPR)	Rasio antara kebutuhan konsumsi pangan normatif (jumlah pangan yang seharusnya dikonsumsi berdasarkan standar gizi per kapita) dengan produksi bersih pangan lokal di kecamatan tersebut. Nilai >1 berarti kebutuhan konsumsi melebihi produksi lokal (potensi defisit pangan). Nilai <1 berarti kecamatan berpotensi surplus pangan.	-	Rasio	Poin

2. Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Persentase penduduk di kecamatan yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan resmi, sesuai data BPS. Indikator ini mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam mengakses pangan bergizi.	-	Persentase	Persen
3. Persentase RT dengan Pengeluaran Pangan >65% terhadap Total Pengeluaran	Persentase rumah tangga yang membelanjakan lebih dari 65% total pengeluarannya untuk pangan.	-	Persentase	Persen
4. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber energi listrik.	-	Persentase	Persen
5. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih layak (sumur terlindung, PDAM, mata air terlindung, dll.).	-	Persentase	Persen
6. Persentase Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan (sakit) dalam periode waktu tertentu (biasanya 1 bulan terakhir).	-	Persentase	Persen
7. Rasio Penduduk per Tenaga Kesehatan per Tingkat Kepadatan	Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan), disesuaikan dengan kepadatan penduduk.	-	Rasio	Poin

8. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Usia >15 Tahun	Rata-rata jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh perempuan usia di atas 15 tahun di kecamatan.	-	Waktu	Tahun
9. Persentase Balita Stunting	Persentase anak usia di bawah 5 tahun yang mengalami stunting (tinggi badan lebih rendah dari standar usia) akibat kekurangan gizi kronis.	-	Persentase	Persen
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kecamatan	Merupakan nilai gabungan (indeks komposit) dari seluruh indikator utama (ketersediaan, akses, pemanfaatan) yang dihitung untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu kecamatan.	-	Indeks	Poin
Rank	Peringkat kecamatan berdasarkan nilai IKP	-	-	-
Prioritas Komposit	Nilai skoring/ranking dari indikator komposit, digunakan untuk mengidentifikasi mana yang paling mendesak ditangani	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00914] Ketahanan Pangan

Definisi : Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan pada level Desa/Kelurahan

Ukuran : Indeks

Satuan : -

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : DKP NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 354. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Produksi Bersih Beras Jagung Ubi Jalar Dan Ubi Kayu Serta Stok Beras Pemerintah Daerah Dan Bantuan Pangan	Perbandingan antara kebutuhan konsumsi normatif (beras-setara) per penduduk dengan pasokan pangan bersih lokal, yaitu:	-	Rasio	Poin

Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	Persentase penduduk di kecamatan yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan resmi, sesuai data BPS. Indikator ini mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam mengakses pangan bergizi.	-	Persentase	Persen
Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65 Persen Terhadap Total Pengeluaran	Persentase rumah tangga yang membelanjakan lebih dari 65% total pengeluarannya untuk pangan.	-	Persentase	Persen
Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber energi listrik.	-	Persentase	Persen
Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih layak (sumur terlindung, PDAM, mata air terlindung, dll.).	-	Persentase	Persen
Angka Harapan Hidup Pada Saat Lahir	Perkiraan umur rata-rata yang akan dicapai bayi yang lahir pada tahun tertentu dengan asumsi pola mortalitas tetap. Menjadi indikator umum kesehatan masyarakat dan well-being.	-	Rata-rata	Tahun
Rata Rata Lama Sekolah Perempuan Di Atas 15 Tahun	Jumlah tahun pendidikan formal rata-rata yang diselesaikan perempuan (≥ 15 tahun). Pendidikan ibu berkorelasi	-	Rata-rata	Tahun

	dengan pengetahuan gizi, pola asuh, dan perilaku konsumsi pangan.			
Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk	Ukuran beban kerja layanan kesehatan yang menyesuaikan kepadatan wilayah:	-	Rasio	Poin
Persentase Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar Stunting	Bagian balita (0-59 bulan) yang memiliki indeks TB/U <-2 SD dari standar WHO. Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis dan kualitas pemanfaatan pangan.	-	Persentase	Persen
Indeks Ketahanan Pangan	Skor komposit yang menggabungkan indikator-indikator di atas (dengan pembobotan sesuai pedoman Bapanas) menjadi satu nilai ringkasan untuk tiap kabupaten/kota.	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Indeks Ketahanan Pangan Provinsi

Konsep : [K00914] Ketahanan Pangan
Definisi : Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan pada level Desa/Kelurahan
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DKP NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 355. Format Data Indeks Ketahanan Pangan Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Indeks Ketersediaan	Indeks yang menggambarkan kemampuan suatu provinsi dalam menyediakan pangan, baik dari produksi lokal, cadangan pemerintah daerah, distribusi antardaerah, maupun bantuan pangan.	-	Indeks	Poin
Indeks Keterjangkauan	Mengukur kemampuan ekonomi dan fisik masyarakat di suatu provinsi untuk mengakses pangan bergizi dalam jumlah yang cukup.	-	Indeks	Poin

Indeks Pemanfaatan Pangan	Menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pangan secara optimal untuk kesehatan dan gizi. Ini mencakup aspek sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.	-	Indeks	Poin
Komposit/Indeks Ketahanan Pangan	Gabungan dari ketiga indeks utama (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan) menjadi satu nilai komprehensif untuk menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu provinsi.	-	Indeks	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis

Konsep : Komoditas Pangan
Definisi : Harga yang ditetapkan untuk komoditas pangan utama yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi dan pangan masyarakat. Komoditas ini biasanya mencakup bahan makanan yang esensial dan sering dikonsumsi oleh masyarakat
Ukuran : Harga
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Rata-rata tertimbang harga pasar berdasarkan data dari berbagai sumber (misalnya pasar tradisional, distributor, dan eceran) dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.
Sumber Data/Publikasi : DKP NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 356. Format Data Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Komoditas	Komoditas bahan makanan yang esensial dan sering dikonsumsi oleh masyarakat	-	-	-
Harga (Rp)	Harga yang ditetapkan untuk komoditas pangan utama yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi dan pangan masyarakat	-	Harga	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

12) Jumlah Bantuan Pangan yang tersalurkan berdasarkan Jenis Bantuan dan Kabupaten/Kota

Konsep : Bantuan Pangan
Definisi : Banyaknya Bantuan Pangan yang tersalurkan berdasarkan Jenis Bantuan dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Massa
Satuan : ton
Metode Perhitungan : Banyaknya Bantuan Pangan yang tersalurkan berdasarkan Jenis Bantuan dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : DKP NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 357. Format Data Jumlah Bantuan Pangan yang tersalurkan berdasarkan Jenis Bantuan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Bantuan	Jenis bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat	-	-	-
Jumlah Bantuan Pangan	Banyaknya Bantuan Pangan yang tersalurkan berdasarkan Jenis Bantuan dan Kabupaten/Kota	-	Massa	Ton
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.23. Metadata Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1) Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan Provinsi Se-Indonesia

Konsep : Indeks Kemerdekaan Pers
Definisi : Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Para ahli yang dimaksud adalah meliputi para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang berkutat dalam komponen-komponen kemerdekaan pers.
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Indeks Kemerdekaan Pers = 46,2% Nilai Lingkungan Fisik dan Politik + 20,4% Nilai Lingkungan Ekonomi + 33,4% Nilai Lingkungan Hukum. (Sumber: Dewan Pers Indonesia).
Sumber Data/Publikasi : Dewan Pers Indonesia
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dewanpers.or.id/provinsi/data

Tabel 358. Format Data Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan Provinsi Se-Indonesia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nilai IKP	Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Para ahli yang dimaksud adalah meliputi para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang	-	Indeks	Poin

	berkutat dalam komponen-komponen kemerdekaan pers.			
Predikat IKP	Predikat IKP: 1. Buruk sekali/tidak bebas (IKP 0-30) 2. Buruk/kurang bebas (IKP 31-55) 3. Sedang/agak bebas (IKP 56-69) 4. Baik/cukup bebas (IKP 70-89) 5. Baik sekali/bebas (IKP 90-100)	1. Buruk sekali/tidak bebas 2. Buruk/kurang bebas 3. Sedang/agak bebas 4. Baik/cukup bebas 5. Baik sekali/bebas	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Definisi : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Ukuran : Indeks

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik = 13,00 % Nilai Domain Kebijakan Internal SPBE + 25,00 % Nilai Domain Tata Kelola SPBE + 16,50 % Nilai Domain Manajemen SPBE + 45,50 % Nilai Domain Layanan SPBE.
Kategori Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Kurang (Indeks SPBE <1,8); Cukup (Indeks SPBE 1,8 s.d <2,6); Baik (Indeks SPBE 2,6 s.d < 3,5); Sangat Baik (Indeks SPBE 3,5 s.d < 4,2); Memuaskan (Indeks SPBE 4,2 s.d 5,0)
(Sumber: PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020).

Sumber Data/Publikasi : KepmenPANRB Nomor 108 Tahun 2023, KepmenPANRB Nomor 13 Tahun 2024, KepmenPANRB Nomor 663 Tahun 2024

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 359. Format Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai Indeks SPBE	Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	-	Indeks	Poin

Predikat Indeks SPBE	Predikat Indeks SPBE: 1. Kurang (Indeks SPBE <1,8) 2. Cukup (Indeks SPBE 1,8 s.d <2,6) 3. Baik (Indeks SPBE 2,6 s.d < 3,5) 4. Sangat Baik (Indeks SPBE 3,5 s.d < 4,2) 5. Memuaskan (Indeks SPBE 4,2 s.d 5,0)	1. Kurang 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik 5. Memuaskan	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Pembangunan Statistik

Definisi : Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan.

Ukuran : Indeks

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : Indeks Pembangunan Statistik = 28% Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia + 24% Nilai Domain Kualitas Data + 19% Nilai Domain Proses Bisnis Statistik + 17% Nilai Domain Kelembagaan + 12% Nilai Domain Statistik Nasional.

Kategori Nilai Indeks Pembangunan Statistik = Kurang (IPS <1,8); Cukup (IPS 1,8 s.d <2,6); Baik (IPS 2,6 s.d < 3,5); Sangat Baik (IPS 3,5 s.d < 4,2); Memuaskan (IPS 4,2 s.d 5,0).
(Sumber: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral).

Sumber Data/Publikasi : Kepka BPS Nomor 741 Tahun 2023, Kepka BPS Nomor 605 Tahun 2024

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 360. Format Data Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai IPS	Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan.	-	Indeks	Poin
Predikat IPS	Predikat IPS: 1. Kurang (IPS <1,8) 2. Cukup (IPS 1,8 s.d <2,6) 3. Baik (IPS 2,6 s.d < 3,5) 4. Sangat Baik (IPS 3,5 s.d < 4,2) 5. Memuaskan (IPS 4,2 s.d 5,0)	1. Kurang 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik 5. Memuaskan	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB

Konsep : Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Definisi : Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah metode untuk mengukur dan menggambarkan tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Ukuran : Indeks
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Indeks Keterbukaan Informasi Publik = 54,5% Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik + 10,4% Dimensi Lingkungan Ekonomi + 35,1% Dimensi Lingkungan Hukum.
Kategori Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik: Buruk Sekali (skor 0-30); Buruk (skor 31-59); Sedang (skor 60-79); Baik (skor 80-89); Baik Sekali (skor 90-100). (Sumber: Buku 1 IKIP 2024)
Sumber Data/Publikasi : Komisi Informasi Pusat
Tautan Publikasi Sumber Data : komisiinformasi.go.id

Tabel 361. Format Data Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai IKIP	Nilai yang menunjukkan ukuran/gambaran tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia	-	Indeks	Poin

Predikat IKIP	Predikat IKIP: 1. Buruk Sekali (skor 0-30) 2. Buruk (skor 31-59) 3. Sedang (skor 60-79) 4. Baik (skor 80-89) 5. Baik Sekali (skor 90-100)	1. Buruk Sekali 2. Buruk 3. Sedang 4. Baik 5. Baik Sekali	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Definisi	:	*Monitoring* adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. (Sumber: PerKI Nomor 1 Tahun 2022).
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Poin
Metode Perhitungan	:	Nilai Monev dihitung melalui komponen berikut: a. sarana prasarana; b. kualitas Informasi; c. jenis informasi; d. komitmen organisasi; e. inovasi dan strategi; dan f. digitalisasi. Kategori Nilai Monev = Informatif (nilai 90-100); Menuju Informatif (nilai 80-89,9); Cukup Informatif (nilai 60-79,9); Kurang Informati (nilai 40-59,9); Tidak Informatif (nilai < 39,9) (Sumber: PerKI Nomor 1 Tahun 2022).
Sumber Data/Publikasi	:	Komisi Informasi Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data	:	komisiinformasi.ntbprov.go.id

Tabel 362. Format Data Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai MONEV	Nilai yang menunjukkan kemampuan *monitoring* dan evaluasi, dimana *monitoring* adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik, sedangkan evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.	-	Indeks	Poin
Predikat MONEV	Predikat MONEV: 1. Informatif (nilai 90-100) 2. Menuju Informatif (nilai 80-89,9) 3. Cukup Informatif (nilai 60-79,9) 4. Kurang Informati (nilai 40-59,9) 5. Tidak Informatif (nilai < 39,9)	1. Informatif 2. Menuju Informatif 3. Cukup Informatif 4. Kurang Informati 5. Tidak Informatif	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Komponen Pembentuk Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi NTB

Konsep : Komponen Indeks Kemerdekaan Pers
Definisi : Nilai komponen-komponen yang membentuk Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Nilai Lingkungan Fisik dan Politik = 6,5% Nilai Indikator Berserikat + 17,4% Nilai Indikator Intervensi + 19,6% Nilai Indikator Kekerasan + 5,8% Nilai Indikator Media Alternatif + 10,6% Nilai Indikator Keragaman + 13,8% Nilai Indikator Informasi Akurat dan Berimbang + 11,4% Nilai Indikator Akses Informasi Publik + 4,6% Nilai Indikator Pelatihan Jurnalis + 10,3% Nilai Indikator Akses Kelompok Rentan.
Nilai Lingkungan Ekonomi = 7,2% Nilai Indikator Pendirian Pers + 25% Nilai Indikator Kepentingan Kelompok + 21,2% Nilai Indikator Keberagaman Kepemilikan + 21,1% Nilai Indikator Tata Kelola + 25,5% Nilai Indikator Kelembagaan Publik.
Nilai Lingkungan Hukum = 28,9% Nilai Indikator Lembaga Peradilan + 8,1% Nilai Indikator Peraturan Dan Kebijakan Jurnalisme + 20,7% Nilai Indikator Kriminalisasi Dan Intimidasi + 11,8% Nilai Indikator Pentaatan UU Pers + 20,7% Nilai Indikator Independensi Dewan Pers Dll + 9,8% Nilai Indikator Ruang Disabilitas. (Sumber: Dewan Pers Indonesia).
Sumber Data/Publikasi : Dewan Pers Indonesia
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dewanpers.or.id/provinsi/data

Tabel 363. Format Data Komponen pembentuk Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Komponen IKP	Komponen yang membentuk nilai IKP	1. Lingkungan Fisik dan Politik 2. Lingkungan Ekonomi 3. Lingkungan Hukum	-	-
Nilai Komponen IKP	Nilai pada masing-masing komponen yang membentuk nilai IKP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Komponen Pembentuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Komponen Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi : Nilai komponen-komponen yang membentuk indeks SPBE
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Nilai Domain Kebijakan Internal SPBE = 13% Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Nilai Domain Tata Kelola SPBE = 10% Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE + 10% Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi + 5% Nilai Aspek Penyelenggara SPBE.
Nilai Domain Manajemen SPBE = 12% Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE + 4.5% Nilai Aspek Pelaksanaan Audit TIK.
Nilai Domain Layanan SPBE = 27.5% Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik + 18% Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.
(Sumber: PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020).
Sumber Data/Publikasi : Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2022, Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023, Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 364. Format Data Komponen pembentuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Komponen Indeks SPBE	Komponen yang membentuk nilai Indeks SPBE	1. Domain Kebijakan Internal SPBE 2. Domain Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE	-	-
Nilai Komponen Indeks SPBE	Nilai pada masing-masing komponen yang membentuk nilai indeks SPBE	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Komponen Pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Komponen Indeks Pembangunan Statistik
Definisi : Nilai komponen-komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia = 25% Aspek Standar Data Statistik + 25% Aspek Metadata Statistik + 25% Aspek Interoperabilitas Data + 25% Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk.
Nilai Domain Kualitas Data = 21% Aspek Relevansi + 16% Aspek Akurasi + 21% Aspek Aktualitas & Ketepatan Waktu + 21% Aspek Aksesibilitas + 21% Aspek Keterbandingan & Konsistensi.

Nilai Domain Proses Bisnis Statistik = 32% Aspek Perencanaan Data + 26% Aspek Pengumpulan Data + 21% Aspek Pemeriksaan Data + 21% Aspek Penyebarluasan Data.
Nilai Domain Kelembagaan = 35% Aspek Profesionalitas + 30% Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel + 35% Aspek Pengorganisasian Statistik.
Nilai Domain Statistik Nasional = 34% Aspek Pemanfaatan Data Statistik + 33% Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik + 33% Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan.
(Sumber: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral).

Sumber Data/Publikasi : Laporan Hasil EPSS 2023, Laporan Hasil EPSS 2024

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 365. Format Data Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Domain	Domain yang membentuk nilai IPS	1. Domain Prinsip SDI 2. Domain Kualitas Data 3. Domain Proses Bisnis Statistik 4. Domain Kelembagaan 5. Domain Statistik Nasional	-	-
Nilai	Nilai pada masing-masing domain yang membentuk nilai IPS	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Komponen Pembentuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB

Konsep	:	Komponen Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Definisi	:	Nilai komponen-komponen yang membentuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Poin
Metode Perhitungan	:	Nilai Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik = 7,1% Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut + 23,7% Akses dan Diseminasi Informasi + 40,5% Ketersediaan Informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru + 12,7% Partisipasi Publik + 10,3% Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi + 5,7% Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan. Nilai Dimensi Lingkungan Ekonomi = 12,4% Biaya Ringan Mendapatkan Informasi + 21,4% Tata Kelola Informasi Publik + 14,4% Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi + 17,9% Kemanfaatan Informasi bagi Publik + 4,7% Keberagaman Kepemilikan Media + 8,2% Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi + 11,1% Transparansi. Nilai Dimensi Lingkungan Hukum = 12,4% Jaminan Hukum atas Akses Informasi + 5,9% Kebebasan Menyebarluaskan Informasi + 12,9% Perlindungan bagi Pemohon Informasi + 6,4% Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi + 23,3% Perlindungan hukum bagi *whistleblower* + 19,3% Kepatuhan menjalankan UU KIP + 19,8% Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi. (Sumber: Buku 1 IKIP 2024).
Sumber Data/Publikasi	:	Komisi Informasi Pusat
Tautan Publikasi Sumber Data	:	komisiinformasi.go.id

Tabel 366. Format Data Komponen pembentuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Komponen IKIP	Komponen yang membentuk nilai IKP	1. Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik 2. Dimensi Lingkungan Ekonomi 3. Dimensi Lingkungan Hukum	-	-
Nilai Komponen IKIP	Nilai pada masing-masing komponen yang membentuk nilai IKIP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Komponen Pembentuk Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Komponen Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Definisi : Nilai komponen-komponen yang membentuk Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Komponen pembentuk nilai Monev adalah berikut: a. sarana prasarana; b. kualitas Informasi; c. jenis informasi; d. komitmen organisasi; e. inovasi dan strategi; dan f. digitalisasi.

Kategori Nilai Monev = Informatif (nilai 90-100); Menuju Informatif (nilai 80-89,9); Cukup Informatif (nilai 60-79,9); Kurang Informatif (nilai 40-59,9); Tidak Informatif (nilai < 39,9)
(Sumber: PerKI Nomor 1 Tahun 2022).

Sumber Data/Publikasi : Komisi Informasi Provinsi NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : komisiinformasi.ntbprov.go.id

Tabel 367. Format Data Komponen pembentuk Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Komponen MONEV	Komponen yang membentuk nilai MONEV	1. Sarana prasarana 2. Kualitas Informasi 3. Jenis informasi 4. Komitmen organisasi 5. Inovasi dan strategi 6. Digitalisasi.	-	-
Nilai Komponen MONEV	Nilai pada masing-masing komponen yang membentuk nilai MONEV	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Jumlah Lembaga dan Pers berdasarkan Jenis Media di Provinsi NTB

Konsep : Lembaga Pers
Definisi : Lembaga pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Pers dapat menggunakan media cetak, media elektronik, dan saluran lain yang tersedia.
Ukuran : Total
Satuan : Lembaga
Metode Perhitungan : Total lembaga pers pada periode tertentu yang disajikan berdasarkan jenis media, meliputi media cetak, radio, TV, dan siber
Sumber Data/Publikasi : Dewan Pers Indonesia
Tautan Publikasi Sumber Data : https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers

Tabel 368. Format Data Jumlah Lembaga dan Pers berdasarkan Jenis Media di Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Media	Jenis media untuk menyajikan informasi	1. Media cetak 2. Radio 3. TV 4. Siber	-	-
Jumlah Lembaga dan Pers	Total lembaga pers berdasarkan jenis media yang digunakan	-	Total	Lembaga
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Jumlah Sengketa Informasi Publik

Konsep : Sengketa Informasi Publik
Definisi : [K01990] Sengketa Informasi Publik: Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
Ukuran : Total
Satuan : Sengketa
Metode Perhitungan : Total Sengketa Informasi Publik yang terjadi pada periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Komisi Informasi Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : komisiinformasi.ntbprov.go.id

Tabel 369. Format Data Jumlah Sengketa Informasi Publik

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Sengketa Informasi Publik	Total sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan	-	Total	Sengketa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Daftar Area *Blankspot* berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Area *Blankspot*
Definisi : *Blankspot* adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet.
Ukuran : Koordinat *Latitude* (garis lintang) dan *Longitude* (garis bujur)
Satuan : Titik
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 370. Format Data Daftar Area *Blankspot* berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Dusun-Desa	Nama Dusun/Desa area *blankspot*	-	-	-
Latitude	Koordinat *latitude* area *blankspot*	-	Koordinat	Derajat
Longitude	Koordinat *longitude* area *blankspot*	-	Koordinat	Derajat
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Daftar Area Lemah Sinyal berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Area Lemah Sinyal
Definisi : Jaringan yang sudah memiliki sinyal tetapi tidak maksimal.
Ukuran : Koordinat *Latitude* (garis lintang) dan *Longitude* (garis bujur)
Satuan : Titik
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 371. Format Data Daftar Area Lemah Sinyal berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Dusun-Desa	Nama Dusun/Desa area lemah sinyal	-	-	-
Latitude	Koordinat *latitude* area lemah sinyal	-	Koordinat	Derajat
Longitude	Koordinat *longitude* area lemah sinyal	-	Koordinat	Derajat
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Base Transceiver Station
Definisi : *Base Transceiver Station* (BTS) berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain.
Ukuran : Total
Satuan : Titik
Metode Perhitungan : Total *Base Transceiver Station* pada periode tertentu yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 372. Format Data Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah BTS	*Base Transceiver Station* berdasarkan kabupaten/kota	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

16) Jumlah Aplikasi TIK yang dimanfaatkan berdasarkan Jenis

Konsep : Aplikasi TIK
Definisi : Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada perangkat elektronik, seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet.
Ukuran : Total
Satuan : Aplikasi
Metode Perhitungan : Total aplikasi TIK yang dimanfaatkan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 373. Format Data Jumlah Aplikasi TIK yang dimanfaatkan berdasarkan Jenis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Sasaran Pelayanan	Sasaran pelayanan Aplikasi TIK	1. Nasional 2. Lokal	-	-
Kategori Sistem	Kategori sistem Aplikasi TIK	1. Rendah 2. Tinggi 3. Strategis	-	-
Jumlah Aplikasi TIK	Jumlah Aplikasi TIK berdasarkan sasaran pelayanan dan kategori sistem	-	Total	Aplikasi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

17) Jumlah Pejabat yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : Tanda Tangan Elektronik
Definisi : Tanda tangan elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang menggunakan informasi elektronik untuk mengidentifikasi dan memverifikasi seseorang atau pihak tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total pejabat yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik
Sumber Data/Publikasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 374. Format Data Jumlah Pejabat yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Jumlah Pejabat yang Menggunakan TTE	Total pejabat yang menggunakan TTE berdasarkan perangkat daerah dalam periode waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

18) Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang Digital

Konsep : Literasi Digital

Definisi : [K01112] Literasi: Kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks.

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Literasi digital terdiri dari 4 pilar, yaitu *Digital Skills*, *Digital Culture*, *Digital Ethics*, dan *Digital Safety*

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total masyarakat dalam periode tertentu yang mendapatkan literasi di bidang digital

Sumber Data/Publikasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 375. Format Data Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

19) Komponen Pembentuk (Aspek) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Komponen Indeks Pembangunan Statistik
Definisi : Nilai komponen-komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Laporan Hasil EPSS 2023, Laporan Hasil EPSS 2024
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 376. Format Data Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Domain	Domain yang membentuk nilai IPS	1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia 2. Domain Kualitas Data 3. Domain Proses Bisnis Statistik 4. Domain Kelembagaan 5. Domain Statistik Nasional	-	-
Aspek	Aspek yang membentuk nilai IPS	1. Standar Data Statistik 2. Metadata Statistik 3. Interoperabilitas Data 4. Kode Referensi dan Data Induk 5. Relevansi	-	-

		6. Akurasi Data 7. Aktualitas dan Ketepatan Data 8. Aksesibilitas 9. Keterbandingan dan Konsistensi 10. Perencanaan Data 11. Pengumpulan Data 12. Pemeriksaan Data 13. Penyebarluasan Data 14. Profesionalitas 15. SDM yang Memadai dan Kapabel 16. Pengorganisasian Statistik 17. Pemanfaatan Data Statistik 18. Pengelolaan Kegiatan Statistik 19. Penguatan SSN Berkelanjutan		
Nilai	Nilai pada masing-masing aspek yang membentuk nilai IPS	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.24. Metadata Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Anggota Koperasi; Koperasi.
Definisi : Banyaknya anggota yang meliputi pemilik dan pengguna jasa koperasi yang dicatat dalam buku daftar anggota.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total dari semua anggota koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 377. Format Data Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Anggota Koperasi	Total anggota koperasi	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2) Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Karyawan
Definisi : Banyaknya Individu yang bekerja di sebuah koperasi, baik sebagai pegawai tetap, kontrak, maupun bagian dari pengelolaan
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total dari semua karyawan koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 378. Format Data Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Karyawan Koperasi	Total karyawan koperasi	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Manajer
Definisi : Banyaknya orang yang diberi wewenang oleh Pengurus Koperasi untuk mengelola usaha dan kegiatan koperasi secara profesional. (Pasal 1 Angka 11 Permen KUKM No. 6/2023)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total dari semua manajer koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 379. Format Data Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Manajer Koperasi	Total manajer koperasi	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

4) Jumlah Pengawas Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Pengawas Koperasi
Definisi : banyaknya perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total dari semua pengawas koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 380. Format Data Jumlah Pengawas Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pengawas Koperasi	Total pengawas koperasi	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

5) Jumlah Pengurus Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Pengurus Koperasi
Definisi : banyaknya perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total dari semua pengurus koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 381. Format Data Jumlah Pengurus Koperasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pengurus Koperasi	Total pengurus koperasi	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

6) Jumlah Koperasi berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi

Definisi : Banyaknya Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan jenis usaha koperasi.

Jenis Usaha koperasi meliputi:

- Simpan Pinjam
- Konsumen
- Produsen
- Jasa
- Pemasaran

Ukuran : Total

Satuan : Unit Usaha

Metode Perhitungan : total dari semua jenis koperasi berdasarkan jenis usaha koperasi

Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 382. Format Data Jumlah Koperasi berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Koperasi	-	1. Koperasi Jasa 2. Koperasi Konsumen 3. Koperasi Pemasaran 4. Koperasi Produsen 5. Koperasi Simpan Pinjam	-	-
Jumlah Koperasi	Total koperasi	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

7) Jumlah Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Banyaknya Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan status keaktifan koperasi.
Status keaktifan meliputi koperasi aktif dan koperasi tidak aktif.
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : total dari semua jenis koperasi berdasarkan status keaktifan koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 383. Format Data Jumlah Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Keaktifan	-	1. Aktif 2. Tidak aktif	-	-
Jumlah Koperasi	Total koperasi	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

8) Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Banyaknya anggota koperasi dan (pemilik/karyawan) UKM yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM
Ukuran : Total
Satuan : orang
Metode Perhitungan : total dari seluruh anggota koperasi dan UMKM yang mengikuti diklat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 384. Format Data Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah yang mengikuti diklat	Total yang mengikuti diklat	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

9) Jumlah Koperasi Sehat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Banyaknya koperasi yang memenuhi berbagai kriteria, seperti permodalan, manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : total semua koperasi sehat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 385. Format Data Jumlah Koperasi Sehat Binaan Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah Koperasi Sehat	Total koperasi sehat	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

10) Jumlah Koperasi Sektor Riil berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Banyaknya koperasi yang menjalankan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa, di luar sektor jasa keuangan dan simpan pinjam.
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : total semua koperasi sektor riil
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 386. Format Data Jumlah Koperasi Sektor Riil berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Koperasi Sektor riil	Total koperasi sektor riil	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

11) Jumlah Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota

Konsep : koperasi
Definisi : Banyaknya koperasi yang melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya dan berfungsi sebagai badan usaha sekaligus lembaga dakwah.(Pasal 1 Angka 1 Permen KUKM No. 19/2023)
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : total semua koperasi syariah
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 387. Format Data Jumlah Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Koperasi Syariah	Total koperasi syariah	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

12) Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi; Rapat Anggota Tahunan.
Definisi : Banyaknya koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : total semua koperasi yang melaksanakan RAT
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 388. Format Data Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Koperasi RAT	Total koperasi yang melaksanakan RAT	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

13) Jumlah Aset Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Total kekayaan koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar atau pinjaman
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total semua aset koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 389. Format Data Jumlah Aset Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Aset	Total nilai aset koperasi	-	Nilai	Juta Rupiah
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

14) Jumlah Modal Luar Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Modal Luar
Definisi : Sejumlah uang yang dihimpun dari perseorangan anggota koperasi, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan Non Bank, koperasi, badan/atau lembaga yang menyediakan pinjaman kepada koperasi, yang diperoleh sesuai dengan perjanjian dan ketentuan pinjaman yang disepakati para pihak.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total semua modal luar koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 390. Format Data Jumlah Modal Luar Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Modal Luar Koperasi	Total nilai modal luar koperasi	-	Nilai	Juta Rupiah
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

15) Jumlah Modal Sendiri Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Modal Sendiri
Definisi : Modal koperasi yang dihimpun dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan jenis simpanan lain yang ditetapkan koperasi, dana cadangan serta hibah.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total semua modal sendiri koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 391. Format Data Jumlah Modal Sendiri Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Modal Sendiri Koperasi	Total nilai modal sendiri koperasi	-	Nilai	Juta Rupiah
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

16) Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Sisa Hasil Usaha
Definisi : Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Sisa Hasil Usaja koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 392. Format Data Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah SHU	Total nilai sisa hasil usaha koperasi	-	Nilai	Juta Rupiah
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

17) Jumlah Volume Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Volume Usaha
Definisi : Banyaknya nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Volume Usaha koperasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 393. Format Data Jumlah Volume Usaha Koperasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Volume Usaha Koperasi	Total nilai volume usaha koperasi	-	Nilai	Juta Rupiah
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

18) Jumlah UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota

Konsep : Skala Usaha
Definisi : Jumlah usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya yang ditinjau dari aset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha.
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total masing-masing skala usaha
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 394. Format Data Jumlah UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Skala Usaha	-	1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah		
Jumlah UMKM	Total usaha berdasarkan skala usaha	-	total	Unit usaha
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

19) Persentase Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Bagian dari seluruh Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : pembagian antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi dikali 100
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 395. Format Data Persentase Koperasi berdasarkan Keaktifan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Keaktifan Koperasi	-	1. Aktif 2. Tidak Aktif		
Persentase Koperasi	Persentase koperasi berdasarkan status keaktifan koperasi	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

20) Persentase Koperasi Sehat Binaan Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi

Definisi : Bagian dari seluruh koperasi binaan Provinsi NTB yang memenuhi berbagai kriteria, seperti permodalan, manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Pembagian antara jumlah koperasi sehat binaan provinsi NTB dibagi dengan jumlah seluruh Koperasi binaan Provinsi NTB dikali 100
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 396. Format Data Persentase Koperasi Sehat Binaan Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Koperasi	Total koperasi	-	Total	Unit
Jumlah Koperasi Sehat	Total koperasi sehat	-	Total	Unit
Persentase Koperasi Sehat	Total koperasi sehat dibagi total koperasi dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

21) Persentase Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Bagian dari seluruh koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
Ukuran : Persentase
Satuan : persen
Metode Perhitungan : Pembagian antara jumlah koperasi syariah dengan jumlah seluruh koperasi dikali dengan 100
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 397. Format Data Persentase Koperasi Syariah berdasarkan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Koperasi	Total koperasi	-	Total	Unit
Jumlah Koperasi Syariah	Total koperasi syariah	-	Total	Unit
Persentase Koperasi Syariah	Total koperasi syariah dibagi total koperasi dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

22) Persentase Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Bagian dari seluruh koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan pada periode tententu
Ukuran : Persentase
Satuan : persen
Metode Perhitungan : Pembagian antara jumlah koperasi yang melaksanakan Rapar Anggota Tahunan dengan jumlah seluruh koperasi dikali dengan 100
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 398. Format Data Persentase Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Koperasi	Total koperasi	-	Total	Unit
Jumlah Koperasi RAT	Total koperasi yang melaksanakan RAT	-	Total	Unit
Persentase Koperasi RAT	Total koperasi RAT dibagi total koperasi dikali 100%	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun	-	-	-

23) Persentase UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota

Konsep : Usaha Kecil Menengah
Definisi : bagian dari seluruh usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya yang ditinjau dari aset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha.
Ukuran : Persentase
Satuan : persen
Metode Perhitungan : Pembagian antara masing-masing usaha berdasarkan skala usaha dengan jumlah seluruh usaha dikali 100
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 399. Format Data Persentase UKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Skala Usaha	-	1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah		
Persentase UMKM	Total koperasi usaha berdasarkan klasifikasi usaha dibagi dengan total UMKM dikali 100%	-	Persentase	Persen

Tahun	Tahun	-	-	-

24) Daftar *Start Up* (Perusahaan Rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan

Konsep : *Start Up*
Definisi : perusahaan rintisan yang baru didirikan untuk mengembangkan produk atau layanan baru
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 400. Format Data Daftar *Start Up* (Perusahaan Rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-

Nama Usaha	Nama Usaha	-	-	-
Produk Usaha	Produk yang dihasilkan dalam suatu usaha	-	-	-
Tahun	Tahun	-	-	-

25) Daftar Koperasi Modern

Konsep : Koperasi Modern
Definisi : Koperasi Modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperate governance*) memilik daya saing dan adaptif terhadap perubahan.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 401. Format Data Daftar Koperasi Modern

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-

Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Koperasi	Nama Koperasi	-	-	-
Produk Usaha	Produk yang dihasilkan dalam suatu koperasi	-	-	-
Tahun	Tahun	-	-	-

26) Jumlah UMKM berdasarkan Sektor Usaha dan Kabupaten/Kota

Konsep : UMKM
Definisi : Jumlah usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya yang ditinjau dari aset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha yang diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha. Klasifikasi usaha yang dimaksud yaitu sektor pertanian dan non pertanian.
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total masing-masing skala usaha berdasarkan sektor usaha
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 402. Format Data Jumlah UMKM berdasarkan Sektor Usaha dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-

Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Sektor Usaha	Sektor lapangan Usaha	Sesuai lampiran 6	-	-
Skala Usaha	-	1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah	-	-
Jumlah Usaha	Total usaha berdasarkan skala usaha dan sektor tertentu	-	Total	Unit ushaa
Tahun	Tahun	-	-	-

27) Jumlah Koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Koperasi
Definisi : Jumlah Koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan untuk mengembangkan usahanya
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total seluruh koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Koperasi UKM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 403. Format Data Jumlah Koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah UMKM	Total UMKM yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	-	Total	Unit Usaha
Tahun	Tahun	-	-	-

2.25. Metadata Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1) Jumlah Sampah yang terkelola di TPA Kebon Kongo

Konsep : [K01524] Pengelolaan Sampah
Definisi : Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Rata-rata Penanganan Sampah/Proyeksi Harian Sampah pada periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas LHK NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 404. Format Data Jumlah Sampah yang terkelola di TPA Kebon Kongo

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Sampah yang Masuk TPA	Banyaknya sampah yang masuk ke TPA Kebun Kongo setiap bulannya	-	Jumlah	Ton
Material *Waste to Energy*	Banyaknya sampah yang diolah menjadi energi	-	Jumlah	Ton
Kompos	Banyaknya sampah yang diolah menjadi pupuk kompos	-	Jumlah	Ton
Produk Daur Ulang	Banyaknya sampah yang diolah menjadi produk daur ulang	-	Jumlah	Ton
Landfill	Banyaknya sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah	-	Jumlah	Ton

Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

2) Daftar Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Laut, Air, Udara)

Konsep : Titik lokasi pemantauan kualitas lingkungan
Definisi : Dimana saja Titik lokasi pemantauan kualitas lingkungan (Air Laut, Air, Udara)
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi Titik lokasi pemantauan kualitas lingkungan (Air Laut, Air, Udara)
Sumber Data/Publikasi : KLHK/DLHK/DLH
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 405. Format Data Daftar Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Laut, Air, Udara)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Level Pemantauan	Kewenangan pemantauan	1. Pusat 2. Provinsi	-	-

		3. Kabupaten/kota		
Jenis Pemantauan Kualitas Lingkungan	Macam-macam pemantauan kualitas lingkungan	1. Air Laut 2. Air 3. Udara	-	-
Lokasi Pemantauan	Tempat atau titik pemantauan	-	-	-
Tanggal Pemantauan	Waktu pemantauan	-	-	-
Tahun	Tahun pemantauan dilaksanakan	-	-	-

3) Daftar Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

Konsep : Pemegang Izin Usaha
Definisi : Identifikasi Pemegang Izin Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi Pemegang Izin Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 406. Format Data Daftar Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kegiatan yang dilakukan	Jenis usaha/kegiatan yang diajukan persetujuan lingkungannya	-	-	-
Sektor	Sektor izin usaha	-	-	-
Tanggal pemeriksaan	Tanggal pemeriksaan dokumen	-	-	-
Status	-	1. Taat 2. Tidak taat	-	-
Tindak lanjut	Tindak lanjut yang diberikan terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan	-	-	-
Tahun	Tahun izin diberikan	-	-	-

4) Daftar Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) berdasarkan Status (Efektif dan Tidak Efektif)

Konsep : Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)
Definisi : Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri hutan lestari
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi BPKH berdasarkan status (efektif atau tidak)
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 407. Format Data Daftar Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) berdasarkan Status (Efektif dan Tidak Efektif)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama BKPH	Nama BKPH	-	-	-
Unit KPHP/KPHL	Unit KPHP/KPHL	-	-	-

Status	Status keaktifan BKPH	1. Efektif 2. Tidak Efektif	-	-
Tahun Efektif	Tahun izin diberikan	-	-	-

5) Luas Areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan Jumlah Bibit dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01867] Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Definisi : Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung Luas Areal dan Jumlah Bibit Rehabilitasi Hutan (reboisasi) dan rehabilitasi lahan (penghijauan) Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 408. Format Data Luas Areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan Jumlah Bibit dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Rehabilitasi	Macam-macam kegiatan rehabilitasi yang dilakukan	1. Penghijauan 2. Reboisasi	-	-
Luas Lahan	Luas lahan yang direhabilitasi	-	Luas	Hektar

Jumlah Bibit	Jumlah bibit yang ditanam pada lahan rehabilitasi	-	Total	Batang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

6) Daftar Desa Sekitar Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

Konsep : [K00745] Kawasan hutan, [K00371] Desa

Definisi : Kawasan hutan: Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Desa: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ukuran : -

Satuan : -

Metode Perhitungan : Identifikasi Desa sekitar kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan

Sumber Data/Publikasi : DLHK

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 409. Format Data Daftar Desa Sekitar Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Fungsi Kawasan	Fungsi kawasan hutan yang berada di sekitar desa	1. Hutan produksi terbatas (HPT) 2. Hutan produksi tetap (HP) 3. Hutan Lindung (HL) 4. Taman Wisata Alam (TWA) 5. Taman Nasional (TN) 6. Cagar Alam (CA) 7. Kawasan Suaka Alam (KSA) 8. Taman Hutan Rakyat (Tahura) 9. Taman Buru (TB)	-	-
UPT/Balai	BKPH pelaksana	-	-	-

7) Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : [K00827] Kelompok Tani Hutan (KTH)
Definisi : Kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Identifikasi Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan Desa/Kelurahan
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 410. Format Data Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Skema Hutan	Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat lokal di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat	1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 3. Kemitraan 4. Usulan	-	-
UPT/Balai	BKPH pelaksana	-	-	-
KTH	KTH Pelaksana	-	-	-

8) Daftar kelompok Tani Hutan (KTH) yang Sudah Memiliki Usaha berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : [K00827] Kelompok Tani Hutan (KTH)

Definisi : Kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa

Ukuran : -

Satuan : -
Metode Perhitungan : Identifikasi Daftar kelompok Tani Hutan (KTH) yang sudah memiliki usaha berdasarkan Desa/Kelurahan
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : https://gokups.menlhk.go.id/

Tabel 411. Format Data Daftar kelompok Tani Hutan (KTH) yang Sudah Memiliki Usaha berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Skema Hutan	Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat lokal di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat	1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 3. Kemitraan Kehutanan 4. Hutan Desa	-	-
UPT/Balai	BKPH pelaksana	-	-	-
KTH	KTH Pelaksana	-	-	-
Kelompok Usaha	Kelompok usaha pelaksana	-	-	-
Nomor Surat	Nomor surat keputusan	-	-	-
Tahun	Tahun sesuai surat keputusan diberikan	-	-	-

Kelas	-	1. Emas 2. Platinum 3. Perak 4. Biru		

9) Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kelompok Hutan

Konsep : [K00745] Kawasan Hutan
Definisi : Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kelompok Hutan
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 412. Format Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kelompok Hutan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kelompok Hutan	Sesuai dengan kelompok hutan	-	-	-
Fungsi Hutan	Jenis hutan berdasarkan fungsinya	1. Hutan Konservasi 2. Hutan Lindung	-	-

		3. Hutan Produksi		
Luas Hutan	Luas hutan berdasarkan fungsi dan kelompok hutan	-	Luas	Hektar

10) Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00745] Kawasan Hutan
Definisi : Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung Luas kawasan hutan dengan fungsi-fungsi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikelompokkan pada masing-masing kabupaten/kota
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 413. Format Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Fungsi Hutan	Jenis hutan berdasarkan fungsinya	1. Hutan Konservasi 2. Hutan Lindung	-	-

		3. Hutan Produksi		
Luas Hutan	Luas hutan berdasarkan fungsi	-	Luas	Hektar

11) Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan BKPH

Konsep : [K00745] Kawasan Hutan
Definisi : Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung Luas kawasan hutan dengan fungsi-fungsi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikelompokkan pada wilayah kerja BPKH
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 414. Format Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi dan BKPH

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama BKPH	Nama BKPH yang ada di Provinsi NTB	1. BKPH Rinjani Barat 2. BKPH Pelangan Tastura 3. BKPH Rinjani Timur 4. BKPH Sejorong Mataiyang 5. BKPH Brang Rea Pucak Ngengas 6. BKPH Batulanteh 7. BKPH Orong Telu 8. BKPH Brang Beh	-	-

		9. BKPH Ropang 10. BKPH Ampang Plampang 11. BKPH Ampang Riwo 12. BKPH Toffo Pajo Soromandi 13. BKPH Tambora 14. BKPH Madapangga Rompu Waworada 15. BKPH Maria Donggomasa		
Nama KPH	Nama kesatuan pengelolaan hutan	-	-	-
Fungsi Hutan	Jenis hutan berdasarkan fungsinya	1. Hutan Konservasi 2. Hutan Lindung 3. Hutan Produksi	-	-
Luas Hutan	Luas hutan berdasarkan fungsi dan BKPH	-	Luas	Hektar

12) Luas Tutupan Lahan berdasarkan Kategori

Konsep : Tutupan Lahan
Definisi : Tutupan lahan mengacu pada jenis penggunaan atau penutupan permukaan lahan di suatu wilayah, baik yang bersifat alami maupun hasil aktivitas manusia
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung Luas Tutupan Lahan pada masing-masing Kategori
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 415. Format Data Luas Tutupan Lahan berdasarkan Kategori

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Hutan	-	1. Hutan 2. Non Hutan	-	-
Lokasi Tutupan Lahan	Letak tutupan lahan	1. Bandara/Pelabuhan 2. Hutan Lahan Kering Primer 3. Hutan Lahan Kering Sekunder 4. Hutan Mangrove Primer 5. Hutan Mangrove Sekunder 6. Hutan Tanaman 7. Lahan Terbuka 8. Perkebunan 9. Pertambangan 10. Permukiman 11. Pertanian Lahan Kering 12. Pertanian Lahan Kering Campur Semak 13. Rawa 14. Semak Belukar 15. Savana 16. Sawah 17. Semak Belukar Rawa 18. Transmigrasi 19. Tambak	-	-
Luas Hutan	Luas hutan berdasarkan fungsi dan BKPH	-	Luas	Hektar

13) Luas Perhutanan Sosial berdasarkan Skema (HKM, HTR, KK, HD), BKPH dan Kabupaten/Kota

Konsep : Perhutanan Sosial
Definisi : Sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan menjaga fungsi ekologis hutan
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung luas perhutanan sosial berdasarkan skema, BPKH, dan Kabupaten/kota
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 416. Format Data Luas Perhutanan Sosial berdasarkan Skema (HKM, HTR, KK, HD), BKPH dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama BKPH	Nama BKPH Pelaksana di Provinsi NTB	1. BKPH Rinjani Barat 2. BKPH Pelangan Tastura 3. BKPH Rinjani Timur	-	-

		4. BKPH Sejorong Mataiyang 5. BKPH Brang Rea Pucak Ngengas 6. BKPH Batulanteh 7. BKPH Orong Telu 8. BKPH Brang Beh 9. BKPH Ropang 10. BKPH Ampang Plampang 11. BKPH Ampang Riwo 12. BKPH Toffo Pajo Soromandi 13. BKPH Tambora 14. BKPH Madapangga Rompu Waworada 15. BKPH Maria Donggomasa		
Skema Hutan	Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat lokal di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat	1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 3. Kemitraan Kehutanan 4. Hutan Desa	-	-
Luas Hutan	Luas hutan	-	Luas	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

14) Luas Lahan Kritis berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan dan Kabupaten/Kota

Konsep : 31010087 Luas Lahan Kritis
Definisi : Luas lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS).
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung Luas Lahan Kritis berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : KLHK

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 417. Format Data Luas Lahan Kritis berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Lokasi Lahan	Lokasi Lahan Kritis	1. Dalam Kawasan Hutan 2. Luar Kawasan Hutan	-	-
Tingkat Kekritisan Lahan	Tingkatan lahan kritis	1. Kritis 2. Sangat Kritis	-	-
Luas	Luas Lahan Kritis berdasarkan tingkat kekritisan dan lokasi lahan	-	Luas	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

15) Daftar Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Definisi : laporan dari masyarakat, lembaga, atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, atau pelanggaran izin lingkungan

Ukuran : Total

Satuan : Kasus

Metode Perhitungan : Menghitung jumlah Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 418. Format Data Jumlah Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Lokasi Pencemaran	Lokasi terjadinya pelanggaran kasus lingkungan	-	-	-
Kasus Lingkungan	Jenis kerusakan yang terjadi	-	-	-
Tindak Lanjut	Upaya penanganan/penyelesaian kasus	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

16) Jumlah Kasus Tindak Pidana Kehutanan

Konsep : Tindak pidana kehutanan
Definisi : Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada kehutanan.
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : Menghitung Jumlah Kasus Tindak Pidana Kehutanan
Sumber Data/Publikasi : DLHK

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 419. Format Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Kehutanan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kasus	Jenis kasus tindak pidana kehutanan	-	-	-
Lokasi	Tempat terjadinya kasus tindak pidana kehutanan	-	-	-
Tahapan	Tahapan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

17) Daftar Perusahaan yang mengikuti Program PROPER berdasarkan Peringkat dan Kabupaten/Kota

Konsep : Program PROPER
Definisi : Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
Ukuran : Total
Satuan : Perusahaan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 420. Format Data Jumlah Perusahaan yang mengikuti Program PROPER berdasarkan Peringkat dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Perusahaan	Nama perusahaan yang mengikuti program PROPER	-	-	-
Sektor	Bidang usaha	1. Air Minum Dalam Kemasan 2. Energi PLTD 3. Energi PLTG 4. Energi PLTGU 5. Energi PLTMGU 6. Energi PLTU 7. Migas Distribusi 8. Pertambangan Bijih Logam Mulia 9. Pelabuhan 10. Tambang Mineral	-	-
Peringkat	Hasil penilaian program PROPER	1. Hijau 2. Biru	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

18) Jumlah Produksi HHK berdasarkan Jenis Kayu

Konsep : [K00510] Hasil Hutan Kayu (HHK)
Definisi : Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
Ukuran : Total
Satuan : Meter kubik (m^3)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : https://phl.menlhk.go.id/

Tabel 421. Format Data Jumlah Produksi HHK berdasarkan Jenis Kayu

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kayu	Jenis Olahan Kayu	1. Kayu Bulat 2. Kayu Olahan	-	-
Sumber	Sumber pohon asal kayu	1. Rimba Campur 2. Mahoni 3. Meranti 4. Bungur 5. Kayu Indah 6. Lainnya	-	-
Jumlah	Total produksi kayu	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

19) Jumlah Produksi HHBK berdasarkan Jenis Hasil Hutan dan BKPH

Konsep : [K01780] Produksi Hasil Hutan Non/Bukan Kayu
Definisi : Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah sumber daya hutan selain kayu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri
Ukuran : Total
Satuan : Tergantung jenis HHBK
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : https://phl.menlhk.go.id/

Tabel 422. Format Data Jumlah Produksi HHBK berdasarkan Jenis Hasil Hutan dan BKPH

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama BKPH	Nama BKPH Pelaksana	1. BKPH Rinjani Barat 2. BKPH Pelangan Tastura 3. BKPH Rinjani Timur 4. BKPH Sejorong Mataiyang 5. BKPH Brang Rea Pucak Ngengas 6. BKPH Batulanteh 7. BKPH Orong Telu 8. BKPH Brang Beh 9. BKPH Ropang 10. BKPH Ampang Plampang 11. BKPH Ampang Riwo 12. BKPH Toffo Pajo Soromandi 13. BKPH Tambora	-	-

		14. BKPH Madapangga Rompu Waworada 15. BKPH Maria Donggomasa		
Jenis HHBK	Sesuai daftar jenis HHBK	-	-	-
Jumlah	Banyaknya HHBK yang dihasilkan	-	Total	Sesuai jenis HHBK
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

20) Daftar Perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Progres Perizinan

Konsep : [K00630] Izin Pemanfaatan Hutan
Definisi : Izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan
Ukuran : Total
Satuan : Perusahaan
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi jumlah Perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Progres Perizinan
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 423. Format Data Jumlah Perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Progres Perizinan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Perusahaan	Nama perusahaan yang izin pemanfaatan hutan	-	-	-
Luas	Luas lahan yang diizinkan	-	Luas	Hektar
Progres Perizinan	Hasil perizinan pada tahun terakhir	1. Definitif PBPH 2. Penentuan tarif iuran PBPH 3. Penyesuaian IUPJLWA menjadi PPBH 4. Permohonan Masuk 5. Survei *Feasibility Study* 6. Terbit Rekomendasi PBPH 7. Batal 8. Terbit verifikasi teknis	-	-
Tahun	Tahun data *update*	-	-	-

21) Daftar Pemegang Izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
Definisi : Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan pemanfaatan hutan secara legal dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Ukuran : Total
Satuan : Perusahaan
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi jumlah Perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : DLHK

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 424. Format Data Jumlah Pemegang Izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Pemegang Izin	Badan Usaha pemegang izin berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH)	-	-	-
Nomor Izin	Nomor surat izin berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH)	-	-	-
Jenis Industri	Jenis usaha pengolahan hasil hutan	-	-	-
Kapasitas Terpasang	-	-	-	-

22) Luas Kebakaran Hutan berdasarkan BKPH/Tahura

Konsep : Kebakaran Hutan
Definisi : Total area hutan yang terbakar dalam suatu periode tertentu
Ukuran : Luas
Satuan : Ha

Metode Perhitungan : Menghitung Data Luas Kebakaran Hutan berdasarkan BKPH/Tahura
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 425. Format Data Luas Kebakaran Hutan berdasarkan BKPH/Tahura

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama BKPH	Nama BKPH pelaksana di Provinsi NTB	-	-	-
Wilayah Kerja BKPH	Kabupaten kota yang menjadi wilayah kerja BKPH	-	-	-
Lokasi Kebakaran	Lokasi terjadinya kebakaran	1. Hutan 2. Lahan	-	-
Luas	Luas area kebakaran	-	Luas	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

23) Luas Perambahan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura

Konsep : Perambahan Hutan
Definisi : aktivitas ilegal berupa pembukaan, penguasaan, atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yang sah, baik untuk keperluan pertanian, perkebunan, pemukiman, maupun eksploitasi sumber daya alam lainnya
Ukuran : Luas

Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Identifikasi Luas Perambahan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 426. Format Data Luas Perambahan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama BKPH	Nama BKPH pelaksana di Provinsi NTB	-	-	-
Luas	Luas area perambahan	-	Luas	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

24) Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dikaji dan dinilai berdasarkan Jenis Dokumen, Sektor dan Kabupaten/Kota

Konsep : Dokumen Lingkungan Hidup
Definisi : Dokumen yang berisi kajian, rencana, dan evaluasi mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : Menghitung Dokumen Lingkungan Hidup dikaji dan dinilai berdasarkan Jenis Dokumen, Sektor dan Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : DLHK

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 427. Format Data Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dikaji dan dinilai berdasarkan Jenis Dokumen, Sektor dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kegiatan	Nama kegiatan dari dokumen yang dikaji	-	-	-
Pemrakarsa	Badan usaha yang memiliki kegiatan	-	-	-
Jenis Dokumen	Macam-macam dokumen yang dikaji	1. Adendum Amdal 2. Amdal 3. Andal 4. DELH 5. DPLH 6. Ka Andal 7. SIPB 8. SPPL 9. UKL-UPL	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

25) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berdasarkan Fungsi Hutan dan Kabupaten/Kota

Konsep : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Definisi : Luas kawasan hutan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk penggunaan kawasan hutan secara legal bagi kegiatan non-kehutanan, seperti pertambangan, infrastruktur, perkebunan, dan proyek strategis lainnya
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung luas penggunaan kawasan hutan yang disetujui
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 428. Format Data Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berdasarkan Fungsi Hutan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kelompok Hutan	Nama kelompok hutan	-	-	-
Pemegang IPPKH	Badan Usaha pemegang izin persetujuan penggunaan kawasan hutan (IPPKH)	-	-	-
Kegunaan	Pemanfaatan kawasan hutan oleh badan usaha pemegang IPPKH	-	-	-

Luas	Luas lahan kawasan hutan yang dimanfaatkan	-	Luas	Hektar

26) Intensitas Patroli dan Luas Pengamanan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura

Konsep : Intensitas Patroli, Luas Pengamanan Hutan
Definisi : kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh petugas kehutanan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan hutan seperti perambahan, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan konflik satwa liar, dengan luas area yang secara aktif dijaga dan dipantau melalui patroli
Ukuran : Intensitas, Luas
Satuan : Kali, Ha
Metode Perhitungan : Menghitung intensitas patroli, dan luas area pengamanan hutan
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 429. Format Data Intensitas Patroli dan Luas Pengamanan Hutan berdasarkan BKPH/Tahura

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama BKPH	Nama BKPH pelaksana di Provinsi NTB	-	-	-

Intensitas Patroli	Total pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh petugas kehutanan	-	Total	Kali
Luas Pengamanan	Luas kawasan yang menjadi lokasi pengawasan dan pemantauan	-	Luas	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

27) Daftar Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

Konsep : [K00322] Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)
Definisi : Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 430. Format Data Daftar Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Kode DAS	Sesuai dengan format data	-	-	-
Nama DAS	Nama DAS	-	-	-
Luas DAS	Luas DAS	-	Luas	Hektar
Klasifikasi	Kondisi DAS pada tahun terakhir	1. DAS dipulihkan 2. DAS dipertahankan	Luas	Hektar
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

28) Daftar Sebaran Mata Air

Konsep : Sebaran Mata Air
Definisi : Sebaran Mata Air mengacu pada distribusi geografis mata air dalam suatu wilayah, biasanya ditentukan berdasarkan topografi, geologi, dan kondisi hidrologi setempat
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi sebaran Mata Air dalam Suatu Wilayah
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 431. Format Data Daftar Sebaran Mata Air

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Mata Air	Nama mata air	-	-	-

29) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indikator Penyusunnya

Konsep : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Definisi : Ukuran yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan parameter lingkungan utama seperti kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 432. Format Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indikator Penyusunnya

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Indikator	Indikator penyusun indeks kualitas lingkungan hidup	1. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indikator Kualitas Air 3. Indikator Kualitas Udara 4. Indikator Kualitas Tutupan Lahan 5. Indikator Kualitas Air Laut	-	-

Nilai	Nilai indeks masing-masing indikator	-	Indeks	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

30) Proyeksi/Potensi Jumlah Timbulan Sampah berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Timbulan Sampah
Definisi : Perkiraan jumlah sampah yang akan dihasilkan di masa mendatang berdasarkan tren pertumbuhan penduduk, konsumsi, dan pola aktivitas ekonomi
Ukuran : Total
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 433. Format Data Proyeksi/Potensi Jumlah Timbulan Sampah berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Proyeksi Tahunan Sampah	Perkiraan jumlah sampah dalam satu tahun tertentu	-	Total	Ton
Proyeksi Harian Sampah	Perkiraan jumlah sampah dalam satu hari tertentu	-	Total	Ton/hari

Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

31) Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Komponennya

Konsep : [K01524] Pengelolaan Sampah
Definisi : Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Ukuran : Persen
Satuan : Persentase
Metode Perhitungan : Persentase Pengurangan + Persentase Penanganan Sampah/2
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 434. Format Data Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Komponennya

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Pengurangan Sampah	Capaian persentase sampah yang dikurangi pada tahun tertentu	-	Persentase	Persen
Penanganan Sampah	Capaian persentase sampah yang ditangani pada tahun tertentu	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

32) Daftar Lokasi Bank Sampah berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : [K00217] Bank Sampah
Definisi : Tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Persyaratan bank sampah: 1. Konstruksi bangunan 2. Sistem manajemen bank sampah Mekanisme bank sampah secara umum: 1. Pemilahan sampah 2. Penyerahan sampah ke bank sampah 3. Penimbangan sampah 4. Pencatatan 5. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke buku tabungan 6. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Menghitung lokasi Bank Sampah berdasarkan Desa/Kelurahan
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : lestari.ntbprov.go.id

Tabel 435. Format Data Daftar Lokasi Bank Sampah berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-

Nama Bank Sampah	Nama bank sampah	-	-	-

33) Daftar Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim berdasarkan Kategori

Konsep : [K01806] Program Kampung Iklim (Proklim)
Definisi : Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Menghitung Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim berdasarkan Kategori
Sumber Data/Publikasi : KLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : https://proklim.ppi.menlhk.go.id/

Tabel 436. Format Data Daftar Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim berdasarkan Kategori

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-

Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Kategori Kampung Iklim	Kategori kampung iklim	1. Lestari 2. Penerima thropy Proklim Utama 3. Proklim Utama penerima sertifikat 4. Proklim Pratama 5. Proklim Madya	-	-
Nama Kelompok Kampung Iklim	Nama kelompok kampung iklim	-	-	-
Tahun	Tahun penghargaan			

34) Daftar Sekolah Adiwiyata berdasarkan Status dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00006] Adiwiyata
Definisi : Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Menghitung Sekolah Adiwiyata berdasarkan Status dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : DLHK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 437. Format Data Daftar Sekolah Adiwiyata berdasarkan Status dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Sekolah	Nama sekolah yang memperoleh gelar adiwiyata	-	-	-
Status	Predikat adiwiyata sekolah	-	-	-
Tahun	Tahun berlakunya penghargaan	-	-	-

2.26. Metadata Dinas Pariwisata

1) Daftar Destinasi Pariwisata

Konsep : Destinasi Pariwisata Daerah
Definisi : Destinasi pariwisata yang berskala daerah
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Total Destinasi Pariwisata
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pariwisata
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 438. Format Data Daftar Destinasi Pariwisata

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kawasan	Daftar kawasan strategis pariwisata yang ada di NTB	-	-	-
Destinasi	Daftar destinasi wisata di daerah	-	-	-

2) Daftar Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terdaftar dan Telah memiliki Sertifikasi HaKI berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota

Konsep : [K01337] Pelaku Usaha
Definisi : Banyaknya individu atau entitas dalam sektor ekonomi kreatif yang telah terdaftar dan mendapatkan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan lokasi geografis di masing-masing kabupaten atau kota.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Daftar Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terdaftar dan Telah memiliki Sertifikasi HaKI berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pariwisata
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 439. Format Data Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terdaftar dan Telah memiliki Sertifikasi HaKI berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pemilik	Nama pemilik usaha	-	-	-
Merek	Merek dagang produk	-	-	-

Kategori Usaha	Pengelompokan usaha berdasarkan jenis produk yang dihasilkan	1. Kuliner 2. Kriya 3. Seni Rupa 4. Seni Pertunjukan 5. Travel	-	-
Jenis Produk	Macam-macam barang/jasa yang ditawarkan	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan

Konsep : [K01008] Wisata, [K02334] Wisatawan Nusantara, [K02332] Wisatawan Mancanegara
Definisi : Banyaknya frekuensi kunjungan yang dilakukan oleh berbagai kategori wisatawan, seperti wisatawan nusantara dan mancanegara, yang mengunjungi suatu destinasi atau lokasi wisata tertentu
Ukuran : Total
Satuan : kunjungan
Metode Perhitungan : Total Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pariwisata
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 440. Format Data Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Wisatawan	Jenis wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTB	1. Wisatawan Mancanegara 2. Wisatawan Nusantara	-	-
Jumlah Wisatawan	Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTB berdasarkan kategori	-	Total	.....
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

4) Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Unggulan (Islamic Center) berdasarkan Jenis Wisatawan

Konsep : [K01008] Wisata, [K02334] Wisatawan Nusantara, [K02332] Wisatawan Mancanegara
Definisi : Banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh berbagai kategori wisatawan, seperti wisatawan nusantara dan mancanegara untuk menjadikan dan mengunjungi Islamic Center sebagai destinasi wisata.
Ukuran : Total
Satuan : Kunjungan
Metode Perhitungan : Total Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Unggulan (Islamic Center) berdasarkan Jenis Wisatawan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pariwisata
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 441. Format Data Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata Unggulan (Islamic Center) berdasarkan Jenis Wisatawan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Wisatawan	Jenis wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTB	1. Wisatawan Mancanegara 2. Wisatawan Nusantara	-	-
Jumlah Wisatawan	Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Islamic Center berdasarkan kategori	-	Total	.....
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

5) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Bagian dari seluruh malam kamar yang tersedia yang dihuni atau terisi tamu; atau perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : TPK = Jumlah Kamar Terisi/Jumlah Kamar Tersedia x 100%
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 442. Format Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelas Hotel	-	1. Bintang 5	-	-

		2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 2 5. Bintang 1		
Tingkat Penghunian Kamar	Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

6) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Bagian dari seluruh malam kamar yang tersedia yang dihuni atau terisi tamu; atau perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : TPK = Jumlah Kamar Terisi/Jumlah Kamar Tersedia x 100%

Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 443. Format Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Kamar Hotel	-	1. <10 2. 10-24 3. 25-40 4. >40	-	-
Tingkat Penghunian Kamar	Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

7) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) berdasarkan Kabupaten Kota

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Bagian dari seluruh malam kamar yang tersedia yang dihuni atau terisi tamu; atau perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : TPK = Jumlah Kamar Terisi/Jumlah Kamar Tersedia x 100%
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 444. Format Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) berdasarkan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Tingkat Penghunian Kamar	Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

8) Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh tamu di hotel bintang, yang dihitung berdasarkan jumlah malam yang diinap oleh tamu dikelompokkan berdasarkan kelas hotel
Ukuran : Rata-rata
Satuan : Hari
Metode Perhitungan : RLM = Jumlah Malam Dihuni/Jumlah Tamu Menginap
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 445. Format Data Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelas Hotel	-	1. Bintang 5 2. Bintang 4	-	-

		3. Bintang 3 4. Bintang 2 5. Bintang 1		
Rata-rata Lama Menginap	Banyaknya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh tamu di hotel bintang	-	Rata-rata	Hari
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

9) Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh tamu di hotel bintang, yang dihitung berdasarkan jumlah malam yang diinap oleh tamu dikelompokkan berdasarkan kelompok kamar hotel
Ukuran : Rata-rata
Satuan : Hari
Metode Perhitungan : RLM = Jumlah Malam Dihuni/Jumlah Tamu Menginap
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 446. Format Data Rata-rata Lama Menginap (RLM) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Kamar Hotel	-	1. <10 2. 10-24 3. 25-40 4. >40	-	-
Rata-rata Lama Menginap	Banyaknya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh tamu di hotel bintang	-	Rata-rata	Hari
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

10) Rata-rata Lama Menginap (RLM) berdasarkan Kabupaten Kota

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh tamu di hotel bintang, yang dihitung berdasarkan jumlah malam yang diinap oleh tamu dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota
Ukuran : Rata-rata
Satuan : Hari
Metode Perhitungan : RLM = Jumlah Malam Dihuni/Jumlah Tamu Menginap
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 447. Format Data Rata-rata Lama Menginap (RLM) berdasarkan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Rata-rata Lama Menginap	Banyaknya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh tamu di hotel bintang	-	Rata-rata	Hari
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

11) Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di hotel bintang berdasarkan jenis wisatawan dan kelas hotel
Ukuran : Total
Satuan : Malam
Metode Perhitungan : Total Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 448. Format Data Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelas Hotel	-	1. Bintang 5 2. Bintang 4	-	-

		3. Bintang 3 4. Bintang 2 5. Bintang 1		
Jumlah Tamu Menginap	Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di hotel	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

12) Jumlah Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di hotel bintang berdasarkan jenis wisatawan dan kelompok hotel
Ukuran : Total
Satuan : Malam
Metode Perhitungan : Total Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 449. Format Data Jumlah Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Kamar Hotel	-	1. <10 2. 10-24 3. 25-40 4. >40	-	-
Jumlah Tamu Menginap	Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di hotel	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

13) Jumlah Tamu Menginap berdasarkan Kabupaten Kota

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di hotel berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Malam
Metode Perhitungan : Total Tamu Menginap berdasarkan Kabupaten Kota
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 450. Format Data Jumlah Tamu Menginap berdasarkan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Tamu Menginap	Banyaknya malam yang dihabiskan tamu selama menginap di hotel	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli;	-	-

		8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

14) Jumlah Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota
Ukuran : Total
Satuan : Usaha
Metode Perhitungan : Total Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pariwisata
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 451. Format Data Jumlah Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha dan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Industri Pariwisata	Macam-macam industri pariwisata	-	-	-
Jumlah	Banyak industri pariwisata di Provinsi NTB berdasarkan jenisnya	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

15) Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Kamar, dan Tenaga Kerja Hotel berdasarkan Kabupaten Kota

Konsep : [K00524] Hotel
Definisi : Banyaknya Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Kamar, dan Tenaga Kerja Hotel berdasarkan Kabupaten Kota
Ukuran : Total
Satuan : Unit dan Orang
Metode Perhitungan : Total Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Kamar, dan Tenaga Kerja Hotel berdasarkan Kabupaten Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pariwisata
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 452. Format Data Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Kamar, dan Tenaga Kerja Hotel berdasarkan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kategori Hotel	-	1. Hotel Bintang 2. Hotel Non Bintang	-	-
Jumlah Hotel	Banyaknya hotel yang terdapat di masing-masing kabupaten kota berdasarkan kategori hotel	-	Total	Unit
Jumlah Kamar	Banyaknya kamar yang tersedia pada hotel di masing-masing kabupaten kota berdasarkan kategori hotel	-	Total	Unit
Jumlah Tenaga Kerja	Banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada hotel di masing-masing kabupaten kota berdasarkan kategori hotel	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

16) Daftar Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Konsep : Desa Wisata
Definisi : Banyaknya Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pariwisata
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 453. Format Data Daftar Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Desa Wisata	Nama desa wisata	-	-	-
Kategori Desa Wisata	-	1. Berkembang 2. Rintisan 3. Mandiri 4. Maju	-	-

Nama POKDARWIS	Nama kelompok sadar wisata	-	-	-
Potensi Desa Wisata	Potensi wisata yang tersedia di desa wisata	-	-	-

2.27. Metadata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Panjang Ruas Jalan Provinsi yang Sudah Memiliki Trotoar/Pedestrian yang Aman

Konsep : [K02381] Ruas Jalan
Definisi : Panjang Bagian jalan yang terletak di antara dua simpang, baik yang sebidang maupun yang tidak sebidang, baik yang diberi isyarat lalu lintas maupun tidak yang merupakan kewenangan Provinsi dan sudah memiliki trotoar/pedestrian yang aman.
Ukuran : Panjang
Satuan : Kilometer
Metode Perhitungan : Total ruas jalan Provinsi yang sudah memiliki trotoar/pedestrian yang aman
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 454. Format Data Panjang Ruas Jalan Provinsi yang Sudah Memiliki Trotoar/Pedestrian yang Aman

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Panjang Jalan	Panjang jalan secara keseluruhan berdasarkan kategori jalan	-	Total	Km
Panjang Jalan yang Sudah Memiliki Trotoar	Panjang jalan yang sudah memiliki trotoar berdasarkan kategori jalan	-	Total	Km
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2) Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT)

Konsep : [K01925] Rumah Tangga; [K00612] Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Definisi : Banyaknya rumah tangga yang bisa mendapatkan layanan pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
Ukuran : Total
Satuan : Rumah Tangga
Metode Perhitungan : Total rumah tangga yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 455. Format Data Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Rumah Tangga	Banyaknya rumah tangga pada satu tahun tertentu	-	Total	RT
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki IPLT	Banyaknya rumah tangga yang memiliki IPLT pada satu tahun tertentu	-	Total	RT
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar

Konsep : 10710032; Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak [K01925] Rumah Tangga; [K01953] Sanitasi
Definisi : Bagian dari populasi rumah tangga yang bisa mendapatkan fasilitas sanitasi dasar yang layak (yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain).
Ukuran : Proporsi
Satuan : poin
Metode Perhitungan : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman pada periode tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 456. Format Data Proporsi Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Rumah Tangga	Banyaknya rumah tangga pada satu tahun tertentu	-	Total	RT
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki akses pada Layanan Sanitasi Dasar	Banyaknya rumah tangga yang memiliki akses layanan pada sanitasi dasar pada satu tahun tertentu	-	Total	RT

Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses pada Layanan Sanitasi Dasar	Sesuai metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

4) Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)

Konsep : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
Definisi : Jumlah unit rumah tangga yang memiliki akses dan terhubung secara langsung ke Sistem Sanitasi Perpipaan dan Drainase Terpadu (SPALD-T) dalam suatu kawasan permukiman tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Rumah Tangga
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh Sambungan Rumah (SR) Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 457. Format Data Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALDT	Banyaknya sambungan rumah yang terlayani SPALDT pada satu tahun tertentu	-	Total	RT
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

5) Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

Konsep : [K01925] Rumah Tangga; [K00025] Air Minum; [1606] Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Definisi : Banyaknya rumah tangga yang bisa mendapatkan air minum yang bersumber dari perusahaan air minum (PAM); mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung yang berjarak lebih dari sepuluh meter dari tempat pembuangan limbah dan tangki septik; penampungan air hujan; dan air kemasan yang dialirkan dengan pipa.
Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Ukuran : Total

Satuan : Rumah Tangga

Metode Perhitungan : Total rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 458. Format Data Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk	Banyaknya penduduk pada satu tahun tertentu	-	Total	Orang
Jumlah Penduduk yang terlayani Jaringan Perpipaan	Banyaknya penduduk yang terlayani jaringan perpipaan pada satu tahun tertentu	-	Total	Orang
Jumlah Penduduk yang terlayani Bukan Jaringan Perpipaan	Banyaknya penduduk yang terlayani bukan jaringan perpipaan pada satu tahun tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

6) Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah

Konsep : [K00656] Jalan
Definisi : Rasio Panjang prasarana transportasi yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya) terhadap Luas suatu Wilayah
Ukuran : Rasio
Satuan : -
Metode Perhitungan : Panjang Jalan pada tempat dan periode waktu tertentu dibagi Luas Wilayah pada tempat dan periode waktu yang sama
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 459. Format Data Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Luas Daerah	Luas daerah kabupaten kota pada satu tahun tertentu	-	Luas	Km2
Panjang Jalan	Jumlah panjang jalan pada satu tahun tertentu	-	Total	Km
Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah	Sesuai metode perhitungan	-	Rasio	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

7) Panjang Jalan Nasional dan Provinsi berdasarkan Kondisi

Konsep : [K00656] Jalan

Definisi : Panjang prasarana transportasi yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya) baik kewenangan Nasional maupun Provinsi yang diklasifikasi berdasarkan kondisi meliputi: 1. Baik; 2. Sedang; 3. Rusak Ringan; 4. Rusak Berat

Ukuran : Panjang
Satuan : Kilometer
Metode Perhitungan : Panjang Jalan Nasional = Total panjang jalan Nasional masing-masing pulau di NTB (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) pada setiap kondisi jalan. Panjang Jalan Provinsi = Total panjang jalan Provinsi masing-masing pulau di NTB (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) pada setiap kondisi jalan.
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 460. Format Data Panjang Jalan Nasional dan Provinsi berdasarkan Kondisi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Jalan	Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.	1. Jalan Nasional 2. Jalan Provinsi	-	-
Lokasi Jalan	Lokasi jalan	1. Pulau Lombok 2. Pulau Sumbawa	-	-
Kondisi Jalan	Keadaan fisik jalan pada satu tahun terakhir	1. Baik 2. Sedang 3. Rusak Ringan 4. Rusak Berat	-	-
Panjang Jalan	Jumlah panjang jalan pada satu tahun tertentu	-	Total	Km
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

8) Panjang Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00656] Jalan
Definisi : Panjang prasarana transportasi yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya) pada Kabupaten/Kota
Ukuran : Panjang
Satuan : Kilometer
Metode Perhitungan : Total panjang jalan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 461. Format Data Panjang Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Panjang Jalan	Jumlah panjang jalan pada satu tahun tertentu berdasarkan kabupaten/kota	-	Total	Km
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

9) Luas Areal Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi berdasarkan Kondisi (Rusak/Baik)

Konsep : [K02359] Irigasi; [K00324] Daerah Irigasi
Definisi : Luas areal layanan daerah irigasi yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (primer dan sekunder) pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.
Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Ukuran : Luas
Satuan : Hektar
Metode Perhitungan : Total Luas Areal Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 462. Format Data Luas Areal Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Daerah Irigasi	Daftar nama daerah irigasi	-	-	-
Luas Areal Irigasi	Luas areal lahan yang mendapatkan suplai air irigasi dari satu jaringan irigasi	-	Luas	Km2
Luas Area Irigasi dalam kondisi baik	Luas areal lahan yang mendapatkan suplai air irigasi dari satu jaringan irigasi dalam kondisi baik	-	Total	Km
Luas Area Irigasi dalam Kondisi Buruk	Luas areal lahan yang mendapatkan suplai air irigasi dari satu jaringan irigasi dalam kondisi buruk	-	Total	Km
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

10) Panjang Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi berdasarkan Kondisi (Rusak/Baik)

Konsep : [K01941] Saluran; [K02359] Irigasi
Definisi : Panjang saluran irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota pada masing-masing kondisi meliputi:
1. Rusak
2. Baik
Ukuran : Panjang
Satuan : Meter
Metode Perhitungan : Luas Saluran Irigasi = Total saluran irigasi di setiap kewenangan pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Panjang Saluran Irigasi = Panjang saluran irigasi di setiap kewenangan pada masing-masing Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 463. Format Data Luas dan Panjang Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan dan Kondisi (Rusak/Baik)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Daerah Irigasi	Daftar nama daerah irigasi	-	-	-
Panjang Saluran Primer	Total keseluruhan panjang saluran utama yang mendistribusikan air irigasi dari sumber air	-	Total	Km

Panjang Saluran Sekunder	Total keseluruhan panjang saluran yang membawa air dari saluran primer menuju saluran tersier	-	Total	Km
Panjang Saluran Tersier	Total keseluruhan panjang saluran yang menyalurkan air dari saluran sekunder	-	Total	Km
Panjang Saluran Primer dalam Kondisi Baik	Total keseluruhan panjang saluran utama yang mendistribusikan air irigasi dari sumber air dalam kondisi baik	-	Total	Km
Panjang Saluran Sekunder dalam Kondisi Baik	Total keseluruhan panjang saluran yang membawa air dari saluran primer menuju saluran tersier dalam kondisi baik	-	Total	Km
Panjang Saluran Tersier dalam Kondisi Baik	Total keseluruhan panjang saluran yang menyalurkan air dari saluran sekunder dalam kondisi baik	-	Total	Km
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

11) Daerah Tangkapan, Volume dan Luas Embung Kewenangan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00433] Embung
Definisi : Luas Daerah Tangkapan, Volume, dan Luas Waduk berukuran mikro di lahan pertanian sebagai tempat penampungan air hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau di suatu wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Luas Volume
Satuan : Satuan Daerah Tangkapan: Kilometer persegi. Satuan Volume: Meter Kubik. Satuan Luas: Hektar

Metode Perhitungan : Daerah tangkapan = Luas Daerah tangkapan setiap embung pada masing-masing Kabupaten/Kota. Volume = Volume setiap embung pada masing-masing Kabupaten/Kota. Luas Embung = Luas setiap embung pada masing-masing Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 464. Format Data Daerah Tangkapan, Volume dan Luas Embung Kewenangan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Embung	Nama embung	-	-	-
Daerah tangkapan	Sesuai metode perhitungan	-	Luas	Km2
Luas Embung	Sesuai metode perhitungan	-	Luas	Km2
Volume Embung	Sesuai metode perhitungan	-	Volume	M3

12) Luas dan Panjang Saluran Drainase berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01941] Saluran

Definisi : Luas dan Panjang struktur kanal atau pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air atau barang cair yang diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota

Ukuran : Luas, Panjang

Satuan : Luas (Meter Persegi), Panjang (Meter)

Metode Perhitungan : Luas dan Panjang saluran drainase masing-masing kabupaten/kota

Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 465. Format Data Luas dan Panjang Saluran Drainase berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Lokasi	Banyaknya lokasi pembangunan saluran drainase pada masing-masing kabupaten kota pada satu tahun tertentu	-	Total	Lokasi
Panjang	Panjang saluran drainase yang terbangun pada satu tahun tertentu	-	Total	Km
Luas Layanan	Luas layanan saluran drainase yang terbangun pada satu tahun tertentu	-	Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

13) Rumah Terlayani SPAM Regional Provinsi

Konsep : [K01606] Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Definisi : Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. Rumah yang terlayani SPAM adalah rumah yang mendapatkan pasokan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Ukuran : Total
Satuan : Rumah tangga
Metode Perhitungan : Jumlah rumah yang terlayani SPAM Regional pada masing-masing kabupaten/kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 466. Jumlah Rumah Tangga terlayani SPAM Regional Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama SPAM	Daftar nama SPAM Regional	-	-	-
Wilayah Pelayanan-Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Wilayah Pelayanan-Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Wilayah Pelayanan-Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Wilayah Pelayanan-Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Wilayah Pelayanan-Kode Kelurahan/Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Wilayah Pelayanan-Nama Kelurahan/Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-

Wilayah Pelayanan-RW	Nomor rukun warga	-	-	-
Wilayah Pelayanan-RT	Nomor rukun tetangga	-	-	-
Nama Kepala Keluarga	Nama kepala keluarga	-	-	-
NIK	Nomor NIK	-	-	-
Jumlah Anggota Rumah	Banyaknya anggota rumah tangga dalam satu rumah tangga	-	Jumlah	Orang
Kondisi Ekonomi Keluarga-MBR	Kondisi ekonomi keluarga tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	-	-	-
Kondisi Ekonomi Keluarga-non MBR	Kondisi ekonomi keluarga tergolong non masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			
Sudah Terlayani	Rumah tangga telah terlayani SPAM Regional	-	-	-
Belum Terlayani	Rumah tangga belum terlayani SPAM Regional	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

14) Rumah Tangga terlayani SPALD Regional Provinsi

Konsep : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Definisi : Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Rumah tangga yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional adalah rumah tangga yang limbah airnya diolah dan dikelola secara terpusat oleh suatu sistem, bukan melalui pengelolaan individu di setiap rumah tangga.

Ukuran : Total

Satuan : Rumah tangga
Metode Perhitungan : Jumlah rumah tangga terlayani SPALD menurut kabupaten/kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 467. Jumlah Rumah Tangga terlayani SPALD Regional Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama SPAM	Daftar nama SPAM Regional	-	-	-
Wilayah Pelayanan-Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Wilayah Pelayanan-Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Wilayah Pelayanan-Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Wilayah Pelayanan-Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Wilayah Pelayanan-Kode Kelurahan/Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Wilayah Pelayanan-Nama Kelurahan/Desa	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Wilayah Pelayanan-RW	Nomor rukun warga	-	-	-

Wilayah Pelayanan-RT	Nomor rukun tetangga	-	-	-
Nama Kepala Keluarga	Nama kepala keluarga	-	-	-
NIK	Nomor NIK	-	-	-
Jumlah Anggota Rumah	Banyaknya anggota rumah tangga dalam satu rumah tangga	-	Jumlah	Orang
Kepadatan Penduduk	Perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah	-	Kepadatan	Jiwa/hektar
Klasifikasi Perkotaan/pedesaan	-	-	-	-
Kondisi risiko sanitasi	Berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan akibat sanitasi yang buruk	-	-	-
Kondisi Ekonomi Keluarga-MBR	Kondisi ekonomi keluarga tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	-	-	-
Kondisi Ekonomi Keluarga-non MBR	Kondisi ekonomi keluarga tergolong non masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	-	-	-
Sudah Terlayani	Rumah tangga telah terlayani SPAM Regional	-	-	-
Belum Terlayani	Rumah tangga belum terlayani SPAM Regional	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2.28. Metadata Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Daftar Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM)

Konsep	:	Indeks Desa Membangun (IDM)
Definisi	:	Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. (PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG INDEKS DESA)
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-
Metode Perhitungan	:	Formulasi Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD Keterangan: ID = Indeks Desa DLD = Dimensi Layanan Dasar DS = Dimensi Sosial DE = Dimensi Ekonomi DL = Dimensi Lingkungan DA = Dimensi Aksebilitas DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 1 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 1.
Sumber Data/Publikasi	:	Kementerian PDTT

Tautan Publikasi Sumber Data : https://idm.kemendesa.go.id/

Tabel 468. Format Data Daftar Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nilai IDM	Nilai IDM pada setiap desa/kelurahan	-	Nilai	Poin
Status IDM	Status berdasarkan nilai IDM	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Daftar Nama Desa dan Kelurahan

Konsep : [K00371] Desa, [K00836] Kelurahan
Definisi : Daftar lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik.
Ukuran : -
Satuan : -

Metode Perhitungan : Total Desa dan Kelurahan di NTB
Sumber Data/Publikasi : BPS
Tautan Publikasi Sumber Data : ntb.bps.go.id

Tabel 469. Format Data Daftar Nama Desa dan Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status	Status wilayah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00060] Akta Kelahiran
Definisi : Banyaknya Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : Total Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 470. Format Data Jumlah Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Pemilikan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	-	Total	Orang
Belum Pemilikan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

4) Jumlah Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Akta Kematian
Definisi : Banyaknya Akta autentik yang meliputi informasi nama, lokasi, dan waktu kematian. (KBBI)
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : Total Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 471. Format Data Jumlah Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Penerbitan Akte Kematian	Jumlah akte kematian yang diterbitkan	-	Total	Dokumen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

5) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju dll) dan Kabupaten

Konsep : BUMDes
Definisi : Banyaknya badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021)
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total Badan Usaha Milik Desa (BumDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju dll) dan Kabupaten
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 472. Format Data Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju dll) dan Kabupaten

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Jumlah BumDes	Jumlah badan usaha miliki desa	-	Total	Unit
Status BumDes	Status badan usaha miliki desa	-	-	-

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum

Konsep : BUMDes
Definisi : Banyaknya badan usaha dan badan usaha bersama yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang Berbadan Hukum
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 473. Format Data Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-

Jumlah BumDes yang berbadan Hukum	Jumlah badan usaha miliki desa yang berbadan hukum	-	Total	Unit
Jumlah BumDes Bersama yang berbadan Hukum	Jumlah badan usaha miliki desa bersama yang berbadan hukum	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah Dana Desa (DD) berdasarkan Kabupaten

Konsep : Dana Desa
Definisi : Banyaknya dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Kabupaten
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Dana Desa (DD) berdasarkan Kabupaten
Sumber Data/Publikasi : DJPB - KEMENKEU
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 474. Format Data Jumlah Dana Desa (DD) berdasarkan Kabupaten

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kecamatan	Jumlah kecamatan di Kabupaten tersebut	-	Total	Kecamatan
Jumlah Desa	Jumlah desa di Kabupaten tersebut	-	Total	Desa
Dana Desa	Jumlah dana desa	-	Total	Rp
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Jumlah Dusun, Jumlah Lingkungan berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : Dusun
Definisi : Banyaknya bagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah Desa atau Kelurahan berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total bagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah Desa atau Kelurahan berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 475. Format Data Jumlah Dusun, Jumlah Lingkungan berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Status Desa/Kelurahan	Status wilayah	1. Desa 2. Kelurahan	-	-
Jumlah Dusun/Lingkungan	Jumlah dusun/lingkungan di setiap desa/kelurahan	-	Total	Dusun/ lingkungan
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Konsep : [K00858] Kepala keluarga
Definisi : Banyaknya orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga dan tertera sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Jenis Kelamin
Ukuran : Total
Satuan : Kepala Keluarga
Metode Perhitungan : Total orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga dan tertera sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 476. Format Data Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

10) Jumlah Lembaga Adat Desa berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Lembaga Adat Desa (LAD)
Definisi : Banyaknya lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 477. Format Data Jumlah Lembaga Adat Desa berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk, [K00011] Agama, [K00704] Jenis Kelamin
Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan Pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan Pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi.

Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 478. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Agama	Agama penduduk	1. Budha 2. Hindu 3. Islam 4. Katholik 5. Kristen	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk berdasarkan agama dan jenis kelamin	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

12) Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk, [K00704] Jenis Kelamin
Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 479. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-

Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

13) Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk, [K02240] Umur/Usia, [K00704] Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : -

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 480. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kategori Umur	Kategori umur penduduk	1. Umur 00-04 2. Umur 05-09 3. Umur 10-14 4. Umur 15-19 5. Umur 20-24 6. Umur 25-29 7. Umur 30-34 8. Umur 35-39 9. Umur 40-44 10. Umur 45-49 11. Umur 50-54 12. Umur 55-59 13. Umur 60-64 14. Umur 65-69 15. Umur 70-74 16. Umur >75	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk berdasarkan kategori umur dan jenis kelamin	-	Total	Jiwa

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

14) Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk, [K01669] Perkawinan
Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 481. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Perkawinan	Status perkawinan penduduk	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk berdasarkan kategori umur dan jenis kelamin	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

15) Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk, [K00706] Jenjang Pendidikan, [K00704] Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah), pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap berdasarkan Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan

tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah), pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : -

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 482. Format Data Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan penduduk	1. Tidak/Belum Sekolah 2. Belum Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SD/Sederajat 4. Tamat SLTP/Sederajat 5. Tamat SLTA/Sederajat 6. Diploma I/II 7. Diploma III/S. Muda 8. Diploma IV/Strata I 9. Strata II 10. Strata III	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk berdasarkan kategori umur dan jenis kelamin	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

16) Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk, KTP, [K00704] Jenis Kelamin
Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 483. Format Data Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk berdasarkan kategori umur dan jenis kelamin	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

17) Jumlah Penduduk yang Memiliki KIA berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk, KIA, [K00704] Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dengan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berdasarkan pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap dengan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berdasarkan pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi dan Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 484. Format Data Jumlah Penduduk yang Memiliki KIA berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Penduduk memiliki KIA	Jumlah penduduk yang memiliki KIA	-	Total	Jiwa
Jumlah Penduduk belum memiliki KIA	Jumlah penduduk yang belum memiliki KIA	-	Total	Jiwa
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Semester	1. Semester 1: Periode Januari-Juni 2. Semester 2: Periode Juli-Desember	1. Semester 1 2. Semester 2	-	-

18) Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Definisi : Banyaknya lembaga kemasyarakatan di Kecamatan/Desa/Kelurahan yang memberikan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total

Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total lembaga kemasyarakatan di Kecamatan/Desa/Kelurahan yang memberikan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 485. Format Data Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Pos Pelayanan Teknologi	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

19) Jumlah Posyandu, Posyandu Keluarga, dan Kader Posyandu berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01766] Posyandu
Definisi : Banyaknya suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, program peningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan anggota masyarakat yang bersedia dan mampu membantu kegiatan posyandu secara sukarela berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total

Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, program peningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan anggota masyarakat yang bersedia dan mampu membantu kegiatan posyandu secara sukarela berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 486. Format Data Jumlah Posyandu, Posyandu Keluarga, dan Kader Posyandu berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu di setiap Kabupaten/Kota	-	Total	Unit
Posyandu Keluarga	Posyandu Keluarga di setiap Kabupaten/Kota	-	Total	Unit
Jumlah Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu di setiap Kabupaten/Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

20) Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun Se-Provinsi NTB

Konsep : Indeks Desa Membangun
Definisi : Komponen untuk mengukur Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. (PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG INDEKS DESA)
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : Total Komponen untuk mengukur Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. (PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG INDEKS DESA)
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 487. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun Se-Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-

Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Attribute	Komponen pembentuk Indeks Desa Membangun	Indeks Ketahanan Sosial Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks Ketahanan Lingkungan	-	-
Nilai	Nilai setiap komponen	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.29. Metadata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Jumlah Anggaran Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berdasarkan OPD

Konsep : Jumlah Anggaran Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Definisi : [K00103] Anggaran: Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan dibutuhkan atau dapat belanjakan.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG): Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. (Sumber: Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2013)
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Anggaran Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang disajikan berdasarkan nama OPD
Sumber Data/Publikasi : DP3AP2KB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 488. Format Data Jumlah Anggaran Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berdasarkan OPD

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-

Program	Nama program perangkat daerah berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	-	-
Kegiatan	Nama kegiatan perangkat daerah berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	-	-
Sub-Kegiatan	Nama sub-kegiatan perangkat daerah berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	-	-
Anggaran	Total nilai anggaran untuk setiap sub-kegiatan perangkat daerah berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	-	-

2) Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00809] Kekerasan
Definisi : [K00809] Kekerasan: Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : Total kasus kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 489. Format Data Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus Kekerasan	Jumlah kasus kekerasan berdasarkan kabupaten/kota	-	Total	Kasus
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

3) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [10620071] Status Disabilitas; [K00704] Jenis Kelamin

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).

[K00704] Jenis Kelamin: Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan jenis kelamin korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 490. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-

Jenis Kelamin Korban	Jenis kelamin korban kekerasan	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

4) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Bentuk Kekerasan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [10620071] Status Disabilitas; [K00811] Kekerasan Emosional; [K00813] Kekerasan Seksual; Eksploitasi; *Trafficking*; Penelantaran; Kekerasan Lainnya

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).

Bentuk Kekerasan: Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, meliputi: [K00812] Kekerasan Fisik, [K00811] Kekerasan Emosional, [K00813] Kekerasan Seksual, Eksploitasi, *Trafficking*, Penelantaran, dan Lainnya.

1. Kekerasan Fisik: Kekerasan fisik ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain.
2. Kekerasan Emosional: Kekerasan emosional ditunjukkan dengan perilaku menghina atau membuat merasa rendah diri, merendahkan atau mempermalukan istri/pasangannya di depan orang lain, dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi istri/pasangannya (misalnya dengan cara berteriak atau membanting sesuatu), mengancam akan menyakiti istri/pasangannya atau orang yang istri/pasangannya sayangi, serta tindakan psikis lainnya.
3. Kekerasan Seksual: Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Kekerasan seksual diukur dengan: 1. perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik , dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik , termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan; 2. eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya; 3. eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.
4. Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

5. *Trafficking*: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
6. Penelantaran: Penelantaran adalah tindakan lalai dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kepada orang lain. Penelantaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penelantaran anak dan penelantaran rumah tangga.

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan bentuk kekerasan yang dialami korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 491. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Bentuk Kekerasan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual,	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-

	mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.			
Bentuk kekerasan	Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban	1. Fisik 2. Psikis 3. Seksual 4. Eksploitasi 5. *Trafficking* 6. Penelantaran 7. Lainnya	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota dan bentuk kekerasan yang dialami oleh korban	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

5) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Kategori Usia (Anak-anak/Dewasa), Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [10620071] Status Disabilitas; [K02240] Umur/Usia; [K00704] Jenis Kelamin

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).

[K02240] Umur/Usia: Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Kelompok umur pada data ini meliputi: 1. <6 tahun; 2. 6-12 tahun; 3. 13-17 tahun; 4. 18-24 tahun; 5. 25-44 tahun; 6. 45-59 tahun; 7. 60+ tahun.

[K00704] Jenis Kelamin: Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan, kategori usia, dan jenis kelamin korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas

Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 492. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Kategori Usia (Anak-anak/Dewasa), Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-
Jenis Kelamin Korban	Jenis kelamin korban kekerasan	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Kategori Usia Korban	Usia korban saat terjadi kekerasan, meliputi anak-anak (≤ 17 tahun) dan dewasa (>17 tahun)	1. <6 tahun 2. 6-12 tahun 3. 13-17 tahun	-	-

		4. 18-24 tahun 5. 25-44 tahun 6. 45-59 tahun 7. 60+ tahun		
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota, jenis kelamin, dan kategori usia korban	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

6) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [10620071] Status Disabilitas; [K00706] Jenjang Pendidikan

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).

[K00706] Jenjang Pendidikan: Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda

tamat sekolah (ijazah). Klasifikasi Isian: 1. Tidak/Belum Pernah Sekolah; 2. PAUD/TK; 3. Sekolah Dasar; 4. SLTP; 5. SLTA; 6. Perguruan Tinggi.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan tingkat pendidikan korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas

Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 493. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-

Tingkat Pendidikan Korban	Tingkat pendidikan terakhir korban	1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2. PAUD/TK 3. Sekolah Dasar 4. SLTP 5. SLTA 6. Perguruan Tinggi	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota dan tingkat pendidikan korban	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

7) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [10620071] Status Disabilitas; Tempat Kejadian Kekerasan

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).

Tempat Kejadian Kekerasan: Tempat dimana suatu tindak kekerasan dilakukan/terjadi. Klasifikasi Isian: 1. Rumah Tangga; 2. Tempat Kerja; 3. Sekolah; 4. Fasilitas Umum; 5. Lembaga Pendidikan Kilat; 6. Lainnya.

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan tempat kejadian kekerasan pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 494. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-

Tempat Kejadian Kekerasan	Tempat dimana suatu tindak kekerasan dilakukan/terjadi	1. Rumah Tangga 2. Tempat Kerja 3. Sekolah 4. Fasilitas Umum 5. Lembaga Pendidikan Kilat 6. Lainnya	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota dan tempat kejadian kekerasan	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

8) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [10620071] Status Disabilitas; Status Pekerjaan

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).

Status Pekerjaan: Angkatan Kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan aktif secara ekonomi. Angkatan Kerja dapat terdiri dari penduduk yang bekerja, pengangguran, atau sedang mencari pekerjaan. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan Angkatan Kerja dapat terdiri dari penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Klasifikasi Isian: 1. Tidak Bekerja; 2. Bekerja; 3. Pelajar; 4. Mengurus Rumah Tangga.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan status pekerjaan korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas

Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 495. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-

	mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.			
Status Pekerjaan Korban	Status pekerjaan korban saat terjadi kekerasan	1. Tidak Bekerja 2. Bekerja 3. Pelajar 4. Mengurus Rumah Tangga	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota dan status pekerjaan korban	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

9) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [10620071] Status Disabilitas; [K01669] Perkawinan

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow*

learning), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).
[K01669] Perkawinan: Status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan. Klasifikasi Isian: 1. Belum Kawin; 2. Kawin; 3. Cerai.

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan status perkawinan korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 496. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-

	efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.			
Status Perkawinan Korban	Status perkawinan korban saat terjadi kekerasan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota dan status perkawinan korban	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

10) Jumlah Pelaku Kekerasan berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00809] Kekerasan

Definisi : [K00809] Kekerasan: Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Pelaku Kekerasan: Seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan. Konsep: Hubungan Pelaku Dengan Korban Kekerasan. Klasifikasi Isian: 1. Orang Tua; 2. Keluarga / Saudara; 3. Suami / Istri; 4. Tetangga; 5. Pacar / Teman; 6. Guru; 7. Majikan; 8. Rekan Kerja; 9. Lainnya.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total pelaku kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan hubungan pelaku dengan korban

Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 497. Format Data Jumlah Pelaku Kekerasan berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Hubungan Korban dengan Pelaku	Hubungan korban kekerasan dengan pelaku yang melakukan kekerasan terhadapnya	1. Orang Tua 2. Keluarga / Saudara 3. Suami / Istri 4. Tetangga 5. Pacar / Teman 6. Guru 7. Majikan 8. Rekan Kerja 9. Lainnya	-	-
Jumlah Pelaku Kekerasan	Jumlah pelaku kekerasan berdasarkan hubungan korban dengan pelaku yang melakukan kekerasan terhadapnya	-	Total	Orang
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

11) Jumlah Kasus KDRT berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00809] Kekerasan; KDRT

Definisi : [K00809] Kekerasan: Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ukuran : Total

Satuan : Kasus

Metode Perhitungan : Total kasus KDRT pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan

Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 498. Format Data Jumlah Kasus KDRT berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah Kasus KDRT	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan kabupaten/kota	-	Total	Kasus
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

12) Jumlah Korban KDRT berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; KDRT; [K00388] Disabilitas[K00704] Jenis Kelamin

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).

[K00704] Jenis Kelamin: Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. Klasifikasi Isian: 1. Laki-laki; 2. Perempuan.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total korban KDRT pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan jenis kelamin korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 499. Format Data Jumlah Korban KDRT berdasarkan Status Disabilitas, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-
Jenis Kelamin Korban	Jenis kelamin korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Korban KDRT	Jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan	-	Total	Orang

	kabupaten/kota dan jenis kelamin korban			
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

13) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Kekerasan yang dialami dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00979] Korban Kekerasan; [K00388] Disabilitas; Jumlah Kekerasan yang dialami

Definisi : [K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.
[10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*).
Jumlah Kekerasan yang dialami: Jumlah kekerasan yang dialami oleh korban selama periode waktu tertentu. Klasifikasi Isian: 1. 1 kekerasan; 2. 2 kekerasan; 3. 3 kekerasan; 4. >3 kekerasan.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan jumlah kekerasan yang dialami korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas

Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tautan Publikasi Sumber Data : kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 500. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Kekerasan yang dialami dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-
Jumlah Kekerasan yang Dialami	Jumlah kekerasan yang pernah dialami oleh korban sampai dengan saat melaporkan	1. 1 kekerasan 2. 2 kekerasan 3. 3 kekerasan 4. >3 kekerasan	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota dan jumlah kekerasan yang dialami oleh korban	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

14) Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Layanan yang diterima dan Kabupaten/Kota

Konsep	:	[K00979] Korban Kekerasan; [K00388] Disabilitas; Jumlah Layanan yang diterima
Definisi	:	[K00979] Korban Kekerasan: Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi. [10620071] Status Disabilitas: Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*). Jumlah Layanan yang diterima: Jumlah layanan yang diterima oleh korban selama periode waktu tertentu, baik layanan 1. Pengaduan; 2. Kesehatan; 3. Bantuan Hukum; 4. Penegakan Hukum; 5. Rehabilitasi Sosial; 6. Reintegrasi Sosial; 7. Pemulangan; dan 8. Pendampingan Tokoh Agama. Klasifikasi Isian: 1. 1 layanan; 2. 2 layanan; 3. 3 layanan; 4. 4 layanan; 5. >4 layanan
Ukuran	:	Total
Satuan	:	Orang
Metode Perhitungan	:	Total korban kekerasan pada periode tertentu berdasarkan wilayah kejadian kekerasan dan jumlah layanan yang diterima korban pada kelompok disabilitas dan kelompok non-disabilitas
Sumber Data/Publikasi	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data	:	kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 501. Format Data Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Disabilitas, Jumlah Layanan yang diterima dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Disabilitas Korban	Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	1. Disabilitas 2. Non-Disabilitas	-	-
Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah layanan yang diterima oleh korban	1. 1 layanan 2. 2 layanan 3. 3 layanan 4. 4 layanan 5. >4 layanan	-	-
Jumlah Korban Kekerasan	Jumlah korban kekerasan berdasarkan kabupaten/kota dan jumlah layanan yang diterima oleh korban	-	Total	Korban
Tahun	Tahun *input* data	-	-	-

15) Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Konsep : Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan
Definisi : [K02299] Usia Kawin Pertama: Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.
Ukuran : Usia
Satuan : Tahun
Metode Perhitungan : Bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama dihitung dari umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.
Sumber Data/Publikasi : Badan Pusat Statistik
Tautan Publikasi Sumber Data : ntb.bps.go.id

Tabel 502. Format Data Rata-rata usia kawin pertama perempuan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Usia Kawin Pertama	Usia perempuan sebelum hamil anak pertamanya	-	Usia	Tahun
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

16) Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Indeks Pembangunan Gender; Indeks Pemberdayaan Gender; Indeks Ketimpangan Gender

Definisi : [33210001] Indeks Pembangunan Gender (IPG): Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. ([K01386] Pembangunan Manusia; [K00472] Gender)
Indeks Pemberdayaan Gender: Ukuran yang digunakan untuk menilai kesetaraan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG): Ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IKG mengukur kesenjangan dalam pencapaian pembangunan dalam tiga aspek, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Ukuran : Indeks

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki. IDG = Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen + Indeks Pengambilan Keputusan. IKG disusun atas dimensi berikut ini: 1. Dimensi Kesehatan Reporduksi; 2. Dimensi Pemberdayaan; 3. Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Sumber Data/Publikasi : Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi Sumber Data : ntb.bps.go.id

Tabel 503. Format Data Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Indeks	Indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki: 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG): Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): Ukuran yang digunakan untuk menilai kesetaraan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. 3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG): Ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IKG mengukur kesenjangan dalam pencapaian pembangunan dalam tiga aspek, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	-
Nilai Indeks	Nilai indeks	-	Indeks	Poin

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

17) Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Definisi : [33210009] Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Kabupaten/Kota: Bagian dari seluruh pejabat di lembaga legislatif tingkat kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota), yang diwakili oleh perempuan. ([K00929] Keterwakilan; [K01647] Perempuan; [K01077] Lembaga Legislatif) [33210010] Nama Data: Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Provinsi: Bagian dari seluruh pejabat di lembaga legislatif tingkat provinsi (DPRD provinsi), yang diwakili oleh perempuan. ([K00929] Keterwakilan; [K01647] Perempuan; [K01077] Lembaga Legislatif)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen = Jumlah Anggota Perempuan di Parlemen / Jumlah Seluruh Anggota Parlemen x 100%

Sumber Data/Publikasi : Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi Sumber Data : ntb.bps.go.id

Tabel 504. Format Data Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	Perbandingan antara jumlah anggota perempuan di parlemen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota parlemen	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

18) Daftar Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat (Pratama, Madya, Nindya, Utama) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Konsep : Kabupaten/Kota Layak Anak
Definisi : Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA): kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Klasifikasi: 1. Pratama; 2. Madya; 3. Nindya; 4. Utama; dan 5. KLA. (Sumber: Permen PPA Nomor 12 Tahun 2022).
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : 1. Pratama (Skor 500-600); 2. Madya (Skor 601-700; 3. Nindya (Skor 701-800); 4. Utama (Skor 801-900; 5. KLA (Skor 901-1000)
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tautan Publikasi Sumber Data : kla.id

Tabel 505. Format Data Daftar Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat (Pratama, Madya, Nindya, Utama) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nilai KLA	Nilai yang menunjukkan kondisi sistem pembangunan pada kabupaten/kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana	-	Nilai	Poin
Predikat KLA	Predikat yang diberikan berdasarkan nilai KLA: 1. Pratama (Skor 500-600) 2. Madya (Skor 601-700) 3. Nindya (Skor 701-800) 4. Utama (Skor 801-900) 5. KLA (Skor 901-1000)	1. Pratama 2. Madya 3. Nindya 4. Utama 5. KLA	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.30. Metadata Dinas Pemuda dan Olahraga

1) Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional antar Atlet PPLP berdasarkan Cabang Olahraga

Konsep : Medali, PPLP
Definisi : Banyaknya medali yang diperoleh pada Kejuaraan Nasional antar Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), dimana PPLP merupakan Sekolah pembibitan olahraga nasional yang digunakan untuk mencari dan membina bakat olahraga pada jenjang pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah pertama atau setingkat. (Sumber: Permenpora Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Prasarana Olahraga Dan Sarana Olahraga Pada Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar
Ukuran : Total
Satuan : Buah
Metode Perhitungan : Total masing-masing medali (Emas, Perak, Perunggu) yang diperoleh pada Kejuaraan Nasional antar Atlet PPLP yang dikategorikan berdasarkan cabang olahraga.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 506. Format Data Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional antar Atlet PPLP berdasarkan Cabang Olahraga

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Cabang Olahraga	Cabang olahraga yang diikuti oleh atlet NTB		-	-
Perolehan Medali Emas	Jumlah medali emas yang diperoleh atlet NTB	-	Total	Buah

Perolehan Medali Perak	Jumlah medali perak yang diperoleh atlet NTB	-	Total	Buah
Perolehan Medali Perunggu	Jumlah medali perunggu yang diperoleh atlet NTB	-	Total	Buah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Wirausaha Dispora NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02166] Pekerja Mandiri/Wirausaha
Definisi : Banyaknya Peserta Pelatihan Wirausaha yang diadakan oleh Dispora NTB bagi penduduk berusia 16-30 tahun.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total Peserta Pelatihan Wirausaha Muda masing-masing Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 507. Format Data Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Wirausaha Dispora NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Pemuda Pelatihan Wirausaha	Jumlah pemuda pelatihan Wirausaha Dispora NTB pada masing-masing Kabupaten/Kota	-	Total	Orang

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara berdasarkan Negara Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota

Konsep : Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
Definisi : Kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui pengiriman dan penerimaan delegasi Pemuda berbasis kerja sama internasional. (Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Negara)
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 508. Format Data Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara berdasarkan Negara Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Peserta	Nama Peserta PPAN	-	-	-
Negara Tujuan	Negara Tujuan Pelaksanaan PPAN	-	-	-
Tahun	Tahun Pelaksanaan PPAN	-	-	-

4) Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi berdasarkan Provinsi Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota

Konsep : Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)
Definisi : Kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui pengiriman dan penerimaan delegasi Pemuda pada level nasional. Data ini dipublikasi dengan menampilkan asal kabupaten/kota peserta PPAP dan provinsi tujuan. (Sumber Data: Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi)
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 509. Format Data Daftar Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi berdasarkan Provinsi Tujuan dan Asal Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Peserta	Nama Peserta PPAP	-	-	-
Provinsi Tujuan	Provinsi Tujuan Pelaksanaan PPAP	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota

Konsep : Kepeloporan Pemuda
Definisi : Pemuda Indonesia yang memiliki semangat kepeloporan dan telah menunjukkan peran aktif serta kontribusi nyata dalam memajukan masyarakat di berbagai bidang. Mereka adalah agen perubahan (*agent of change*) yang melakukan inovasi, membangun solusi atas permasalahan sosial, dan menginspirasi lingkungan sekitarnya melalui aksi nyata yang memperoleh peringkat di tingkat provinsi.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 510. Format Data Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama	Nama Pemuda Pelopor	-	-	-
Bidang Kepeloporan	Bidang kepeloporan pemuda pada tingkat provinsi	1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Agama, Sosial dan Budaya 3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata 4. Pangan 5. Inovasi Teknologi	-	-

Peringkat	Peringkat Pemuda Pelopor sesuai bidang kepeloporan	1. Peringkat I 2. Peringkat II 3. Peringkat III	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Nasional berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota

Konsep : Kepeloporan Pemuda
Definisi : Pemuda Indonesia yang memiliki semangat kepeloporan dan telah menunjukkan peran aktif serta kontribusi nyata dalam memajukan masyarakat di berbagai bidang. Mereka adalah agen perubahan (*agent of change*) yang melakukan inovasi, membangun solusi atas permasalahan sosial, dan menginspirasi lingkungan sekitarnya melalui aksi nyata yang memperoleh peringkat di tingkat provinsi.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 511. Format Data Daftar Pemuda Pelopor Tingkat Nasional berdasarkan Bidang Kepeloporan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama	Nama Pemuda Pelopor	-	-	-

Bidang Kepeloporan	Bidang kepeloporan pemuda pada tingkat provinsi	1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Agama, Sosial dan Budaya 3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata 4. Pangan 5. Inovasi Teknologi	-	-
Peringkat	Peringkat Pemuda Pelopor sesuai bidang kepeloporan	1. Peringkat I 2. Peringkat II 3. Peringkat III	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah Atlet PPLP dan PPLPD NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : PPLP
Definisi : Banyaknya Atlet pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) yang merupakan Sekolah pembibitan olahraga nasional yang digunakan untuk mencari dan membina bakat olahraga pada jenjang pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah pertama atau setingkat. (Sumber: Permenpora Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Prasarana Olahraga Dan Sarana Olahraga Pada Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total seluruh Atlet (atlet PPLP dan PPLPD NTB) pada masing-masing Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 512. Format Data Jumlah Atlet PPLP dan PPLPD NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Asal Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah	Jumlah Atlet PPLP dan PPLPD NTB	-	Total	Orang
Tahun	Tahun Pelaksanaan kegiatan	-	-	-

8) Daftar Atlet Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga

Konsep : Medali
Definisi : Daftar Atlet Peroleh Medali baik Emas, Perak maupun Perunggu pada setiap cabang olahraga.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 513. Format Data Daftar Atlet Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Nama Peserta/Anggota Tim	Nama peserta/anggota tim peroleh medali	-	-	-
Kategori	-	1. Putra 2. Putri 3. Pasangan Putra 4. Pasangan Putri 5. Pasangan Campuran. 6. Tim	-	-
Cabang Olahraga	Cabang Olahraga yang diikuti oleh atlet peroleh medali	-	-	-
Kelas/Nomor Pertandingan	Kelas/Nomor Pertandingan yang diikuti oleh atlet peroleh medali	-	-	-
Medali	Jenis medali yang diperoleh oleh masing-masing atlet peroleh medali	1. Emas 2. Perak 3. Perunggu	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Daftar Atlet Disabilitas Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga

Konsep : [K01596] Penyandang Disabilitas
Definisi : Daftar Atlet yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dan memperoleh Medali baik Emas, Perak maupun Perunggu pada Tingkat Nasional dan internasional
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 514. Format Data Daftar Atlet Disabilitas Peroleh Medali pada Tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan Cabang Olahraga

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Peserta/Anggota Tim	Nama peserta/anggota tim peroleh medali	-	-	-
Kategori	-	1. Putra 2. Putri 3. Pasangan Putra 4. Pasangan Putri 5. Pasangan Campuran. 6. Tim	-	-
Cabang Olahraga	Cabang Olahraga yang diikuti oleh atlet peroleh medali	-	-	-
Kelas/Nomor Pertandingan	Kelas/Nomor Pertandingan yang diikuti oleh atlet peroleh medali	-	-	-
Medali	Jenis medali yang diperoleh oleh masing-masing atlet peroleh medali	1. Emas 2. Perak 3. Perunggu	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berdasarkan Provinsi se-Indonesia

Konsep : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Definisi : Indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Lima domain tersebut adalah (I) Domain Pendidikan, (II) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, (III) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, (IV) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta (V) Domain Gender dan Diskriminasi.
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : Indeks Pembangunan Pemuda = (Indeks Domain Pendidikan + Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan + Indeks Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja + Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan + Indeks Domain Gender dan Diskriminasi)/5. (Sumber: Panduan Indeks Pembangunan Pemuda)
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : https://ipp.sarikata.com/document

Tabel 515. Format Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berdasarkan Provinsi se-Indonesia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nilai IPP	Nilai Indeks Pembangunan Pemuda masing-masing Provinsi di Indonesia.	-	Total	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Nilai Komponen Pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB

Konsep	:	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Definisi	:	Indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Lima domain tersebut adalah (I) Domain Pendidikan, (II) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, (III) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, (IV) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta (V) Domain Gender dan Diskriminasi.
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Poin
Metode Perhitungan	:	Indeks Domain Pendidikan = (Nilai Transformasi Indikator Rata-rata Lama Sekolah +Nilai Transformasi APK Sekolah Menengah + Nilai Transformasi APK Perguruan Tinggi)/3 X 10. Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan = (Nilai Transformasi Angka Kesakitan Pemuda + Nilai Transformasi Persentase Pemuda Korban Kejahatan + Nilai Transformasi Persentase Pemuda Merokok + Nilai Transformasi Persentase Perempuan yang sedang Hamil)/4 X 10. Indeks Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja = (Nilai Transformasi Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih + Nilai Transformasi TPT Pemuda)/2 X 10. Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan = (Nilai Transformasi Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan + Nilai Transformasi Persentase Pemuda yang Aktif dalam kegiatan Organisasi + Nilai Transformasi Persentase Pemuda yang Memberikan Saran atau Pendapat dalam Rapat)/3 x 10. Indeks Domain Gender dan Diskriminasi = (Nilai Transformasi Angka Perkawinan Usia Anak +Nilai Transformasi Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan tingkat SMA ke Atas + Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal)/3 X 10. Penghitungan Nilai Transformasi sebagaimana yang tersedia pada Dokumen Panduan Indeks Pembangunan Pemuda. (Sumber: Panduan Indeks Pembangunan Pemuda).
Sumber Data/Publikasi	:	Kementerian pemuda dan Olahraga

Tautan Publikasi Sumber Data : https://ipp.sarikata.com/document

Tabel 516. Format Data Nilai Komponen Pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Domain	Nama Domain pembentuk IPP	1. Domain Pendidikan 2. Domain Kesehatan & Kesejahteraan 3. Domain Lapangan & Kesempatan Kerja 4. Domain Partisipasi & Kepemimpinan 5. Domain Gender & Diskriminasi	-	-
Nilai Domain	Nilai setiap domain IPP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Daftar Nama Atlet Elit Nasional

Konsep : Olahragawan Elite
Definisi : Atlet yang memiliki prestasi tinggi di tingkat nasional maupun internasional dan telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga olahraga resmi Indonesia, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 517. Format Data Daftar Nama Atlet Elit Nasional

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Atlet Elite	Nama Atlet Elit Nasional	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin atlet	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Olahraga	Cabang Olahraga yang diikuti oleh atlet	-	-	-
Prestasi	Medali yang diperoleh masing-masing atlet pada *event*/kegiatan olahraga tertentu	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Daftar Pelatih Olahraga yang Bersertifikat berdasarkan Cabang Olahraga dan Kabupaten/Kota

Konsep : Pelatih Olahraga
Definisi : Daftar Pelatih Olahraga yang Bersertifikat Provinsi, Nasional, maupun Internasional pada masing-masing cabang olahraga. (Sumber Data: Permenpora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar-standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga).
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 518. Format Data Daftar Pelatih Olahraga yang Bersertifikat berdasarkan Cabang Olahraga dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Pelatih	Nama pelatih bersertifikat	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pelatih	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Cabang Olahraga	Cabang Olahraga keahlian pelatih olahraga	-	-	-
Piagam Kepelatihan	Piagam yang dimiliki oleh pelatih olahraga	1. Pelatih Provinsi 2. Pelatih Daerah 3. Pelatih Nasional	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Daftar Prasarana Olahraga yang Dikelola oleh Dispora NTB

Konsep : Prasarana Olahraga
Definisi : Tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan dan Dikelola oleh Dispora NTB (Sumber data: Permenpora RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional).
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pemuda dan Olahraga

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 519. Format Data Daftar Prasarana Olahraga yang Dikelola oleh Dispora NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Prasarana Olahraga	Nama prasarana olahraga yang dikelola oleh Dispora NTB	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Nilai Komponen Pembentuk (Indikator) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB

Konsep : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Definisi : Indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Lima domain tersebut adalah (I) Domain Pendidikan, (II) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, (III) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, (IV) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta (V) Domain Gender dan Diskriminasi.

1. Domain Pendidikan: Indikator Rata-rata Lama Sekolah; Indikator APK Sekolah Menengah; Indikator APK PT
2. Domain Kesehatan & Kesejahteraan: Indikator Angka Kesakitan Pemuda; Indikator Persentase Pemuda Korban Kejahatan; Indikator Persentase Pemuda Yang Merokok; Indikator Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil
3. Domain Lapangan & Kesempatan Kerja: Indikator Pemuda Wirausaha Kerah Putih; Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda

4. Domain Partisipasi & Kepemimpinan: Indikator Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan; Indikator Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi; Indikator Persentase Pemuda yang Memberikan Saran dalam Rapat
5. Domain Gender & Diskriminasi: Indikator Angka Perkawinan Usia Anak; Indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Mengikuti pendidikan Menengah & Tinggi; Indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor formal

Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Poin
Metode Perhitungan	:	Indeks Domain Pendidikan = (Nilai Transformasi Indikator Rata-rata Lama Sekolah +Nilai Transformasi APK Sekolah Menengah + Nilai Transformasi APK Perguruan Tinggi)/3 X 10. Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan = (Nilai Transformasi Angka Kesakitan Pemuda + Nilai Transformasi Persentase Pemuda Korban Kejahatan + Nilai Transformasi Persentase Pemuda Merokok + Nilai Transformasi Persentase Perempuan yang sedang Hamil)/4 X 10. Indeks Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja = (Nilai Transformasi Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih + Nilai Transformasi TPT Pemuda)/2 X 10. Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan = (Nilai Transformasi Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan + Nilai Transformasi Persentase Pemuda yang Aktif dalam kegiatan Organisasi + Nilai Transformasi Persentase Pemuda yang Memberikan Saran atau Pendapat dalam Rapat)/3 x 10. Indeks Domain Gender dan Diskriminasi = (Nilai Transformasi Angka Perkawinan Usia Anak +Nilai Transformasi Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan tingkat SMA ke Atas + Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal)/3 X 10. Penghitungan Nilai Transformasi sebagaimana yang tersedia pada Dokumen Panduan Indeks Pembangunan Pemuda. (Sumber: Panduan Indeks Pembangunan Pemuda).
Sumber Data/Publikasi	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tautan Publikasi Sumber Data	:	https://ipp.sarikata.com/document

Tabel 520. Format Data Nilai Komponen Pembentuk (Indikator) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Indikator	Nama Indikator Penyusun Domain IPP	Domain Pendidikan 1. Indikator Rata-rata Lama Sekolah 2. Indikator APK Sekolah Menengah 3. Indikator APK PT Domain Kesehatan & Kesejahteraan 4. Indikator Angka Kesakitan Pemuda 5. Indikator Persentase Pemuda Korban Kejahatan 6. Indikator Persentase Pemuda Yang Merokok 7. Indikator Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil Domain Lapangan & Kesempatan Kerja 8. Indikator Pemuda Wirausaha Kerah Putih 9. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Domain Partisipasi & Kepemimpinan 10. Indikator Persentase Pemuda yang Mengikuti kegiatan Sosial Kemasyarakatan 11. Indikator Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi 12. Indikator Persentase Pemuda yang Memberikan Saran dalam Rapat Domain Gender & Diskriminasi	-	-

		13. Indikator Angka Perkawinan Usia Anak 14. Indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Mengikuti pendidikan Menengah & Tinggi 15. Indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor formal		
Nilai Indikator	Nilai setiap indikator IPP	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.31. Metadata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Nilai Investasi berdasarkan Sektor dan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN)

Konsep : [K00622] Investasi, K01197] Modal
Definisi : Besarnya nilai penanaman modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu berdasarkan sektor dan statusnya (PMA dan PMDN) .
Ukuran : Nilai
Satuan : rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 521. Format Data Nilai Investasi berdasarkan Sektor dan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Status Penanaman Modal	-	1. Penanaman Modal Asing 2. Penanaman Modal Dalam Negeri	-	-
Sektor	Sektor Usaha Penanaman Modal	Lampiran Sektor Usaha Penanaman Modal	-	-
Realisasi investasi	Besarnya nilai penanaman modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau	-	Nilai	Rupiah

	suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu berdasarkan sektor dan statusnya			
Tahun	Tahun realisasi investasi	-	-	-
Triwulan	Triwulan realisasi investasi	-	-	-

2) Nilai Investasi berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00622] Investasi, K01197] Modal
Definisi : Besarnya penanaman modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu, dikelompokkan berdasarkan status (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota.
Ukuran : Nilai
Satuan : rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 522. Format Data Nilai Investasi berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Status Penanaman Modal	-	1. Penanaman Modal Asing 2. Penanaman Modal Dalam Negeri	-	-
Sektor	Sektor Usaha Penanaman Modal	Lampiran Sektor Usaha Penanaman Modal	-	-
Realisasi investasi	Besarnya penanaman modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu, dikelompokkan berdasarkan status	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun realisasi investasi	-	-	-
Triwulan	Triwulan realisasi investasi	-	-	-

3) Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Sektor

Konsep : [K01337] Pelaku Usaha, K01197] Modal, [K01058] Lapangan Usaha

Definisi : Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu menurut KBLI berdasarkan status penanaman modal (PMA dan PMDN) dan Sektor ekonomi usahanya. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran : Total

Satuan : unit usaha
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko

Tabel 523. Format Data Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Sektor

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Status Penanaman Modal	-	1. Penanaman Modal Asing 2. Penanaman Modal Dalam Negeri	-	-
Sektor	Sektor Usaha Penanaman Modal	Lampiran Sektor Usaha Penanaman Modal	-	-
Jumlah Pelaku Usaha	Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu menurut KBLI berdasarkan status penanaman modal	-	Total	
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

4) Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01337] Pelaku Usaha, K01197] Modal, [K01058] Lapangan Usaha
Definisi : Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu menurut KBLI berdasarkan status penanaman modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota.
KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan

keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran : Total
Satuan : unit usaha
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 524. Format Data Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Status Penanaman Modal	-	1. Penanaman Modal Asing 2. Penanaman Modal Dalam Negeri	-	-
Jumlah Pelaku Usaha	Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu menurut KBLI berdasarkan status penanaman modal	-	Total	
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

5) Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI yang Menyampaikan LKPM berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01337] Pelaku Usaha, [K01197] Modal, [K01058] Lapangan Usaha

Definisi : Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu menurut KBLI yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran : Total

Satuan : orang

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 525. Format Data Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI yang Menyampaikan LKPM berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-

Status Penanaman Modal	-	1. Penanaman Modal Asing 2. Penanaman Modal Dalam Negeri	-	-
Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu menurut KBLI yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Status Penanaman Modal	-	Total	
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

6) Jumlah Tambahan Tenaga Kerja di Perusahaan PMA/PMDN berdasarkan Asal Tenaga Kerja (TKI dan TKA) dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02159] Tenaga Kerja, K01197] Modal, [K02160] Tenaga Kerja Asing
Definisi : Banyaknya Tambahan Tenaga Kerja di Perusahaan PMA/PMDN berdasarkan Asal Tenaga Kerja (TKI dan TKA) dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 526. Format Data Jumlah Tambahan Tenaga Kerja di Perusahaan PMA/PMDN berdasarkan Asal Tenaga Kerja (TKI dan TKA) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Tenaga Kerja	-	- Tenaga Kerja Asing - Tenaga Kerja Indonesia	-	-
Jumlah tenaga kerja	Banyaknya Tambahan Tenaga Kerja di Perusahaan PMA/PMDN berdasarkan Asal Tenaga Kerja (TKI dan TKA) dan Kabupaten/Kota	-	Total	orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

7) Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor

Konsep Usaha : [K01337] Pelaku
Definisi : Banyaknya pelaku/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor ekonomi
Ukuran : Total
Satuan : unit usaha
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 527. Format Data Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan (Izin dan Non Izin) dan Sektor

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-

Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Izin dan Non Izin	-	Lampiran jenis izin dan non izin	-	-
Jumlah Izin	Jumlah ijin non ijin yang diterbitkan	-	Total	Ijin
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

8) Daftar Pengaduan Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi

Konsep : Pengaduan, Permasalahan invesatsi
Definisi : Daftar Pengaduan atau permasalahan yang diajukan oleh perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang difasilitasi penyelesaiannya oleh instansi berwenang (DPMPTSP Provinsi NTB).
Ukuran : Total
Satuan : Aduan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 528. Format Data Daftar Pengaduan Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Pengaduan Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi	Daftar Pengaduan atau permasalahan yang diajukan oleh perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang difasilitasi penyelesaiannya oleh	-	-	-

	instansi berwenang (DPMPTSP Provinsi NTB)			
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

9) Jumlah Perizinan untuk Risiko Skala Sedang dan Besar

Konsep : Perizinan, Risiko Skala Sedang, Risiko Skala Besar
Definisi : Banyaknya perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) untuk usaha atau kegiatan dengan tingkat risiko menengah dan tinggi, baik untuk usaha Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Ukuran : Total
Satuan : Perizinan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : DPMPTSP Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 529. Format Data Jumlah Perizinan untuk Risiko Skala Sedang dan Besar

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Status Penanaman Modal	-	1. Penanaman Modal Asing 2. Penanaman Modal Dalam Negeri	-	-

Jumlah Perijinan	Banyaknya perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA untuk usaha atau kegiatan dengan tingkat risiko menengah dan tinggi	-	Total	Ijin
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2.32. Metadata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK/PAUD berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00113] Angka Partisipasi Kasar
Definisi : APK PAUD adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan PAUD terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (3-6 Tahun). PAUD meliputi TK/TKLB, RA, PAUDQ, Bimas Non Islam, KB, TPA, SPS, PAUD di Dikmas
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Rumus APK PAUD = (Jumlah Peserta Didik pada tingkat PAUD/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Berusia 3 - 6 Tahun) * 100%
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 530. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK/PAUD berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun	Jumlah penduduk berusia 3-6 tahun yang bersumber dari BPS	-	Total	Orang

Jumlah Peserta Didik PAUD/Sederajat	Jumlah Peserta Didik PAUD/Sederajat yang bersumber dari Publikasi Kemdikbud	-	Total	Orang
APK PAUD	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan PAUD terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (3-6 Tahun)	-	Persentase	Persen
Tahun Ajaran	Tahun Ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00113] Angka Partisipasi Kasar
Definisi : APK SD/Sederajat adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD/Sederajat terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (7 - 12 Tahun). SD/Sederajat meliput: SD, SDLB, Paket A, MI, dan Salafoyah Ula'.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Rumus APK SD = (Jumlah Peserta Didik pada tingkat SD/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Berusia 7 - 12 Tahun) * 100%
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 531. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Jumlah penduduk berusia 7-12 tahun yang bersumber dari BPS	-	Total	Orang
Jumlah Peserta Didik SD/Sederajat dan Paket A	Jumlah Peserta Didik SD/ Sederajat yang bersumber dari Publikasi Kemdikbud	-	Total	Orang
APK SD/Sederajat	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD/Sederajat terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (7 - 12 Tahun)	-	Persentase	Persen
Tahun Ajaran	Tahun Ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00113] Angka Partisipasi Kasar

Definisi : APK SMP/Sederajat adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP/Sederajat terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang

pendidikan tertentu (13 - 15 Tahun). SMP/Sederajat meliput SMP, SMPLB, MTs, Paket B, Salafiyah Wustha.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Rumus APK SMP = (Jumlah Peserta Didik pada tingkat SMP/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Berusia 13 - 15 Tahun) * 100%

Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan

Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 532. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Jumlah penduduk berusia 13-15 tahun yang bersumber dari BPS	-	Total	Orang
Jumlah Peserta Didik SMP/Sederajat	Jumlah Peserta Didik SMP/Sederajat yang bersumber dari Publikasi Kemdikbud	-	Total	Orang
APK SMP/Sederajat	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP/Sederajat terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (13 - 15 Tahun)	-	Persentase	Persen

Tahun Ajaran	Tahun Ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00113] Angka Partisipasi Kasar
Definisi : APK SMA/Sederajat adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMA/Sederajat terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (16 - 18 Tahun). SMA Sederajat meliputi SMA,SMK,SMLB, MA, Paket C, dan Salafiyah Ulya.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Rumus APK SMA = (Jumlah Peserta Didik pada tingkat SMA Sederajat)/(Jumlah Penduduk Berusia 16 - 18 Tahun) * 100%
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 533. Format Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	Jumlah penduduk berusia 16-18 tahun yang bersumber dari BPS	-	Total	Orang
Jumlah Peserta Didik SMA Sederajat	Jumlah Peserta Didik SMA Sederajat	-	Total	Orang
APK SMA/Sederajat	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMA/Sederajat terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (16 - 18 Tahun)	-	Persentase	Persen
Tahun Ajaran	Tahun Ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

5) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00114] Angka Partisipasi Murni
Definisi : APM SD/Sederajat adalah Perbandingan antara siswa usia sekolah 7-12 Tahun pada jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan penduduk usia yang sesuai (7-12 Tahun) dan dinyatakan dalam persentase. SD/Sederajat meliput: SD, MI, SDLB, Paket A, dan Salafiyah Ula'.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : APM SD= Jumlah Peserta Didik SD/Sederajat yang berusia 7-12 Tahun/ Jumlah Penduduk Berusia 7-12 Tahun * 100%
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 534. Format Data Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Jumlah penduduk berusia 7-12 tahun yang bersumber dari BPS	-	Total	Orang
Jumlah Peserta Didik SD/Sederajat yang Berusia 7-12 Tahun	Jumlah Peserta Didik SD/Sederajat yang berusia 7-12 Tahun yang bersumber dari publikasi kemdikbud	-	Total	Orang
APM SD/Sederajat	Perbandingan antara siswa usia sekolah 7-12 Tahun pada jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan penduduk usia yang sesuai (7-12 Tahun)	-	Persentase	Persen
Tahun Ajaran	Tahun Ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

6) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00114] Angka Partisipasi Murni

Definisi : APM SMP/Sederajat adalah Perbandingan antara siswa usia sekolah 13-15 Tahun pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat dengan penduduk usia yang sesuai (13-15 Tahun) dan dinyatakan dalam persentase. SMP/Sederajat meliput: SMP, SMPLB, MTs, Paket B, Salafiyah Wustha.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : APM SMP = Jumlah Peserta Didik SMP/Sederajat yang berusia 13-15 Tahun/ Jumlah Penduduk Berusia 13-15 Tahun * 100%

Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan

Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 535. Format Data Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Jumlah penduduk berusia 13-15 tahun yang bersumber dari BPS	-	Total	Orang
Jumlah Peserta Didik SMP/Sederajat yang Berusia 13-15 Tahun	Jumlah Peserta Didik SMP/Sederajat yang Berusia 13-15 Tahun yang bersumber dari publikasi kemdikbud	-	Total	Orang
APM SMP/Sederajat	Perbandingan antara siswa usia sekolah 13-15 Tahun pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat dengan penduduk usia yang sesuai (13-15 Tahun)	-	Persentase	Persen
Tahun Ajaran	Tahun Ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

7) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00114] Angka Partisipasi Murni
Definisi : APM SMA/Sederajat adalah Perbandingan antara siswa usia sekolah (16-18 Tahun) tertentu pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat dengan penduduk usia yang sesuai (16-18 Tahun) dan dinyatakan dalam persentase. SMA Sederajat meliputi: SMA, SMK, SMLB, MA, Paket C, dan Salafiyah Ulya.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : APM SMA = Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat yang berusia 16-18 Tahun/ Jumlah Penduduk Berusia 16-18 Tahun * 100%
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 536. Format Data Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/Sederajat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	Jumlah penduduk berusia 16-18 tahun yang bersumber dari BPS	-	Total	Orang

Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat yang berusia 16-18 Tahun	Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat yang berusia 16-18 Tahun yang bersumber dari Dinas Pendidikan	-	Total	Orang
APM SMA/Sederajat	Perbandingan antara siswa usia sekolah (16-18 Tahun) tertentu pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat dengan penduduk usia yang sesuai (16-18 Tahun)	-	Persentase	Persen
Tahun Ajaran	Tahun Ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

8) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Konsep : [K00114] Angka Partisipasi Murni (APM); [K00704] Jenis Kelamin
Definisi : Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk berdasarkan kelompok usia antara perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di bangku sekolah yang sesuai dengan umurnya. Klasifikasi jenjang pendidikan antara lain: 1. SD/Sederajat; 2. SMP/Sederajat; 3. SMA/Sederajat
Ukuran : Rasio
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Rumus: APM Perempuan pada Jenjang Pendidikan Tertentu / APM Laki-laki pada jenjang usia tertentu * 100%
Sumber Data/Publikasi : BPS Pusat
Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ1NSMy/rasio-angka-partisipasi-murni--apm--perempuan-laki-laki-menurut-provinsi-dan-jenjang-pendidikan.html

Tabel 537. Format Data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenjang pendidikan	-	1. SD/Sederajat 2. SMP/Sederajat 3. SMA/Sederajat 4. Perguruan Tinggi	-	-
Rasio APM	Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk berdasarkan kelompok usia antara perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di bangku sekolah yang sesuai dengan umurnya	-	Rasio	Persen
Tahun	Tahun	-	-	-

9) Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00115] Angka Partisipasi Sekolah
Definisi : APS adalah Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : 1. APS 7 - 12 Tahun = Jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun yang masih sekolah / Jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun * 100%

2. APS 13 - 15 Tahun = Jumlah penduduk usia 13 - 15 Tahun yang masih sekolah / Jumlah penduduk usia 13 - 15 Tahun * 100%
3. APS 16 - 18 Tahun = Jumlah penduduk usia 16 - 18 Tahun yang masih sekolah / Jumlah penduduk usia 16 - 18 Tahun * 100%

Sumber Data/Publikasi : BPS NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521

Tabel 538. Format Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kelompok Umur	-	7 – 12 Tahun 13 – 15 Tahun 16 – 18 Tahun	-	-
Nilai APS	Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun	-	-	-

10) Jumlah Peserta Didik Tingkat TK/PAUD berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/PAUD)
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/PAUD)). PAUD meliputi TK/TKLB, RA, PAUDQ, Bimas Non Islam, KB, TPA, SPS, PAUD di Dikmas
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA/BA/PAUD
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 539. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat TK/PAUD berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Status Sekolah	-	1. Formal 2. Non Formal	-	-
Jenis Sekolah	-	Formal: 1. TK/TKLB 2. RA 3. PAUDQ	-	-

		4. Bimas Non Islam Non Formal: 1. KB 2. TPA 3. SPS 4. PAUD di Dikmas		
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya Peserta Didik pada setiap jenis sekolah	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

11) Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; Sekolah Dasar; Madrasah Ibtidaiyah
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan SD/Sederajat. SD/Sederajat meliputi SD, SDLB, Paket A, MI, Salafiyah Ula'.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada jenjang pendidikan SD/Sederajat
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 540. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Sekolah	-	1. SD 2. SDLB 3. Paket A 4. MI 5. Salafiyah Ula	-	-
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya Peserta Didik pada setiap jenis sekolah	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

12) Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; Sekolah Menengah Pertama
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (SMP/MTs/Sederajat). SMP/Sederajat meliput: SMP, SMPLB, Paket B, MTs,Salafiyah Wustha.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat

Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 541. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/MTs/Sederajat berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Sekolah	-	1. SMP 2. SMPLB 3. Paket B 4. MTs 5. Salafiyah Wulya	-	-
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya Peserta Didik pada setiap jenis sekolah	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

13) Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat Berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; Sekolah Mengah Atas; Sekolah Menengah Kejuruan.
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan) Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan SMA/Sederajat.
Ukuran : Total

Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada masing-masing tingkat pendidikan SMA/Sederajat
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 542. Format Data Jumlah Peserta Didik SMA/Sederajat Berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Sekolah	-	1. SMA 2. SMK 3. SMLB 4. MA 5. Paket C 6. Salafiyah Ulya	-	-
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya Peserta Didik pada setiap jenis sekolah	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

14) Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat yang Berusia 7-12 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; Sekolah Dasar; Madrasah Ibtidaiyah
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (SD/Sederajat) yang berusia 7-12 Tahun.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada jenjang pendidikan SD/Sederajat
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 543. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SD/Sederajat yang Berusia 7-12 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Sekolah	-	1. SD 2. SDLB 3. Paket A 4. MI 5. Salafiyah Ula	-	-
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya Peserta Didik pada setiap jenis sekolah yang berusia 7-12	-	Total	Orang

Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

15) Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/Sederajat yang Berusia 13-15 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; Sekolah Menengah Pertama
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (SMP/MTs/Sederajat) yang berusia 13-15 tahun.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 544. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SMP/MTs/Sederajat yang Berusia 13-15 tahun berdasarkan Jenis Sekolah dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Sekolah	-	1. SMP 2. SMPLB 3. Paket B	-	-

		4. MTs 5. Salafiyah Wulya		
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya Peserta Didik pada setiap jenis sekolah yang berusia 13-15 Tahun	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

16) Jumlah Peserta Didik Tingkat SMA/Sederajat yang Berusia 16-18 tahun berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; Sekolah Mengah Atas; Sekolah Menengah Kejuruan.
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan SMA/Sederajat.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat
Sumber Data/Publikasi : portal data pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah

Tabel 545. Format Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SMA/Sederajat yang Berusia 16-18 tahun berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SMLB 4. MA 5. Paket C 6. Salafiyah Ulya	-	-
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya peserta didik pada setiap jenis Satuan Pendidikan yang berusia 16-18 Tahun	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

17) Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan Khusus berdasarkan Kabupaten Kota, Satuan Pendidikan Khusus, Status Satuan Pendidikan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Konsep : [K01735] Peserta Didik; [K01978] Sekolah Luar Biasa (SLB)
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan khusus/SLB.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada satuan pendidikan khusus/SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 546. Format Data Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan Khusus berdasarkan Kabupaten Kota, Satuan Pendidikan Khusus, Status Satuan Pendidikan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Satuan Pendidikan	Nama dari satuan Pendidikan yang bersangkutan	-	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang tersedia pada SLB	1. PAUD/TK 2. SDLB 3. SMLPB 4. SMLB	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Peserta Didik	Banyaknya peserta didik di SLB berdasarkan tingkat Pendidikan dan jenis kelamin tertentu	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

18) Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada SMA dan SMK berdasarkan Satuan Pendidikan, Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan

Konsep : [K01735] Peserta Didik; [K01596] Penyandang Disabilitas
Definisi : [10310061] Jumlah Penyandang Disabilitas yang bersekolah(Disesuaikan)
Banyaknya orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menjadi peserta didik dan aktif bersekolah di satuan pendidikan tertentu pada SMA, SMK dan SLB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik penyandang disabilitas pada SMA, SMK dan SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 547. Format Data Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada SMA dan SMK berdasarkan Satuan Pendidikan, Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Satuan Pendidikan	Nama dari satuan Pendidikan yang bersangkutan	-	-	-
Tingkat Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK	-	-

Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jumlah Peserta Didik Dengan Disabilitas	Banyaknya peserta didik dengan disabilitas	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

19) Jumlah Pendidik SMA dan SMK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidik dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02183] Pendidik; [10320055] Tingkat Pendidikan
Definisi : [10310060] Jumlah Pendidik (Disesuaikan).Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru, yang mengajar pada satuan pendidikan SMA dan SMK.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total guru pada semua tingkat pendidikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 548. Format Data Jumlah Pendidik SMA dan SMK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidik dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK	-	-
Kelompok Tingkat Pendidikan	-	1. S1/D4/Ke bawah 2. S1/D4/Ke atas		
Tingkat Pendidikan Pendidik	Tingkat Pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh pendidik	1. SMA/Ke bawah 2. D1 3. D2 4. D3 5. S1/D4 6. S2 7. S3		
Jumlah Pendidik	Banyaknya pendidik pada setiap jenis satuan Pendidikan	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

20) Jumlah Pendidik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Status Satuan pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02183] Pendidik; [K00704] Jenis Kelamin; [K01971] Satuan Pendidikan; [10320055] Tingkat Pendidikan

Definisi : [10310060] Jumlah Pendidik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru, yang mengajar pada satuan pendidikan.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total guru pada masing-masing jenjang pendidikan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 549. Format Data Jumlah Pendidik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Status Satuan pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pendidik	Banyaknya pendidik pada setiap jenis satuan Pendidikan	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

21) Jumlah Pendidik Mata Pelajaran Bimbingan Konseling pada SMA/SMK/SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02183] Pendidik
Definisi : Banyaknya guru Bimbingan konseling pada SMA, SMK, dan SLB.
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Banyaknya guru Bimbingan konseling pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 550. Format Data Jumlah Pendidik Mata Pelajaran Bimbingan Konseling pada SMA/SMK/SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pendidik BK	Banyaknya pendidik BK pada setiap jenis satuan Pendidikan	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

22) Jumlah Pendidik di SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02183] Pendidik; [K01978] Sekolah Luar Biasa (SLB); [K00704] Jenis Kelamin; [10320051] Status Satuan Pendidikan

Definisi : [10310060] Jumlah Pendidik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru yang mengajar pada satuan pendidikan khusus.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total guru pada satuan pendidikan khusus
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 551. Format Data Jumlah Pendidik di SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Status Kepegawaian		1. ASN 2. Non ASN	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pendidik	Banyaknya pendidik pada setiap tingkat pendidikan	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

23) Jumlah Pendidik SMA,SMK dan SLB yang memiliki Sertifikat Pendidik Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02183] Pendidik; [K02383] Sertifikasi
Definisi : [10310060] Jumlah Pendidik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru yang mengajar pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SMLB yang memiliki sertifikat pendidik.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total guru yang memiliki sertifikat pendidik
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 552. Format Data Jumlah Pendidik SMA,SMK dan SLB yang memiliki Sertifikat Pendidik Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta		

Jumlah Pendidik yang Memiliki Serdik	Banyaknya pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

24) Jumlah Tenaga Kependidikan SMA,SMK dan SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Tenaga Kependidikan
Definisi : Banyaknya tenaga kependidikan pada SMA, SMK, dan SLB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total tenaga kependidikan (di luar guru)
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 553. Format Data Jumlah Tenaga Kependidikan SMA,SMK dan SLB Berdasarkan Satuan Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki	-	-

		2. Perempuan		
Jumlah Tenaga Kependidikan	Banyaknya tenaga kependidikan pada SMA, SMK, dan SLB	-	Total	Orang
Tahun Ajaran	Tahun ajaran yang bersesuaian	-	-	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

25) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin

Konsep : Partisipasi sekolah

Definisi : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Ukuran : masa

Satuan : tahun

Metode Perhitungan : HLS merupakan penjumlahan angka partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di rumah tangga khusus (pesantren dan non pesantren) .

Rumus: $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$

Sumber Data/Publikasi : BPS NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzA5IzI=/harapan-lama-sekolah--hls--provinsi-nusa-tenggara-barat--menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin--tahun-.html

Tabel 554. Format Data Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin (Tabel Format Data sesuai Format Portal NTB Satu Data)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Harapan Lama Sekolah	Nilai Harapan Lama Sekolah	-	Masa	Tahun
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

26) Iklim Inklusivitas, Iklim Keamanan dan Iklim Kebhinekaan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Konsep : Rapor Pendidikan

Definisi : Iklim Inklusivitas. Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar. Iklim keamanan satuan pendidikan. Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar. Iklim Kebinekaan. Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar

Ukuran : Skor

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Kemdikdasmen
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 555. Format Data Iklim Inklusivitas, Iklim Keamanan dan Iklim Kebhinekaan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenjang Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SDLB 4. SMPLB 5. SMLB	-	-
Jenis Indikator	-	1. Iklim Inklusivitas 2. Iklim Kebhinekaan 3. Iklim Keamanan 4. Kemampuan Literasi 5. Kemampuan Numerasi 6. Kualitas Pembelajaran	-	-
Nilai Indeks	Nilai masing-masing indeks	-	Indeks	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

27) Rata-rata lama sekolah (RLS) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Partisipasi sekolah
Definisi : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani
Ukuran : masa
Satuan : tahun
Metode Perhitungan : RLS dihitung dari jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani
Rumus: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYylzI=/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-usia-25-tahun-ke-atas-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-barat.html

Tabel 556. Format Data Rata-rata lama sekolah (RLS) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Rata-rata Lama Sekolah	Nilai Rata-rata Lama Sekolah	-	Masa	Tahun
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

28) Kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Jenjang Pendidikan

Konsep : Rapor Pendidikan
Definisi : Kemampuan Literasi dan numerasi tiap satuan pendidikan (SMA, SMK dan SLB) pada Rapor Pendidikan
Ukuran : Skor
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 557. Format Data Kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Jenjang Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Pelayanan Dasar	-	1. Pendidikan Khusus 2. Pendidikan Menengah	-	-
Kategori Asesmen Nasional	-	1. Kemampuan Numerasi Peserta Didik 2. Kemampuan Literasi Peserta Didik	-	-
Nilai Indeks	Nilai masing-masing indeks	-	Indeks	-
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

29) Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama dan Menurut Jenis Kelamin

Konsep	:	Penduduk Usia Kerja; Bekerja; Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan; Lapangan Usaha; Jenis Kelamin.
Definisi	:	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan lapangan pekerjaan utama dan menurut jenis kelamin. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Klasifikasi tingkat pendidikan tertinggi yaitu: 1. Tidak/Belum Tamat SD; 2. SD/Sederajat; 3. SMP/Sederajat; 4. SMA/Sederajat; 5. Diploma; 6. Universitas Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Data lapangan pekerjaan dikelompokkan dalam 17 kategori seperti pada Lampiran 5.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Metode Perhitungan	:	pembagian antara jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada Lapangan usaha I dan tingkat pendidikan j dengan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dengan tingkat pendidikan j dikali 100
Sumber Data/Publikasi	:	BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data	:	https://ntb.bps.go.id/id/publication/2024/04/30/3673bf234ff029e11fc8a204/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-barat-2023.html

Tabel 558. Format Data Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama dan Menurut Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Pendidikan Tertinggi	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	1. Tidak/Belum Tamat SD 2. SD/Sederajat 3. SMP/Sederajat 4. SMA/Sederajat 5. Diploma 6. Universitas	-	-
Lapangan Pekerjaan Utama	Bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja	Lampiran 5	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Persentase penduduk yang bekerja	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

30) Format Data Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Penduduk; Pendidikan Tertinggi

Definisi : Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Tidak punya ijazah, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) dan Kabupaten/Kota. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Klasifikasi tingkat pendidikan tertinggi yaitu: 1. Tidak/Belum Tamat SD; 2. SD/Sederajat; 3. SMP/Sederajat; 4. SMA/Sederajat; 5. Perguruan Tinggi

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : pembagian antara jumlah penduduk 15 tahun ke Atas yang memiliki tingkat pendidikan i dan di suatu wilayah j (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan jumlah penduduk di wilayah j (Provinsi/Kabupaten/Kota) dikali 100

Sumber Data/Publikasi : BPS NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : https://ntb.bps.go.id/id/publication/2024/05/31/bbefd7dce38d918ea82688ba/statistik-pendidikan-provinsi-nusa-tenggara-barat-2023.html

Tabel 559. Format Data Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	1. Tidak punya ijazah SD 2. SD/Sederajat 3. SMP/Sederajat 4. SMA/Sederajat 5. Perguruan Tinggi	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Persentase penduduk 15 Tahun ke Atas	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data diambil	-	-	-

31) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berdasarkan Provinsi Se-Indonesia

Konsep : Kebudayaan

Definisi : Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: 1. Dimensi Ekonomi Budaya; 2. Dimensi Pendidikan; 3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya; 4. Dimensi Warisan Budaya; 5. Dimensi Ekspresi Budaya; 6. Dimensi Budaya Literasi; 7. Dimensi Kesetaraan Gender.

Rentang nilai IPK yaitu dari 0 – 100 dengan klasifikasi: 0,00 – 20,00 (sangat rendah); 20,01 – 40,00 (rendah); 40,01 – 60,00 (sedang); 60,01 – 80,00 (tinggi); 80,01 – 100,00 (sangat tinggi).

Ukuran : Indeks

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing nilai dimensi pembentuk IPK dengan bobotnya. Rumus: IPK = 0,10 * skor dimensi Ekonomi Budaya + 0,20 * skor dimensi pendidi + 0,20 * skor dimensi ketahanan sosial budaya + 0,25 * skor dimensi warisan budaya + 0,10 * skor dimensi ekspresi budaya + 0,10 * skor dimensi budaya literasi + 0,05 * skor dimensi Gender

Sumber Data/Publikasi : Kemdikbud

Tautan Publikasi Sumber Data : https://ipk.kemdikbud.go.id/#about

Tabel 560. Format Data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berdasarkan Provinsi Se-Indonesia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Lampiran 7	-	-
Nama Provinsi	-	Lampiran 7	-	-
IPK	Nilai IPK	-	Indeks	-
Tahun	Tahun dilakukan penilaian	-	-	-

32) Dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB

Konsep : Kebudayaan

Definisi : terdapat 7 dimensi dalam perhitungan IPK, yaitu: 1. Dimensi Ekonomi Budaya merupakan Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Dimensi ini terdiri dari Indikator; 2. Dimensi Pendidikan; 3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya; 4. Dimensi Warisan Budaya; 5. Dimensi Ekspresi Budaya; 6. Dimensi Budaya Literasi; 7. Dimensi Gender

Ukuran : Skor

Satuan : Poin

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Kemdikbud

Tautan Publikasi Sumber Data : https://ipk.kemdikbud.go.id/#about

Tabel 561. Format Data Dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Dimensi	-	1. D1 2. D2 3. D3 4. D4 5. D5 6. D6 7. D7	-	-
Nama Dimensi	-	1. D1: Ekonomi Budaya 2. D2: Pendidikan 3. D3: Ketahanan Sosial Budaya 4. D4: Warisan Budaya 5. D5: Ekspresi Budaya 6. D6: Budaya Literasi 7. D7: Gender	-	-
Nilai	Nilai masing-masing dimensi	-		Poin
Tahun	Tahun dilakukan penilaian	-	-	-

33) Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB

Konsep : Kebudayaan
Definisi : Terdapat 31 indikator dalam perhitungan IPK
Ukuran : Skor

Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Kemdikbud
Tautan Publikasi Sumber Data : https://ipk.kemdikbud.go.id/#about

Tabel 562. Format Data Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Indikator	-	X1.1 X2.1; X2.2; X2.3; X2.4; X2.5; X2.6 X3.1; X3.2; X3.3; X3.4; X3.5; X3.6; X3.7; X3.8 X4.1; X4.2; X4.3; X4.4; X4.5; X4.6 X5.1; X5.2; X5.3; X5.4 X6.1; X6.2; X6.3 X7.1; X7.2; X7.3	-	-
Nama Indikator	-	X1.1: Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) X2.1: Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 25 tahun ke atas X2.2: Harapan Lama Sekolah (HLS) X2.3: Angka Kesiapan Sekolah (AKS) X2.4: Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar	-	-

		muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya X2.5: Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah X2.6: Partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termisikin X3.1: Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. X3.2: Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. X3.3: Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama. X3.4: Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku. X3.5: Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir		

		X3.6: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong X3.7: Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir X3.8: Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal X4.1: Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi X4.2: Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi X4.3: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari X4.4: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni X4.5: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun X4.6: Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional X5.1: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran		

		atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir X5.2: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi X5.3: Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni X5.4: Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat X6.1: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir X6.2: Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir X6.3: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat X7.1: Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki X7.2: Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat		

		X7.3: Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki		
Nilai	Nilai masing-masing indikator	-		Poin
Tahun	Tahun dilakukan penilaian	-	-	-

34) Jumlah Kepala Sekolah (SMA,SMK,SLB) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota

Konsep : Kepala Sekolah
Definisi : banyaknya guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pada SMA, SMK, dan SLB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total kepala sekolah pada jenjang SMA, SMK, dan SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 563. Format Data Jumlah Kepala Sekolah (SMA,SMK,SLB) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SMLB	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah SMA, SMK, SMLB	-	Total	Orang
Tahun	Tahun dilakukan penilaian	-	-	-

35) Jumlah Pengawas (SMA,SMK, SLB)berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Pengawas

Konsep : Pengawas
Definisi : Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total pengawas sekolah pada jenjang SMA, SMK, dan SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 564. Format Data Jumlah Pengawas (SMA,SMK, SLB)berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Pengawas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Tingkat Pendidikan	-	1. S1/D4 2. S2 3. S3	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pengawas	Jumlah pengawas SMA, SMK, SMLB	-	Total	Orang
Tahun	Tahun dilakukan penilaian	-	-	-

36) Persentase lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi

Konsep : Lulusan [K02383] Sertifikasi
Definisi : Bagian dari seluruh lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah lulusan SMK pada periode tertentu / jumlah lulusan SMK pada periode tertentu * 100%
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 565. Format Data Persentase lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jumlah Lulusan SMK	Jumlah lulusan SMK, baik yang negeri maupun yang swasta		Total	Orang
Jumlah Lulusan SMK yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	Jumlah lulusan SMK yang sudah memiliki sertifikasi Kompetensi		Total	Orang
Persentase Lulusan SMK yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	Bagian dari seluruh lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun dilakukan penilaian	-	-	-

37) Angka Melanjutkan dari Lulusan SD/MI ke SMP/MTs menurut Provinsi

Konsep : Partisipasi Sekolah

Definisi : persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD sederajat pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SMP sederajat pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD sederajat pada tahun ajaran lalu.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : pembagian Jumlah siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD sederajat pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SMP sederajat pada tahun ajaran sekarang dengan jumlah siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD sederajat pada tahun ajaran lalu * 100%

Sumber Data/Publikasi : BPS Pusat
Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521

Tabel 566. Format Data Angka Melanjutkan dari Lulusan SD/MI ke SMP/MTs berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Angka Melanjutkan ke SMP/Sederajat	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	-
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

38) Angka Melanjutkan dari Lulusan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Partisipasi Sekolah
Definisi : persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP sederajat pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP sederajat pada tahun ajaran lalu.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Jumlah siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP sederajat pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat pada tahun ajaran sekarang / jumlah siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP sederajat pada tahun ajaran lalu * 100%
Sumber Data/Publikasi : BPS Pusat
Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521

Tabel 567. Format Data Angka Melanjutkan dari Lulusan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Angka Melanjutkan ke SMP/Sederajat	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	-
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

39) Angka Mengulang berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota

Konsep : Peserta Didik: Mengulang Kelas
Definisi : Bagian seluruh peserta didik pada tahun ajaran sebelumnya yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan harus mengulang pembelajaran pada tingkat pendidikan dan satuan pendidikan yang sama dengan tahun ajaran sebelumnya.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Pembagian antara jumlah peserta didik yang mengulang kelas pada tahun ajaran tertentu, dengan jumlah peserta didik tahun ajaran sebelumnya, dikali 100.
Sumber Data/Publikasi : BPS Pusat
Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521

Tabel 568. Format Data Angka Mengulang berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-

Jenjang Pendidikan	-	1. SD/Sederajat 2. SMP/Sederajat 3. SMA/Sederajat	-	-
Angka Mengulang	Bagian seluruh peserta didik pada tahun ajaran sebelumnya yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan harus mengulang pembelajaran pada tingkat pendidikan dan satuan pendidikan yang sama dengan tahun ajaran sebelumnya	-	-	-
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

40) Jumlah(Persentase) anak tidak sekolah dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Konsep : Anak Tidak Sekolah
Definisi : jumlah anak-anak dan/atau remaja usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, atau SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : jumlah anak yang tidak sekolah
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 569. Format Data Jumlah anak tidak sekolah dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Laki-laki + Perempuan	-	-
Angka Tidak Sekolah			Persentase	Persen
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

41) Angka anak tidak sekolah berdasarkan Provinsi dan Kelompok Umur

Konsep : Anak Tidak Sekolah

Definisi : Bagian dari anak-anak dan/atau remaja usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, atau SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Angka ini dihitung untuk setiap kelompok usia sekolah pada tiap-tiap jenjang sebagai berikut: Kelompok usia PAUD/sederajat 3-6 tahun; Kelompok usia SD/sederajat 7-12 tahun; Kelompok usia SMP/sederajat 13-15 tahun; dan Kelompok usia SMA/sederajat 16-18 tahun.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Angka anak tidak sekolah dihitung untuk setiap jenjang pendidikan yaitu SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat. Angka anak tidak sekolah diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk

dalam rentang usia sekolah di jenjang i yang tidak terdaftar di sekolah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan i.

Sumber Data/Publikasi : BPS Pusat

Tautan Publikasi Sumber Data : https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521

Tabel 570. Format Data Angka anak tidak sekolah berdasarkan Provinsi dan Kelompok Umur

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Kelompok Umur	-	- 7-12 Tahun - 13-15 Tahun - 16-18 Tahun	-	-
Angka Anak Tidak Sekolah	Bagian dari anak-anak dan/atau remaja usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, atau SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut	-	-	-
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

42) Angka Melek Huruf berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Melek Aksara/Huruf

Definisi : Bagian dari populasi penduduk umur ≥ 15 tahun, yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur >=15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521

Tabel 571. Format Data Angka Melek Huruf berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Laki-laki + Perempuan	-	-
Angka Melek Huruf	Bagian dari populasi penduduk umur ≥ 15 tahun, yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin/lainnya	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

43) Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Melek Aksara/Huruf
Definisi : Bagian dari populasi penduduk umur ≥ 15 tahun, yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang buta huruf dibagi jumlah penduduk umur >=15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521

Tabel 572. Format Data Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Laki-laki + Perempuan	-	-
Angka Buta Huruf	Bagian dari populasi penduduk umur ≥ 15 tahun, yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya		Persentase	Persen

Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

44) Jumlah Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; [K00704] Jenis Kelamin
Definisi : [10310063] Jumlah Peserta Didik (Disesuaikan). Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : total peserta didik pada satuan pendidikan khusus/SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 573. Format Data Jumlah Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-

Jumlah Peserta Didik	Jumlah peserta didik pada satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

45) Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah/*Drop Out* SMA/SMK/SLB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; [K02380] Putus Sekolah
Definisi : [10310065] Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah. Banyaknya peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan atau dikeluarkan dari satuan pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total peserta didik yang putus sekolah pada satuan pendidikan SMK, SMA, dan SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 574. Format Data Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah/*Drop Out* SMA/SMK/SLB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK	-	-

		3. SLB		
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Kelas		Menyesuaikan kelas yang ada di satuan pendidikan	-	-
Jumlah Peserta Didik yang DO	Jumlah peserta didik pada satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang putus sekolah	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

46) Jumlah anak usia 4 - 18 Tahun penyandang disabilitas (Berat) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Ekonomi, dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01476] Penduduk; [K00388] Disabilitas
Definisi : [10410053] Jumlah Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan/Gangguan (Disesuaikan). Banyaknya penduduk berumur 4-18 tahun yang mengalami satu atau lebih kesulitan/gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : REGSOSEK
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 575. Format Data Jumlah anak usia 4 - 18 Tahun penyandang disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Status Ekonomi dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Tingkat Kesejahteraan	-	1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Desil 5 6. Desil 6 7. Desil 7 8. Desil 8 9. Desil 9 10. Desil 10	-	-
Jumlah disabilitas	Jumlah Disabilitas yang berusia 4-18 Tahun	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

47) Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Pendidik berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01735] Peserta Didik; [K02183] Pendidik
Definisi : [10310073] Rasio Peserta Didik terhadap Pendidik (disesuaikan). Perbandingan antara jumlah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu terhadap tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB.
Ukuran : Rasio
Satuan : -
Metode Perhitungan : jumlah peserta didik pada jenjang tertentu / jumlah guru pada jenjang tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 576. Format Data Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Pendidik berdasarkan Satuan Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Nama Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-

Nama Satuan Pendidikan	Nama satuan Pendidikan	-	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jumlah Peserta Didik	Jumlah peserta didik pada satuan Pendidikan	-	Total	Orang
Jumlah Pendidik	Jumlah guru pada satuan Pendidikan	-	Total	Orang
Rasio Peserta Didik Terhadap Pendidik	Jumlah peserta didik dibagi jumlah pendidik dikali 100%	-	Rasio	Persen
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

48) Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Rombongan Belajar berdasarkan Satuan pendidikan

Konsep : [K01735] Peserta Didik; [K01904] Rombongan Belajar
Definisi : [10310074] Rasio Peserta Didik terhadap Rombongan Belajar(disesuaikan). Perbandingan antara jumlah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu terhadap kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
Ukuran : Rasio
Satuan : orang per rombongan belajar
Metode Perhitungan : Pembagian antara jumlah peserta didik dengan rombongan belajar di satuan pendidikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 577. Format Data Rasio Peserta Didik pada SMA, SMK,SLB terhadap Rombongan Belajar berdasarkan Satuan pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Nama Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Nama Satuan Pendidikan	Nama satuan Pendidikan	-	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jumlah Peserta Didik	Jumlah peserta didik pada satuan Pendidikan	-	Total	Orang
Jumlah Rombel	Jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan	-	Total	Rombel
Rasio Peserta Didik Terhadap Rombel	Jumlah peserta didik dibagi jumlah rombel dikali 100%	-	Rasio	Persen
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

49) Rasio Rombongan Belajar pada SMA, SMK,SLB terhadap Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan

Konsep : [K01905] Ruang Kelas; [K01904] Rombongan Belajar
Definisi : Perbandingan antara kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan terhadap ketersediaan ruang kelas pada satuan pendidikan.
Ukuran : Rasio
Satuan : Rombongan Belajar per Ruang Kelas
Metode Perhitungan : Pembagian antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas di satuan pendidikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 578. Format Data Rasio Rombongan Belajar pada SMA, SMK,SLB terhadap Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Nama Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Nama Satuan Pendidikan	Nama satuan Pendidikan	-	-	-

Status Satuan Pendidikan	-	- Negeri - Swasta	-	-
Jumlah Rombel	Jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan	-	Total	Rombel
Jumlah Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas pada satuan pendidikan	-	Total	Ruang Kelas
Rasio Rombel Terhadap Ruang Kelas	Jumlah rombongan belajar dibagi jumlah ruang kelas dikali 100%	-	Rasio	Persen
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

50) Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK/SLB berdasarkan Satuan pendidikan

Konsep : [K01904] Rombongan Belajar
Definisi : Banyaknya kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
Ukuran : total
Satuan : Rombongan Belajar per Ruang Kelas
Metode Perhitungan : jumlah rombongan belajar pada SMA, SMK dan SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 579. Format Data Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK/SLB berdasarkan Satuan pendidikan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Nama Kecamatan		Sesuai Lampiran 3		
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Nama Satuan Pendidikan	Nama satuan Pendidikan	-	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jumlah Rombel	Jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan	-	Total	Rombel
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

51) Daftar Lembaga yang mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Keahlian untuk SMK

Konsep : Lembaga
Definisi : Daftar Lembaga yang mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Keahlian untuk SMK
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 580. Format Data Daftar Lembaga yang mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Keahlian untuk SMK

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis LSP	Jenis Lembaga Sertifikasi Profesi	-	-	-
Nama LSP	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi	-	-	-
Nomor SK Lisensi	Nomor SK Lisensi	-	-	-
Nomor Lisensi	Nomor Lisensi	-	-	-
Jurusan	Jurusan profesi			

52) Jumlah Ruang Kelas pada SMA dan SMK berdasarkan Kondisi, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota

Konsep : [K01905] Ruang Kelas
Definisi : [10310066] Jumlah Ruang Kelas. Banyaknya ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh ruang kelas pada Satuan Pendidikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 581. Format Data Jumlah Ruang Kelas pada SMA dan SMK berdasarkan Kondisi, Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Kondisi Ruang Kelas	-	1. Baik 2. Rusak Ringan 3. Rusak Sedang 4. Rusak Berat		
Jumlah Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas pada satuan pendidikan	-	Total	Ruang Kelas
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

53) Jumlah Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan Khusus

Konsep : [K01905] Ruang Kelas
Definisi : [10310066] Jumlah Ruang Kelas. Banyaknya ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) pada satuan pendidikan khusus.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh ruang kelas pada Satuan Pendidikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 582. Format Data Jumlah Ruang Kelas berdasarkan Satuan Pendidikan Khusus

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Satuan Pendidikan	-	-	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Kondisi Ruang Kelas	-	1. Baik 2. Rusak Ringan 3. Rusak Sedang		

		4. Rusak Berat		
Jumlah Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas pada satuan pendidikan	-	Total	Ruang Kelas
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

54) Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota

Konsep : sekolah
Definisi : [10310067] Jumlah Satuan Pendidikan. Banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh sekolah pada setiap jenjang Pendidikan
Sumber Data/Publikasi : Kemendikdasmen
Tautan Publikasi Sumber Data : https://dapo.dikdasmen.go.id/sp

Tabel 583. Format Data Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Satuan Pendidikan dan Kabupaten Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah SMA, SMK dan SLB di NTB	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

55) Jumlah SMA Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Sekolah Menengah Atas
Definisi : banyaknya bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh SMA Terbuka
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 584. Format Data Jumlah SMA Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah satuan Pendidikan	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

56) Status Akreditasi SMA/SMK/SLB Berdasarkan Status sekolah

Konsep : [K00035] Akreditasi; [K01971] Satuan Pendidikan
Definisi : Banyaknya satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB berdasarkan tingkat Pengakuan terhadap program satuan pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : total SMA, SMK, dan SLB berdasarkan akreditasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 585. Format Data Status Akreditasi SMA/SMK/SLB Berdasarkan Status sekolah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Nama Satuan Pendidikan	-	-	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Status Akreditasi	-	1. A 2. B 3. C 4. TT	-	-
Tahun	Tahun dilaksanakan akreditasi	-	-	-
Tahun Berakhir	Tahun berakhirnya akreditasi	-	-	-

57) Jumlah Lulusan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Sekolah

Konsep : Peserta Didik
Definisi : Banyaknya lulusan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh peserta didik yang telah lulus pada jenjang SMA, SMK, an SLB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 586. Format Data Jumlah Lulusan SMA, SMK, dan SLB Berdasarkan Status Sekolah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Satuan Pendidikan	-	1. SMA 2. SMK 3. SLB	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jumlah lulusan	Jumlah peserta didik yang telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat akhir	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

58) Jumlah Lulusan SMK yang bekerja berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Peserta Didik; Bekerja
Definisi : Jumlah peserta Didik yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi yang sudah bekerja
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh peserta didik yang telah lulus pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang sudah bekerja

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 587. Format Data Jumlah Lulusan SMK yang bekerja berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Satuan Pendidikan	-	1. Negeri 2. Swasta	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah lulusan yang bekerja	Jumlah peserta didik yang telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat akhir dan sudah bekerja	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data yang diukur	-	-	-

59) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Ritus

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Ritus

Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Ritus merupakan tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 588. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Ritus

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal ritus	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

60) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Manuskrip

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Manuskrip
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 589. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Manuskrip

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal manuskrip	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah	-	-

		5. Sudah Berkurang		
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

61) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Tradisi Lisan

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Tradisi Lisan
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Yang dimaksud dengan tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 590. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Tradisi Lisan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal tradisi lisan	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Jenis	-	1. Syair 2. Dongeng	-	-

		3. Pantun 4. Pemujaan 5. Nasihat		
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

62) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Adat Istiadat

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Adat Istiadat
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Adat istiadat adalah Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 591. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Adat Istiadat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal tradisi lisan	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Jenis	-	1. Perkawinan 2. Kelahiran 3. Kematian 4. Sosial	-	-
Uraian	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

63) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Seni

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Seni
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Seni adalah Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 592. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Seni

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal seni	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Jenis	-	1. Musik Tradisional 2. Tari Tradisional 3. Tari Kreasi Tradisional 4. Musik Modern 5. Seni rupa	-	-

		6. Sinematografi 7. Teater Tradisional 8. Teater Modern 9. Wayang		
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

64) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Bahasa

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Bahasa
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 593. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Bahasa

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal bahasa	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Jenis	-	1. Bahasa 2. Huruf 3. Dialek	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

65) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Pengetahuan Tradisional

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Pengetahuan Tradisional

Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 594. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Pengetahuan Tradisional

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal Pengetahuan tradisional	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Jenis	-	1. Kerajinan 2. Pengobatan Tradisional	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

66) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Teknologi Tradisional

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
Teknologi Tradisional
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 595. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Teknologi Tradisional

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal Teknologi tradisional	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-

Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

67) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Olah Raga Tradisional

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Olahraga Tradisional
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 596. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Olah Raga Tradisional

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal Olahraga tradisional	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

68) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Permainan Rakyat

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); Permainan Rakyat
Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Permainan yang didasarkan pada nilai tertentu, dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri, misalnya permainan kelereng, congklak, gasing, gobak sodor, dsb.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 597. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Permainan Rakyat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal permainan rakyat	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Jenis	-	1. Individu 2. Kelompok 3. Jumlah Pemain	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

69) Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Indikasi Geografis

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)

Definisi : Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Indikasi geografis dapat dimaknai sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, faktor manusia, atau kombinasi keduanya

Ukuran : -

Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 598. Format Data Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Indikasi Geografis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal Pengetahuan tradisional	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Karya Budaya	Nama Karya Budaya	-	-	-
Jenis	-	1. Tanaman 2. Hewan 3. Produk 4. Lain-lain	-	-
Uraian Karya Budaya	Uraian singkat tentang karya budaya	-	-	-
Kondisi	Kondisi karya budaya	1. Masih bertahan 2. Sudah berkembang 3. Terancam punah 4. Sudah punah 5. Sudah Berkurang	-	-
Tahun Register	Tahun karya budaya didaftarkan	-	-	-

70) Daftar Cagar Budaya Provinsi NTB

Konsep : Cagar Budaya
Definisi : Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 599. Format Data Daftar Cagar Budaya Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota asal Pengetahuan tradisional	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Cagar Budaya	Nama Cagar budaya	-	-	-
Kategori	-	1. Bangunan 2. Situs	-	-

71) Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Angka Partisipasi Provinsi

Konsep : [K01289] Partisipasi Sekolah
Definisi : Keikutsertaan penduduk dalam pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, maupun pendidikan yang setara.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Laporan SPM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 600. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Angka Partisipasi Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Pelayanan Dasar	Jenis pelayanan dasar yang diberikan	1. Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK) 2. Pendidikan Khusus	-	-
Jumlah Anak yang Bersekolah Pada Jenjang Menengah	Totalnya peserta didik pada jenjang Pendidikan menengah	-	Total	Orang
Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun	Jemlah penduduk berusia 16-18 tahun	-	Total	Orang
Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun yang Sedang Belajar di Satuan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun yang Sedang Belajar di Satuan Pendidikan	-	Total	Orang

Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun	Jemlah penduduk berusia 16-18 tahun	-	Total	Orang
Jumlah Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Yang Bersekolah	Jumlah Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Yang Bersekolah	-	Total	Orang
Penyandang Disabilitas Pada Provinsi Yang Bersangkutan	Penyandang Disabilitas Pada Provinsi Yang Bersangkutan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data disajikan			

72) Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi

Konsep : [K02183] Pendidik
Definisi : Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru yang mengajar pada satuan pendidikan.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Laporan SPM
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 601. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Pelayanan Dasar	Jenis pelayanan dasar yang diberikan	1. Pendidikan Menengah (SMA/SLB/SMK Umum) 2. Pendidikan Khusus	-	-
Jumlah Formasi Guru ASN yang Diajukan	Jumlah Formasi Guru ASN yang Diajukan	-	Total	Orang
Jumlah Formasi Guru ASN Yang Dibutuhkan	Jumlah Formasi Guru ASN Yang Dibutuhkan	-	Total	Orang
Indeks Distribusi Guru Tahun N	Nilai Indeks Distribusi Guru Tahun ke - N	-	Indeks	-
Indeks Distribusi Guru Tahun N - 1	Indeks Distribusi Guru Tahun N - 1	-	Indeks	-
Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak Di Provinsi Yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak Di Provinsi Yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah	-	Total	Orang
Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data disajikan			

73) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Provinsi

Konsep : Rapor Pendidikan
Definisi : Kemampuan Literasi dan numerasi tiap satuan pendidikan (SMA, SMK dan SLB) pada Rapor Pendidikan
Ukuran : Skor
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 602. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Pelayanan Dasar	Jenis pelayanan dasar yang diberikan	1. Pendidikan Menengah (SMA/SLB/SMK Umum) 2. Pendidikan Khusus	-	-
Rata-rata Nilai Literasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta	Rata-rata Nilai Literasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta	-	Nilai	Poin
Rata-rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	-	Nilai	Poin

Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta	Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta	-	Nilai	Poin
Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun data disajikan	-	-	-

74) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kejuruan Provinsi

Konsep : Rapor Pendidikan
Definisi : Kemampuan Literasi dan numerasi tiap satuan pendidikan (SMA, SMK dan SLB) pada Rapor Pendidikan
Ukuran : Skor
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 603. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kejuruan Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Pelayanan Dasar	Jenis pelayanan dasar yang diberikan	Pendidikan Menengah (SMK)	-	-
Total Individu Lulusan SMK Yang Bekerja Atau Berwirausaha Atau Melanjutkan Studi	Total Individu Lulusan SMK Yang Bekerja Atau Berwirausaha Atau Melanjutkan Studi	-	Total	Orang
Total Individu Lulusan SMK Pada Tahun Tertentu Berdasarkan Rapor Pendidikan	Total Individu Lulusan SMK Pada Tahun Tertentu Berdasarkan Rapor Pendidikan	-	Total	Orang
Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Pada Tahun N Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Pada Tahun N Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	Persentase	Persen
Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Pada Tahun N-1 Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Pada Tahun N-1 Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data disajikan			

75) Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan Numerasi Provinsi

Konsep : Rapor Pendidikan
Definisi : Kemampuan Literasi dan numerasi tiap satuan pendidikan (SMA, SMK dan SLB) pada Rapor Pendidikan
Ukuran : Skor

Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 604. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan Numerasi Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Pelayanan Dasar	Jenis pelayanan dasar yang diberikan	1. Pendidikan Menengah (SMA/SLB/SMK Umum) 2. Pendidikan Khusus	-	-
Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Laki-laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Laki-laki Berdasarkan Asesmen Nasional	-	Skor	Poin
Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	-	Skor	Poin
Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen	Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen	-	Skor	Poin

Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen	Rata-rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen	-	Skor	Poin
Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Laki-laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Laki-laki Berdasarkan Asesmen Nasional	-	Skor	Poin
Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	-	Skor	Poin
Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen	Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen	-	Skor	Poin
Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen	Rata-rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen	-	Skor	Poin

Tahun	Tahun data disajikan			

76) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Provinsi

Konsep : Rapor Pendidikan
Definisi : Iklim Inklusivitas. Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar. Iklim keamanan satuan pendidikan. Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar. Iklim Kebinekaan. Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
Ukuran : Skor
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pendidikan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 605. Format Data Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Pelayanan Dasar	Jenis pelayanan dasar yang diberikan	1. Pendidikan Menengah (SMA/SLB/SMK Umum) 2. Pendidikan Khusus	-	-
Indeks Iklim Keamanan Rata-	Indeks Iklim Keamanan Rata- Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	-	Skor	Poin

Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N				
Indeks Iklim Keamanan Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen Nasional	Indeks Iklim Keamanan Rata- Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen Nasional	-	Skor	Poin
Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata-rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata-rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	-	Skor	Poin
Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata-rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata-rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen	-	Skor	Poin
Tahun	Tahun data disajikan			

2.33. Metadata Dinas Perdagangan

1) Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi

Konsep : Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol
Definisi : Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi oleh dinas perdagangan pada periode tertentu
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 606. Format Data Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol	Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi oleh dinas perdagangan pada periode tertentu	-	-	-
Tahun	Tahun pemberian bantuan	-	-	-

2) Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Jenis Bantuan

Konsep : Bantuan Sarana Prasarana
Definisi : Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan (barang maupun jasa) untuk Masyarakat khususnya pelaku UKM yang dikoordinir oleh Dinas Perdagangan
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang diberikan ke Masyarakat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 607. Format Data Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Jenis Bantuan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Bantuan	Jenis bantuan yang berikan oleh Dinas Perdagangan ke Masyarakat	Sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan	-	-
Jumlah Bantuan	Total bantuan yang berikan per jenis bantuan	-	Total	Sesuai dengan jenis bantuan
Satuan	Satuan jumlah sesuai jenis bantuan	-	-	-
Tahun	Tahun pemberian bantuan	-	-	-

3) Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Bantuan Sarana Prasarana
Definisi : Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan (barang maupun jasa) untuk Masyarakat khususnya pelaku UKM yang dikoordinir oleh Dinas Perdagangan
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang diberikan ke Masyarakat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 608. Format Data Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Bantuan	Jenis bantuan yang berikan oleh Dinas Perdagangan ke Masyarakat	Sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan	-	-
Jumlah Bantuan	Total bantuan yang berikan per jenis bantuan	-	Total	Sesuai dengan jenis bantuan
Satuan	Satuan jumlah sesuai jenis bantuan	-	-	-
Tahun	Tahun pemberian bantuan	-	-	-

4) Jumlah Pengaduan Konsumen yang Difasilitasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pengaduan Konsumen
Definisi : Pengaduan konsumen adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh kerugian atau potensi kerugian. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
Ukuran : Total
Satuan : Aduan
Metode Perhitungan : Total Pengaduan konsumen
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 609. Format Data Jumlah Pengaduan Konsumen yang Difasilitasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nomor Pengaduan/ Registrasi	Nomor registrasi pengaduan	-	-	-
Tanggal Diterima	Tanggal diterimanya pengaduan	-	-	-
Nama Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang mengusulkan pengaduan	-	-	-
Klasifikasi Pengaduan	-	1. Barang 2. Jasa	-	-
Jenis Pengaduan	-	Sesuai dengan jenis pengaduan	-	-

Cara Penyelesaian	-	1. Konsolasi 2. Mediasi	-	-
Status Penyelesaian	-	1. Masih dalam proses 2. Selesai 3. Tercapai Kesepakatan 4. Tidak tercapai kesepakatan 5. Tidak selesai	-	-
Tahun	Tahun dilakukan pengaduan		-	-

5) Jumlah Produk Unggulan yang dipromosikan di NTB *Mall* berdasarkan Kategori Produk

Konsep : Produk yang disebarkan melalui *e-commerce*
Definisi : *e-commerce* adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini *e-commerce* lebih sering terjadi melalui internet. Pada Data ini produk yang disebarkan melalui *e-commerce* adalah produk yang sudah terdaftar pada NTB *Mall*
Ukuran : Total
Satuan : Produk
Metode Perhitungan : Total Produk yang disebarkan melalui NTB *Mall* pada periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 610. Format Data Jumlah Produk Unggulan yang dipromosikan di NTB *Mall* berdasarkan Kategori Produk

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kategori Produk	Kategori produk yang ada di NTB *Mall*	Sesuai dengan NTB *Mall*	-	-
Jumlah Produk	Jumlah jenis produk yang dijual di NTB *mall*	-	-	-
Tahun	Tahun pertama kali produk dijual di NTB *Mall*	-	-	-

6) Jumlah UKM yang bermitra di NTB *Mall* berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Usah Kecil Menengah
Definisi : UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UKM yang bermitra adalah UKM yang sudah memanfaatkan Aplikasi NTB Mall dalam usahanya.
Ukuran : Total
Satuan : Usaha
Metode Perhitungan : Total UKM yang sudah memanfaatkan Aplikasi NTB *Mall* dalam usahanya pada periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 611. Format Data Jumlah UKM yang bermitra di NTB *Mall* berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota asal UKM	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah UKM	Jumlah UKM yang sudah terdaftar di NTB *Mall*	-	Total	Unit Usaha
Tahun	Tahun terakhir data di-*update*	-	-	-

7) Komoditi Barang dan Jasa yang diawasi Peredarannya

Konsep : Barang dan Jasa
Definisi : Daftar Barang dan Jasa yang peredarannya diawasi oleh Dinas Perdagangan
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 612. Format Data Komoditi Barang dan Jasa yang diawasi Peredarannya

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Klasifikasi Barang	Klasifikasi jenis barang	-	-	-
Merek	Merek barang	-	-	-
Jenis Barang	Jenis barang yang diawasi	-	-	-
Asal Barang	Negara Asal barang	-	-	-
Nama Perusahaan	Nama Perusahaan yang menghasilkan barang	-	-	-
Kabupaten	Kabupaten asal Perusahaan	-	-	-
Alamat Perusahaan	Alamat perusahaan	-	-	-

8) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir

Konsep : Ekspor
Definisi : Nilai dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan eksportir
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Nilai Ekspor dari semua eksportir
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 613. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Eksportir	Nama perusahaan/badan usah/perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor	-	-	-
Nilai Ekspor	Total nilai dari barang yang diekspor	-	Nilai	US$
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

9) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas

Konsep : Ekspor
Definisi : Nilai dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Nilai Ekspor dari semua komoditas
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 614. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Kelompok Komoditas	Kelompok komoditas yang diekspor	1. Hasil kerajinan 2. Hasil perikanan dan kelautan 3. Hasil kehutanan 4. Hasil pertanian dan perkebunan 5. Hasil pertambangan	-	-
Nilai Ekspor	Total nilai dari barang yang diekspor	-	Nilai	US$
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September;	-	-

		10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

10) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan

Konsep : Ekspor
Definisi : Nilai dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan Negara Tujuan ekspor
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Nilai Ekspor dari semua negara tujuan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 615. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Negara Tujuan	Negara tujuan pengiriman barang yang diekspor	Nama Negara tujuan ekspor	-	-
Nilai Ekspor	Total nilai dari barang yang diekspor	-	Nilai	US$
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

11) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan

Konsep : Ekspor
Definisi : Nilai dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan pelabuhan muatnya
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Nilai Ekspor dari semua pelabuhan muat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 616. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Pelabuhan Muat	Pelabuhan muat barang yang diekspor	1. Tanjung perak – Surabaya 2. Lombok International Airport 3. Soekarno Hatta 4. Benete – Sumbawa 5. Ngurah Rai – Denpasar 6. Tanjung Mas		
Nilai Ekspor	Total nilai dari barang yang diekspor	-	Nilai	US$
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

12) Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang

Konsep : Ekspor
Definisi : Nilai dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan tambang dan non tambang
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : Total Nilai Ekspor baik tambang maupun non tambang
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 617. Format Data Nilai Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Jenis Barang		1. Tambang 2. Non Tambang	-	-
Nilai Ekspor	Total nilai dari barang yang diekspor	-	Nilai	US$
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

13) Perkembangan Harga Rata-rata Bahan Pokok berdasarkan Komoditas

Konsep : Harga Rata-rata
Bahan Kebutuhan Pokok
Definisi : Harga barang/komoditas yang dihitung secara rata-rata aritmetika (*simple average*). Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : rata-rata harga dari masing-masing kebutuhan pokok
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 618. Format Data Perkembangan Harga Rata-rata Bahan Pokok berdasarkan Komoditas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Bahan Pokok	Nama bahan pokok yang dipantau harganya	Sesuai dengan bahan pokok yang dipantau	-	-
Satuan Barang	Satuan barang pokok yang dipantau	Sesuai dengan barang yang dipantau	-	-
Harga	Harga barang pokok hasil pemantauan	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun dilaksanakan pemantauan	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan pemantauan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

14) Perkembangan Harga Rata-rata Barang Strategis (Penting) yang dipantau berdasarkan Jenis Barang

Konsep : Harga Rata-rata; Bahan Kebutuhan Pokok
Definisi : Harga rata-rata bahan bangunan/material yang digunakan pengusaha dalam mengerjakan proyek.
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : rata-rata harga dari masing-masing harga bahan bangunan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 619. Format Data Perkembangan Harga Rata-rata Barang Strategis (Penting) yang dipantau berdasarkan Jenis Barang

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Bahan penting	Nama bahan penting yang dipantau harganya	Sesuai dengan bahan penting yang dipantau	-	-
Satuan Barang	Satuan barang penting yang dipantau	Sesuai dengan barang yang dipantau	-	-
Harga	Harga barang pokok hasil pemantauan	-	Nilai	Rupiah
Tahun	Tahun dilaksanakan pemantauan	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan pemantauan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

15) Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dengan Penerbitan SKA berdasarkan Tambang-Non Tambang

Konsep : Ekspor
Definisi : Perkembangan atau pertumbuhan nilai ekspor tambang maupun non tambang pada periode tertentu terhadap nilai periode sebelumnya.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : Nilai ekspor tambang maupun non tambang Pada periode tertentu - Nilai ekspor tambang maupun non tambang Pada periode sebelumnya/Nilai ekspor tambang maupun non tambang Pada periode sebelumnya * 100%
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 620. Format Data Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor dengan Penerbitan SKA berdasarkan Tambang-Non Tambang

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Barang		1. Tambang 2. Non Tambang	-	-
Persentase pertumbuhan	Perkembangan atau pertumbuhan nilai ekspor tambang maupun non tambang pada periode tertentu terhadap nilai periode sebelumnya	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September;	-	-

		10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

16) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir

Konsep : Ekspor
Definisi : Volume dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan eksportir
Ukuran : Volume
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Total Volume Ekspor dari semua eksportir
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 621. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Eksportir

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Eksportir	Nama perusahaan/badan usah/perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor	-	-	-
Volume Ekspor	Total volume dari barang yang diekspor	-	Total	Ton
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September;	-	-

		10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

17) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas

Konsep : Ekspor
Definisi : Volume dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas
Ukuran : Volume
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Total Volume Ekspor dari semua komoditas
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 622. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Komoditas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Kelompok Komoditas	Kelompok komoditas yang diekspor	1. Hasil kerajinan 2. Hasil perikanan dan kelautan 3. Hasil kehutanan 4. Hasil pertanian dan perkebunan 5. Hasil pertambangan	-	-
Volume Ekspor	Total volume dari barang yang diekspor	-	Total	Ton
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-

Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

18) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan

Konsep : Ekspor
Definisi : Volume dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan Negara Tujuan eskpor
Ukuran : Volume
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Total Volume Ekspor dari semua negara tujuan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 623. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Negara Tujuan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Negara Tujuan	Negara tujuan pengiriman barang yang diekspor	Nama Negara tujuan ekspor	-	-
Volume Ekspor	Total volume dari barang yang diekspor	-	Total	Ton
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli;	-	-

		8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

19) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan

Konsep : Ekspor
Definisi : Volume dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan pelabuhan muatnya
Ukuran : Volume
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Total Volume Ekspor dari semua pelabuhan muat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 624. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Pelabuhan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Variabel	**Definisi**	**Klasifikasi Isian**	**Ukuran**	**Satuan**
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Pelabuhan Muat	Pelabuhan muat barang yang diekspor	1. Tanjung perak – Surabaya 2. Lombok International Airport 3. Soekarno Hatta 4. Benete – Sumbawa 5. Ngurah Rai – Denpasar 6. Tanjung Mas		

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Volume Ekspor	Total volume dari barang yang diekspor	-	Total	Ton
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

20) Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang

Konsep : Ekspor
Definisi : Volume dari perdagangan barang yang akan dijual kepada pihak luar negeri berdasarkan penerbitan Surat keterangan asal barang yang diklasifikasikan berdasarkan tambang dan non tambang
Ukuran : Volume
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Total Volume Ekspor baik tambang maupun non tambang
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 625. Format Data Volume Ekspor dengan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) berdasarkan Tambang-Non Tambang

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Bara	-	-
Jenis Barang		1. Tambang 2. Non Tambang	-	-

Volume Ekspor	Total volume dari barang yang diekspor	-	Total	Ton
Tahun	Tahun dilaksanakan ekspor	-	-	-
Bulan	Bulan dilaksanakan ekspor	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

21) Daftar Pasar Tradisional/Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Pasar
Definisi : Banyaknya pasar yang meliputi pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, dan pasar tanpa bangunan.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 626. Format Data Daftar Pasar Tradisional/Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lokasi Pasar	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	Kecamatan Lokasi Pasar	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan Lokasi Pasar	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Pasar	Nama pasar	-	-	-
Jumlah Pedagang	Jumlah pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan di pasar		Total	Orang
Tahun	Tahun dilakukan pendataan	-	-	-

22) Daftar Pelaksanaan Pasar Lelang

Konsep : Pasar Lelang
Definisi : Daftar pelaksanaan pasar lelang yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi NTB. Pasar lelang adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli melalui sistem lelang.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 627. Format Data Daftar Pelaksanaan Pasar Lelang

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
ID Lelang	Identitas lelang	-	-	-
Jenis Transaksi	Jenis transaksi lelang	- SPOT	-	-
Penyelenggara PFK	Pihak yang menyelenggarakan lelang	-	-	-
Kode Anggota Penjual	Kode dari anggota yang menjual	-	-	-
Penjual	Pihak yang menjual barang pada transaksi lelang	-	-	-
Kode Anggota Pembeli	Kode dari anggota yang membeli	-	-	-
Pembeli	Pihak yang membeli barang pada transaksi lelang	-	-	-
Komoditas	Komoditas barang yang dijual pada transaksi lelang	-	-	-
Volume	Banyaknya barang yang dijual dan dibeli pada transaksi lelang	-	-	-
Satuan	Satuan dari barang	-	-	-
Harga Satuan	Harga per satuan dari barang yang dilelang	-	-	-
Harga Pembukaan	Perkalian dari variabel volume dan harga satuan	-	-	-
Nilai Transaksi	Total nilai transaksi	-	-	-
Status Transaksi	Status pelaksanaan transaksi lelang	- Terbuka	-	-
Tahun	Tahun dilaksanakan transaksi lelang	-	-	-

Bulan	Bulan dilaksanakan transaksi lelang	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-
Waktu Transaksi	Waktu dilaksanakan transaksi lelang	-	-	-

23) Daftar Pelaksanaan Pasar Murah

Konsep : Pasar Murah
Definisi : Daftar pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi NTB. Pasar murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perdagangan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 628. Format Data Daftar Pelaksanaan Pasar Murah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Sumber Dana	Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pasar murah	1. APBN 2. APBD	-	-

Lokasi	Lokasi pelaksanaan pasar murah	-	-	-
Tahun	Tahun dilaksanakan pasar murah	-	-	-
Tanggal	Tanggal pelaksanaan pasar murah	-	-	-

24) Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) berdasarkan Provinsi se-Indonesia

Konsep : Indeks Keberdayaan Konsumen
Definisi : IKK digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja serta peningkatan keberdayaan konsumen yang ada di Indonesia. Semakin tinggi nilai IKK maka menunjukkan bahwa semakin berdaya konsumen Indonesia.
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Ditjen PKTN
Tautan Publikasi Sumber Data : https://ditjenpktn.kemendag.go.id/secara-berkala/ditpk/likk

Tabel 629. Format Data Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) berdasarkan Provinsi se-Indonesia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nilai IKK	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	-	Indeks	-
Mutu	-	1. Mampu 2. Kritis	-	-
Tahun	Tahun dilaksanakan penilaian	-	-	-

25) Komponen Pembentuk Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Provinsi NTB

Konsep : Indeks Keberdayaan Konsumen
Definisi : IKK digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja serta peningkatan keberdayaan konsumen yang ada di Indonesia. Semakin tinggi nilai IKK maka menunjukkan bahwa semakin berdaya konsumen Indonesia.
Ukuran : Indeks
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Ditjen PKTN
Tautan Publikasi Sumber Data : https://ditjenpktn.kemendag.go.id/secara-berkala/ditpk/likk

Tabel 630. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Nama Provinsi	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Komponen IKK	Komponen pembentuk nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	1. Pencarian informasi 2. Pengetahuan tentang Undang-undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen 3. Pemilihan barang dan jasa 4. Preferensi barang dan jasa 5. Perilaku pembelian 6. Kecenderungan untuk bicara 7. Perilaku komplain	-	-

Nilai Komponen IKK	Nilai untuk setiap komponen pembentuk nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun dilaksanakan penilaian	-	-	-

2.34. Metadata Dinas Perhubungan

1) Panjang Ruas Jalan Provinsi yang sudah memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00656] Jalan
Definisi : Panjang jalan yang memiliki fasilitas penerangan jalan umum.
Ukuran : Total
Satuan : Km
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 631. Format Data Panjang Ruas Jalan Provinsi yang sudah memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Ruas Jalan	Nama ruas jalan yang memiliki penerangan jalan umum	-	--	-
Panjang Ruas Jalan Provinsi yang memiliki Penerangan Jalan Umum	Total panjang ruas jalan provinsi yang memiliki penerangan jalan umum yang melintas di masing-masing kabupaten/kota	-	Total	Km
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2) Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00609] Penerangan Jalan
Definisi : Banyaknya unit PJU yang terpasang pada ruas jalan provinsi.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 632. Format Data Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Ruas Jalan	Nama ruas jalan yang memiliki penerangan jalan umum	-	--	-
Panjang Ruas Jalan Provinsi yang memiliki Penerangan Jalan Umum	Total panjang ruas jalan provinsi yang memiliki penerangan jalan umum yang melintas di masing-masing kabupaten/kota	-	Total	Km
Jumlah kebutuhan PJU	Jumlah PJU yang dibutuhkan pada masing-masing ruas jalan	-	Total	Unit
Jumlah PJU terpasang	Jumlah PJU yang telah terpasang pada masing-masing ruas jalan	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Daftar pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Data mengenai nama, lokasi, status dan kondisi pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan
Ukuran : -
Satuan : Pelabuhan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 633. Format Data Daftar pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Pelabuhan	Daftar pelabuhan penyebrangan yang terdapat di provinsi NTB	-	-	pelabuhan
Status	Kondisi pelabuhan pada tahun terakhir	1. Dibangun 2. Dikembangkan 3. Direncanakan	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

4) Daftar pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Data mengenai nama, lokasi, status, dan kondisi pelabuhan laut yang telah dibangun atau dikembangkan.
Ukuran : -
Satuan : Pelabuhan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 634. Format Data Daftar pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Pelabuhan	Daftar pelabuhan laut yang terdapat di provinsi NTB	-	-	pelabuhan
Status	Kondisi pelabuhan pada tahun terakhir	1. Dibangun 2. Dikembangkan 3. Direncanakan	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

5) Daftar Bandar Udara (Luas, Lokasi/Koordinat, Kategori)

Konsep : [K00212] Bandar Udara (Bandara)
Definisi : Data mengenai nama, lokasi, luas, koordinat dan kategori dari setiap bandar udara
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 635. Format Data Daftar Bandar Udara (Luas, Lokasi/Koordinat, Kategori)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Bandara	Daftar bandara yang terdapat di provinsi NTB	-	-	-
Lokasi	Alamat bandara	-	-	-
Koordinat	Titik koordinat bandara	-	-	-
Panjang *runway*	Panjang jalur lintas pesawat	-	Total	Km
Luas Gedung	Luas gedung bandara	-	Luas	M^2

6) Bongkar Muat Bagasi melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Konsep : [K00212] Bandar Udara (Bandara)
Definisi : Total berat bagasi yang dibongkar dan dimuat berdasarkan Rute penerbangan (Domestik-Internasional)
Ukuran : Total
Satuan : Kg
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 636. Format Data Bongkar Muat Bagasi melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Bandara	Daftar nama bandara yang tersedia di provinsi NTB	-	-	-
Rute Penerbangan	Jenis Penerbangan	1. Domestik 2. Internasional	-	-
Kategori Bagasi	-	1. Bongkar 2. Muat 3. Transit	-	-
Berat Bagasi	Total berat bagasi	-	Total	Kilogram
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September;	-	-

		10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

7) Bongkar Muat Kargo melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Konsep : [K00212] Bandar Udara (Bandara)
Definisi : Total berat kargo yang dibongkar dan dimuat berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)
Ukuran : Total
Satuan : Kg
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 637. Format Data Bongkar Muat Kargo melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Bandara	Daftar nama bandara yang tersedia di provinsi NTB	-	-	-
Rute Penerbangan	Jenis Penerbangan	1. Domestik 2. Internasional	-	-
Kategori Kargo	-	1. Bongkar 2. Muat 3. Transit	-	-
Berat Kargo	Total berat kargo	-	Total	Kilogram
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

8) Jumlah Penumpang melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Konsep : [K00212] Bandar Udara (Bandara)
Definisi : Total penumpang yang berangkat dan datang melalui bandara berdasarkan Rute (Domestik-Internasional) dalam periode tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 638. Format Data Jumlah Penumpang melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Bandara	Daftar nama bandara yang tersedia di provinsi NTB	-	-	-
Rute Penerbangan	Jenis Penerbangan	1. Domestik 2. Internasional	-	-
Kategori Penumpang	-	1. Bongkar 2. Muat	-	-

		3. Transit		
Jumlah Penumpang	Total penumpang	-	Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

9) Jumlah Pesawat melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Konsep : [K00212] Bandar Udara (Bandara)
Definisi : Total pesawat yang *take-off* dan *landing* di bandara yang ada Provinsi NTB berdasarkan rute penerbangan (domestik-internasional)
Ukuran : Total
Satuan : Unit Pesawat
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 639. Format Data Jumlah Pesawat melalui Bandara di Provinsi NTB berdasarkan Rute (Domestik-Internasional)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Bandara	Daftar nama bandara yang tersedia di provinsi NTB	-	-	-

Rute Penerbangan	Jenis Penerbangan	1. Domestik 2. Internasional	-	-
Aktivitas	-	1. Bongkar 2. Muat 3. Transit	-	-
Jumlah Pesawat	Total pesawat	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

10) Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB berdasarkan Jenis Komoditi

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Total berat barang (bongkar dan muat) di pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB yang dikelompokkan berdasarkan jenis komoditi yang diangkut
Ukuran : Total
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 640. Format Data Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB berdasarkan Jenis Komoditi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Pelabuhan	Daftar nama pelabuhan yang tersedia di provinsi NTB	-	-	-
Jenis Komoditi	Kelompok komoditi barang	1. Bahan pokok 2. Bahan Strategis 3. Migas 4. Non migas 5. Barang dalam kemasan	-	-
Nama Barang	Sesuai jenis barang	-	-	-
Kategori Barang	-	1. Bongkar 2. Muat	-	-
Jumlah	Total barang yang dibongkar dan dimuat dalam periode tahun tertentu	-	-	Sesuai jenis barang
Satuan	Satuan jumlah sesuai kategori barang	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

11) Bongkar Muat Hewan melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Total hewan yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB dalam periode tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 641. Format Data Bongkar Muat Hewan melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Pelabuhan	Daftar nama pelabuhan yang tersedia di provinsi NTB	-	-	-
Aktivitas	-	1. Bongkar 2. Muat	-	-
Jumlah	Total hewan yang dibongkar dan dimuat dalam periode tahun tertentu	-	-	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

12) Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Total penumpang yang berangkat maupun datang melalui pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 642. Format Data Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Pelabuhan	Daftar nama pelabuhan yang tersedia di provinsi NTB	-	-	-
Tujuan Pelayaran	Tujuan pelayaran penumpang	1. Luar negeri 2. Dalam negeri	-	-
Kategori Penumpang	-	1. Datang 2. Berangkat	-	-
Jumlah penumpang	Total penumpang yang datang dan berangkat dalam periode tahun tertentu	-	-	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli;	-	-

		8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

13) Jumlah Kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Total Kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano yang dikelompokkan menurut jenis kendaraan
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 643. Format Data Jumlah Kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Kendaraan	Jenis kendaraan berdasarkan golongan yang melalui pelabuhan	1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IVA 5. Golongan IVB 6. Golongan VA 7. Golongan VB 8. Golongan VIA	-	-

		9. Golongan VIB 10. Golongan VII 11. Golongan VIII 12. Golongan IX		
Jumlah Kendaraan	Total kendaraan yang melalui pelabuhan dalam periode tahun tertentu	-	-	unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

14) Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Total penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 644. Format Data Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Penumpang	Jenis penumpang yang melalui pelabuhan	1. Dewasa 2. Anak-anak	-	-
Jumlah penumpang	Total penumpang yang melalui pelabuhan dalam periode tahun tertentu	-	-	orang

Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

15) Jumlah Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano

Konsep : [K01321] Pelabuhan
Definisi : Banyaknya Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 645. Format Data Jumlah Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan-Pototano

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Kapal	Daftar kapal yang beroperasi di Pelabuhan Kayangan-Pototano	-	-	-
Nama Perusahaan	Daftar perusahaan yang menaungi kapal	-	-	-
Kapasitas Penumpang	Jumlah maksimal penumpang yang dapat dimuat kapal	-	Total	Orang

Kapasitas Kendaraan Roda 4	Jumlah maksimal kendaraan roda 4 yang dapat dimuat kapal	-	Total	Unit
Jumlah ABK	Banyaknya pegawai yang bekerja di kapal	-	Total	Orang
Tahun Pembuatan	Tahun kapal dibuat	-	-	-

16) Daftar Rute Angkutan Laut di Provinsi NTB

Konsep : [K00123] Angkutan Laut
Definisi : Daftar jalur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di wilayah Provinsi NTB, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi, termasuk rute internasional berdasarkan jenis (Barang dan Penumpang)
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 646. Format Data Daftar Rute Angkutan Laut di Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Rute	Rute angkutan laut	-	-	-
Tujuan	Tujuan angkutan laut	-	-	-
Pelayanan Kapal	Pelayanan Kapal	-	-	-

Jumlah Angkutan	Total angkutan sesuai rute, tujuan, dan pelayanan kapal	-	-	-
Kategori Angkutan	Kategori Angkutan	-	-	-

17) Jumlah Kendaraan melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB

Konsep : [K00853] Kendaraan Bermotor, [K02190] Terminal
Definisi : Total kendaraan untuk kendaraan penumpang antar-kota dalam provinsi (AKDP) melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB yang masuk dan keluar
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 647. Format Data Jumlah Kendaraan melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Terminal	Daftar terminal tipe B yang beroperasi di Provinsi NTB	-	-	-
Kategori Kendaraan	Jenis kendaraan yang melalui terminal	1. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 2. Angkutan Desa 3. Travel 4. Mobil 5. Sepeda Motor	-	-

		6. Pick Up 7. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) 8. Cidomo		
Jumlah Kendaraan	Banyaknya kendaraan yang melalui terminal dalam periode tahun tertentu	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

18) Jumlah Penumpang melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB

Konsep : [K01588] Penumpang, [K02190] Terminal
Definisi : Total penumpang yang Berangkat dan Datang melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 648. Format Data Jumlah Penumpang melalui Terminal Tipe B di Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Nama Terminal	Daftar terminal tipe B yang beroperasi di Provinsi NTB	-	-	-
Kategori Kendaraan	Jenis kendaraan yang melalui terminal	1. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 2. Angkutan Desa 3. Travel 4. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	-	-
Kategori Penumpang	Jenis Penumpang yang melalui terminal	1. Berangkat 2. Datang	-	-
Jumlah Penumpang	Banyaknya penumpang yang melalui terminal dalam periode tahun tertentu		Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data dihasilkan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

19) Jumlah Kendaraan yang memperpanjang Kartu Pengawasan Elektronik (KPE)

Konsep : [K00853] Kendaraan Bermotor
Definisi : Banyaknya kendaraan yang telah melakukan proses perpanjangan izin operasionalnya melalui penerbitan atau pembaruan KPE
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 649. Format Data Jumlah Kendaraan yang memperpanjang Kartu Pengawasan Elektronik (KPE)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Kendaraan	Jenis kendaraan yang melalui terminal	1. Taksi 2. Pariwisata 3. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 4. Angkutan Sewa Umum 5. Antar Jemput 6. Pemadu Moda 7. Angkutan Sewa Khusus 8. KSPN	-	-
Jumlah kendaraan	Banyaknya kendaraan yang memperpanjang kartu pengawasan elektronik (KPE)		Total	unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

20) Daftar Rute/Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Konsep : [K00691] Jaringan Trayek
Definisi : Daftar rute jalur perjalanan angkutan umum yang beroperasi dalam wilayah provinsi (AKDP), termasuk titik keberangkatan, pemberhentian, dan tujuan akhir.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 650. Format Data Daftar Rute/Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode AKDP	Kode angkutan kota dalam provinsi (AKDP)	-	-	-
Rute	Jalan tempuh AKDP	-	-	-

21) Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00793] Kecelakaan Transportasi
Definisi : Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Provinsi NTB
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 651. Format Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Satuan Polisi	Satuan kepolisian di setiap kabupaten/kota	1. Polres Lombok Barat 2. Polres Lombok Tengah 3. Polres Lombok Timur	-	-

		4. Polres Sumbawa 5. Polres Dompu 6. Polres Bima 7. Polres Sumbawa Barat 8. Polres Lombok Utara 9. Polres Kota Mataram 10. Polres Kota Bima		
Jumlah Kecelakaan	Banyaknya kecelakaan yang tercatat pada masing-masing polres		Total	kejadian
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

22) Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00974] Korban, [K00793] Kecelakaan Transportasi
Definisi : Banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan lalu lintas
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 652. Format Data Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Satuan Polisi	Satuan kepolisian di setiap kabupaten/kota	1. Polres Lombok Barat 2. Polres Lombok Tengah 3. Polres Lombok Timur 4. Polres Sumbawa 5. Polres Dompu 6. Polres Bima 7. Polres Sumbawa Barat 8. Polres Lombok Utara 9. Polres Kota Mataram 10. Polres Kota Bima	-	-
Kategori korban	Jenis kondisi korban kecelakaan	1. Meninggal dunia 2. Luka Berat 3. Luka Ringan		
Jumlah Korban	Banyaknya korban kecelakaan yang tercatat pada masing-masing polres		Total	Orang
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

23) Daftar Permohonan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Konsep : [K01049] Lalu Lintas
Definisi : Daftar dokumen yang mencatat permohonan izin serta hasil kajian dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan fasilitas umum atau kegiatan usaha tertentu.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dishub
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 653. Format Data Daftar Permohonan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama ANDALALIN	Daftar nama ANDALALIN	-	-	-
Status	Status permohonan dokumen ANDALALIN	1. Diterima 2. Ditolak	-	-
Kondisi	Keadaan gedung yang mengajukan permohonan dokumen ANDALALIN	1. Terbangun 2. Belum Terbangun	-	-
Tahun	Tahun permohonan dokumen ANDALALIN terverifikasi	-	-	-

2.35. Metadata Dinas Perindustrian

1) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Terfasilitasi Sertifikasi Halal

Konsep : Industri Kecil Menengah
Definisi : Banyaknya Industri kecil menengah yang produknya sudah tersertifikasi halal. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (Sumber: Permenperin Nomor 9 Tahun 2022). Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi ini didasarkan pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total IKM yang produknya telah mendapatkan sertifikasi halal
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perindustrian
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 654. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Terfasilitasi Sertifikasi Halal

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama IKM	Nama IKM yang produknya mendapat sertifikasi halal	-	-	-
Jenis Produk	Jenis produk yang memperoleh sertifikasi halal	-	-	-
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang terlatih dalam Meningkatkan Mutu Kemasan

Konsep : Industri Kecil Menengah

Definisi : Banyaknya Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendapatkan pelatihan untuk Meningkatkan Mutu Kemasan . Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (Sumber: Permenperin Nomor 9 Tahun 2022). Mutu Kemasan adalah sejauh mana kemasan memenuhi standar yang ditentukan, termasuk keamanan, daur ulang, dan pelabelan. Kemasan yang baik dapat meningkatkan mutu produk dan menarik minat konsumen.

Ukuran : Total

Satuan : Unit Usaha

Metode Perhitungan : Total IKM yang telah terlatih dalam meningkatkan mutu kemasan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Perindustrian

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 655. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang terlatih dalam Meningkatkan Mutu Kemasan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama IKM	Nama IKM yang terlatih meningkatkan mutu kemasan	-	-	-
Jenis Produk	Jenis produk yang ditingkatkan mutu kemasannya	-	-	-
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek

Konsep : Industri Kecil Menengah

Definisi : Banyaknya Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas

seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial.

Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total IKM yang produknya telah mendapatkan HKI
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perindustrian
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 656. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama IKM	Nama IKM yang produknya mendapatkan HKI	-	-	-
Jenis Produk	Jenis produk yang memperoleh HKI	-	-	-
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

4) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Wirausaha Baru (WUB)

Konsep : Industri Kecil Menengah
Definisi : Banyaknya Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Wirausaha Baru (WUB). Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Program Wirausaha Baru (WUB) adalah program yang bertujuan untuk mencetak wirausaha baru dan meningkatkan daya saing industri kecil menengah (IKM).
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total IKM yang telah tergabung dalam program WUB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perindustrian
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 657. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Wirausaha Baru (WUB)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama IKM	Nama IKM yang produknya terfasilitasi wirausaha baru (WUB)	-	-	-
Jenis Produk	Jenis produk yang terfasilitasi wirausaha baru (WUB)	-	-	-
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

5) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Konsep : Industri Kecil Menengah

Definisi : Banyaknya Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah persentase kandungan komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan keduanya. TKDN merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ukuran : Total

Satuan : Unit Usaha

Metode Perhitungan : Total IKM yang produknya telah memenuhi aspek TKDN

Sumber Data/Publikasi : Dinas Perindustrian

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 658. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya terfasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama IKM	Nama IKM yang produknya terfasilitasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	-	-	-
Jenis Produk	Jenis produk yang terfasilitasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	-	-	-
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Nilai	Nilai TKDN masing-masing IKM	-	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

6) Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi NTB

Konsep : Industri Kecil Menengah

Definisi : Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ukuran : Total

Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total Industri Kecil Menengah Formal dan Non Formal di Provinsi NTB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perindustrian
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 659. Format Data Daftar Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kategori Industri	Jenis Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah memiliki izin NIB (formal) dan yang belum memiliki izin (non formal)	1. Formal 2. Non Formal	-	-
Cabang Industri	Jenis Industri Kecil Menengah berdasarkan bidang usaha yang dimiliki	1. IKM Pengolahan Pangan 2. IKM Hulu Agro 3. IKM Permesinan 4. IKM Pertambangan 5. IKM Kimia Farmasi dan kosmetik 6. IKM Ekonomi Kreatif	-	-
Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki IKM	-	Total	Orang
Investasi	Jumlah modal yang ditempatkan pada IKM	-	Total	Rupiah
Nilai Produk	Nilai dari produk tersebut/harga satuan produk	-	Nilai	Rupiah

Bahan Baku	Nilai dari bahan baku pembuatan produk	-	Nilai	Rupiah
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

7) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan Cabang Industri dan Kabupaten/Kota (Klasifikasi Cabang Industri Sesuai Permenperin)

Konsep : Industri Kecil Menengah
Definisi : Banyaknya Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan Cabang Industri. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Ukuran : Total
Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total IKM dari masing-masing kabupaten/kota berdasarkan cabang industri
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 660. Format Data Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan Cabang Industri dan Kabupaten/Kota (Klasifikasi Cabang Industri Sesuai Permenperin)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kategori Industri	Jenis Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah memiliki izin NIB (formal) dan yang belum memiliki izin (non formal)	1. Formal 2. Non Formal	-	-
Cabang Industri	Jenis Industri Kecil Menengah berdasarkan bidang usaha yang dimiliki	1. IKM Pengolahan Pangan 2. IKM Hulu Agro 3. IKM Permesinan 4. IKM Pertambangan 5. IKM Kimia Farmasi dan kosmetik 6. IKM Ekonomi Kreatif	-	-
Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki IKM	-	Total	Orang
Investasi	Jumlah modal yang ditempatkan pada IKM	-	Total	Rupiah
Nilai Produk	Nilai dari produk tersebut/harga satuan produk	-	Nilai	Rupiah
Bahan Baku	Nilai dari bahan baku pembuatan produk	-	Nilai	Rupiah
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

8) Jumlah Industri Kecil berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota

Konsep : Industri Kecil Menengah

Definisi : Banyaknya Industri Kecil berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit). K00934. Konsep: [K00934] Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Pengklasifikasian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ukuran : Total

Satuan : Unit Usaha

Metode Perhitungan : Total IKM berdasarkan kategori

Sumber Data/Publikasi : -

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 661. Format Data Jumlah Industri Kecil berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Cabang Industri	Jenis Industri Kecil Menengah berdasarkan bidang usaha yang dimiliki	1. IKM Pengolahan Pangan 2. IKM Hulu Agro 3. IKM Permesinan 4. IKM Pertambangan 5. IKM Kimia Farmasi dan kosmetik 6. IKM Ekonomi Kreatif	-	-
Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki IKM	-	Total	Orang
Investasi	Jumlah modal yang ditempatkan pada IKM	-	Total	Rupiah
Nilai Produk	Nilai dari produk tersebut/harga satuan produk	-	Nilai	Rupiah
Bahan Baku	Nilai dari bahan baku pembuatan produk	-	Nilai	Rupiah
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

9) Jumlah Industri Mikro berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota

Konsep : Industri Kecil Menengah

Definisi : Banyaknya industri mikro berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 digit K00934. Konsep: [K00934] Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Pengklasifikasian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran : Total

Satuan : Unit Usaha
Metode Perhitungan : Total industri mikro berdasarkan kategori
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 662. Format Data Jumlah Industri Mikro berdasarkan Kategori (KBLI 5 digit) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Cabang Industri	Jenis Industri Kecil Menengah berdasarkan bidang usaha yang dimiliki	1. IKM Pengolahan Pangan 2. IKM Hulu Agro 3. IKM Permesinan 4. IKM Pertambangan 5. IKM Kimia Farmasi dan kosmetik 6. IKM Ekonomi Kreatif	-	-
Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki IKM	-	Total	Orang
Investasi	Jumlah modal yang ditempatkan pada IKM	-	Total	Rupiah
Nilai Produk	Nilai dari produk tersebut/harga satuan produk	-	Nilai	Rupiah
Bahan Baku	Nilai dari bahan baku pembuatan produk	-	Nilai	Rupiah
KBLI	-	Sesuai Lampiran 6	-	-
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2.36. Metadata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1) Jumlah Koleksi Perpustakaan berdasarkan Klasifikasi Subyek DDC

Konsep : [K00942] Koleksi Perpustakaan
Definisi : Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan sesuai dengan klasifikasi Subjek *Decimal Classification* (DDC)
Ukuran : Total
Satuan : Eksemplar/Judul
Metode Perhitungan : Jumlah semua judul buku berdasarkan klasifikasi Subjek DDC
Jumlah semua buku berdasarkan klasifikasi subjek DDC.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 663. Format Data Jumlah Koleksi Perpustakaan berdasarkan Klasifikasi Subyek DDC

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Klasifikasi Subjek DDC	Suatu panduan atau standar dalam mengelompokkan koleksi terutama buku di perpustakaan.	1. 000 - Karya Umum 2. 100 - Filsafat Dan Psikologi 3. 200 - Agama 4. 300 - Ilmu Sosial 5. 400 - Bahasa 6. 500 - Ilmu Murni 7. 600 - Ilmu Terapan 8. 700 - Kesenian Dan Olahraga	-	-

		9. 800 - Kesusastraan 10. 900 - Sejarah Dan Geografi 11. 999 - Lainnya		
Jumlah Judul	Banyaknya judul buku koleksi perpustakaan pada masing-masing klasifikasi subjek DDC	-	Total	Judul
Jumlah Buku	Banyaknya jumlah buku koleksi perpustakaan pada masing-masing klasifikasi subjek DDC	-	Total	Eksemplar
Tahun	Tahun pelaksanaan identifikasi koleksi perpustakaan	-	-	-

2) Jumlah Alih Media Koleksi Perpustakaan berdasarkan Jenis

Konsep : Alih Media, (K00942) Koleksi Perpustakaan
Definisi : Proses mengonversi bahan pustaka dari format aslinya ke format lain untuk tujuan pelestarian, kemudahan akses, atau efisiensi ruang. Proses ini dapat mencakup digitalisasi, mikrofilming, atau perubahan dari cetak ke format audiovisual.
Ukuran : Total
Satuan : Judul /Halaman
Metode Perhitungan : Jumlah koleksi yang dialihmediakan berdasarkan jenis media.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 664. Format Data Jumlah Alih Media Koleksi Perpustakaan berdasarkan Jenis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Media	Jenis media yang dialihmediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB	1. Koleksi Buku 2. Koleksi Naskah Kuno 3. Koleksi Surat Kabar 4. Naskah Buletin Pustaka 5. Naskah Kliping 6. Naskah Kumpulan Abstrak	-	-
Kategori Alih Media	-	Halaman Judul	-	-
Jumlah Buku	Banyaknya jumlah buku koleksi perpustakaan pada masing-masing klasifikasi subjek DDC	-	Total	Judul/ Halaman
Tahun	Tahun pelaksanaan penghitungan alih media koleksi perpustakaan	-	-	-

3) Jumlah Karya Cetak Karya Rekam Koleksi Deposit Daerah berdasarkan Jenis

Konsep : Koleksi deposit daerah
Definisi : Kumpulan karya cetak dan karya rekam yang wajib diserahkan oleh penerbit, penulis, atau produsen media di suatu daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya dan informasi lokal. Koleksi ini mencerminkan kekayaan intelektual dan dokumentasi perkembangan suatu daerah dalam berbagai bidang
Ukuran : Total
Satuan : Judul

Metode Perhitungan : Jumlah koleksi deposit yang dihitung berdasarkan jenis karya cetak dan rekam yang diterima dalam periode tertentu.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 665. Format Data Jumlah Karya Cetak Karya Rekam Koleksi Deposit Daerah berdasarkan Jenis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis KCKR	Jenis koleksi deposit daerah yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB	1. *Booklet* 2. Brosur 3. Buku 4. Buletin 5. Jurnal 6. Kaset CD 7. Kliping 8. Laporan 9. Majalah 10. Pamflet 11. Peta 12. Surat Kabar	-	-
Jumlah	Banyaknya koleksi deposit yang dihitung berdasarkan jenis karya cetak dan rekam yang diterima dalam periode tertentu	-	Total	Judul
Tahun	Tahun pelaksanaan penghitungan KCKR	-	-	-

4) Jumlah Kunjungan Perpustakaan berdasarkan Jenis Layanan

Konsep : Kunjungan Perpustakaan
Definisi : Jumlah pengguna yang mengakses perpustakaan baik secara langsung maupun daring, dikategorikan berdasarkan jenis layanan yang mereka gunakan. Data ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemanfaatan perpustakaan dan meningkatkan kualitas layanan.
Ukuran : Total
Satuan : Kunjungan
Metode Perhitungan : Jumlah kunjungan dihitung dengan mencatat setiap interaksi pengguna dengan perpustakaan berdasarkan layanan yang mereka gunakan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 666. Format Data Jumlah Kunjungan Perpustakaan berdasarkan Jenis Layanan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Layanan	Jenis layanan pada Perpustakaan NTB yang dikunjungi	1. Deposit 2. Internet 3. Kunjungan Berkelompok 4. Layanan Deposit 5. Layanan Internet 6. Layanan Kearsipan 7. Layanan Umum 8. NTBelib 9. Perpustakaan Keliling (Feeling) 10. Pocadi IC NTB 11. *Storytelling*	-	-

		12. Umum		
Jumlah Kunjungan	Jumlah pengguna yang mengakses perpustakaan baik secara langsung maupun daring, dikategorikan berdasarkan jenis layanan yang mereka gunakan	-	Total	Kunjungan
Tahun	Tahun pelaksanaan penghitungan jumlah kunjungan perpustakaan	-	-	-

5) Jumlah Anggota Perpustakaan berdasarkan Jenis Keanggotaan

Konsep : [K00109] Anggota Perpustakaan
Definisi : Pemustaka atau pengguna perpustakaan yang mendaftarkan diri sebagai anggota layanan perpustakaan dan memeroleh Kartu Tanda Anggota Perpustakaan.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah anggota perpustakaan dihitung dengan mencatat total pengguna yang terdaftar dalam sistem keanggotaan perpustakaan pada setiap jenis keanggotaan dalam satu periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 667. Format Data Jumlah Anggota Perpustakaan berdasarkan Jenis Keanggotaan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Anggota	Jenis keanggotaan yang dimiliki oleh anggota perpustakaan	1. Istimewa 2. Mahasiswa	-	-

		3. Pelajar 4. Umum 5. *Uncategorized*		
Jumlah Anggota Perpustakaan	Jumlah anggota perpustakaan pada masing-masing jenis keanggotaan perpustakaan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun pelaksanaan penghitungan anggota perpustakaan	-	-	-

6) Jumlah Pos dan Mobil Perpustakaan Keliling

Konsep : Perpustakaan keliling
Definisi : Jumlah layanan perpustakaan yang menggunakan kendaraan atau titik layanan sementara untuk menyediakan akses ke bahan bacaan di berbagai lokasi
Ukuran : Total
Satuan : Tempat/ Unit
Metode Perhitungan : Jumlah pos pelayanan perpustakaan keliling.
Jumlah unit mobil yang digunakan sebagai perpustakaan keliling.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 668. Format Data Jumlah Pos dan Mobil Perpustakaan Keliling

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Jenis Layanan	Jenis layanan perpustakaan keliling yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan NTB	1. Pos Perpustakaan Keliling 2. Mobil Perpustakaan Keliling	-	-
Jumlah	Jumlah layanan perpustakaan yang menggunakan kendaraan atau titik layanan sementara untuk menyediakan akses ke bahan bacaan di berbagai lokasi	-	Total	Tempat/ Unit
Tahun	Tahun pelaksanaan kegiatan pos dan mobil perpustakaan keliling.	-	-	-

7) Daftar Perpustakaan Terakreditasi di NTB

Konsep : [K00035] Akreditasi; [K01694] Perpustakaan

Definisi : Jumlah Perpustakaan yang telah lulus proses akreditasi dan mendapatkan sertifikat akreditasi dari lembaga berwenang, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) atau instansi terkait lainnya dalam periode tertentu.
[10920059] Predikat Akreditasi Perpustakaan: Predikat yang diberikan kepada perpustakaan berdasarkan nilai akreditasinya yang terdiri atas: 1. nilai 91,00—100 mendapatkan predikat A; 2. nilai 76,00—90,99 mendapatkan predikat B; 3. nilai 60,00—75,99 mendapatkan predikat C; dan 4. nilai kurang dari 60,00 mendapatkan predikat belum terakreditasi.

Ukuran : Total

Satuan : Perpustakaan

Metode Perhitungan : Jumlah perpustakaan terakreditasi dihitung berdasarkan data akreditasi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang dalam suatu periode tertentu

Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 669. Format Data Daftar Perpustakaan Terakreditasi di NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kategori Perpustakaan	Kategori perpustakaan yang tersedia pada masing-masing Kabupaten/Kota	1. Umum 2. Sekolah	-	-
Jenis Perpustakaan	Jenis perpustakaan yang tersedia pada masing-masing Kabupaten/Kota	1. Perguruan Tinggi 2. Perpustakaan Desa/Kelurahan 3. Perpustakaan Disarpus Lombok Barat 4. Perpustakaan DPK Provinsi/ Kabupaten/Kota 5. Perpustakaan Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor 6. SD/MI 7. Sekolah Luar Biasa 8. SMA/K,MA 9. SMP/MTS	-	-
Tipe Akreditasi	Tipe akreditasi yang diperoleh masing-masing jenis perpustakaan	1. Terakreditasi: Predikat A; Predikat B; Predikat C 2. Predikat belum terakreditasi	-	-
Jumlah	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi pada masing-masing jenis perpustakaan dan Tipe Akreditasi.	-	Total	Unit

Tahun	Tahun Instansi/Lembaga mendapatkan akreditasi perpustakaan	-	-	-

8) Jumlah Arsip berdasarkan Jenis

Konsep : [K02341] Arsip
Definisi : Jumlah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ukuran : Total
Satuan : Dokumen
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi dan menjumlahkan arsip berdasarkan jenisnya
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 670. Format Data Jumlah Arsip berdasarkan Jenis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Arsip	Jenis arsip	1. Statis 2. Inaktif		
Jumlah Arsip	Jumlah arsip berdasarkan jenis	-	Total	Dokumen
Tahun	Tahun pendataan	-	-	-

9) Jumlah Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) Koleksi Perpustakaan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Instansi	Daftar Instansi/Lembaga yang memiliki arsip	-	-	-
Jenis Arsip	Jenis Arsip yang dimiliki oleh masing-masing instansi	1. Statis 2. Inaktif	-	-
Jumlah	Banyaknya arsip yang dimiliki oleh masing-masing instansi.	-	Total	Dokumen
Tahun	Tahun pendataan	-	-	-

10) Sirkulasi koleksi perpustakaan

Definisi : Jumlah aktivitas keluar-masuknya bahan pustaka dalam sistem perpustakaan, mencakup peminjaman dan pengembalian buku atau koleksi lainnya.
Ukuran : Total
Satuan : Sirkulasi/Judul/Eksemplar.
Metode Perhitungan : Jumlah peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan selama satu tahun
Jumlah judul buku yang dipinjam dan dikembalikan selama satu tahun
Jumlah buku yang dipinjam dan dikembalikan selama satu tahun
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 671. Format Data Jumlah Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) Koleksi Perpustakaan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Peminjaman dan Pengembalian	Banyaknya aktivitas peminjaman dan pengembalian buku pada Dinas Perpustakaan NTB	-	Total	Sirkulasi
Jumlah Judul Buku	Banyaknya jumlah judul buku yang dipinjam dan dikembalikan	-	Total	Judul
Jumlah Buku	Banyaknya jumlah buku yang dipinjam dan dikembalikan	-	Total	Eksemplar
Tahun	Tahun penghitungan Jumlah Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) Koleksi Perpustakaan	-	-	-

11) Daftar *Record Center* berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : *Record Center*, Perangkat Daerah
Definisi : Fasilitas yang digunakan untuk menyimpan arsip perangkat daerah.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah *record center* pada setiap perangkat daerah.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 672. Format Data Daftar *Record Center* berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah *Record Center*	Banyaknya *Record Center* yang dimiliki masing-masing Perangka Daerah.	-	Total	Unit
Tahun	Tahun pendataan *record center* pada perangkat daerah.	-	-	-

12) Daftar Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial
Definisi : Perpustakaan yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga aktif dalam memberikan pelatihan keterampilan, mendukung kewirausahaan, serta meningkatkan literasi digital dan sosial bagi masyarakat
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 673. Format Data Daftar Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Jenis Perpustakaan	Jenis Perpustakaan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan	1. Perpustakaan Desa 2. Perpustakaan Kelurahan	-	-
Tahun	Tahun perpustakaan mendapat predikat inklusi sosial.	-	-	-

13) Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) berdasarkan Provinsi se-Indonesia

Konsep : [K01112] Literasi
Definisi : [10910005]: Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu
Ukuran : Indeks
Satuan : -

Metode Perhitungan : TGM = (0.3FM + 0.3DM + 0.3JB) + (0.05FAI + 0.05DAI)
Sumber Data/Publikasi : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Badan Pusat Statistik (BPS)
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 674. Format Data Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) berdasarkan Provinsi se-Indonesia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai TGM yang diperoleh setiap Kabupaten /Kota dan Provinsi NTB	-	Indeks	-
Predikat	Predikat yang diperoleh masing-masing kabupaten/kota sesuai nilai TGM yang diperoleh.	1. Sangat Rendah: Nilai 0–20 2. Rendah: Nilai 20,1–40 3. Sedang: Nilai 40,1–60 4. Tinggi: Nilai 60,1–80 5. Sangat Tinggi: Nilai 80,1–100	-	-
Tahun	Tahun rilis TGM	-	-	-

14) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : [K01112] Literasi
Definisi : [10310006] Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM): Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu: 1. Anggota Perpustakaan (UPLM7); 2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2); 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3); 4. Keterlibatan Masyarakat Di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6); 5. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1); 6. Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)

Ukuran : Indeks

Satuan : -

Metode Perhitungan : Rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas dua (2) komponen, antara lain: komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Rumus ini merupakan kumpulan dari rumus pengukuran rasio dari tujuh (7) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat beserta pembaginya dari komponen Aspek Masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari 4 komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja.

Sumber Data/Publikasi : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 675. Format Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) berdasarkan Provinsi se-Indonesia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

IPLM	Nilai IPLM yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB	-	Indeks	-
Kategori	Kategori yang ditetapkan untuk penilaian IPLM	1. Sangat Rendah (0-29,9), 2. Rendah (30-49,9), 3. Sedang (50-79,9), 4. Tinggi (80-89,9), dan 5. Sangat Tinggi (90- 100).	-	-
Tahun	Tahun rilis IPLM	-	-	-

15) Komponen Pembentuk Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Konsep : [K01112] Literasi

Definisi : [10910005]: Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Dimensi Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dibagi menjadi 5 (lima) dimensi yaitu: 1. Frekuensi membaca per minggu (FM): Seberapa sering individu melakukan aktivitas membaca dalam satu minggu; 2. Durasi membaca per hari (DM): Lama waktu yang dihabiskan untuk membaca setiap harinya; 3. Jumlah buku yang dibaca per triwulan (JB): Total buku yang diselesaikan dalam periode tiga bulan; 4. Frekuensi akses internet per minggu (FAI): Seberapa sering individu mengakses internet dalam satu minggu, yang dapat mencerminkan akses terhadap bahan bacaan digital; 5. Durasi akses internet per hari (DAI): Lama waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet setiap harinya.

Ukuran : Indeks

Satuan : -

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 676. Format Data Komponen Pembentuk Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Indikator	Nama Indikator yang menjadi komponen penilaian TGM	1. Frekuensi membaca 2. Durasi membaca 3. Jumlah buku yang dibaca 4. Frekuensi akses internet 5. Durasi akses internet	Indeks	-
Nilai Komponen	Nilai setiap Indikator penilaian TGM	-	-	Buku / Triwulan Jam / Hari Kali / Minggu
Tahun	Tahun rilis TGM	-	-	-

16) Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Konsep : [K01112] Literasi

Definisi : [10310006] Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM): Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu 1. Anggota Perpustakaan (UPLM7); 2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2); 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3); 4. Keterlibatan Masyarakat Di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6); 5. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1); 6. Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)

Ukuran : Total
Satuan : Poin
Metode Perhitungan :
Sumber Data/Publikasi : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 677. Format Data Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Komponen IPLM	Nama Komponen yang menjadi penilaian IPLM	1. Anggota Perpustakaan (UPLM7) 2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2) 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) 4. Keterlibatan Masyarakat Di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6) 5. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) 6. Perpustakaan Ber-snp (UPLM5) 7. Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	-	-
Nilai Komponen	Nilai setiap Komponen UPLM	-	Total	Poin
Tahun	Tahun keluarnya nilai IPLM	-	-	-

17) Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01694] Perpustakaan
Definisi : [10910096] Jumlah Perpustakaan: Banyaknya institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka dari berbagai jenis perpustakaan.
Ukuran : Total
Satuan : Perpustakaan
Metode Perhitungan : Mengidentifikasi dan menjumlahkan Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 678. Format Data Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Perpustakaan	Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang tentang perpustakaan.	1. PU. Perpustakaan Umum 2. PK. Perpustakaan Khusus 3. PS. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah	-	-

		4. PT. Perpustakaan Perguruan Tinggi		
Kategori Perpustakaan	Kategori perpustakaan pada masing-masing jenis perpustakaan	1. Nomor Pokok Perpustakaan 2. Non Nomor Pokok Perpustakaan	-	-
Jumlah	Jumlah perpustakaan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kategori perpustakaan.	-	Total	Perpusta-kaan
Tahun	Tahun pendataan perpustakaan berdasarkan jenis dan Kabupaten/Kota	-	-	-

2.37. Metadata Dinas Pertanian dan Perkebunan

1) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Jumlah Produksi Tanaman, Produksi, Luas Panen, Produktivitas Padi
Definisi	:	Produksi pertanian merupakan suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian. Jumlah Produksi pertanian: Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Luas Panen merupakan Luas area Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Produktivitas Padi: Produksi padi (padi sawah dan padi ladang) yang dihitung per satuan luas lahan. (Sumber: Analisis Produktivitas Padi di Indonesia 2023, BPS RI)
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Ton, Ha, Kuintal/ Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: menjumlahkan seluruh hasil panen dalam satu periode tertentu. Luas panen: metode Kerangka Sampel Area (sampel beberapa wilayah, titik2 pengamatan sudah ditentukan, difoto, di tagging, dividio, potensinya, kemudian estimasi luas panennya). Produktivitas = produksi di bagi luas panen. Produksi: Hasil perkalian antara luas panen (bersih) dengan produktivitas. Luas panen: Perhitungan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan HP berbasis android sehingga dapat diamati kondisi pertanaman di sampel segmen. (sampel beberapa wilayah, titik2 pengamatan sudah ditentukan, difoto, di tagging, dividio, potensinya, kemudian estimasi luas panennya).

Produktivitas: Estimasi angka produktivitas padi diperoleh dari Survei Ubinan berbasis sampel KSA. Penentuan lokasi sampel ubinan saat ini menggunakan aplikasi berbasis android.

Sumber Data/Publikasi : BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : bps.go.id

Tabel 679. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Padi	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Padi	Produksi padi yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jagung berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, Luas Panen, Produktivitas Jagung
Definisi	:	Produksi pertanian merupakan suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian. Luas Panen merupakan Luas area Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang Produktivitas merupakan produksi pada wilayah tertentu dalam satu periode dikelompokkan per kabupaten kota [24110264] Jumlah Produksi Palawija: Produksi Kuantitas hasil budi daya tanaman palawija (jagung) yang diukur berdasarkan luas panen dan produktivitas per hektar. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas Jagung: Produksi jagung yang dihitung per satuan luas lahan. (Sumber: Analisis Produktivitas Padi di Indonesia 2023, BPS RI)
Ukuran	:	Massa, Luas, Produktivitas
Satuan	:	Ton, Ha, Kuintal/ Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: menjumlahkan seluruh hasil panen dalam satu periode tertentu. Luas panen: metode Kerangka Sampel Area (sampel beberapa wilayah, titik2 pengamatan sudah ditentukan, difoto, di tagging, dividio, potensinya, kemudian estimasi luas panennya). Produktivitas = produksi di bagi luas panen Produksi: Hasil perkalian antara luas panen (bersih) dengan produktivitas. Luas panen: Perhitungan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan HP berbasis android sehingga dapat diamati kondisi pertanaman di sampel segmen tersebut. (sampel beberapa wilayah, titik2 pengamatan sudah ditentukan, difoto, di tagging, dividio, potensinya, kemudian estimasi luas panennya).

Produktivitas: Survei Ubinan berbasis sampel KSA. Penentuan lokasi sampel ubinan menggunakan aplikasi berbasis android

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPS

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 680. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jagung berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Jagung	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Jagung	Produksi jagung yang dihitung per satuan luas lahan	-	Total	Kuintal/ hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Mangga berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan mangga: jumlah produksi tanaman mangga yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 681. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Mangga berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Mangga	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman mangga yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Pohon
Produktivitas Mangga	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Pohon
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Manggis berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan manggis: jumlah produksi tanaman manggis yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Tanaman menghasilkan: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 682. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Manggis berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Manggis	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman manggis yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Pohon
Produktivitas Manggis	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Pohon
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pisang berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan pisang: jumlah produksi tanaman pisang yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Rumpun, Kuintal per Rumpun
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Tanaman menghasilkan: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 683. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pisang berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Pisang	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman pisang yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Rumpun
Produktivitas Pisang	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Rumpun
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Durian berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan durian: jumlah produksi tanaman Durian yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Tanaman menghasilkan: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 684. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Durian berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Durian	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman durian yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Pohon
Produktivitas Durian	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Pohon
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Rambutan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan rambutan: jumlah produksi tanaman rambutan yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Tanaman menghasilkan: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 685. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Rambutan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Rambutan	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman rambutan yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Pohon
Produktivitas Rambutan	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Pohon
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nangka berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan nangka: jumlah produksi tanaman nangka yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Tanaman menghasilkan: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 686. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nangka berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Nangka	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman nangka yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Pohon
Produktivitas Nangka	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Pohon
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nanas berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan nanas: jumlah produksi tanaman nanas yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Tanaman menghasilkan: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 687. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Nanas berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Nanas	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman nanas yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Pohon
Produktivitas Nanas	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Pohon
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pepaya berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman menghasilkan pepaya: jumlah produksi tanaman pepaya yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah pepaya yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Tanaman menghasilkan: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 688. Format Data Produksi, Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Pepaya berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Pepaya	Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim		Massa	Kuintal
Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman pepaya yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen		Luas	Hektar
Produktivitas Pepaya	Tingkat hasil panen yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Merah berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Produksi bawang merah: jumlah produksi tanaman bawang merah yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Hektar, Kuintal per Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 689. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Merah berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Bawang Merah	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Bawang Merah	Produksi bawang merah yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahu	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Besar berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Produksi cabai besar: jumlah produksi tanaman cabai besar yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 690. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Besar berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Cabai Besar	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Cabai Besar	Produksi cabai besar yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Rawit berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Produksi cabai rawit: jumlah produksi tanaman cabai rawit yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah cabai rawit yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Hektar, Kuintal per Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 691. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cabai Rawit berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Cabai Rawit	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Cabai Rawit	Produksi cabai rawit yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Putih berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Produksi bawang putih: jumlah produksi tanaman bawang putih yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen bawang putih yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 692. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bawang Putih berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Bawang Putih	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Bawang Putih	Produksi bawang putih yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tomat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Produksi tomat: jumlah produksi tanaman tomat yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen tomat yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 693. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tomat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Tomat	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Tomat	Produksi tomat yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

16) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kentang berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi kentang: jumlah produksi tanaman kentang yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen kentang yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Kuintal, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 694. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kentang berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kentang	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Kentang	Produksi kentang yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

17) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kubis berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi kubis: jumlah produksi tanaman kubis yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen kubis yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Kuintal, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 695. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kubis berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kubis	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Kubis	Produksi kubis yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

18) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Buncis berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi buncis: jumlah produksi tanaman buncis yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buncis yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Satuan : Kuintal, Hektar, Kuintal per Hektar

Satuan : Kuintal, Pohon, Kuintal per Pohon

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 696. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Buncis berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Buncis	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Kuintal
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Hektar
Produktivitas Buncis	Produksi buncis yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

19) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Tanah berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi pertanian merupakan suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian. Luas Panen merupakan Luas area Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang Produktivitas merupakan produksi pada wilayah tertentu dalam satu periode dikelompokkan per kabupaten kota

[24110264] Jumlah Produksi Palawija: Produksi Kuantitas hasil budi daya tanaman palawija (kacang tanah) yang diukur berdasarkan luas panen dan produktivitas per hektar.

[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen kacang tanah yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Ha, Kuintal/ Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 697. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Tanah berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kacang Tanah	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kacang Tanah	Produksi kacang tanah yang dihitung per satuan luas lahan	-	Total	Kuintal/ Hektar

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

20) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Kayu berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi pertanian merupakan suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian. Luas Panen merupakan Luas area Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang Produktivitas merupakan produksi pada wilayah tertentu dalam satu periode dikelompokkan per kabupaten kota [24110264] Jumlah Produksi Palawija: Produksi Kuantitas hasil budi daya tanaman palawija (ubi kayu) yang diukur berdasarkan luas panen dan produktivitas per hektar. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Ton, Ha, Kuintal/ Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 698. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Kayu berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Ubi Kayu	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Ubi Kayu	Produksi ubi kayu yang dihitung per satuan luas lahan	-	Total	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

21) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Jalar berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi pertanian merupakan suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian. Luas Panen merupakan Luas area Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang Produktivitas merupakan produksi pada wilayah tertentu dalam satu periode dikelompokkan per kabupaten kota [24110264] Jumlah Produksi Palawija: Produksi Kuantitas hasil budi daya tanaman palawija (ubi jalar) yang diukur berdasarkan luas panen dan produktivitas per hektar. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Ton, Ha, Kuintal/ Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 699. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Ubi Jalar berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Ubi Jalar	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Ubi Jalar	Produksi ubi jalar yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

22) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Hijau berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi pertanian merupakan suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditas pertanian. Luas Panen merupakan Luas area Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang Produktivitas merupakan produksi pada wilayah tertentu dalam satu periode dikelompokkan per kabupaten kota [24110264] Jumlah Produksi Palawija: Produksi Kuantitas hasil budi daya tanaman palawija (kacang hijau) yang diukur berdasarkan luas panen dan produktivitas per hektar. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Ton, Ha, Kuintal/ Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 700. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kacang Hijau berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kacang Hijau	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kacang Hijau	Produksi kacang hijau yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

23) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kelapa berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep	:	Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas
Definisi	:	Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan. Produksi kelapa: jumlah produksi pohon kelapa yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen. [24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Ukuran	:	Massa, Luas, Rata-rata
Satuan	:	Ton, Hektar, Kuintal per Hektar
Metode Perhitungan	:	Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan
Sumber Data/Publikasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 701. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kelapa berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kelapa	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kelapa	Produksi kelapa yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

24) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Robusta berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi kopi robusta: jumlah produksi kopi robusta yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 702. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Robusta berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Kopi Robusta	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kopi Robusta	Produksi kopi robusta yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

25) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Arabika berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi kopi arabika: jumlah produksi kopi arabika yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 703. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kopi Arabika berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kopi Arabika	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kopi Arabika	Produksi kopi arabika yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

26) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jambu Mete berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi jambu mete: jumlah produksi jambu mete yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 704. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jambu Mete berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Jambu Mete	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Jambu Mete	Produksi jambu mete yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

27) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kakao berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi kakao: jumlah produksi kakao yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 705. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kakao berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kakao	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kakao	Produksi kakao yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

28) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi tembakau rakyat: jumlah produksi tembakau rakyat yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 706. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Rakyat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Tembakau Rakyat	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Tembakau Rakyat	Produksi tembakau rakyat yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

29) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Virginia berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi tembakau virginia: jumlah produksi tembakau virginia yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 707. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tembakau Virginia berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Tembakau Virginia	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Tembakau Virginia	Produksi tembakau virginia yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

30) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tebu berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi tebu: jumlah produksi tebu yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 708. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Tebu berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Tebu	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Tebu	Produksi tebu yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

31) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Asam berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi asam: jumlah produksi asam yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 709. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Asam berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Asam	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Asam	Produksi asam yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

32) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lada berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi lada: jumlah produksi lada yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 710. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lada berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Lada	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Lada	Produksi lada yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

33) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kemiri berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi kemiri: jumlah produksi kemiri yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 711. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kemiri berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Kemiri	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kemiri	Produksi kemiri yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

34) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Aren berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi aren: jumlah produksi aren yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 712. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Aren berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Aren	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Aren	Produksi aren yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

35) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lontar berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi lontar: jumlah produksi lontar yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 713. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Lontar berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Lontar	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Lontar	Produksi lontar yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

36) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jarak Pagar berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi jarak pagar: jumlah produksi jarak pagar yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kg per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 714. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Jarak Pagar berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Jarak Pagar	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Jarak Pagar	Produksi jarak pagar yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

37) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cengkeh berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi cengkeh: jumlah produksi cengkeh yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 715. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Cengkeh berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Cengkeh	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Cengkeh	Produksi cengkeh yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

38) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kapuk berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi kapuk: jumlah produksi kapuk yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 716. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kapuk berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Kapuk	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Kapuk	Produksi kapuk yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

39) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Vanili berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi vanili: jumlah produksi vanili yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 717. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Vanili berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Vanili	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Vanili	Produksi vanili yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

40) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Wijen berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi wijen: jumlah produksi wijen yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 718. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Wijen berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Wijen	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Wijen	Produksi wijen yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

41) Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Pinang berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen, Produktivitas

Definisi : Produksi tanaman perkebunan merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.
Produksi pinang: jumlah produksi pinang yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Produktivitas: ukuran atau tingkat hasil panen buah mangga yang diperoleh dari suatu luas lahan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Ton, Hektar, Kuintal per Hektar

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Produktivitas: jumlah produksi dibagi luas lahan

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 719. Format Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Pinang berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Pinang	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen		Massa	Ton
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Ha
Produktivitas Pinang	Produksi pinang yang dihitung per satuan luas lahan	-	Rata-rata	Kuintal/ Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

42) Produksi dan Luas Panen Aglonema berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi aglonema: jumlah produksi tanaman aglonema yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Pohon, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 720. Format Data Produksi dan Luas Panen Aglonema berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Aglonema	Jumlah produksi tanaman Aglonema yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Pohon
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

43) Produksi dan Luas Panen Anthurium Bunga berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi anthrium bunga: jumlah produksi tanaman anthrium bunga yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Pohon,meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 721. Format Data Produksi dan Luas Panen Anthurium Bunga berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Anthurium Bunga	Jumlah produksi tanaman Anthurium Bunga yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Pohon
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

44) Produksi dan Luas Panen Krisan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi krisan: jumlah produksi tanaman krisan yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas
Satuan : Tangkai, meter persegi
Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 722. Format Data Produksi dan Luas Panen Krisan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Krisan	Jumlah produksi tanaman Krisan yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Tangkai
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

45) Produksi dan Luas Panen Mawar berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi mawar: jumlah produksi tanaman mawar yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Tangkai, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 723. Format Data Produksi dan Luas Panen Mawar berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Mawar	Jumlah produksi tanaman Mawar yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Tangkai
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

46) Produksi dan Luas Panen Melati berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi melati: jumlah produksi tanaman melati yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Tangkai, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 724. Format Data Produksi dan Luas Panen Melati berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Melati	Jumlah produksi tanaman Melati yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Tangkai
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

47) Produksi dan Luas Panen Palem berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi palem: jumlah produksi tanaman palem yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas, Rata-rata

Satuan : Pohon, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 725. Format Data Produksi dan Luas Panen Palem berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Palem	Jumlah produksi tanaman Palem yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Pohon
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

48) Produksi dan Luas Panen Jahe berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi jahe: jumlah produksi tanaman jahe yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Kg, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 726. Format Data Produksi dan Luas Panen Jahe berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan

Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Jahe	Jumlah produksi tanaman Jahe yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Kg
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

49) Produksi dan Luas Panen Laos/Lengkuas berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi laos/lengkuas: jumlah produksi tanaman laos/lengkuas yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Kg, meter persegi
Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 727. Format Data Produksi dan Luas Panen Laos/Lengkuas berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Laos/Lengkuas	Jumlah produksi tanaman Laos/Lengkuas yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Kg
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

50) Produksi dan Luas Panen Kunyit berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi kunyit: jumlah produksi tanaman kunyit yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Kg, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 728. Format Data Produksi dan Luas Panen Kunyit berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Kunyit	Jumlah produksi tanaman Kunyit yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Kg
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

51) Produksi dan Luas Panen Temukunci berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi temukunci: jumlah produksi tanaman temukunci yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Kg, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 729. Format Data Produksi dan Luas Panen Temukunci berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Produksi Temukunci	Jumlah produksi tanaman Temukunci yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Kg
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

52) Produksi dan Luas Panen Lempuyang berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Produksi, [K01282] Panen, Luas Panen

Definisi : Produksi hortikultura merupakan hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan, dimana tanaman ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
Produksi lempuyang: jumlah produksi tanaman lempuyang yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.
[24110214] Luas Panen: Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Ukuran : Massa, Luas

Satuan : Kg, meter persegi

Metode Perhitungan : Produksi: Jumlah pohon produktif dikali Rata-rata hasil per pohon
Luas Panen: Jumlah lahan yang dipanen (m^2) dibagi 1 hektar

Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 730. Format Data Produksi dan Luas Panen Lempuyang berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Produksi Lempuyang	Jumlah produksi tanaman Lempuyang yang dihasilkan berdasarkan luas yang dipanen.		Massa	Kg
Luas Panen	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.		Luas	Meter persegi
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

53) Luas Lahan Pertanian berdasarkan Jenis Pengairan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01036] Lahan Pertanian (Agricultural Land), [K00324] Daerah Irigasi
Definisi : Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan berdasarkan jenis pengairan (sawah irigasi, sawah non irigasi, dan sawah tadah hujan) yang dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Menghitung luas lahan pertanian pada setiap jenis pengairan yang digunakan meliputi sawah irigasi, sawah non irigasi, dan sawah tadah hujan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 731. Format Data Luas Lahan Pertanian berdasarkan Jenis Pengairan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Pengairan	Jenis pengairan yang digunakan untuk mengklasifikasi lahan pertanian.	1. Sawah Irigasi 2. Sawah Non Irigasi 3. Sawah Tadah Hujan	-	-
Luas Lahan	Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan		Luas	Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

54) Luas Pertanaman yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota

Konsep : Pertanaman, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Definisi : Ukuran atau besaran luas lahan tanaman pertanian (dalam hektar) yang terkena serangan Organisme Pengganggu Tanaman secara kumulatif (ringan, sedang, maupun berat) dalam suatu periode tertentu.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Luas pertanaman yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) baik ringan, sedang, maupun berat
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 732. Format Data Luas Pertanaman yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Tanaman	Jenis Tanaman yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	-	-	-
Kumulatif Luas Tambah Serang	Luas pertanaman yang terserang (OPT) baik ringan/sedang/ berat		Luas	Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

55) Luas Pertanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota

Konsep : Pertanaman, Dampak Perubahan Iklim (DPI)
Definisi : luas lahan pertanian (dalam satuan hektar) yang mengalami gangguan atau kerusakan pada tanaman akibat fenomena iklim ekstrem atau perubahan pola cuaca yang tidak normal, dalam periode waktu tertentu.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : Luas pertanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada setiap jenis komoditi yang terserang pada masing-masing Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 733. Format Data Luas Pertanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) berdasarkan Komoditi dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis DPI	Jenis perubahan iklim yang mengakibatkan gagal panen	-	-	-
Jenis Tanaman	Jenis tanaman yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI)	-	-	-
Total Lahan Terkena	Luas lahan yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI)	-	Luas	Hektar
Total Lahan Puso	Luas lahan yang tidak mengeluarkan hasil panen, yang disebabkan karena dampak perubahan iklim sehingga hasil panen tidak lebih dari 11% dari keadaan normal.	-	Luas	Hektar
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

56) Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Kelas dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00826] Kelompok Tani (Poktan)

Definisi : Banyaknya Kumpulan petani yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, data ini dikelompokkan berdasarkan kelas kelompok tani (pemula, lanjut, madya, dan utama) dan Kabupaten/Kota.

Ukuran : Total
Satuan : Kelompok
Metode Perhitungan : Jumlah kelompok tani pada masing-masing kelas kelompok tani di setiap kabupaten/kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 734. Format Data Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Kelas dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kelas Kelompok Tani	Penggolongan kelompok tani berdasarkan kelas tertentu.	1. Utama 2. Madya 3. Lanjut 4. Pemula 5. Belum Diketahui	Massa	Ton
Jumlah Kelompok Tani	Banyaknya Kumpulan petani yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk		Total	Kelompok

	meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

57) Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Pembinaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00826] Kelompok Tani (Poktan)
Definisi : Jumlah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang Mendapatkan Pembinaan yaitu yang telah menerima bimbingan, pelatihan, pendampingan, atau fasilitasi dari instansi pemerintah, penyuluh pertanian, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak swasta dalam rangka peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha tani selama periode tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Kelompok, Gapoktan, Lembaga
Metode Perhitungan : Jumlah masing-masing kelompok tani, Gapoktan, dan KEP yang mendapatkan pembinaan pada setiap kabupaten/kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 735. Format Data Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Pembinaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jumlah Kelompok Tani	Banyaknya kelompok tani yang mendapatkan pembinaan.	-	Total	Kelompok
Jumlah Gapoktan	Banyaknya Gapoktan yang mendapatkan pembinaan.	-	Total	Kelompok
Jumlah KEP	Banyaknya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendapatkan pembinaan.	-	Total	Kelompok
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

58) Jumlah Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota

Konsep : Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
Definisi : Jumlah Bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun non pemerintah berupa pupuk subsidi, sarana/peralatan produksi, bibit, atau lainnya. data ini dikelompokkan berdasarkan jenis dan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Jumlah bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang diperoleh petani pada masing-masing sumber pendanaan yaitu APBN maupun APBD pada setiap kabupaten/kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 736. Format Data Jumlah Bantuan Alat Mesin Pertanian berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Sumber Dana	Sumber dana pemberi bantuan alat mesin pertanian (Alsintan)	1. APBN 2. APBD	-	-
Jenis Alsintan	Jenis bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang diberikan	-	-	-
Jumlah Alsintan	Jumlah Bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun non pemerintah berupa pupuk subsidi, sarana/peralatan produksi, bibit, atau lainnya. data ini dikelompokkan berdasarkan jenis dan Kabupaten/Kota	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

59) Jumlah Target dan Realisasi Pupuk Subsidi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01833] Pupuk.
Definisi : [24110265] Jumlah Realisasi Pupuk Bersubsidi: Banyaknya realisasi penyaluran pupuk dengan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
Ukuran : Total
Satuan : Ton
Metode Perhitungan : Penjumlahan realisasi pupuk subsidi pada setiap kabupaten kota.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 737. Format Data Jumlah Target dan Realisasi Pupuk Subsidi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Pupuk	Jenis pupuk subsidi yang akan dialokasikan	1. NPK 2. NPK Formula Khusus 3. Organik Cair 4. Organik Granul 5. SP-36 6. Urea 7. ZA	-	-
Alokasi	Ketersediaan pupuk subsidi yang akan dialokasikan	-	Total	Ton
Realisasi	Banyaknya realisasi penyaluran pupuk dengan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian	-	Total	Ton
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

60) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Definisi : Luas keseluruhan lahan pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah melalui peraturan tata ruang, yang diperuntukkan dan dilindungi secara hukum untuk digunakan secara berkelanjutan dalam produksi pangan pokok demi menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : https://jdih.ntbprov.go.id/content/peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2013

Tabel 738. Format Data Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kategori	Kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berupa Lahan Sawah Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-	-
Luas Lahan	Luas keseluruhan lahan pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah	-	Luas	Hektar

	pusat atau daerah melalui peraturan tata ruang, yang diperuntukkan dan dilindungi secara hukum untuk digunakan secara berkelanjutan dalam produksi pangan pokok demi menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan nasional			
Penetapan	Regulasi yang mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	-	-	-

61) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Definisi : Luas wilayah atau lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kawasan lindung pertanian yang harus dipertahankan secara berkelanjutan untuk produksi pangan nasional, agar tidak dialihfungsikan menjadi penggunaan non-pertanian.
Ukuran : Luas
Satuan : Ha
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 739. Format Data Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Luas Lahan	Luas wilayah atau lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kawasan lindung pertanian yang harus dipertahankan secara berkelanjutan untuk produksi pangan nasional, agar tidak dialihfungsikan menjadi penggunaan non-pertanian	-	Luas	Hektar
Penetapan	Regulasi yang mengatur tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.38. Metadata Dinas Perumahan dan Permukiman

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Status Kerawanan Bencana dan Potensi Relokasi Daerah

Konsep : [K01915] Rumah Layak Huni; [K00974] Korban; [K00255] Bencana
Definisi : Banyaknya Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang disediakan dan direhabilitasi bagi Korban Bencana.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 740. Format Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Status Kerawanan Bencana dan Potensi Relokasi Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Tingkat Kerusakan Rumah	Tingkat kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan fisik, kerusakan struktural, atau kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam.	1. Rusak Berat: Tingkat kerusakan 46% - 70% 2. Rusak Sedang: Tingkat kerusakan 31% - 45%	-	-

		3. Rusak Ringan: Tingkat kerusakan 0 - 30%		
Jumlah Kerusakan Rumah	Banyaknya kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan fisik, kerusakan struktural, atau kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam.	Jumlah	-	Unit
Perbaikan dan Pembangunan Rumah	Perbaikan dan pembangunan rumah bagi korban bencana provinsi dipertimbangkan berdasarkan status kerawanan bencana dan potensi relokasi daerah. Ini melibatkan pembangunan rumah baru di lokasi yang lebih aman atau perbaikan rumah yang terdampak, tergantung pada kerusakan dan rekomendasi relokasi	1. Rumah Selesai 2. Rumah Dalam Tahap Pengerjaan Fisik 3. Rumah Dalam Tahap Perencanaan	-	-
Jumlah	Banyaknya rumah yang mendapatkan perbaikan dan pembangunan rumah.	-	Jumlah	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Rumah Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Status Ekonomi dan Kepemilikan Rumah

Konsep : K01714] Perumahan
Definisi : Banyaknya Rumah yang diidentifikasi pada perumahan yang berpotensi terkena relokasi program Provinsi dan diklasifikasikan berdasarkan status ekonomi dan kepemilikan rumah.
Ukuran : Total
Satuan : Unit

Metode Perhitungan : Total Rumah hasil Identifikasi Perumahan di lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Provinsi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 741. Format Data Jumlah Rumah Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Status Ekonomi dan Kepemilikan Rumah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kegiatan	Kegiatan yang mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang perumahan yang terdampak, termasuk jumlah rumah, kepala keluarga, jumlah jiwa, dan status kepemilikan tanah.	-	-	-
Luas Permukiman	[K00759] Besaran dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.	-	-	-
Jumlah Rumah	Banyaknya Rumah yang diidentifikasi pada perumahan yang berpotensi terkena relokasi program Provinsi dan diklasifikasikan berdasarkan status ekonomi dan kepemilikan rumah	-	-	-

Jumlah KK	Indikator yang menunjukkan jumlah rumah tangga atau keluarga yang tercatat dalam administrasi kependudukan di suatu wilayah.	-	Jumlah	Kepala Keluarga
Jumlah Jiwa	Total orang atau penduduk dalam suatu wilayah tertentu.	-	-	Jiwa
Kondisi Fisik Rumah	Kondisi fisik bangunan tempat tinggal yang harus memenuhi standar tertentu terkait keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni. Ini mencakup aspek seperti struktur bangunan, ventilasi, pencahayaan, kelembapan, kebersihan, dan akses air bersih. [UU No. 1 Tahun 2011]	RLH atau RTLH	Jumah	Unit
Kepemilikan Rumah	Status legal di mana seseorang atau entitas memiliki hak atas sebuah rumah, termasuk hak untuk mendiami, menggunakan, dan menjualnya.	1. Hak Milik 2. Sewa 3. Lainnya	-	Unit
Status Kepemilikan Tanah	Status kepemilikan tanah bisa dikategorikan sebagai legal (sah) atau ilegal (tidak sah). Kepemilikan tanah yang sah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara itu, kepemilikan tanah yang tidak sah bisa terjadi jika seseorang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat, atau jika kepemilikan	1. Legal 2. Ilegal	-	-

	tersebut diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum.			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : 10710081, Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah yang Memenuhi Syarat Ketahanan Bangunan, [K01915] Rumah Layak Huni; K02365] Ketahanan Bangunan

Definisi : Bagian dari seluruh rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan bangunan atap, dinding, dan lantai terluasnya memiliki daya tahan sehingga kuat dan aman untuk jangka waktu lama.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Metode Perhitungan : Total rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100 persen.
Jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas memenuhi syarat ketahanan bangunan dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100 persen.
Jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan bangunan utama lantai rumah terluas memenuhi syarat ketahanan bangunan dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100 persen.
Jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan bangunan utama dinding rumah terluas memenuhi syarat ketahanan bangunan dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100 persen.

Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 742. Format Data Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Ketahanan Bangunan	Daya tahan suatu bangunan yang ditinjau dari bahan bangunan atap, dinding, dan lantai terluas yang memenuhi syarat sehingga dapat berdiri dan ditempati secara aman untuk jangka waktu lama.	1. Tidak Layak 2. Layak Huni	-	-
Persentase (%)	K01925] Rumah Tangga, [K02365] Ketahanan Bangunan. [K00171] Atap. Bagian dari seluruh rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan utama atap terluas memenuhi syarat ketahanan bangunan. [K00385] Dinding. Bagian dari seluruh rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan utama dinding terluas memiliki daya tahan berdiri dan aman untuk jangka waktu lama. [K01056] Lantai. Bagian dari seluruh rumah tangga yang menempati rumah	-	Persen	Persen

	dengan bahan utama lantai terluas memiliki daya tahan dan aman untuk jangka waktu lama.			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan jenis bukti kepemilikan lahan bangunan tempat tinggal berupa sertifikat berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00215] Bangunan Tempat Tinggal, [K00864] Kepemilikan , Aset atau Dokumen; [K01019] Lahan
Definisi : Banyaknya rumah tangga dengan kepemilikan Keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan seluruhnya atau utamanya untuk tempat menetap dengan status milik sendiri dengan bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat yang diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Rumah Tangga
Metode Perhitungan : Total rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri dan memiliki sertifikat.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 743. Format Data Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan jenis bukti kepemilikan lahan bangunan tempat tinggal berupa sertifikat berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-

Jumlah Penduduk	Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap.	-	Total	Orang
ART	Peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar (AD) yang mengatur tata tertib, hak dan kewajiban warga, serta operasional lingkungan perumahan.	Jumlah	-	Persen
Proyeksi Jumlah RT	Proyeksi jumlah rumah tangga merupakan perkiraan atau estimasi mengenai jumlah rumah tangga yang akan ada di masa depan.	-	Jumlah	Rumah Tangga
Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri (%)	Bangunan yang dimiliki secara sah oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang menempati bangunan tersebut.	-	-	Persen
Jumlah RT Dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri	[K00215] Bangunan Tempat Tinggal; Bangunan yang dimiliki secara sah oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang menempati bangunan tersebut.	-	Jumlah	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : [K01915] Rumah Layak Huni; [K01479] Penduduk Miskin
Definisi : Banyaknya Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang dimiliki penduduk miskin berdasarkan Desa/Kelurahan
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Rumah Tidak layak Huni yang dimiliki masyarakat miskin
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 744. Format Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	-	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	-	-	-
Kode Kecamatan	-	-	-	-
Nama Kecamatan	-	-	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	-	-	-
Nama Kelurahan/Desa	-	-	-	-

Jumlah RTLH	Banyaknya rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : [K01915] Rumah Layak Huni; [K01479] Penduduk Miskin
Definisi : Banyaknya Rumah tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang dimiliki penduduk miskin dan berhasil ditangani.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Rumah Tidak layak Huni yang dimiliki masyarakat miskin dan sudah ditangani
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 745. Format Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-

Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Jenis Penanganan	Jenis Penanganan RTLH yang merupakan program bantuan pemerintah untuk memperbaiki atau membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.	1. Pembangunan Baru (PB) 2. Peningkatan Kualitas (PK)	-	-
Jumlah RTLH Masyarakat Miskin yang Tertangani	Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin yang Tertangani.	-	Jumlah	Unit
Sumber Anggaran	Sumber pendanaan dari berbagai sumber yang di alokasikan kepada RTLH Masyarakat Miskin.	1. APBN 2. APBD 1 3. APBD 2 4. BAZNAS 5. CSR 6. LAINNYA	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Definisi : Banyaknya Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. (Sumber: Permen PUPR RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus)

Ukuran : Total

Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masing-masing Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 746. Format Data Jumlah Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Jenis Penanganan	BSPS memiliki dua jenis penanganan utama: Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS). PKRS digunakan untuk memperbaiki rumah yang sudah ada, sedangkan PBRS untuk membangun rumah baru, terutama untuk mengganti rumah	1. Pembangunan Baru (PB) 2. Peningkatan Kualitas (PK)	-	Unit

	rusak total atau membangun di atas tanah kavling			
Jumlah (Unit)	Banyaknya rumah yang mendapatkan BSPS.	-	Jumlah	Unit
Sumber Anggaran	Sumber anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.	1. APBN	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : Permukiman Kumuh
Definisi : Banyaknya kawasan permukiman yang tidak layak huni pada luasan 10-15 Ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. (Sumber: Permen PUPR RI Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh).
Ukuran : Total
Satuan : Hektar
Metode Perhitungan : Total kawasan permukiman kumuh pada Desa/kelurahan tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 747. Format Data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Jumlah	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : Permukiman Kumuh
Definisi : Banyaknya kawasan permukiman yang tidak layak huni pada luasan 10-15 Ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan berhasil ditangani. (Sumber: Permen PUPR RI Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh).
Ukuran : Total
Satuan : Hektar
Metode Perhitungan : Total kawasan permukiman kumuh yang berhasil ditangani pada Desa/kelurahan tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 748. Format Data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	-	-	Jumlah	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Jumlah Kawasan Permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) berdasarkan Desa/Kelurahan

Konsep : [K00759] Kawasan Permukiman

Definisi : Banyaknya bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan dan dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Ukuran : Total
Satuan : Hektar
Metode Perhitungan : Total kawasan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) pada Desa/kelurahan tertentu
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 749. Format Data Jumlah Kawasan Permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) berdasarkan Desa/Kelurahan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PPSU) Sumber Dana (PAD)	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PPSU) adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan dan memelihara fasilitas umum seperti jalan, saluran air, penerangan, dan fasilitas lainnya	Nomor Paket dan Nama Desa/Kelurahan	-	-

	di suatu wilayah, yang dalam hal ini di tingkat kelurahan. PPSU bertujuan untuk memastikan kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan, serta mencegah gangguan terhadap kepentingan masyarakat. Pembiayaan PPSU yang bersumber dari dana PAD yang merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah.			
Jumlah (Unit)	Banyaknya Paket PPSU	-	Jumlah	Unit
Harga Satuan (Rp.)	-	-	Total	Rupiah
Pagu (Rp.)	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan	Nominal Pagu	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

Konsep : K01714] Perumahan
Definisi : Banyaknya Rumah yang diidentifikasi pada perumahan yang berada pada lokasi rawan bencana
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Rumah hasil Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana

Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 750. Format Data Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Jenis Bencana	-	1. Gunung Api 2. Gempa Bumi 3. Tsunami	-	-
Luas Perumahan	Luas Perumahan di kawasan rawan bencana	-	Luas	Hektar
Jumlah Rumah	Jumlah rumah di kawasan rawan bencana	-	Total	Unit
Jumlah KK	Jumlah KK di kawasan rawan bencana	-	Total	KK
Jumlah Jiwa	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana	-	Total	Jiwa
RLH	Jumlah rumah dengan kondisi layak huni di kawasan rawan bencana		Total	Unit
RTLH	Jumlah rumah dengan kondisi tidak layak huni di kawasan rawan bencana		Total	Unit
Hak Milik	Jumlah rumah dengan status kepemilikan adalah milik sendiri di kawasan rawan bencana		Total	Unit

Sewa	Jumlah rumah dengan status kepemilikan adalah sewa di kawasan rawan bencana		Total	Unit
Tahun	Tahun data disajikan			

12) Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Provinsi

Konsep : K01714] Perumahan
Definisi : Luas lahan potensial yang akan digunakan sebagai relokasi perumahan Provinsi.
Ukuran : Luas
Satuan : Hektar
Metode Perhitungan : Total Luas lahan potensial yang akan digunakan sebagai relokasi perumahan Provinsi.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 751. Format Data Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kota lokasi lahan potensial	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	Kecamatan lokasi lahan potensial	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-

Nama Kelurahan/Desa	Desa/Kelurahan lokasi lahan potensial	Lampiran 4	-	-
Luas Lahan	Luas lahan potensial sebagai kawasan relokasi perumahan provinsi	-	Luas	Hektar
Pemilik	Pemilik lahan	-		
Tahun	Tahun data disajikan	-		

13) Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi

Konsep : K01714] Perumahan
Definisi : Banyaknya rumah yang terkena/terdampak bencana provinsi.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total rumah yang terkena/terdampak bencana provinsi.
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 752. Format Data Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota terjadinya bencana	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-

Nama Kecamatan	Kecamatan terjadinya bencana	Lampiran 3	-	-
Jenis Bencana	-	1. Gunung Api 2. Gempa Bumi 3. Tsunami	-	-
Tahun terjadi bencana	Tahun terjadi bencana	-	-	-
Jumlah rumah yang rusak	jumlah rumah yang rusak akibat terjadinya bencana	-	Total	Unit
Rusak Ringan	jumlah rumah yang rusak ringan akibat terjadinya bencana	-	Total	Unit
Rusak Sedang	jumlah rumah yang rusak Sedang akibat terjadinya bencana	-	Total	Unit
Rusak Berat	jumlah rumah yang rusak berat akibat terjadinya bencana	-	Total	Unit
Hak Milik	Jumlah rumah dengan status kepemilikan adalah milik sendiri	-	Total	Unit
Sewa	Jumlah rumah dengan status kepemilikan adalah sewa	-	Total	Unit
Lainnya	Jumlah rumah dengan status kepemilikan adalah lainnya	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data disajikan	-	-	-

14) Identifikasi Perumahan di Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Konsep : K01714] Perumahan
Definisi : Banyaknya rumah yang berada pada lokasi pengembangan Kawasan strategis Provinsi
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total rumah yang berada pada lokasi pengembangan Kawasan strategis Provinsi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 753. Format Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	Kecamatan lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	Desa/kelurahan lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi	Lampiran 4	-	-
Kawasan Pengembangan	Nama Kawasan Pengembangan	-	-	-

Luas Lahan	Luas lahan pengembangan kawasan strategis provinsi	-	Luas	Hektar
Jumlah rumah	jumlah rumah pada lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi	-	total	unit
Jumlah KK	Jumlah KK pada lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi	-	Total	KK
MBR	Banyaknya rumah dengan kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah	-	Total	Unit
Non MBR	Banyaknya rumah dengan kondisi ekonomi masyarakat tidak berpenghasilan rendah	-	Total	Unit
Legal	Status Kepemilikan tanah legal	-	Total	Unit
Ilegal	Status Kepemilikan tanah ilegal	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data disajikan	-	-	-

15) Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha)

Konsep : K01714] Perumahan
Definisi : Banyaknya kawasan permukiman yang tidak layak huni pada luasan 10-15 Ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan berhasil ditangani.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total rumah yang berada pada di Kawasan Kumuh
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 754. Format Data Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota lokasi kawasan kumuh	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	Kecamatan kawasan kumuh	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	Desa/kelurahan lokasi kawasan kumuh	Lampiran 4	-	-
Luas lahan	Luas lahan kawasan kumus	-	Luas	Hektar
Jumlah Rumah	Jumlah rumah pada kawasan kumuh	-	Total	Unit
Jumlah KK	Jumlah KK pada kawasan kumuh	-	Total	KK
Tingkat kekumuhan		-	-	-
Keterangan		-	-	-
Tahun	Tahun data disajikan	-	-	-

16) Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Konsep : K01714] Perumahan
Definisi : Banyaknya Rumah yang diidentifikasi pada perumahan yang berpotensi terkena relokasi program Provinsi dan diklasifikasikan berdasarkan status ekonomi dan kepemilikan rumah.
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total Rumah hasil Identifikasi Perumahan di lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Provinsi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Perumahan dan Permukiman
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 755. Format Data Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota lokasi terkena relokasi	Lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	Kecamatan lokasi terkena relokasi	Lampiran 3	-	-
Kode Kelurahan/Desa	-	Lampiran 4	-	-
Nama Kelurahan/Desa	Desa/kelurahan lokasi terkena relokasi	Lampiran 4	-	-
Jenis Program relokasi	Jenis program relokasi yang dilaksanakan	-	-	-

Jumlah rumah terdampak	jumlah rumah terdampak relokasi	-	total	unit
Jumlah KK	Jumlah KK terdampak relokasi	-	Total	KK
Jumlah Jiwa	Jumlah masyarakat yang terdampak relokasi	-	Total	Orang
MBR	Banyaknya rumah dengan kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah	-	Total	Unit
Non MBR	Banyaknya rumah dengan kondisi ekonomi masyarakat tidak berpenghasilan rendah	-	Total	Unit
Legal	Status Kepemilikan tanah legal	-	Total	Unit
Ilegal	Status Kepemilikan tanah ilegal	-	Total	Unit
Sudah Terlayani_ Ganti Aset	banyaknya rumah yang sudah terlayani dengan cara mengganti aset	-	Total	Unit
Sudah Terlayani_ Subsidi sewa	Banyaknya rumah yang sudah terlayani dengan cara subsidi sewa	-	Total	Unit
Sudah Terlayani_ Penyediaan RLH	Banyaknya rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni	-	Total	Unit
Belum terlayani	Banyaknya rumah yang belum terlayani	-	Total	Unit

2.39. Metadata Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1) Populasi Ternak berdasarkan Jenis Ternak

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak
Banyaknya hewan yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Klasifikasi: Jenis Ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total ternak untuk setiap jenis ternak
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 756. Format Data Populasi Ternak berdasarkan Jenis Ternak

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Ternak	-	1. Sapi 2. Kerbau 3. Kuda 4. Kambing 5. Domba 6. Babi 7. Rusa 8. Kelinci	-	-

Populasi Ternak	Total ternak untuk masing-masing jenis ternak	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2) Populasi Unggas berdasarkan Jenis Unggas

Konsep : Unggas
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Klasifikasi: Jenis Unggas.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : penjumlahan total untuk setiap jenis Unggas
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 757. Format Data Populasi Unggas berdasarkan Jenis Unggas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Ternak	-	1. Ayam Buras 2. Ayam Ras Pedaging 3. Ayam Ras Petelur 4. Merpati 5. Puyuh 6. Itik 7. Itik Manila	-	-

Populasi Ternak	Total ternak untuk masing-masing jenis ternak	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

3) Populasi Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak, Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak. Banyaknya hewan yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Klasifikasi: Jenis Ternak, Usia Ternak, dan Jenis kelamin ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : penjumlahan total untuk setiap jenis ternak
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 758. Format Data Populasi Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak, Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Ternak	-	1. Sapi 2. Kerbau 3. Kuda 4. Kambing 5. Domba 6. Babi 7. Rusa	-	-

		8. Kelinci		
Kelompok Usia	-	1. 0-1 Tahu 2. 1-2 Tahun 3. >2 Tahun	-	-
Jenis Kelamin	-	1. Jantan 2. Betina	-	-
Populasi Ternak	Total ternak untuk masing-masing jenis ternak	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

4) Jumlah Pemotongan Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak

Konsep : [K01420] Pemotongan Ternak
Definisi : [24110060] Jumlah Ternak yang Dipotong. Banyaknya ternak yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi: Jenis Ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Penjumlahan total untuk setiap jenis ternak yang dipotong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 759. Format Data Jumlah Pemotongan Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Ternak	-	1. Sapi 2. Kerbau 3. Kuda 4. Kambing 5. Domba 6. Babi 7. Rusa 8. Kelinci	-	-
Jumlah Pemotongan Ternak	Total ternak untuk masing-masing jenis ternak yang dipotong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

5) Populasi Ayam Buras berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Ayam Buras) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Klasifikasi: Wilayah
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total ayam buras
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 760. Format Data Populasi Ayam Buras berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Ayam Buras	Total ayam buras	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

6) Populasi Ayam Petelur berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak

Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Ayam petelur) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.

Ukuran : Total

Satuan : Ekor

Metode Perhitungan : Total ayam petelur

Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 761. Format Data Populasi Ayam Petelur berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Ayam Ras Petelur	Total ayam ras petelur	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

7) Populasi Ayam Ras Pedaging berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Ayam pedaging) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total ayam pedaging
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 762. Format Data Populasi Ayam Ras Pedaging berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Ayam Ras Pedaging	Total ayam ras pedaging	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

8) Populasi Babi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Babi) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total Babi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 763. Format Data Populasi Babi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Babi	Total babi	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

9) Populasi Domba berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Domba) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total domba
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 764. Format Data Populasi Domba berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Domba	Total domba	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

10) Populasi Itik berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Itik) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total Itik
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : Kepka 846

Tabel 765. Format Data Populasi Itik berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Itik	Total itik	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

11) Populasi Itik Manila berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Itik Manila) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total Itik Manila
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 766. Format Data Populasi Itik Manila berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Itik Manila	Total itik manila	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

12) Populasi Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (Kambing) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total kambing
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 767. Format Data Populasi Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Kambing	Total kambing	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

13) Populasi Kelinci berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (kelinci) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total kelinci
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 768. Format Data Populasi Kelinci berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Kelinci	Total kelinci	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

14) Populasi Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (kerbau) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total kerbau
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 769. Format Data Populasi Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Kerbau	Total kerbau	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

15) Populasi Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (kuda) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Klasifikasi: Wilayah
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total kuda
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 770. Format Data Populasi Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Kuda	Total kuda	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

16) Populasi Merpati berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (merpati) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total merpati
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 771. Format Data Populasi Merpati berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Merpati	Total merpati	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

17) Populasi Puyuh berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (puyuh) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total puyuh
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 772. Format Data Populasi Puyuh berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Puyuh	Total puyuh	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

18) Populasi Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110233] Jumlah Ternak (Disesuaikan). Banyaknya hewan (sapi potong) yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total sapi potong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 773. Format Data Populasi Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Populasi Sapi Potong	Total sapi potong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

19) Pemotongan Babi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01420] Pemotongan Ternak
Definisi : [24110060] Jumlah Ternak yang Dipotong (disesuaikan). Banyaknya ternak babi yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi: Jenis Ternak
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Penjumlahan total babi yang dipotong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 774. Format Data Pemotongan Babi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah Pemotongan Babi	Total babi yang dipotong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

20) Pemotongan Domba berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01420] Pemotongan Ternak
Definisi : [24110060] Jumlah Ternak yang Dipotong (disesuaikan). Banyaknya ternak domba yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi: Jenis Ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Penjumlahan total domba yang dipotong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 775. Format Data Pemotongan Domba berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah Pemotongan Domba	Total domba yang dipotong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

21) Pemotongan Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01420] Pemotongan Ternak
Definisi : [24110060] Jumlah Ternak yang Dipotong (disesuaikan). Banyaknya ternak kambing yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi: Jenis Ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Penjumlahan total kambing yang dipotong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 776. Format Data Pemotongan Kambing berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah Pemotongan Kambing	Total kambing yang dipotong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

22) Pemotongan Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01420] Pemotongan Ternak
Definisi : [24110060] Jumlah Ternak yang Dipotong (disesuaikan). Banyaknya ternak kerbau yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi: Jenis Ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Penjumlahan total kerbau yang dipotong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 777. Format Data Pemotongan Kerbau berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah Pemotongan Kerbau	Total kerbau yang dipotong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

23) Pemotongan Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01420] Pemotongan Ternak
Definisi : [24110060] Jumlah Ternak yang Dipotong (disesuaikan). Banyaknya ternak kuda yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi: Jenis Ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Penjumlahan total kuda yang dipotong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 778. Format Data Pemotongan Kuda berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah Pemotongan Kuda	Total kuda yang dipotong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

24) Pemotongan Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01420] Pemotongan Ternak
Definisi : [24110060] Jumlah Ternak yang Dipotong (disesuaikan). Banyaknya ternak sapi potong yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi: Jenis Ternak.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Penjumlahan total sapi potong yang dipotong
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 779. Format Data Pemotongan Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah Pemotongan Sapi Potong	Total sapi potong yang dipotong	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

25) Jumlah Kasus Hewan Tertular PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota

Konsep : Penyakit Hewan
Definisi : Banyaknya hewan ternak yang terinfeksi penyakit hewan menular strategis (PHMS). PHMS merupakan Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : Jumlah kasus untuk setiap jenis penyakit
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 780. Format Data Jumlah Kasus Hewan Tertular PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis PHMS	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Jumlah Kasus PHMS	Banyaknya hewan yang terinfeksi PHMS	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

26) Persentase perkembangan Ternak yang Terinfeksi PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota

Konsep : Penyakit Hewan
Definisi : penurunan jumlah ternak yang terinfeksi penyakit hewan menular strategis.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : jumlah hewan yang terinfeksi PHMS tahun t - jumlah hewan yang terinfeksi PHMS tahun t-1 / jumlah ternak yang terinfeksi PHMS tahun t-1 * 100
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 781. Format Data Persentase Penurunan perkembangan Ternak yang Terinfeksi PHMS berdasarkan Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis PHMS	-	Sesuai Lampiran 7	-	-
Jumlah Kasus PHMS	Banyaknya hewan yang terinfeksi PHMS	-	Total	Ekor
Persentase Perkembangan PHMS	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

27) Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi; [K00338] Daging (Meatyield)
Definisi : [24110101] Jumlah Produksi Daging. Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (*edible portion*), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.
Ukuran : Massa
Satuan : Kilogram
Metode Perhitungan : Meatyield = daging murni + jeroan + daging variasi (*edible portion*)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 782. Format Data Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Ternak	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Produksi Daging	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Total	Kilogram
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

28) Produksi Telur Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01779] Produksi
Definisi : [24110113] Jumlah Produksi Telur Unggas. Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.
Ukuran : Massa
Satuan : Kilogram
Metode Perhitungan : PTt = P0(t) x BP x Pr
Keterangan:
PTt: Produksi/Penyediaan Telur tahun t

P0(t): Populasi ayam ras petelur tahun t
BP: Persentase Betina Produktif terhadap Populasi
Pr: Produktivitas per ekor betina produktif (jumlah telur yang dihasilkan per ekor per tahun dalam satuan kg

Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 783. Format Data Produksi Telur Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Ternak	-	- Ayam Buras - Ayam Ras - Itik	-	-
Produksi Telur	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Total	Kilogram
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

29) Jumlah Ternak Potong dan Bibit yang dikirim ke Luar Daerah berdasarkan Jenis Ternak

Konsep : [K02197] Ternak; [K01584] Penjualan
Definisi : [24110280] Jumlah Ternak Keluar (Disesuaikan). Banyaknya hewan peliharaan dan hasil ternak yang dikirim ke luar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri, baik melalui penjualan dan/atau pengurangan lain.
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total ternak yang dikirim ke luar daerah
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 784. Format Data Jumlah Ternak Potong dan Bibit yang dikirim ke Luar Daerah berdasarkan Jenis Ternak

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Komoditas	-	Sesuai dengan komoditas ternak yang dikirim	-	-
Jumlah yang dikirim	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Total	
Satuan	Satuan disesuaikan dengan jenis ternak yang dikirim			
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

30) Jumlah Ternak dan Hasil Ternak yang masuk ke dalam Daerah berdasarkan Komoditas

Konsep : [K02197] Ternak
Definisi : [24110281] Jumlah Ternak yang masuk (Disesuaikan). Banyaknya ternak dan hasil ternak yang didatangkan dari luar kabupaten/kota, provinsi, atau luar negeri, melalui pembelian dan/atau penambahan lain seperti ternak bantuan.
Ukuran : Total Massa
Satuan : Ekor Kilogram
Metode Perhitungan : Total ternak dan hasil ternak yang masuk ke NTB
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 785. Format Data Jumlah Ternak dan Hasil Ternak yang masuk ke dalam Daerah berdasarkan Komoditas

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Komoditas	-	Sesuai dengan komoditas ternak yang dikirim	-	-
Jumlah yang masuk	Sesuai dengan metode perhitungan	-	Total	
Satuan	Satuan disesuaikan dengan jenis ternak yang masuk			
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

31) Jumlah Kelompok Ternak yang dibina berdasarkan Komoditas dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00826] Kelompok Tani (Poktan)
Definisi : Banyaknya kelompok ternak yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ukuran : Total
Satuan : Kelompok
Metode Perhitungan : Total kelompok ternak yang mendapatkan pembinaan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 786. Format Data Jumlah Kelompok Ternak yang dibina berdasarkan Komoditas dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Kelompok Ternak	-	- Sapi - Kerbau - Kambing - Unggas - Pengolahan	-	-
Jumlah Kelompok Ternak	Total kelompok ternak yang mendapatkan pembinaan dari dinas peternakan Provinsi	-	Total	Kelompok
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

32) Jumlah UKM Produk Peternakan yang dibina berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : UKM
Definisi : Banyaknya UKM Produk Peternakan yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ukuran : Total
Satuan : Unit usaha
Metode Perhitungan : Total UKM Produk Peternakan yang mendapatkan pembinaan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 787. Format Data Jumlah UKM Produk Peternakan yang dibina berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah UKM yang dibina	Total UKM bidnag peternakan yang mendapatkan pembinaan dari dinas peternakan Provinsi	-	Total	Usaha
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

33) Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Peternakan berdasarkan Jenis Sarana dan Kabupaten/Kota

Konsep : Sarana Prasarana
Definisi : Banyaknya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan peternakan
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total sarana dan prasarana pendukung peternakan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 788. Format Data Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Peternakan berdasarkan Jenis Sarana dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Sarana	-	- Pasar Hewan - Pos Inseminasi Buatan - Puskeswan - Rumah Potong Hewan - Tempat Pemotongan Hewan		
Jumlah Sarana	Total sarana peternakan	-	Total	Unit
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

34) Nilai Tukar Petani Peternakan

Konsep : [K01744] Petani
Definisi : [27010042] Nilai Tukar Petani (disesuaikan). Angka yang menggambarkan daya beli petani peternakan serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi.
Ukuran : Rasio
Satuan : -
Metode Perhitungan : Membandingkan Indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani dikalikan 100
Sumber Data/Publikasi : BPS NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 789. Format Data Nilai Tukar Petani Peternakan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nilai Tukar Petani	Angka yang menggambarkan daya beli petani peternakan serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-
Bulan	Bulan data yang bersangkutan	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

35) Daftar Kelompok Tani Ternak (KTT) berbasis Korporasi

Konsep : [K00826] Kelompok Tani (Poktan)
Definisi : Daftar kelompok tani ternak yang berbasis korporasi
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 790. Format Data Daftar Kelompok Tani Ternak (KTT) berbasis Korporasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Korporasi	-	-	-	-
Nama Kelompok	Nama kelompok yang tergabung dalam suatu korporasi	-	-	-

36) Jumlah Sapi Inseminasi Buatan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Inseminasi Buatan
Definisi : Banyaknya sapi yang dihasilkan/lahir dari proses inseminasi buatan dalam 1 tahun
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total sapi hasil inseminasi buatan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 791. Format Data Jumlah Sapi Inseminasi Buatan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jumlah IB	Jumlah inseminasi yang disuntikkan	-	Total	Akseptor
Jumlah Kelahiran	Jumlah kelahiran hasil inseminasi buatan	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

37) Jumlah Ternak yang di-Vaksinasi berdasarkan Jenis Vaksin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Vaksinasi
Definisi : Banyaknya ternak yang mendapatkan vaksinasi
Ukuran : Total
Satuan : Ekor
Metode Perhitungan : Total ternak yang di vaksinasi
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 792. Format Data Jumlah Ternak yang di-Vaksinasi berdasarkan Jenis Vaksin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Vaksin	-	- Vaksin PMK - Vaksin Rabies - Vaksin Anthrax	-	-
Jumlah Ternak	Jumlah ternak yang mendapatkan vaksinasi	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

38) Jumlah *Day Old Chicken* (DOC) yang didistribusikan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : *Day-old chicken*
Definisi : Banyaknya *day old chicken* yang didistribusikan dalam 1 tahun
Ukuran : total
Satuan : ekor
Metode Perhitungan : Total DOC yang didistribusikan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 793. Format Data Jumlah *Day Old Chicken* (DOC) yang didistribusikan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Ternak	-	- Ayam Ras Pedaging - Ayam Ras Petelur	-	-
Jumlah Ternak	Jumlah DOC yang didistribusikan	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

39) Unit Usaha yang Memiliki Sertifikasi NKV

Konsep : Usaha Sertifikasi
Definisi : Banyaknya unit usaha yang memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner dalam 1 tahun
Ukuran : Total
Satuan : Unit usaha
Metode Perhitungan : Total unit usaha yang mendapatkan sertifikasi NKV
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 794. Format Data Unit Usaha yang Memiliki Sertifikasi NKV

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Kode Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Nama Kecamatan	-	Sesuai Lampiran 3	-	-
Kode Desa/Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Desa Kelurahan	-	Sesuai Lampiran 4	-	-
Nama Unit Usaha	Nama unit usaha yang memiliki NKV	-	-	-
Jenis Unit Usaha	-	1. RPHR 2. BUP 3. CS 4. GK 5. UCSBW	-	-
Level NKV	-	1. Level I 2. Level II 3. Level III		
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

40) Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Peternakan Berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02159] Tenaga Kerja
Definisi : Banyaknya tenaga kerja yang diserap pada sektor peternakan
Ukuran : Total
Satuan : orang
Metode Perhitungan : total tenaga kerja pada sektor peternakan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 795. Format Data Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Peternakan Berdasarkan Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Ternak	Komoditas kelompok ternak	1. Sapi 2. Kerbau 3. Kuda 4. Kambing 5. Domba 6. Babi 7. Ayam Buras 8. Ayam Ras Pedaging 9. Itik	-	-
Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	-	Total	Ekor

Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

41) Jumlah Tenaga Lapang Bidang Peternakan Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K02159] Tenaga Kerja
Definisi : Banyaknya tenaga lapang bidang peternakan
Ukuran : Total
Satuan : orang
Metode Perhitungan : total tenaga kerja lapang bidang peternakan
Sumber Data/Publikasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 796. Format Data Jumlah Tenaga Lapang Bidang Peternakan Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai lampiran 2	-	-
Jenis Ketenagaan	-	1. Wasbitnak 2. Wastukan 3. Dokter Hewan Puskeswan 4. Pengawas Obat Hewan 5. Paramedis 6. Inseminator 7. PKB	-	-

Jumlah Tenaga lapang	Jumlah tenaga lapang bidang peternakan	-	Total	Ekor
Tahun	Tahun data dihasilkan	-	-	-

2.40. Metadata Dinas Sosial

1) Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT/Sembako berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Bantuan Sosial
Definisi : [K00225] Bantuan Sosial: Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
[K01800] Program Bantuan Sosial Sembako (BPNT): Bantuan sosial pangan senilai Rp200.000/KPM/bulan yang ditukarkan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan disalurkan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme uang elektronik.
Ukuran : Total
Satuan : KK
Metode Perhitungan : Total keluarga yang menerima bantuan sosial dari program BPNT yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 797. Format Data Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT/Sembako berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Total keluarga yang menerima bantuan sosial dari program BPNT	-	Total	KK

	yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program PKH berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Bantuan Sosial
Definisi : [K00225] Bantuan Sosial
[K01807] Program Keluarga Harapan (PKH): Program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin. Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Ukuran : Total
Satuan : KK
Metode Perhitungan : Total keluarga yang menerima bantuan sosial dari program PKH yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 798. Format Data Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program PKH berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Total keluarga yang menerima bantuan sosial dari program PKH yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	KK
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Bantuan Sosial

Definisi : [K00225] Bantuan Sosial
[K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total individu yang menerima bantuan sosial berupa bantuan iuran JKN yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota

Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 799. Format Data Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Penerima Bantuan	Total individu yang menerima bantuan sosial berupa bantuan iuran JKN yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Konsep : Bantuan Sosial

Definisi : [K00225] Bantuan Sosial

[K01685] Perlindungan Sosial: Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespons beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

[K00677] Jaminan Sosial: Suatu program perlindungan sosial yang diberikan kepada peserta yang telah melakukan pembayaran iuran.

Ukuran : Total

Satuan : KK; Orang
Metode Perhitungan : Total individu atau Keluarga (korban bencana) yang menerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 800. Format Data Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin korban bencana	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Kelompok Umur	Kelompok umur korban bencana	-	-	-
Jumlah Individu	Total individu (korban bencana) yang menerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Keluarga dan Individu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Definisi : [K00907] Kesejahteraan Sosial: Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Data utama yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial.

Ukuran : Total
Satuan : KK; Orang
Metode Perhitungan : Total keluarga dan individu yang terdaftar dalam DTKS yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Kementerian Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 801. Format Data Jumlah Keluarga dan Individu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah KK dalam DTKS	Jumlah KK dalam DTKS	-	Total	KK
Jumlah Individu dalam DTKS	Jumlah Individu dalam DTKS	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah Wanita Penerima Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita "Mirah Adi" berdasarkan Jenis Rehabilitasi dan Kabupaten/Kota

Konsep : Rehabilitasi Sosial
Definisi : [K01871] Rehabilitasi Sosial: Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total wanita yang menerima Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi yang disajikan berdasarkan jenis rehabilitasi dan Nama Kabupaten/ Kota. Jenis rehabilitasi:
1. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), 2. Wanita Tuna Susila (WTS), 3. Wanita Rawan Tindak Asusila (WRTA), 4. Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), 5. Wanita Korban *Trafficking*
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 802. Format Data Jumlah Wanita Penerima Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita "Mirah Adi" berdasarkan Jenis Rehabilitasi dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Rehabilitasi	Jenis rehabilitasi yang disiapkan oleh Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"	1. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 2. Wanita Tuna Susila (WTS)	-	-

		3. Wanita Rawan Tindak Asusila (WRTA) 4. Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK) 5. Wanita Korban *Trafficking*		
Jumlah Penerima Rehabilitasi Sosial	Total wanita yang menerima Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita "Mirah Adi" yang disajikan berdasarkan jenis rehabilitasi dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri" berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Pelatihan Keterampilan

Definisi : Pelatihan keterampilan adalah program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan teknik khusus. Pelatihan ini diberikan kepada individu, dengan jenis pelatihan sebagai berikut:
1. Tata Boga, 2. Tata Rias, 3. Tata Busana, 4. Otomotif, 5. Pengelasan, 6. Pendingin

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total individu yang menerima pelatihan keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri yang disajikan berdasarkan jenis pelatihan, jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota.
Jenis pelatihan keterampilan:

1. Tata Boga, 2. Tata Rias, 3. Tata Busana, 4. Otomotif, 5. Pengelasan, 6. Pendingin (AC, AC Mobil, dan Kulkas)

Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 803. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri" berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Pelatihan	Jenis pelatihan ketrampilan yang disiapkan oleh Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"	1. Tata Boga 2. Tata Rias 3. Tata Busana 4. Otomotif 5. Pengelasan 6. Pendingin	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta pelatihan ketrampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan	Total peserta pelatihan ketrampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Jumlah Anak Asuh pada Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Anak Asuh
Definisi : Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga karena orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Dalam pengasuhan ini, anak asuh akan mendapatkan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah anak asuh pada Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 804. Format Data Jumlah Anak Asuh pada Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin anak asuh pada Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan"	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-

Jumlah Anak Asuh	Jumlah anak asuh pada Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan" yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Mandalika" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Lanjut Usia
Definisi : Lanjut usia (lansia) adalah sebutan untuk orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah lanjut usia (lansia) pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 805. Format Data Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Mandalika" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Kelamin	Jenis kelamin lanjut usia (lansia) pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Mandalika"	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia (lansia) pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Mandalika" berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Jumlah Anak Penerima Perlindungan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Perlindungan Anak
Definisi : [K01681] Perlindungan Anak: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah anak yang menerima perlindungan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 806. Format Data Jumlah Anak Penerima Perlindungan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin anak yang menerima perlindungan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa"	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Anak Penerima Perlindungan	Jumlah anak yang menerima perlindungan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Jumlah Disabilitas Penerima Pemberdayaan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Penyandang Disabilitas

Definisi : [K01596] Penyandang Disabilitas: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah penyandang disabilitas yang diberdayakan pada PPSPAPPD "Sasambo Matupa" yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota. Jenis Pemberdayaan:
1. Membatik, 2. Desain Grafis, 3. Bengkel Las

Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 807. Format Data Jumlah Disabilitas Penerima Pemberdayaan pada PPSPAPPD “Sasambo Matupa” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Pemberdayaan	Jenis pemberdayaan disabilitas yang disiapkan oleh PPSPAPPD “Sasambo Matupa”	1. Membatik 2. Desain Grafis 3. Bengkel Las	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penyandang disabilitas yang diberdayakan pada PPSPAPPD “Sasambo Matupa”	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Disabilitas Penerima Pemberdayaan	Jumlah penyandang disabilitas yang diberdayakan pada PPSPAPPD “Sasambo Matupa” yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya "Madani" berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Pelatihan Keterampilan
Definisi : Pelatihan keterampilan adalah program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan teknik khusus. Pelatihan ini dapat dilakukan untuk individu, kelompok, organisasi, atau lembaga.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah individu yang menerima pelatihan keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani berdasarkan jenis pelatihan, jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota. Jenis pelatihan keterampilan:
1.Otomotif, 2.Pertukangan, 3.Tata Boga, 4.Menjahit
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 808. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya "Madani" berdasarkan Jenis Pelatihan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Jenis Pelatihan	Jenis pelatihan keterampilan yang disiapkan oleh Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya “Madani”	1. Otomotif 2. Pertukangan 3. Tata Boga 4. Menjahit	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta pelatihan keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya “Madani”	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan	Jumlah individu yang menerima pelatihan keterampilan pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya “Madani” berdasarkan jenis pelatihan, jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Lanjut Usia
Definisi : Lanjut usia (lansia) adalah sebutan untuk orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Jumlah lanjut usia (lansia) pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 809. Format Data Jumlah Lanjut Usia pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin lanjut usia (lansia) pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Meci Angi"	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia (lansia) pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Meci Angi" yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras "Muthmainnah" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : Rehabilitasi Sosial
Definisi : [K01871] Rehabilitasi Sosial: Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang direhabilitasi pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah yang disajikan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota

Sumber Data/Publikasi : Dinas Sosial

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 810. Format Data Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras "Muthmainnah" berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang direhabilitasi pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras "Muthmainnah"	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Penerima Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang direhabilitasi pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras "Muthmainnah" yang disajikan jenis kelamin dan Nama Kabupaten/ Kota	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis

Konsep : Orang terlantar; [K01596] Penyandang Disabilitas; Anak terlantar; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); Gelandangan; Pengemis

Definisi : Orang terlantar: Seseorang yang mengalami kesulitan hidup, tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak memiliki sumber penghasilan.
[K01596] Penyandang Disabilitas: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Anak terlantar: Anak yang tidak mendapatkan asuhan yang layak, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, atau bahkan dieksploitasi.
[K01055] Lanjut Usia (Lansia): Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
Gelandangan: Orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sering berpindah-pindah
Pengemis: Orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta kepada orang lain

Ukuran : -

Satuan : -

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : -

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 811. Format Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-

Nama	Nama penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	-	-	-
NIK	NIK yang bersangkutan	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis Kelamin yang bersangkutan	-	-	-
Tempat dan Tanggal Lahir	Tempat dan tanggal Lahir yang bersangkutan	-	-	-
Alamat	Alamat yang bersangkutan	-	-	-
Tinggal di Dalam Keluarga	Posisi tinggal/domisili yang bersangkutan	1. Di Keluarga (Rumah) 2. Di Luar Keluarga	-	-
Hubungan dengan Kepala Keluarga	Hubungan yang bersangkutan dengan Kepala Keluarga	-	-	-
Nomor KK	Nomor KK yang bersangkutan	-	-	-
Tinggal di Luar Keluarga	Posisi tinggal/domisili yang bersangkutan di luar keluarga	1. Panti 2. Komunitas 3. Jalanan 4. Pasar 5. Terminal 6. Lainnya	-	-
Status Perkawinan	Status perkawinan yang bersangkutan	-	-	-
Pekerjaan/Sekolah	Pekerjaan/sekolah yang bersangkutan	-	-	-
Jenis Disabilitas	Jenis disabilitas jika yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas	-	-	-
Kondisi Ketelantaran – Keluarga/ Masyarakat/ Seseorang Tidak Mengurus	Kondisi ketelantaran yang bersangkutan terkait apakah ada keluarga/ masyarakat/ seseorang yang mengurusnya	-	-	-

Kondisi Ketelantaran – Rentan Mengalami Tindak Kekerasan dari Lingkungan	Kondisi ketelantaran yang bersangkutan terkait kerentanan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan	-	-	-
Kondisi Ketelantaran – Masih Memiliki Keluarga, Tetapi Mengalami Tindak Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran	Kondisi ketelantaran yang bersangkutan jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran	-	-	-
Keterangan	Keterangan tambahan terkait yang bersangkutan	-	-	-

16) Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Dalam Panti Dan/Atau Lembaga Baik Milik Pemerintah Maupun Masyarakat

Konsep : Orang terlantar; [K01596] Penyandang Disabilitas; Anak terlantar; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); Gelandangan; Pengemis

Definisi : Orang terlantar: Seseorang yang mengalami kesulitan hidup, tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak memiliki sumber penghasilan.

[K01596] Penyandang Disabilitas: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anak terlantar: Anak yang tidak mendapatkan asuhan yang layak, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, atau bahkan dieksploitasi.
[K01055] Lanjut Usia (Lansia): Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
Gelandangan: Orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sering berpindah-pindah
Pengemis: Orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta kepada orang lain

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat yang disajikan berdasarkan nama Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 812. Format Data Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Dalam Panti Dan/Atau Lembaga Baik Milik Pemerintah Maupun Masyarakat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas fisik terlantar yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang

Jumlah Penyandang Disabilitas Intelektual Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas intelektual terlantar yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang
Jumlah Penyandang Disabilitas Mental Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas mental terlantar yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang
Jumlah Penyandang Disabilitas Sensorik Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas sensorik terlantar yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang
Jumlah Penyandang Disabilitas Ganda Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas ganda terlantar yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang
Jumlah Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang
Jumlah Gelandangan Pengemis	Jumlah gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik pemerintah maupun masyarakat	-	Total	Orang

Keterangan	Keterangan tambahan	-	-	-

17) Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Luar Panti Dan/Atau Lembaga (Berbasis Keluarga/Masyarakat/ Komunitas)

Konsep : Orang terlantar; [K01596] Penyandang Disabilitas; Anak terlantar; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); Gelandangan; Pengemis

Definisi : Orang terlantar: Seseorang yang mengalami kesulitan hidup, tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak memiliki sumber penghasilan.
[K01596] Penyandang Disabilitas: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Anak terlantar: Anak yang tidak mendapatkan asuhan yang layak, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, atau bahkan dieksploitasi.
[K01055] Lanjut Usia (Lansia): Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
Gelandangan: Orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sering berpindah-pindah
Pengemis: Orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta kepada orang lain

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/ komunitas) yang disajikan berdasarkan nama Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : -

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 813. Format Data Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan di Luar Panti Dan/Atau Lembaga

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas fisik terlantar yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/ masyarakat/ komunitas)	-	Total	Orang
Jumlah Penyandang Disabilitas Intelektual Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas intelektual terlantar yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/ komunitas)	-	Total	Orang
Jumlah Penyandang Disabilitas Mental Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas mental terlantar yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/ masyarakat/ komunitas)	-	Total	Orang
Jumlah Penyandang Disabilitas Sensorik Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas sensorik terlantar yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/ masyarakat/ komunitas)	-	Total	Orang

Jumlah Penyandang Disabilitas Ganda Terlantar	Jumlah penyandang disabilitas ganda terlantar yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/ masyarakat/ komunitas)	-	Total	Orang
Jumlah Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/komunitas)	-	Total	Orang
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/komunitas)	-	Total	Orang
Jumlah Gelandangan Pengemis	Jumlah gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/komunitas)	-	Total	Orang
Keterangan	Keterangan tambahan	-	-	-

18) Rekapitulasi Estimasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Konsep : [K00975] Korban Bencana
Definisi : [K00975] Korban Bencana: Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Ukuran : Total
Satuan : Orang

Metode Perhitungan : Estimasi jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang disajikan berdasarkan nama Kabupaten/Kota

Sumber Data/Publikasi : -

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 814. Format Data Rekapitulasi Estimasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Estimasi Korban Gempa Bumi	Jumlah estimasi korban gempa bumi	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Tsunami	Jumlah estimasi korban tsunami	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Banjir	Jumlah estimasi korban banjir	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Tanah Longsor	Jumlah estimasi korban tanah longsor	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Letusan Gunung Api	Jumlah estimasi korban letusan gunung api	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Gelombang Laut Ekstrem	Jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrem	-	Total	Orang

Jumlah Estimasi Korban Angin Topan	Jumlah estimasi korban angin topan	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Kekeringan	Jumlah estimasi korban kekeringan	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Konflik Sosial	Jumlah estimasi korban konflik sosial	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Aksi Teror	Jumlah estimasi korban aksi teror	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Kebakaran	Jumlah estimasi korban kebakaran	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Wabah/ Epidemi	Jumlah estimasi korban wabah/ epidemi	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Gagal Teknologi	Jumlah estimasi korban gagal teknologi	-	Total	Orang
Jumlah Estimasi Korban Kebakaran Hutan	Jumlah estimasi korban kebakaran hutan	-	Total	Orang
Keterangan	Keterangan lainnya	-	-	-

19) Data dan Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos)

Konsep : SDM Kesejahteraan Sosial
Definisi : Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) merujuk pada individu yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik secara profesional maupun sebagai relawan. Mereka memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, baik dalam penanganan masalah sosial, penyediaan layanan, maupun pengembangan program kesejahteraan sosial.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total SDM Kesejahteraan Sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 815. Format Data dan Rekapitulasi Jumlah Sumber daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Wilayah	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama SDM Kesos	Nama SDM Kesos	-	-	-
Jenis SDM Kesos	Jenis SDM Kesos	1. Pekerja Sosial 2. Tenaga Kesos 3. Relawan Sosial	-	-
Nama Kelembagaan/ Sarana Prasarana Tempat Bekerja	Nama Kelembagaan/ Sarana Prasarana Tempat Bekerja	-	-	-
Status SDM Kesos	Status SDM Kesos	1. ASN 2. SDM Masyarakat	-	-

Rekrutmen dan Pembinaan SDM Kesos	Rekrutmen dan Pembinaan SDM Kesos	1. Pusat 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota	-	-
Keterangan	Keterangan lainnya	-	-	-

20) Data dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi

Konsep : Sarana Prasarana
Definisi : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dll.).
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 816. Format Data dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Penerima Pelayanan Dasar yang Membutuhkan Sarana Prasarana	Jumlah penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasarana	-	-	-

Nama Sarana Prasarana	Nama sarana prasarana	-	-	-
Status Kepemilikan	Status kepemilikan sarana prasarana	1. Pemerintah 2. Masyarakat	-	-
Akreditasi	Akreditasi sarana prasarana		-	-
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi sarana prasarana	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik	-	-
Tingkat Kerusakan	Tingkat kerusakan sarana prasarana	1. Rendah 2. Sedang 3. Berat	-	-
Keterangan	Keterangan lainnya	-	-	-

2.41. Metadata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Hasil Uji Kompetensi dan Lembaga Pelatihan Kerja

Konsep : [K01736] Peserta Pelatihan: [K01352] Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
Definisi : Banyaknya orang mengikuti pelatihan pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik yang bersifat teknis, manajerial, maupun kewirausahaan.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 817. Format Data Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Hasil Uji Kompetensi dan Lembaga Pelatihan Kerja

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Lembaga Pelatihan Kerja	Nama lembaga pelatihan	1. Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lombok Tengah 2. Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lombok Timur 3. Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lombok Utara 4. Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa Barat 5. Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bima 6. Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar	-	-

		Negeri (BLKDLN) NTB 7. Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kabupaten Bima 8. Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kabupaten Sumbawa 9. Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kecamatan Selong		
Program Pelatihan	Program pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan terkait	-	-	-
Kejuruan Sasaran	Kejuruan sasaran pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan terkait	-	-	-
Jumlah Peserta	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Pencari Kerja, Pencari Kerja yang ditempatkan dan Jumlah Lowongan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01441] Pencari Kerja: [K02159] Tenaga Kerja: [K01486] Penempatan Pekerja: [K01119] Lowongan Pekerjaan

Definisi : Pencari Kerja: Banyaknya orang yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, Pencari Kerja yang Ditempatkan: Banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja dan/atau di luar hubungan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan. Lowongan Kerja: Banyaknya kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah dan persyaratan tertentu untuk mengisi jabatan/jenis pekerjaan yang tersedia dari pemberi kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 818. Format Data Jumlah Pencari Kerja, Pencari Kerja yang ditempatkan dan Jumlah Lowongan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pencari kerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin	-	Total	Orang
Jumlah Lowongan Kerja	Jumlah lowongan kerja berdasarkan jenis kelamin	-	Total	Orang
Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan jenis kelamin	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Konsep : [K01441] Pencari Kerja Terdaftar
Definisi : Banyaknya orang yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 819. Format Data Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan pencari kerja	1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2. Tidak Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SD/Sederajat 4. Tamat SMP/Sederajat 5. Tamat SMA/SMK/Sederajat 6. Diploma I/II 7. Diploma III (D3) 8. Diploma IV/Sarjana Terapan (D4) 9. Sarjana (S1) 10. Magister (S2) 11. Doktor (S3)	-	-

Jenis Kelamin	Jenis kelamin pencari kerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01310] Pekerja Migran Indonesia
Definisi : Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terdaftar secara resmi, dan dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, jenis kelamin, negara tujuan, serta daerah asal (kabupaten/kota) di Provinsi NTB
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 820. Format Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2. Tidak Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SD/Sederajat 4. Tamat SMP/Sederajat 5. Tamat SMA/SMK/Sederajat 6. Diploma I/II 7. Diploma III (D3) 8. Diploma IV/Sarjana Terapan (D4) 9. Sarjana (S1) 10. Magister (S2) 11. Doktor (S3)	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Negara Tujuan	Negara tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	-
Jumlah PMI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan negara tujuan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin

Konsep : [K02160] Tenaga Kerja Asing
Definisi : Banyaknya warga negara asing yang memiliki visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.diklasifikasikan berdasarkan kewarganegaraan serta jenis kelamin.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 821. Format Data Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kewarganegaraan	Kewarganegaraan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Tenaga Kerja Asing (TKA)	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah TKA	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan kewarganegaraan dan jenis kelamin	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Konsep : [K02160] Tenaga Kerja Asing
Definisi : Banyaknya warga negara asing yang memiliki visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan jenis kelamin
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 822. Format Data Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jabatan	Jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Tenaga Kerja Asing (TKA)	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah TKA	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan jabatan dan jenis kelamin	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah Kantor pusat dan Cabang PPTKIS berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01716] Perusahaan
Definisi : Banyaknya akumulasi kantor pusat yang mengelola operasional utama serta kantor cabang PPTKIS yang mendukung pelayanan dan pengelolaan tenaga kerja
Ukuran : Total
Satuan : Kantor
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 823. Format Data Jumlah Kantor pusat dan Cabang PPTKIS berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kantor Pusat PPTKIS	Banyaknya akumulasi kantor pusat yang mengelola operasional utama	-	Total	Unit
Jumlah Kantor Cabang PPTKIS	Banyaknya akumulasi kantor cabang PPTKIS yang mendukung pelayanan dan pengelolaan tenaga kerja	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Terakreditasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01079] Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Definisi : Daftar yang memuat nama dan lokasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Terakreditasi berdasarkan Kabupaten/Kota
Ukuran : Total
Satuan : Daftar Nama
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 824. Format Data Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Terakreditasi berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Lembaga Pelatihan Kerja	Nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	-	Total	LPK
Akreditasi	Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah Perusahaan yang memiliki Sarana Hubungan Industrial berdasarkan Sektor dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01716] Perusahaan
Definisi : Banyaknya perusahaan yang telah mengimplementasikan perangkat, mekanisme, dan institusi yang digunakan untuk mengelola hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah secara harmonis serta berkeadilan.
Ukuran : Total
Satuan : Perusahaan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 825. Format Data Jumlah Perusahaan yang memiliki Sarana Hubungan Industrial berdasarkan Sektor dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Sektor	Sektor usaha	-	-	-
Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang memiliki Sarana Hubungan Industrial berdasarkan Sektor dan Kabupaten/Kota	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

10) Daftar Perusahaan yang memiliki Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Konsep : [K01716] Perusahaan
Definisi : Daftar yang memuat nama dan lokasi perusahaan yang memiliki Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Ukuran : Total
Satuan : Daftar Nama
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 826. Format Data Daftar Perusahaan yang memiliki Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Perusahaan	Nama perusahaan yang memiliki Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00791] Kecelakaan Kerja
Definisi : Banyaknya kasus kecelakaan dan penyakit yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan.
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 827. Format Data Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Kasus	Jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

12) Besaran Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota

Konsep : [K00204] Balas Jasa dan Upah Pekerja
Definisi : Besarnya nilai upah minimum berdasarkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum
Ukuran : Nilai Rupiah
Satuan : Rupiah / Bulan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 828. Format Data Besaran Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Besaran Upah Minimum	Besaran upah minium setiap wilayah	-	Nilai	Rp
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

13) Jumlah Perusahaan yang sudah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01716] Perusahaan

Definisi : Banyaknya perusahaan yang telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan
Ukuran : Total
Satuan : Perusahaan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 829. Format Data Jumlah Perusahan yang sudah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Perusahaan	Jumlah perusahaan yang sudah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

14) Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00677] Jaminan Sosial: [K01740] Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Definisi : banyaknya pekerja yang secara resmi menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 830. Format Data Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

15) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin

Konsep : [K00117] Angkatan Kerja
Definisi : Bagian dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan/menganggur berdasarkan jenis kelamin
Ukuran : Tingkat
Satuan : Persentase (%)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 831. Format Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin angkatan kerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Bagian dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan/menganggur berdasarkan jenis kelamin	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

16) Jumlah Penduduk yang Bekerja

Konsep : [K01476] Penduduk: [K00237] Bekerja
Definisi : Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan ekonomi atau memiliki pekerjaan dalam periode tertentu, baik sebagai pekerja formal maupun informal.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 832. Format Data Jumlah Penduduk yang Bekerja

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Penduduk yang Bekerja	Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan ekonomi atau memiliki pekerjaan dalam periode tertentu, baik sebagai pekerja formal maupun informal.	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

17) Penerimaan remitansi PMI melalui Bank Indonesia dan Pos Indonesia

Konsep : [K01878] Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI): [K01310] Pekerja Migran Indonesia
Definisi : Banyaknya penerimaan transfer dari PMI yang bekerja di luar negeri malalui BI atau Pos Indonesia
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 833. Format Data Penerimaan remitansi PMI melalui Bank Indonesia dan Pos Indonesia

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Instansi Pemerima	Instansi penerima remitansi PMI	-	-	-
Jumlah	Jumlah instansi	-	Total	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Triwulan	Triwulan penyajian data 1. Triwulan I merupakan data pada Januari-Maret 2. Triwulan II merupakan data pada April-Juni 3. Triwulan III merupakan data pada Juli-September 4. Triwulan IV merupakan data pada Oktober-Desember	1. Triwulan I 2. Triwulan II 3. Triwulan III 4. Triwulan IV	-	-

18) Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama seminggu menurut kabupaten/kota (Penduduk Usia Kerja)

Konsep : [K01476] Penduduk

Definisi : Banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan dalam seminggu terakhir, baik sebagai bagian dari angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja.

Ukuran : Total

Satuan : Orang

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 834. Format Data Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama seminggu menurut kabupaten/kota (Penduduk Usia Kerja)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Angkatan Kerja - Bekerja	Jumlah Angkatan Kerja yang kegiatan utama seminggu adalah Bekerja	-	Total	Orang

Angkatan Kerja Pengangguran - Pernah Bekerja	Jumlah Angkatan Kerja Pengangguran yang kegiatan utama seminggu adalah Pernah Bekerja	-	Total	Orang
Angkatan Kerja Pengangguran - Tidak Pernah Bekerja	Jumlah Angkatan Kerja Pengangguran yang kegiatan utama seminggu adalah Tidak Pernah Bekerja	-	Total	Orang
Angkatan Kerja Pengangguran - Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja Pengangguran	-	Total	Orang
Angkatan Kerja - Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	-	Total	Orang
Angkatan Kerja - Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	-	Persentase	Persen
Bukan Angkatan Kerja - Sekolah	Jumlah Bukan Angkatan Kerja yang kegiatan utama seminggu adalah Sekolah	-	Total	Orang
Bukan Angkatan Kerja - Mengurus Rumah Tangga	Jumlah Bukan Angkatan Kerja yang kegiatan utama seminggu adalah Mengurus Rumah Tangga	-	Total	Orang
Bukan Angkatan Kerja - Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja yang kegiatan utama seminggu adalah Lainnya	-	Total	Orang
Bukan Angkatan Kerja - Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	-	Total	Orang

Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas, termasuk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	-	Total	Orang
Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

19) Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Status Bekerja (Bekerja dan Pengangguran) dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00117] Angkatan Kerja: [K00237] Bekerja
Definisi : Banyaknya penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) yang bekerja maupun mencari pekerjaan (pengangguran).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 835. Format Data Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Status Bekerja (Bekerja dan Pengangguran) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-

Status Bekerja	Status bekerja angkatan kerja	1. Bekerja 2. Pengangguran	-	-
Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan status bekerja	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

20) Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pencari kerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah pencari kerja terdaftar	-	Total	Orang
Lowongan Kerja Terdaftar	Jumlah lowongan kerja terdaftar	-	Total	Lowongan
Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	Jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

21) Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Konsep : [K00117] Angkatan Kerja
Definisi : Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran menurut jenis kelamin
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Disnakertrans
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 836. Format Data Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin angkatan kerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

22) Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Bekerja

Konsep : [K00117] Angkatan Kerja: [K00237] Bekerja
Definisi : Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja berdasarkan kelompok umur dan jam bekerja
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 837. Format Data Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Bekerja

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kelompok Umur	Kelompok umur angkatan kerja	1. 15–19 2. 20–24 3. 25–29 4. 30–34 5. 35–39 6. 40–44 7. 45–49 8. 50–54 9. 55–59 10. 60+	-	-
Jumlah Jam Bekerja per Minggu	Jumlah jam bekerja per minggu angkatan kerja	1. 0 jam 2. 1–14 jam	-	-

		3. 15–34 jam 4. ≥35 jam 5. >48 jam		
Kategori	Kategori jumlah jam bekerja	1. Tidak bekerja 2. Bekerja sangat ringan 3. Bekerja ringan 4. Bekerja penuh (full time) 5. Bekerja lebih dari wajar	-	-
Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja menurut kelompok umur dan jam bekerja per minggu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

23) Jumlah LPKS yang ada dan sudah terakreditasi

Konsep : [K01716] Perusahaan
Definisi : Banyaknya LPKS non pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja.
Ukuran : Total
Satuan : Perusahaan
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 838. Format Data Jumlah LPKS yang ada dan sudah terakreditasi

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah LPKS	Jumlah LPKS yang ada	-	-	Lembaga
Jumlah LPKS Terakreditasi	Jumlah LPKS yang terakreditasi	-	-	Lembaga
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

24) Jumlah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah)

Konsep : [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja)[K01314] Pekerja Sektor Informal
Definisi : Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja pada sektor formal dan informal
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 839. Format Data Jumlah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Sektor	Sektor tenaga kerja	1. Formal/Penerima Upah 2. Informal/Bukan Penerima Upah	-	-
Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

25) Jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah)

Konsep : [K00677] Jaminan Sosial: [K01740] Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Definisi : Banyaknya pekerja yang secara resmi menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sektor formal dan informal
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 840. Format Data Jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sektor (Formal/Penerima Upah dan Informal/Bukan Penerima Upah)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Sektor	Sektor tenaga kerja	1. Formal/Penerima Upah 2. Informal/Bukan Penerima Upah	-	-
Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sektor	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

26) Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Kategori Bekerja (Penuh Waktu, Paruh Waktu, Setengah Pengangguran)

Konsep : [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja
Definisi : Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja berdasarkan Kategori Bekerja (Penuh Waktu, Paruh Waktu, Setengah Pengangguran)
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 841. Format Data Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Kategori Bekerja (Penuh Waktu, Paruh Waktu, Setengah Pengangguran)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Kategori Bekerja	Kategori bekerja	1. Penuh Waktu 2. Paruh Waktu 3. Setengah Pengangguran	-	-
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja	Jumlah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan kategori	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

27) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin

Konsep : [K00116] Angka-Angka Per Kapita: [K01528] Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)
Definisi : Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi setiap anggota rumah tangga selama sebulan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli yang mengacu pada kota rujukan dan tahun rujukan tertentu berdasarkan jenis kelamin
Ukuran : Total
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 842. Format Data Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin penduduk	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	-	Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah/Orang /Tahun
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

28) Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama

Konsep : [K01476] Penduduk: [K00237] Bekerja
Definisi : Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu lapangan pekerjaan tertentu dengan total penduduk yang bekerja, dinyatakan dalam bentuk persen.
Ukuran : Persentase
Satuan : Persentase (%)
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 843. Format Data Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Lapangan Pekerjaan Utama	-	Sesuai Lampiran 5	-	-
Lapangan Pekerjaan Utama	-	Sesuai Lampiran 5	-	-
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja	Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

29) Persentase TPT berdasarkan Daerah (Perkotaan, Pedesaan)

Konsep : [K01510] Pengangguran: [K00117] Angkatan Kerja
Definisi : Persentase penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan
Ukuran : Persentase
Satuan : Persentase (%)
Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 844. Format Data Persentase TPT berdasarkan Daerah (Perkotaan, Pedesaan)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Daerah	Kategori daerah	1. Perkotaan 2. Pedesaan 3. Perkotaan+Pedesaan	-	-
Persentase TPT	Persentase TPT berdasarkan kategori daerah	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

30) Persentase TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut jenis kelamin

Konsep : [K01510] Pengangguran: [K00117] Angkatan Kerja
Definisi : Persentase penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin
Ukuran : Persentase
Satuan : Persentase (%)

Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 845. Format Data Persentase TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut jenis kelamin

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan angkatan kerja	1. Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD 2. SMP 3. SMA umum 4. SMA Kejuruan 5. Diploma I/II/III 6. Universitas	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin angkatan kerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
TPT	Persentase penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja	-	Persentase	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

31) Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal berdasarkan pekerjaan utama

Konsep : [K01457] Pendapatan Individu: [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja: [K01314] Pekerja Sektor Informal
Definisi : Rata-rata pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja informal berdasarkan pekerjaan utama
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 846. Format Data Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal berdasarkan pekerjaan utama

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Pekerjaan Utama	Pekerjaan utama pekerja informal	1. Pertanian 2. Industri 3. Jasa 4. Pertanian+Industri+Jasa	-	-
Rata-rata Pendapatan Bersih	Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal berdasarkan pekerjaan utama	-	Rata-rata	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

32) Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal berdasarkan tingkat pendidikan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01457] Pendapatan Individu: [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja): [K01314] Pekerja Sektor Informal
Definisi : Rata-rata pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja informal berdasarkan tingkat pendidikan dan kabupaten/kota
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 847. Format Data Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal berdasarkan tingkat pendidikan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan pekerja informal	1. Tidak pernah sekolah/Belum tamat SD 2. Sekolah Dasar 3. Sekolah Menengah Pertama 4. SMA ke atas 5. Rata-rata Total	-	-
Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal	Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal berdasarkan pekerjaan utama	-	Rata-rata	Rupiah

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

33) Rata-rata upah yang diterima buruh/karyawan dalam sebulan menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01457] Pendapatan Individu: [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja)
Definisi : Rata-rata upah yang diterima oleh buruh/karyawan berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota
Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 848. Format Data Rata-rata upah yang diterima buruh/karyawan dalam sebulan menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pekerja	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan berdasarkan jenis kelamin	-	Rata-rata	Rupiah
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

34) Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K00677] Jaminan Sosial: [K01740] Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Definisi : Banyaknya pengajuan klaim kecelakaan kerja yang diterima oleh lembaga penjamin sosial ketenagakerjaan atau asuransi tenaga kerja
Ukuran : Total
Satuan : Klaim
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 849. Format Data Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja	Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

35) Jumlah peserta pemagangan dalam negeri berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01374] Pemagangan Dalam Negeri
Definisi : Banyaknya peserta yang terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan oleh penyelenggara pemagangan dalam negeri dan atau perseorangan.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 850. Format Data Jumlah peserta pemagangan dalam negeri berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri	Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

36) Jumlah peserta pemagangan luar negeri berdasarkan Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota

Konsep : [K01739] Peserta Pemagangan Luar Negeri
Definisi : Banyaknya pencari kerja terdaftar yang mengikuti program pemagangan yang menjadi bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 851. Format Data Jumlah peserta pemagangan luar negeri berdasarkan Negara Tujuan dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Negara Tujuan	Negara Tujuan magang	-	-	-
Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri	Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.42. Metadata Inspektorat

1) Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Zona Integritas (ZI)

Konsep	:	Zona Integritas
Definisi	:	Zona Integritas: Instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Klasifikasi: 1. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima 2. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima Sumber: PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021; PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024.
Ukuran	:	-
Satuan	:	-
Metode Perhitungan	:	Nilai Evaluasi Zona Integritas = 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil
Sumber Data/Publikasi	:	Inspektorat
Tautan Publikasi Sumber Data	:	-

Tabel 852. Format Data Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Zona Integritas (ZI)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Kategori Zona Integritas	Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	1. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Jumlah Pengaduan Masyarakat berdasarkan Media Aduan

Konsep : Jumlah Pengaduan Masyarakat
Definisi : [K01504] Pengaduan Masyarakat: Bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada aparatur pemerintah berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
Ukuran : Total
Satuan : Aduan
Metode Perhitungan : Total pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media SMS, KP, LANGSUNG, dan SRT

Sumber Data/Publikasi : Inspektorat
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 853. Format Data Jumlah Pengaduan Masyarakat berdasarkan Media Aduan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Media Pengaduan Masyarakat	Media yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aduan	1. SMS 2. KP 3. Langsung 4. SRT	-	-
Jumlah Pengaduan Masyarakat	Jumlah aduan masyarakat berdasarkan jenis media yang digunakan	-	Total	Aduan
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Nilai SAKIP berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : Nilai SAKIP
Definisi : [K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP): Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Nilai Akuntabilitas Kinerja = 30% Perencanaan Kinerja + 30% Pengukuran Kinerja + 15% Pelaporan Kinerja + 25% Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja = AA (Sangat

Memuaskan, nilai >90 - 100); A (Memuaskan, nilai >80 - 90); BB (Sangat Baik, nilai >70 - 80); B (Baik, nilai >60 - 70); CC (Cukup/Memadai, nilai >50 - 60); C (Kurang, nilai >30 - 50); D (Sangat Kurang, nilai 0 - 30). (Sumber: PermenPANRB No. 88 Tahun 2021).

Sumber Data/Publikasi : Inspektorat

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 854. Format Data Nilai SAKIP berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Nilai SAKIP	Nilai yang menunjukkan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Perangkat Daerah

Konsep : Nilai PMPRB
Definisi : [K01860] Reformasi Birokrasi (RB): Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.
Ukuran : Nilai
Satuan : Poin
Metode Perhitungan : Nilai PMPRB = 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil.
Kategori Nilai PMPRB = AA (Istimewa, nilai >90 - 100); A (Memuaskan, nilai >80 - 90); BB (Sangat Baik, nilai >70 - 80); Baik (Baik, nilai >60 - 70); CC (Cukup/Memadai, nilai >50 - 60); C (Kurang, nilai >30 - 50); D (Sangat Kurang, nilai 0 - 30). (PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014)
Sumber Data/Publikasi : Inspektorat
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 855. Format Data Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Perangkat Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB	Sesuai Lampiran 1	-	-
Nilai PMPRB	Nilai yang menunjukkan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik	-	Nilai	Poin
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.43. Metadata Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, Dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

1) *Average Length of Stay* (ALOS)

Konsep : Rata-rata jumlah hari di Rumah Sakit
Definisi : Rata-rata jumlah hari yang dihabiskan oleh seorang pasien yang dirawat inap di sebuah fasilitas kesehatan (misalnya rumah sakit) dari saat masuk hingga saat keluar
Ukuran : Rata-rata
Satuan : Hari
Metode Perhitungan : ALOS = Total Hari Perawatan/Jumlah Pasien Keluar
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 856. Format Data *Average Length of Stay* (ALOS)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Indikator Pelayanan	*Average Length Of Stay* (ALOS): Rata-rata jumlah hari yang dihabiskan oleh seorang pasien yang dirawat inap di sebuah fasilitas kesehatan (misalnya	*Average Length Of Stay* (ALOS)	-	-

	rumah sakit) dari saat masuk hingga saat keluar			
Nilai Indikator Pelayanan	Nilai capaian masing-masing indikator layanan rumah sakit	-	Nilai	Hari
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) *Bed Occupation Rate* (BOR)

Konsep : Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur
Definisi : Mengukur persentase penggunaan tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam periode tertentu, Nilai BOR yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa mencerminkan masalah dalam manajemen rumah sakit. BOR ideal 60-85%
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : BOR = (Jumlah Hari perawatan/(Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam periode)) x 100%
Sumber Data/Publikasi : RSJ Mutiara Sukma
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 857. Format Data *Bed Occupation Rate* (BOR)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Indikator Pelayanan	*Bed Occupation Rate* (BOR): Mengukur persentase penggunaan	*Bed Occupation Rate* (BOR)	-	-

	tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam periode tertentu			
Nilai Indikator Pelayanan	Nilai capaian masing-masing indikator layanan rumah sakit	-	Nilai	Persen
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) *Bed Turn Over* (BTO)

Konsep : Angka Pergantian Tempat Tidur
Definisi : Menunjukkan seberapa sering setiap tempat tidur rumah sakit digunakan oleh pasien dalam periode tertentu
Ukuran : Total
Satuan : Kali
Metode Perhitungan : BTO = (Jumlah Pasien Keluar/Jumlah Tempat Tidur) x 100%
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 858. Format Data *Bed Turn Over* (BTO)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Indikator Pelayanan	*Bed Turn Over* (BTO): Menunjukkan seberapa sering setiap tempat tidur	*Bed Turn Over* (BTO)	-	-

	rumah sakit digunakan oleh pasien dalam periode tertentu			
Nilai Indikator Pelayanan	Nilai capaian masing-masing indikator layanan rumah sakit	-	Nilai	Kali Per Tahun
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) *Turn Over Interval* (TOI)

Konsep : Selang Pergantian Tempat Tidur
Definisi : Menunjukkan rata-rata waktu (jumlah hari) suatu tempat tidur kosong atau tidak ditempati pasien sebelum digunakan kembali oleh pasien berikutnya
Ukuran : Total
Satuan : Hari
Metode Perhitungan : TOI = ((Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam periode) - Total hari perawatan)/jumlah pasien keluar
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 859. Format Data *Turn Over Interval* (TOI)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Indikator Pelayanan	*Turn Over Interval* (TOI): Menunjukkan rata-rata waktu (jumlah hari) suatu	*Turn Over Interval* (TOI)	-	-

	tempat tidur kosong atau tidak ditempati pasien sebelum digunakan kembali oleh pasien berikutnya			
Nilai Indikator Pelayanan	Nilai capaian masing-masing indikator layanan rumah sakit	-	Nilai	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) *Gross Death Rate* (GDR)

Konsep : Angka Kematian Kasar
Definisi : Menunjukkan persentase jumlah pasien yang meninggal selama perawatan di rumah sakit terhadap jumlah total pasien keluar (*discharge*), termasuk yang meninggal dan yang sembuh atau dirujuk
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : GDR = (Jumlah pasien meninggal/Jumlah total pasien keluar) x 100%
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 860. Format Data *Gross Death Rate* (GDR)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-

Indikator Pelayanan	*Gross Death Rate* (GDR): Menunjukkan persentase jumlah pasien yang meninggal selama perawatan di rumah sakit terhadap jumlah total pasien keluar (*discharge*), termasuk yang meninggal dan yang sembuh atau dirujuk	*Gross Death Rate* (GDR)	-	-
Nilai Indikator Pelayanan	Nilai capaian masing-masing indikator layanan rumah sakit	-	Nilai	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) *Net Death Rate* (NDR)

Konsep : Angka Kematian Bersih
Definisi : Mengukur persentase pasien yang meninggal setelah 48 jam dirawat di rumah sakit dibandingkan dengan jumlah total pasien keluar (*discharge*), termasuk yang meninggal dan yang sembuh atau dirujuk
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Metode Perhitungan : NDR = (Jumlah pasien meninggal setelah 48 jam dirawat/(Jumlah total pasien keluar - Jumlah pasien meninggal dalam 48 jam) x 100%
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 861. Format Data *Net Death Rate* (NDR)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Indikator Pelayanan	*Net Death Rate* (NDR): Mengukur persentase pasien yang meninggal setelah 48 jam dirawat di rumah sakit dibandingkan dengan jumlah total pasien keluar (*discharge*), termasuk yang meninggal dan yang sembuh atau dirujuk	*Net Death Rate* (NDR)	-	-
Nilai Indikator Pelayanan	Nilai capaian masing-masing indikator layanan rumah sakit	-	Nilai	Hari
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD)

Konsep : Kunjungan pasien
Definisi : Mengukur jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan di berbagai unit pelayanan rumah sakit dalam periode tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 862. Format Data Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD)

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Instalasi	Nama instalasi pada rumah sakit	1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat	-	-
Jumlah Kunjungan	Mengukur jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan di berbagai unit pelayanan rumah sakit dalam periode tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

8) Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) dan Cara Pembayaran

Konsep : Kunjungan pasien, Cara Pembayaran
Definisi : Mengukur jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) serta metode pembayaran yang digunakan pasien untuk membayar layanan tersebut
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 863. Format Data Jumlah Kunjungan berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) dan Cara Pembayaran

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Instalasi	Nama instalasi pada rumah sakit	1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat	-	-
Status Bayar	Metode pembayaran yang digunakan pasien untuk membayar layanan pada rumah sakit	1. Umum 2. BPJS 3. Asuransi Swasta 4. Bansos 5. Lainnya	-	-

Jumlah Kunjungan	Mengukur jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) serta metode pembayaran yang digunakan pasien untuk membayar layanan tersebut	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

9) Daftar 10 Besar Penyakit berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) per Triwulan

Konsep : Penyakit
Definisi : Data statistik yang mencatat 10 jenis penyakit terbanyak yang diderita pasien berdasarkan tempat layanan di rumah sakit (Rawat Jalan, Rawat Inap, dan IGD) dalam periode triwulan (3 bulan)
Ukuran : Total
Satuan : Kasus
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 864. Format Data Daftar 10 Besar Penyakit berdasarkan Instalasi (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD) per Triwulan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Penyakit	Nama penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien di rumah sakit dalam periode triwulanan	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Pasien	Jumlah pasien yang menderita penyakit tertentu dalam periode triwulanan	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Triwulan	Triwulan penyajian data 1. Triwulan I merupakan data pada Januari-Maret 2. Triwulan II merupakan data pada April-Juni 3. Triwulan III merupakan data pada Juli-September 4. Triwulan IV merupakan data pada Oktober-Desember	1. Triwulan I 2. Triwulan II 3. Triwulan III 4. Triwulan IV	-	-

10) Jumlah SDM Kesehatan berdasarkan Status Kepegawaian (ASN, Non-ASN) dan Jenis SDM Kesehatan

Konsep : SDM Kesehatan
Definisi : Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di suatu fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik) yang dikategorikan berdasarkan jenis tenaga kesehatan dan status kepegawaian
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 865. Format Data Jumlah SDM Kesehatan berdasarkan Status Kepegawaian (ASN, Non-ASN) dan Jenis SDM Kesehatan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Status Kepegawaian	Status kepegawaian	1. ASN 2. Non-ASN	-	-
Kelompok SDM	Kelompok SDM Kesehatan	1. Tenaga Medis 2. Tenaga Kesehatan 3. Tenaga Penunjang	-	-
Jenis SDM	Jenis SDM Kesehatan	Tenaga Medis: 1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Dokter Spesial	-	-

		4. Dokter Gigi Spesialis Tenaga Kesehatan: 5. Tenaga Psikologi Klinis 6. Tenaga Keperawatan 7. Tenaga Kebidanan 8. Tenaga Farmasi 9. Tenaga Kesehatan Masyarakat 10. Tenaga Kesehatan Lingkungan 11. Tenaga Gizi 12. Tenaga Keterapian Fisik 13. Tenaga Teknis Medis 14. Tenaga Biomedika 15. Tenaga Kesehatan Tradisional 16. Tenaga kesehatan Lain Tenaga Penunjang: 17. Struktural 18. Dukungan Manajemen 19. Pendidikan dan Pelatihan		
Jumlah Pegawai	Jumlah pegawai yang bekerja di rumah sakit yang dikategorikan berdasarkan jenis dan status kepegawaian	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

11) Jumlah Pasien Pelayanan Pasung

Konsep : Pasien Pelayanan Pasung
Definisi : Jumlah pasien yang pernah mengalami pemasungan akibat gangguan mental dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan, baik berupa pelepasan, rehabilitasi, atau intervensi medis dan psikososial
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 866. Format Data Jumlah Pasien Pelayanan Pasung

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Jenis Layanan	Pasien Pasung	Pasien Pasung	-	-
Jumlah Pasien	Jumlah pasien yang menerima layanan tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

12) Jumlah Pasien Pelayanan Terapi NAPZA

Konsep : Pasien Pelayanan Terapi NAPZA
Definisi : Jumlah individu yang mendapatkan pelayanan terapi akibat penyalahgunaan NAPZA di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik rehabilitasi, atau layanan berbasis masyarakat dalam periode tertentu
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 867. Format Data Jumlah Pasien Pelayanan Terapi NAPZA

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Jenis Layanan	Pasien Terapi NAPZA	Pasien Terapi NAPZA	-	-
Jumlah Pasien	Jumlah pasien yang menerima layanan tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September;	-	-

		10. Oktober; 11. November; 12. Desember		

13) Pelayanan Konseling dan Tes HIV/AIDS

Konsep : Konseling dan Tes HIV/AIDS
Definisi : Jumlah individu yang telah mendapatkan pelayanan konseling dan tes HIV/AIDS di fasilitas kesehatan dalam periode tertentu, baik secara sukarela (VCT – *Voluntary Counseling and Testing*) maupun melalui program skrining (PITC – *Provider Initiated Testing and Counseling*).
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 868. Format Data Pelayanan Konseling dan Tes HIV/AIDS

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Jenis Layanan	Pelayanan Konseling dan Tes HIV/AIDS	Pelayanan Konseling dan Tes HIV/AIDS	-	-
Jumlah Pasien	Jumlah pasien yang menerima layanan tertentu	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

14) Peserta Tes HIV/AIDS Terkonfirmasi Positif

Konsep : Peserta Tes HIV/AIDS Terkonfirmasi Positif
Definisi : Jumlah individu yang mendapatkan hasil tes HIV positif setelah melalui pemeriksaan HIV/AIDS di fasilitas layanan kesehatan dalam periode tertentu.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 869. Format Data Peserta Tes HIV/AIDS Terkonfirmasi Positif

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Nama Rumah Sakit	-	Sesuai Lampiran 8	-	-
Jenis Layanan	Peserta Tes HIV/AIDS Terkonfirmasi Positif	-	-	-
Jumlah Pasien	Jumlah pasien yang menerima layanan tertentu	-	Total	Orang

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-
Bulan	Bulan penyajian data	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-

2.44. Metadata Satuan Polisi Pamong Praja

1) Daftar Produk Hukum Daerah NTB yang mengandung sanksi untuk ditegakkan

Konsep : Produk Hukum Daerah

Definisi : Produk hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan atau keputusan. Bentuk produk hukum daerah antara lain: Peraturan Daerah (Perda); Peraturan Gubernur (Pergub); dan Keputusan Gubernur

Sanksi dalam produk hukum daerah dapat berupa:

1. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.
2. Sanksi keperdataan dan berupa, antara lain, ganti kerugian.

Ukuran : -

Satuan : -

Metode Perhitungan : -

Sumber Data/Publikasi : Satpol PP

Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 870. Format Data Daftar Produk Hukum Daerah NTB yang mengandung sanksi untuk ditegakkan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Perda/Perkada yang Memuat Sanksi	Nomor Perda/Perkada yang Memuat Sanksi	-	-	-

Perda/Perkada Tentang	Tentang pada Perda/Perkada yang Memuat Sanksi	-	-	-
Perda/Perkada Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Sanksi pada Perda/Perkada yang Memuat Sanksi	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2) Cakupan Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Konsep : Cakupan Penegakan Hukum Peraturan Daerah
Definisi : Cakupan Penegakan Hukum Peraturan Daerah
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda x 100%
Sumber Data/Publikasi : -
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 871. Format Data Cakupan Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran yang terjadi terhadap Perda	-	Total	Pelanggaran
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	Jumlah penyelesaian yang dilakukan terhadap penegakan Perda	-	Total	Penyelesaian
Persentase Penegakan Perda	Persentase jumlah penyelesaian yang dilakukan terhadap penegakan Perda	-	Persentase	Persen

	terhadap Jumlah pelanggaran yang terjadi terhadap Perda			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

3) Jumlah Pengamanan berdasarkan Jenisnya

Konsep : Pengamanan
Definisi : Pengamanan adalah segala tindakan, kegiatan, dan usaha yang dilakukan untuk mencegah, menangkal, dan mengatasi ancaman atau gangguan keamanan.
Ukuran : Total
Satuan : Kegiatan
Metode Perhitungan : Total pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam periode tertentu, baik pengamanan untuk kegiatan unjuk rasa maupun pengamanan *event*
Sumber Data/Publikasi : Satpol PP
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 872. Format Data Jumlah Pengamanan berdasarkan Jenisnya

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kategori Pengamanan	Kategori pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP	1. Patroli 2. Pengamanan 3. Pengamanan Khusus	-	-
Jenis Pengamanan	Uraian jenis pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP	-	-	-
Jumlah Pengamanan	Jumlah pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP	-	Total	Kegiatan

Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

4) Jumlah Satlinmas berdasarkan Kabupaten/Kota

Konsep : Satlinmas
Definisi : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Satlinmas juga bertugas membantu penanganan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Ukuran : Total
Satuan : Organisasi
Metode Perhitungan : Total Satlinmas pada periode tertentu yang disajikan berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota
Sumber Data/Publikasi : Satpol PP
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 873. Format Data Jumlah Satlinmas berdasarkan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin Satlinmas	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Jumlah Satlinmas	Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yaitu organisasi yang dibentuk oleh	-	Total	Orang

	pemerintah desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat			
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

5) Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi NTB

Konsep : Sarana Prasarana
Definisi : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dll.).
Ukuran : Total
Satuan : Unit
Metode Perhitungan : Total sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dalam periode tertentu
Sumber Data/Publikasi : Satpol PP
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 874. Format Data Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi NTB

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Sarana dan Prasarana	Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP	1. *Handy Talky* (HT) 2. Helm Huru-hara 3. Jaket Pol PP 4. Kendaraan Roda 3 Bajaj 5. Metal Detektor 6. Mobil Patroli	-	-

		7. Mobil Pengamanan Dan Pengawalan (Pamwal) 8. Mobil Truk Pengendalian Masyarakat (PAMDAL) 9. Motor Roda 2 10. Rompi *Safety* 11. Senter *Emergency* 12. Tameng 13. Tongkat T		
Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP	1. Layak 2. Tidak Layak	-	-
Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP berdasarkan jenis dan kondisi	-	Total	Unit
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

6) Jumlah Anggota Satpol PP berdasarkan Status (ASN, Non-ASN) dan Kabupaten/Kota

Konsep : Anggota Satpol PP
Definisi : Anggota Satpol PP adalah seluruh pegawai yang bekerja di Satpol PP, baik dengan status sebagai ASN maupun non-ASN.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total anggota Satpol PP yang disajikan berdasarkan status kepegawaian (ASN dan non-ASN) serta berdasarkan Nama Kabupaten/ Kota.
Sumber Data/Publikasi : Satpol PP
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 875. Format Data Jumlah Anggota Satpol PP berdasarkan Status (ASN, Non-ASN) dan Kabupaten/Kota

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kode Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Nama Kabupaten/ Kota	-	Sesuai Lampiran 2	-	-
Status Kepegawaian	Status kepegawaian anggota Satpol PP	1. ASN 2. Non-ASN	-	-
Jumlah Anggota Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP berdasarkan status kepegawaian	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

7) Daftar Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Serta Aset Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada

Konsep : Fasilitas

Definisi : [K00458] Fasilitas Umum: Fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti pasar tradisional, terminal, stasiun, dll.
[K00452] Fasilitas Sosial: Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintah, sekolah, dll. Konsep: Aset warga: Aset warga merujuk pada aset pribadi, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok
Lokasi Penegakan Perda dan Perkada: Lokasi dimana Satpol PP melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban

Ukuran : -

Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Satpol PP
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 876. Format Data Daftar Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Serta Aset Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Jenis Fasum/Fasos/Aset	Jenis fasum/fasos/aset yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada	1. Area Parkir 2. Cafe 3. Minimarket 4. Sampan 5. Kendaraan Roda 4 yang Dimiliki Oleh Warga 6. Kendaraan Roda 2 yang Dimiliki Oleh Warga 7. Rumah Warga Negara 8. Jembatan 9. Sekolah 10. Rumah Ibadah	-	-
Jumlah Fasum/Fasos/Aset	Jumlah fasum/fasos/aset yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada	-	Total	Unit
Kondisi Fasum/Fasos/Aset	Kondisi fasum/fasos/aset yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada	-	-	-
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

8) Rekapitulasi Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada

Konsep : Warga Negara
Definisi : Warga Negara: Orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara tersebut
Lokasi Penegakan Perda dan Perkada: Lokasi dimana Satpol PP melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Satpol PP
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 877. Format Data Rekapitulasi Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Lokasi Penegakan Perda dan Perkada	Lokasi penegakan Perda dan Perkada	-	-	-
Jumlah Warga Negara	Jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

9) Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada, Sesuai Kriteria yang Ditentukan

Konsep : Warga negara
Definisi : Warga Negara: Orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara tersebut.
Trantibum (Ketenteraman dan Ketertiban Umum): Kondisi yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, dan tenteram.
Ukuran : Total
Satuan : Orang
Metode Perhitungan : Total warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran produk hukum daerah
Sumber Data/Publikasi : Satpol PP
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 878. Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada, Sesuai Kriteria yang Ditentukan

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Lokasi Penegakan Perda dan Perkada	Lokasi penegakan Perda dan Perkada	-	-	-
Jenis Cedera	Jenis cedera yang dialami oleh warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada	1. Cedera Ringan 2. Cedera Sedang dan/atau Berat	-	-

Jumlah Warga Negara	yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada berdasarkan jenis cedera	-	Total	Orang
Tahun	Tahun penyajian data	-	-	-

2.45. Metadata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1) Daftar Nama Anggota DPRD berdasarkan Jenis Kelamin, Partai Politik dan Dapil

Konsep : Anggota DPRD
Definisi : Daftar Nama Pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi NTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat Jenis kelamin, Nama Partai Politik, Daerah Pemilihan, dan Periode Jabatan. (Sumber Data: Peraturan DPRD NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD NTB).
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Sekretariat DPRD NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 879. Format Data Daftar Nama Anggota DPRD berdasarkan Jenis Kelamin, Partai Politik dan Dapil

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nama Anggota DPRD	Nama Anggota DPRD	-	-	-
Jenis Kelamin	Jenis kelamin anggota DPRD	1. Laki-laki 2. Perempuan	-	-
Partai Politik	Setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela alas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	-	-

	bangsa dan negara melalui pemilihan umum. (Sumber: UU RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik)	4. Partai Golongan Karya (Golkar) 5. Partai Nasdem 6. Partai Buruh 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 12. Partai Amanat Nasional (PAN) 13. Partai Bulan Bintang (PBB) 14. Partai Demokrat 15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 18. Partai Ummat		
Dapil	Satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Sumber: Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 Pengawasan Pemungutan dan	1. Dapil NTB I Kota Mataram 2. Dapil NTB II Lombok Barat - Lombok Utara 3. Dapil NTB III Lombok Timur 4. Dapil NTB IV Lombok Timur 5. Dapil NTB V Sumbawa - Sumbawa Barat 6. Dapil NTB VI Kota Bima, Kabupaten Bima Dan Kabupaten Dompu 7. Dapil NTB VII Lombok Tengah 8. Dapil NTB VIII Lombok Tengah	-	-

	Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum)			
Periode	Periode jabatan anggota DPRD	-	-	-

2) Daftar Perda Inisiasi DPRD

Konsep : Peraturan Daerah Provinsi
Definisi : Daftar Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur yang merupakan Inisiasi DPRD, memuat Nomor Produk Hukum, dan Tahun disahkan. (Sumber Data: UU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Sekretariat DPRD NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 880. Format Data Daftar Perda Inisiasi DPRD

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Nomor Registrasi Produk Hukum	Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.	-	-	-

	(Sumber: Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)			
Nama Perda	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur yang merupakan Inisiasi DPRD	-	-	-
Periode	Periode jabatan anggota DPRD	-	-	-

3) Daftar Kegiatan *Hearing* dan Audiensi yang diterima DPRD

Konsep : *Hearing*, Audiensi
Definisi : Daftar Kegiatan *Hearing* dan Audiensi yang diterima DPRD memuat kegiatan/topik, elemen masyarakat yang melaksanakan, anggota DPRD yang menerima, dan waktu pelaksanaan *hearing*/audiensi.
Ukuran : -
Satuan : -
Metode Perhitungan : -
Sumber Data/Publikasi : Sekretariat DPRD NTB
Tautan Publikasi Sumber Data : -

Tabel 881. Format Data Daftar Kegiatan *Hearing* dan Audiensi yang diterima DPRD

Variabel	Definisi	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
Kode Provinsi	-	52	-	-
Nama Provinsi	-	Nusa Tenggara Barat	-	-
Kegiatan/Topik	Topik Pelaksanaan Kegiatan *Hearing* dan Audiensi yang diterima oleh DPRD	-	-	-

Elemen Masyarakat	Elemen Masyarakat yang melaksanakan Kegiatan *Hearing* dan Audiensi kepada DPRD	-	-	-
Penerima	Pejabat DPRD NTB yang menerima Kegiatan *Hearing* dan Audiensi	-	-	-
Jumlah Tamu	Banyaknya masyarakat yang mengikuti Kegiatan *Hearing* dan Audiensi kepada DPRD NTB pada waktu tertentu	-	Total	Orang
Tahun Pelaksanaan	Tahun pelaksanaan kegiatan *hearing* dan audiensi	-	-	-
Bulan Pelaksanaan	Bulan pelaksanaan kegiatan *hearing* dan audiensi	1. Januari; 2. Februari; 3. Maret; 4. April; 5. Mei; 6. Juni; 7. Juli; 8. Agustus; 9. September; 10. Oktober; 11. November; 12. Desember	-	-
Tanggal Pelaksanaan	Tanggal pelaksanaan kegiatan *hearing* dan audiensi	-	-	-

BAB III
PENUTUP

BAB III

PENUTUP

Bab III Penutup bertujuan untuk menjabarkan rencana implementasi metadata dalam proses tata kelola data untuk mewujudkan NTB Satu Data di Provinsi NTB. Penguatan tata kelola satu data daerah dengan penyusunan metadata dari seluruh data yang tertuang dalam Daftar Data Daerah Provinsi NTB Tahun 2025. Metadata memiliki arti penting dan strategis dalam kerangka peningkatan kualitas tata kelola satu data daerah. Penyusunan metadata Daftar Data Daerah ini menjadi salah satu prasyarat yang harus disediakan untuk menjamin agar data yang disediakan oleh produsen data lebih berkualitas. Metadata menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk menjamin kinerja produsen data dan walidata yang berkualitas. Hal ini terkait dengan tersedianya acuan yang jelas tentang ketentuan konsep, definisi, ukuran, satuan, dan berbagai ketentuan lain yang terkait dengan data yang akan dihasilkan. Metadata ini akan menjadi acuan pengumpulan dan pemeriksaan data, yang dilaksanakan oleh produsen data dan walidata dalam rangka

Metadata ini menggunakan pendekatan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) untuk proses pemilahan data yang dirancang sebagai upaya memperoleh data terpilah berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas, dan karakteristik kelompok lainnya. Hal ini sangat penting untuk masukan/*input* dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi pengelolaan pembangunan daerah. Selanjutnya, perlu dilaksanakan penilaian untuk mengukur efektivitas pemanfaatan metadata ini dalam mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data di Provinsi NTB. Hal ini akan berdampak pada perubahan proses bisnis pengelolaan data di tingkat Perangkat Daerah sebagai Produsen Data yang diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola data di Provinsi NTB.

METADATA NTB SATU DATA

Pedoman Pengumpulan Data Sektoral NTB Satu Data | 2025

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perangkat Daerah Provinsi NTB

No.	Perangkat Daerah
1	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
2	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
3	Biro Hukum Sekretariat Daerah
4	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
6	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
8	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
9	Biro Umum Sekretariat Daerah
10	Badan Kepegawaian Daerah
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
16	Badan Penghubung
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Badan Riset dan Inovasi Daerah
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Dinas Kesehatan
22	Dinas Ketahanan Pangan
23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26	Dinas Pariwisata
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	Dinas Perdagangan

No.	Perangkat Daerah
34	Dinas Perhubungan
35	Dinas Perindustrian
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
37	Dinas Pertanian dan Perkebunan
38	Dinas Perumahan dan Permukiman
39	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
40	Dinas Sosial
41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Inspektorat
43	Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir
44	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
45	Rumah Sakit Mandalika
46	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat
47	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
48	Satuan Polisi Pamong Praja
49	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lampiran 2. Kode Wilayah dan Nama Kabupaten/ Kota

No.	Kode Wilayah	Nama Kabupaten/ Kota
1	5201	Kabupaten Lombok Barat
2	5202	Kabupaten Lombok Tengah
3	5203	Kabupaten Lombok Timur
4	5204	Kabupaten Sumbawa
5	5205	Kabupaten Dompu
6	5206	Kabupaten Bima
7	5207	Kabupaten Sumbawa Barat
8	5208	Kabupaten Lombok Utara
9	5271	Kota Mataram
10	5272	Kota Bima

Lampiran 3. Kode Wilayah dan Nama Kecamatan

No.	Kode dan Nama Kabupaten/ Kota		Kode dan Nama Kecamatan	
1	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201010	Sekotong
2	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201011	Lembar
3	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201020	Gerung
4	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201030	Labu Api
5	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201040	Kediri
6	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201041	Kuripan
7	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201050	Narmada
8	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201051	Lingsar
9	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201060	Gunung Sari
10	5201	Kabupaten Lombok Barat	5201061	Batu Layar
11	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202010	Praya Barat
12	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202011	Praya Barat Daya
13	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202020	Pujut
14	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202030	Praya Timur
15	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202040	Janapria
16	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202050	Kopang
17	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202060	Praya
18	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202061	Praya Tengah
19	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202070	Jonggat
20	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202080	Pringgarata
21	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202090	Batukliang
22	5202	Kabupaten Lombok Tengah	5202091	Batukliang Utara
23	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203010	Keruak
24	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203011	Jerowaru
25	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203020	Sakra
26	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203021	Sakra Barat
27	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203022	Sakra Timur
28	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203030	Terara
29	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203031	Montong Gading
30	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203040	Sikur
31	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203050	Masbagik
32	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203051	Pringgasela
33	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203060	Sukamulia
34	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203061	Suralaga
35	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203070	Selong
36	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203071	Labuhan Haji
37	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203080	Pringgabaya

No.	Kode dan Nama Kabupaten/ Kota		Kode dan Nama Kecamatan	
38	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203081	Suela
39	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203090	Aikmel
40	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203091	Wanasaba
41	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203092	Sembalun
42	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203093	Lenek
43	5203	Kabupaten Lombok Timur	5203100	Sambelia
44	5204	Kabupaten Sumbawa	5204020	Lunyuk
45	5204	Kabupaten Sumbawa	5204021	Orong Telu
46	5204	Kabupaten Sumbawa	5204050	Alas
47	5204	Kabupaten Sumbawa	5204051	Alas Barat
48	5204	Kabupaten Sumbawa	5204052	Buer
49	5204	Kabupaten Sumbawa	5204061	Utan
50	5204	Kabupaten Sumbawa	5204062	Rhee
51	5204	Kabupaten Sumbawa	5204070	Batulanteh
52	5204	Kabupaten Sumbawa	5204080	Sumbawa
53	5204	Kabupaten Sumbawa	5204081	Labuhan Badas
54	5204	Kabupaten Sumbawa	5204082	Unter Iwes
55	5204	Kabupaten Sumbawa	5204090	Moyo Hilir
56	5204	Kabupaten Sumbawa	5204091	Moyo Utara
57	5204	Kabupaten Sumbawa	5204100	Moyo Hulu
58	5204	Kabupaten Sumbawa	5204110	Ropang
59	5204	Kabupaten Sumbawa	5204111	Lenangguar
60	5204	Kabupaten Sumbawa	5204112	Lantung
61	5204	Kabupaten Sumbawa	5204121	Lape
62	5204	Kabupaten Sumbawa	5204122	Lopok
63	5204	Kabupaten Sumbawa	5204130	Plampang
64	5204	Kabupaten Sumbawa	5204131	Labangka
65	5204	Kabupaten Sumbawa	5204132	Maronge
66	5204	Kabupaten Sumbawa	5204140	Empang
67	5204	Kabupaten Sumbawa	5204141	Tarano
68	5205	Kabupaten Dompu	5205010	Hu'u
69	5205	Kabupaten Dompu	5205011	Pajo
70	5205	Kabupaten Dompu	5205020	Dompu
71	5205	Kabupaten Dompu	5205030	Woja
72	5205	Kabupaten Dompu	5205040	Kilo
73	5205	Kabupaten Dompu	5205050	Kempo
74	5205	Kabupaten Dompu	5205051	Manggalewa
75	5205	Kabupaten Dompu	5205060	Pekat

No.	Kode dan Nama Kabupaten/ Kota		Kode dan Nama Kecamatan	
76	5206	Kabupaten Bima	5206010	Monta
77	5206	Kabupaten Bima	5206011	Parado
78	5206	Kabupaten Bima	5206020	Bolo
79	5206	Kabupaten Bima	5206021	Mada Pangga
80	5206	Kabupaten Bima	5206030	Woha
81	5206	Kabupaten Bima	5206040	Belo
82	5206	Kabupaten Bima	5206041	Palibelo
83	5206	Kabupaten Bima	5206050	Wawo
84	5206	Kabupaten Bima	5206051	Langgudu
85	5206	Kabupaten Bima	5206052	Lambitu
86	5206	Kabupaten Bima	5206060	Sape
87	5206	Kabupaten Bima	5206061	Lambu
88	5206	Kabupaten Bima	5206070	Wera
89	5206	Kabupaten Bima	5206071	Ambalawi
90	5206	Kabupaten Bima	5206080	Donggo
91	5206	Kabupaten Bima	5206081	Soromandi
92	5206	Kabupaten Bima	5206090	Sanggar
93	5206	Kabupaten Bima	5206091	Tambora
94	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207010	Sekongkang
95	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207020	Jereweh
96	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207021	Maluk
97	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207030	Taliwang
98	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207031	Brang Ene
99	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207040	Brang Rea
100	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207050	Seteluk
101	5207	Kabupaten Sumbawa Barat	5207051	Poto Tano
102	5208	Kabupaten Lombok Utara	5208010	Pemenang
103	5208	Kabupaten Lombok Utara	5208020	Tanjung
104	5208	Kabupaten Lombok Utara	5208030	Gangga
105	5208	Kabupaten Lombok Utara	5208040	Kayangan
106	5208	Kabupaten Lombok Utara	5208050	Bayan
107	5271	Kota Mataram	5271010	Ampenan
108	5271	Kota Mataram	5271011	Sekarbela
109	5271	Kota Mataram	5271020	Mataram
110	5271	Kota Mataram	5271021	Selaparang
111	5271	Kota Mataram	5271030	Cakranegara
112	5271	Kota Mataram	5271031	Sandubaya
113	5272	Kota Bima	5272010	Rasanae Barat

No.	Kode dan Nama Kabupaten/ Kota		Kode dan Nama Kecamatan	
114	5272	Kota Bima	5272011	Mpunda
115	5272	Kota Bima	5272020	Rasanae Timur
116	5272	Kota Bima	5272021	Raba
117	5272	Kota Bima	5272030	Asakota

Lampiran 4. Kode Wilayah dan Nama Desa/Kelurahan

1) Kabupaten Lombok Barat

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5201010	Sekotong	5201010001	Pelangan
2	5201010	Sekotong	5201010002	Sekotong Barat
3	5201010	Sekotong	5201010003	Buwun Mas
4	5201010	Sekotong	5201010004	Sekotong Tengah
5	5201010	Sekotong	5201010005	Kedaro
6	5201010	Sekotong	5201010006	Batu Putih
7	5201010	Sekotong	5201010007	Cendi Manik
8	5201010	Sekotong	5201010008	Gili Gede Indah
9	5201010	Sekotong	5201010011	Taman Baru
10	5201011	Lembar	5201011001	Mareje
11	5201011	Lembar	5201011002	Sekotong Timur
12	5201011	Lembar	5201011003	Lembar
13	5201011	Lembar	5201011004	Jembatan Kembar
14	5201011	Lembar	5201011005	Labuan Tereng
15	5201011	Lembar	5201011006	Mareje Timur
16	5201011	Lembar	5201011007	Lembar Selatan
17	5201011	Lembar	5201011008	Jembatan Gantung
18	5201011	Lembar	5201011009	Jembatan Kembar Timur
19	5201011	Lembar	5201011010	Eyat Mayang
20	5201020	Gerung	5201020003	Banyu Urip
21	5201020	Gerung	5201020004	Dasan Geres
22	5201020	Gerung	5201020005	Babussalam
23	5201020	Gerung	5201020006	Dasan Tapen
24	5201020	Gerung	5201020007	Beleke
25	5201020	Gerung	5201020009	Kebunayu
26	5201020	Gerung	5201020010	Gapuk
27	5201020	Gerung	5201020011	Suka Makmur
28	5201020	Gerung	5201020012	Tempos
29	5201020	Gerung	5201020013	Gerung Selatan
30	5201020	Gerung	5201020014	Gerung Utara
31	5201020	Gerung	5201020015	Mesanggok
32	5201020	Gerung	5201020016	Giri Tembesi
33	5201020	Gerung	5201020017	Taman Ayu
34	5201030	Labu Api	5201030001	Kuranji
35	5201030	Labu Api	5201030002	Perampuan

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
36	5201030	Labu Api	5201030003	Karang Bongkot
37	5201030	Labu Api	5201030004	Terong Tawah
38	5201030	Labu Api	5201030005	Bajur
39	5201030	Labu Api	5201030006	Telaga Waru
40	5201030	Labu Api	5201030007	Bagik Polak
41	5201030	Labu Api	5201030008	Bengkel
42	5201030	Labu Api	5201030009	Merembu
43	5201030	Labu Api	5201030010	Labu Api
44	5201030	Labu Api	5201030011	Kuranji Dalang
45	5201030	Labu Api	5201030012	Bagik Polak Barat
46	5201040	Kediri	5201040005	Jagaraga Indah
47	5201040	Kediri	5201040006	Montong Are
48	5201040	Kediri	5201040007	Kediri
49	5201040	Kediri	5201040008	Gelogor
50	5201040	Kediri	5201040009	Rumak
51	5201040	Kediri	5201040010	Banyumulek
52	5201040	Kediri	5201040011	Ombe Baru
53	5201040	Kediri	5201040012	Dasan Baru
54	5201040	Kediri	5201040013	Kediri Selatan
55	5201040	Kediri	5201040014	Lelede
56	5201041	Kuripan	5201041001	Kuripan Selatan
57	5201041	Kuripan	5201041002	Kuripan
58	5201041	Kuripan	5201041003	Kuripan Utara
59	5201041	Kuripan	5201041004	Jagaraga
60	5201041	Kuripan	5201041005	Giri Sasak
61	5201041	Kuripan	5201041006	Kuripan Timur
62	5201050	Narmada	5201050001	Sembung
63	5201050	Narmada	5201050002	Badrain
64	5201050	Narmada	5201050003	Batu Kuta
65	5201050	Narmada	5201050004	Tanak Beak
66	5201050	Narmada	5201050005	Peresak
67	5201050	Narmada	5201050006	Keru
68	5201050	Narmada	5201050007	Sedau
69	5201050	Narmada	5201050008	Lebah Sempage
70	5201050	Narmada	5201050009	Sesaot
71	5201050	Narmada	5201050010	Suranadi
72	5201050	Narmada	5201050011	Selat
73	5201050	Narmada	5201050012	Nyur Lembang

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
74	5201050	Narmada	5201050013	Lembuak
75	5201050	Narmada	5201050014	Dasan Tereng
76	5201050	Narmada	5201050015	Krama Jaya
77	5201050	Narmada	5201050016	Gerimax Indah
78	5201050	Narmada	5201050017	Narmada
79	5201050	Narmada	5201050018	Golong
80	5201050	Narmada	5201050019	Pakuan
81	5201050	Narmada	5201050020	Buwun Sejati
82	5201050	Narmada	5201050021	Mekar Sari
83	5201051	Lingsar	5201051001	Peteluan Indah
84	5201051	Lingsar	5201051002	Lingsar
85	5201051	Lingsar	5201051003	Batu Kumbung
86	5201051	Lingsar	5201051004	Batu Mekar
87	5201051	Lingsar	5201051005	Karang Bayan
88	5201051	Lingsar	5201051006	Langko
89	5201051	Lingsar	5201051007	Sigerongan
90	5201051	Lingsar	5201051008	Duman
91	5201051	Lingsar	5201051009	Dasan Geria
92	5201051	Lingsar	5201051010	Gegerung
93	5201051	Lingsar	5201051011	Giri Madia
94	5201051	Lingsar	5201051012	Gegelang
95	5201051	Lingsar	5201051013	Gontoran
96	5201051	Lingsar	5201051014	Saribaye
97	5201051	Lingsar	5201051015	Bug-bug
98	5201060	Gunung Sari	5201060001	Jati Sela
99	5201060	Gunung Sari	5201060002	Sesela
100	5201060	Gunung Sari	5201060003	Midang
101	5201060	Gunung Sari	5201060004	Kekeri
102	5201060	Gunung Sari	5201060005	Penimbung
103	5201060	Gunung Sari	5201060006	Mambalan
104	5201060	Gunung Sari	5201060007	Dopang
105	5201060	Gunung Sari	5201060008	Taman Sari
106	5201060	Gunung Sari	5201060009	Gunung Sari
107	5201060	Gunung Sari	5201060014	Kekait
108	5201060	Gunung Sari	5201060015	Mekar Sari
109	5201060	Gunung Sari	5201060016	Guntur Macan
110	5201060	Gunung Sari	5201060017	Gelangsar
111	5201060	Gunung Sari	5201060018	Ranjok

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
112	5201060	Gunung Sari	5201060019	Bukit Tinggi
113	5201060	Gunung Sari	5201060020	Jeringo
114	5201061	Batu Layar	5201061001	Sandik
115	5201061	Batu Layar	5201061002	Meninting
116	5201061	Batu Layar	5201061003	Batu Layar
117	5201061	Batu Layar	5201061004	Lembah Sari
118	5201061	Batu Layar	5201061005	Senteluk
119	5201061	Batu Layar	5201061006	Senggigi
120	5201061	Batu Layar	5201061007	Batu Layar Barat
121	5201061	Batu Layar	5201061008	Bengkaung
122	5201061	Batu Layar	5201061009	Pusuk Lestari

2) Kabupaten Lombok Tengah

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5202010	Praya Barat	5202010002	Selong Belanak
2	5202010	Praya Barat	5202010003	Mekar Sari
3	5202010	Praya Barat	5202010004	Banyu Urip
4	5202010	Praya Barat	5202010005	Kateng
5	5202010	Praya Barat	5202010006	Mangkung
6	5202010	Praya Barat	5202010007	Bondir
7	5202010	Praya Barat	5202010013	Setanggor
8	5202010	Praya Barat	5202010014	Penujak
9	5202010	Praya Barat	5202010015	Batujai
10	5202010	Praya Barat	5202010016	Tanak Rarang
11	5202011	Praya Barat Daya	5202011001	Montong Sapah
12	5202011	Praya Barat Daya	5202011002	Kabul
13	5202011	Praya Barat Daya	5202011003	Pelambik
14	5202011	Praya Barat Daya	5202011004	Ranggagata
15	5202011	Praya Barat Daya	5202011005	Ungga
16	5202011	Praya Barat Daya	5202011006	Darek
17	5202011	Praya Barat Daya	5202011007	Batu Jangkih
18	5202011	Praya Barat Daya	5202011008	Montong Ajan
19	5202011	Praya Barat Daya	5202011009	Pandan Indah
20	5202011	Praya Barat Daya	5202011010	Serage
21	5202011	Praya Barat Daya	5202011011	Teduh
22	5202011	Praya Barat Daya	-	Pandan Tinggang
23	5202020	Pujut	5202020001	Tumpak

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
24	5202020	Pujut	5202020002	Prabu
25	5202020	Pujut	5202020003	Kuta
26	5202020	Pujut	5202020004	Rembitan
27	5202020	Pujut	5202020005	Sukadana
28	5202020	Pujut	5202020006	Mertak
29	5202020	Pujut	5202020007	Pengengat
30	5202020	Pujut	5202020008	Teruwai
31	5202020	Pujut	5202020009	Gapura
32	5202020	Pujut	5202020010	Kawo
33	5202020	Pujut	5202020011	Segale Anyar
34	5202020	Pujut	5202020012	Sengkol
35	5202020	Pujut	5202020013	Pengembur
36	5202020	Pujut	5202020014	Ketara
37	5202020	Pujut	5202020015	Tanak Awu
38	5202020	Pujut	5202020016	Bangket Parak
39	5202020	Pujut	-	Dadap
40	5202020	Pujut	-	Kerame Jati
41	5202030	Praya Timur	5202030001	Kidang
42	5202030	Praya Timur	5202030002	Bilelando
43	5202030	Praya Timur	5202030003	Semoyang
44	5202030	Praya Timur	5202030004	Ganti
45	5202030	Praya Timur	5202030005	Beleka
46	5202030	Praya Timur	5202030006	Sengkerang
47	5202030	Praya Timur	5202030007	Landah
48	5202030	Praya Timur	5202030008	Marong
49	5202030	Praya Timur	5202030009	Mujur
50	5202030	Praya Timur	5202030010	Sukaraja
51	5202030	Praya Timur	-	Beleke Daye
52	5202030	Praya Timur	-	Beleke Lebe Sane
53	5202030	Praya Timur	-	Pegonak
54	5202030	Praya Timur	-	Jero Puri
55	5202040	Janapria	5202040001	Loang Maka
56	5202040	Janapria	5202040002	Langko
57	5202040	Janapria	5202040003	Selebung Rembiga
58	5202040	Janapria	5202040004	Bakan
59	5202040	Janapria	5202040005	Durian
60	5202040	Janapria	5202040006	Pendem
61	5202040	Janapria	5202040007	Janapria

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
62	5202040	Janapria	5202040008	Saba
63	5202040	Janapria	5202040009	Lekor
64	5202040	Janapria	5202040010	Kerembong
65	5202040	Janapria	5202040011	Jango
66	5202040	Janapria	5202040012	Setuta
67	5202040	Janapria	-	Prako
68	5202040	Janapria	-	Tibu Sisok
69	5202040	Janapria	-	Janggawana
70	5202040	Janapria	-	Lingkok Berenge
71	5202050	Kopang	5202050001	Muncan
72	5202050	Kopang	5202050002	Monggas
73	5202050	Kopang	5202050003	Darmaji
74	5202050	Kopang	5202050004	Dasan Baru
75	5202050	Kopang	5202050005	Kopang Rembiga
76	5202050	Kopang	5202050006	Montong Gamang
77	5202050	Kopang	5202050007	Lendang Ara
78	5202050	Kopang	5202050008	Bebuaq
79	5202050	Kopang	5202050009	Waja Geseng
80	5202050	Kopang	5202050010	Semparu
81	5202050	Kopang	5202050011	Aik Bual
82	5202050	Kopang	-	Berinding
83	5202050	Kopang	-	Pajangan
84	5202060	Praya	5202060001	Panjisari
85	5202060	Praya	5202060002	Leneng
86	5202060	Praya	5202060003	Renteng
87	5202060	Praya	5202060004	Praya
88	5202060	Praya	5202060005	Prapen
89	5202060	Praya	5202060006	Tiwugalih
90	5202060	Praya	5202060009	Semayan
91	5202060	Praya	5202060018	Bunut Baok
92	5202060	Praya	5202060019	Gerunung
93	5202060	Praya	5202060020	Gonjak
94	5202060	Praya	5202060021	Jago
95	5202060	Praya	5202060022	Aik Mual
96	5202060	Praya	5202060023	Mertak Tombok
97	5202060	Praya	5202060024	Montong Terep
98	5202060	Praya	5202060025	Mekar Damai
99	5202061	Praya Tengah	5202061001	Jontlak

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
100	5202061	Praya Tengah	5202061002	Gerantung
101	5202061	Praya Tengah	5202061003	Sasake
102	5202061	Praya Tengah	5202061004	Lajut
103	5202061	Praya Tengah	5202061005	Batunyala
104	5202061	Praya Tengah	5202061006	Pejanggik
105	5202061	Praya Tengah	5202061007	Kelebuh
106	5202061	Praya Tengah	5202061008	Beraim
107	5202061	Praya Tengah	5202061009	Pengadang
108	5202061	Praya Tengah	5202061010	Jurang Jaler
109	5202061	Praya Tengah	5202061011	Dakung
110	5202061	Praya Tengah	5202061012	Prai Meke
111	5202061	Praya Tengah	-	Lelong
112	5202070	Jonggat	5202070001	Labulia
113	5202070	Jonggat	5202070002	Sukarara
114	5202070	Jonggat	5202070003	Puyung
115	5202070	Jonggat	5202070004	Gemel
116	5202070	Jonggat	5202070005	Barejulat
117	5202070	Jonggat	5202070006	Bunkate
118	5202070	Jonggat	5202070007	Nyerot
119	5202070	Jonggat	5202070008	Batutulis
120	5202070	Jonggat	5202070009	Jelantik
121	5202070	Jonggat	5202070010	Ubung
122	5202070	Jonggat	5202070011	Bonjeruk
123	5202070	Jonggat	5202070012	Perina
124	5202070	Jonggat	5202070013	Pengenjek
125	5202080	Pringgarata	5202080001	Bilebante
126	5202080	Pringgarata	5202080002	Bagu
127	5202080	Pringgarata	5202080003	Sintung
128	5202080	Pringgarata	5202080004	Pringgarata
129	5202080	Pringgarata	5202080005	Murbaya
130	5202080	Pringgarata	5202080006	Sepakek
131	5202080	Pringgarata	5202080007	Pemepek
132	5202080	Pringgarata	5202080008	Menemeng
133	5202080	Pringgarata	5202080009	Arjangka
134	5202080	Pringgarata	5202080010	Taman Indah
135	5202080	Pringgarata	5202080011	Sisik
136	5202090	Batukliang	5202090001	Beber
137	5202090	Batukliang	5202090002	Pagutan

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
138	5202090	Batukliang	5202090003	Barabali
139	5202090	Batukliang	5202090004	Bujak
140	5202090	Batukliang	5202090005	Peresak
141	5202090	Batukliang	5202090006	Mantang
142	5202090	Batukliang	5202090007	Aik Dareq
143	5202090	Batukliang	5202090008	Selebung
144	5202090	Batukliang	5202090009	Tampak Siring
145	5202090	Batukliang	5202090010	Mekar Bersatu
146	5202090	Batukliang	-	Lendang Tampel
147	5202091	Batukliang Utara	5202091001	Mas-mas
148	5202091	Batukliang Utara	5202091002	Aik Bukaq
149	5202091	Batukliang Utara	5202091003	Setiling
150	5202091	Batukliang Utara	5202091004	Aik Berik
151	5202091	Batukliang Utara	5202091005	Teratak
152	5202091	Batukliang Utara	5202091006	Lantan
153	5202091	Batukliang Utara	5202091007	Tanak Beaq
154	5202091	Batukliang Utara	5202091008	Karang Sidemen

3) Kabupaten Lombok Timur

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5203010	Keruak	5203010005	Tanjung Luar
2	5203010	Keruak	5203010006	Pijot
3	5203010	Keruak	5203010007	Selebung Ketangga
4	5203010	Keruak	5203010008	Sepit
5	5203010	Keruak	5203010009	Keruak
6	5203010	Keruak	5203010010	Batu Putik
7	5203010	Keruak	5203010011	Senyiur
8	5203010	Keruak	5203010012	Ketapang Raya
9	5203010	Keruak	5203010013	Pijot Utara
10	5203010	Keruak	5203010014	Ketangga Jeraing
11	5203010	Keruak	5203010015	Mendana Raya
12	5203010	Keruak	5203010016	Setungkep Lingsar
13	5203010	Keruak	5203010017	Danerase
14	5203010	Keruak	5203010018	Montong Belae
15	5203010	Keruak	5203010019	Pulau Maringkik

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
16	5203011	Jerowaru	5203011001	Batunampar
17	5203011	Jerowaru	5203011002	Sukaraja
18	5203011	Jerowaru	5203011003	Jerowaru
19	5203011	Jerowaru	5203011004	Pemongkong
20	5203011	Jerowaru	5203011005	Pandan Wangi
21	5203011	Jerowaru	5203011006	Sekaroh
22	5203011	Jerowaru	5203011007	Wakan
23	5203011	Jerowaru	5203011008	Ekas Buana
24	5203011	Jerowaru	5203011009	Kwang Rundun
25	5203011	Jerowaru	5203011010	Batu Nampar Selatan
26	5203011	Jerowaru	5203011011	Pene
27	5203011	Jerowaru	5203011012	Sukadamai
28	5203011	Jerowaru	5203011013	Sepapan
29	5203011	Jerowaru	5203011014	Seriwe
30	5203011	Jerowaru	5203011015	Paremas
31	5203020	Sakra	5203020001	Suangi
32	5203020	Sakra	5203020012	Sakra
33	5203020	Sakra	5203020013	Kabar
34	5203020	Sakra	5203020014	Rumbuk
35	5203020	Sakra	5203020015	Keselet
36	5203020	Sakra	5203020016	Sakra Selatan
37	5203020	Sakra	5203020017	Rumbuk Timur
38	5203020	Sakra	5203020018	Suangi Timur
39	5203020	Sakra	5203020019	Moyot
40	5203020	Sakra	5203020020	Songak
41	5203020	Sakra	5203020021	Peresak
42	5203020	Sakra	5203020022	Kuang Baru
43	5203021	Sakra Barat	5203021001	Sukarara
44	5203021	Sakra Barat	5203021002	Gunung Rajak
45	5203021	Sakra Barat	5203021003	Rensing
46	5203021	Sakra Barat	5203021004	Bungtiang
47	5203021	Sakra Barat	5203021005	Pengkelakmas
48	5203021	Sakra Barat	5203021006	Borok Toyang
49	5203021	Sakra Barat	5203021007	Pejaring
50	5203021	Sakra Barat	5203021008	Montong Beter
51	5203021	Sakra Barat	5203021009	Mengkuru
52	5203021	Sakra Barat	5203021010	Rensing Raya
53	5203021	Sakra Barat	5203021011	Pematung

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
54	5203021	Sakra Barat	5203021012	Jero Gunung
55	5203021	Sakra Barat	5203021013	Boyemare
56	5203021	Sakra Barat	5203021014	Gadung Mas
57	5203021	Sakra Barat	5203021015	Tanak Kaken
58	5203021	Sakra Barat	5203021016	Rensing Bat
59	5203021	Sakra Barat	5203021017	Kembang Are Sampai
60	5203021	Sakra Barat	5203021018	Gerisak Semanggleng
61	5203022	Sakra Timur	5203022001	Gelanggang
62	5203022	Sakra Timur	5203022002	Surabaya
63	5203022	Sakra Timur	5203022003	Lepak
64	5203022	Sakra Timur	5203022004	Gereneng
65	5203022	Sakra Timur	5203022005	Montongtangi
66	5203022	Sakra Timur	5203022006	Menceh
67	5203022	Sakra Timur	5203022007	Lepak Timur
68	5203022	Sakra Timur	5203022008	Surabaya Utara
69	5203022	Sakra Timur	5203022009	Gereneng Timur
70	5203022	Sakra Timur	5203022010	Lenting
71	5203030	Terara	5203030001	Jenggik
72	5203030	Terara	5203030002	Rarang
73	5203030	Terara	5203030003	Suradadi
74	5203030	Terara	5203030004	Santong
75	5203030	Terara	5203030005	Terara
76	5203030	Terara	5203030006	Sukadana
77	5203030	Terara	5203030007	Rarang Selatan
78	5203030	Terara	5203030008	Lando
79	5203030	Terara	5203030009	Rarang Tengah
80	5203030	Terara	5203030010	Leming
81	5203030	Terara	5203030011	Selagik
82	5203030	Terara	5203030012	Embung Raja
83	5203030	Terara	5203030013	Kalianyar
84	5203030	Terara	5203030014	Embung Kandong
85	5203030	Terara	5203030015	Rarang Batas
86	5203030	Terara	5203030016	Pandan Duri
87	5203031	Montong Gading	5203031002	Kilang
88	5203031	Montong Gading	5203031003	Montong Betok
89	5203031	Montong Gading	5203031004	Pringgajurang
90	5203031	Montong Gading	5203031005	Perian
91	5203031	Montong Gading	5203031006	Jenggik Utara

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
92	5203031	Montong Gading	5203031007	Pesanggrahan
93	5203031	Montong Gading	5203031008	Pringgajurang Utara
94	5203031	Montong Gading	5203031009	Lendang Belo
95	5203040	Sikur	5203040001	Semaya
96	5203040	Sikur	5203040002	Sikur
97	5203040	Sikur	5203040003	Montongbaan
98	5203040	Sikur	5203040004	Loyok
99	5203040	Sikur	5203040005	Kotaraja
100	5203040	Sikur	5203040006	Tetebatu
101	5203040	Sikur	5203040007	Kembang Kuning
102	5203040	Sikur	5203040008	Montongbaan Selatan
103	5203040	Sikur	5203040009	Gelora
104	5203040	Sikur	5203040010	Darma Sari
105	5203040	Sikur	5203040011	Tetebatu Selatan
106	5203040	Sikur	5203040012	Jeruk Manis
107	5203040	Sikur	5203040013	Sikur Selatan
108	5203040	Sikur	5203040014	Sikur Barat
109	5203050	Masbagik	5203050001	Kesik
110	5203050	Masbagik	5203050002	Paok Motong
111	5203050	Masbagik	5203050003	Masbagik Selatan
112	5203050	Masbagik	5203050004	Masbagik Timur
113	5203050	Masbagik	5203050007	Masbagik Utara
114	5203050	Masbagik	5203050008	Danger
115	5203050	Masbagik	5203050009	Lendang Nangka
116	5203050	Masbagik	5203050010	Masbagik Utara Baru
117	5203050	Masbagik	5203050011	Lendang Nangka Utara
118	5203050	Masbagik	5203050012	Kumbang
119	5203051	Pringgasela	5203051001	Rempung
120	5203051	Pringgasela	5203051002	Pringgasela
121	5203051	Pringgasela	5203051003	Jurit
122	5203051	Pringgasela	5203051004	Pengadangan
123	5203051	Pringgasela	5203051005	Aikdewa
124	5203051	Pringgasela	5203051006	Jurit Baru
125	5203051	Pringgasela	5203051007	Pringgasela Selatan
126	5203051	Pringgasela	5203051008	Pengadangan Barat
127	5203051	Pringgasela	5203051009	Pringgasela Timur
128	5203051	Pringgasela	5203051010	Timbanuh
129	5203060	Sukamulia	5203060001	Setanggor

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
130	5203060	Sukamulia	5203060002	Jantuk
131	5203060	Sukamulia	5203060003	Padamara
132	5203060	Sukamulia	5203060004	Dasan Lekong
133	5203060	Sukamulia	5203060005	Sukamulia
134	5203060	Sukamulia	5203060006	Sukamulia Timur
135	5203060	Sukamulia	5203060007	Paok Pampang
136	5203060	Sukamulia	5203060008	Setanggor Selatan
137	5203060	Sukamulia	5203060009	Nyiur Tebel
138	5203061	Suralaga	5203061001	Anjani
139	5203061	Suralaga	5203061002	Tebaban
140	5203061	Suralaga	5203061003	Kerongkong
141	5203061	Suralaga	5203061004	Bagik Payung
142	5203061	Suralaga	5203061005	Suralaga
143	5203061	Suralaga	5203061006	Bagik Payung Selatan
144	5203061	Suralaga	5203061007	Gerung Permai
145	5203061	Suralaga	5203061008	Dasan Borok
146	5203061	Suralaga	5203061009	Tumbuh Mulia
147	5203061	Suralaga	5203061010	Gapuk
148	5203061	Suralaga	5203061011	Bintang Rinjani
149	5203061	Suralaga	5203061012	Paok Lombok
150	5203061	Suralaga	5203061013	Dames Damai
151	5203061	Suralaga	5203061014	Waringin
152	5203061	Suralaga	5203061015	Bagikpayung Timur
153	5203070	Selong	5203070001	Denggen
154	5203070	Selong	5203070005	Kelayu Jorong
155	5203070	Selong	5203070006	Kembang Sari
156	5203070	Selong	5203070007	Majidi
157	5203070	Selong	5203070008	Rakam
158	5203070	Selong	5203070009	Pancor
159	5203070	Selong	5203070010	Sekarteja
160	5203070	Selong	5203070011	Sandubaya
161	5203070	Selong	5203070012	Khusus Kota Selong
162	5203070	Selong	5203070013	Kelayu Selatan
163	5203070	Selong	5203070014	Kelayu Utara
164	5203070	Selong	5203070015	Denggen Timur
165	5203071	Labuhan Haji	5203071001	Penedagandor
166	5203071	Labuhan Haji	5203071002	Labuhan Haji
167	5203071	Labuhan Haji	5203071003	Teros

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
168	5203071	Labuhan Haji	5203071004	Tanjung
169	5203071	Labuhan Haji	5203071005	Surya Wangi
170	5203071	Labuhan Haji	5203071006	Ijobalit
171	5203071	Labuhan Haji	5203071007	Korleko
172	5203071	Labuhan Haji	5203071008	Kerta Sari
173	5203071	Labuhan Haji	5203071009	Banjar Sari
174	5203071	Labuhan Haji	5203071010	Tirtanadi
175	5203071	Labuhan Haji	5203071011	Korleko Selatan
176	5203071	Labuhan Haji	5203071012	Geres
177	5203080	Pringgabaya	5203080001	Bagik Papan
178	5203080	Pringgabaya	5203080002	Apitaik
179	5203080	Pringgabaya	5203080003	Kerumut
180	5203080	Pringgabaya	5203080004	Pohgading
181	5203080	Pringgabaya	5203080005	Batuyang
182	5203080	Pringgabaya	5203080006	Pringgabaya
183	5203080	Pringgabaya	5203080013	Labuhan Lombok
184	5203080	Pringgabaya	5203080014	Teko
185	5203080	Pringgabaya	5203080015	Pohgading Timur
186	5203080	Pringgabaya	5203080016	Pringgabaya Utara
187	5203080	Pringgabaya	5203080017	Tanak Gadang
188	5203080	Pringgabaya	5203080018	Anggaraksa
189	5203080	Pringgabaya	5203080019	Gunung Malang
190	5203080	Pringgabaya	5203080020	Seruni Mumbul
191	5203080	Pringgabaya	5203080021	Telaga Waru
192	5203081	Suela	5203081001	Suela
193	5203081	Suela	5203081002	Ketangga
194	5203081	Suela	5203081003	Selaparang
195	5203081	Suela	5203081004	Suntalangu
196	5203081	Suela	5203081005	Sapit
197	5203081	Suela	5203081006	Perigi
198	5203081	Suela	5203081007	Mekar Sari
199	5203081	Suela	5203081008	Puncak Jeringo
200	5203090	Aikmel	5203090004	Kalijaga
201	5203090	Aikmel	5203090008	Kembang Kerang
202	5203090	Aikmel	5203090009	Aikmel
203	5203090	Aikmel	5203090010	Aikmel Utara
204	5203090	Aikmel	5203090011	Kalijaga Selatan
205	5203090	Aikmel	5203090012	Kalijaga Timur

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
206	5203090	Aikmel	5203090014	Kembang Kerang Daya
207	5203090	Aikmel	5203090015	Aikmel Barat
208	5203090	Aikmel	5203090017	Toya
209	5203090	Aikmel	5203090020	Kalijaga Tengah
210	5203090	Aikmel	5203090021	Bagik Nyaka Santri
211	5203090	Aikmel	5203090022	Aik Prapa
212	5203090	Aikmel	5203090026	Keroya
213	5203090	Aikmel	5203090027	Aikmel Timur
214	5203091	Wanasaba	5203091001	Mamben Lauq
215	5203091	Wanasaba	5203091002	Mamben Daya
216	5203091	Wanasaba	5203091003	Wanasaba
217	5203091	Wanasaba	5203091004	Karang Baru
218	5203091	Wanasaba	5203091005	Bebidas
219	5203091	Wanasaba	5203091006	Tembeng Putik
220	5203091	Wanasaba	5203091007	Wanasaba Lauk
221	5203091	Wanasaba	5203091008	Mamben Baru
222	5203091	Wanasaba	5203091009	Beriri Jarak
223	5203091	Wanasaba	5203091010	Bandok
224	5203091	Wanasaba	5203091011	Wanasaba Daya
225	5203091	Wanasaba	5203091012	Otak Rarangan
226	5203091	Wanasaba	5203091013	Jineng
227	5203091	Wanasaba	5203091014	Karang Baru Timur
228	5203092	Sembalun	5203092001	Sembalun Bumbung
229	5203092	Sembalun	5203092002	Sembalun Lawang
230	5203092	Sembalun	5203092003	Sajang
231	5203092	Sembalun	5203092004	Bilok Petung
232	5203092	Sembalun	5203092005	Sembalun
233	5203092	Sembalun	5203092006	Sembalun Timba Gading
234	5203093	Lenek	-	Lenek
235	5203093	Lenek	-	Lenek Lauk
236	5203093	Lenek	-	Lenek Daya
237	5203093	Lenek	-	Lenek Baru
238	5203093	Lenek	-	Lenek Kalibambang
239	5203093	Lenek	-	Lenek Pesiraman
240	5203093	Lenek	-	Lenek Ramban Biak
241	5203093	Lenek	-	Lenek Duren
242	5203093	Lenek	-	Sukarema
243	5203093	Lenek	-	Kalijaga Baru

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
244	5203100	Sambelia	5203100001	Sambelia
245	5203100	Sambelia	5203100002	Belanting
246	5203100	Sambelia	5203100003	Obel Obel
247	5203100	Sambelia	5203100004	Sugian
248	5203100	Sambelia	5203100005	Labuhan Pandan
249	5203100	Sambelia	5203100006	Dara Kunci
250	5203100	Sambelia	5203100007	Bagik Manis
251	5203100	Sambelia	5203100008	Dadap
252	5203100	Sambelia	5203100009	Madayin
253	5203100	Sambelia	5203100010	Senanggalih
254	5203100	Sambelia	5203100011	Padak Guar

4) Kabupaten Sumbawa

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5204020	Lunyuk	5204020001	Pada Suka
2	5204020	Lunyuk	5204020002	Suka Maju
3	5204020	Lunyuk	5204020003	Lunyuk Ode
4	5204020	Lunyuk	5204020004	Lunyuk Rea
5	5204020	Lunyuk	5204020005	Jamu
6	5204020	Lunyuk	5204020009	Emang Lestari
7	5204020	Lunyuk	5204020010	Perung
8	5204020	Lunyuk	5204020011	Upt Brang Lamar
9	5204021	Orong Telu	5204021001	Mungkin
10	5204021	Orong Telu	5204021002	Kelawis
11	5204021	Orong Telu	5204021003	Sebeok
12	5204021	Orong Telu	5204021004	Senawang
13	5204050	Alas	5204050006	Luar
14	5204050	Alas	5204050007	Baru
15	5204050	Alas	5204050008	Kalimango
16	5204050	Alas	5204050009	Juran Alas
17	5204050	Alas	5204050010	Dalam
18	5204050	Alas	5204050011	Pulau Bungin
19	5204050	Alas	5204050013	Merente
20	5204050	Alas	5204050019	Labuhan Alas
21	5204051	Alas Barat	5204051001	Mapin Rea
22	5204051	Alas Barat	5204051002	Mapin Kebak
23	5204051	Alas Barat	5204051003	Labuhan Mapin

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
24	5204051	Alas Barat	5204051004	Lekong
25	5204051	Alas Barat	5204051005	Gontar
26	5204051	Alas Barat	5204051006	Usar Mapin
27	5204051	Alas Barat	5204051007	Gontar Baru
28	5204051	Alas Barat	5204051008	Mapin Beru
29	5204052	Buer	5204052001	Pulau Kaung
30	5204052	Buer	5204052002	Tarusa
31	5204052	Buer	5204052003	Juru Mapin
32	5204052	Buer	5204052004	Kalabeso
33	5204052	Buer	5204052005	Labuhan Burung
34	5204052	Buer	5204052006	Buin Baru
35	5204061	Utan	5204061001	Stowe Brang
36	5204061	Utan	5204061002	Tengah
37	5204061	Utan	5204061003	Sabedo
38	5204061	Utan	5204061004	Motong
39	5204061	Utan	5204061005	Orong Bawa
40	5204061	Utan	5204061006	Labuhan Bajo
41	5204061	Utan	5204061007	Pukat
42	5204061	Utan	5204061008	Jorok
43	5204061	Utan	5204061009	Bale Brang
44	5204062	Rhee	5204062001	Sampe
45	5204062	Rhee	5204062002	Luk
46	5204062	Rhee	5204062003	Rhee
47	5204062	Rhee	5204062004	Rhee Loka
48	5204070	Batulanteh	5204070001	Baturotok
49	5204070	Batulanteh	5204070002	Tankam Pulit
50	5204070	Batulanteh	5204070003	Bao Desa
51	5204070	Batulanteh	5204070004	Tepal
52	5204070	Batulanteh	5204070005	Batu Dulang
53	5204070	Batulanteh	5204070006	Kelungkung
54	5204080	Sumbawa	5204080004	Lempeh
55	5204080	Sumbawa	5204080010	Samapuin
56	5204080	Sumbawa	5204080011	Brang Bara
57	5204080	Sumbawa	5204080012	Pekat
58	5204080	Sumbawa	5204080013	Seketeng
59	5204080	Sumbawa	5204080014	Bugis
60	5204080	Sumbawa	5204080015	Uma Sima
61	5204080	Sumbawa	5204080016	Brang Biji

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
62	5204081	Labuhan Badas	5204081001	Labuhan Badas
63	5204081	Labuhan Badas	5204081002	Karang Dima
64	5204081	Labuhan Badas	5204081003	Labuhan Sumbawa
65	5204081	Labuhan Badas	5204081004	Labuhan Aji
66	5204081	Labuhan Badas	5204081005	Sebotok
67	5204081	Labuhan Badas	5204081006	Bajo Medang
68	5204081	Labuhan Badas	5204081007	Bugis Medang
69	5204082	Unter Iwes	5204082001	Pelat
70	5204082	Unter Iwes	5204082002	Kerekeh
71	5204082	Unter Iwes	5204082003	Boak
72	5204082	Unter Iwes	5204082004	Pungka
73	5204082	Unter Iwes	5204082005	Jorok
74	5204082	Unter Iwes	5204082006	Kerato
75	5204082	Unter Iwes	5204082007	Uma Beringin
76	5204082	Unter Iwes	5204082008	Nijang
77	5204090	Moyo Hilir	5204090001	Serading
78	5204090	Moyo Hilir	5204090002	Kakiang
79	5204090	Moyo Hilir	5204090003	Moyo
80	5204090	Moyo Hilir	5204090004	Poto
81	5204090	Moyo Hilir	5204090005	Berare
82	5204090	Moyo Hilir	5204090006	Ngeru
83	5204090	Moyo Hilir	5204090010	Olat Rawa
84	5204090	Moyo Hilir	5204090011	Batu Bangka
85	5204090	Moyo Hilir	5204090013	Moyo Mekar
86	5204090	Moyo Hilir	5204090014	Labuhan Ijuk
87	5204091	Moyo Utara	5204091001	Sebewe
88	5204091	Moyo Utara	5204091002	Pungkit
89	5204091	Moyo Utara	5204091003	Kukin
90	5204091	Moyo Utara	5204091004	Baru Tahan
91	5204091	Moyo Utara	5204091005	Penyaring
92	5204091	Moyo Utara	5204091006	Songkar
93	5204100	Moyo Hulu	5204100001	Sempe
94	5204100	Moyo Hulu	5204100002	Semamung
95	5204100	Moyo Hulu	5204100003	Sebasang
96	5204100	Moyo Hulu	5204100004	Batu Tering
97	5204100	Moyo Hulu	5204100005	Batu Bulan
98	5204100	Moyo Hulu	5204100006	Mokong
99	5204100	Moyo Hulu	5204100007	Pernek

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
100	5204100	Moyo Hulu	5204100008	Leseng
101	5204100	Moyo Hulu	5204100009	Lito
102	5204100	Moyo Hulu	5204100010	Marga Karya
103	5204100	Moyo Hulu	5204100011	Brang Rea
104	5204100	Moyo Hulu	5204100012	Maman
105	5204110	Ropang	5204110002	Lebangkar
106	5204110	Ropang	5204110003	Lebin
107	5204110	Ropang	5204110008	Lawin
108	5204110	Ropang	5204110010	Ropang
109	5204110	Ropang	5204110011	Ranan
110	5204111	Lenangguar	5204111001	Ledang
111	5204111	Lenangguar	5204111002	Tatebal
112	5204111	Lenangguar	5204111003	Lenangguar
113	5204111	Lenangguar	5204111004	Telaga
114	5204112	Lantung	5204112001	Sepukur
115	5204112	Lantung	5204112002	Ai Mual
116	5204112	Lantung	5204112003	Lantung
117	5204112	Lantung	5204112004	Padesa
118	5204121	Lape	5204121001	Lape
119	5204121	Lape	5204121002	Dete
120	5204121	Lape	5204121003	Labuhan Kuris
121	5204121	Lape	5204121004	Hijrah
122	5204122	Lopok	5204122001	Pungkit
123	5204122	Lopok	5204122002	Lopok
124	5204122	Lopok	5204122003	Lopok Beru
125	5204122	Lopok	5204122004	Langam
126	5204122	Lopok	5204122005	Berora
127	5204122	Lopok	5204122006	Mama
128	5204122	Lopok	5204122007	Tatede
129	5204130	Plampang	5204130006	Sepakat
130	5204130	Plampang	5204130007	Upt Prode Sp I
131	5204130	Plampang	5204130008	Upt Prode Sp Ii
132	5204130	Plampang	5204130009	Plampang
133	5204130	Plampang	5204130010	Sepayung
134	5204130	Plampang	5204130011	Teluk Santong
135	5204130	Plampang	5204130012	Muer
136	5204130	Plampang	5204130017	Brang Kolong
137	5204130	Plampang	5204130018	Selante

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
138	5204130	Plampang	5204130019	Usar
139	5204131	Labangka	5204131001	Jaya Makmur
140	5204131	Labangka	5204131002	Sekokat
141	5204131	Labangka	5204131003	Suka Damai
142	5204131	Labangka	5204131004	Labangka
143	5204131	Labangka	5204131005	Suka Mulya
144	5204132	Maronge	5204132001	Maronge
145	5204132	Maronge	5204132002	Labuhan Sangoro
146	5204132	Maronge	5204132003	Simu
147	5204132	Maronge	5204132004	Pemasar
148	5204140	Empang	5204140001	Boal
149	5204140	Empang	5204140002	Empang Atas
150	5204140	Empang	5204140003	Jotang
151	5204140	Empang	5204140005	Ongko
152	5204140	Empang	5204140007	Empang Bawa
153	5204140	Empang	5204140011	Lamenta
154	5204140	Empang	5204140013	Gapit
155	5204140	Empang	5204140014	Pamanto
156	5204140	Empang	5204140015	Jotang Beru
157	5204140	Empang	5204140016	Bunga Eja
158	5204141	Tarano	5204141001	Labuhan Bontong
159	5204141	Tarano	5204141002	Labuhan Aji
160	5204141	Tarano	5204141003	Bantulanteh
161	5204141	Tarano	5204141004	Labuhan Jambu
162	5204141	Tarano	5204141005	Tolo' Oi
163	5204141	Tarano	5204141006	Mata
164	5204141	Tarano	5204141007	Banda
165	5204141	Tarano	5204141008	Labuhan Pidang

5) Kabupaten Dompu

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5205010	Hu'u	5205010001	Huu
2	5205010	Hu'u	5205010002	Daha
3	5205010	Hu'u	5205010003	Rasabou
4	5205010	Hu'u	5205010004	Cempi Jaya
5	5205010	Hu'u	5205010005	Adu
6	5205010	Hu'u	5205010006	Sawe

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
7	5205010	Hu'u	5205010007	Jala
8	5205010	Hu'u	5205010008	Marada
9	5205011	Pajo	5205011001	Jambu
10	5205011	Pajo	5205011002	Lune
11	5205011	Pajo	5205011003	Woko
12	5205011	Pajo	5205011004	Ranggo
13	5205011	Pajo	5205011005	Lepadi
14	5205011	Pajo	5205011006	Temba Lae
15	5205020	Dompu	5205020001	Mbawi
16	5205020	Dompu	5205020002	Dorebara
17	5205020	Dompu	5205020004	Kandai Satu
18	5205020	Dompu	5205020005	Karijawa
19	5205020	Dompu	5205020006	Potu
20	5205020	Dompu	5205020007	Bada
21	5205020	Dompu	5205020008	Bali
22	5205020	Dompu	5205020009	Dorotangga
23	5205020	Dompu	5205020010	Oo
24	5205020	Dompu	5205020011	Katua
25	5205020	Dompu	5205020012	Karamabura
26	5205020	Dompu	5205020013	Kareke
27	5205020	Dompu	5205020014	Mangge Nae
28	5205020	Dompu	5205020015	Mangge Asi
29	5205020	Dompu	5205020016	Sorisakolo
30	5205030	Woja	5205030001	Riwo
31	5205030	Woja	5205030002	Madaprama
32	5205030	Woja	5205030003	Bara
33	5205030	Woja	5205030004	Nowa
34	5205030	Woja	5205030005	Wawonduru
35	5205030	Woja	5205030006	Matua
36	5205030	Woja	5205030007	Montabaru
37	5205030	Woja	5205030008	Kandai Dua
38	5205030	Woja	5205030009	Simpasai
39	5205030	Woja	5205030010	Saneo
40	5205030	Woja	5205030011	Mumbu
41	5205030	Woja	5205030012	Bakajaya
42	5205030	Woja	5205030013	Rababaka
43	5205030	Woja	5205030014	Serakapi
44	5205040	Kilo	5205040001	Mbuju

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
45	5205040	Kilo	5205040002	Taropo
46	5205040	Kilo	5205040003	Kramat
47	5205040	Kilo	5205040004	Malaju
48	5205040	Kilo	5205040005	Lasi
49	5205040	Kilo	5205040006	Kiwu
50	5205050	Kempo	5205050009	Ta'a
51	5205050	Kempo	5205050010	Kempo
52	5205050	Kempo	5205050011	Soro
53	5205050	Kempo	5205050012	Konte
54	5205050	Kempo	5205050013	So Nggajah
55	5205050	Kempo	5205050014	Tolo Kalo
56	5205050	Kempo	5205050015	Doro Kobo
57	5205050	Kempo	5205050016	Soro Barat
58	5205051	Manggalewa	5205051001	Kwangko
59	5205051	Manggalewa	5205051002	Nangatumpu
60	5205051	Manggalewa	5205051003	Banggo
61	5205051	Manggalewa	5205051004	Soriutu
62	5205051	Manggalewa	5205051005	Doromelo
63	5205051	Manggalewa	5205051006	Lanci Jaya
64	5205051	Manggalewa	5205051007	Nusa Jaya
65	5205051	Manggalewa	5205051008	Suka Damai
66	5205051	Manggalewa	5205051009	Tanju
67	5205051	Manggalewa	5205051010	Kampas Meci
68	5205051	Manggalewa	5205051011	Tekasire
69	5205051	Manggalewa	5205051012	Anamina
70	5205060	Pekat	5205060001	Doropeti
71	5205060	Pekat	5205060002	Beringin Jaya
72	5205060	Pekat	5205060003	Pekat
73	5205060	Pekat	5205060004	Sorinomo
74	5205060	Pekat	5205060005	Tambora
75	5205060	Pekat	5205060006	Kadindi
76	5205060	Pekat	5205060007	Nangamiro
77	5205060	Pekat	5205060008	Calabai
78	5205060	Pekat	5205060009	Nangakara
79	5205060	Pekat	5205060010	Kadindi Barat
80	5205060	Pekat	5205060011	Sori Tatanga
81	5205060	Pekat	5205060012	Karombo

6) Kabupaten Bima

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5206010	Monta	5206010005	Tolotangga
2	5206010	Monta	5206010006	Sondo
3	5206010	Monta	5206010007	Simpasai
4	5206010	Monta	5206010008	Sie
5	5206010	Monta	5206010009	Tangga
6	5206010	Monta	5206010010	Monta
7	5206010	Monta	5206010011	Sakuru
8	5206010	Monta	5206010012	Baralau
9	5206010	Monta	5206010014	Tolouwi
10	5206010	Monta	5206010015	Willamaci
11	5206010	Monta	5206010016	Pela
12	5206010	Monta	5206010017	Tangga Baru
13	5206010	Monta	5206010018	Nontotera
14	5206010	Monta	5206010019	Waro
15	5206011	Parado	5206011001	Lere
16	5206011	Parado	5206011002	Paradowane
17	5206011	Parado	5206011003	Kuta
18	5206011	Parado	5206011004	Paradorato
19	5206011	Parado	5206011005	Kanca
20	5206020	Bolo	5206020004	Sanolo
21	5206020	Bolo	5206020005	Sondosia
22	5206020	Bolo	5206020006	Bontokape
23	5206020	Bolo	5206020007	Timu
24	5206020	Bolo	5206020008	Leu
25	5206020	Bolo	5206020013	Tambe
26	5206020	Bolo	5206020014	Rasabou
27	5206020	Bolo	5206020015	Rato
28	5206020	Bolo	5206020016	Kananga
29	5206020	Bolo	5206020017	Nggembe
30	5206020	Bolo	5206020018	Tumpu
31	5206020	Bolo	5206020019	Rada
32	5206020	Bolo	5206020020	Darussalam
33	5206020	Bolo	5206020021	Kara
34	5206021	Mada Pangga	5206021001	Woro
35	5206021	Mada Pangga	5206021002	Campa
36	5206021	Mada Pangga	5206021003	Mpuri
37	5206021	Mada Pangga	5206021004	Dena

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
38	5206021	Mada Pangga	5206021005	Rade
39	5206021	Mada Pangga	5206021006	Monggo
40	5206021	Mada Pangga	5206021007	Ndano
41	5206021	Mada Pangga	5206021008	Tonda
42	5206021	Mada Pangga	5206021010	Bolo
43	5206021	Mada Pangga	5206021011	Mada Wau
44	5206021	Mada Pangga	5206021012	Ncandi
45	5206030	Woha	5206030001	Keli
46	5206030	Woha	5206030002	Tenga
47	5206030	Woha	5206030003	Naru
48	5206030	Woha	5206030004	Nisa
49	5206030	Woha	5206030005	Tente
50	5206030	Woha	5206030006	Rabakodo
51	5206030	Woha	5206030007	Samili
52	5206030	Woha	5206030008	Kalampa
53	5206030	Woha	5206030009	Risa
54	5206030	Woha	5206030010	Pandai
55	5206030	Woha	5206030011	Donggobolo
56	5206030	Woha	5206030012	Dadibou
57	5206030	Woha	5206030013	Talabiu
58	5206030	Woha	5206030014	Wadu Wani
59	5206030	Woha	5206030015	Penapali
60	5206040	Belo	5206040005	Ncera
61	5206040	Belo	5206040006	Lido
62	5206040	Belo	5206040007	Ngali
63	5206040	Belo	5206040008	Renda
64	5206040	Belo	5206040009	Cenggu
65	5206040	Belo	5206040010	Runggu
66	5206040	Belo	5206040018	Soki
67	5206040	Belo	5206040019	Roka
68	5206040	Belo	5206040020	Diha
69	5206041	Palibelo	5206041001	Belo
70	5206041	Palibelo	5206041002	Roi
71	5206041	Palibelo	5206041003	Dore
72	5206041	Palibelo	5206041004	Nata
73	5206041	Palibelo	5206041005	Ntonggu
74	5206041	Palibelo	5206041006	Teke
75	5206041	Palibelo	5206041007	Tonggondoa

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
76	5206041	Palibelo	5206041008	Tonggorisa
77	5206041	Palibelo	5206041009	Panda
78	5206041	Palibelo	5206041010	Ragi
79	5206041	Palibelo	5206041011	Padolo
80	5206041	Palibelo	5206041012	Bre
81	5206050	Wawo	5206050011	Tarlawi
82	5206050	Wawo	5206050012	Raba
83	5206050	Wawo	5206050013	Pesa
84	5206050	Wawo	5206050015	Ntori
85	5206050	Wawo	5206050016	Maria
86	5206050	Wawo	5206050018	Kambilo
87	5206050	Wawo	5206050019	Kombo
88	5206050	Wawo	5206050020	Maria Utara
89	5206050	Wawo	5206050021	Riamau
90	5206051	Langgudu	5206051002	Laju
91	5206051	Langgudu	5206051004	Doro O'o
92	5206051	Langgudu	5206051006	Waworada
93	5206051	Langgudu	5206051007	Kawuwu
94	5206051	Langgudu	5206051008	Karumbu
95	5206051	Langgudu	5206051009	Kalodu
96	5206051	Langgudu	5206051010	Rupe
97	5206051	Langgudu	5206051011	Kangga
98	5206051	Langgudu	5206051012	Karampi
99	5206051	Langgudu	5206051013	Wadu Ruka
100	5206051	Langgudu	5206051014	Dumu
101	5206051	Langgudu	5206051015	Rompo
102	5206051	Langgudu	5206051016	Sambane
103	5206051	Langgudu	5206051017	Sarae Ruma
104	5206051	Langgudu	5206051018	Pusu
105	5206052	Lambitu	5206052001	Sambori
106	5206052	Lambitu	5206052002	Kaboro
107	5206052	Lambitu	5206052003	Kuta
108	5206052	Lambitu	5206052004	Teta
109	5206052	Lambitu	5206052005	Kaowa
110	5206052	Lambitu	5206052006	Londu
111	5206060	Sape	5206060008	Sari
112	5206060	Sape	5206060009	Boke
113	5206060	Sape	5206060010	Jia

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
114	5206060	Sape	5206060012	Naru
115	5206060	Sape	5206060014	Bajopulau
116	5206060	Sape	5206060015	Bugis
117	5206060	Sape	5206060016	Rasabou
118	5206060	Sape	5206060017	Nae
119	5206060	Sape	5206060018	Parangina
120	5206060	Sape	5206060019	Raioi
121	5206060	Sape	5206060020	Sangia
122	5206060	Sape	5206060021	Kowo
123	5206060	Sape	5206060022	Buncu
124	5206060	Sape	5206060023	Poja
125	5206060	Sape	5206060024	Tanah Putih
126	5206060	Sape	5206060025	Naru Barat
127	5206060	Sape	5206060026	Lamere
128	5206060	Sape	5206060027	Oi Maci
129	5206061	Lambu	5206061001	Mangge
130	5206061	Lambu	5206061002	Kaleo
131	5206061	Lambu	5206061003	Simpasai
132	5206061	Lambu	5206061004	Soro
133	5206061	Lambu	5206061005	Lanta
134	5206061	Lambu	5206061006	Rato
135	5206061	Lambu	5206061007	Sumi
136	5206061	Lambu	5206061008	Nggelu
137	5206061	Lambu	5206061009	Lambu
138	5206061	Lambu	5206061010	Hidirasa
139	5206061	Lambu	5206061012	Melayu
140	5206061	Lambu	5206061013	Lanta Barat
141	5206061	Lambu	5206061014	Monta Baru
142	5206061	Lambu	5206061015	Sangga
143	5206070	Wera	5206070002	Ntoke
144	5206070	Wera	5206070003	Pai
145	5206070	Wera	5206070004	Bala
146	5206070	Wera	5206070005	Oitui
147	5206070	Wera	5206070006	Tawali
148	5206070	Wera	5206070007	Sangiang
149	5206070	Wera	5206070008	Hidirasa
150	5206070	Wera	5206070009	Nunggi
151	5206070	Wera	5206070010	Wora

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
152	5206070	Wera	5206070015	Tadewa
153	5206070	Wera	5206070016	Nanga Wera
154	5206070	Wera	5206070017	Kalajena
155	5206070	Wera	5206070018	Ranggasolo
156	5206070	Wera	5206070019	Mandala
157	5206071	Ambalawi	5206071001	Rite
158	5206071	Ambalawi	5206071002	Talapiti
159	5206071	Ambalawi	5206071003	Tolowata
160	5206071	Ambalawi	5206071004	Nipa
161	5206071	Ambalawi	5206071005	Mawu
162	5206071	Ambalawi	5206071006	Kole
163	5206080	Donggo	5206080001	Rora
164	5206080	Donggo	5206080002	Palama
165	5206080	Donggo	5206080003	Mbawa
166	5206080	Donggo	5206080004	O'o
167	5206080	Donggo	5206080005	Doridungga
168	5206080	Donggo	5206080008	Kala
169	5206080	Donggo	5206080012	Bumi Pajo
170	5206080	Donggo	5206080013	Mpili
171	5206080	Donggo	5206080014	Ndano Nae
172	5206081	Soromandi	5206081001	Bajo
173	5206081	Soromandi	5206081002	Punti
174	5206081	Soromandi	5206081003	Wadukopa
175	5206081	Soromandi	5206081004	Kananta
176	5206081	Soromandi	5206081005	Sai
177	5206081	Soromandi	5206081006	Sampungu
178	5206081	Soromandi	5206081007	Lewintana
179	5206090	Sanggar	5206090004	Oi Saro
180	5206090	Sanggar	5206090005	Piong
181	5206090	Sanggar	5206090006	Boro
182	5206090	Sanggar	5206090007	Kore
183	5206090	Sanggar	5206090008	Taloko
184	5206090	Sanggar	5206090009	Sandue
185	5206091	Tambora	5206091001	Labuhan Kananga
186	5206091	Tambora	5206091002	Kawinda Nae
187	5206091	Tambora	5206091003	Oi Panihi
188	5206091	Tambora	5206091004	Kawinda Toi
189	5206091	Tambora	5206091005	Rasabou

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
190	5206091	Tambora	5206091009	Oi Bura
191	5206091	Tambora	5206091011	Oi Katupa

7) Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5207010	Sekongkang	5207010001	Sekongkang Bawah
2	5207010	Sekongkang	5207010002	Sekongkang Atas
3	5207010	Sekongkang	5207010003	Tongo
4	5207010	Sekongkang	5207010004	Ai Kangkung
5	5207010	Sekongkang	5207010005	Tatar
6	5207010	Sekongkang	5207010006	Talonang Baru
7	5207010	Sekongkang	5207010007	Kemuning
8	5207020	Jereweh	5207020002	Belo
9	5207020	Jereweh	5207020004	Goa
10	5207020	Jereweh	5207020005	Beru
11	5207020	Jereweh	5207020006	Dasan Anyar
12	5207021	Maluk	5207021001	Maluk
13	5207021	Maluk	5207021002	Benete
14	5207021	Maluk	5207021003	Bukit Damai
15	5207021	Maluk	5207021004	Mantun
16	5207021	Maluk	5207021005	Pasir Putih
17	5207030	Taliwang	5207030003	Lalar Liang
18	5207030	Taliwang	5207030004	Labuan Lalar
19	5207030	Taliwang	5207030005	Kuang
20	5207030	Taliwang	5207030006	Labuan Kertasari
21	5207030	Taliwang	5207030007	Bugis
22	5207030	Taliwang	5207030008	Dalam
23	5207030	Taliwang	5207030009	Menala
24	5207030	Taliwang	5207030010	Sampir
25	5207030	Taliwang	5207030011	Seloto
26	5207030	Taliwang	5207030012	Tamekan
27	5207030	Taliwang	5207030013	Banjar
28	5207030	Taliwang	5207030014	Batu Putih
29	5207030	Taliwang	5207030015	Telaga Bertong
30	5207030	Taliwang	5207030016	Sermong
31	5207030	Taliwang	5207030017	Arab Kenangan
32	5207030	Taliwang	-	Lamunga

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
33	5207031	Brang Ene	5207031001	Kalimantong
34	5207031	Brang Ene	5207031002	Mura
35	5207031	Brang Ene	5207031003	Lampok
36	5207031	Brang Ene	5207031004	Manemeng
37	5207031	Brang Ene	5207031005	Mujahiddin
38	5207031	Brang Ene	5207031006	Mataiyang
39	5207040	Brang Rea	5207040001	Sapugara Bree
40	5207040	Brang Rea	5207040002	Desa Beru
41	5207040	Brang Rea	5207040003	Tepas
42	5207040	Brang Rea	5207040004	Bangkat Monteh
43	5207040	Brang Rea	5207040005	Seminar Salit
44	5207040	Brang Rea	5207040006	Tepas Sepakat
45	5207040	Brang Rea	5207040007	Moteng
46	5207040	Brang Rea	5207040008	Lamuntet
47	5207040	Brang Rea	5207040009	Rarak Rongis
48	5207050	Seteluk	5207050002	Kelanir
49	5207050	Seteluk	5207050003	Meraran
50	5207050	Seteluk	5207050004	Air Suning
51	5207050	Seteluk	5207050005	Rempe
52	5207050	Seteluk	5207050006	Tapir
53	5207050	Seteluk	5207050007	Seteluk Atas
54	5207050	Seteluk	5207050008	Seteluk Tengah
55	5207050	Seteluk	5207050009	Lamusung
56	5207050	Seteluk	5207050010	Loka
57	5207050	Seteluk	5207050011	Seran
58	5207051	Poto Tano	5207051001	Senayan
59	5207051	Poto Tano	5207051002	Mantar
60	5207051	Poto Tano	5207051003	Kiantar
61	5207051	Poto Tano	5207051004	Poto Tano
62	5207051	Poto Tano	5207051005	Upt Tambak Sari
63	5207051	Poto Tano	5207051006	Tua Nanga
64	5207051	Poto Tano	5207051007	Tebo
65	5207051	Poto Tano	5207051008	Kokar Lian

8) Kabupaten Lombok Utara

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5208010	Pemenang	5208010001	Malaka
2	5208010	Pemenang	5208010002	Pemenang Barat
3	5208010	Pemenang	5208010003	Pemenang Timur
4	5208010	Pemenang	5208010004	Gili Indah
5	5208010	Pemenang	-	Menggala
6	5208020	Tanjung	5208020001	Sigar Penjalin
7	5208020	Tanjung	5208020002	Teniga
8	5208020	Tanjung	5208020003	Tegal Maja
9	5208020	Tanjung	5208020004	Jenggala
10	5208020	Tanjung	5208020005	Tanjung
11	5208020	Tanjung	5208020006	Sokong
12	5208020	Tanjung	5208020007	Medana
13	5208020	Tanjung	-	Sama Guna
14	5208030	Gangga	5208030001	Bentek
15	5208030	Gangga	5208030002	Gondang
16	5208030	Gangga	5208030003	Genggelang
17	5208030	Gangga	5208030004	Rempek
18	5208030	Gangga	5208030005	Sambik Bangkol
19	5208030	Gangga	-	Selelos
20	5208030	Gangga	-	Rempek Darussalam
21	5208030	Gangga	-	Segara Katon
22	5208040	Kayangan	5208040001	Santong
23	5208040	Kayangan	5208040002	Pendua
24	5208040	Kayangan	5208040003	Kayangan
25	5208040	Kayangan	5208040004	Dangiang
26	5208040	Kayangan	5208040005	Sesait
27	5208040	Kayangan	5208040006	Gumantar
28	5208040	Kayangan	5208040007	Selengen
29	5208040	Kayangan	5208040008	Salut
30	5208040	Kayangan	-	Pansor
31	5208040	Kayangan	-	Santong Mulia
32	5208050	Bayan	5208050001	Mumbul Sari
33	5208050	Bayan	5208050002	Akar Akar
34	5208050	Bayan	5208050003	Sukadana
35	5208050	Bayan	5208050004	Anyar
36	5208050	Bayan	5208050005	Senaru
37	5208050	Bayan	5208050006	Bayan

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
38	5208050	Bayan	5208050007	Karang Bajo
39	5208050	Bayan	5208050008	Loloan
40	5208050	Bayan	5208050009	Sambik Elen
41	5208050	Bayan	-	Gunjan Asri
42	5208050	Bayan	-	Andalan
43	5208050	Bayan	-	Batu Rakit

9) Kota Mataram

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5271010	Ampenan	5271010004	Ampenan Selatan
2	5271010	Ampenan	5271010005	Ampenan Tengah
3	5271010	Ampenan	5271010006	Pejeruk
4	5271010	Ampenan	5271010007	Ampenan Utara
5	5271010	Ampenan	5271010008	Banjar
6	5271010	Ampenan	5271010009	Taman Sari
7	5271010	Ampenan	5271010010	Kebon Sari
8	5271010	Ampenan	5271010011	Pejarakan Karya
9	5271010	Ampenan	5271010012	Bintaro
10	5271010	Ampenan	5271010013	Dayan Peken
11	5271011	Sekarbela	5271011001	Jempong Baru
12	5271011	Sekarbela	5271011002	Tanjung Karang
13	5271011	Sekarbela	5271011003	Karang Pule
14	5271011	Sekarbela	5271011004	Tanjung Karang Permai
15	5271011	Sekarbela	5271011005	Kekalik Jaya
16	5271020	Mataram	5271020001	Pagesangan
17	5271020	Mataram	5271020002	Mataram Timur
18	5271020	Mataram	5271020003	Pagesangan Barat
19	5271020	Mataram	5271020004	Pagesangan Timur
20	5271020	Mataram	5271020005	Pejanggik
21	5271020	Mataram	5271020006	Punia
22	5271020	Mataram	5271020007	Pagutan
23	5271020	Mataram	5271020008	Pagutan Barat
24	5271020	Mataram	5271020009	Pagutan Timur
25	5271021	Selaparang	5271021001	Dasan Agung Baru
26	5271021	Selaparang	5271021002	Gomong
27	5271021	Selaparang	5271021003	Dasan Agung
28	5271021	Selaparang	5271021004	Mataram Barat

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
29	5271021	Selaparang	5271021005	Monjok Barat
30	5271021	Selaparang	5271021006	Karang Baru
31	5271021	Selaparang	5271021007	Rembiga
32	5271021	Selaparang	5271021008	Monjok Timur
33	5271021	Selaparang	5271021009	Monjok
34	5271030	Cakranegara	5271030004	Cakranegara Selatan
35	5271030	Cakranegara	5271030005	Cakranegara Barat
36	5271030	Cakranegara	5271030006	Cakranegara Timur
37	5271030	Cakranegara	5271030007	Cakranegara Utara
38	5271030	Cakranegara	5271030009	Sayang Sayang
39	5271030	Cakranegara	5271030010	Cakranegara Selatan Baru
40	5271030	Cakranegara	5271030011	Cilinaya
41	5271030	Cakranegara	5271030012	Sapta Marga
42	5271030	Cakranegara	5271030013	Mayura
43	5271030	Cakranegara	5271030014	Karang Taliwang
44	5271031	Sandubaya	5271031001	Dasan Cermen
45	5271031	Sandubaya	5271031002	Abian Tubuh Baru
46	5271031	Sandubaya	5271031003	Babakan
47	5271031	Sandubaya	5271031004	Turida
48	5271031	Sandubaya	5271031005	Mandalika
49	5271031	Sandubaya	5271031006	Bertais
50	5271031	Sandubaya	5271031007	Selagalas

10) Kota Bima

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
1	5272010	Rasanae Barat	5272010004	Paruga
2	5272010	Rasanae Barat	5272010005	Tanjung
3	5272010	Rasanae Barat	5272010006	Sarae
4	5272010	Rasanae Barat	5272010007	Nae
5	5272010	Rasanae Barat	5272010009	Dara
6	5272010	Rasanae Barat	5272010010	Pane
7	5272011	Mpunda	5272011001	Sambinae
8	5272011	Mpunda	5272011002	Panggi
9	5272011	Mpunda	5272011003	Mande
10	5272011	Mpunda	5272011004	Sadia
11	5272011	Mpunda	5272011005	Manggemaci
12	5272011	Mpunda	5272011006	Monggonao

No.	Kode dan Nama Kecamatan		Kode dan Nama Desa/Kelurahan	
13	5272011	Mpunda	5272011007	Lewirato
14	5272011	Mpunda	5272011008	Penatoi
15	5272011	Mpunda	5272011009	Santi
16	5272011	Mpunda	5272011010	Matakando
17	5272020	Rasanae Timur	5272020001	Lampe
18	5272020	Rasanae Timur	5272020002	Dodu
19	5272020	Rasanae Timur	5272020003	Nungga
20	5272020	Rasanae Timur	5272020004	Kumbe
21	5272020	Rasanae Timur	5272020014	Oi Fo'o
22	5272020	Rasanae Timur	5272020015	Kodo
23	5272020	Rasanae Timur	5272020016	Lelamase
24	5272020	Rasanae Timur	5272020017	Oimbo
25	5272021	Raba	5272021001	Nitu
26	5272021	Raba	5272021002	Rontu
27	5272021	Raba	5272021003	Rabangodu Selatan
28	5272021	Raba	5272021004	Rabangodu Utara
29	5272021	Raba	5272021005	Penaraga
30	5272021	Raba	5272021006	Rabadompu Barat
31	5272021	Raba	5272021007	Rabadompu Timur
32	5272021	Raba	5272021008	Kendo
33	5272021	Raba	5272021009	Penanae
34	5272021	Raba	5272021010	Rite
35	5272021	Raba	5272021011	Ntobo
36	5272030	Asakota	5272030001	Melayu
37	5272030	Asakota	5272030002	Jatiwangi
38	5272030	Asakota	5272030003	Jatibaru
39	5272030	Asakota	5272030004	Kolo
40	5272030	Asakota	5272030005	Ule
41	5272030	Asakota	5272030006	Jatibaru Timur

Lampiran 5. Sektor/Lapangan Usaha

No.	Kode	Klasifikasi Sektor/Lapangan Usaha
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2	B	Pertambangan dan Penggalian
3	C	Industri Pengolahan
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas
5	E	Pengadaan Air
6	F	Konstruksi
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8	H	Transportasi dan Pergudangan
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10	J	Informasi dan Komunikasi
11	K	Jasa Keuangan
12	L	Real Estat
13	M,N	Jasa Perusahaan
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15	P	Jasa Pendidikan
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya

Lampiran 6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

No.	Kode	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2	B	Pertambangan dan Penggalian
3	C	Industri Pengolahan
4	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
5	E	*Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* Dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi
6	F	Konstruksi
7	G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8	H	Pengangkutan dan Pergudangan
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

10	J	Informasi dan Komunikasi
11	K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
12	L	Real Estat
13	M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
14	N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
15	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
16	P	Pendidikan
17	Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
18	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
19	S	Aktivitas Jasa Lainnya
20	T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
21	U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Lampiran 7. Kode Wilayah dan Nama Provinsi se-Indonesia

No.	Kode Wilayah	Nama Provinsi
1	11	Aceh
2	12	Sumatera Utara
3	13	Sumatera Barat
4	14	Riau
5	15	Jambi
6	16	Sumatera Selatan
7	17	Bengkulu
8	18	Lampung
9	19	Kepulauan Bangka Belitung
10	21	Kepulauan Riau
11	31	Dki Jakarta
12	32	Jawa Barat
13	33	Jawa Tengah
14	34	Di Yogyakarta
15	35	Jawa Timur
16	36	Banten
17	51	Bali
18	52	Nusa Tenggara Barat
19	53	Nusa Tenggara Timur
20	61	Kalimantan Barat

21	62	Kalimantan Tengah
22	63	Kalimantan Selatan
23	64	Kalimantan Timur
24	65	Kalimantan Utara
25	71	Sulawesi Utara
26	72	Sulawesi Tengah
27	73	Sulawesi Selatan
28	74	Sulawesi Tenggara
29	75	Gorontalo
30	76	Sulawesi Barat
31	81	Maluku
32	82	Maluku Utara
33	91	Papua Barat
34	92	Papua Barat Daya
35	94	Papua
36	95	Papua Selatan
37	96	Papua Tengah
38	97	Papua Pegunungan

METADATA
NTB SATU DATA

Pedoman Pengumpulan Data Sektoral NTB Satu Data

2025

Buku **Metadata NTB Satu Data Tahun 2025** ini dapat menjadi acuan dan fondasi yang kuat bagi seluruh pihak dalam membangun tata kelola data yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di Provinsi NTB yang kita cintai ini. Penyusunan buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis dan upaya nyata untuk memperkuat ekosistem data daerah yang berdaya guna, inklusif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan NTB Satu Data. Harapannya, proses perencanaan pembangunan daerah dapat menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan menjamin pembangunan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi NTB.

ntb SATUDATA